



PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 75 TAHUN 2023

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2024





BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja-PD) 2024 dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2024 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah

Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II RKPD

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat dan memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. Bab VII Penutup.

- (2) Rincian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. Pedoman PD dalam menyusun Renja-PD; dan
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

BAB III PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 Juni 2023

BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 30 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,


KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2023 NOMOR 75

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024

Pemerintah
Kabupaten Pangandaran



RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2024





DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 75 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
BAB I	I-1
PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-13
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-15
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	I-16
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-37
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-54
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-148
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-155
2.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Pangandaran Pada Masa Pandemi.....	II-180
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-182
2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-183
2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	II-210
2.5 Inovasi Daerah.....	II-224



2.5.1 API Virtual Account Pembayaran Pajak Daerah	II-224
2.5.2 Perizinan Menjangkau Kampung Menggandeng Para Pedagang (Perjaka Gandang).....	II-228
2.5.3 Rakyat Nanjeur, Cageur, tur Tahan Pangan (Rancatan).....	II-229

BAB III_KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional.....	III-3
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat.....	III-12
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pangandaran	III-18
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-27
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-29
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-34
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-37

BAB IV_SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-4
4.1.1 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	IV-4
4.1.2 Telaah Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat	IV-13
4.1.3 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran.....	IV-19
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024.....	IV-25
4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	IV-25
4.2.2 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.....	IV 30
4.2.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	IV-35
4.2.4 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Kabupaten Pangandaran..	IV-38
4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran.....	IV-50



4.2.6 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2024	IV-52

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2024	V-2
5.2 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 ..	V-3
5.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024	V-25

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.. VI-1

6.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama	VI-3
6.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK)	VI-5

BAB VII PENUTUP VII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Administrtif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran .	II-3
Tabel 2. 2	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran	II-4
Tabel 2. 3	Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran	II-6
Tabel 2. 4	Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran.....	II-11
Tabel 2. 5	Jenis Tanah di Kabupaten Pangandaran	II-12
Tabel 2. 6	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pangandaran .	II-13
Tabel 2. 8	Luasan Potensi Gempa di Kabupaten Pangandaran.....	II-18
Tabel 2. 9	Luasan Potensi Tsunami di Kabupaten Pangandaran	II-19
Tabel 2. 11	Luasan Potensi Bencana Banjir di Kabupaten Pangandaran	II-21
Tabel 2. 12	Jumlah Penduduk di Kabupaten Pangandaran 2022	II-22
Tabel 2. 13	Persentase Penyebaran Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2022	II-23
Tabel 2. 14	Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pangandaran Tahun 2022	II-24
Tabel 2. 15	Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2022	II-25
Tabel 2. 16	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2022	II-26
Tabel 2. 17	Data Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran Tahun 2022	II-28
Tabel 2. 18	Data Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran	II-31
Tabel 2. 19	Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2022	II-32
Tabel 2. 20	Rencana Pola Ruang.....	II-35
Tabel 2. 21	Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota.....	II-39
Tabel 2. 22	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	II-39
Tabel 2. 23	Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Jawa barat Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)	II-42
Tabel 2. 24	Indeks Gini Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2018-2022.....	II-44
Tabel 2. 25	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pangandaran dengan Provinsi dan Kab/Kota Tetangga Tahun 2018-2022.....	II-45



Tabel 2. 26	Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2018-2022	II-47
Tabel 2. 27	IPM Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2018-2022	II-50
Tabel 2. 28	Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-50
Tabel 2. 29	Angka Melek Huruf Kabupaten Pangandaran	II-51
Tabel 2. 30	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2022	II-52
Tabel 2. 31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pangandaran	II-53
Tabel 2. 32	Hasil Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-56
Tabel 2. 33	Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pendidikan Tahun 2022.....	II-59
Tabel 2. 34	Hasil Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022.....	II-63
Tabel 2. 35	Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan Tahun 2022.....	II-68
Tabel 2. 36	Hasil Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022.....	II-75
Tabel 2. 37	Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun 2022.....	II-77
Tabel 2. 38	Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-79
Tabel 2. 39	Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022	II-80
Tabel 2. 40	Hasil Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-82
Tabel 2. 41	Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022.....	II-84
Tabel 2. 42	Hasil Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022.....	II-87
Tabel 2. 43	Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Sosial	II-90
Tabel 2. 44	Hasil Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022.....	II-96



Tabel 2. 45	Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-98
Tabel 2. 46	Hasil Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-100
Tabel 2. 47	Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-103
Tabel 2. 48	Hasil Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-104
Tabel 2. 49	Hasil Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-107
Tabel 2. 50	Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-109
Tabel 2. 51	Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-111
Tabel 2. 52	Hasil Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-112
Tabel 2. 53	Hasil Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-113
Tabel 2. 54	Hasil Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022 ..	II-115
Tabel 2. 55	Hasil Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-116
Tabel 2. 56	Hasil Capaian Kinerja Urusan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-118
Tabel 2. 57	Hasil Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-119
Tabel 2. 58	Hasil Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-120
Tabel 2. 59	Hasil Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-121
Tabel 2. 60	Hasil Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-122
Tabel 2. 61	Hasil Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-124
Tabel 2. 62	Hasil Capaian Kinerja Urusan kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-126
Tabel 2. 63	Hasil Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-127



Tabel 2. 64	Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-129
Tabel 2. 65	Hasil Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-131
Tabel 2. 66	Hasil Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-132
Tabel 2. 67	Hasil Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-134
Tabel 2. 68	Hasil Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-135
Tabel 2. 69	Hasil Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-136
Tabel 2. 70	Hasil Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pangandaran ..	II-138
Tabel 2. 71	Hasil Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-139
Tabel 2. 72	Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-140
Tabel 2. 73	Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-142
Tabel 2. 74	Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-144
Tabel 2. 75	Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-146
Tabel 2. 76	Hasil Capaian Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-147
Tabel 2. 77	Hasil Capaian Kinerja Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2018 – 2022	II-149
Tabel 2. 78	Hasil Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2022	II-150
Tabel 2. 79	Hasil Capaian Kinerja Urusan Iklim Investasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2022	II-152
Tabel 2. 80	Rasio Kelulusan S1/S2/S2 Tahun 2018 – 2022	II-153
Tabel 2. 81	Hasil Capaian Kinerja Urusan Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2022	II-154
Tabel 2. 82	Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-155
Tabel 2. 83	Capaian Kinerja Sasaran	II-166
Tabel 2. 84	Capaian Indikator Makro Tahun 2022	II-180
Tabel 2. 85	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-184



Tabel 2. 86	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	II-210
Tabel 3. 1	Realisasi dan Target Pertumbuhan Struktur Ekonomi Nasional	III-5
Tabel 3. 2	Sasaran Ekonomi Nasional Tahun 2024	III-7
Tabel 3. 3	Sasaran Fiskal Nasional Tahun 2024 (Persen PDB)	III-9
Tabel 3. 4	Perbandingan Capaian Nasional dengan Kabupaten Pangandaran Tahun 2022	III-12
Tabel 3. 5	Pertumbuhan dan struktur Ekonomi Sisi Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	III-14
Tabel 3. 6	Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	III-15
Tabel 3. 7	Arah kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat	III-16
Tabel 3. 8	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2022 (Miliar Rupiah)	III-20
Tabel 3. 9	Capaian Ekonomi Makro daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	III-21
Tabel 3. 10	Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19	III-23
Tabel 3. 11	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pangandaran	III-31
Tabel 3. 12	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran	III-35
Tabel 3. 13	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pangandaran	III-39
Tabel 4. 1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026	IV-16
Tabel 4. 2	Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026	IV-19
Tabel 4. 3	Hubungan Visi – Misi – Tujuan – Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026	IV-21
Tabel 4. 4	Keselarasan Antara Prioritas Nasional dengan Sasaran Nasional Tahun 2024	IV-28
Tabel 4. 5	Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan	IV-31
Tabel 4. 6	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	IV-36
Tabel 4. 7	Arah Kebijakan RKP 2024, Isu Strategis RPJMD, Permasalahan Pembangunan, Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026, dan Isu Strategis RKPD 2024	IV-40
Tabel 4. 8	Prioritas Pembangunan 2024 dan Isu Strategis	IV-50



Tabel 4. 9	Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional-Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran	IV-53
Tabel 4. 10	Persandingan antara Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024	IV-54
Tabel 4. 11	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dengan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024.....	IV-60
Tabel 4. 12	Keselarasan Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Jawa Barat	IV-66
Tabel 4. 13	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab	IV-78
Tabel 4. 14	Dukungan Program terhadap Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024.....	IV-103
Tabel 4. 15	Program yang Mendukung PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	IV-104
Tabel 4. 16	Program yang Mendukung PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan	IV-109
Tabel 4. 17	Program yang Mendukung PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	IV-111
Tabel 4. 18	Program yang Mendukung PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	IV-113
Tabel 4. 19	Program yang Mendukung PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	IV-114
Tabel 4. 20	Program yang Mendukung PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.....	IV-116
Tabel 4. 21	Program yang Mendukung PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.....	IV-117
Tabel 5. 1	Proyeksi Belanja Daerah	V-3
Tabel 5. 2	Rencana Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024.....	V-4
Tabel 5. 3	Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal	V-9



Tabel 5. 4 Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2024 V-25

Tabel 6. 1 Indikator Makro Daerah VI-2

Tabel 6. 2 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama VI-4

Tabel 6. 3 Target Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 . VI-7

Tabel 6. 4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat
Hasil/Outcome Kabupaten Pangandaran Tahun 2022,
2024, 2025 VI-21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran	I-3
Gambar 1. 2	Hubungan RKPD dengan Dokumen Lain	I-14
Gambar 2. 1	Kerangka Pemikiran dan Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Pangandaran	II-1
Gambar 2. 2	Peta Administrasi Kabupaten Pangandaran.....	II-2
Gambar 2. 3	Peta Topografi Kabupaten Pangandaran	II-7
Gambar 2. 4	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran	II-8
Gambar 2. 5	Peta Geologi Kabupaten Pangandaran	II-9
Gambar 2. 6	Peta Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pangandaran.....	II-11
Gambar 2. 7	Peta Batas DAS Kabupaten Pangandaran.....	II-13
Gambar 2. 8	Peta Curah Hujan.....	II-15
Gambar 2. 9	Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran	II-17
Gambar 2. 10	Peta Rawan Gempa.....	II-18
Gambar 2. 11	Peta Rawan Tsunami	II-19
Gambar 2. 12	Peta Pergerakan Tanah.....	II-20
Gambar 2. 13	Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Pangandaran	II-33
Gambar 2. 14	Peta Rencana Struktur Ruang	II-34
Gambar 2. 15	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran.....	II-36
Gambar 2. 16	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran.....	II-37
Gambar 2. 17	Aplikasi API Virtual Account Pembayaran Pajak Daerah	III-226
Gambar 2. 18	Indikator Kegiatan Rancangan	III-22
Gambar 3. 1	Arah Kebijakan Ekonomi 2024 Kabupaten Pangandaran	III-22
Gambar 4. 1	Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas	IV-3
Gambar 4. 2	Profil Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat.....	IV-11
Gambar 4. 3	Kontribusi Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	IV-12



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi	II-38
Grafik 2. 2 Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)	II-42
Grafik 2. 3 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pangandaran dengan Nasional dan Tahun 2019-2022 (Ribu Rupiah)	II-43
Grafik 2. 4 Laju Inflasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2021....	II-47
Grafik 2. 5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022	II-49
Grafik 2.6 Realisasi PAD Kabupaten Pangandaran Tahun 2015-2022.....	II-227
Grafik 3. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Ekonomi Global Tahun 2021-2024	III-4
Grafik 3. 2 Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Jawa Barat	III-13
Grafik 3. 3 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022.....	III-19

BAB I

Pendahuluan

RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan daerah. Perencanaan dilakukan untuk menentukan arah dan fokus pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

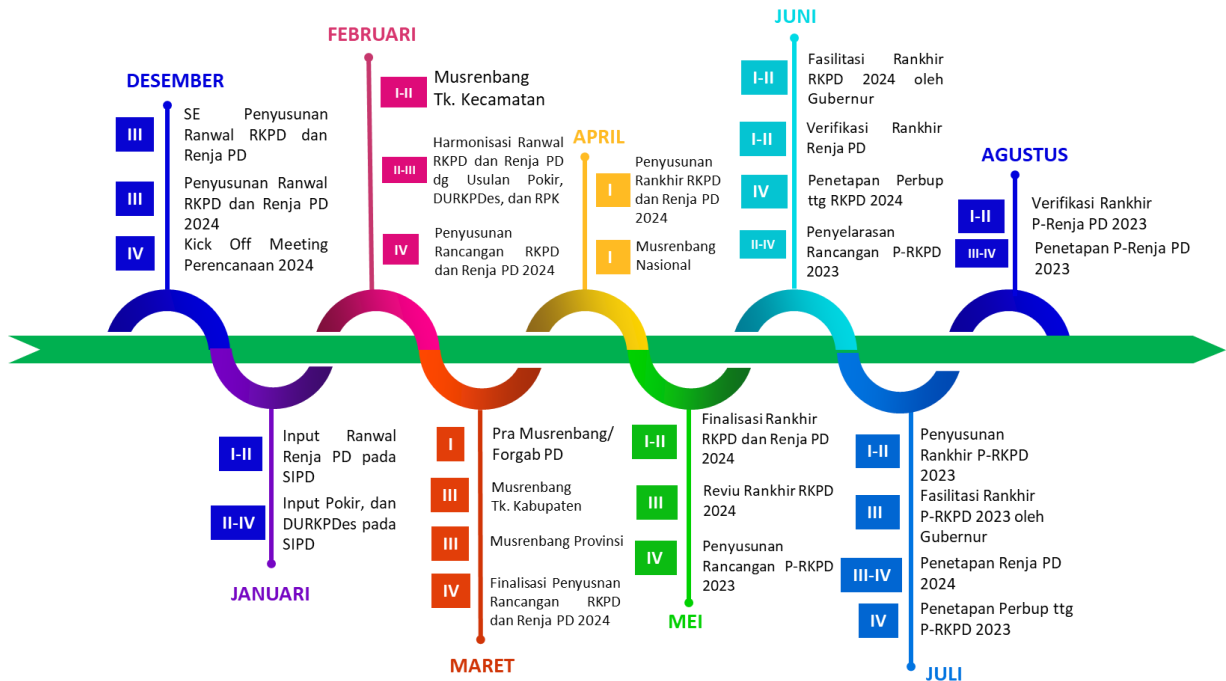
Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Secara operasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 8 ayat (1-4) menyebutkan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah baik RPJMD maupun RKPD menggunakan 4 (empat) pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan politis, dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat memilih menentukan pilihannya didasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah;
2. Pendekatan teknokratik, dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. Pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan, dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi, dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Proses penyusunan RKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari beberapa tahapan yaitu, persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menentukan kebijakan, melalui urutan pilihan (prioritas), yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Tahapan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2024 disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

Sumber: Bappeda Kabupaten Pangandaran, 2023

RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab, yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing

- kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD tahun 2024 harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 dalam RPJMD dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran. Keterkaitan rencana kinerja perangkat daerah dengan eksistensi kondisi dan potensi daerah yang dipadukan dengan permasalahan dan isu strategis terkini harus mampu diformulasikan melalui dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 yang aktual dan berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pangandaran masih dihadapkan pada tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemi virus Covid-19. Pandemi *corona virus disease* atau Covid-19 memiliki dampak yang cukup signifikan bagi seluruh daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangandaran. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah melakukan berbagai kebijakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat khususnya karena dampak Covid-19, salah satunya melalui penguatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Pada tahun 2024 diharapkan Indonesia sudah terlepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan fokus pada pemantapan pemulihan ekonomi bahkan lebih baik dari kondisi sebelum pandemi, seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan pada semua lini (*new normal*).

Arah kebijakan pembangunan yang tertuang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan RKPD Provinsi Jawa Barat dengan

prioritas pembangunan daerah dibuat untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran nomor 4 Tahun 2021.

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 mengusung tema **“Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah”**. Tema tersebut berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 yang memiliki makna bahwa pada tahun 2024 pembangunan di Kabupaten Pangandaran diarahkan untuk, 1) penanganan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja, 2) pengembangan pusat ekonomi masyarakat melalui program ekonomi kreatif, 3) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penanganan *stunting*, 4) peningkatan kapasitas pendidikan kesetaraan, 5) peningkatan nilai investasi melalui infrastruktur dan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan 6) reformasi birokrasi, inovasi daerah, dan dukungan penyelenggaraan pemilu serentak. Selain itu dengan adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah, arah kebijakan tahun 2024 diprioritaskan untuk mendorong pemulihan dan percepatan pertumbuhan dunia usaha melalui revitalisasi pariwisata, pengembangan sektor UMKM, dan peningkatan iklim investasi.

Arah kebijakan Kabupaten Pangandaran disusun dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju, kerangka pendanaan baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh melalui kolaborasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pihak swasta, akademisi dan dana umat serta mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

- Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran

- Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

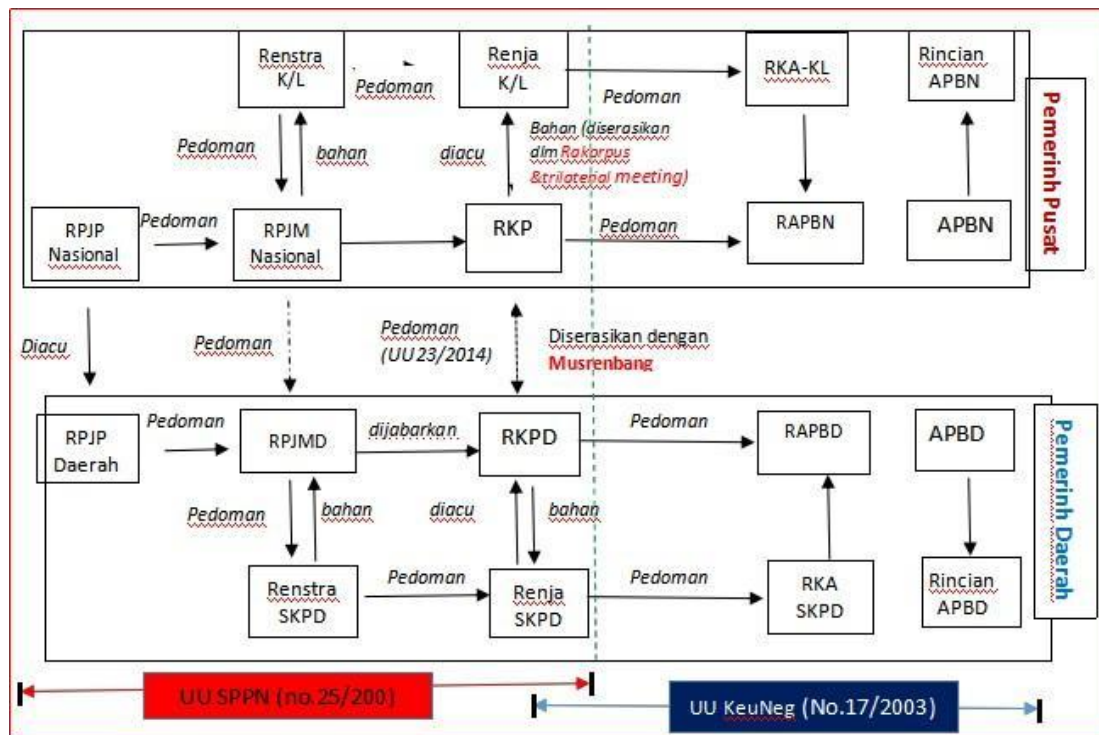
Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan sebuah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek yang berdimensi tahunan yakni 1 tahun. Berdasarkan strukturnya, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Dalam hal ini keterkaitan antar suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan untuk saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen perencanaan terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan,
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan,
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga,
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan, dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra),
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana digambarkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. 2 Hubungan RKPD dengan Dokumen Lain

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Hubungan antar dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2024 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. RPJMN dan RPJMD merupakan 2 dokumen perencanaan yang saling berhubungan dan bersinergi. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat 3.
- b. RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah serta keuangan daerah.

- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran disusun berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan RPJMD tahun 2021-2026.
- d. RKPD tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap perangkat daerah.
- e. Program dan kegiatan RKPD tahun 2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2024 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.
- f. RKPD menjadi pedoman/acuan para perangkat daerah untuk menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 tahun.

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menyempurnakan arah kebijakan dalam dokumen induk yaitu RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026. Selain itu, maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan sinergi antara sasaran dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2024 dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026;
2. Untuk menjamin konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2024 dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran 2024 dapat dijadikan pedoman untuk:

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;
3. Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024;
4. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana kerja tahunan agar target capaian RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026, khususnya arah kebijakan pada tahun pertama dapat tercapai;
5. Memelihara keselarasan dan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyesuaian
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Pada bab ini akan membahas mengenai evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

- 2.1 Kondisi Umum Daerah
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

- 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Pangandaran pada Masa Pandemi
- 2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.4.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - 2.4.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- 2.5 Inovasi Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah.

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional
 - 3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat
 - 3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pangandaran
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
 - 4.1.1 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional
 - 4.1.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi

- 4.1.3 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran
- 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024
 - 4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024
 - 4.2.2 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
 - 4.2.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 4.2.4 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Kabupaten Pangandaran
 - 4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran
 - 4.2.6 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2024

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

- 5.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2024
- 5.2. Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan, yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

- 6.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
- 6.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK)

BAB VII PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Tahun 2024, sebagai pedoman bagi semua



pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2024

BAB II

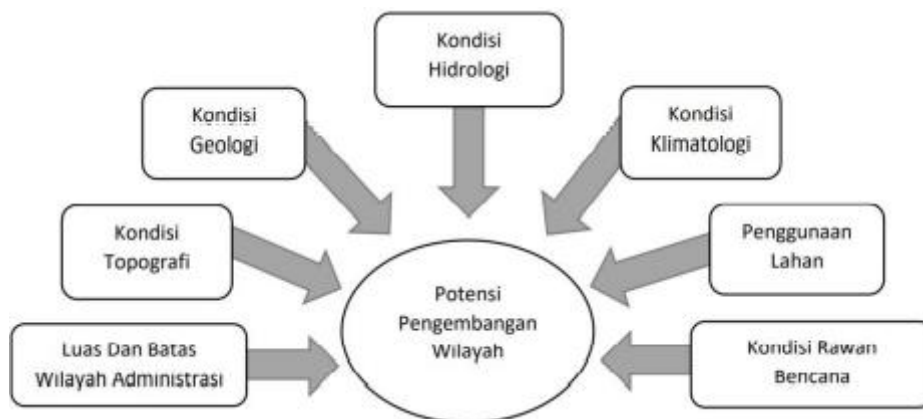
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Bab ini berisi informasi kondisi umum daerah, potensi pengembangan wilayah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Bab ini juga menjadi acuan dalam perumusan arah kebijakan dan pengambilan keputusan penting pada masa mendatang.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi umum daerah terbagi menjadi tiga, yaitu aspek geografi, aspek demografi, dan potensi pengembangan wilayah. Keadaan Kabupaten Pangandaran secara umum potensi pengembangan wilayahnya dipengaruhi oleh beberapa kondisi wilayah eksisting yang disajikan pada Gambar 2.1.



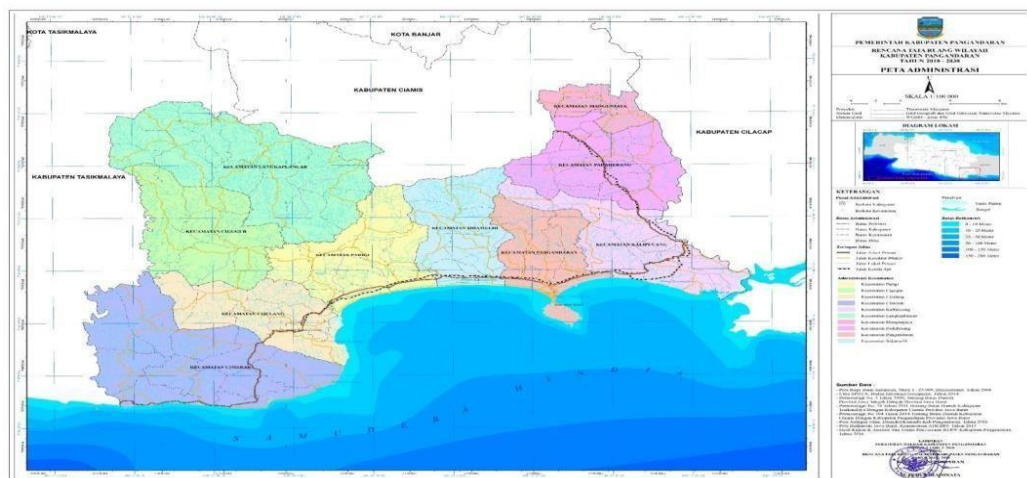
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran dan Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Pangandaran

Sumber: Diolah Penyusun, 2023

Berdasarkan Gambar 2.1. terdapat enam kondisi yang mempengaruhi potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pangandaran yaitu batas wilayah administrasi, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, kondisi klimatologi, kondisi penggunaan lahan, dan kondisi daerah rawan bencana.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pangandaran ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat yang merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap).



Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pangandaran terletak pada $108^{\circ}8'0''$ sampai dengan $108^{\circ}50'0''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}24'0''$ sampai dengan $7^{\circ}54'20''$ Lintang Selatan. Sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administratif wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- A. Sebelah Utara : Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya

- B. Sebelah Timur : Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
- C. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- D. Sebelah Barat : Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari, Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya

Ibu Kota Kabupaten Pangandaran terletak di Kecamatan Parigi, yang memiliki cakupan wilayah terdiri dari 10 kecamatan dan 93 desa. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran kurang lebih 1.134,23 Km². Pembagian luas wilayah per-kecamatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Luas Administrtif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Parigi	111,23	10	53	122	399
2	Cijulang	94,37	7	38	90	252
3	Cimerak	190,22	11	51	99	357
4	Cigugur	117,82	7	39	64	200
5	Langkaplancar	205,54	15	66	115	414
6	Mangunjaya	31,98	5	28	47	233
7	Padaherang	112,76	14	60	142	443
8	Kalipucang	104,27	9	29	80	291
9	Pangandaran	75,57	8	33	90	344
10	Sidamulih	90,47	7	33	68	263
Jumlah		1.134,23	93	430	917	3.196

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran 2018-2038, diolah 2023

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Kabupaten Pangandaran berada pada ketinggian antara 0 - 700 m di atas permukaan laut (dpl). Elevasi Kabupaten Pangandaran cenderung semakin tinggi dari arah selatan ke utara kecuali bagian barat pesisir yang wilayahnya perbukitan karst. Kondisi masing-masing kecamatan tercantum dalam tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2. 2 Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	• Kondisi geografis: bagian selatan dominan pesisir bertebing curam dan ke bagian utara merupakan perbukitan kapur. • Ketinggian: 3-80 mdpl dengan daerah dataran rendah atau pantai
2	Cijulang	• Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai. • Ketinggian: 2-185 mdpl dengan daerah dataran rendah/pantai.
3	Cigugur	• Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir melainkan perbukitan dan dataran tinggi. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Cigugur relatif sama antara 200-500 mdpl.
4	Langkaplancar	• Wilayah ini merupakan dataran tertinggi di Kabupaten Pangandaran. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Langkaplancar relatif sama antara 400-1.000 mdpl.
5	Parigi	• Ketinggian wilayah bervariasi antara 5-500 mdpl • Desa yang berada di dataran rendah yakni Desa Parigi, Karangjaladri, Cibenda, Karangbenda dan Ciliang.
6	Sidamulih	• Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai. • Ketinggian: 3-250 mdpl dengan daerah dataran tingginya yakni desa Kersaratu dan Kalijati.

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
7	Pangandaran	• Merupakan daerah pesisir pantai, merupakan ODTW Nasional dan memiliki Cagar Alam yang dilindungi. • Ketinggian: 3.500 mdpl.
8	Kalipucang	• Ketinggian wilayah bervariasi antara 2-400 mdpl, dengan desa yang berada di dataran tinggi yakni Desa Ciparakan (400 mdpl) dan Emplak (160 mdpl). • Daerah lainnya merupakan dataran rendah berkisar antara 2-8 mdpl.
9	Padaherang	• Wilayah ini bukan pesisir. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Padaherang bervariasi antara 13-600 mdpl. • Daerah yang berada di dataran tinggi yakni Desa Panyutran (600 mdpl) dan Bojongsari (245 mdpl). • Sedangkan daerah lainnya merupakan dataran yang relatif sama berkisar antara 13-24 mdpl.
10	Mangunjaya	• Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Mangunjaya relatif sama antara 13-17 mdpl.

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038, diolah 2023

Kabupaten Pangandaran berdasarkan kondisi tingkat kemiringan lerengnya, memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat garis sesar di bagian tengah timur Kabupaten Pangandaran yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam. Kondisi masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	Kemiringan lereng merata pada hampir semua desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5% - 15%.
2	Cijulang	- Kemiringan lereng merata pada hampir semua desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5% - 15%. - Sebagian kecil wilayah di Desa Kertayasa dan Margacinta memiliki kemiringan lereng 15% - 25%.
3	Cigugur	- Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. - Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Harumandala dan Pagerbumi.
4	Langkaplancar	- Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. - Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian besar Desa Jayasari, Pangkalan, Bojongkondang, Bangunjaya, Langkaplancar, dan Cimanggu.
5	Parigi	- Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%. - Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Selasari.
6	Sidamulih	- Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%. - Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Kalijati, Sidamulih, dan Kersaratu.
7	Pangandaran	- Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%. - Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Pagergunung dan Sukahurip.
8	Kalipucang	- Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. - Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil wilayah Desa Putrapinggan.

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
9	Padaherang	• Kemiringan lereng bervariasi antara 0% - 40%. • Wilayah pada bagian timur jalan provinsi hampir merata memiliki kemiringan lereng 0% - 8%. • Wilayah pada bagian barat jalan provinsi memiliki Kemiringan lereng yang bervariasi antara 8% - lebih dari 40%.
10	Mangunjaya	• Kemiringan lereng merata hampir pada seluruh desa dengan kisaran kemiringan lereng antara 0% - 5%.

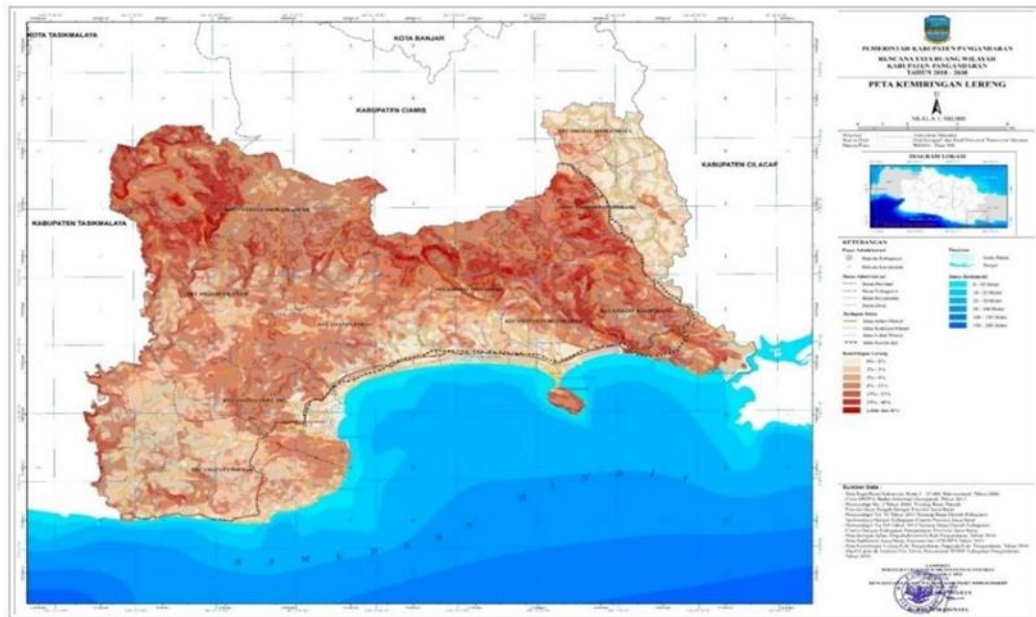
Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Wilayah dengan kemiringan lereng >40% perlu dikelola dengan baik, salah satunya adalah dengan upaya mempertahankan tanaman tegakannya untuk mengurangi risiko bencana longsor. Gambaran sebaran topografi dan kemiringan lereng di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sebagai gambaran topografi dan kemiringan lereng wilayah Kabupaten Pangandaran, dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Pangandaran

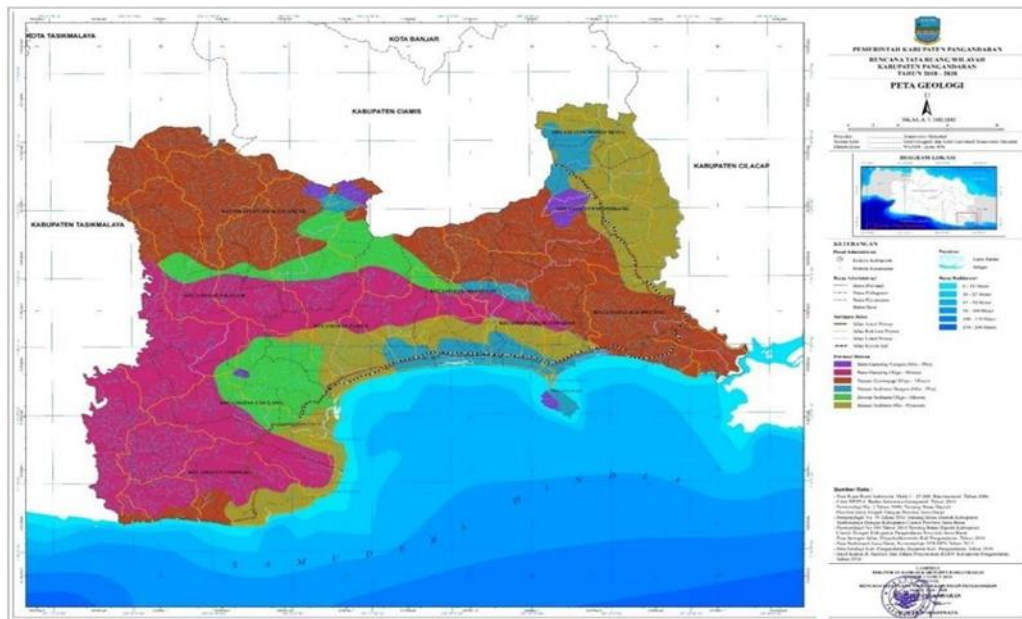
Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038



Gambar 2. 4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran
Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Berdasarkan kondisi geologi, Kabupaten Pangandaran merupakan daratan yang terbentuk pada periode tersier kecuali pada pantai yang landai merupakan daratan baru yang terbentuk akibat endapan laut yang berumur holosen. Kontrol struktur geologi sangat kuat di daerah ini. Di bagian tengah - timur terdapat patahan yang memanjang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara-barat laut. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa.



Gambar 2. 5 Peta Geologi Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Satuan geologi yang terdapat di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dalam lingkungan tertentu, diantaranya:

1. Satuan Geologi Lingkungan Dataran: Satuan berupa dataran dengan kemiringan lereng $< 5\%$. Ketinggian antara 0-50 m di atas permukaan air laut. Melempar di pesisir pantai antara Pangandaran - Parigi - Cijulang dan Kalipucang.
2. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Terjal: Kemiringan lereng $> 25\%$, ketinggian antara 100 - 700 m di atas permukaan laut, tersusun oleh breksi, batu pasir, batuan beku, batu gamping, dan tufa. Menghampar di bagian tengah memanjang ke arah Barat Daya Tenggara dan sebagian kecil di Bukit Pananjung membagi dua bagian zona pemisah air. Adapun yang paling banyak dijumpai yaitu di Kecamatan Langkaplancar.
 - a. Perbukitan Terjal Padaherang-Kalipucang
 - 1) Tanah lapukan berupa lempung pasir-kerikil, pasir lempungan, tebal berkisar antara 10-50 cm, daya dukung sedang- tinggi, agak kompak-kompak, permeabilitas sedang, porositas sedang. Muka air tanah berkisar antara

3-10 m, debit sumur gali <5 l/detik. Mata air debit <10 l/detik. Kualitas air tanah baik, jernih, tidak bau, warna air agak kekuningan.

- 2) Longsoran mudah terjadi pada bukit terjal daya dukung tinggi kompak dan keras. Peruntukan ruang sebaiknya untuk pengembangan hutan produksi dan yang lebih baik adalah untuk hutan lindung atau sebagai konservasi lahan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan baik pula untuk pengembangan komoditas perkebunan tanaman keras atau tanaman tahunan sebagai penguat tanah yang akan mengurangi gerakan tanah. Jalur jalan Kalipucang - Pangandaran bertumpu pada batuan yang kurang stabil. Sumber bahan galian terdiri atas batu belah lempung sebagai bahan bata merah, tras, dan tanah urug serta batu kapur.

b. Perbukitan Terjal Pananjung

Saat ini merupakan cagar alam dan hutan lindung untuk kepentingan pelestarian alam sekaligus sebagai obyek wisata. Fungsi kawasan lindung sangat baik yang berfungsi sebagai daerah resapan.

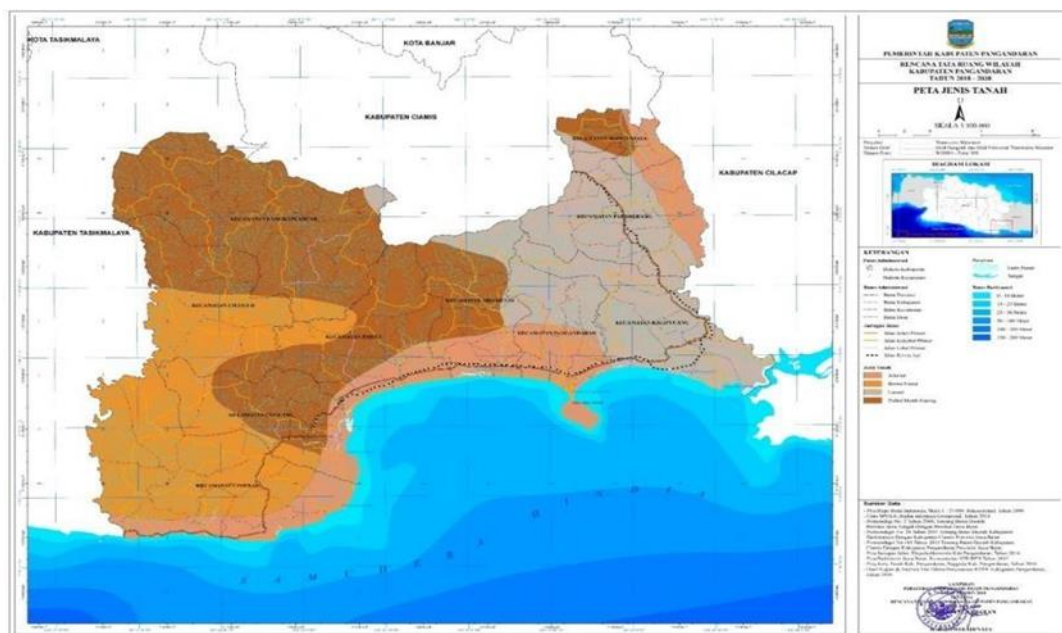
3. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Karst (Batu Gamping): Merupakan morfologi yang khas batu gamping, batu gamping pasir, permukaan kasar dan kemiringan lereng curam. Morfologi ini terhampar cukup luas di sekitar Pangandaran-Cijulang-Parigi hingga Cimerak dan meluas ke utara yaitu Padaherang-Kalipucang, dan penting sebagai daerah resapan. Debit air mata air >50 l/detik. Tanah lapukan umumnya berupa lempung berkerikil yang sangat subur untuk budidaya pertanian pada lahan kering. Ketebalan umumnya <1 m daya dukung sedang sampai dengan tinggi. Badan jalan yang bertumpu pada batuan ini sering terjadi jalan yang amblas, karena jenis batuan ini sangat

labil. Adapun jenis batuan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4 Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)
1	Batu Gamping Neogen (Mio – Plio)	1.649,77
2	Batu Gamping Oligo – Miosen	35.296,43
3	Batuan Gunungapi Oligo – Miosen	37.349,30
4	Batuan Sedimen Neogen (Mio – Plio)	6.869,57
5	Batuan Sedimen Oligo – Miosen	11.800,95
6	Batuan Sedimen Plio – Plistosen	20.358,12
Total		113.324,15

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038



Gambar 2. 6 Peta Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Terdapat 4 jenis tanah di Kabupaten Pangandaran, diantaranya adalah alluvial, brown forest, latosol, dan podsol merah kuning. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan basah

lekat. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai dan daerah cekungan (depresi).

Jenis tanah brown forest merupakan jenis tanah mineral yang telah mengalami perkembangan profil, solum agak tebal, warna agak coklat kekelabuan hingga hitam, kandungan organik tinggi, tekstur geluh berdebu, struktur remah, konsistensi gembur dan bersifat licin berminyak (*smeary*), dan peka terhadap erosi. Tanah ini berasal dari batuan induk abu atau tuff vulkanik.

Jenis tanah latosol telah berkembang atau terjadi diferensiasi horizon, kedalaman dalam, tekstur lempung, struktur remah hingga gumpal, konsistensi gembur hingga agak teguh, warna coklat merah hingga kuning. Penyebarannya di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 300-1000 meter, batuan induk dari tuff, material vulkanik, breksi batuan beku intrusi.

Jenis tanah podsol merah kuning merupakan tanah mineral yang telah berkembang, solum (kedalaman) dalam, tekstur lempung hingga berpasir, struktur gumpal, konsistensi lekat, bersifat agak asam (pH kurang dari 5.5), kesuburan rendah hingga sedang, dan peka erosi. Tanah tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering, curah hujan lebih dari 2.500 mm/tahun. Luasan jenis tanah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Jenis Tanah di Kabupaten Pangandaran

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Alluvial	17.789,60
2	Brown Forest	26.458,61
3	Latosol	25.848,21
4	Podsol Merah Kuning	43.228,93
Total		113.325,35

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Terdapat satu sungai besar yang melalui Kabupaten Pangandaran, yaitu sungai Citanduy yang merupakan muara bagi beberapa sungai kecil dengan muara terakhir sungai Citanduy ini adalah Sagara Anakan. Sungai Citanduy ini mengalir dari Panumbangan sampai Kalipucang. Kabupaten Pangandaran berada dalam dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu, DAS Ciwulan-Cilaki dan DAS Citanduy. Luasan masing-masing DAS yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pangandaran

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	DAS Ciwulan – Cilaki	91.250,39
2	DAS Citanduy	22.074,72
	Jumlah	113.325,11

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018- 2038



Gambar 2. 7 Peta Batas DAS Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Hidrologi di Kabupaten Pangandaran dibedakan dalam 2 estimasi produktivitas air tanah, yaitu:

1. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir. Akuifer dengan produktifitas air sangat tinggi dengan kedalaman

10 meter terdapat pada fisiografi perbukitan bergelombang (lereng 15-40%). Komposisi litologi merupakan vulkan yang terdiri dari breksi gunung berapi, lava dan tufa, batu pasir, pasir tufaan, batu lanau, batu lempung sisipan lignit dan konglomerat. Akuifer ini terdapat di Kecamatan Pangandaran dan Parigi.

2. Akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan dan saluran. Akuifer ini terdapat dengan produktivitas sangat besar mencapai 10-100 liter/detik. Terdapat ada fisiografi datar bergelombang dengan komposisi litologi aluvium terdiri dari lempung, lanau, pasir dan kerikil. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Cijulang dan Cimerak.

Air tanah dangkal di Kabupaten Pangandaran di kawasan pantai berasal langsung dari peresapan air hujan. Muka air tanah sangat bervariasi berkisar antara 2-9 m, pH berkisar antara 6-9 menunjukkan angka yang cukup tinggi. Mata air banyak dijumpai di daerah kaki bukit di daerah batu gamping dan breksi vulkanik. Debit mata air bervariasi di antara 0,2 liter/detik hingga 20 liter/detik bahkan ada juga yang mencapai 100 liter/detik.

Mata air di sekitar Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi sudah dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Kabupaten Pangandaran memiliki sumber air baku (mata air) yang merupakan milik Pemerintah Daerah yaitu:

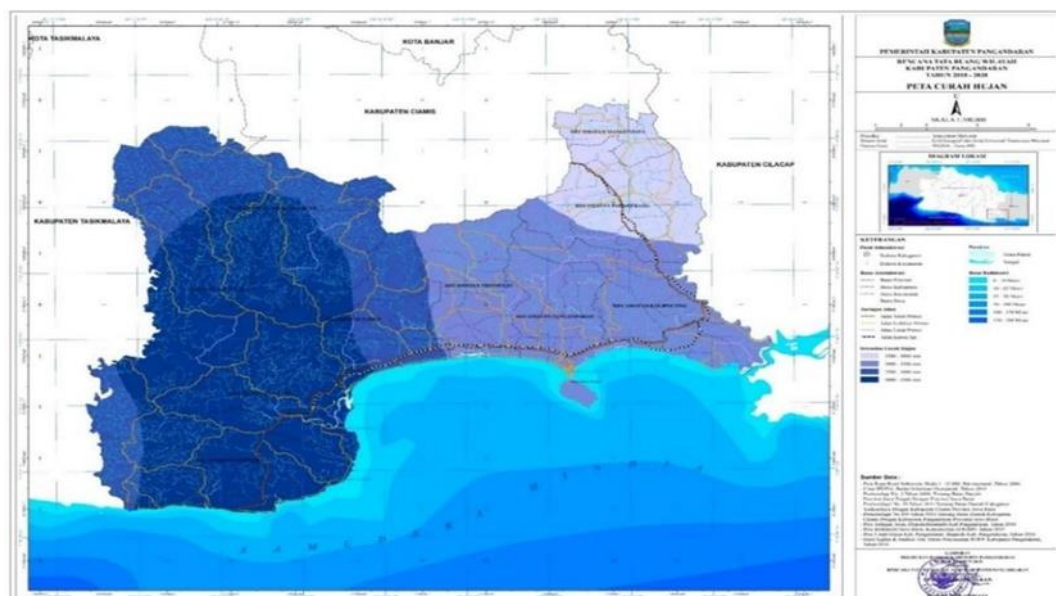
1. Mata air Kalisodong yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 105,0 C/det;
2. Mata air Guha Hawu yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 7,5 C/det;
3. Mata air Madasari yang terdapat di Desa Masawah Kecamatan Cimerak, Debit 7,5 C/det;
4. Mata air Cijumleng yang terdapat di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih, Debit 32,5 C/det.

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Iklim tropis yaitu musim kemarau (musim timur) dan musim penghujan (musim barat) di Kabupaten Pangandaran memiliki curah hujan rata-rata per tahun sekitar 1.647 mm, kelembaban udara antara 85-89% dengan suhu 20-30°C. Musim kemarau dan musim hujan secara langsung akan mempengaruhi musim penangkapan ikan di perairan Pangandaran.

Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, dimana pada saat musim ini laut tidak berombak besar dan perairan dalam keadaan tenang, sehingga operasi penangkapan ikan di laut tidak terganggu. Pada saat musim timur angin bersifat kering, karena membawa massa udara kering yang berdampak terjadi musim kemarau. Angin musim timur bergerak dari Australia ke Asia.

Pada saat musim hujan angin bertiup dari wilayah Asia kemudian melewati samudra Hindia menuju ke benua Australia. Pada kondisi ini, kedudukan semu matahari berada di belahan bumi selatan dan akan menyebabkan tekanan tinggi di kawasan Asia termasuk Indonesia, namun tekanan menjadi rendah di kawasan Australia. Peta sebaran curah hujan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Gambar 2.8



Gambar 2. 8 Peta Curah Hujan

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

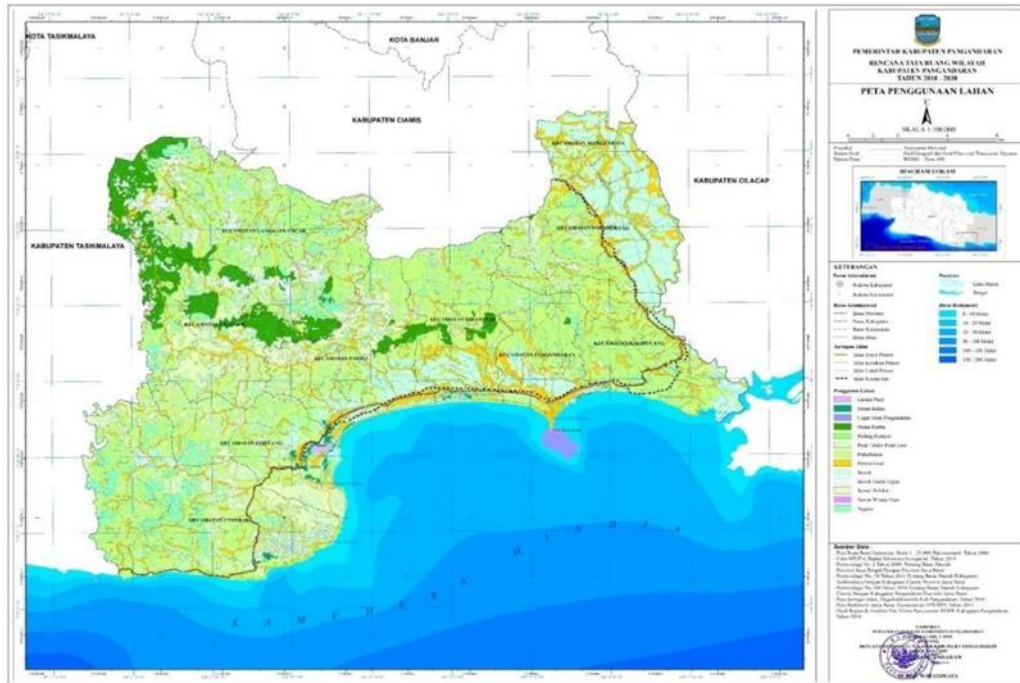
2.1.1.6 Kondisi Penggunaan Lahan

Kabupaten Pangandaran merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran sangat bervariasi dengan penggunaan lahan terbesar untuk lahan hutan rakyat yaitu seluas 30.202,04, kedua untuk lahan perkebunan negara atau swasta yaitu seluas kurang lebih 4.342,35 ha. Berikutnya penggunaan untuk lahan pekarangan dan bangunan seluas 24.678 Ha. Untuk lebih rinci penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2. 7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Irigasi teknis	9.651,00
2	Irigasi setengah teknis	3.578,98
3	Irigasi sederhana PU	1.950,00
4	Irigasi sederhana Non PU	-
5	Tadah hujan	8.906,00
6	Pasang surut	9,00
7	Lebak	607,00
8	Rawa	-
9	Pekarangan dan bangunan	24.678,00
10	Tegal/kebun/ladang/huma	24.917,00
11	Penggembalaan/padang rumput	1.758,00
12	Sementara tidak diusahakan	9.031,00
13	Hutan Rakyat	30.202,04
14	Hutan Negara	17.047,56
15	Hutan Mangrove	310,00
16	Perkebunan negara/swasta	4.342,35
17	Rawa yang ditanami	-
18	Tambak	-
19	Kolam/empang	13.272,00
20	Lain-lain	-
Grand Total		150.259,93

Sumber: LKPJ Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, diolah 2023



Gambar 2. 9 Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2038

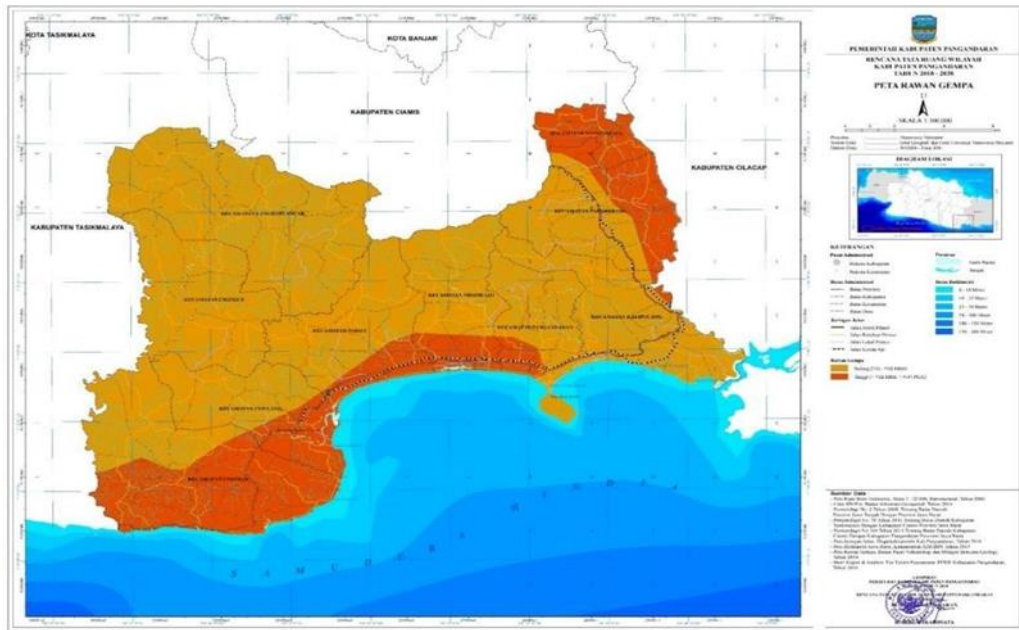
2.1.1.7 Kondisi Rawan Bencana

Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah yang rawan terhadap kejadian bencana alam yang sering terjadi di Sebagian besar wilayah Kabupaten Pangandaran. Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pangandaran diantaranya tsunami, gempa bumi, longsor, dan banjir. Tsunami rawan terjadi karena wilayah selatan Kabupaten Pangandaran berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sementara banjir sering terjadi karena wilayah Kabupaten Pangandaran dilewati sungai besar dengan debit air yang cukup tinggi. Gempa bumi juga rawan terjadi karena terdapat patahan-patahan di wilayah Kabupaten Pangandaran, sementara bencana longsor dapat terjadi akibat jenis tanah yang memang rawan dan kemiringan terjal di beberapa tempat di Kabupaten Pangandaran.

1. Rawan Bencana Gempa Bumi Tektonik dan Tsunami

Terdapat patahan yang membentang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara-barat laut di bagian tengah-timur Kabupaten Pangandaran. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan

batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa. Letak Kabupaten Pangandaran yang rawan gempa dan berbatasan langsung dengan laut mengakibatkan Kabupaten Pangandaran juga sangat rawan terkena bencana tsunami.



Gambar 2. 10 Peta Rawan Gempa

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Pantai Pangandaran yang berbentuk teluk dan memanjang dengan kemiringan lereng yang landai menjadi semacam “kantung tsunami” sehingga kawasan pesisirnya rawan bencana tsunami. Berikut adalah luasan wilayah Kabupaten Pangandaran yang rawan gempa dan tsunami yang tersaji pada Tabel 2.10

Tabel 2. 8 Luasan Potensi Gempa di Kabupaten Pangandaran

No	Kerawanan Gempa	Luas (Ha)
1	MMI. VII – VIII	84.879,54
2	MMI. > VII	28.445,56
Total		113.325,10

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Tabel diatas menunjukkan bahwa potensi terbesar gempa di Kabupaten Pangandaran berada di skala MMI. VII – VIII dengan luas

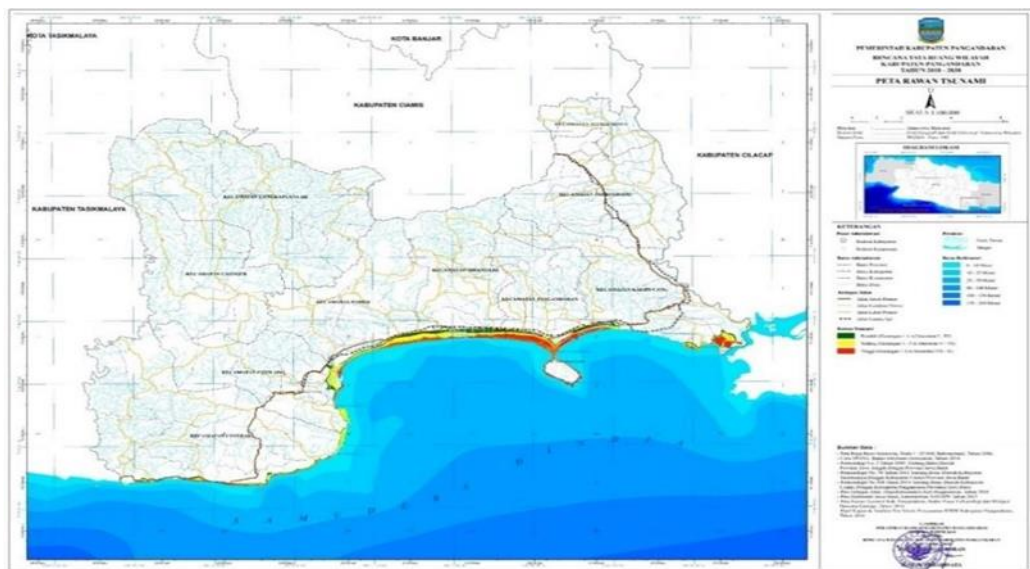
wilayah sebesar 84.879,54 Ha. Sedangkan 28.445,56 Ha ada di skala MMI. > VII.

Tabel 2. 9 Luasan Potensi Tsunami di Kabupaten Pangandaran

No	Kerawanan Tsunami	Luas (Ha)
1	Zona Rawan Rendah Total	691,25
2	Zona Rawan Menengah Total	1.148,45
3	Zona Rawan Tinggi Total	1.425,42
Total		3.265,12

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Tabel diatas menunjukkan bahwa total luasan potensi tsunami di Kabupaten Pangandaran sebesar 3.265,12 Ha. Luas potensi tsunami ini dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni zona rawan rendah total dengan luas sebesar 691,25 Ha, zona rawan menengah total dengan luas sebesar 1.148,45 Ha, dan zona rawan tinggi total dengan luas sebesar 1.425,42 Ha.



Gambar 2. 11 Peta Rawan Tsunami

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

2. Rawan Bencana Gerakan Tanah

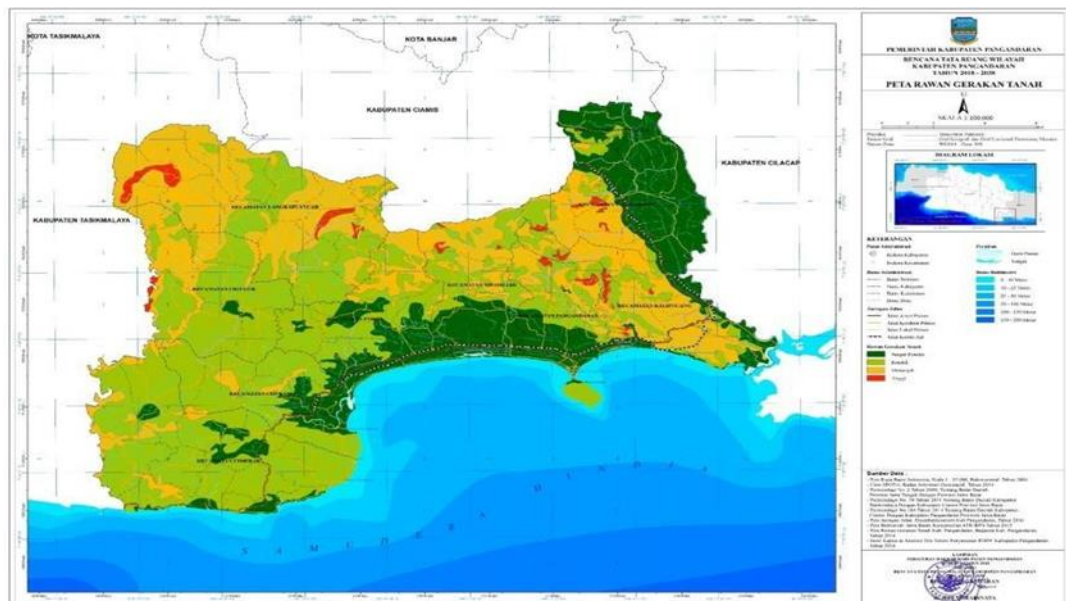
Daerah perbukitan Kabupaten Pangandaran merupakan Kawasan yang rawan bencana Gerakan tanah disebabkan kondisi tanah yang tidak stabil dan kemiringan lereng yang besar. Faktor lain penyebab

rawan bencana Gerakan tanah adalah curah hujan yang tinggi dan alih fungsi lahan di daerah perbukitan. Dengan adanya kawasan-kawasan yang rawan gerakan tanah, berarti lahan permukiman harus berada pada tingkat kemiringan lereng yang rendah. Potensi gerakan tanah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Tabel 2.10

Tabel 2. 10 Luasan Potensi Gerakan Tanah di Kabupaten Pangandaran

No	Kerawanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)
1	Sangat Rendah	25.774,32
2	Rendah	51.309,74
3	Menengah	34.519,48
4	Tinggi	1.721,57
Total		113.325,11

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038



Gambar 2. 12 Peta Pergerakan Tanah

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

3. Rawan Bencana Banjir

Wilayah dataran rendah Kabupaten Pangandaran merupakan hasil proses pengendapan material laut dan sungai sehingga sesuai kodrat alam, daerah yang dekat dengan sungai merupakan daerah

dataran banjir yang selalu tergenang jika debit air sungai meningkat. Dataran banjir ini adalah daerah yang cukup subur namun tidak dapat dikembangkan secara maksimal. Berikut adalah luasan wilayah Kabupaten Pangandaran yang rawan banjir pada Tabel 2.11

Tabel 2. 11 Luasan Potensi Bencana Banjir di Kabupaten Pangandaran

No	Kerawanan Banjir	Luas (Ha)
1	Tidak Rawan Banjir	95.144,98
2	Rawan Banjir	18.180,35
Total		113.325,33

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Pangandaran memiliki luas wilayah 18.180,35 Ha yang berpotensi mengalami bencana banjir. Adapun wilayah yang rawan banjir tersebut meliputi sebagian kecil dari setiap kecamatan. Berikut merupakan kecamatan yang wilayahnya termasuk kedalam daerah rawan banjir yaitu Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Parigi, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Padaherang, dan Kecamatan Mangunjaya. Bencana banjir tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti curah hujan yang tinggi yang menyebabkan air sungai meluap serta air laut pasang yang menyebabkan banjir rob. Meskipun dari setiap kecamatan tersebut hanya sebagian kecil daerah yang rawan banjir namun daerah rawan banjir ini hendaknya segera diminimalisir untuk mengurangi dampak yang terjadi kedepannya.

2.1.1.8 Jumlah Penduduk

Pada bagian ini menjelaskan secara umum keadaan demografi di Kabupaten Pangandaran. Adapun yang dibahas dalam sub bab ini adalah mengenai jumlah penduduk, kepadatan penduduk, komposisi

penduduk, jumlah penduduk berdasarkan pendidikan hingga jumlah penduduk yang bekerja.

Data disajikan dengan prinsip legal formal dan diperoleh dari instansi yang berwenang. Artinya bahwa data yang tersaji diperoleh langsung salah satunya dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan berdasarkan kartu identitas/KTP. Namun terkadang informasi dalam KTP tidak sesuai dengan kondisi saat ini, yang dapat diakibatkan tidak di updatenya kartu identitas/KTP oleh pemegangnya sehingga mengakibatkan perbedaan data dengan kenyataan di lapangan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 yaitu 436.748 jiwa. Dari jumlah tersebut proporsi penduduk laki-laki dan perempuan yaitu 218.716 dan 218.032 jiwa, selisih 684 jiwa yang mana jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

Tabel 2. 12 Jumlah Penduduk di Kabupaten Pangandaran 2022

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Parigi	23.625	24.143	47.768
2	Cijulang	13.780	14.188	27.968
3	Cimerak	25.277	25.056	50.333
4	Cigugur	11.871	11.555	23.426
5	Langkaplancar	26.522	25.935	52.457
6	Mangunjaya	16.807	16.766	33.573
7	Padaherang	35.324	35.278	70.602
8	Kalipucang	19.885	19.598	39.483
9	Pangandaran	30.459	30.079	60.538
10	Sidamulih	15.166	15.434	30.600
Jumlah		218.716	218.032	436.748

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, 2023

2.1.1.9 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Pada tahun 2022, persebaran penduduk Kabupaten Pangandaran bervariasi antar kecamatan, dimulai dari yang terendah 198,83 jiwa per kilometer persegi yaitu di kecamatan Cigugur yang memiliki luas 117,82 kilometer persegi, dan yang memiliki kepadatan penduduk terendah kedua yaitu Kecamatan Langkaplancar dengan tingkat kepadatan 255,22 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Mangunjaya dengan kepadatan 1.049,81 jiwa per kilometer persegi, dan tertinggi kedua yaitu Kecamatan Pangandaran dengan kepadatan 801,09 jiwa per kilometer persegi dengan luas 75,57 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 60.538 orang. Berikut gambaran luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Pangandaran tahun 2022.

Tabel 2. 13 Persentase Penyebaran Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
			(Jiwa)	(Jiwa)
1	Parigi	111,23	47.768	429,45
2	Cijulang	94,37	27.968	296,37
3	Cimerak	190,22	50.333	264,60
4	Cigugur	117,82	23.426	198,83
5	Langkaplancar	205,54	52.457	255,22
6	Mangunjaya	31,98	33.573	1.049,81
7	Padaherang	112,76	70.602	626,13
8	Kalipucang	104,27	39.483	378,66
9	Pangandaran	75,57	60.538	801,09
10	Sidamulih	90,47	30.600	338,23
Jumlah		1.134,23	436.748	385,06

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, 2023

2.1.1.10 Komposisi Penduduk

Penduduk merupakan objek sasaran pembangunan sekaligus subjek pelaku pembangunan yang berperan menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Potensi dan tantangan pembangunan daerah juga ditentukan oleh keadaan riil penduduk dan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus menempatkan penduduk sebagai pusat dari setiap kebijakan pembangunan yang dikembangkan. Komposisi penduduk berdasarkan struktur usia berkisar antara 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, komposisi ini menggambarkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yang dapat menggambarkan semakin banyak jumlah penduduk yang produktif semakin rendah angka ketergantungannya dan sebaliknya.

Tabel 2. 14 Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pangandaran Tahun 2022

No	Struktur Usia	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0-4	14.786	13.846	28.632
2	5-9	16.307	15.240	31.547
3	10-14	17.571	16.404	33.975
4	15-19	14.281	14.013	28.294
5	20-24	17.684	16.760	34.444
6	25-29	17.288	16.165	33.453
7	30-34	15.550	14.700	30.250
8	35-39	14.734	14.530	29.264
9	40-44	14.858	15.284	30.142
10	45-49	14.520	15.792	30.312
11	50-54	15.284	16.182	31.466
12	55-59	13.141	14.587	27.728
13	60-64	11.672	12.368	24.040
14	65-69	8.703	8.551	17.254
15	70-74	6.020	5.952	11.972
16	75+	6.317	7.658	13.975
Jumlah		218.716	218.032	436.748

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, 2023

Pengaruh keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dari semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), yang berarti semakin rendah rasio beban tanggungan, dapat membuka peluang bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan kemampuannya di segala bidang. Tabel 2.15 di bawah ini menunjukkan angka beban ketergantungan penduduk.

Tabel 2. 15 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Usia Produktif (15 – 64)	Usia Tidak Produktif		Dependency Rasio
			0 – 14	65 +	
1	Laki-laki	149.012	48.664	21.040	46,78
2	Perempuan	150.381	45.490	22.161	44,99
Jumlah		299.393	94.154	43.201	45,88

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, 2023

Berdasarkan tabel 2.15 yang menunjukkan jumlah tanggungan kurang dari 50%. Artinya kita sudah memasuki masa bonus demografi. Jika bonus demografi digunakan dengan benar, maka akan membuka *window of opportunity*. Peluang untuk mempercepat roda perekonomian lebih tinggi karena banyaknya kelompok usia produktif. Namun, jika periode bonus demografi tidak digunakan, bukan peluang yang didapat, melainkan bencana sosial. Tingkat pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas dapat meningkat. Bonus demografi yang terkait dengan pembangunan manusia akan berdampak besar pada kemajuan daerah. Bersama-sama, era produktif menggerakkan roda perekonomian. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya pengangguran dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya diharapkan puncak bonus demografi dan produktivitas penduduk akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Ketersediaan pekerjaan yang melimpah akan mencegah pekerja yang sangat terampil untuk mencari pekerjaan dan pindah ke kabupaten

atau daerah lain. Semakin banyak sumber daya manusia yang berkualitas yang tinggal di daerah tersebut, semakin nyata keberhasilan pembangunan manusia. Karena tingkat ketergantungan yang tinggi, akan mengurangi pilihan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas hidupnya yang tentunya berdampak pada penurunan dan peningkatan angka IPM.

2.1.1.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah akan sangat mempengaruhi peningkatan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) karena salah satu faktor dalam IPM adalah Pendidikan, yang merupakan gabungan dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Semakin banyak orang yang bersekolah dan menyelesaikan pendidikannya, maka nilai Indeks Pendidikan akan semakin tinggi. Kondisi Pendidikan penduduk Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2. 16

Tabel 2. 16 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2022

No	Status Pendidikan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/Blm Sekolah	57.993	54.206	112.199
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	14.313	12.725	27.038
3	Tamat SD/Sederajat	77.395	88.843	166.238
4	SLTP/Sederajat	34.747	33.200	67.947
5	SLTA/Sederajat	26.518	21.041	47.559
6	Diploma I/II	793	829	1.622
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	1.131	1.479	2.610
8	Diploma IV/Strata I	5.355	5.483	10.838
9	Strata-II	450	216	666
10	Strata-III	21	10	31
Jumlah		218.716	218.032	436.748

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, 2023

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran yang menyelesaikan pendidikan strata 1 sebanyak 10.838 orang, jenjang Diploma I dan II sebanyak 1.622 orang, SLTA/ sederajat sebanyak 47.559 jiwa dan SLTP/ sederajat sebanyak 67.947 jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pangandaran sudah mulai meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak bersekolah/ belum sekolah yaitu sebanyak 112.199 orang, dimana 28.632 orang tidak bersekolah (0-4 tahun) dan selebihnya adalah penduduk usia sekolah hingga dewasa, namun tidak mengenyam pendidikan. Dari kinerja tersebut menghasilkan indeks pendidikan sebesar 60,41 pada tahun 2022. Angka tersebut masih dibawah rata-rata indeks pendidikan Provinsi Jawa Barat, sehingga harus ada program pemerintah daerah untuk mendongkrak indeks pendidikan Kabupaten Pangandaran, khususnya dari jenjang pendidikan nonformal/ kesetaraan.

2.1.1.12 Jumlah Penduduk yang Bekerja

Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu ditujukan untuk meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha agar penduduk dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk menyerap tenaga kerja tambahan yang masuk ke pasar tenaga kerja setiap tahunnya, sehingga angka pengangguran dapat ditekan dengan cara menyalurkan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan yang tersedia.

Dari sisi tenaga kerja, indikator kesempatan kerja (*demand for labour*) adalah hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja/ peluang bagi pencari kerja. Kesempatan kerja adalah kesempatan atau kondisi yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan

sehingga semua orang yang mau dan mampu bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan berdasarkan keahlian, keterampilan dan bakat masing-masing. Dengan demikian, kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan akan tenaga kerja. Sedangkan angkatan kerja (*labour force*) diartikan sebagai bagian dari penduduk yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari peluang untuk melakukan pekerjaan produktif sebagai sumber daya manusia. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat menyerap lebih banyak penduduk yang bekerja.

Tabel 2. 17 Data Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran Tahun 2022

NO	Pekerjaan	Jumlah Orang		Jumlah (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Belum/tidak bekerja	77.154	64.272	141.426
2	Mengurus rumah tangga	37	93.944	93.981
3	Pelajar/mahasiswa	13.687	10.423	24.110
4	Pensiunan	1.488	662	2.150
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2.092	1.828	3.920
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	170	2	172
7	Kepolisian (Polri)	199	5	204
8	Perdagangan	1.758	1.176	2.934
9	Petani/pekebun	40.934	22.237	63.171
10	Peternak	69	18	87
11	Nelayan/perikanan	2.458	28	2.486
12	Industri	113	15	128
13	Konstruksi	25	3	28
14	Transportasi	155	0	155
15	Karyawan swasta	6.667	2.437	9.104
16	Karyawan BUMN	304	53	357
17	Karyawan BUMD	60	19	79
18	Karyawan honorer	1.380	1.593	2.973
19	Buruh harian lepas	14.568	1.961	16.529
20	Buruh tani/perkebunan	13.958	6.239	20.197
21	Buruh nelayan/perikanan	881	42	923
22	Buruh peternakan	58	20	78

NO	Pekerjaan	Jumlah Orang		Jumlah (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
23	Pembantu rumah tangga	4	364	368
24	Tukang cukur	29	0	29
25	Tukang listrik	25	1	26
26	Tukang batu	139	2	141
27	Tukang kayu	629	0	629
28	Tukang sol sepatu	8	1	9
29	Tukang las/pandai besi	86	1	87
30	Tukang jahit	466	312	778
31	Tukang gigi	4	0	4
32	Penata rias	3	41	44
33	Penata busana	0	2	2
34	Penata rambut	5	6	11
35	Mekanik	337	1	338
36	Seniman	64	16	80
37	Tabib	6	0	6
38	Paraji	1	55	56
39	Perancang busana	2	0	2
40	Penerjemah	1	0	1
41	Imam masjid	102	0	102
42	Pendeta	2	1	3
43	Pastor	0	0	0
44	Wartawan	13	0	13
45	Ustadz/mubaligh	266	38	304
46	Juru masak	1	5	6
47	Promotor acara	0	0	0
48	Anggota DPR RI	0	0	0
49	Anggota DPD RI	0	0	0
50	Anggota BPK	0	0	0
51	Presiden	0	0	0
52	Wakil Presiden	0	0	0
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0
54	Anggota Kabinet Kementerian	0	0	0
55	Gubernur	0	0	0
56	Wakil Gubernur	0	0	0
57	Bupati	1	0	1
58	Wakil Bupati	1	0	1

NO	Pekerjaan	Jumlah Orang		Jumlah (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
59	Walikota	0	0	0
60	Wakil Wali Kota	0	0	0
61	Anggota DPRD Provinsi	1	0	1
62	Anggota DPRD Kab. /Kota	29	10	39
63	Dosen	24	15	39
64	Guru	422	643	1.065
65	Pilot	0	0	0
66	Pengacara	5	0	5
67	Notaris	2	2	4
68	Arsitek	3	0	3
69	Akuntan	1	0	1
70	Konsultan	10	1	11
71	Dokter	40	40	80
72	Bidan	0	243	243
73	Perawat	91	123	214
74	Apoteker	10	18	28
75	Psikiater/Psikolog	0	0	0
76	Penyiar televisi	0	0	0
77	Penyiar radio	1	2	3
78	Pelaut	49	0	49
79	Peneliti	4	0	4
80	Sopir	1.226	0	1.226
81	Pialang	3	3	6
82	Paranormal	1	0	1
83	Pedagang	3.067	2.589	5.656
84	Perangkat Desa	924	203	1.127
85	Kepala Desa	79	1	80
86	Biarawan/biarawati	0	0	0
87	Wiraswasta	32.293	6.291	38.584
88	Pekerjaan lainnya	21	25	46
Jumlah		218.716	218.032	436.748

Sumber: Disdukcapil Kab. Pangandaran, 2023

Data dimaksud merupakan gambaran jenis pekerjaan yang diajukan oleh penduduk saat pengurusan KTP, sehingga ada kemungkinan tidak menggambarkan kondisi riil dikarenakan tidak

adanya updating pekerjaan pada KTP yang disampaikan kepada Disdukcapil.

Berdasarkan Tabel 2. 17, dapat disampaikan bahwa masih relatif tingginya jumlah penduduk yang belum dan atau tidak bekerja mengindikasikan bahwa usia yang masih belum siap bekerja (anak-anak) dan angkatan kerja yang cukup besar kurang lebih sebesar 138.710 orang dari total penduduk Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut menggambarkan yang masuk pada usia kerja masih belum terserap secara maksimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus difungsikan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena investasi pada “*human capital*” ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Pangandaran. Adapun data secara khusus mengenai ketenagakerjaan dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2. 18 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah pencari kerja yang dilatih (BLK, LPK, Swasta dan Perangkat Daerah/PD lainnya)	168 LPK
2	Jumlah data BLK, LPK Swasta dan kejuruannya	12 LPK
3	Jumlah pencari kerja yang terdaftar(laki-laki dan perempuan)	L = 1406
		P = 1356
4	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang bekerja	1682 Orang
5	Jumlah pencari kerja yang bersertifikat	1618 Orang
6	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam negeri dan luar negeri)	DN = 1682
		LN = 195
7	Data perusahaan penempatan migran Indonesia (P2MI) dan sending dan organization(SO untuk negara tujuan)	1 P2MI
8	Rencana ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
9	Jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan PHK	2 Orang
10	Data perusahaan yang mulai operasi Kembali	385 Perusahaan

No	Uraian	Jumlah
11	Angka perselisihan hubungan industrial antar pekerja dan perusahaan	2 Kasus
12	Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan	1 Kasus
13	Kepesertaan sistem jaminan sosial (Ketenagakerjaan dan Kesehatan)	112 Perusahaan

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Pangandaran, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa kualitas tenaga kerja di Kabupaten Pangandaran cukup baik yaitu ada 1618 orang pencari kerja yang bersertifikat. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja harus terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Pangandaran. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa (padat karya) dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Rendahnya kesadaran warga untuk pemutakhiran data status ketenagakerjaan juga terlihat dari data jumlah penduduk yang bekerja sebagai pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran dalam Tabel 2. 19.

Tabel 2. 19 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2022

Instansi	Pendidik		Tenaga Kependidikan		Kepsek	Jumlah
	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS		
SD Negeri	1.401	1.006	6	122	282	2.817
SD Swasta	0	19	0	2	2	23
SMP Negeri	616	324	16	181	37	1.174
SMP Swasta	1	189	0	23	16	229
Total						4.243

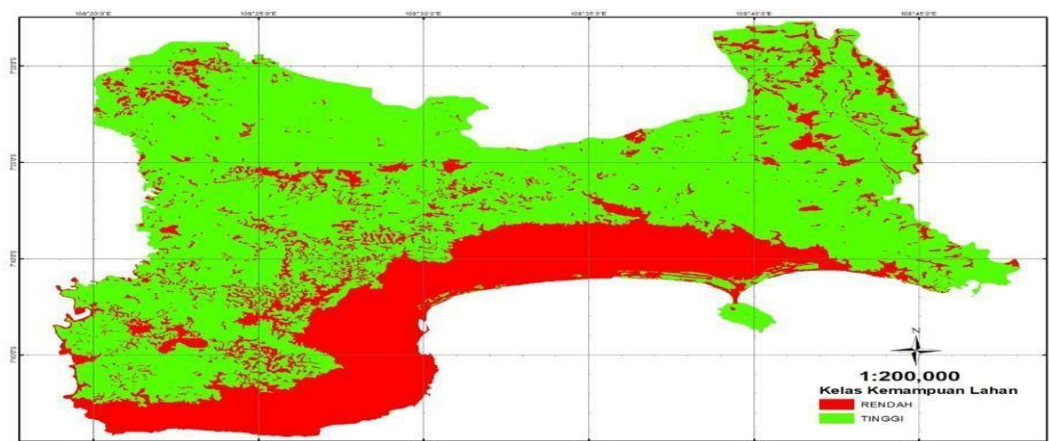
Sumber: Disdikpora Kabupaten Pangandaran Tahun 2022, 2023

Berdasarkan perbedaan data dimaksud, untuk kepentingan pengambilan kebijakan sektoral, maka data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data sektoral. Data diatas menunjukkan masih banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2.1.1.13 Potensi Pengembangan Wilayah

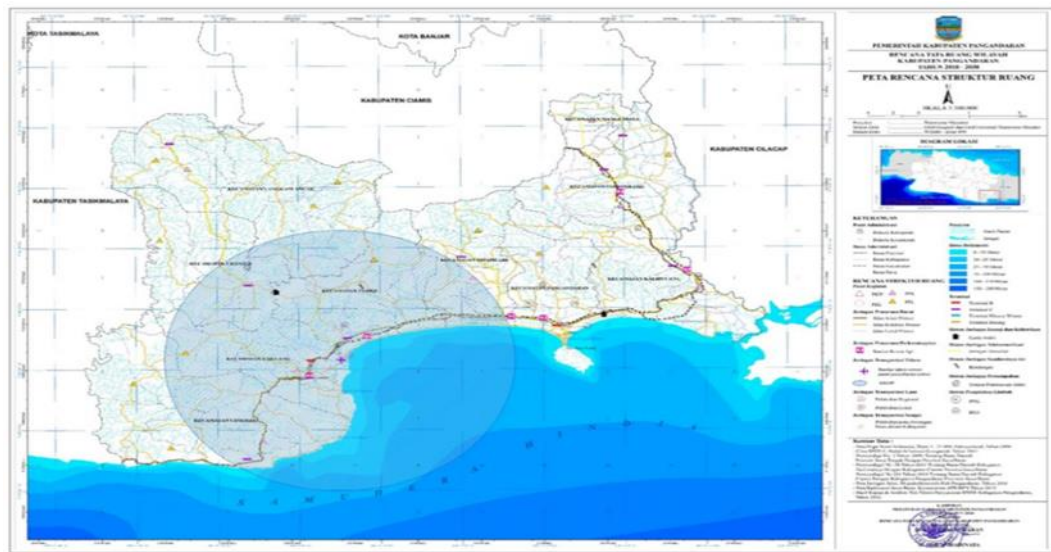
Daya dukung Potensi Pengembangan Wilayah diperoleh dari analisis Satuan Kapasitas Lahan (SKL). Inti dari analisis SKL secara keseluruhan adalah analisis daya tampung lahan, melihat daya dukung lahan yang cocok untuk pengembangan sebagai kawasan perkotaan/pedesaan dengan intensitas kegiatan budidaya di dalamnya, baik itu pemukiman, pertanian, perkebunan dan budidaya lainnya.

Dalam analisis SKL yang menghasilkan daya pengembangan tanah dibagi menjadi 2 kelas yaitu rendah dan tinggi. Kawasan dengan kelas daya pengembangan tinggi menjadi kawasan budidaya, sedangkan kawasan dengan kelas daya pengembangan rendah hanya dapat digunakan untuk kawasan lindung. Peta kemampuan lahan dapat dilihat pada Gambar 2. 13.



Gambar 2. 13 Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038



Gambar 2. 1 Peta Rencana Struktur Ruang
Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038

Gambar 2. 14 Peta Rencana Struktur Ruang
Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038

Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran terdiri antara Rencana Kawasan Lindung dan Budidaya. Pembagian proporsi antara rencana kawasan lindung dan budidaya yaitu sebesar 22,66% untuk kawasan lindung dan 77,34% untuk kawasan budidaya.

1. Kawasan Lindung

Dalam rencana kawasan lindung terdapat daerah resapan air sebesar 3,02% dari luas wilayah Kabupaten Pangandaran, wilayah sempadan pantai sebesar 0,56% dari luas wilayah Kabupaten Pangandaran, wilayah sempadan sungai sebesar 3,50% dari total luas wilayah Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran, kawasan sekitar danau/situ/waduk sebesar 0,03% dari luas Kabupaten Pangandaran, Cagar Alam pananjung Pangandaran sebesar 0,40% dari total luas Kabupaten Pangandaran, Cagar Alam laut pananjung Pangandaran sebesar 0,41% dari luas Kabupaten Pangandaran, kawasan hutan pantai mangrove 0,17% dari luas Kabupaten Pangandaran, taman wisata alam Pananjung 0,03% dari luas Kabupaten Pangandaran, kawasan lindung secara geologis 13,95% dari total wilayah Kabupaten Pangandaran dan wilayah bencana tsunami sebesar 0,59% dari luas wilayah Kabupaten Pangandaran

2. Kawasan Budidaya

Pada rencana kawasan budidaya terdapat hutan produksi sebesar 7,58% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, hutan produksi terbatas sebesar 7,12% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, pertanian lahan basah sebesar 13,28% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, pertanian lahan kering sebesar 7,12% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, perkebunan sebesar 26,26% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan industri sebesar 0,50% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan permukiman perkotaan sebesar 7,57% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran dan kawasan permukiman perdesaan sebesar 10,65% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran yang tersaji pada Tabel 2. 20.

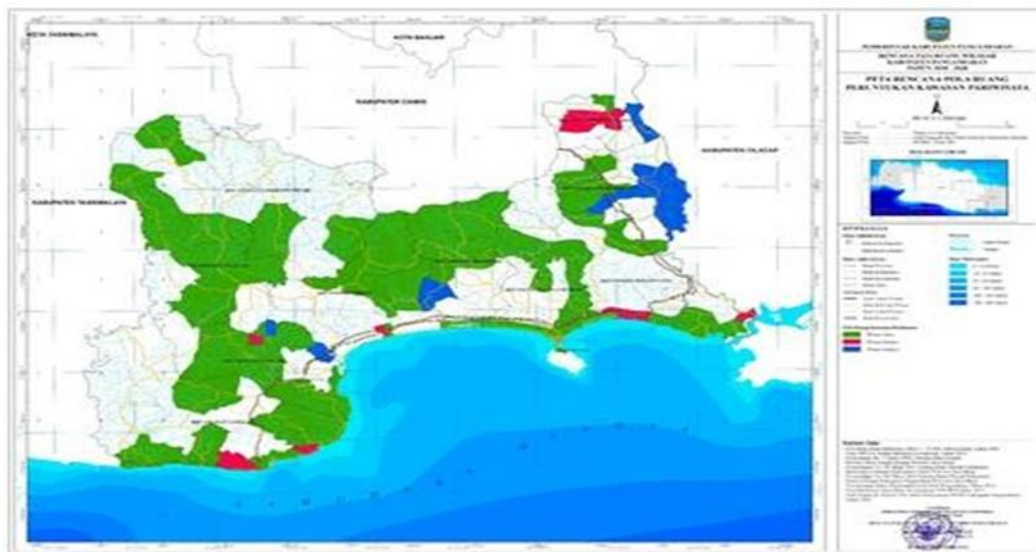
Tabel 2. 20 Rencana Pola Ruang

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	(%)
Rencana Kawasan Lindung			
1	Kawasan Resapan Air	3.441,07	3,02 %
2	Kawasan Sempadan Pantai	636,60	0,56 %
3	Kawasan Sempadan Sungai	3.990,00	3,50 %
4	Kawasan Sekitar danau/situ/embung	33,06	0,03 %
5	Cagar Alam Pananjung Pangandaran	454,62	0,40 %
6	Cagar Alam Laut Pananjung Pangandaran	470	0,41 %
7	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	188,00	0,17 %
8	Taman Wisata Alam Pananjung	34,32	0,03 %
9	Kawasan Lindung Geologi	15.882,42	13,95 %
10	Kawasan Bencana Tsunami	674,00	0,59 %
Jumlah		25.804,09	22,66 %
Rencana Kawasan Budidaya			
1	Hutan Produksi	8.626,00	7,58 %
2	Hutan Produksi Terbatas	8.102	7,12 %
3	Pertanian Lahan Basah	15.125	13,28 %

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	(%)
4	Pertanian Lahan Kering	4.997,00	7,12 %
5	Perkebunan	29.894,00	26,26 %
6	Kawasan Industri	565,08	0,50 %
7	Kawasan Permukiman Perkotaan	8.614,00	7,57 %
8	Kawasan Permukiman Perdesaan	12.125,00	10,65 %
Jumlah		88.046, 87	77,34 %
Jumlah Total Kaupaten		113.850,98	100%

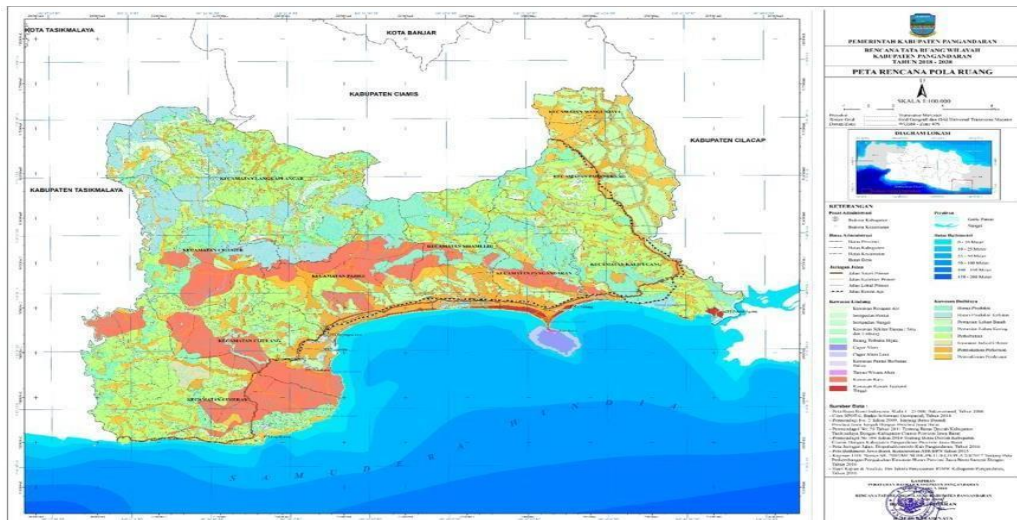
Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038

Di bawah ini adalah peta rencana pola ruang kawasan wisata (Gambar 2. 15) dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pangandaran (Gambar 2. 16).



Gambar 2. 15 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038



Gambar 2. 16 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran
Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Terdapat beberapa aspek yang penting dan harus diperhatikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, antara lain aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan fokus pada seni budaya dan olahraga. Analisis aspek-aspek tersebut dilakukan terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menganalisis kinerja terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Indikator-indikator tersebut meliputi pertumbuhan PDRB, indeks gini, persentase penduduk miskin, laju inflasi, dan indeks pembangunan manusia.

2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah dinyatakan dalam satuan rupiah.

Indikator pengukuran dengan PDRB dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan

dihitung dalam tahun tertentu, serta digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Selanjutnya PDRB menggambarkan atas dasar arus nilai tambah barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga yang berlaku pada tahun tersebut dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.



Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah 2022

Dalam pembangunan ekonomi, fokus tujuan utamanya adalah mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang lebih merata. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ukuran yang digunakan sebagai acuan pertama untuk menjelaskan kinerja perekonomian secara sederhana.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan atau pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran menunjukkan tren positif dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020 terkoreksi menjadi hanya -0,05 akibat pandemi Covid-19. Seiring dengan penurunan kasus Pandemi Covid-19 dan berbagai upaya pemerintah, pertumbuhan ekonomi perlahan kembali tumbuh positif mencapai 3,67

pada tahun 2021. Terus mengalami peningkatan yang positif untuk Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 mencapai 5,03.

Tabel 2. 21 Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pangandaran	5,32	5,94	-0,05	3,67	5,03
Banjar	5,05	5,03	0,94	3,46	4,19
Ciamis	5,31	5,38	-0,14	3,66	5,02
Tasikmalaya	5,7	5,43	-0,98	3,43	4,70

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. Diolah. 2023

Berdasarkan Tabel 2.21 laju PDRB Kabupaten Pangandaran menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan peningkatan pada tahun 2018 ke 2019. Kemudian nilai tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali naik pada tahun 2021. Hal tersebut merupakan dampak dari Pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan capaian laju PDRB kabupaten/kota terdekat, Kabupaten Pangandaran mempunyai capaian yang relatif stabil lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota tetangga. Hal tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program kegiatan prioritas perangkat daerah yang diarahkan untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pangandaran. Pada tahun 2022 dengan segala upaya melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi, sehingga pada tahun 2022 Laju PDRB Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan menjadi 5,03.

Tabel 2. 22 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.822,71	3.050,50	3.145,23	3.241,83	3.485,23
B	Pertambangan dan Penggalian	62,74	62,34	64,07	72,32	75,08
C	Industri Pengolahan	501,95	542,22	550,48	592,48	663,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,58	7,96	8,16	9,03	9,69

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,45	1,67	1,84	2,07	2,13
F	Konstruksi	893,88	1.004,70	928,67	1.023,09	1.019,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.085,53	2.281,84	2.243,97	2.368,36	2.605,45
H	Transportasi dan Pergudangan	1.234,67	1.318,35	1.330,79	1.403,19	1.574,36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	932,14	1.060,12	1.091,41	1.162,85	1.325,47
J	Informasi dan Komunikasi	158,39	169,64	227,3	242,55	249,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	201,7	208,23	214,09	242,55	267,32
L	Real Estate	269,48	298,43	328,4	361,77	395,47
M,N	Jasa Perusahaan	100,79	124,32	112,47	122,79	137,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	314,16	316,3	318,26	312,33	311,59
P	Jasa Pendidikan	584,42	658,67	728,21	767,95	793,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23,07	25,67	25,14	27,49	29,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	157,55	180,73	179,78	181,78	219,29
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		10.352,22	11.311,69	11.498,28	12.129,79	13.163,69

Sumber: BPS Pangandaran; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2023

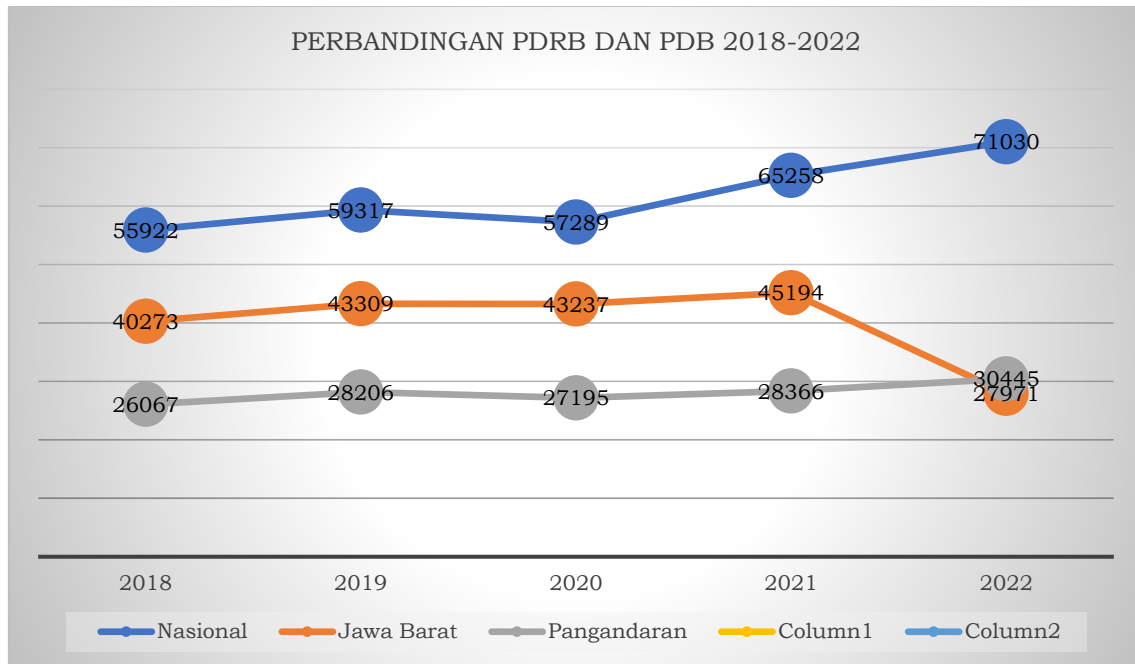
Pertumbuhan ekonomi adalah proses pertumbuhan output perkapita yang terlihat dalam jangka panjang. Konsep jangka panjang mengacu pada kesejahteraan masyarakat, yang digambarkan dalam peningkatan produksi per kapita, yang secara bersamaan menawarkan alternatif yang berbeda dalam hal konsumsi barang dan jasa dan sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat dan bersamaan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi rakyat. Dengan kata lain, arah pembangunan ekonomi adalah berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik-baiknya.

Untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, salah satu indikator pengukurannya adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

Pada Tabel 2. 22 dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran kontribusi sektor korporasi yang terdampak oleh Pandemi Covid-19. Sektor pertanian merupakan sektor yang cukup stabil dan tidak terpengaruh oleh pandemi Covid-19. Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar sektor yang mempengaruhi kontribusi PDRB terus meningkat. Hanya beberapa faktor yang mengalami penurunan, seperti sektor konstruksi, jasa dunia usaha, jasa kesehatan dan jasa sosial dan lainnya. Dengan demikian, beberapa sektor tersebut sebaiknya tidak dijadikan sebagai program unggulan.

2.1.2.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita atau yang biasa disebut dengan pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. Pendapatan per kapita digunakan sebagai indikator makro untuk melihat kemakmuran suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu wilayah, maka wilayah tersebut semakin Makmur.



Grafik 2. 2 Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, BPS, 2022

PDRB Per kapita Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 mengalami menjadi 30.445 (Ribu rupiah) atas dasar harga berlaku,. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pulihnya perekonomian seiring dengan kebijakan pemerintah untuk memberlakukan pelonggaran kegiatan masyarakat dan meningkatnya nilai tambah *output* lapangan usaha utama, yakni lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, & Perikanan, Konstruksi, Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor, dan Transportasi & Pergudangan.

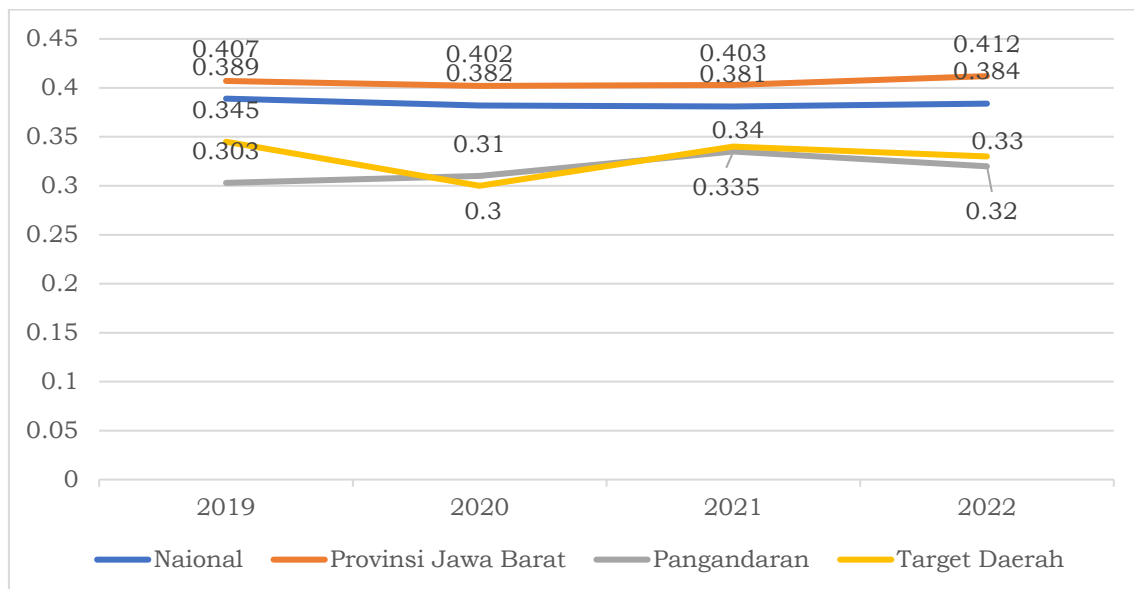
Tabel 2. 23 Perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Jawa barat Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah)

Kabupaten/ Kota	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Pangandaran	26.064	28.206	27.195	28.366	30.445	18.401	19.307	18.304	18.762	19.488
Banjar	22.463	23.508	22.189	23.003	23.812	16.777	17.291	16.228	16.539	16.983
Ciamis	24.474	26.273	20.120	27.218	29.472	17.565	18.329	17.898	18.401	19.169
Tasikmalaya	19.428	20.925	20.120	20.855	22.372	13.316	13.789	13.081	13.367	13.829

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Diolah 2023

2.1.2.3 Indeks Gini

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diukur dengan melihat peningkatan pendapatan penduduk di suatu daerah. Peningkatan pendapatan yang terjadi harus merata dan dapat dirasakan oleh seluruh strata sosial masyarakat, artinya aspek pemerataan pendapatan menjadi penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan tolok ukur keberhasilan hasil-hasil pembangunan suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Pangandaran. Kekhawatiran akan terjadinya ketimpangan hasil pembangunan kemudian berujung pada munculnya permasalahan sosial di masyarakat.



Grafik 2. 3 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pangandaran dengan Nasional dan Tahun 2019-2022 (Ribuan Rupiah)

Sumber: BPS Pangandaran; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2023

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan/ketidakmerataan pendapatan di suatu wilayah secara keseluruhan dengan melihat perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga atau individu dengan total pendapatan. Indeks gini sebagai ukuran distribusi pendapatan memiliki nilai berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika koefisien gini 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti terjadi ketimpangan sempurna mutlak.

Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 maka termasuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 dan 0,5 termasuk dalam kategori ketimpangan "sedang" dan jika nilainya lebih besar dari 0,5, maka terjadi ketimpangan yang "tinggi".

Tabel 2. 24 Indeks Gini Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2018-2022

Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Pangandaran	0,303	0,310	0,335	0,320	0,294
Kabupaten Tasikmalaya	0,353	0,322	0,343	0,378	0,378
Kabupaten Ciamis	0,309	0,354	0,336	0,342	0,337
Kota Banjar	0,322	0,302	0,312	0,341	0,362

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Diolah 2023

Rasio gini Kabupaten Pangandaran menunjukkan angka yang cenderung naik meskipun terdampak pandemi Pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021. Kondisi ini menggambarkan bahwa pendapatan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran hampir merata karena didukung oleh kebijakan pembangunan infrastruktur di semua wilayah untuk menunjang perekonomian masyarakat. Meskipun cenderung mengalami peningkatan, rasio gini Kabupaten Pangandaran jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota terdekat dapat dikatakan paling rendah di tahun 2022 yakni 0,294.

2.1.2.4 Persentase Penduduk Miskin

Pembangunan adalah suatu proses untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Pada tingkat kesejahteraan ekonomi hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat yang dilihat dari tingkat konsumsi akibat peningkatan pendapatan masyarakat. Salah satu indikator terpenting keberhasilan pembangunan adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin.

Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu tugas penting pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Pangandaran. Pemerintah telah mencoba untuk menerapkan beberapa jenis Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menekan angka kemiskinan hingga ke tingkat yang serendah mungkin.

Ukuran kemiskinan didasarkan dengan membandingkan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Tabel 2. 25 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pangandaran dengan Provinsi dan Kab/Kota Tetangga Tahun 2018-2022

Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin (Po)					Jumlah Penduduk Miskin (ribu)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Pangandaran	8,12	7,71	8,99	9,65	9,23	32,19	30,7	36,05	39,07	37,91
Banjar	5,70	5,50	6,09	7,11	6,73	10,4	10,1	11,2	13,4	12,73
Ciamis	7,22	6,65	7,62	7,97	7,72	85,7	79,4	91,4	96,6	93,96
Tasikmalaya	9,85	9,12	10,34	11,15	10,73	172,4	159,9	181,5	200,6	87,13
Jawa Barat	7,45	6,91	7,88	8,40	8,06	3615,8	3399,2	3920,2	4195,3	4070,98

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. Diolah. 2023

Capaian program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 sempat mengalami kenaikan yang ditandai dengan menurunnya persentase penduduk miskin yang semula mencapai 8,12% kemudian menurun hingga 7,71%. Angka tersebut kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yang mencapai 9,65% yang dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 tetapi pada tahun 2022 persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 9,23.

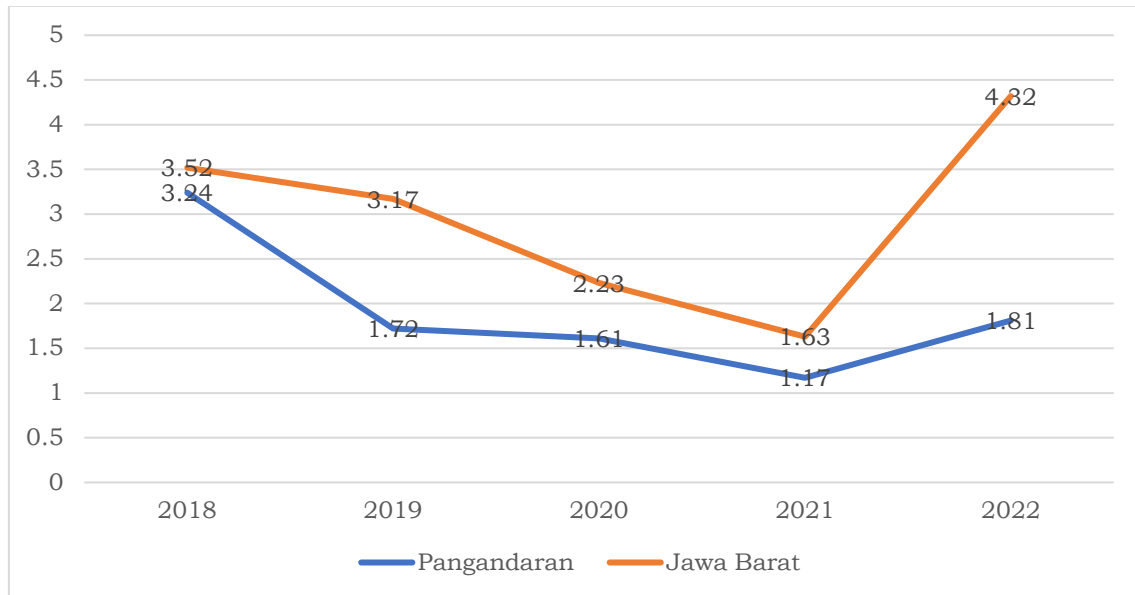
Selaras dengan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangandaran mencapai angka tertinggi pada tahun 2022 sebanyak 37,91 ribu penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin

ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dan juga bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara rata-rata.

2.1.2.5 Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi dimana harga barang, jasa, dan faktor produksi naik. Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali jika kenaikan itu meluas ke barang, jasa, atau faktor produksi lainnya. Inflasi mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat yang berarti terjadi guncangan atau gangguan jaminan sosial akibat ketidakmampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

Di Provinsi Jawa Barat, BPS secara rutin menghitung inflasi di 7 kota (biasa disebut kota Indeks Harga Konsumen). Kota-kota tersebut yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya. Khusus untuk wilayah Priangan Timur (Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran), data inflasi daerah yang dihitung hanya Kota Tasikmalaya, oleh Tim TPID Pihak Bank Indonesia (BI) Cabang Tasikmalaya bersama Tim Kabupaten/Kota dan BPS. Oleh karena di Kabupaten Pangandaran belum tersedia data inflasi tahunan karena tidak ada survei harga konsumen secara rutin, maka inflasi di Kabupaten Pangandaran dapat didekati pola/data inflasi kabupaten/kota yang kondisi perekonomiannya mirip diantaranya Kota Tasikmalaya, walaupun pada kenyataannya pasti akan sedikit berbeda, tapi diharapkan perbedaannya sedikit.



Grafik 2. 4 Laju Inflasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2021

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Pada tahun 2022, perhitungan inflasi Kabupaten Pangandaran, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 2018-2022 inflasi secara umum telah mencapai 1,81% (Grafik 2.4). Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumah tangga secara makro di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 0,64%.

Inflasi akan mendorong perekonomian menjadi lebih baik dengan meningkatnya pendapatan nasional, dan orang akan semakin semangat untuk bekerja, menabung, serta berinvestasi. Bagi pengusaha, inflasi akan memberikan keuntungan karena akan memberikan perolehan yang lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi.

Tabel 2. 26 Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2018-2022

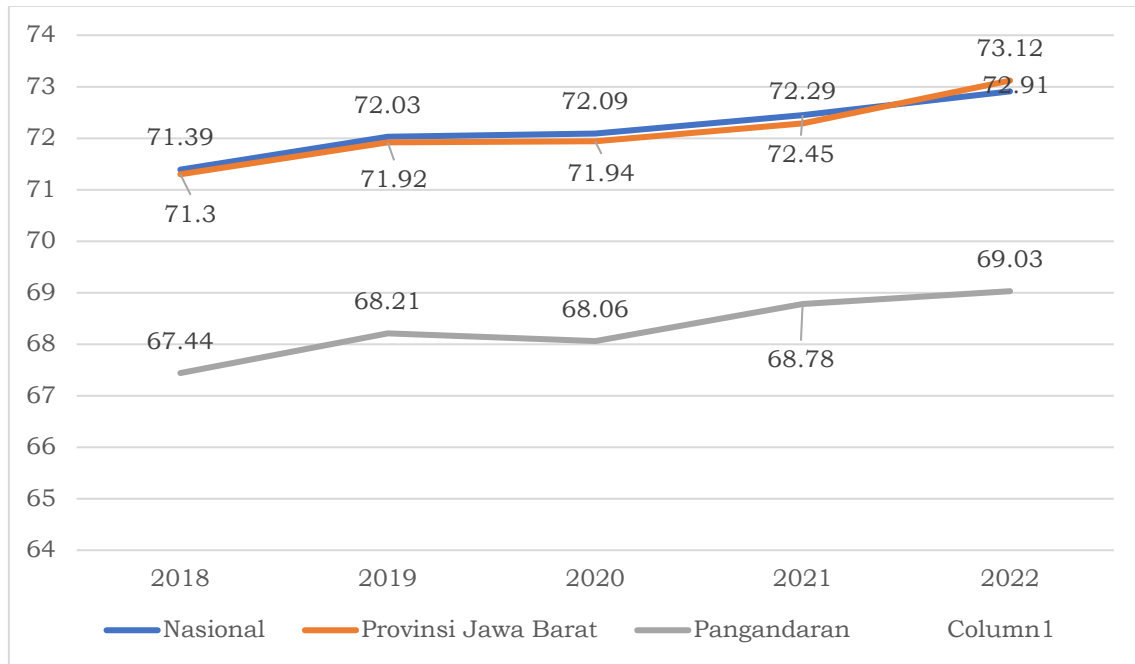
Kabupaten/Kota	Laju Inflasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pangandaran	3,24	1,72	1,61	1,17	5,03
Tasikmalaya	2,30	1,72	1,61	1,17	6,65

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah 2023

2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses pembangunan yang berpusat pada manusia dengan mengukur perbandingan harapan hidup, pendidikan dan taraf hidup. IPM sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara termasuk negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Saat mengukur peringkat negara, *United Nations Development Programme* (UNDP) memeringkat semua negara dalam skala dari 0 (terendah) hingga 1 (tertinggi) dalam hal pembangunan manusia di masing-masing negara tersebut.

IPM merupakan indikator agregat tunggal yang tidak dapat digunakan untuk mengukur semua dimensi pembangunan manusia, tetapi dapat digunakan untuk mengukur tiga dimensi utama pembangunan manusia dengan kemampuan dasar masyarakat. Tiga kapasitas dasar tersebut adalah umur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan, serta akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak.



Grafik 2. 5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran secara umum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun meskipun pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Angka capaian IPM Kabupaten Pangandaran masih berada di bawah capaian nasional dan provinsi, begitu pula jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2021 dan 2022. Meskipun begitu, angka capaian IPM Kabupaten Pangandaran empat tahun terakhir mengalami tren laju pertumbuhan yang positif dengan peningkatan pada seluruh variabel komposit yang terdiri dari Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Paritas Daya Beli. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Pangandaran dapat dikategorikan sedang, yaitu capaian IPM antara 60-70.

**Tabel 2. 27 IPM Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota
Tetangga Tahun 2018-2022**

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Pangandaran	67,44	68,21	68,06	68,28	69,03
Kabupaten Tasikmalaya	65,00	65,64	65,67	65,90	66,84
Kabupaten Ciamis	69,63	70,39	70,49	70,93	71,45
Kota Banjar	71,25	71,75	71,70	71,92	72,55

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. Diolah. 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perbandingan capaian IPM Kabupaten Pangandaran dengan kabupaten/kota tetangga yang menunjukkan posisi Kabupaten Pangandaran berada di atas capaian Kabupaten Tasikmalaya dan berada di bawah capaian Kabupaten Ciamis serta Kota Banjar.

**Tabel 2. 28 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018-2022**

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,44	68,21	68,06	68,28	69,03
Indeks Pendidikan	58,71	59,07	59,33	59,72	60,41
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,04	12,06	12,07	12,08	12,11
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,58	7,67	7,74	7,85	8,03
Indeks Kesehatan	78,22	78,65	79,08	79,38	79,83
Umur Harapan Hidup (tahun)	70,84	71,12	71,4	71,6	71,89
Indeks Pengeluaran	66,81	68,32	67,2	67,14	68,21
Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	8.968	9.423	9.084	9.065	9.389

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

Pencapaian IPM Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu empat tahun terakhir masuk kedalam kategori sedang dengan angka capaian 60-70. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kabupaten Pangandaran, antara lain: selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat,

karena hal ini merupakan salah satu penentu perbaikan derajat kesehatan masyarakat namun dalam kenyataannya hal ini cukup sulit diintervensi. Peran Pemerintah harus terus ditingkatkan salah satunya melalui program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat dan bersih. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah dengan melanjutkan kebijakan pendidikan gratis melalui Program Pangandaran Hebat. Disisi lain dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli.

2.1.2.7 Angka Melek Huruf

Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Tabel 2. 29 Angka Melek Huruf Kabupaten Pangandaran

Kelompok Umur	2020	2021	2022
15-24	99,46	N/A	N/A
15-44	99,69	N/A	N/A
15+	98,59	N/A	N/A
45+	97,47	N/A	N/A

Sumber: BPS Pangandaran; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka melek huruf di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 sebanyak 99,46 persen kelompok umur 15 tahun keatas dan sebanyak 97,47 persen kelompok umur 45 keatas sudah melek huruf. Hal ini menunjukkan hampir seluruh penduduk Kabupaten Pangandaran melek huruf.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran berhasil dalam meningkatkan angka melek huruf di Kabupaten

Pangandaran melalui pendidikan dan usaha lain sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pangandaran.

2.1.2.8 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk suatu kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai (menurut umur penduduk dan ketentuan usia sekolah pada jenjang tersebut) relatif terhadap jumlah penduduk kelompok yang bersangkutan. kelompok usia sekolah. APM digunakan untuk menunjukkan berapa banyak penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan berapa banyak penduduk yang bersekolah pada usia yang memenuhi ketentuan kelompok usia wajib sekolah pada jenjang pendidikan yang diikuti.

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah penduduk yang masih bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk) dan jumlah penduduk yang secara bersamaan memenuhi persyaratan resmi untuk penduduk yang bersekolah. pencapaian pendidikan. APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi umum penduduk pada suatu jenjang pendidikan tertentu. - Untuk menunjukkan seberapa besar kapasitas yang dapat ditawarkan oleh sistem pendidikan kepada siswa pada usia sekolah tertentu. Selain itu, APK juga merupakan indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat mencerminkan jumlah penduduk yang meningkat ke tingkat yang belum mencukupi bahkan melebihi usia sekolah.

Tabel 2. 30 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2022

Jenjang Pendidikan	APM			APK		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
SD/MI/Sederajat	95,76	95,84	99,99	102,81	103,54	103,60
SMP/MTs/Sederajat	84,62	84,97	84,63	95,72	94,59	85,57
SMA/SMK/MA/Sederajat	67,48	67,27	66,78	83,94	84,79	84,31

Sumber: BPS Pangandaran; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2022 APM di Kabupaten Pangandaran cenderung naik kecuali untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat terdapat penurunan begitu juga dengan APK Tahun 2022 yang cenderung naik, kecuali jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat terdapat penurunan.

Angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar yang naik menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pangandaran memiliki partisipasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan fasilitas dan layanan pendidikan di Kabupaten Pangandaran cukup memadai. Selain itu dukungan dari pihak yang lain juga membantu masyarakat dalam meningkatkan minat pendidikan di Kabupaten Pangandaran.

2.1.2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang terkait dengan pengukuran ketenagakerjaan yang merangkum masyarakat yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dengan menghitung rasio angkatan kerja (semua yang bekerja) terhadap total angkatan kerja pada waktu tertentu.

Tabel 2. 31 1Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator Capaian Tenaga Kerja	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	77,74	75,08	76,79	74,75	79,92
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,58	4,48	5,08	3,25	1,56
Jumlah Penduduk Usia Kerja	240.175	234.003	245.619	241.542	260.761

Sumber: BPS Pangandaran; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2023

Baik nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) maupun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pangandaran tahun

2018 hingga tahun 2021 memiliki nilai yang fluktuatif. Keduanya memiliki persamaan memiliki penurunan pada tahun 2019 dan 2021 dimana terjadi wabah Covid-19. Mayoritas data di tahun mengalami penurunan. Salah satu faktornya adalah ketersediaan lapangan usaha yang belum memadai dibandingkan penduduk usia kerja. Namun hal tersebut memacu perbaikan sehingga Kembali meningkat ditahun 2022 mencapai 79,92.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk mengejar ketertinggalan, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pengurangan pengangguran sehingga dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan program pembangunan. Kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh institusi.

Aspek pelayanan umum terdiri dari beberapa kategori urusan yakni, 1) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 2) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 3) Urusan pilihan, 4) Unsur pendukung pemerintahan, dan 5) Unsur penunjang pemerintah. Aspek Pelayanan Umum yang berkaitan dengan Layanan urusan pemerintah wajib meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi, tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah;

penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan dan kearsipan.

Sementara aspek pelayanan umum urusan pilihan terdiri atas kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan ketransmigrasian. Sedangkan unsur penunjang terdiri atas, perencanaan; keuangan; kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; serta penelitian dan pengembangan. Berikut merupakan penjelasan terkait urusan-urusan terkait aspek pelayanan umum serta data terkait.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Pemerintah daerah wajib melakukan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar seperti yang tertera didalam UU nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Berikut penjabaran masing-masing urusan.

2.1.3.1.1 Pendidikan

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembangunan di bidang pendidikan diperlukan peran serta yang aktif, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat sehingga semua program peningkatan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan bidang pendidikan. Peran pendidikan sangatlah penting sehingga pembangunan di bidang pendidikan baik secara formal ataupun nonformal harus selalu ditingkatkan. Setidaknya terdapat tiga permasalahan pendidikan. Pertama yakni terkait pemerataan, baik pemerataan kualitas, pemerataan sarana maupun pemerataan guru (rasio guru yang cukup tetapi tidak merata). Kedua yakni kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terkait *how to have* (bagaimana memperoleh/rekrutmen) dan *how to empower* (bagaimana memberdayakan). Ketiga yakni terkait kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum merata

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting, sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan tidak hanya pada pendidikan formal, namun juga meliputi pendidikan nonformal. Dalam pemenuhan pelayanan di bidang pendidikan, pemerintah Kabupaten Pangandaran didukung dan dikuatkan oleh masyarakat dan swasta secara signifikan. Berikut adalah data capaian kinerja urusan pendidikan Kabupaten Pangandaran tahun 2018- 2022.

Tabel 2. 32 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Siswa PAUD	Orang	7347	7181	8005	8005	8257
Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	%	104,5	97,03	96	103,54	101,7
Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	98,82	99,29	98	94,59	104

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	93	88	91	95,84	96
Jumlah Anak Usia 5-6 tahun	Orang	12.451	12.553	12.032	12.032	12.296
Jumlah gedung sekolah SD/MI	Unit	343	344	344	344	347
Rasio Sekolah/penduduk Usia 13-15	Rasio	07: 03,3	07: 01,8	07: 17,1	07: 17,1	9: 17
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Orang	37.555	40.211	39.991	39.991	39.572
Jumlah gedung sekolah SMP/MTs	Unit	87	86	85	85	88
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Orang	19,253	19,173	19,984	19,984	20,181
Rasio Sekolah SD/MI/SMP/MTs/penduduk Usia 7-12/3-15	Rasio	0,25833 3	0,1375	0,13819 4	0,13819 4	72,79
Jumlah Sekolah (SD/MI + SMP/MTs)	Unit	430	430	429	429	435
Jumlah Penduduk Usia (7-12) + (13-15) thn	Orang	56808	59384	59975	59975	59753
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar	Rasio	75.69	72.41	71,01	71,51	87,68
Jumlah Guru SD/MI	Orang	3518	3539	1584	1584	2972
Jumlah Murid SD/MI	Orang	39246	39015	38,498	38498	37459
Rasio Perbandingan Jumlah Guru dan Jumlah Murid SD/MI	Rasio	1: 11,15	1: 11,02	1: 24,30	1: 24,30	1: 12,60
Jumlah Guru SMP/MTs	Orang	1503	1547	680	680	1631
Jumlah Murid SMP/MTs	Orang	19026	19036	19,498	19,498	18,564
Rasio Perbandingan Jumlah Guru dan Jumlah Murid SMP/MTs	Rasio	1: 12,65	1: 12,30	1: 28,67	1: 28,67	1: 11,38
Jumlah Guru	Orang	5021	5086	2264	2264	4603

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
(SD/MI + SMP/MTs)						
Jumlah Murid (SD/MI + SMP/MTs)	Orang	58272	58051	57996	57996	56023
Rasio Perbandingan Jumlah Guru dengan Murid Sekolah Pendidikan Dasar + SMP/MTs	Rasio	1: 11.60	1: 11.41	1: 25.61	1: 25.61	1: 12.17
Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	Orang	2947	4527	4349	4349	4171
Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Orang	5021	4627	4531	4531	4603

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2023

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Pada data di atas dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya regulasi pemerintah pusat tentang zonasi. Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menangani permasalahan tersebut telah berupaya memaksimalkan sinergitas berbagai pihak dalam mensosialisasikan pentingnya melanjutkan pendidikan.

Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Pangandaran mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2021 sebesar 94,59% menjadi 104% ditahun 2022. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat dalam melanjutkan pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak akan pentingnya pendidikan.

Pada indikator jumlah murid di Kabupaten Pangandaran didominasi oleh tingkat SD/MI dan SMP/MTS yang jumlahnya mencapai 56.023 orang pada tahun 2022. Jika dilihat pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan kesadaran orang tua untuk menuntaskan pendidikan formal dari jenjang SD/MI sampai SMA/MA selama 12 tahun sebagai bagian daripada program pemerintah.

Pada indikator jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 yakni sebanyak 4.171 orang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang sebanyak 4.349 orang. Hal ini dikarenakan belum banyaknya Perguruan Tinggi (PT) di Kabupaten Pangandaran yang menyediakan jurusan sesuai dengan kebutuhan di lembaga pendidikan setingkat SD/MI dan/atau SMP/MTs.

Pemenuhan pelayanan dasar di urusan pendidikan terdapat pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM). Berikut merupakan pencapaian indikator SPM pada urusan pendidikan tahun 2022:

Tabel 2. 33 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pendidikan Tahun 2022

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini			
	Jumlah yang harus dilayani	5.320	5.320	100%
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Buku Gambar	27.162	27.162	100%

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	2. Alat Mewarnai	22.635	22.635	100%
	3. Penyediaan biaya personil Peserta Didik	5.354.855.600	5.354.855.600	100%
	4. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	120	120	100%
	5. Kualitas pendidik yang berkualifikasi	151	151	100%
2.	Pendidikan Dasar			
	Jumlah yang harus dilayani	44.457	44.457	100%
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Buku teks pelajaran	44.708	44.708	100%
	2. Perlengkapan belajar	44.708	44.708	100%
	3. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	341	341	100%
	4. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	338	290	85,80%
	5. Jumlah rombongan belajar di satuan Pendidikan	2.292	2.292	100%
	6. Penyediaan biaya personil peserta didik	43.688.974.423	43.688.974.423	100%
	7. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	3.001	3.001	100%
	8. Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C	341	335	98,24%
3.	Pendidikan Kesetaraan			
	Jumlah yang harus dilayani	374	374	100%
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Modul belajar	240	240	100%
	2. Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	12	12	100%
	3. Penyediaan biaya personil peserta didik	411.000.000	411.000.000	100%

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	55	55	100%
	5. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	8	8	100%
	6. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	6	6	100%
	7. Perlengkapan belajar	240	240	100%
	8. PKBM Terakreditasi minimal C	12	12	100%

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2023

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar indikator-indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Pangandaran total pencapaiannya sebesar 100% kecuali dua indikator yakni indikator Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat sebesar 85,80% dan indikator Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C sebesar 98,24%. Hal ini menunjukkan bahwa semua anak memiliki akses yang setara ke lembaga pendidikan, kurikulum dan materi pembelajaran disediakan secara memadai, sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dengan baik, serta evaluasi dan pemantauan dilakukan secara efektif.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Beberapa hal dapat dilakukan untuk meningkatkan gerakan hidup sehat antara lain dengan menyediakan air

bersih dan sanitasi yang memadai, mengimbau masyarakat untuk patuh menjalankan protokol kesehatan dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu daerah.

Kualitas kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Balita, dan lain-lain. Pemerintah pusat melalui kementerian PPN/Bappenas menetapkan ada 8 area reformasi sistem kesehatan. Delapan area reformasi sistem kesehatan yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan penempatan tenaga kesehatan;
- b. Penguatan puskesmas;
- c. Peningkatan kualitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK);
- d. Kemandirian farmasi dan alat kesehatan;
- e. Ketahanan kesehatan;
- f. Pengendalian penyakit dan imunisasi;
- g. Pembiayaan kesehatan; serta
- h. Teknologi informasi pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan derajat kesehatan akan memberikan dampak positif terkait kemajuan kesehatan di Kabupaten Pangandaran. Realisasi kinerja Kabupaten Pangandaran di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 34 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 Kelahiran Hidup	8,24	5,4	5,43	5,43	6,25
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	49,91	49,08	49,39	49,39	71,42
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun	per 1000 Kelahiran Hidup	8,73	6,55	5,6	5,6	0,54
Rasio Posyandu Per Seratus Balita	Rasio	2,31	1,83	1,88	1,88	9,48
Rasio puskesmas per satuan penduduk	Rasio	1: 27.838	1: 28.319	1: 28.432	1: 28.432	1: 29.116
Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	Rasio	1: 11.930	1: 12.494	1: 12.544	1: 12.544	1: 12.845
Rasio poliklinik per satuan penduduk	Rasio	1: 20.024	1: 20.228	1: 20.309	1: 20.309	1: 39.704
Prevalensi Balita <i>Stunting</i>	%	4,1	3,3	3,94	3,94	2,21
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,84	71,12	71,4	71,6	71,89
Angka Kematian Ibu	Orang	3	3	5	5	4
Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih	Jumlah	6112	6074	6095	6095	5596
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	103,13	110,19	97,38	97,38	100
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Rasio	99,15	99,23	102,10	102,10	100
Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	86	88,17	87,1	87,1	82,8
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	%	100,5	102,8	101,5	101,5	100

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	%	0	0	0	0	0
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
Penderita Diare Yang Ditangani	%	30,3	53,2	66,2	66,2	30,4
Angka Kejadian Malaria	Angka	0,02	0,02	0,02	0,02	0
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	1,18	1,04	0,27	0,27	0,57
Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Nifas	%	96,85	98,67	100	100	100
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	%	67,69	69,76	57,42	57,42	66,67
Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	77,72	94,65	88,39	88,39	100
Persentase ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	100	100	100	88,6
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	23,37
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	74,77
Persentase warga	%	100	100	100	100	74,85

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	65,6
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	89,39
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100
Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100
Persentase Balita Gizi Buruk/ <i>Stunting</i> yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100	100
Nilai rata rata IKM Puskesmas	Nilai	N/A	86,37	100	100	88,51
Persentase puskesmas akreditasi minimal madya	%	53,3	93,3	93,3	93,3	93,3
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Rasio	N/A	N/A	1: 426.483	1: 426.483	1: 436.748
Rasio tenaga dokter per 100.000 penduduk	Rasio	5,62	10,78	12,42	12,42	19
Rasio Bidan Per Seratus Ribu	Rasio	30,81	85,98	100,35	100,35	104,4

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk						
Jumlah Perawat	Orang	355	355	446	446	569
Jumlah Bidan	Orang	370	373	377	377	456
Jumlah Farmasi	Orang	14	48	136	136	108
Jumlah Ahli Gizi	Orang	12	20	20	20	46
Jumlah Dokter Spesialis	Orang	0	0	12	16	20
Jumlah Dokter Gigi	Orang	7	9	12	12	20
Jumlah Dokter Umum	Orang	36	43	56	56	63
Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	Bayi	271	193	268	268	299
Gizi Buruk	Bayi	110,2	106,48	106,95	106,95	51
Ibu Hamil Kunjungan K1	%	90,19	90,51	92,82	92,82	6138
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	90,19	90,15	92,82	92,82	5666
Kasus HIV	Orang	38	17	16	16	39
Angka kesakitan DBD	Orang	137	158	194	194	502
Angka kesakitan Diare	Orang	N/A	7873	4765	4765	3698
Angka kesakitan ISPA	Orang	5582	293	227	227	134
Angka kesakitan Tuberculosis	Orang	389	357	387	387	683
Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	%	73,3	100	100	100	100
Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	%	73,3	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, 2023

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi sebesar 6,25 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan pada indikator Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2021 yakni dari sebesar 5,6 per 1000 Kelahiran Hidup menjadi

0,54 per 1000 Kelahiran Hidup. Hal ini dikarenakan adanya dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan.

Pada indikator prevalensi balita *stunting* untuk tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 menjadi sebesar 2,21%. Hal ini membuktikan bahwa kondisi *stunting* balita di Kabupaten Pangandaran dapat dikurangi melalui penanganan gizi buruk dan *stunting* yang baik, dengan cara mengadopsi beberapa inovasi dari puskesmas. Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menangani permasalahan *stunting*.

Indeks kesehatan merupakan cerminan dari tingkat kesehatan di suatu daerah. Indeks kesehatan disusun berdasarkan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). AHH adalah jumlah rata-rata tahun seseorang dapat hidup. Kesehatan merupakan aspek penting dan bagian dari indeks pembangunan manusia. Semakin meningkatnya kualitas kesehatan di Kabupaten Pangandaran, maka akan memberikan *multiplier effect* pada aspek kehidupan masyarakat lainnya. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 mengalami kenaikan yakni menjadi sebesar 71,89. Hal ini dikarenakan adanya dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan.

Pada indikator Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mencapai 100%. Hal ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menangani kasus gizi buruk pada balita. Demikian juga dengan indikator Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD sejak tahun 2018 hingga 2022 juga mencapai 100%. Hal ini dikarenakan penanganan penyakit DBD yang sesuai SOP sehingga penderita bisa ditangani dengan tepat.

Pemenuhan pelayanan dasar di urusan kesehatan terdapat pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum. Berikut merupakan pencapaian indikator SPM pada urusan kesehatan tahun 2022:

Tabel 2. 35 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan Tahun 2022

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
	Jumlah yang harus dilayani	5.840	5.840	100%
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	3.739	2.319	62.02 %
	2. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	7.917	7.303	92.24 %
	3. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	4.336	3.446	79.47 %
	4. Tablet tambah darah	61.727	61.727	100.00 %
	5. Kartu ibu/rekam medis ibu	4.486	4.331	96.54 %
	6. Dokter/dokter spesialis kebidanan	18	18	100.00 %
	7. Bidan	285	285	100.00 %
	8. Perawat	168	168	100.00 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
	Jumlah yang harus dilayani	5.574	5.574	100.00 %
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	7.894	7.605	96.34 %
	2. Formulir Partograf	3.763	3.763	100.00 %
	3. Kartu ibu (rekam medis)	4.538	4.427	97.55 %
	4. Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	17	16	94.12 %
	5. Bidan	290	290	100.00 %
	6. Perawat	120	120	100.00 %
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
	Jumlah yang harus dilayani	5.309	5.309	100%
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Vaksin Hepatitis B0	3.780	3.719	98.39 %

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	2. Vitamin K1 injeksi	3.624	3.624	100%
	3. Salep/tetes mata antibiotik	3.506	3.506	100%
	4. Formulir bayi baru lahir	4.064	4.064	100%
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	1.943	1.943	100%
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	7.743	7.626	98.49 %
	7. Dokter/dokter spesialis Anak	14	14	100%
	8. Bidan	264	264	100%
	9. Perawat	169	169	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita			
	Jumlah yang harus dilayani	20.557	20.557	100%
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	13.334	13.334	100%
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	14.937	13.768	92.17 %
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	12.026	12.026	100%
	4. Vitamin A Biru	4.095	1.202	
	5. Vitamin A Merah	12.174	12.174	100%
	6. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	5.786	5.763	99.60 %
	7. Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	6.433	6.090	94.67 %
	8. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	1.400	1.400	100%
	9. Peralatan Anafilaktik	378	349	92.33 %
	10. Bidan	201	201	100%
	11. Dokter	23	23	100%
	12. Perawat	141	141	100%
	13. Ahli Gizi	19	19	100%
	14. Guru PAUD	122	122	100%
	15. Kader Kesehatan	3.012	3.012	100%

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			
	Jumlah yang harus dilayani	71.134	71.134	100%
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Buku raport kesehatanku	26.377	3.069	11.64 %
	2. Buku pemantauan kesehatan	32.435	2.919	9.00 %
	3. Kuesioner skrining kesehatan	23.511	5.919	25.18 %
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	4.988	55	1.10 %
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	2.221	160	7.20 %
	6. Dokter/Dokter gigi	24	22	91.67 %
	7. Bidan	204	204	100%
	8. Perawat	162	162	100%
	9. Ahli Gizi	24	24	100%
	10. Tenaga Kesehatan Masyarakat	42	42	100%
	11. Guru	305	267	
	12. Kader Kesehatan	2.653	2.653	100%
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			
	Jumlah yang harus dilayani	274.722	174.722	64%
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	78	28	35.90 %
	2. Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi ba Tensimeter dan, Alat ukur lingkar perut, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	1.951	1.920	98.41 %
	3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	13	13	100.00 %

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	4. Dokter	30	30	100.00 %
	5. Bidan	234	234	100.00 %
	6. Perawat	182	182	100.00 %
	7. Ahli Gizi	25	24	96.00 %
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	43	43	100.00 %
	9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	338	326	96.45 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			
	Jumlah yang harus dilayani	65.400	65.400	100.00 %
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	39.728	37.898	95.39 %
	2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	18.693	8.219	43.97 %
	3. Buku kesehatan lansia	30.815	19.170	62.21 %
	4. Dokter	27	27	100.00 %
	5. Bidan	215	215	100.00 %
	6. Perawat	167	167	100.00 %
	7. Ahli Gizi	19	19	100.00 %
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	33	33	100.00 %
	9. Tenaga Non Kesehatan Terlatih	84	76	90.48 %
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
	Jumlah yang harus dilayani	146.820	138.820	95%
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	26.865	23.326	86.83 %
	2. Tensimeter	59	35	59.32 %

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	39	11	28.21 %
	4. Dokter	31	31	100.00 %
	5. Bidan	229	229	100.00 %
	6. Perawat	184	184	100.00 %
	7. Tenaga Kesehatan Masyarakat	34	34	100.00 %
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
	Jumlah yang harus dilayani	6.328	6.328	100%
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	2.629	2.506	95.32 %
	2. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	12	12	100%
	3. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	17	16	94.12 %
	4. Dokter	31	31	100%
	5. Bidan	227	227	100%
	6. Perawat	184	184	100%
	7. Ahli Gizi	23	23	100%
	8. Tenaga Kesehatan Masyarakat	42	42	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			
	Jumlah yang harus dilayani	570	570	100%
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	48	37	77.08 %
	2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi	23	9	39.13 %

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	1.079	1.063	98.52 %
	4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	142	31	21.83 %
	5. Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	22	22	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
	Jumlah yang harus dilayani	5.902	5.902	100%
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	49	24	48.98 %
	2. Reagen Zn TB	76	73	96.05 %
	3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	388	301	77.58 %
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	5.410	5.410	100%
	5. Catridge tes cepat molekuler	1	1	100%
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	1.563	1.533	98.08 %
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	9	9	100%
	8. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	21	21	100%
	9. Perawat	121	121	100%
	10. Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	25	24	96.00 %
	11. Penata Rontgen	1	0	0%
	12. Tenaga Kesehatan masyarakat Kesehatan masyarakat	31	30	96.77 %
	13. Tenaga non Kesehatan terlatih	6	3	50.00 %

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
	Jumlah yang harus dilayani	6.770	5.887	87%
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	194	194	100%
	2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	2.819	2.806	99.54 %
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	2.751	1.834	66.67 %
	4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	3.385	2.015	59.53 %
	5. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	23	23	100%
	6. Perawat	137	137	100%
	7. Bidan	187	187	100%
	8. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	34	34	100%
	9. Tenaga Kesehatan masyarakat	38	38	100%
	10. Tenaga non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	7	7	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, 2023

Berdasarkan pada tabel di atas masih terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang kurang optimal dalam pencapaiannya, hal tersebut disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi standar pemeriksaan kesehatan serta kurangnya beberapa alat kesehatan yang dimiliki Kabupaten Pangandaran. Artinya bila tidak

merasakan indikasi adanya gangguan kesehatan, maka jadwal pemeriksaan rutin sering kali tertunda oleh kegiatan lainnya. Pemeriksaan rutin adalah langkah preventif yang dapat membantu mendeteksi dini gangguan kesehatan yang mungkin tidak menunjukkan indikasi awal. Melakukan pemeriksaan rutin secara teratur dapat membantu dalam menjaga kesehatan dan mencegah perkembangan masalah kesehatan yang lebih serius.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari beberapa aspek di antaranya jalan, drainase, saluran irigasi dan jumlah tempat ibadah. Indikator pada informasi penataan ruang adalah persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

Tabel 2. 36 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan Kondisi Baik	Km	269,75	401,2	429.129	445,18	470.442
Panjang Jalan Seluruhnya	Km	504,31	504,31	504,31	504,31	504,31
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten	Km	504,31	504,31	504,31	504,31	504,31
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	63,58	63,58	67,57	69,50	12.890,79
Luas Areal Irigasi	Ha	10.341,91	16.785,38	16.785,38	16.785,38	17.889,20
Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	53	65	66	67	64

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan yang Terbangun	Km	0,98	0,98	5,94	0,838	5.742
Jumlah Jembatan yang Terbangun	Unit	4	4	6	1	5
Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	60,09	83	85,09	88,28	93,28

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pangandaran, 2023

Pada tabel disebut dapat dilihat bahwa kinerja pembangunan Kabupaten Pangandaran ditinjau dari indikator panjang jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022. Peningkatan ini akan berdampak pada kemudahan akses masyarakat di area kawasan Kabupaten Pangandaran. Persentase jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yakni menjadi sebesar 93,28%. Hal ini dikarenakan pembangunan dan rekonstruksi jalan untuk akses jalan yang baik menjadi salah satu fokus utama pembangunan, disertai ketersediaan anggaran, serta spesifikasi bahan pembangunan dan rekonstruksi jalan agar penggunaan jalan dapat bertahan lama.

Pada indikator persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Meskipun terjadi penurunan tetapi terdapat kenaikan permintaan pembangunan SPAM untuk penyediaan air bersih. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran masyarakat akan kebutuhan akses air bersih. Selain itu jumlah jembatan yang terbangun mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 dibangun 5 unit jembatan.

Pada indikator panjang jalan yang terbangun pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 terjadi *refocusing* anggaran yang digunakan dalam penanganan Covid-19. Diharapkan melalui

pembangunan infrastruktur pendukung ini nantinya akses dan pertumbuhan ekonomi kawasan di Kabupaten Pangandaran akan lebih mudah dan semakin meningkat.

Pemenuhan pelayanan dasar di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terdapat pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM). Berikut merupakan pencapaian indikator SPM pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2022:

Tabel 2. 37 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun 2022

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari			
	Jumlah yang harus dilayani	1.260	1.080	86%
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	75.600	64.800	85,71 %
	2. Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	420	341	81,19 %
	3. Jaringan perpipaan	12.000	12.000	100.00 %
	4. Jaringan bukan perpipaan	0	0	-
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik			
	Jumlah yang harus dilayani	425	425	100.00 %
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	24	24	100.00 %
	2. Kualitas pelayanan air limbah domestik	130	130	100.00 %
	3. Sub-Sistem pengolahan setempat	0	0	-
	4. Sub-Sistem pengangkutan	0	0	-
	5. Sub-Sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	0	0	-
	6. Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	0	0	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pangandaran, 2023

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator layanan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pencapaiannya masih dibawah 100% yakni jumlah yang harus dilayani Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebesar 86%, Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) sebesar 85,71%, dan Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau) sebesar 81,19%. Hal tersebut dikarenakan kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti saluran pipa air bersih, sumur, atau sistem penyediaan air yang efektif serta faktor geografis atau kondisi lingkungan tertentu, seperti wilayah terpencil dan pegunungan sehingga menyulitkan akses fisik terhadap air bersih.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011), sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 Angka 13 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2011). Sedangkan, Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan, minimal bangunan dan kesehatan penghuni (Peraturan Menteri PU No.2/PRT/M/2017). Berikut merupakan capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Pangandaran:

Tabel 2. 38 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Ketaatan terhadap RTRW	%	35	27	35	35	36,19
Persentase Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan yang Terpenuhi	%	5,717	5,7	11,43	11,43	11,43
Indeks Risiko Sanitasi	Nilai	41,31	38	32,39	32	32

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pangandaran, 2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 untuk indikator ketaatan terhadap RTRW telah mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan terlaksananya rencana tata ruang wilayah beserta pembuatan dan pelaksanaan kebijakan penataan ruang. Pada tahun 2022, realisasi pemenuhan sarana dan prasarana pusat pemerintahan mencapai 11,43%. Di mana pada tahun 2019 hanya terealisasi 5,7%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kinerja disertai dengan peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran kegiatan.

Pada indikator Indeks Risiko Sanitasi pada tahun 2022 tetap dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan tempat pembuangan sampah, penanganan limbah serta kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan demikian, capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman perlu dioptimalkan kembali kinerja nya. Utamanya dalam peningkatan rumah tangga bersanitasi dan sarana prasarana pemerintah yang baik.

Pemenuhan pelayanan dasar di urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM). Berikut merupakan pencapaian indikator SPM pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2022:

Tabel 2. 39 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
	Jumlah yang harus dilayani	1	1	100.00 %
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	-
	2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	1	1	100.00 %
	3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	-
	4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	0	0	-
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Jumlah yang harus dilayani	0	0	-
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau bangunan	0	0	-
	2. Subsidi uang sewa	0	0	-
	3. Penyediaan rumah layak huni	0	0	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pangandaran, 2023

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota mencapai sebesar 100%. Hal ini dikarenakan semua rumah korban bencana di Kabupaten Pangandaran telah dilakukan rehabilitasi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah belum adanya data dasar dalam penentuan prioritas pembangunan rumah layak huni dan untuk pelaksanaan penerapan SPM membutuhkan waktu dalam proses pendataan dikarenakan pendataan bukan hanya dilingkup internal. Hal ini perlu dilakukan koordinasi, sinergi, dan pendataan bersama dengan stake holders terkait.

2.1.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu hal yang wajib diutamakan guna terciptanya ketertiban dan keamanan bagi seluruh masyarakat serta menumbuhkan masyarakat yang tangguh dan tanggap dalam menghadapi bencana. Sedangkan perlindungan masyarakat yakni suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan hukum. Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga keswadayaan masyarakat berkembang dan berperan dalam berbagai bidang, baik budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya.

Berikut adalah hasil capaian kinerja pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Pangandaran tahun 2018- 2022:

Tabel 2. 40 Hasil Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Penurunan Pelanggaran Perda	%	N/A	58%	0%	-180%	14%
Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum	%	N/A	N/A	-270%	27%	-67%
Persentase peningkatan Kasus Kebakaran Yang Di respons Kurang 15 menit	%	35%	28%	33%	63%	75%
Persentase desa/ kelurahan/kampung rawan bencana yang mendapat/ memperoleh informasi peringatan dini bencana	%	69	68,8	68,8	68,8	60,5
Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana	%	24	27	29	22	22
Persentase Korban Bencana yang mendapatkan penanganan	%	0,09	0,09	2,4	n/a	n/a

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan	%	100	100	100	100	100
Persentase jumlah kerusakan akibat bencana yang terrehabilitasi	%	100	100	100	100	100
Kejadian Kebakaran	Kasus	31	53	79	35	37
Jumlah Pelanggaran K3 yang Dilaporkan Masyarakat dan Teridentifikasi	Kasus	24	10	37	28	24
Pelanggaran K3 yang Terselesaikan	Kasus	22	10	10	28	24
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	91,67	100	100	100	100
Petugas Linmas di Kab/Kota	Orang	1908	1908	1913	1946	1929

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Pangandaran, 2023

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat penurunan pelanggaran Perda pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan yang signifikan akan pelanggaran Perda di Kabupaten Pangandaran. Sedangkan pada indikator tingkat penurunan gangguan ketertiban umum pada tahun 2022 sebesar -67%. Hal ini dikarenakan meningkatnya aduan dari masyarakat terkait gangguan ketertiban umum.

Persentase peningkatan kasus kebakaran yang di respons kurang 15 menit pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya optimalisasi pelayanan pemadam kebakaran dalam tingkat waktu tanggap. Sedangkan persentase desa/kelurahan tangguh bencana pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 sebesar 22%. Hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran yang digunakan

untuk percepatan pemulihan ekonomi pasca Covid-19, serta adanya kebijakan pembatasan kerumunan. Meskipun demikian, Kabupaten Pangandaran terus meningkatkan hal ini dengan cara melatih warga desa dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pada tahun 2022 terdapat 37 kasus kejadian kebakaran namun semuanya berhasil dipadamkan dengan cepat. Selain itu, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap terjadi pelanggaran K3 di Kabupaten Pangandaran dapat diselesaikan semuanya.

Pemenuhan pelayanan dasar di urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdapat pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM). Berikut merupakan pencapaian indikator SPM pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2022:

Tabel 2. 41 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)			
	Jumlah yang harus dilayani	432.032	432.032	100.00 %
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	432.032	432.032	100.00 %
	2. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	432.032	432.032	100.00 %
	3. Standar operasional prosedur Satpol PP	9	7	77,78 %
	4. Standar sarana prasarana Satpol PP	3	3	100.00 %

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	1	1	100.00 %
	6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	2	0	0%
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN			
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			
	Jumlah yang harus dilayani	426.483	426.483	100.00 %
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	0	0	-
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	0	0	-
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	40	40	100.00 %
	4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0	-
	5. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	0	0	-
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
	Jumlah yang harus dilayani	1.500	1.490	99,33 %
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	0	0	-
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	0	0	-
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
	Jumlah yang harus dilayani	3.264	3.264	100.00 %

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0	0	-
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	3.264	3.264	100.00 %
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	0	0	-
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	0	-
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	0	0	-
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR			
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			
	Jumlah yang harus dilayani	432.032	432.032	100.00 %
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	9	9	100.00 %
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	3	3	100.00 %
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2	2	100.00 %
	4. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	30	28	93,33 %

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan BPBD Kabupaten Pangandaran, 2023

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian sebagian besar jenis layanan telah mencapai 100%. Ada beberapa indikator yang pencapaiannya masih dibawah 100% yakni Standar operasional prosedur Satpol PP sebesar 77,78%; Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap

pelanggaran Perda dan Perkada sebesar 0%, Jumlah yang harus dilayani Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana sebesar 99,33%; dan Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia sebesar 99,33%.

Pada jenis layanan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada memang belum dapat dicapai hal ini dikarenakan ketidakjelasan regulasi atau hambatan dalam proses hukum yang menyebabkan keterlambatan atau ketidakpastian dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran tersebut. Sedangkan pada indikator jenis layanan standar operasional prosedur Satpol PP masih belum tercapai 100% dikarenakan kurangnya perencanaan dan pengembangan SOP yang komprehensif.

2.1.3.1.6 Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang disabilitas, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Untuk mengurangi angka penyandang disabilitas, maka diperlukan kerja sama dari pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan sosial Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 42 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	48.272	45.944	116.458	46.516	39.134

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	57.096	50.817	116,458	52.224	53.268
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani	Jiwa	48.272	45.944	116.458	50.210	39.134
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ada	Jiwa	57.096	50.817	116.458	52.224	53.268
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang diberikan bantuan	Jiwa	48.272	45.944	116.458	46.516	39.134
Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang seharusnya menerima bantuan	Jiwa	57.096	50.817	116.458	52.224	53.268
Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	%	84,54%	90,41%	100%	91%	73%
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah	%	6,08%	5,81%	6,71%	6%	6,27

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
menerima jaminan sosial						
Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina	Jiwa	N/A	N/A	1.427	1.531	2.006
Persentase PSKS yang aktif sosialisasi/ penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100
Persentase PPKS yang mandiri	%	1,2	6,1	27	39,52	40,63
Jumlah Panti Sosial	Unit	21	23	22	23	31
Jumlah fakir miskin mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	Jiwa	48.272	45.944	117.471	47.516	39.134
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial	Jiwa	48.272	45.944	117.471	45.417	644

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, 2023

Berdasarkan data di atas, jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Pangandaran mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 yakni sebanyak 116.458, tahun 2021 sebesar 46.516 dan tahun 2022 yakni sebanyak 39.134 jiwa. Sedangkan untuk jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang seharusnya memperoleh bantuan sosial di tahun 2022 yakni sebanyak 53.268 jiwa. Pendataan yang dilakukan merupakan keberhasilan dalam kerja sama

antar *stakeholder* dan adanya dukungan anggaran sehingga pendataan di lapangan dapat dilakukan.

Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami pencapaian yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari sebesar 91% menjadi sebesar 73%. Hal ini dikarenakan masih adanya data yang tidak valid. Persentase PSKS yang aktif sosialisasi/penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya kekompakan sumber daya manusia serta adanya dukungan anggaran.

Jumlah panti sosial di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 mengalami kenaikan yakni menjadi sebanyak 31 unit. Sedangkan jumlah fakir miskin mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi sebesar 39.134 jiwa. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Pangandaran terutama dibidang sosial untuk meningkatkan kinerjanya dengan penyediaan data yang valid dan akurat.

Pemenuhan pelayanan dasar di urusan sosial terdapat pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM). Berikut merupakan pencapaian indikator SPM pada urusan sosial tahun 2022:

Tabel 2. 43 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Sosial Tahun 2022

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti			
	Jumlah yang harus dilayani	192	192	100.00 %
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Layanan data dan pengaduan	12	12	100.00 %

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	-
	3. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	-
	4. Penyediaan permakanan	180	180	100.00 %
	5. Penyediaan sandang	1	1	100.00 %
	6. Penyediaan alat bantu	1	1	100.00 %
	7. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	-
	8. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	12	12	100.00 %
	9. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	12	12	100.00 %
	10. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	-
	11. Akses ke layanan pendidikan	1	1	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	100.00 %
	13. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	100.00 %
	14. Layanan rujukan	2	2	100.00 %
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	-
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti			
	Jumlah yang harus dilayani	10	10	100.00 %
	Mutu Minimal Layanan Dasar			

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	1. Layanan data dan pengaduan	9	9	100.00 %
	2. Penyediaan permakanan	8	8	100.00 %
	3. Penyediaan sandang	8	8	100.00 %
	4. Penyediaan alat bantu	1	1	100.00 %
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	-
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	8	8	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	0	0	-
	8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	2	2	100.00 %
	9. Akses ke layanan pendidikan	0	0	-
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	8	8	100.00 %
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	8	8	100.00 %
	12. Layanan rujukan	8	8	100.00 %
	13. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	-
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	-
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	-
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti			
	Jumlah yang harus dilayani	1.596	1.596	100.00 %

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Layanan data dan pengaduan	4	4	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	-
	3. Penyediaan permakanan	1.526	1.526	100.00 %
	4. Penyediaan sandang	0	0	-
	5. Penyediaan alat bantu	66	66	100.00 %
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	6	6	100.00 %
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	4	4	100.00 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	0	0	-
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	-
	10. Akses ke layanan pendidikan	0	0	-
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	4	4	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	4	4	100.00 %
	13. Layanan rujukan	0	0	-
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	-
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	-

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti			
	Jumlah yang harus dilayani	6	6	100.00 %
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Layanan data dan pengaduan	6	6	100.00 %
	2. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	-
	3. Penyediaan permakanan	6	6	100.00 %
	4. Penyediaan sandang	6	6	100.00 %
	5. Penyediaan alat bantu	0	0	-
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	-
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	6	6	100.00 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	0	0	-
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	-
	10. Akses ke layanan pendidikan	0	0	-
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	6	6	100.00 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	6	6	100.00 %
	13. Layanan rujukan	6	6	100.00 %
	14. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	-

No.	Jenis Layanan SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	15. Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	-
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
	Jumlah yang harus dilayani	185	185	100.00 %
	Mutu Minimal Layanan Dasar			
	1. Penyediaan permakanan	152	152	100.00 %
	2. Penyediaan sandang	33	33	100.00 %
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	0	0	-
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	0	-
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	0	0	-

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, 2023

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian SPM urusan Sosial Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan yakni sebesar 100%. Hal ini dikarenakan tersedianya sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur, dan fasilitas yang memadai serta kapasitas para tenaga profesional yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Nondasar

Fokus layanan urusan wajib nondasar mencakup: usaha kecil mikro dan menengah, tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; pemberdayaan masyarakat dan desa; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi dan UMKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian,

kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan, yang disajikan sebagai berikut.

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, atau sebagainya.

Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Lalu yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan agar menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk dapat menjalankan urusan pemerintah daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan serapan dan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Berkaitan dengan tenaga kerja dapat disajikan data hasil kinerja bidang urusan tenaga kerja pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 44 Hasil Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka partisipasi angkatan kerja	%	240,175	237,582	245,619	241,542	260,761

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,74	75,08	76,79	74,75	79,92
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,58	4,48	5,08	3,25	1,56
Rasio penduduk yang bekerja	Rasio	14	90	57,97	87,95	78,67
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (usia kerja)	Rasio	96,42	95,48	94,52	96,75	98,44
Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	N/A	N/A	N/A	58,96	76,43
Rasio penduduk yang bekerja	Rasio	N/A	N/A	57,97	87,95	78,67
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	N/A	N/A	72	46,26	15,13

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Pangandaran, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022 mengalami peningkatan angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 mencapai sebesar 79,92%. Hal ini dikarenakan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap TPAK serta masyarakat yang masih tergolong mampu cukup banyak untuk memilih tidak segera mencari lowongan pekerjaan karena faktor dari keluarga yang finansialnya memadai.

Pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan serta adanya kompetensi yang sesuai dari para pencari kerja. Sedangkan pada indikator persentase pencari kerja yang ditempatkan terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 yakni menjadi sebesar 76,43%. Hal ini dikarenakan para pencari kerja memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai sehingga memudahkan para pencari kerja untuk ditempatkan pada lowongan tertentu. Permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Pangandaran adalah terjadinya kesenjangan antara jumlah pencari kerja terhadap kesempatan untuk bekerja.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan usaha dalam mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Kedudukan perempuan akan membaik jika ketika perempuan dapat mandiri serta mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Dalam penyelenggaraan perlindungan anak berbagai pihak seperti negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab didalamnya”.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus mengupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Berikut adalah hasil capaian kinerja urusan pemberdayaan dan perlindungan anak Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022.

Tabel 2. 45 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	89,68	90,02	89,78	89,92	90,2
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	69,2	74,56	74,57	75,98	76,09
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	26,49	26,11	24,7	25,42	24,89

Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Anak Kabupaten Pangandaran, 2023

IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-Laki dan IPM Perempuan ditinjau dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPG di Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 yakni menjadi sebesar 90,20. Hal ini dikarenakan adanya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan diruang publik dan pribadi termasuk perdagangan orang, eksploitasi seksual dan berbagai jenis eksploitasi lainnya serta dengan menjamin partisipasi penuh, efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan mengalami penurunan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi sebesar 24,89%. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan usia produktif dan belum optimalnya kesetaraan upah antara perempuan dan laki-laki. Pada indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya keterlibatan perempuan diparlemen, adanya partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan dari perempuan.

2.1.3.2.3 Pangan

Menurut UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pangan Pasal 1 menjelaskan definisi ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ketahanan pangan sendiri adalah kondisi tersedianya pangan oleh negara untuk rakyatnya, tersedianya pangan yang cukup baik disertai dengan jumlah maupun mutunya, keamanan, keanekaragaman, gizi yang cukup, pemerataan, dan harga yang terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan

budaya masyarakat agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Manusia membutuhkan energi untuk hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari. Asupan energi harus mengandung karbohidrat, lemak dan protein untuk digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Energi yang diserap dari asupan makanan harus sesuai dengan porsi yang dibutuhkan untuk asupan energi penuh. Pada urusan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman bergam, bergizi danimbang namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Berikut merupakan hasil kinerja bidang urusan pangan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022:

Tabel 2. 46 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka kecukupan protein per kapita	Gram/Kap. Hari	63,7	68,8	70,6	70,6	64,8
Jumlah desa rawan pangan	Desa	10	9	8	6	16
Total desa pangan lestari	Desa	18	3	3	17	21
Ketersediaan pangan utama (<i>food availability</i>)	Ton/Tahun	32.576,42	61.823,74	38.727,46	141.806	171.154,06
Skor PPH Konsumsi	Skor	89,5	93,2	94,5	93,4	93,3
Angka Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/ Hari	3603	6460	5525,18	5525,18	Belum Rilis

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angka Ketersediaan Protein	Gram/Kap/Hari	275,62	180,89	350,72	350,72	Belum Rilis
Skor PPH Ketersediaan	Skor	89,5	93,2	94,5	93,4	Belum Rilis
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,18	82,56	81,99	80,64	81,12

Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa angka kecukupan protein per kapita pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penurunan konsumsi asupan protein dari jenis padi-padian, kacang-kacangan, sayur dan buah. Pada indikator jumlah desa rawan pangan mengalami peningkatan di tahun 2022 hal ini dikarenakan adanya masa transisi pandemi Covid-19. Sedangkan pada indikator total desa pangan lestari pada tahun 2022 mengalami peningkatan yakni menjadi sebanyak 21 desa. Hal ini dikarenakan meningkatnya stabilitas ekonomi, pemenuhan gizi keluarga dan pencegahan *stunting*.

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan produksi sehingga ketersediaan pangan utama menjadi terpenuhi. Sedangkan pada indeks ketahanan pangan mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 yakni menjadi sebesar 81,12. Hal ini meningkat dibandingkan tahun 2021 dikarenakan adanya peningkatan pada aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan, dan aspek pemanfaatan pangan.

Skor PPH Konsumsi merujuk pada indikator penilaian kualitas makanan yang dikembangkan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) untuk membantu konsumen dalam memilih makanan yang sehat. PPH singkatan dari “Peringkat Penuh” atau “Peringkat Penuh

Potensi” dan mencerminkan kandungan nutrisi indikator suatu makanan. Skor PPH konsumsi yang ada di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 yakni sebesar 93,3, menurun dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya penurunan konsumsi dikelompok kacang-kacangan dan gula.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Hak atas tanah merupakan hak yang memberikan wewenang kepada pemiliknya dalam menggunakan maupun memanfaatkan tanah yang dimilikinya. Kewenangan dalam hak atas tanah dijelaskan menurut regulasi UU Pokok Agraria Pasal 4 ayat 2 yaitu menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan langsung dengan tanah itu dalam batas-batas menurut UU ini dan regulasi yang berlaku.

Menurut pasal 33 (1) UUD 1945 dikatakan bahwa, “Bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara”. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat berhak menguasai kekayaan alam tersebut sebagaimana tercantum dalam UUPA Pasal 1 ayat (2) yang memberi wewenang kepada negara untuk: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Penataan wilayah dan ruang melalui pembuatan peraturan tentang tata ruang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai konsekuensi pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk. Konflik-konflik yang sering muncul pada urusan pertanahan di Kabupaten Pangandaran adalah berupa konflik perbatasan antar kecamatan, desa maupun antar penduduk, serta dengan *stakeholders*

lain seperti pengusaha pertambangan dan perkebunan. Berikut merupakan tabel hasil capaian kinerja urusan pertanahan Kabupaten Pangandaran:

Tabel 2. 47 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Jumlah kebijakan umum mengenai pedoman pelaksanaan pengembangan dan penataan batas wilayah yang diterbitkan	%	N/A	100	100	100	100

Sumber: BPN Kabupaten Pangandaran, 2023

Berdasarkan tabel di atas capaian urusan pertanahan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2019 hingga tahun 2022 terlihat stagnan. Hal ini dikarenakan telah terlaksananya koordinasi dengan pihak BPN dan sudah tersertifikasi tanah yang ada di wilayah kabupaten pangandaran.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Sumber daya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintahan. Pengelolaan sumber daya alam memiliki tujuan yang sama yaitu agar terus tersedianya sumber daya alam yang dapat diperbarui, menghemat dan meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat

diperbarui serta mencari substitusi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berikut ini dapat disajikan realisasi dari kinerja di Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan mutu lingkungan hidup:

Tabel 2. 48 Hasil Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Volume sampah yang ditangani (m3)	m3	30.224 m3	52.954 m3	30.848 m3	35.564 m3	54.162 m3
Volume produksi sampah	m3	167.025,2 m3	181.475,86 m3	183.136,82 m3	184.242,03 m3	188.985,16 m3
Persentase Penanganan Sampah	%	18.10%	29.18%	16,84%	19,30%	28,66%
Indeks Kualitas Air	Indeks	47.78	50	51.67	50	50
Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	N/A	N/A	N/A	92,9	79,76
Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,3	85,68	77,79	88,66	88,16
Indeks Kualitas Vegetasi/IKTL	Indeks	52,28	52,28	65,25	68,84	69,05
Jumlah Daya Tampung TPS (m3)	m3	120 m3	150 m3	210 m3	210 m3	222 m3
Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Pelaku Usaha	N/A	8	6	3	6
Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh	Pelaku Usaha	N/A	8	16	3	22

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pemerintah Daerah Kab/Kota						
Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Kasus	6	5	4	3	3
Total pengaduan masyarakat yang teregister	Kasus	6	5	4	3	3
Total timbunan sampah	ton/tahun	61.395	62.019	62.266,52	62.523,33	62.365,10
Jumlah Sampah 3R	ton/tahun	N/A	2.211,90	2.573,25	7.493,50	2.190
Total Jumlah Timbunan Sampah Kabupaten (Ton)	Ton	59,716.34	60,910.66	62,128.88	62.523,33	62.365,10
Luas area Kabupaten yang dilayani	Km2	183	295,00	170,25	195,12	289,75
Luas area Kabupaten keseluruhan	Km2	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penanganan sampah pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang fluktuatif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya meskipun pencapaian masih sangat rendah yakni sebesar 28,66% di tahun 2022. Hal ini dikarenakan kurangnya armada pengangkut sampah, pertambahan penduduk, banyaknya pengunjung wisata yang menghasilkan sampah, dan kurangnya masyarakat dalam mengelola sampah.

Indeks kualitas air Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 yakni sebesar 50. Hal ini masih tergolong rendah dikarenakan kondisi alam saat musim hujan membawa sedimen yang larut dari air sungai dan adanya kegiatan pembuangan sampah/air limbah domestik yang tidak sesuai peraturan. Sedangkan indeks kualitas udara cenderung lebih

baik yakni pada tahun 2022 sebesar 88,18. Meskipun demikian, hal ini menurun dibandingkan tahun 2021 dikarenakan kurangnya pemantauan dan pengawasan emisi dari perusahaan penghasil emisi dan kendaraan yang belum memenuhi baku mutu emisi.

Jumlah daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya unit TPS3R di wilayah Kabupaten Pangandaran. Pada indikator jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dan izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten di Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan ditahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan belum banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang mengetahui aturan yang berlaku sehingga masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Capaian urusan bidang lingkungan hidup Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan terutama terkait dengan penanganan sampah. Hal tersebut disebabkan oleh belum memadainya sarana prasarana penanganan sampah, seperti belum tersedianya TPA, armada angkut sampah yang masih terbatas karena sebagian rusak serta belum tersedianya TPS3R di setiap Kecamatan. Untuk menunjang dan meningkatkan Indikator Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan kegiatan menanam pohon baik di hutan rakyat maupun hutan mangrove. Peningkatan capaian kinerja urusan lingkungan hidup, nantinya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaturan serta pengelolaan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan suatu hal penting dalam kehidupan masyarakat sebagai data pendukung dalam penentuan prioritas sasaran program pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Berikut adalah

capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022:

Tabel 2. 49 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Penerbitan KTP elektronik	%	78,03	91,96	96,95	99,17	98,35
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	29,02	17,03	26,78	98,2	93,85
Cakupan Perekaman Maturitas Elektronik	%	4,9	2,75	3,29	99,2	98,89
Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	3,12	26,51	14,66	56,26	51,97
Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	%	33,1	74,2	74,61	73,58	75,31
Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Perkawinan	%	53,32	57,94	59,54	100	63,86
Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	%	52,42	61,05	67,25	78,87	99,68
Persentase Validasi database Kependudukan	%	8,7	30,43	39,13	60,87	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, 2023

Pada tahun 2022, cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik sebesar 98,35%. Indikator penerbitan Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang fluktuatif yakni pada tahun 2022 sebesar 93,85%. Meskipun demikian, terjadi penurunan dibandingkan tahun 2021. Sedangkan cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pangandaran masih

tergolong rendah yakni pada tahun 2022 hanya sebesar 51,97%. Rendah atau turunnya angka pada indeks yang disebutkan di atas dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Persentase validasi *database* pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan yakni mencapai 100% ditahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya implementasi regulasi Permendagri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian hak akses dan pemanfaatan data. Kebutuhan masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan bisa didapat melalui pencatatan administrasi penduduk.

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah kabupaten dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Upaya pemberdayaan masyarakat adalah salah satu indikator dalam menentukan kemandirian sumber daya manusia (SDM) di suatu daerah. Pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan upaya membendung arus urbanisasi ke kota, karena suatu daerah mampu melakukan pemberdayaan masyarakat, maka suatu daerah berhasil dalam melakukan proses pembangunan. Berikut merupakan hasil kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 50 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Desa Kategori Swasembada	%	N/A	4,30%	8,60%	18,28%	38,70 %
Jumlah Desa Kategori Swasembada	Desa	N/A	4	8	17	36
Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	Lembaga	73	83	87	87	87
Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Baik	%	26,88	44,09	59,14	58,06	65,59
Jumlah PKK Aktif	PKK	104	104	104	104	104
Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif dalam Pembangunan Desa	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, 2023

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase desa kategori swasembada pada tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya kekompakan SDM, kerja sama antar *stakeholder*, dan adanya dukungan anggaran. Demikian juga pada jumlah desa kategori swasembada pada tahun 2019 hingga tahun 2022 juga mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya kekompakan SDM, kerja sama antar *stakeholder*, dan adanya dukungan anggaran.

Pada tahun 2018 hingga tahun 2022 jumlah PKK aktif di Kabupaten Pangandaran mengalami angka yang stagnan yakni sebanyak 104 PKK. Demikian juga dengan persentase PKK aktif pada tahun 2018 hingga

tahun 2022 mengalami angka yang stagnan yakni sebesar 100%. Hal ini dikarenakan adanya kekompakan SDM, kerja sama antar *stakeholder*, dan adanya dukungan anggaran.

Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan beberapa capaian ini menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilakukan telah mampu menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di desa.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk berfokus kepada edukasi masyarakat terkait jumlah anggota keluarga yang akan ditanggung di masa depan. Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat ditekan. Selain itu Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masing-masing.

Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diamanahkan berdasarkan regulasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, serta pembinaan keluarga sejahtera.

Berikut merupakan data hasil kinerja bidang urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada 5 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 51 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
TFR	-	2,42	2,32	2,29	2,51	2,22
CPR	%	75,15	76,41	60,25	73,37	69,81
Unmet Need	%	17,23	14,88	24,84	18,1	19,7
LPP	%	0,57	0,57	0,96	1,24	1,17
Ratio Akseptor KB	%	75,16	76,43	60,25	73,37	70,31
ASFR	-	13,45	17,61	18,01	19,81	27

Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Anak Kabupaten Pangandaran, 2023

Total *Fertility Rate* (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita per seribu wanita selama masa reproduksinya. Hipotesisnya adalah bahwa tidak ada wanita yang meninggal sebelum akhir masa reproduksinya dan tingkat kesuburan menurut usia tidak berubah dari waktu ke waktu. TFR pada Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022 mengalami angka yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan penggunaan kontrasepsi selama wanita usia subur serta rendahnya PUS yang melahirkan dibawah usia 19 tahun.

Contrasepsi Prevalence Rate (CPR) adalah prevalensi penggunaan kontrasepsi yang membandingkan PUS peserta IB aktif (peserta IB yang sedang menggunakan metode kontrasepsi dengan PUS total). Indikator ini dapat memberikan informasi tentang seberapa besar peningkatan kesehatan ibu akibat regulasi fertilitas. Indikator-indikator ini dapat memberikan prediksi untuk mengukur akses terhadap layanan kesehatan reproduksi esensial. CPR di Kabupaten Pangandaran mengalami angka yang fluktuatif yakni pada tahun 2022 sebesar 69,81%. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka kelahiran dan masih rendahnya pemakaian kontrasepsi.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Pangandaran mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 mengalami

penurunan dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan pembentukan kampung KB serta meningkatnya peserta KB aktif.

2.1.3.2.9 Perhubungan

Perhubungan merupakan hal yang penting dalam hal yang berkaitan tentang arus mobilisasi antar satu ke lainnya. Peran perhubungan sendiri tidak jauh dari hal distribusi barang maupun jasa pada kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Hal tersebut dapat mendorong, maupun menunjang pada segala aspek kehidupan bermasyarakat dengan suatu tujuan seperti halnya pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Proses mobilisasi dari masyarakat khususnya Kabupaten Pangandaran cukup terbatas dikarenakan adanya pembatasan sosial akibat dari pandemi Covid-19. Pembatasan sosial ini didukung juga dengan pengetatan beberapa ruas jalur penghubung yang ada di Kabupaten Pangandaran. Sehingga secara langsung pandemi ini mempengaruhi arus pergerakan masyarakat. Adapun data hasil kinerja bidang urusan perhubungan pemerintah Kabupaten Pangandaran pada 5 tahun terakhir ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 52 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Sarana Prasarana Perhubungan yang Ada dalam Kondisi Baik	%	70	76,3	76,9	78	96
Angka Kecelakaan Lalu Lintas	%	0,005	0,003	0,002	0,001	0,001
Jumlah Penumpang Angkutan Darat	Unit	358,988	631,396	474,383	482,441	487,356
Persentase Kecamatan yang Terlayani Angkutan Umum	%	50	50	60	50	50

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, 2023

Berdasarkan tabel di atas, rasio sarana prasarana perhubungan yang ada dalam kondisi baik mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat untuk pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum

(Smart PJU) di semua titik lokasi di 10 kecamatan, dan pagar pengaman jalan di 3 titik lokasi.

Persentase kecamatan yang terlayani angkutan umum pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami angka yang fluktuatif. Meskipun demikian capaiannya masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan tidak adanya SDM Kasi Angkutan yang menangani kegiatan perencanaan pembukaan dan pengelolaan trayek baru, tidak adanya pengusaha angkutan umum yang berminat atau mampu untuk bekerja sama membuka jaringan trayek baru, serta kurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum.

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informasi menjadi suatu hal yang sangat penting saat ini. Oleh karena itu urusan komunikasi dan informasi merupakan urusan yang sangat penting dalam proses kelangsungan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran. Berikut adalah capaian urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022.

Tabel 2. 53 Hasil Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase aplikasi <i>e-government</i> yang terintegrasi	%	20	30	40	45	48
Indeks SPBE	indeks	1,50	2,32	3,02	3,42	2,82
Jumlah IKM	jumlah	85,25	88,11	76,81	89,13	89,25
Jumlah KIM	kelompok	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kabupaten Pangandaran, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase aplikasi *e-government* yang terintegrasi selalu meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2022 mencapai 48%. Hal ini dikarenakan semua pengampu sistem memanfaatkan secara baik sesuai dengan kebutuhan masing-

masing. Sedangkan pada indeks SPBE pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi sebesar 2,82%. Hal ini dikarenakan banyaknya penambahan pada nilai tingkat kematangan indikator SPBE.

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja urusan komunikasi dan informasi Kabupaten Pangandaran memang menunjukkan capaian kinerja dengan nilai yang cukup positif. Namun, ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan dalam proses pencapaiannya, diantaranya terkait dengan pengintegrasian aplikasi pada setiap dinas ataupun unit kerja di jajaran perangkat daerah Kabupaten Pangandaran yang masih belum sepenuhnya tercapai.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha kecil dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Usaha kecil dan menengah akan selalu menghadapi tantangan yang kompleks dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi. Untuk menguatkan perekonomian daerah, maka perlu dilakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penguatan UMKM merupakan salah satu faktor penggerak pembangunan ekonomi daerah agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Berikut adalah capaian urusan koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022.

Tabel 2. 54 Hasil Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase koperasi aktif	%	32,69	33,96	89,02	89,02	91,56
Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	100	100	100	100	100
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	100	100	100	100	100
Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi	%	20,83	13,04	14,29	16,66	8,4
Jumlah usaha mikro dan kecil	Jumlah	10882	11360	11360	11360	98290

Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran, 2023

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase koperasi aktif mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya pembinaan dan pengawasan koperasi. Sedangkan persentase KSP/USP yang naik klasifikasi mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan stagnannya predikat kesehatan KSP/USP Koperasi.

Pada indikator jumlah usaha mikro dan kecil pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pendataan menyeluruh dari tiap desa. Dalam pencapaian kinerja di urusan koperasi dan UKM, terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu kurangnya data terkait jumlah anggota koperasi yang sejahtera dan perkembangan usaha UMKM.

Peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Pangandaran disebabkan oleh beberapa faktor penggerak, salah satunya yaitu adanya fasilitas pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan

untuk masyarakat. Tidak hanya memberikan pelatihan namun Kabupaten Pangandaran juga memberikan dukungan permodalan bagi usaha mikro dan kecil dengan bermitra oleh pihak ketiga, serta fasilitasi penjaminan untuk pengajuan kredit. Namun, pada realisasinya terdapat sejumlah faktor yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Pangandaran seperti mengubah pola pemikiran masyarakat tentang semangat kewirausahaan.

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Di era globalisasi seperti saat ini, persaingan dunia usaha semakin ketat. Agar dapat bertahan maka setiap daerah mulai berlomba-lomba untuk mengembangkan wilayahnya. Pengembangan yang diupayakan dimaksudkan untuk menarik investor agar masuk ke daerahnya, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Berbagai upaya dilakukan seperti memanfaatkan kekayaan alam, menaikkan retribusi daerah dan ada juga yang memudahkan perizinan bagi investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut. Realisasi kinerja Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangandaran tersajikan dalam data sebagai berikut:

Tabel 2. 55 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah investor PMDN	Jumlah	429	131	2.124	1.050	NA
PMA	Rp	17.750.000	0	0	0	31.010.000.000
PMDN	RP	205.291.216.995	471.716.357.987	349.898.121.679	219.437.739.336	1.750.354.863.491
Jumlah Investasi (PMA.PMDN)	Rp	205,3 M	471,8 M	349,9 M	795,7 M	1.781,4 M

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan pada indikator PMA dan PMDN dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 jumlah realisasi investasi (PMA dan PMDN) mencapai Rp. 1.781,4 Miliar. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak investor yang melihat adanya peluang investasi di Kabupaten Pangandaran yang memang terkenal sebagai tempat pariwisata bagi wisatawan nasional maupun internasional. Maka dari itu, banyak investor yang menginvestasikan modalnya untuk menjalankan usaha di Kabupaten Pangandaran.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran yang strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Dalam berbagai aspek pembangunan, pemuda memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional maupun lokal. Peranan pemuda sebagai aset untuk percepatan pembangunan, sangat tergantung pada kualitas sumber daya pemuda.

Pengoptimalan peran pemuda di Kabupaten Pangandaran memiliki peran penting dalam pembangunan daerah baik dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan, keamanan maupun sosial budaya. Pemberdayaan pemuda dapat dilakukan melalui organisasi sosial kepemudaan seperti karang taruna maupun *Non-Government Organization* (NGO) pemuda yang bergerak di berbagai bidang. Selain itu, untuk meningkatkan kesegaran jasmani serta mengembangkan minat dan bakat masyarakat dalam bidang keolahragaan juga dikembangkan sektor olahraga di Kabupaten Pangandaran.

Selain itu, permasalahan pembangunan pada generasi muda saat ini adalah memiliki tubuh yang sehat, kuat dan berdaya saing. Oleh karena itu, jika pemuda tersebut memiliki hati jiwa dan raga yang sehat, maka dapat mengerahkan daya tahan tubuh yang kuat pula untuk

mengatisipasi berbagai penyakit. Berikut merupakan capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 56 Hasil Capaian Kinerja Urusan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah organisasi olahraga/klub olahraga	Organisasi/ Klub	2	2	2	2	2
Jumlah Klub Olahraga	Klub	127	127	146	146	146
Jumlah Gedung Olahraga	Unit	42	117	117	117	117

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2023

Pada urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2022 umumnya tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya melakukan olahraga, menjadikan munculnya klub-klub olahraga berbasis prestasi, dan kesehatan. Dengan tercapainya medali dalam Pekan Olahraga Daerah Provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa Kabupaten Pangandaran bisa bersaing untuk cabang olahraga tertentu. Meskipun demikian, masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya berolahraga serta belum banyaknya cabang olahraga yang bisa mendapatkan medali, karena belum ditunjang oleh besaran anggaran, sarpras dan fasilitas lainnya yang representatif.

2.1.3.2.14 Statistik

Statistik merupakan upaya pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penyajian data yang sering digunakan untuk masalah ilmiah, industri maupun sosial. Tahap pengolahan data sangat menentukan tingkat keakuratan dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. Dengan adanya lembaga statistik diharapkan mampu menyebarluaskan produk yang berkualitas terkait hasil pembangunan di berbagai sendi kehidupan, baik lingkungan sosial, ekonomi, budaya,

dan pemerintahan. Statistik digunakan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam memahami kondisi daerahnya dan mempermudah dalam proses pengambilan keputusan.

Statistik pada pemerintahan dibantu dalam mendeskripsikan maupun mengimplementasikan data tentang data kepegawaian dan variabel yang akan diteliti. Oleh sebab itu, perbaikan maupun penyempurnaan terus dilakukan untuk mendukung perubahan atau penambahan nilai guna meningkatkan penilaian dan sebagai sumber informasi bagi Kabupaten Pangandaran. Adapun indikator capaian statistik Kabupaten Pangandaran sebagai berikut.

Tabel 2. 57 Hasil Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Publikasi	publikasi	3	1	0	0	2

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kabupaten Pangandaran, 2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah publikasi statistik pada tahun 2022 yakni sebanyak 2 publikasi. Hal ini meningkat dibandingkan tahun 2021. Meskipun demikian, capaian ini masih tergolong rendah dikarenakan kurangnya kesadaran skpd untuk menyeahkan hasil publikasi data statistik.

2.1.3.2.15 Persandian

Semakin berkembangnya *E-Government* memunculkan banyak inovasi baru yang semakin memberikan kemudahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan komunikasi publik. Persandian dan keamanan informasi adalah sebagai entitas pengaman data dan informasi. Namun demikian, hal tersebut memunculkan permasalahan yaitu ancaman keamanan data maupun transaksi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan mereka. Peran persandian dan keamanan informasi berada

yaitu sebagai entitas pengaman data dan informasi sangat berperan aktif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Bidang tersebut merupakan pengamanan data dan informasi yang dilakukan analisis guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

Tabel 2. 58 Hasil Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Sistem Informasi yang Menerapkan Sistem Keamanan Informasi	Sistem Informasi	10	16	20	21	25

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kabupaten Pangandaran, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa sistem informasi yang menerapkan sistem keamanan informasi meningkat setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dimana pada tahun 2022 yakni sebanyak 25. Hal ini dikarenakan kesadaran akan pengamanan sistem untuk keamanan lalu lintas data dan informasi.

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten termuda yang ada di provinsi Jawa Barat, selain memiliki banyak wisata alam, kabupaten ini juga terkenal dengan wisata budaya dan wisata buatan yang memiliki keunikan dan beragam. Pemerintah kabupaten melakukan berbagai upaya dan berinovasi dalam mengembangkan kawasan wisata salah satunya dengan menarik wisatawan dengan memperkenalkan budaya yang ada. Perbatasan wilayah Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Cilacap menyebabkan Kabupaten Pangandaran kental akan kultur Sunda dan kultur Jawa. Berkembangnya era globalisasi cukup berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya. Berikut merupakan hasil capaian kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 59 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Cagar Budaya Dilestarikan	Cagar Budaya	139	165	151	151	159
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah	18	12	8	40	14
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah	0	6	0	3	11
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu	Jumlah	30	30	30	30	26
Persentase Kelompok Budaya Aktif	Jumlah	0	0	100	100	218

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah cagar budaya yang dilestarikan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 yakni sebesar 159 cagar budaya. Capaian tersebut merupakan objek diduga cagar budaya yang terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ada 159 objek diduga cagar budaya, namun yang sudah terdaftar di BPCB dan/atau yang sudah teregister di *website* Kemendikbudristek sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 32 objek dan yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya ada 1 objek.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pembatasan kegiatan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Meskipun demikian pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali dibandingkan tahun 2021. Pada indikator persentase kelompok budaya aktif mengalami kenaikan yang signifikan ditahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya konsistensi pengawasan, pembinaan dan koordinasi yang baik antar *stakeholder* terkait.

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, bahwa dari salah satu ketujuh agenda pembangunan nasional adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki cara pikir yang terbuka, kritis, kreatif, dan memiliki karakter. Perkembangan literasi masyarakat Indonesia salah satunya bergantung pada kegemaran membaca yang tergambar dalam Indeks Literasi Masyarakat (IPLM). Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi berkontribusi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, berkarakter, mandiri dan berdaya saing yang pada akhirnya terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan merupakan pusat kegiatan belajar, membaca dan mencari informasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Capaian kinerja urusan perpustakaan Kabupaten Pangandaran disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 60 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Selama 1 Tahun	Orang	1.169	12.567	3.931	3.104	14.740
Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul Buku	5.286	9.636	10.794	12.274	23.036
Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Koleksi Buku	9.519	10.083	10.761	11.900	23.036
Jumlah Seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai	Orang	N/A	1	1	265	364
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	Orang	1.169	12.567	3.931	3.104	14.740

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Nilai IKM terhadap Pelayanan Perpustakaan	Nilai	31,195	31,426	42,958	87,585	89,71
Jumlah Perpustakaan	Perpustakaan	325	325	627	632	695
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Per Tahun	Orang	1.169	12.567	9.151	3.104	14.740
Jumlah Orang dalam Populasi yang Harus Dilayani	Orang	31.195	31.426	42.958	33.935	30.296

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 maupun tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada dua tahun tersebut masih adanya pembatasan aktivitas sehingga berkurangnya pengunjung perpustakaan. Selain itu adanya program mobil perpustakaan keliling dan promosi literasi ke sekolah dasar sampai ke sekolah menengah atas juga mempengaruhi pencapaian kinerja di bidang perpustakaan.

Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pengadaan buku yang bersumber dari Banprov dan DAK serta adanya hibah buku dari masyarakat. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Pangandaran juga mengalami peningkatan ditahun 2022 yakni menjadi sebanyak 695 perpustakaan di Pangandaran. Hal ini dikarenakan dilaksanakannya penelusuran perpustakaan ke kecamatan, desa, sekolah dan madrasah.

Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai di Kabupaten Pangandara pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pendataan seluruh pustakawan dan tenaga pustaka di seluruh

Kabupaten Pangandaran. Sedangkan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 belum ada pendataan seluruh Pustakawan dan tenaga pustaka di seluruh Kabupaten Pangandaran.

2.1.3.2.18 Kearsipan

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Era digitalisasi saat ini menuntut upaya strategis yang dilakukan lembaga kearsipan dan lembaga pengelola kearsipan lainnya, untuk memastikan bahwa arsip baik yang bersifat statis maupun dinamis menjadi Informasi yang terkandung di dalamnya merupakan informasi yang nyata dan tidak dapat dibantah. Melalui arsip, generasi saat ini dapat mengetahui apa saja yang pernah terjadi sebelumnya dan generasi yang akan datang dapat mengetahui apa saja yang terjadi saat ini sehingga kita dapat mengetahui apa yang terjadi dari waktu ke waktu untuk dipelajari. Berikut merupakan capaian hasil kinerja urusan kearsipan Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022:

Tabel 2. 61 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	%	18	18	18	18	18
Persentase arsip yang terjamin keamanannya	%	N/A	48,03	48,03	48,03	48,03

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	18	18	0	18	18
Pengelolaan Kearsipan menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM	Kegiatan	2	2	2	0	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran, 2023

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2018 hingga tahun 2022 tidak mengalami perubahan yakni sebesar 18%. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kearsipan kepada OPD sehingga masih perlu ditingkatkan. Sedangkan persentase arsip yang terjamin keamanannya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 tidak mengalami perubahan yakni sebesar 48,03%. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kearsipan kepada OPD sehingga masih perlu ditingkatkan. Selain itu, juga perlu ditambahkan terkait kelengkapan dan daya dukung sarana dan prasarana.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri atas: kelautan dan perikanan pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Berikut adalah penjelasan serta data terkait urusan pemerintah pilihan.

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Sumber daya perikanan di Kabupaten Pangandaran meliputi sumber daya perikanan tangkap dan budi daya dan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan di masa depan, namun masih belum secara optimal tergali dan dimanfaatkan. Sedangkan untuk kelompok

usaha didominasi oleh kelompok nelayan. Produksi ikan sendiri mencakup semua hasil penangkapan/budi daya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi yang dicatat tidak hanya produksi yang dijual saja tetapi termasuk produksi yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun yang diberikan kepada nelayan/pekerja sebagai upah. Tidak termasuk ikan yang diperoleh dalam rangka olah raga atau rekreasi, juga ikan yang dibuang kembali ke laut setelah ditangkap atau ikan yang dibuang karena terkena racun, pencemaran, atau penyakit. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/budi daya. Berikut merupakan hasil capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 62 Hasil Capaian Kinerja Urusan kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Produksi Ikan	Ton	2.517,61	2.757,86	1.522,53	1.687,89	1.572,23
Target Daerah	Ton	2.931	2.941	2.947	2.950	1.537,79
Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kapita /Tahun	20,5	22,5	23,1	22,1	22,6
Jumlah Kelompok Nelayan	Kelompok	194	195	241	243	245
Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	Ton	2.344,76	2.498,91	1.282,54	1.374,42	1.276,67
Produksi Benih Ikan	Ekor/Tahun	6.825.978	8.617.470	11.728.291	96.500	0

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah produksi ikan pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan musim cuaca yang tidak menentu sehingga produksi ikan juga tidak menentu. Sedangkan jumlah konsumsi ikan mengalami angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan semakin giatnya sosialisasi gemar makan ikan yang dilakukan sehingga masyarakat sadar akan pentingnya makan ikan.

Jumlah kelompok nelayan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya dorongan dari diri sendiri untuk berkelompok, sehingga mereka bisa terakomodasi kegiatan dan aktifitasnya oleh pemerintah. Sedangkan produksi benih ikan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dikarenakan tidak adanya indukan ikan.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Bidang pariwisata akan selalu menghadapi tantangan yang kompleks dalam menunjang peningkatan ekonomi. Manajemen pengelolaan pariwisata akan mempengaruhi tingkat pengelolaan potensi wisata yang dimiliki daerah tersebut terhadap daya tarik masyarakat untuk berwisata di daerah tersebut. Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah yang berpotensi sebagai kawasan wisata andalan. Kunjungan wisata selalu naik di setiap tahun. Perkembangan dalam sektor wisata Kabupaten Pangandaran lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 63 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Orang	4.045.704	3.775.273	2.842.022	3.127.174	4.112.044
Jumlah Kunjungan	Orang	132.978	117.767	88.484	0	1.177

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Wisatawan Mancanegara						
Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	Rp	19.813.64 7.250	18.472.85 8.000	13.786.56 8.250	15.126.46 8.000	29.383.78 8.500
Jumlah Penerimaan Sektor Pariwisata	Rp	19.813.64 7.250	18.472.85 8.000	13.786.56 8.250	15.126.46 8.000	29.383.78 8.500
Jumlah Rumah Makan/Restoran	Unit	192	203	203	203	211
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Milyar	932,14	1.060,12	1.091,41	1.162,85	1.325,48
Jumlah Hotel	Unit	311	378	383	405	434

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2023

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisata domestik dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami angka yang fluktuatif dimana penurunan yang signifikan terjadi ditahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan sudah tidak adanya pandemi Covid-19 sehingga kondisi semakin normal. Jumlah penerimaan sektor pariwisata pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan yang signifikan karena sudah tidak adanya pembatasan akibat Covid-19. Selain itu, pada tahun 2019 tinggi karena ini dihitung berdasarkan akhir tahun ketika 2020 dan terjadi hook besar sehingga jumlah kunjungan wisata menurun drastis. Hal ini dapat bisa dilihat dari keselarasan dengan jumlah PAD yang masuk.

Jumlah hotel dan jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2018 hingga tahun 2022 setiap tahunnya mengalami kenaikan dimana pada tahun 2022 terdapat sebanyak 211 rumah makan/restoran dan 434 hotel di Kabupaten Pangandaran. Hal ini dikarenakan adanya penggunaan sistem OSS sehingga

mempermudah pembuatan izin membuka usaha Rumah makan dan restoran.

2.1.3.3.3 Pertanian

Sektor pertanian dalam pengembangannya sangat bervariasi mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang saat ini sedang berkembang selain itu juga menjadi potensi dan peluang pasar yang cukup baik, diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, tomat, cabe merah, cabe rawit, manggis, durian, dan pisang. Berikut adalah capaian urusan pertanian Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018-2022.

Tabel 2. 64 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	N/A	N/A	N/A	21	17
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	N/A	N/A	N/A	0,62	0,10
Produksi sektor pertanian	ton	243.971,9 1	238.926,3 2	234.213,9 0	236.035, 49	227.840,2 7
Produksi sektor perkebunan	Ton	86.042,90	87.032,25	86.624,89	86.618,4 5	87.260,45
Produktivitas Padi	Ton/Ha	6,2	6,2	6,3	6,3	6,22
Luas Lahan Sawah	Ha	16.564	16.564	16.564	16.747	16.727
Produktivitas Jagung	Ton/Ha	6,26	5,97	6,01	6,45	6,24
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya per Hektar	Ton	5,83	6,17	6,3	6,2	6,24
Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Ton	209.879,3 4	205.003,3 8	205.981,1 2	214.265, 66	210.144,6 8

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kontribusi PDRB Konstan dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Milyar Rupiah	1.749,64	1.805,52	1.855,81	1.898,15	1.963,55
Jumlah Kontribusi PDRB Harga Berlaku dan Sektor Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	Milyar Rupiah	2.822,71	3.050,50	3.143,79	3.241,83	3.485,23
Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok	1.181	1.202	1.348	1.230	1.448

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa produksi sektor pertanian pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan perubahan cuaca yang sulit di prediksi sehingga pelaksanaan kegiatan dilapangan terganggu dan harus ikut menyesuaikan sehingga mempengaruhi musim tanam dan panen. Sedangkan produksi sektor perkebunan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penambahan tanaman yang ditahun sebelumnya belum menghasilkan dan ditahun 2022 menjadi tanaman menghasilkan (panen).

Produksi padi dan produktivitas jagung pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan perubahan cuaca yang sulit diprediksi sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan terganggu dan harus ikut menyesuaikan sehingga mempengaruhi musim tanam dan panen. Sedangkan cakupan bina kelompok tani pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yakni menjadi 1.448 kelompok. Semakin banyak kelompok tani yang dibina akan memudahkan pemberian bantuan hingga menghitung bagaimana potensi pertanian di Kabupaten Pangandaran.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Perdagangan merupakan unsur dalam pelaksanaan dalam mendukung urusan pemerintah untuk peningkatan ekonomi di sektor perdagangan. Bidang perdagangan akan selalu menghadapi tantangan peningkatan dalam mendorong peningkatan ekonomi dengan melihat potensi daerah Kabupaten Pangandaran. Capaian kinerja urusan perdagangan dalam waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 65 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Nilai ekspor daerah	Rp	91.005.691.618,00	59.833.038.627,00	108.822.663,83	169.354.600.717,78	124.522.765.710,00
Persentase Pertumbuhan ekspor	%	N/A	-34,25	81,88	55,62	-26,47
Persentase peningkatan nilai ekspor perdagangan	%	N/A	-34,25	81,88	55,62	-26,47
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,15	20,17	19,52	19,53	19,79
Nilai PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	RP (Miliar)	2085,53	2281,84	2243,97	2368,26	2605,46

Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Pangandaran, 2023

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai ekspor bersih pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan tidak ada permintaan ekspor beberapa komoditi salah satunya komoditas kapulaga. Demikian juga dengan persentase pertumbuhan ekspor di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yang dikarenakan tidak ada permintaan ekspor beberapa komoditi.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 yakni meningkat dibandingkan tahun 2021 menjadi sebesar 19,79%. Hal ini dikarenakan mulai pulihnya aktivitas perdagangan pasca pandemi Covid-19 yaitu dengan dibukanya berbagai pusat pembelanjaan, pasar-pasar, serta dibukanya objek-objek wisata di Pangandaran yang berdampak pada aktivitas perdagangan hotel dan restoran. Demikian juga dengan nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga mengalami kenaikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan mulai pulihnya ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat juga semakin membaik.

2.1.3.3.5 Perindustrian

Perindustrian merupakan unsur dalam pelaksanaan urusan pemerintah untuk peningkatan ekonomi. Urusan perindustrian selalu mengalami tantangan yang kompleks dalam upaya peningkatan ekonomi. Capaian kinerja urusan perindustrian dalam waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 66 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah industri baru	Industri	N/A	19	13	40	419
Persentase pertumbuhan industri	%	N/A	-0,005	0,004	0,011	11,71
Cakupan bina kelompok pengrajin	%	N/A	0,45	0,52	0	6

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	4,85	4,79	4,78	4,88	5,04
Nilai PDRB Sektor Industri	RP	501.950.000.000	542.220.000.000	549.520.000.000	592.380.000.000	663.410.000.000

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan industri Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 yakni menjadi sebesar 11,71%. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah industri baru yang mengalami kenaikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni menjadi sebanyak 419 industri. Hal ini dikarenakan adanya pendataan industri serta pemberdayaan IKM di Kabupaten Pangandaran.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami angka yang fluktuatif dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Hal ini dikarenakan pulihnya aktivitas/kegiatan sektor industri. Sedangkan cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan yang signifikan yakni menjadi sebesar 6%. Hal ini dikarenakan adanya pembinaan dan pemberdayaan kelompok pengrajin.

2.1.3.3.6 Transmigrasi

Pelaksanaan sektor transmigrasi melibatkan adanya kerja sama antar pemerintah daerah baik itu melibatkan daerah pengirim maupun daerah yang menerima dengan pemerintah pusat yang menjadi fasilitator. Berikut merupakan hasil capaian kinerja urusan transmigrasi Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 67 Hasil Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Transmigrasi Swakarsa	KK	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, 2023

Sejak tahun 2018 hingga 2022, Kabupaten Pangandaran tidak melaksanakan transmigrasi baik dalam bentuk transmigrasi umum maupun swakarsa. Hal ini dikarenakan tidak diberangkatkannya calon transmigran selama kurang lebih 3 tahun disebabkan adanya Pandemi Covid-19.

2.1.3.4 Fokus Layanan Pendukung, Penunjang, Pengawasan Urusan Pemerintahan

Urusan penunjang urusan pemerintah pemerintah pada sub bab ini akan membahas mengenai keuangan daerah Kabupaten Pangandaran, kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Pangandaran, hingga SilPa Perhitungan anggaran.

2.1.3.4.1 Perencanaan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan diperlukan untuk menentukan target keberhasilan, sehingga dari perencanaan terdapat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Berikut ini adalah hasil kinerja perencanaan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022.

Tabel 2. 68 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP Unsur Perencanaan	%	22,22	22,09	22,24	22,42	20,10
Persentase Sinergitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan	%	94,26	98,17	97,75	67,03	62,95
Nilai SAKIP Bappeda	%	A (89,71)	A (89,86)	A (89,88)	B (65,8)	B (67,72)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran, 2023

Urusan perencanaan telah berjalan semakin baik dari tahun ke tahun. Nilai SAKIP Bappeda mengalami penurunan yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 yakni sebesar 67,72%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan perhitungan komponen yang dinilai menjadi 4 komponen (Evaluasi Kinerja) sesuai Permenpan-RB Nomor 88 Tahun 2021. Sedangkan persentase sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan pada tahun 2022 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan daerah yang terintegrasi dari proses perencanaannya, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran serta penilaian kinerja pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi.

2.1.3.4.2 Keuangan

Bidang urusan keuangan merupakan urusan penunjang dalam pelaksanaan pemerintah untuk mendukung perencanaan, pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah di bidang keuangan. Berikut ini adalah Realisasi kinerja Bidang Urusan Keuangan Kabupaten Pangandaran:

Tabel 2. 69 Hasil Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP dan Kinerja Keuangan BPKD	Nilai	A	A	A	B	N/A
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
Persentase Peningkatan Pengelolaan PAD	%	33,05	3,23	-8,31	66,35	50,64

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran, 2023

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 (Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*: menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia). Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atau *Qualified Opinion*: menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

Opini Tidak Wajar atau *Adversed Opinion*: menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pernyataan

Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Dari tabel di atas terlihat bahwa opini BPK terhadap laporan keuangan daerah selama tahun 2018-2021 adalah WTP sedangkan pada tahun 2022 menjadi WDP. Hal ini dikarenakan adanya kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola entitas. Ditambah dengan adanya beban target yang harus di penuhi menjelang habis masa kepala daerah menjabat.

2.1.3.4.3 Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan

Sumber daya aparatur dalam suatu pemerintahan harus selalu ditingkatkan pengembangan kapasitasnya agar dapat beradaptasi secara cepat dengan perubahan lingkungan di instansi. Kepegawaian, pendidikan serta pelatihan merupakan penunjang urusan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam memberikan pelayanan publik ke depan, sumber daya aparatur akan selalu menghadapi tantangan yang kompleks dalam mendukung kinerja pemerintah Kabupaten Pangandaran. Peningkatan kemampuan melalui kependidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh Badan Kepegawaian untuk meningkatkan kualitas dari ASN. Berikut ini adalah realisasi kinerja kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Kabupaten Pangandaran:

**Tabel 2. 70 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian,
Kependidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	2,83%	13,78%	0,57%	11,73%	24%
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah	%	14,48%	11,82%	3,30%	1,49%	10%
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Orang	29	25	28	26	32
Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Orang	110	119	119	104	129
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Orang	2.527	2.710	2.094	2.047	2.066
Persentase OPD yang Tidak terdapat Hukuman Disiplin	%	94,12	80	80	90	97,22%
Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)	Skor	57,85	58,65	38,92	53,04	55,84

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami angka yang fluktuatif dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan teranggarkannya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. Indeks Profesionalitas ASN dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021 yakni menjadi sebesar 55,84. Meskipun demikian hal ini masih tergolong rendah dikarenakan adanya perubahan anggaran, pengumpulan data kinerja terhambat, mekanisme

pengumpulan data *ter-update* yang diperlukan untuk perhitungan IP ASN kurang mendapat perhatian dari SKPD.

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada instansi pemerintah sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang fluktuatif dimana pada tahun 2022 yakni sebanyak 32 orang. Demikian juga dengan jumlah Jabatan Administrasi (JA) pada instansi pemerintah pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan adanya anggaran yang memadai serta penyelenggara mendapatkan assessor yang kompeten dan bersertifikat.

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Menurut UU No 11 Tahun 2019, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. Sedangkan pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian dan pengembangan merupakan bentuk garda daerah untuk membuat pemerintahan terus maju dan mampu menciptakan inovasi baru. Berikut adalah capaian urusan penelitian dan pengembangan Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022:

Tabel 2. 71 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kelitbangan dalam RKPD	Dokumen	8	8	8	9	6
Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD	Dokumen	8	8	8	9	6
Persentase Implementasi	Persen	100	100	75	44,44	66,67

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rencana Kelitbangan						

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase implementasi rencana kelitbangan sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan meskipun belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi Covid-19.

2.1.3.4.5 Pengawasan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan diperlukan agar tidak terdapat pelanggaran disiplin dan penyelewengan kekuasaan. Pengawasan merupakan penunjang urusan dalam pelaksanaan pemerintahan dalam mendukung Sumber Daya Manusia, Pembangunan dan Pelayanan. Pengawasan menjadi salah satu sektor yang penting dan harus dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas mengawasi yaitu Inspektorat. Realisasi hasil kinerja di bidang pengawasan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 72 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Kapabilitas APIP (1 s/d 5)	Skor	2	2	2	2	2

Indikator	Satuan	Capaian				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (1 s/d 5)	Skor	3	3	3	3	3
Persentase Unit Kerja yang melaksanakan RB dan Pembangunan ZI Daerah	%	0	7,4	7,4	29,6	0

Sumber: Inspektorat Kabupaten Pangandaran, 2023

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator urusan pengawasan bersifat stagnan. Hal ini dikarenakan dalam penilaian penetapan tujuan kualitas sasaran strategis OPD belum berorientasi hasil; atas komponen penetapan tujuan pada program dan kegiatan yang tidak terkait dengan sasaran, maka perlu segera direvisi, agar tidak menimbulkan ketidakefektivan, ketidakefisienan, dan/atau bahkan kerugian keuangan negara/daerah; dalam penilaian struktur dan proses mengindikasikan bahwa secara umum pengendalian intern belum diimplementasikan secara konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran walaupun sebagian besar pengendalian pada komponen struktur dan proses telah dilaksanakan; manajemen risiko pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran perlu dilakukan secara konsisten baik pada resiko strategis maupun risiko operasional; pimpinan OPD belum sepenuhnya mendorong penerapan manajemen risiko, melalui penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja; pimpinan OPD belum menggunakan kuasa dan wewenangnya untuk mendorong sikap antikorupsi dalam pengambilan keputusan dan kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan edukasi anti korupsi.

Untuk indikator persentase unit kerja yang melaksanakan RB dan pembangunan ZI daerah pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi menjadi 0 dikarenakan adanya peraturan baru terkait pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yaitu Permenpan RB nomor 90 Tahun 2021. Sesuai ketentuan dimaksud, terdapat aspek pengukuran

keberhasilan baru dalam pembangunan zona integritas yaitu reform yang dipengaruhi oleh komitmen dalam perubahan, komitmen pimpinan, dan membangun budaya kerja. Selain itu berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluasi Pembangunan ZI yang dilakukan terhadap empat unit kerja yang diusulkan bahwa untuk komponen hasil yaitu nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survey Persepsi Anti Korupsi nilainya masih kurang. Untuk perbaikan selanjutnya perlu dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam upaya meningkatkan pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK dan WBBM sesuai Permenpan RB nomor 90 Tahun 2021.

2.1.3.4.6 Pemerintahan Umum

Wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah. Bakesbangpol memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat. Berikut ini akan disajikan data realisasi kinerja untuk Unsur Pemerintahan Umum dari Tahun 2018-2022:

Tabel 2. 73 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kejadian Konflik	Konflik	1	1	0	3	NA
Peningkatan jumlah masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa	Orang	150	0	280	215	NA
Peningkatan cakupan kemitraan dalam	Orang	75	238	190	91	NA

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
pengembangan wawasan kebangsaan						
Angka Partisipasi masyarakat	%	79,04	82,1	83,88	0	NA
Meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat	%	79,04	82,1	83,88	85	NA
Persentase masyarakat yang memahami Kesatuan Bangsa	%	NA	NA	NA	75	80
Persentase Informasi ATHG yang tersampaikan	%	NA	NA	NA	81	83,57
Persentase masyarakat yang memahami demokrasi	%	NA	NA	NA	78	77
Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	NA	NA	NA	89,86	62,7

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran, 2023

Pada tahun 2022, indikator jumlah kejadian konflik, peningkatan jumlah masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa, peningkatan cakupan kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan, angka partisipasi masyarakat, meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat sudah tidak digunakan lagi. Indikator-indikator tersebut diganti dengan persentase masyarakat yang memahami kesatuan bangsa, persentase informasi ATHG yang tersampaikan, persentase masyarakat yang memahami demokrasi, nilai sakip badan kesatuan bangsa dan politik.

Persentase informasi ATHG yang tersampaikan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan Optimalnya upaya mendapatkan informasi ATHG sebagai upaya deteksi dini pencegahan konflik. Demikian juga dengan indikator persentase masyarakat yang memahami kesatuan bangsa pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan pembinaan tentang kesatuan bangsa berhasil dilaksanakan karena banyak peserta yang memahami mengenai kesatuan bangsa.

2.1.3.4.7 Sekretariat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Tabel 2. 74 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	N/A	CC (51,60)	CC (52,05)	CC (53,64)	CC (56,48)
Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	98	166,67	166,67	166,67	166,67
Persentase pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang sesuai dengan SPM	%	Baik	Baik (81,18)	Baik (84,49)	Baik (84,92)	Baik (84,46)
Survey Kepuasan Masyarakat	Predikat	B (78,62)	B (82,62)	B (83,52)	B (84,92)	B (86,48)
Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik	%	N/A	95	97,3	91,83	93,12
Nilai AKIP Pemda	Predikat	B (60,82)	B (65,90)	B (66,73)	B (66,86)	B (67,72)

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, 2023

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2019 hingga tahun 2022 secara nilai mengalami peningkatan yakni pada tahun 2022 sebesar 56,48. Sedangkan secara predikat yakni memperoleh predikat CC. Hal ini dikarenakan sosialisasi/implementasi terkait penerapan reformasi birokrasi belum maksimal dan masih kurangnya pemahaman dan komitmen seluruh perangkat daerah; Tim RB/Pokja RB tidak

berjalan secara maksimal dengan tidak adanya kejelasan mengenai peran dan tanggungjawab setiap komponen, aspek dan indikator RB; belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)/jadwal pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi; Tim Asessor PMPRB Unit Organisasi/OPD belum mendapatkan pelatihan; belum adanya pembentukan Agen Perubahan (*Agent of Change*) dan role model; tidak adanya monitoring dan evaluasi dari Tim RB/Pokja RB secara berkala; terdapat penilaian pada Komponen Pengungkit di Area Hasil Antara Area Perubahan yang belum dilaksanakan seperti: Sistem Merit, Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Pengelolaan Aset, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran; dan belum adanya *reward*/perhatian khusus berupa perlakuan khusus dari pimpinan terhadap unit kerja yang berhasil melaksanakan reformasi. Hal ini dapat digunakan sebagai motivasi daerah untuk bisa menjadi lebih baik di tahun-tahun berikutnya.

Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2022 yakni sebesar 86,48%. Hal ini dikarenakan adanya komitmen unit pelayan publik dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik seluruh unit pelayanan perangkat daerah; semua perangkat daerah mendukung diselenggarakannya Survei Kepuasan Masyarakat meskipun dengan keterbatasan anggaran dan SDM; melakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja pelayanan publik dan menjadikan bagian dari materi pemeriksaan oleh aparaturnya pengawas internal; meningkatkan standar pelayanan publik pada perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku; memperluas cakupan zona kepatuhan standar pelayanan publik pada perangkat daerah, kecamatan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2.1.3.4.8 Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan

terhadap tugas dan fungsi DPRD. Urusan Sekretariat DPRD merupakan hal yang penting dalam menunjang segala bentuk aktivitas anggota legislatif dalam menjaring aspirasi masyarakat di daerah. Sekretariat DPRD merupakan urusan yang berkaitan dengan hal-hal penunjang anggota legislatif dalam menjalankan seluruh aktivitas kinerjanya. Untuk menunjang pembangunan Daerah supaya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat maka legislatif melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat. Setiap tahunnya sekretaris dewan mampu untuk menerbitkan rencana tahunan tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Realisasi kinerja yang berkaitan dengan Sekretariat DPRD di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 75 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Pangandaran	Surat Keputusan	188.4/ Kpts.0 1.a/DP RD/201 8	188.4/ Kpts. 01/DP RD/20 19	188.4/ Kpts. 01/DP RD/20 20	188.4/ Kpts. 34/DP RD/20 21	188.4/K pts.28/ DPRD/2 022
Persentase Kenaikan Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	%	67,40%	81,38%	83,54%	83,35%	85,28%

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, 2023

Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa terdapat kenaikan tingkat kepuasan pelayanan sekretariat DPRD menjadi 85,28% di tahun 2022 yang sebelumnya hanya 83,35% di tahun 2021. Hal ini dikarenakan terfasilitasinya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.

2.1.3.4.9 Penanggulangan Bencana

Bencana tsunami dan gempa bumi merupakan dua bencana yang cukup sering terjadi dan berdampak kepada minat wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran. Berikut merupakan realisasi kinerja urusan penanggulangan bencana Kabupaten Pangandaran tahun 2018-2022:

Tabel 2. 76 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase desa/kelurahan/kampung rawan bencana yang mendapat/ memperoleh informasi peringatan dini bencana	%	69	68,8	68,8	80,6	100
Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	24	27	29	34,05	20,43
Persentase Korban Bencana yang mendapatkan penanganan	%	0,09	0,09	2,4	100	100
Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan	%	100	100	0	100	100
Persentase jumlah kerusakan akibat bencana yang direhabilitasi	%	100	100	0	100	100
Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	BB (80)	A (85,65)	A (86,01)	B (60,50)	60,55
Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	168,52	145,44	145,44	129,21	137,36
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Kali	40	67	12	26	N/A
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	Kali	62	89	30	35	N/A

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, 2023

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase desa/kelurahan/kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, dan sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia. Indeks Kapasitas Daerah pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yakni menjadi sebesar 137,36.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah akan menjelaskan tentang kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi, sumber daya manusia dan daya saing pariwisata.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Pengeluaran per kapita dapat diartikan sebagai perbandingan total biaya yang telah dikeluarkan untuk konsumsi seluruh anggota rumah tangga dalam kurun waktu satu bulan yang dibagi dengan banyaknya jumlah anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan kemampuan daya beli (BPS, 2020). Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat dihitung dari angka konsumsi rumah tangga per kapita, dengan kata lain yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran ini dibagi berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran, karena semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Oleh karena itu, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat

kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2. 77 Hasil Capaian Kinerja Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi per Kapita	Rp	N/A	590.032,00	635.968,00	648.636,00	N/A
Persentase Konsumsi	%	N/A	N/A	56,2	54,98	N/A
Pengeluaran Nonmakanan per Kapita	Rp	N/A	1.067.368,00	1.131.678,00	1.179.731,00	N/A
APBD	Rp	1.108.573.838.440	1.287.690.789.071	1.395.046.653.495	1.473.090.741.881	1.282.067.392.061,00
SiLPA	Rp	36.638.676.690	66.887.105.830	79.728.538.874	20.000.000.000	21.000.000.000,00

Sumber: Diolah Penyusun, 2023

Terlihat pada di atas, capaian fokus kemampuan ekonomi daerah untuk keuangan suatu daerah diperlihatkan dari jumlah APBD suatu daerah, apabila semakin tinggi jumlah APBD maka akan semakin tinggi pula kemampuan keuangan suatu daerah tersebut. Pada tabel di atas terlihat bahwa APBD Kabupaten Pangandaran mengalami angka yang fluktuatif dimana terjadi penurunan pada tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena jumlah peningkatan pendapatan di suatu daerah maka akan diiringi dengan peningkatan pembiayaan, karena beban belanja suatu daerah tersebut juga ikut bertambah.

SiLPA mempunyai kepanjangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Dalam perumusan APBD yang ideal, angka SiLPA yang muncul seharusnya sama dengan nol, yang berarti bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang ada. Angka SiLPA di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 21.000.000.000.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas di suatu wilayah atau infrastruktur yang dapat menunjang daya saing daerah dan keterkaitan dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain jumlah orang yang dapat diangkut oleh angkutan umum dan jumlah orang melalui terminal, penataan wilayah, fasilitas bank dan nonbank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, restoran/rumah makan, dan ketersediaan penginapan.

Peran fasilitas di suatu wilayah atau infrastruktur yang dapat menunjang daya saing daerah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 78 Hasil Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan	Km	504.31	504.31	504.31	504.31	504.31
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah	58.070	65.311	48.150	52.341	50.531
Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Jumlah	10	24	12	11	1
Rasio izin trayek	Jumlah	0,0024	0,0057	0,0028	0,0004	0,0002
Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	64	50	45	62	1347
Jumlah Angkutan Darat	Jumlah	2.685	2.587	2.405	2.570	2.665
Jumlah penumpang angkutan darat	Jumlah	358.988	631.396	474.383	482.441	487.356
Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	Jumlah	101	129	132	194	2.665
Jumlah angkutan umum	Jumlah	165	165	165	195	133
Jumlah pemasangan rambu-rambu	Jumlah	757	782	835	937	1168
Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Jumlah	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Tabel Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	466.838	458.363	473.231	491.411	483.573
Jumlah orang/barang melalui dermaga	Jumlah	18.151	20.515	33.657	33.656	25.122

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah orang/barang melalui terminal	Jumlah	446.110	435.217	473.231	535.112	483.573
Jumlah orang/barang melalui bandara	Jumlah	2.577	2.631	1.576	2.135	2.574

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran 2023

Tabel di atas memperlihatkan tentang kemampuan Kabupaten Pangandaran yang berkaitan dengan fasilitas wilayah dan infrastruktur. Jika dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, tidak ada peningkatan panjang jalan di Kabupaten Pangandaran, tetap sepanjang 504,31 km. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah orang/barang melalui terminal yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, peningkatan tertinggi ada di tahun 2020 menuju 2021 yaitu peningkatannya sebesar 61.881 orang. Peningkatan serupa juga terjadi pada jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, peningkatan terbesar terdapat pada tahun 2020 menuju 2022 yaitu sebesar 18.180. Berdasarkan data-data tersebut kondisi jalanan di Kabupaten Pangandaran mulai mengalami kepadatan, karena peningkatan jumlah penumpang angkutan darat tidak diselaraskan dengan pengembangan infrastruktur jalan yang memadai.

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal untuk jangka panjang. Penanaman modal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan dapat menciptakan lapangan kerja yang baru, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu investasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan di suatu daerah.

Iklim investasi yang baik juga dapat berpengaruh terhadap daya saing suatu daerah, semakin baik iklim investasi maka akan membuat

daya saing daerah juga meningkat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat investasi di suatu daerah antara lain adalah angka kriminalitas, jumlah aksi demo yang terjadi, waktu yang dibutuhkan untuk proses perijinan, jumlah dan jenis pajak retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa yang berstatus swasembada terhadap total desa. Beberapa peran iklim investasi terhadap daya saing daerah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 79 Hasil Capaian Kinerja Urusan Iklim Investasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Investor PMDN	Jumlah	429	131	2.124	1.050	NA
PMA	Rp	17.750.000.000	0	0	0	31.010.000.000
PMDN	Rp	205.291.216.995	471.716.357.987	349.898.121.679	219.437.739.336	1.750.354.863.491
Jumlah investasi (PMA/PMDN)	Rp	205,3 M	471,8 M	349,9 M	795,7 M	1.781,4 M

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah investasi PMDN mempunyai jumlah yang fluktuatif setiap tahunnya, hal tersebut juga terdapat pada jumlah investor PMDN yang ada di Kabupaten Pangandaran. Pada tahun 2020 jumlah investor PMDN meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019, tetapi jumlah investasi PMDN tidak lebih tinggi daripada tahun 2019, hal tersebut perlu ditelusuri apakah jumlah investasi dipengaruhi oleh banyaknya jumlah investor yang ada di Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran harus lebih memperhatikan dan menerapkan cara-cara untuk mengoptimalkan capaian iklim investasi yang ada di daerahnya.

Jumlah investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan adanya kemudahan perizinan melalui sistem OSS sehingga

para investor dapat dengan mudah menanamkan modalnya untuk melakukan usaha di Kabuapten Pangandaran.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah daerah, karena sumber daya manusia yang baik dapat memberikan sumbangan pikiran dan upaya untuk mencapai tujuan di suatu daerah. Fokus sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari rasio ketergantungan yang terdapat pada tabel 2.80 berikut ini.

Tabel 2. 80 Rasio Kelulusan S1/S2/S2 Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
Lulusan S1	Jumlah	554	582	224	100	N/A
Lulusan S2	Jumlah	58	61	0	1	N/A
Lulusan S3	Jumlah	0	0	0	0	N/A

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, 2023

Terlihat pada tabel di atas jumlah lulusan dengan tingkat pendidikan sarjana (S1) menjadi dominasi di Kabupaten Pangandaran. Lulusan magister tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan, tetapi kemudian menurun di tahun 2020. Sedangkan untuk lulusan doktoral di Kabupaten Pangandaran belum ada, ke depannya Kabupaten Pangandaran dapat mendorong masyarakatnya agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara memberikan beasiswa daerah untuk putra putri daerah yang berprestasi. Pada tahun 2022, data-data tersebut masih belum tersedia.

2.1.4.5 Fokus Daya Saing Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat diandalkan dalam pengembangan perekonomian di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam pengembangan pariwisata, dilihat dengan dibuatnya Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pada pasal 2 dinyatakan penyelenggaraan kepariwisataan berasaskan manfaat, keseimbangan, kemandirian, partisipatif, kelestarian, dan berkelanjutan. Berdasarkan manfaat-manfaat tersebut maka pengembangan pariwisata yang baik di Kabupaten Pangandaran turut serta dalam meningkatkan daya saing daerah juga. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, seperti yang digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 81 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2022

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kunjungan Wisatawan se-Kabupaten (yang dikelola pemda)	Orang	4.045.704	3.775.273	2.261.981	3.127.174	4.112.044
PAD sektor pariwisata	Jumlah	19.813.647.250	18.472.858.000	13.786.568.250	15.126.468.000	29.383.788.500
Penyelenggaraa n festival seni dan budaya	Kegiatan	18	4	N/A	40	14
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	2	2	N/A	3	11
Jumlah Cagar budaya yang Dikelola Secara Terpadu (yang diduga)	Cagar Budaya	30	30	30	30	26

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2023

Berdasarkan tabel di atas, PAD pada sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan mulai tahun 2018 sampai tahun 2020, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda. Tidak hanya PAD sektor pariwisata yang menurun, jumlah kunjungan wisatawan juga mengalami penurunan, bahkan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta jumlah jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi turut absen di tahun 2020. Tetapi semua indikator mulai mengalami kenaikan pada tahun

2021. Pada tahun 2022, terjadi penurunan pada indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi yang dilakukan terhadap hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah salah satunya dengan melihat indikator kinerja program (*outcome*). Evaluasi dilakukan agar dapat terlihat ketercapaian program dengan target perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sudah sesuai atau belum. Dalam hal ini, perangkat daerah telah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja perangkat daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati melalui Bappeda. Tabel berikut menyajikan realisasi indikator kinerja program (*outcome*) tahun 2018-2022.

Tabel 2. 82 Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	
2.2	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
2.2.1.1	Pertumbuhan PDRB	5,41	5,96	-0,05	3,67	5,03	<
2.2.1.2	Indeks Gini	0,303	0,310	0,335	0,320	0,294	<
2.2.1.3	Penduduk Miskin (PO)	8,12	7,17	8,99	9,65	9,32	<
2.2.1.4	Laju Inflasi	3,24	1,72	1,61	1,17	6,65	=
2.2.1.5	Indeks Pembangunan Manusia	67,44	68,21	68,06	68,28	69,03	=
2.2.2.1	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,04	12,06	12,07	12,08	12,11	
2.2.2.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	77,74	75,08	76,79	74,75	79,92	
2.2.2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,58	4,48	5,08	3,25	1,56	>
2.2.3.1	Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	18	4	N/A	40	1	<
2.2.3.1	Jumlah Klub Olahraga	127	127	146	146	146	
2.3	PELAYANAN UMUM						
2.3.1	Pelayanan Umum Wajib Dasar						
2.3.1.1	Pendidikan						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	99,55	104,5 3	102,8 1	103,5 4	103,6 0	>
	Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	95,84	94,64	95,72	94,59	85,57	>
	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	91,24	85,83	83,94	84,79	84,31	
	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	6,53	6,73	N/A	11,05	15,30	
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	95,34	95,19	95,76	95,84	99,99	>
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	82,32	84,72	84,62	84,97	84,63	>
	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	67,41	67,92	67,48	67,27	66,78	
	Angka Partisipasi Murni Perguruan Tinggi	5,14	4,84	N/A	7,93	12,54	
	Jumlah Guru Berijazah S1/DIV	2947	4527	4349	4349	4171	>
2.3.1.2	Kesehatan						
	Prevalensi Balita Stunting	4,1	3,3	3,94	3,94	2,21	
	Angka Harapan Hidup	70,84	71,12	71,4	71,6	71,89	
	Jumlah Perawat	355	355	446	446	569	
	Jumlah Bidan	370	373	377	377	456	
	Jumlah Farmasi	14	48	136	136	108	
	Jumlah Ahli Gizi	12	20	20	20	46	
	Jumlah Dokter Spesialis	0	0	12	16	20	
	Jumlah Dokter Gigi	7	9	12	12	20	
	Jumlah Dokter Umum	36	43	56	56	63	
	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	73,3	100	100	100	100	
2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Panjang Jalan Kondisi Baik	269.7 5	401.2	429,1 29	445,1 8	470,4 42	
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	63.58	63.58	67,57	69,50	12.89 0,79	
	Luas Areal Irigasi (Ha)	10.34 1,91	16.78 5,38	16.78 5,38	16.78 5,38	17.88 9,20	
	Persentase penduduk berakses air minum (%)	53	65	66	67	64	<
	Jumlah jembatan yang terbangun (unit)	4	4	6	1	5	
	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	60,09	83	85,09	88,28	93,28	>
2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	5,71	5,71	11,43	11,43	11,43	<
2.3.1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
	Kejadian Kebakaran Kabupaten Pangandaran	31	53	79	35	37	>
	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	24	10	37	28	24	>
2.3.1.6	Sosial						
	Jumlah PPKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	57.09 6	50.81 7	116.4 58	52.22 4	53.26 8	
	Jumlah PPKS yang tertangani	48.27 2	45.94 4	116.4 58	50.21 0	39.13 4	
	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	84,54	90,41	100	91,00	73	>
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	6,08	5,81	6,71	6,00	6,27	<
	Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina	N/A	N/A	1.427	1.531	2.006	
2.3.2	Layanan Urusan Wajib Non-Dasar						
2.3.2.1	Tenaga Kerja						
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	N/A	N/A	N/A	58,96	76,43	
2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,68	90,02	89,78	89,92	89,92	<
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,20	74,56	74,57	75,10	75,98	>
	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	26,49	26,11	24,70	25,42	24,89	<
2.3.2.3	Pangan						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Angka kecukupan Protein per kapita	68,8	70,5	70,6	58,5	57	
	Jumlah desa rawan pangan	10	9	8	6	16	
	Total desa pangan lestari	18	3	3	18	19	
	Ketersediaan pangan utama (<i>food availability</i>)	32576,42	61823,74	38727,46	14180,6	171.154,06	
	Skor PPH Konsumsi	89,5	93,2	94,5	93,4	93,3	
	Angka ketersediaan Energi	3602	6460	5525,18	5525,18	2100	
	Angka Ketersediaan Protein	275,62	180,89	350,72	350,72	57	
	Skor PPH Ketersediaan	89,5	93,2	94,5	93,4	93,3	
	Indeks Ketahanan Pangan	77,18	82,56	81,99	81,99	81,12	>
2.3.2.4	Pertanahan						
	Persentase Jumlah Kebijakan umum mengenai pedoman pelaksanaan pengembangan dan penataan batas wilayah yang diterbitkan	N/A	100	100	100	100	=
2.3.2.5	Lingkungan Hidup						
	Volume produksi sampah	167.025,2 m3	181.475,86 m3	183.136,82 m3	184.242,03 m3	188.985,16 m3	>
	Persentase Penanganan sampah	18,10 %	29,18 %	16,84 %	19,30 %	28,66 %	>
	Indeks Kualitas Air	47.78	50	51.67	50	50	<
	Indeks Kualitas Udara	84.30	85,68	77.79	88,66	88,18	>
	Indeks Kualitas Vegetasi/IKTL	52.28	52.28	65.25	68,84	69,05	>
2.3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	78,03	91,96	96,95	99,17	98,35	<
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	29,02	17,03	26,78	98,20	93,85	<
	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	3,12	26,51	14,66	56,26	51,97	<
	Persentase validasi database kependudukan	8,7	30,43	39,13	60,87	100	
2.3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Prosentase Desa Kategori Swasembada	N/A	4,30	8,60	18,28	38,7	
	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa kategori baik	26,88	44,09	59,14	58,06	65,59	
	Jumlah PKK aktif	104	104	104	104	104	
2.3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	TFR/ <i>Total Fertility Rate</i>	2,42	2,32	2,29	2,51	2,22	
	CPR/ <i>Contraceptive Prevalence Rate (%)</i>	75,15	76,41	60,25	73,37	69,81	
	Unmet Need	17,23	14,88	24,84	18,1	19,7	
	LPP/Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,57	0,57	0,96	1,24	1,17	
	Ratio Akseptor KB (%)	75,16	76,43	60,25	73,37	70,31	
	ASFR/ <i>Age Specific Fertility Rate</i>	13,45	17,61	18,01	19,81	27	
2.3.2.9	Perhubungan						
	Rasio sarana prasarana perhubungan yang ada dalam kondisi baik	70,00	76,30	76,90	78,00	96	>
	Persentase kecamatan yang terlayani angkutan umum	50	50	60	50	50	=
2.3.2.1 0	Komunikasi dan Informatika						
	Indeks SPBE	1,50	2,32	3,02	3,42	2,82	
	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat/Standar Kepuasan Masyarakat)	85,25	88,11	76,81	89,13	89,25	
2.3.2.1 1	Usaha Mikro Kecil Menengah						
	Persentase koperasi aktif	32,69	33,96	89,02	89,02	91,56	>
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	100	100	100	100	100	=
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	100	100	100	100	100	>
2.3.2.1 2	Penanaman Modal						
	Jumlah Investor PMDN	429	131	2124	1050	N/A	
2.3.2.1 3	Kepemudaan dan Olahraga						
	Jumlah Klub Olahraga	127	127	146	146	146	
	Jumlah Gedung Olahraga	42	117	117	117	117	
2.3.2.1 4	Statistik						

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Jumlah Publikasi	3	1	0	0	2	
2.3.2.1 5	Persandian						
	Jumlah Sistem Informasi yang menerapkan sistem keamanan informasi	10	16	20	21	25	<
2.3.2.1 6	Kebudayaan						
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	18	12 (Keg. Bidang)	8	40	1	<
	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	2	6 (Keg. Diluar bidang)	N/A	3	11	
	Jumlah Cagar budaya yang Dikelola Secara Terpadu	30	30	30	30	26	
2.3.2.1 7	Perpustakaan						
	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	1.169	12.567	3.931	3.104	14.740	<
	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	3.490	3.709	4.010	4.563	7.728	<
	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	N/A	1	1	265	364	<
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan	31,195	31,426	42,958	87,585	89,71	
2.3.2.1 8	Kearsipan						
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	18	18	18	18	18	
	Persentase arsip yang terjamin keamanannya	N/A	48,03	48,03	48,03	48,03	
2.3.3	Urusan Pilihan						
2.3.3.1	Kelautan dan Perikanan						
	Jumlah Produksi Ikan (ton)	2.517,61	2.757,86	1.522,53	1.687,89	1.572,23	
	Target Daerah (ton)	2.931	2.941	2.947	2.950	1.537,79	
	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	20,5	22,5	23,1	22,1	22,6	
	Target Daerah (kg/kapita/tahun)	20,1	22,04	22,9	21,3	N/A	
	Jumlah Kelompok Nelayan	194	195	241	245	214	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	2.344, 76	2.498, 91	1.282, 54	1.374, 42	1.276, 67	
	Produksi benih ikan	6.825. 978	8.617. 470	11.72 8.291	96.50 0	0	
2.3.3.2	Pariwisata						
	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	4.045. 704	3.775. 273	2.842. 022	3.127. 174	4.112. 044	
	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	132.9 78	117.7 67	88.48 4	0	1177	
	Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	19.81 3.647. 250	18.47 2.858. 000	13.78 6.568. 250	15.12 6.468. 000	29.38 3.788. 500	>
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	932.1 37	1.060. 116	1.091. 410,6 9	1.162. 850	1.289. 270	
2.3.3.3	Pertanian						
	Produktivitas Padi	6,2	6,21	6,3	6,3	6,22	
	Luas Lahan Sawah	16.56 4	16.56 4	16.56 4	16.74 7	16.72 7	
	Produktivitas Jagung	6,26	5,97	6,01	6,45	5,63	
	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya	209.8 79,34	205.0 03,38	205.9 81,12	214.2 65,66	210.1 44,68	
2.3.3.4	Perdagangan						
	Persentase Pertumbuhan ekspor	N/A	-34,25	81,88	55,62	10	
	Persentase peningkatan nilai ekspor perdagangan	N/A	-34,25	81,88	55,62	10	>
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	20,15	20,17	19,52	19,53	19,54	
2.3.3.5	Perindustrian						
	Persentase Pertumbuhan Industri	N/A	-0,005	0,004	0,011	11,71	
	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	N/A	0,45	0,52	0	6	
2.3.3.6	Transmigrasi						
	Persentase Transmigran Swakarsa	0	0	0	0	0	<
2.3.4	Layanan Pendukung, Penunjang, Pengawasan Urusan Pemerintahan						
2.3.4.1	Perencanaan						
	Nilai SAKIP Unsur Perencanaan (%)	22,22	22,09	22,24	22,42	20,10	
	Persentase Sinergitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan	94,26	98,17	97,75	67,03	62,95	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Nilai SAKIP Bappeda	A (89,71)	A (89,86)	A (89,88)	B (65,8)	B (67,72)	
2.3.4.1	Keuangan						
	Nilai SAKIP dan Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	A	A	A	B	N/A	
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	
	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (%)	33,05	3,23	-8,31	66,35	50,64	
2.3.4.2	Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan						
	Persentase ASN yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Teknis	2,80	1,40	10,25	11,73	24	>
	Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Manajerial	14,50	11,80	14	20	N/A	
2.3.4.3	Penelitian dan Pengembangan						
	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	8	8	8	9	6	
	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	8	8	8	9	6	
	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100	100	75	44,44	66,67	
2.3.4.4	Pengawasan						
	Menurunnya Rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD	100	100	41,30	99,89	N/A	
	Persentase SKPD yang tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP- nya berada pada Level 3	108	100	85,71	60	N/A	
	Persentase SKPD yang nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)-nya sangat baik (BB)	117,6 4	117,6 3	133,3 3	110,9 2	N/A	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	119,9 9	166,6 7	119,9 9	104,2 7	N/A	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Pemerintah (AKIP) Inspektorat						
	Persentase SKPD yang berpredikat ZI/WBK/ WBBM	0	100	40,00	50,05	N/A	
2.3.4.5	Pemerintahan Umum						
	Jumlah Kejadian Konflik	1	1	0	3	N/A	
	Peningkatan jumlah masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa	150	0	280	200	N/A	
	Peningkatan cakupan kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	75	238	190	123	N/A	
2.3.4.6	Sekretariat Daerah						
	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	CC (51,60)	CC (52,06)	CC (53,64)	CC (56,48)	
	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	98	166,6 7	166,6 7	166,6 7	166,6 7	>
2.3.4.7	Sekretariat Dewan						
	Persentase Kenaikan Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	67,40	81,38	83,54	83,35	85,28	>
2.3.4.1	Penanggulangan Bencana						
	Persentase desa/kelura- han/kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana	69	68,8	68,8	80,6	100	>
	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	24	27	29	34,05	20,43	
2.4	DAYA SAING DAERAH						
	Realisasi Pendapatan	1.137. 227.0 65.38 9,50	1.474. 724.1 69.54 4,00	1.572. 138.4 80.71 4,00	1.332. 367.8 11.46 5,00	1.226. 706.1 57.35 1,00	<

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	
	Realisasi Belanja	1.161. 646.5 78.17 0,45	1.461. 491.5 19.43 5,00	1.565. 838.4 72.27 8,00	1.349. 232.0 78.10 8,00	1.222. 318.4 90.27 6,00	<
	SILPA	3.734. 597.9 37,00	16.04 3.940. 289,0 5	22.30 8.402. 266,0 5	1.894. 671.1 55,00	2.509. 895.0 45,00	
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
	Panjang Jalan	504,3 1	504,3 1	504,3 1	504,3 1	504,3 1	
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	58.07 0	65.31 1	48.15 0	52.34 1	50.53 1	>
	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	10	24	12	11	1	<
2.4.3	Fokus Iklim Investasi						
	Jumlah Investor PMDN	429	131	2.124	1.050	NA	
	PMA	17.75 0.000	0	0	0	31.01 0.000. 000	
	PMDN	205.2 91.21 6.995	471.7 16.35 7.987	349.8 98.12 1.679	219.4 37.73 9.336	1.750. 354.8 63.49 1	
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia						
	Lulusan S1	554	582	224	100	100	
	Lulusan S2	58	61	0	1	1	
2.4.5	Fokus Daya Saing Pariwisata						
	Jumlah Kunjungan Wisatawan se-Kabupaten (yang dikelola pemda)	4.045. 704	3.775. 273	2.261. 981	3.127. 174	4.113. 221	>
	Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten	5.065. 693	5.614. 481	2.842. 022	3.000. 000	N/A	
	PAD sektor pariwisata	19.81 3.647. 250	18.47 2.858. 000	13.78 6.568. 250	15.12 6.468. 000	29.38 3.788. 500	>

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 dan SIPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di RKPD mempunyai tujuan untuk melihat capaian tingkat kemajuan progres dan kesesuaian dengan program dan kegiatan di RPJMD. Prioritas pembangunan daerah



di Kabupaten Pangandaran dibuat berdasarkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Realisasi ketercapaian kinerja indikator di kinerja sasaran berdasarkan pelaksanaan RKPD Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target RKPD tahun 2022 nantinya akan menghasilkan kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2022 seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 83 Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1.	Meningkatnya Layanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	59,76	59,72	Disdikpora	
2.	Meningkatnya Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapat penghargaan baik tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional	Jumlah pemuda berprestasi yang mendapat penghargaan	Orang	100	60	Disdikpora	
3.	Meningkatnya Kinerja Organisasi/SKPD	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	89	65,5	Disdikpora	
4.	Meningkatnya Kinerja Organisasi/SKPD	Nilai LHE AKIP Dinas Kesehatan	Nilai	67,25 – 69,00	61	Dinkes	
5.	Meningkatnya kualitas lingkungan sehat	Persentase Rumah Sehat	%	81	80	Dinkes	
		Cakupan Desa ODF (Open Defecation Free)	%	70	80		
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	67,79	133	Dinkes	
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	6,84	8		
		Prevalensi <i>Stunting</i>	%	5	4		
		Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,1	0		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	>62,5	88		
		Capaian SPM	%	100	86		
		Akreditasi Fasyankes	Level	Utama	Utama		



No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
7.	Meningkatnya budaya sehat	Cakupan Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	%	50	58	Dinkes	
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai LHE AKIP DPUTRPRKP	Nilai	67,25 – 69,00	N/A	DPUTRPRKP	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
9.	Meningkatnya permukiman layak huni yang disediakan	Persentase Rumah yang Layak Huni	%	74	41,56	DPUTRPRKP	
10.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	1,731	45,34	DPUTRPRKP	
11.	Meningkatnya Pemahaman Kesatuan Bangsa	Persentase masyarakat yang memahami Kesatuan Bangsa	%	69	80	Bakesbangpol	
		Persentase Informasi ATHG yang tersampaikan	%	70	83,57		
12.	Meningkatnya Pemahaman Demokratisasi	Persentase masyarakat yang memahami demokrasi	%	61	77	Bakesbangpol	
13.	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	68	*62,7	Bakesbangpol	*Nilai SAKIP pada tahun 2021, SAKIP 2022 akan dinilai pada awal tahun 2023
14.	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	Satpol PP	



No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
15.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Praja	Nilai LHE AKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai	68	60,25	Satpol PP	
16.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LHE AKIP BPBD	Nilai	67,03	60,55	BPBD	Belum tercapainya target dikarenakan ada dokumen yang belum tersedia
17.	Meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	144	137,36	BPBD	Indeks ketahanan daerah semakin rendah semakin baik
18.	Meningkatnya Layanan Kebencanaan	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Respon Time	14	26	BPBD	
19.	Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	%	60	66	Dinsos PMD	
20.	Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	%	37	40,63	Dinsos PMD	
21.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik	Nilai LHE AKIP Dinsos PMD	Nilai	67,25	N/A	Dinsos PMD	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
22.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	%	5,00 – 4,50	1,56	Disnaker	Pelaksanaan kegiatan pelatihan membantu mengurangi tingkat pengangguran di



No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Kabupaten Pangandaran
23.	Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Dinas Ketenagakerjaan	Nilai	73,25	N/A	Disnaker	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
24.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Nilai LHE AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Nilai	87	N/A	DLHK	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
25.	Meningkatnya Kualitas Air	Indek Kualitas Air	Indeks	51,75	50	DLHK	
26.	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	78,5	88,16	DLHK	
27.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	65,25	38,21	DLHK	
28.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai LHE AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	67,2	N/A	Disdukcapil	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
29.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	%	100	111	Disdukcapil	Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya dokumen administrasi kependudukan
30.	Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Persentase SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang menandatangani perjanjian kerja sama	%	100	25	Disdukcapil	Belum adanya jaringan privat terkait akses pemanfaatan data kependudukan



No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
		pemanfaatan data kependudukan					
31.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,58 – 0,55	1,17	DKBP3A	
32.	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	74,57	75,98	DKBP3A	
33.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	Nilai	60 – 70	N/A	DKBP3A	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
34.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan	Nilai LHE AKIP Dinas Perhubungan	Nilai	82	N/A	Dishub	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
35.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik	%	56,03	53,98	Dishub	
		Persentase Kecamatan yang Terlayani Angkutan Umum	%	0,5	0	Dishub	
36.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai AKIP	Nilai	89,66	N/A	Diskominfo	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
37.	Implementasi Penyelenggaraan E-Government	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	%	79	95,52	Diskominfo	Semua pegampu sistem memanfaatkan secara baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing



No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
		Persentase pengamanan informasi daerah	%	60	74,62	Diskominfo	Kesadaran akan pengamanan sistem lalu lintas data dan informasi
38.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Penyebaran dan Pemerataan Informasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik	%	55	66,68	Diskominfo	Peyebaran informasi melalui media sosial telaksana dengan baik
		Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	%	25	N/A	Diskominfo	Masih menunggu data dari SKPD
39.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DPMPPTSP Kabupaten Pangandaran	Persentase realisasi nilai investasi	%	6,89	1,24	DPMPPTSP	Nilai Investasi pada T.A 2022
40.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai LHE AKIP DPMPPTSP Kab.Pangandaran	Nilai	87,67	N/A	DPMPPTSP	Nilai AKIP diberikan setelah dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran
41.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada DPMPPTSP Kabupaten Pangandaran	Nilai interval pelayanan publik	Nilai	2,61 – 2,65	3,44	DPMPPTSP	Nilai interval pelayanan publik DPMPPTSP Kabupaten Pangandaran 2022
42.	Meningkatkan Kapasitas Usaha Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkat Kualitasnya	%	45.12	46,05	Diskopdagin	
43.	Pengembangan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	15	4,65	Diskopdagin	



No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
44.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perdagangan	%	5,55	N/A	Diskopdagin	Belum rilis oleh BPS
45.	Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Perindustrian	Presentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Perindustrian	%	5,96	N/A	Diskopdagin	Belum rilis oleh BPS
46.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Nilai LHE AKIP Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian	Nilai	69	N/A	Diskopdagin	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
47.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanna pendidikan secara komprehensif	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	18,56	19,16	Dispusip	Capaian Kinerja melebihi target karena adanya bantuan pengadaan koleksi perpustakaan dari Provinsi
48.	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai LHE AKIP Dispusip	Nilai	75,25	N/A	Dispusip	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
		Nilai LAKE Kabupaten/Kota	Nilai	2,764	3,93	Dispusip	Capaian Kinerja melebihi target karena ada perubahan perhitungan Nilai Lake dari Perka Nomor 38 Tahun 2015 ke Perka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan



No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Kearsipan, sehingga standar penilaiannya ikut berubah
49.	Meningkatkan produktivitas perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	0,5	- 0,19	DKPKP	
50.	Meningkatkan ketahanan pangan berbasis masyarakat	Skor pola pangan harapan	Skor	75	97	DKPKP	
51.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKPKP	Nilai LHE AKIP DKPKP	%	89,92	N/A	DKPKP	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
52.	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Lokal	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	7,5	16,82	Disparbud	
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,29	1	Disparbud	
		Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	%	15	11,85	Disparbud	
		Persentase budaya lokal benda dan tak benda yang dilestarikan	%	15	34,82	Disparbud	
53.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan professional	Nilai LHE AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	Poin	67,25-69,00	N/A	Disparbud	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
54.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura;	%	1	110,14	Distan	



No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan;	%	3	74,01	Distan	
		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan.	%	1	15,17	Distan	
55.	Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Petani	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	%	10	N/A	Distan	Masih dalam proses perhitungan
56.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	Nilai SAKIP	Nilai	92	N/A	Distan	Masih dalam proses perhitungan
57.	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	CC	N/A	Setda	On Proses
58.	Meningkatnya Kualitas Laporan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Kabupaten	Nilai	70	N/A	Setda	On Proses
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai	3	N/A	Setda	On Proses
59.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Barang/Jasa serta Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui ULP, serta Implementasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	%	95	97	Setda	
60.	Tertib administrasi Pertanahan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi	Indeks	85	60	Setda	
61.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	67	N/A	Setwan	Belum keluar penilaian dari



No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							inspektorat kabupaten
62.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Pangandaran	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,61-2,65	3,26 – 4,00	Setwan	
63.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Nilai	68,2	64,5	Inspektorat	
		Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal	Nilai	7,6	7,39	Inspektorat	
64.	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3	3	Inspektorat	
65.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai	68,13	N/A	Bappeda	On Proses
66.	Meningkatnya sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan	Presentase OPD dengan Nilai LHE AKIP Komponen Perencanaan di atas 10,95	% (OPD)	68,57% (24 OPD)	N/A	Bappeda	On Proses
67.	Pemenuhan dokumen perencanaan dan peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	%	100%	100%	Bappeda	
		Persentase rata-rata capaian realisasi IKU	%	76,85%	83,74%	Bappeda	



No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
68.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	65 – 85%	N/A	Bappeda	On Proses
69.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	1	-26,67	BKAD	Penilaian tahun 2021
70.	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Nilai	5	6,02	BKAD	Penilaian tahun 2021
		Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	Nilai	20	18,45	BKAD	Penilaian tahun 2021
		Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	5	6,02	BKAD	Penilaian tahun 2021
		Indeks Penyerapan Anggaran Daerah	Nilai	20	18,45	BKAD	Penilaian tahun 2021
		Indeks Kondisi Keuangan Daerah	Nilai	6	2,3	BKAD	Penilaian tahun 2021
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	BKAD	Penilaian tahun 2021
71.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan BMD	Penyusunan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) sesuai SAP	%	95	95	BKAD	
		Peningkatan Sertifikasi Tanah BMD	%	80	56	BKAD	



No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
		Peningkatan pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	%	70	60	BKAD	
72.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Nilai LHE AKIP BKPSDM	Nilai	67,95	63,25	BKPSDM	
73.	Meningkatnya nilai indeks profesionalitas ASN melalui dimensi kompetensi, kualifikasi, disiplin dan kinerja	Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi	Indeks	13,75	13,94	BKPSDM	
		Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi	Indeks	9,42	12,73	BKPSDM	
		Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja	Indeks	14,26	24,23	BKPSDM	
		Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin	Indeks	4,99	4,97	BKPSDM	
74.	Meingkatkan Pajak Daerah	Meingkatkan Pajak Daerah	Meingkatnya Pajak Daerah	Meingkatkan Pajak Daerah	Meingkatkan Pajak Daerah	Bapenda	
75.	Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Padaherang	Indeks/Nilai	68,5	N/A	Kec. Padaherang	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
		Indeks Pelayanan Publik	Persen	80	85,58	Kec. Padaherang	
76.	Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Mangunjaya	Indeks/Nilai	68,5	N/A	Kec. Mangunjaya	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
		Indeks Pelayanan Publik	Persen	80	87,68	Kec. Mangunjaya	
77.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan	Nilai LHE AKIP Kecamatan Kalipucang	Nilai	85,25	N/A	Kec. Kalipucang	Belum keluar penilaian dari



No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
	yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima						inspektorat kabupaten
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	80	89,1	Kec. Kalipucang	
78.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Kalipucang	Nilai	69	N/A	Kec. Pangandaran	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	84	86,13	Kec. Pangandaran	
79.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Kalipucang	Nilai	68,5	N/A	Kec. Sidamulih	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	80	88,45	Kec. Sidamulih	
80.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Kalipucang	Nilai	68,5	N/A	Kec. Parigi	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	80	91,55	Kec. Parigi	
81.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Kalipucang	Nilai	89	N/A	Kec. Cijulang	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	80	90,48	Kec. Cijulang	
82.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu	Nilai LHE AKIP Kecamatan Kalipucang	Nilai	65	N/A	Kec. Cimerak	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
	memberikan pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	83,275	83,2	Kec. Cimerak	
83.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Kalipucang	Nilai	67,68	N/A	Kec. Cigugur	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	80	84,22	Kec. Cigugur	
84.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Nilai LHE AKIP Kecamatan Kalipucang	Nilai	74,46	N/A	Kec. Langkaplancar	Belum keluar penilaian dari inspektorat kabupaten
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	85	77,2	Kec. Langkaplancar	

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2022, 2023

Secara lengkap dapat dilihat pada Matriks Evaluasi RKPD Tahun 2022 Triwulan IV yang disajikan pada **Lampiran I**.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2022 dilakukan terhadap capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penduduk Miskin. Selanjutnya capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Pangandaran disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 84 Capaian Indikator Makro Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1.	Pertumbuhan Ekonomi			
	a. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,60-5,20	5,03
	b. PDRB per Kapita (ADHK)	Rp	19.488.412,97	19.488.412,97
	c. PDRB per Kapita (ADHB)	Rp	30.444.747,68	30.444.747,68
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka			
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,50-5,00	1,56
	b. Jumlah Penganggur	Orang	21.619	6.745
3.	Kemiskinan			
	a. Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,00-7,55	9,32
	b. Jumlah Penduduk Miskin	Orang	30.710	37.910
4.	Indeks Pembangunan Manusia			
	a. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,50-69,12	69,03
	b. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,96	71,89
	c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,03	8,03
	d. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,11	12,11
	e. Pengeluaran per Kapita	Rp	9.585.238	9.389.000
5.	Ketimpangan			
	a. Rasio Gini	Poin	0,338-0,330	0,294

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2022, 2023

2.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Pangandaran Pada Masa Pandemi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia,

termasuk di Indonesia, dikategorikan sebagai bencana non alam. Adanya pandemi Covid-19 menuntut kesiapsiagaan yang harus didukung oleh kesiapan sistem kesehatan daerah yang optimal. Kabupaten Pangandaran mencoba untuk mengoptimalkan aspek upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sumber daya obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Pengoptimalan dari aspek-aspek tersebut bertujuan untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Jumlah kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Pangandaran sampai dengan bulan Mei 2022 sebanyak 7.276 orang dengan jumlah kasus sembuh sebanyak 7.065 orang dan meninggal 211 orang. Data kasus baik kasus terkonfirmasi positif, sembuh, dan meninggal terus menunjukkan kecenderungan meningkat sehingga membutuhkan upaya ketat untuk mengendalikan penularan. Hal tersebut tidak terlepas dari kaitan dengan munculnya berbagai varian virus baru, misalnya varian Delta yang meningkatkan tingkat kematian pasien yang terpapar dan juga varian omicron yang meningkatkan tingkat pasien yang tertular Covid-19.

Salah satu Langkah untuk mengendalikan angka yang terpapar virus Covid-19 adalah dengan mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*). Untuk mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*) pemerintah menetapkan pemberian vaksinasi. Hingga 5 Juni 2022, cakupan vaksinasi dosis 1 di Kabupaten Pangandaran telah mencapai angka 317.715 peserta penerima vaksin. Sedangkan untuk vaksinasi dosis 2 telah mencapai 267.774 peserta penerima vaksin, dan 79.739 peserta vaksin telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga/*booster*.

Selama masa pandemi Covid-19 kondisi ekonomi cenderung bertumbuh ke arah negatif. Hal tersebut tercermin dari komponen pembentuk PDRB, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi serta ekspor dan impor. Konsumsi rumah tangga menurun, konsumsi pemerintah teralihkan dari konsumsi untuk pembangunan daerah menjadi berubah haluan untuk penanggulangan pandemi Covid-19, investasi diperkirakan menurun, ekspor dan impor tumbuh negatif. Proyek-proyek strategis dan program kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran,

mengalami realokasi dan *refocusing* anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan sedikit mengalami penghambatan.

Selama adanya pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan kebijakan penutupan sementara dan pembatasan kunjungan wisata sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat guna menekan penyebaran dan penularan Covid-19. Hal-hal tersebut mengakibatkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada beberapa sektor unggulan, khususnya sektor pariwisata, perdagangan, perhotelan, dan restoran.

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan diperoleh dari hasil analisis gambaran umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang sudah direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah biasanya muncul dari keunggulan yang belum dipergunakan secara optimal dan kekurangan yang tidak di atasi untuk mencapai peluang yang muncul dan meminimalisasi hambatan yang terjadi. Pengoptimalan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, akan membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang keunggulan, kekurangan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan juga dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan yang diampu. Hal tersebut mempunyai tujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan

yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang agar didapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dapat dipecahkan,. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan

2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan menjadi pemicu permasalahan pembangunan daerah. Selain itu kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat juga dapat berpengaruh pada munculnya pembangunan daerah. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*.

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang sudah direncanakan, kemudian permasalahan tersebut dapat dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 85 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya pertumbuhan PDRB	1. Belum optimalnya pengelolaan dan penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Belum optimalnya kemampuan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah 2. Beberapa jenis retribusi belum terbentuk perdanya 3. Belum adanya pelayanan pajak dan retribusi berbasis elektronik 4. Belum optimalnya kemampuan aparatur pelayanan pajak dan retribusi daerah
		2. Aktivitas perekonomian di Kabupaten Pangandaran masih rendah	1. Masih rendahnya produktivitas pendapatan masyarakat 2. Rendahnya Pendapatan masyarakat, menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga keinginan untuk melakukan konsumsi menurun 3. Rendahnya permintaan barang dan jasa dari kabupaten Pangandaran 4. UMKM masih memiliki permasalahan pada permodalan dan pemasaran 5. Kabupaten pangandaran belum memiliki rumah kemas (sentra UMKM)
		3. Masih rendahnya investor yang berinvestasi di wilayah Kabupaten Pangandaran	1. Belum optimalnya pemberian kemudahan perizinan investasi 2. Kurangnya sinergi antar perangkat daerah 3. Belum optimalnya promosi dan perizinan
		4. Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan belum maksimal	1. Keterampilan Tenaga kerja belum optimal 2. Belum adanya BLK
		5. Kontribusi sektor pertanian sebagai sektor yang menyumbang kontribusi tertinggi terhadap PDRB trend pertumbuhannya cenderung menurun	1. Belum optimalnya pengolahan hasil bumi yakni pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan 2. Penurunan luas lahan pada tahun 2022



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		yakni sebesar 21% pada tahun 2021 menjadi sebesar 17% pada tahun 2022	yakni menjadi sebesar 16.727 Ha dimana pada tahun 2021 sebesar 16.747 Ha. 3. Penurunan produktivitas jagung pada tahun 2022 menjadi sebesar 6,24 ton/ha, dimana pada tahun 2021 sebesar 6,45 ton/ha 4. Penurunan produksi sub sektor peternakan 5. Penurunan produktivitas padi/bahan pangan utama lainnya per hektar dibandingkan tahun 2020 yakni sebesar 6,3 ton sedangkan pada tahun 2021 sebesar 6,2 ton dan tahun 2022 sebesar 6,24 ton
		6. Komposisi PDRB untuk sektor penyedia akomodasi dan makan minum belum menyumbang kontribusi tinggi padahal sektor ini yang di dalamnya ada kegiatan pariwisata merupakan sektor unggulan Kabupaten Pangandaran	1. Pemilik hotel dan restoran didominasi oleh penduduk yang berasal dari luar Kabupaten Pangandaran 2. Belum optimalnya promosi sektor pendukung pariwisata 3. Belum optimalnya pengembangan potensi wisata 4. Belum optimalnya infrastruktur pendukung perekonomian seperti jalan usaha tani, dan infrastruktur menuju destinasi wisata 5. Belum optimalnya aksesibilitas menuju Pangandaran
		7. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pangandaran tiap Tahun cenderung meningkat akan tetapi pertumbuhan rata-rata masih di bawah pertumbuhan PDRB Provinsi	1. Industri pengolahan yang berada di Kabupaten Pangandaran belum memberikan nilai tambah yang tinggi, 2. Belum optimalnya penggunaan produk lokal untuk kegiatan perekonomian di Kabupaten Pangandaran.
2.	Masih rendahnya PDRB per kapita	1. Pendapatan masyarakat yang masih rendah.	1. Standar hidup dari sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah 2. Tingkat pendapatan yang rendah



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		3. Tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi	1. Masih rendahnya produksi dalam daerah
		2. Kurangnya produk daerah untuk ekspor	1. Aktivitas perekonomian di Kabupaten Pangandaran masih rendah
		3. PDRB per kapita Kabupaten Pangandaran masih rendah jika dibandingkan PDRB Provinsi Jawa Barat maupun PDRB per Kapita Nasional	2. Kurang optimalnya peningkatan produktivitas sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
3.	Masih adanya prevalensi balita kurang gizi	Masih ditemukannya kasus <i>stunting</i> di Kabupaten Pangandaran	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat, 2. Kurangnya SDM kesehatan, 3. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat, 4. Masih rendahnya program-program Promotif dan preventif mengenai perilaku sehat.
4.	Persentase PAD terhadap pendapatan belum signifikan	Belum optimalnya pengelolaan potensi PAD,	1. Belum optimalnya kemampuan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah 2. Beberapa jenis retribusi belum terbentuk perdanya, 3. Belum adanya pelayanan pajak dan retribusi berbasis elektronik 4. Belum optimalnya kemampuan aparaturnya pelayanan pajak dan retribusi daerah 5. Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah 6. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah 7. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah.
5.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB masih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa	Terjadi proses transformasi perekonomian nasional, yang tadinya lebih didominasi oleh nilai komoditas	1. Sulitnya sektor pertanian akses kredit ke perbankan, juga akses ke pasar, dan beberapa masalah internal di sektor

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Barat/Kabupaten sekitar, seperti Kab. Ciamis	primer hasil produksi sektor pertanian dalam arti sempit, bergeser ke arah dominasi sektor dan atau sub sektor lainnya.	pertanian itu sendiri seperti rendahnya kualitas SDM dan teknologi 2. Kurangnya minat pemuda untuk menjadi petani sebagai profesi dan mata pencaharian sehari-hari 3. Berkurangnya lahan persawahan yang diakibatkan adanya pembangunan infrastruktur dan permukiman yang tidak terkendali
6.	RLS masih rendah	RLS masih rendah berdasarkan data tahun 2022 sebesar 8,03	1. Belum ada intervensi pemerintah daerah untuk program kesetaraan pendidikan untuk penduduk di atas usia 25 tahun/pendidikan non formal 2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan khususnya penduduk yang usianya sudah melampaui usia sekolah 3. Kurangnya sarana prasarana serta lembaga pendidikan non formal
7.	Tidak adanya Nilai Tukar Petani sebagai tolok ukur kesejahteraan Petani	Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan petani	1. Masih rendahnya pendapatan petani 2. Belum adanya fasilitas/pusat pemasaran produk pertanian yang representatif 3. Perlu adanya peningkatan life skills terhadap pelaku usaha dan UMKM
8.	Masih rendahnya Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar	Masih rendahnya jumlah guru yang mengajar pada tingkat SD/MI yakni sebesar 12,60:1 dan SMP/MTs sebesar 11,38:1 pada tahun 2022, sedangkan standar berdasarkan PP No.74 Tahun 2008 tentang guru untuk TK sederajat 15: 1, SD sederajat 21: 1, MI sederajat 15: 1, SMP sederajat 20: 1, MTS sederajat 1: 1	1. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga pengajar untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs belum optimal 2. Banyaknya tenaga pendidik yang sudah dan akan pensiun 3. Kuota penerimaan tenaga pendidik di Kabupaten Pangandaran sedikit
9.	Masih rendahnya Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Masih rendahnya jumlah guru yang memiliki ijazah S1/D-IV baru mencapai	1. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga pengajar belum optimal 2.

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		4.171 tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 4.349, sedangkan pada UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan setiap guru wajib memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Banyaknya tenaga pendidik yang sudah dan akan pensiun 3. Kuota penerimaan tenaga pendidik di Kabupaten Pangandaran sedikit
10.	Masih Adanya Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1. Jumlah SDM tenaga kesehatan tidak sesuai rasio, dimana, ketersediaan tenaga kesehatan per 100.000 penduduk yang diharapkan berdasarkan dokumen Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025 Kemenkes RI untuk tenaga dokter spesialis 24, dokter umum 96, sedangkan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 jumlah dokter spesialis sebanyak 20 dan dokter umum sebanyak 63.	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. Masih ada penyandang gizi buruk yang berpotensi menjadi penyebab kematian pada bayi saat lahir.	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat 3. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat
		3. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 mencapai angka 6,25 yang menunjukkan masih tingginya Angka Kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	1. Aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih sangat sulit dijangkau 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dan bersih
11.	Masih adanya Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (71,42% pada tahun 2022)	1. Jumlah SDM tenaga kesehatan tidak sesuai rasio terutama untuk tenaga dokter spesialis dan dokter umum dimana rasio dokter Kabupaten Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	
		2. Masih ada penyandang gizi buruk yang berpotensi mengalami komplikasi ketika proses melahirkan	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat 2. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat 3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
		3. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Pangandaran mencapai angka 71,42 pada tahun 2022 yang menunjukkan terjadinya kenaikan dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 49,39 per 100.000 kelahiran hidup	1. Aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih sangat sulit dijangkau 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dan bersih
12.	Masih adanya Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (6,25 pada tahun 2022)	1. Jumlah SDM tenaga kesehatan tidak sesuai rasio terutama untuk tenaga dokter spesialis dan dokter umum dimana rasio dokter Kabupaten Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. masih ada penyandang gizi buruk yang berpotensi menjadi penyebab kematian pada bayi saat lahir.	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat 2. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat 3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
		3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat	1. Aksesibilitas menuju fasilitas kesehatan di beberapa daerah masih sangat sulit dijangkau 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dan bersih
13.	Masih rendahnya Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	Rasio rumah sakit di Kabupaten Pangandaran hanya tersedia 1: 436.748 pada tahun 2022	1. Ketersediaan sarana prasarana kesehatan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat belum optimal 2.

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			Minimnya lahan 3. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran
14.	Masih rendahnya Rasio dokter per seratus ribu penduduk	Kurangnya dokter untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
15.	Masih adanya kasus Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Gizi Buruk	1. Kurangnya tenaga dokter untuk mengakomodasi, dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat	1. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
16.	Masih tingginya angka kesakitan tuberculosis yakni sebesar 683 pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 387	1. Kurangnya tenaga dokter serta minim edukasi untuk mengakomodasi penanganan penderita Tuberkulosis BTA dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat	1. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
17.	Masih tingginya tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk). (Pada tahun 2022 sebanyak 5.902 orang terduga tuberkulosis)	1. Kurangnya tenaga dokter serta minim edukasi untuk mengakomodasi penanganan penderita prevalensi Tuberkulosis dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. Kabupaten Pangandaran masih menjadi salah satu kabupaten penyumbang angka prevalensi TB Nasional, sedangkan penanggulangan TB menjadi salah satu program strategis nasional yang perlu didukung oleh pemerintah tingkat daerah.	1. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
18.	Masih rendahnya Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	1. Kurangnya Jumlah tenaga kesehatan masih belum sesuai rasio dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. Masih ada penyandang gizi buruk yang berpotensi tinggi tertular virus TB	1. Kurangnya sosialisasi tentang penyakit yang berbahaya 2. Kurangnya Fasilitas kesehatan yang khusus untuk Tuberkulosis 3. Kurangnya sarana dan prasarana khusus untuk penanganan Tuberkulosis
19.	Masih rendahnya proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	1. Kurangnya tenaga dokter untuk mengobati Tuberkulosis dalam program DOTS dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. Masih ada penyandang gizi buruk yang berpotensi tinggi tertular virus TB	1. Kurangnya sosialisasi tentang penyakit yang berbahaya 2. Kurangnya Fasilitas kesehatan yang khusus untuk Tuberkulosis 3. Kurangnya sarana dan prasarana khusus untuk penanganan Tuberkulosis
20.	Masih tingginya kasus diare (pada tahun 2022 sebanyak 3698 orang)	1. Kurangnya tenaga serta sarana penunjang untuk dokter dalam menangani diare dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. Masih Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
21.	Masih adanya prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (0,57% pada tahun 2022)	1. Masyarakat belum memahami tentang prevalensi HIV/AIDS dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. Kabupaten Pangandaran perlu melakukan penanggulangan guna mendorong capaian HIV/AIDS di Tingkat Provinsi maupun Nasional	1. Masih kurangnya program-program Promotif dan preventif mengenai HIV/AIDS 2. Sosialisasi mengenai prevalensi HIV/AIDS kurang optimal 3. Edukasi tidak optimal dilakukan oleh institusi terkait

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
22.	Masih rendahnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (66,67% pada tahun 2022)	1. Kurangnya tenaga kesehatan serta sarana penunjang untuk dokter dalam menangani kasus neonatus dengan komplikasi dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit
		2. Rendahnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani akan berpengaruh pada angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	1. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
23.	Persentase ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Adanya penurunan Persentase ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil pada tahun 2022 yakni menjadi sebesar 88,6% dibandingkan tahun 2021 dimana sebesar 100%	1. Jumlah tenaga kesehatan yang menangani belum sesuai
24.	SPM Kesehatan	Konsistensi pencapaian perlu tetap dipertahankan	1. Konsistensi pencapaian target 12 indikator SPM kesehatan
25.	Rendahnya Indeks Risiko Sanitasi (pada tahun 2022 masih sebesar 32)	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah	1. Kurangnya sosialisasi pola hidup bersih
		2. Tingkat kekumuhan perumahan masih tinggi	1. Fasilitas MCK belum menjadi kebutuhan utama 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas MCK
		3. Jaringan air bersih belum menjadi prioritas ke pemukiman kumuh	1. Belum optimalnya penataan kawasan permukiman
		4. Tidak adanya data awal perhitungan	1. Tidak adanya kegiatan untuk melakukan pendataan awal pada jumlah rumah dan rumah tinggal
26.	Masih terjadinya genangan >2 kali dalam 1 tahun	1. Tidak tersedia gorong-gorong yang cukup untuk menampung air hujan	1. Sistem drainase yang kurang baik

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		2. Tingkat Kesadaran Masyarakat masih rendah sering membuang sampah, dan terjadi pengendapan	1. Minimnya sosialisasi ramah lingkungan
		3. Tidak adanya data awal perhitungan	1. Tidak adanya kegiatan untuk melakukan pendataan awal pada jumlah rumah dan rumah tinggal
27.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	1. Masih rendahnya luas areal irigasi	1. Sistem operasi dan pemeliharaan irigasi yang kurang baik
28.	Rasio Jaringan Irigasi belum optimal	1. Masih rendahnya rasio jaringan irigasi	1. Terbatasnya lahan
		2. Masih kurangnya pengertian/pemahaman tentang penghitungan rasio jaringan irigasi	2. Tidak adanya data ideal panjang irigasi yang dibutuhkan untuk mengairi luasan daerah pertanian
29.	Persentase penduduk berakses air minum belum optimal (64% pada tahun 2022)	Masih rendahnya jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum	1. Langkanya air akibat tekanan kebutuhan penduduk 2. Terjadinya degradasi wilayah tangkapan air di bagian hulu 3. Tidak adanya data awal perhitungan
30.	Ketaatan terhadap RTRW belum optimal, berdasarkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 36,19%	Tingkat penindakan hukum/sanksi yang kurang tegas dalam implementasi kebijakan, bagi para pelanggar	1. Koordinasi antar SKPD masih rendah 2. Tingkat sosialisasi belum maksimal kepada masyarakat
31.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (6,27% pada tahun 2022)	1. Kurangnya perhatian dan pembinaan pemerintah kabupaten terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial	1. Minimnya sarana penunjang dan pembinaan terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial
		2. Belum tersedianya data yang akurat terkait dengan data penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	1. Terbatasnya Bidang pada SKPD dan SDM yang menangani masalah sosial 2. Masih belum memadainya jumlah SDM serta sarana prasarana yang berhubungan dengan pengelolaan data dan pengarsipan
32.	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial	Konsistensi pencapaian perlu tetap pertahankan	1. Masih diperlukannya pelaksanaan program-program terkait Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan social



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			agar pencapaian pada tahun-tahun berikutnya tetap tercapai.
33.	Masih rendahnya Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (15,13% pada tahun 2022)	1. Masih kurangnya pelatihan berbasis kompetensi 2. Pemerintah Daerah belum memiliki Balai Latihan Kerja.	1. Minimnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Pangandaran. 2. Masih rendahnya tingkat keterampilan tenaga kerja. 1. Pembangunan Balai Latihan Kerja belum terealisasi
34.	Masih rendahnya Rasio penduduk yang bekerja (pada tahun 2022 sebesar 78,67%)	1. Lapangan pekerjaan Kabupaten Pangandaran masih rendah 2. Mayoritas masyarakat lebih memilih bekerja setelah lulus SMA/SMK sederajat	1. Sosialisasi mengenai lowongan pekerjaan 1. Upaya untuk meningkatkan motivasi lapangan pekerjaan
35.	Masih adanya Pekerja Migran Indonesia Ilegal asal Kab. Pangandaran	1. Pekerja migran ilegal pada umumnya tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah 2. Sulitnya Proses Pemulangan PMI Ilegal yang mengalami PHK atau meninggal dunia ke tanah air 3. Masih ada anggapan dari pencari tenaga kerja bahwa menjadi PMI Ilegal lebih mudah dan murah.	1. Belum optimalnya pendataan dan pemeriksaan serta deteksi dini terhadap masyarakat yang berencana menjadi pekerja migran ilegal 1. Pendataan pekerja migran ilegal masih sulit dilakukan 1. Belum optimalnya sosialisasi dari pemerintah mengenai Pekerja Migran Indonesia Ilegal 2. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai risiko menjadi PMI Ilegal
36.	Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (pada tahun 2022 sebesar 76,09)	Rendahnya partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan dari perempuan	1. Masih rendahnya tingkat kesetaraan gender 2. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan sehingga mempengaruhi pada kualitas dan kuantitas perempuan di lembaga pemerintahan
37.	Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan	Masih belum optimalnya kesetaraan upah antara perempuan dan laki-laki	Belum optimalnya pemberdayaan perempuan sehingga mempengaruhi pada kualitas dan kuantitas perempuan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
38.	Masih rendahnya angka kecukupan protein per kapita (pada tahun 2022 sebesar 64,8 gram/kap.hari)	1. Tingkat daya beli masyarakat rendah	1. Terbatasnya sumber daya daerah 2. Masih rendahnya pendapatan masyarakat
		2. Target ketersediaan protein masih belum tercapai	1. Konsumsi masyarakat atas bahan pokok pengganti nasi masih belum beragam
39.	Masih rendahnya persentase luas lahan bersertifikat	Masih adanya masyarakat yang belum memiliki kelengkapan administrasi pertanahan	1. Masih rendahnya sosialisasi mengenai pertanahan dari pemerintah 2. Tingkat sosialisasi yang rendah/tidak maksimal mengenai pertanahan
40.	Belum lengkapnya RPPLH kabupaten/kota	Perhatian dinas teknis terhadap penyediaan data untuk dokumen KLHS belum optimal	1. Terbatasnya SDM 2. Penyediaan data untuk dokumen KLHS belum optimal
41.	Penyelenggaraan KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten belum optimal	1. Jumlah SDM di bidang lingkungan hidup masih kurang	1. Terbatasnya SDM
		2. KLHS RDTR dan dokumen yang berkaitan dengan tata ruang kurang maksimal dalam prosesnya	2. Proses penyusunan KLHS RDTR dan dokumen yang berkaitan dengan tata ruang belum optimal
42.	Masih Rendahnya Indeks kualitas Air (50 pada tahun 2022)	1. Kawasan yang sangat potensial sebagai tempat cadangan penyimpanan air kurang mendapat perhatian	1. Belum adanya Pengelolaan Kawasan
		2. Pengelolaan limbah masih rendah	1. Sosialisasi ramah lingkungan masih rendah 2. Belum tersedianya sarana dan prasarana IPLT 3. Belum adanya perda
		3. Belum tersedianya sarana laboratorium lingkungan	1. Belum tersedianya alat/sarana dan prasarana 2. SDM belum tersedia
43.	Masih kecilnya Indeks kualitas Tutupan Lahan (38,21 pada tahun 2022)	Masih banyaknya lahan kritis	1. Rehabilitasi pada kawasan lindung belum optimal 2. Rendahnya perhatian dan kesadaran masyarakat untuk memelihara lahan serta melakukan reboisasi 3. Belum optimalnya sosialisasi
44.	Masih minim penghargaan lingkungan hidup yang didapat	1. Masih rendahnya jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat	1. Minimnya sosialisasi ramah lingkungan pada masyarakat

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		2. Rendahnya Rasio RTH	1. Penegakan kebijakan terkait lingkungan belum optimal 2. Pengembangan dan perizinan tidak memperhatikan RTH yang 30% 3. Masih rendahnya pendataan untuk penetapan hutan kota pada tiap kecamatan dan penetapan taman
		3. Perlu peningkatan pada indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan sebagai upaya peningkatan KLH di pemdes	1. Kurangnya SDM dan sarana prasarana untuk melakukan pengujian
		4. Masih rendahnya pendataan program kampung iklim	1. Belum adanya sosialisasi mengenai kampung iklim kepada masyarakat
45.	Masih minimnya timbunan sampah yang ditangani	Masih rendahnya tingkat penanganan sampah (28,66% tahun 2022)	1. Terbatasnya lahan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan timbunan sampah serta terbatasnya SDM
46.	Masih rendahnya persentase jumlah sampah yang ter kurangi melalui 3R	Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap data dan informasi penanganan sampah	1. Terbatasnya sarana penghimpun data dan informasi
47.	Masih rendahnya volume sampah yang ditangani	Masih rendahnya tingkat penanganan sampah (28,66% tahun 2022)	1. Tidak adanya TPA 2. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan sampah serta terbatasnya SDM
48.	Sulitnya melaksanakan Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Belum tersedianya TPA/TPST/SPA	1. Terbatasnya lahan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana 3. Terbatasnya SDM
49.	Menurunnya Cakupan Penerbitan KTP elektronik (pada tahun 2022 sebesar 98,35, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 99,17%)	1. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk perekaman e-KTP masih terbatas 2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan	1. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan perekaman e-KTP melalui pelayanan <i>mobile</i> masih terbatas 1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya KTP
50.	Masih rendahnya bayi ber-akte kelahiran (pada tahun 2022 sebesar 75,31%)	1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pembuatan akte kelahiran	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran.



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan	1. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan <i>mobile</i> masih terbatas 2. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akte kelahiran masih perlu ditingkatkan
51.	Masih kurangnya pasangan berakte nikah (pada tahun 2022 sebesar 63,86%)	1. Kurang optimal nya dinas terkait dalam sosialisasi teknis karena adanya permasalahan dari faktor eksternal	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya akta nikah/buku nikah.
		2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi masih perlu ditingkatkan	1. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan <i>mobile</i> masih terbatas 2. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akta nikah/buku nikah masih perlu ditingkatkan
52.	Rendahnya penerbitan Kartu Keluarga (pada tahun 2022 sebesar 93,85%, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 98,2%)	1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap <i>database</i> kependudukan	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya KK 2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i>
		2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang menangani pembuatan KK	1. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan <i>mobile</i> masih terbatas 2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan
53	Rendahnya penerbitan kartu identitas anak (pada tahun 2022 sebesar 51,97%)	1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap <i>database</i> kependudukan	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya kartu identitas anak 2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i> 3. Pemahaman dan keterampilan petugas pelayanan terhadap penerapan Peraturan Mendagri Nomor 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran belum optimal
		2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan	1. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan <i>mobile</i> masih terbatas 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang menangani pembuatan KIA

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
54.	Kurangnya kelompok binaan PKK	Masih rendahnya jumlah kelompok binaan PKK (104 tahun 2022)	1. Rendahnya sosialisasi dari pemerintah 2. Rendahnya partisipasi masyarakat
55.	Masih rendahnya Rasio Akseptor KB (70,31% pada tahun 2022)	1. Perhatian dinas teknis terhadap KB belum optimal	1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh KB
		2. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program KB	1. Program Konseling mengenai KB belum optimal
		3. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan	1. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal
56.	Masih rendahnya cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (19,7% pada tahun 2022)	1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i> PUS	1. Sosialisasi mengenai program Keluarga Berencana kepada masyarakat belum optimal
		2. Program Konseling mengenai KB belum optimal	1. Terbatasnya SDM
		3. Rendahnya keinginan masyarakat untuk menggunakan alat Kontrasepsi	1. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat untuk mengikuti program KB belum optimal 2. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan
57.	Kurangnya Rasio izin trayek (0,0002 pada tahun 2022)	1. Rendahnya perhatian dinas teknis	1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i> 2. Terbatasnya SDM
		2. Berkurangnya jumlah pengusaha angkutan	1. Jumlah sebaran penduduk di Kabupaten Pangandaran masih belum merata 2. Rendahnya sosialisasi pihak terkait kepada masyarakat 3. Belum adanya dokumen kajian transportasi daerah
58.	Rendahnya Jumlah uji kir angkutan umum	1. Masih rendahnya pengujian kir terhadap angkutan umum	1. Terbatasnya lahan 2. Terbatasnya SDM dan Peralatan 3. Rendahnya sosialisasi pihak terkait
		2. Masih minimnya fasilitas uji kir	1. Belum tersedianya sarana dan prasarana uji kendaraan



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
59.	Minimnya kualitas Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (3 jumlah terminal, 1 jumlah pelabuhan, 1 jumlah bandara)	1. Rendahnya perhatian dinas teknis	1. Terbatasnya lahan 2. Terbatasnya SDM
		2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i>	1. Rendahnya minat masyarakat terhadap jasa angkutan umum
		3. Penentuan lokasi strategis untuk terminal tipe A harus berdasarkan kajian	1. Perlu dilakukan pemindahan terminal Pangandaran ke Cijulang
60.	Kurangnya jumlah angkutan darat (pada tahun 2022 sebanyak 2.665)	1. Rendahnya perhatian dinas teknis	1. Dominasi kendaraan pribadi 2. Terbatasnya SDM
		2. Kondisi layanan angkutan yang kurang baik	1. Perlu dilakukan pembukaan angkutan perdesaan ke wilayah-wilayah kecamatan 2. Ruas jalan Kabupaten yang sebagian besar masih kecil 3. Perlu adanya kajian transportasi
61.	Kurangnya pemasangan Rambu-rambu (1.380 pada tahun 2018 – 2022)	Masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas	1. Pemasangan rambu lalu lintas, papan informasi, rambu evakuasi, serta alat-alat sistem informasi peringatan dini belum optimal 2. Kurangnya papan Informasi maupun rambu Evakuasi ataupun alat-alat Early Warning Sistem Informasi
62.	Kurangnya cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	1. Masih rendahnya pelatihan penggunaan teknologi dan informasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan	1. Rendahnya sosialisasi kepada masyarakat 2. Rendahnya minat masyarakat
		2. Penyebarluasan informasi publik belum optimal	1. Rendahnya SDM 2. Sarana prasarana belum memadai
63.	Rendahnya Indeks SPBE (pada tahun 2022 sebesar 2,82)	1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wisata, perekonomian, dan pemerintahan.	1. Terbatasnya peralatan dan SDM
		2. Implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum berjalan secara efektif	1. Sarana prasarana infrastruktur belum memadai 2. Komitmen yang masih rendah dari pihak terkait mengenai implementasi SPBE
64.	Rendahnya persentase koperasi aktif	1. Masih rendahnya kaderisasi generasi muda sebagai pengurus koperasi,	1. Optimalisasi sosialisasi



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		2. Masih rendahnya koperasi yg bergerak di sektor riil	2. Adanya persyaratan pembubaran yang belum terpenuhi terkait dengan LPDB
		3. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif	3. Belum terbentuknya tim pembubaran koperasi dan SDM yang mumpuni
65.	Masih perlu peningkatan pada persentase UMKM	1. Potensi UMKM sebagai muatan lokal belum terpetakan	1. Kajian pemetaan UMKM belum tersedia 2. Belum ada formulasi untuk menghitung jumlah peningkatan presentasi kewirausahaan mikro dibagi jumlah penduduk 3. Belum ada produk hukum yang memfasilitasi UMKM untuk memasarkan produknya.
		2. Minimnya UMKM yang memiliki hak izin dan edar	1. Belum ada unit kerja khusus untuk memfasilitasi UMKM mendapatkan haki
		3. Terhambatnya promosi produk UMKM	1. Belum optimalnya pemasaran produk UMKM 2. Masih rendahnya pemberdayaan SDM UMKM
		4. Belum tersedianya display/ruang promosi untuk ajang promosi UMKM bagi wisatawan	1. Terbatasnya sarana dan lahan 2. Belum tersedia alat uji laboratorium bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan izin edar di Kabupaten Pangandaran 3. SDM dan sarana prasarana untuk rumah kemasan masih terbatas
66.	Minimnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (pada tahun 2022 data masih NA sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 1.050. pada tahun 2020 sebanyak 2.124)	1. Masih rendahnya jumlah investor	1. Daya tarik Kabupaten Pangandaran sebagai lokasi investasi masih kurang
		2. Belum adanya RUPM dan kajian investasi untuk setiap sektor	2. Masih tertundanya RDTR
67.	Minimnya jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (1.781,4 M pada tahun 2022)	1. Masih rendahnya nilai investasi	1. Masih terbatasnya investor
		2. Belum adanya RUPM dan kajian investasi untuk setiap sektor	2. Masih tertundanya RDTR
68.	Minimnya rasio daya serap tenaga kerja	1. Masih rendahnya rasio daya serap tenaga kerja	1. Masih rendahnya <i>skill</i> Masyarakat 2. Masih kurangnya pelatihan kerja
		2. Belum adanya sarana untuk pelatihan (BLK)	1. Tidak adanya sarana penunjang



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
69.	Minimnya kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	1. Rendahnya perhatian dinas teknis	1. Minimnya investor
		2. Kurangnya event yang mampu menarik investasi	2. Event pameran dengan tujuan menarik dan mendapatkan investor belum dapat dilaksanakan secara maksimal
70.	Rendahnya tingkat pembangunan terhadap Kepemudaan dan Olah Raga (146 jumlah klub olahraga pada tahun 2022)	1. Masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap kepemudaan	1. Terbatasnya kuantitas SDM pembina dan pengelola bakat, minat pemuda
		2. Rendahnya pembinaan terhadap atlet potensial	1. Bidang Kepemudaan dan Olahraga masih bernaung di bawah SKPD Disdikpora
		3. Minimnya ruang bagi pemuda dan kaum milenial untuk mengekspresikan ide-ide dan juga ikut berpartisipasi dalam upaya pembangunan daerah	1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung 2. Rendahnya akses pemuda dalam kewirausahaan
71.	Rendahnya kualitas sistem data dan statistik yang terintegrasi	Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i>	1. Terbatasnya SDM
			2. Fungsi statistik belum diimplementasikan secara optimal
72.	Data dalam buku kabupaten dalam angka tidak lengkap	1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i>	1. Terbatasnya SDM 2. Kurangnya pengetahuan terkait data yang harus dilengkapi oleh masing-masing perangkat daerah
		2. Terbatasnya SDM	1. Implementasi belum optimal
73.	Data dalam buku "PDRB" tidak lengkap	1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i>	1. Terbatasnya SDM
		2. Terbatasnya SDM	1. Implementasi belum optimal
74.	Pengamanan Sistem Informasi	Pengamanan sistem informasi belum tersertifikasi	1. Terbatasnya jumlah SDM
			2. Ketersediaan infrastruktur masih terbatas
			3. Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang pengamanan informasi di seluruh daerah
75.	Belum maksimalnya intensitas penyelenggaraan festival seni dan	Belum optimalnya pelaksanaan festival seni dan budaya	1. Belum semua festival seni dan budaya terselenggara 2. Terbatasnya



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	budaya (14 festival seni dan budaya pada tahun 2022)		SDM 3. Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dimasukan ke dalam <i>database</i> adalah festival yang mendapatkan pendanaan dari dinas
76.	Belum optimalnya benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (159 pada tahun 2022)	Kajian tentang penetapan cagar budaya belum ada/belum disusun	1. Terbatasnya SDM yang mampu mengoptimalkan potensi benda peninggalan dan situs budaya
77.	Belum optimalnya jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (11 pada tahun 2022)	Belum tersedianya pusat budaya	1. Terbatasnya SDM 2. Kajian dan landasan hukum tentang inventarisasi karya budaya belum ada/belum disusun 3. Belum adanya ruang khusus untuk menampilkan karya budaya
78.	Belum optimalnya jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (26 pada tahun 2019)	Belum optimalnya perhatian dinas teknis terhadap cagar budaya	1. Terbatasnya SDM 2. Belum adanya pendataan secara spesifik terkait cagar budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran
79.	Rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1. Kurangnya minat baca	1. Rendahnya perhatian dinas teknis 2. Terbatasnya SDM
		2. Belum adanya PERBUP atau PERDA terkait bidang perpustakaan	1. Belum adanya payung hukum dari pimpinan daerah yang menangani urusan perpustakaan
80.	Rendahnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Belum adanya payung hukum dari pimpinan daerah yang menangani urusan perpustakaan	1. Rendahnya perhatian dinas teknis 2. Terbatasnya SDM 3. Belum adanya Perbup atau Perda terkait bidang perpustakaa
81.	Minimnya rasio perpustakaan persatuan penduduk	1. Kurangnya minat baca	1. Rendahnya perhatian dinas teknis 2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i>
		2. Belum adanya pembinaan terkait bidang perpustakaan	1. Kurangnya jumlah SDM (Pustakawan)
		3. Belum adanya Perbup atau Perda terkait bidang perpustakaan	1. Belum adanya payung hukum dari pimpinan daerah yang menangani urusan perpustakaan
82.		1. Rendahnya minat baca masyarakat	1. Kurangnya sosialisasi 2. Rendahnya perhatian dinas teknis 3. Terbatasnya

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Rendahnya jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (14.740 pada tahun 2022)	2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i> 3. Belum adanya pembinaan terkait bidang perpustakaan 4. Belum adanya Perbup atau Perda terkait bidang perpustakaan	event yang berkaitan dengan perpustakaan 1. Adanya sumber informasi dan hiburan lain selain perpustakaan 1. Kurangnya jumlah SDM (Pustakawan) 1. Belum adanya payung hukum dari pimpinan daerah yang menangani urusan perpustakaan
83.	Rendahnya jumlah koleksi judul buku perpustakaan (23.036 pada tahun 2022)	Rendahnya perhatian dinas teknis	1. Kurangnya jumlah SDM (Pustakawan) 2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i> 3. Terhambatnya proses pemilihan dan pengadaan koleksi buku berstandar nasional
84.	Rendahnya jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1. Rendahnya perhatian dinas teknis 2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i>	1. Rendahnya tingkat penyelenggaraan pelatihan 1. Kebutuhan penerimaan CPNS formasi pustakawan 2. Kebutuhan adanya instansi dan lembaga pendidikan di bidang perpustakaan
85.	Rendahnya persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (18% pada tahun 2022)	Belum Maksimalnya pengelolaan arsip	1. Terbatasnya SDM 2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i> 3. Rendahnya perhatian dinas teknis
86.	Kurangnya peningkatan SDM pengelola kearsipan (0 kegiatan pada tahun 2022)	1. Rendahnya perhatian dinas teknis 2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi <i>database</i>	1. Terbatasnya SDM 2. Kurangnya keahlian SDM dalam mengelola arsip 1. Belum adanya tenaga arsiparis yang berstatus sebagai ASN sehingga pengelolaan arsip masih dikelola oleh tenaga non ASN
87.	Pemerintah tingkat provinsi mengadakan evaluasi atas regulasi dan instrumen bidang kearsipan	Belum adanya implementasi terhadap evaluasi tersebut	1. Belum masuknya evaluasi atas regulasi dan instrumen bidang kearsipan
88.	Penempatan SDM Kearsipan pada setiap SKPD belum optimal	Setiap SKPD belum memiliki SDM yang khusus mengelola kearsipan	1. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penempatan SDM



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			pengelola kearsipan untuk ditempatkan di setiap SKPD
89.	Sarana dan Prasarana penyimpanan arsip pada setiap SKPD belum optimal	Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk penyimpanan arsip di setiap SKPD	1. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan kearsipan di setiap SKPD
90.	Menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara (pada tahun 2022 sebanyak 1.177 sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 88.484. pada tahun 2021 sebanyak 0 karena adanya Covid-19)	1. Kurangnya promosi pariwisata	1. Terbatasnya SDM Pariwisata 2. Kurangnya event pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung 3. Masih terbatasnya media promosi yang digunakan 4. Belum dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah
		2. Belum optimalnya pengembangan kearifan lokal sebagai daya tarik, baik dari arsitektur maupun budaya lokal	1. Pemahaman kepariwisataan belum menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah 2. Perlunya Pengembangan daya tarik wisata alternatif selain wisata bahari
		3. Pengembangan destinasi wisata tidak diimbangi dengan infrastruktur jalan dan lokasi yang memadai	1. Belum optimalnya lahan Parkir
		4. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata dan pengelolaan daya tarik dan usaha pariwisata lainnya belum lengkap	1. Belum tersedianya Creative Center 2. Minimnya pelatihan peningkatan kapasitas SDM pariwisata
91.	Rendahnya PAD sektor pariwisata (29.383.788.500 pada tahun 2022)	1. Belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata yang kewenangannya di bawah Pemda	1. Belum optimalnya peran pemerintah dalam merintis pembangunan pariwisata potensial 2. Terbatasnya SDM Pariwisata
		2. Pengembangan dan persediaan daya tarik wisata potensial belum optimal	1. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah kabupaten, desa, dan kelompok penggerak pariwisata dalam membangun daya tarik wisata 2. Kebijakan/landasan hukum kepariwisataan dalam pengembangan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		3. Pemantauan dan pelaporan retribusi wisata di daya tarik wisata yang belum optimal	1. Belum diterapkannya pengelolaan retribusi wisata menggunakan teknologi informasi
		4. Masih ada beberapa kriteria GSTC-D yang belum masuk kategori hijau	1. Pemenuhan kriteria GSTC-D belum optimal 2. Perangkat Daerah terkait belum memprioritaskan kegiatan yang mendukung pemenuhan kriteria GSTC-D
92.	Cakupan bina kelompok petani masih rendah (1.448 kelompok pada tahun 2022)	Masih rendahnya jumlah kelompok peternak yang mendapat bantuan PEMDA	1. Sosialisasi yang masih rendah
93.	Belum adanya petunjuk teknis mengenai LP2B	Belum disusun nya Perbup dan juknis LP2B	1. Belum adanya Sosialisasi Perda tentang LP2B
94.	Pengembangan Komoditas lokal masing-masing daerah belum optimal	Tidak ada program kegiatan mengarah ke komoditas lokal	1. Masih kurangnya pasar yang menampung produk lokal
95.	Komoditas pertanian sebagai penunjang sektor UMKM belum optimal	Pemasaran produk pertanian belum optimal	1. Belum ada koperasi khusus pertanian 2. Belum adanya pola pasar pertanian
96.	Penggunaan teknologi di sektor pertanian belum optimal	Masih rendahnya pembinaan teknologi di sektor pertanian	1. Belum adanya balai pelatihan pertanian
97.	Sertifikasi Pohon Induk Pilihan belum optimal	1. Belum terselenggaranya pelaksanaan balai benih pertanian 2. Belum ada tenaga ahli dalam pembibitan	1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung benih pertanian 1. Kurangnya sumber daya tenaga ahli pembibitan
98.	Pengembangan Agrowisata belum optimal	Masih rendahnya koordinasi antara pihak Desa, Dinas Pariwisata dengan Dinas Pertanian	1. Tingginya ego sektoral
99.	Peningkatan sektor ternak belum optimal	Minimnya sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas ternak	1. Belum adanya pola pasar tradisional 2. Belum tersedianya pasar ternak 3. Belum tersedianya puskesmas
100.	Peningkatan kelompok tani muda belum optimal	Masih rendahnya minat pemuda dalam sektor pertanian	1. Kurang menariknya sektor pertanian bagi pemuda
101.	Persentase rumah tangga pengguna listrik masih rendah	Jumlah rumah tangga pengguna listrik masih berada di bawah standar Provinsi Jawa Barat	1. Masih ada wilayah yang belum teraliri listrik 2. Terbatasnya jarak jangkauan tiang listrik ke rumah penduduk 3. Jangkauan PLN masih terbatas,

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			sehingga belum menjangkau wilayah permukiman yang berada di pedalaman
102.	Rendahnya Ekspor Bersih Perdagangan (Rp. 124.522.765.710 pada tahun 2022)	1. Masih rendahnya produksi produk UMKM yang belum memenuhi kriteria barang ekspor	1. Masih rendahnya wawasan tentang ekspor impor. 2. Minimnya pelatihan yang dilaksanakan kepada UMKM
		2. Masih rendahnya SDM untuk ikut terlibat dan mengembangkan produk unggulan Kabupaten Pangandaran	1. Belum adanya lembaga khusus yang dapat memfasilitasi pengembangan produk unggulan daerah
103.	Cakupan bina kelompok nelayan masih rendah	1. Masih rendahnya jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan pemerintah daerah	1. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah
		2. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi laut/perikanan yang tinggi	1. Kurangnya kompetensi SDM nelayan 2. Kurangnya sarana penunjang
		3. Masih rendahnya armada nelayan	1. Terbatasnya modal yang dimiliki oleh nelayan untuk bisa memiliki dan menggunakan teknologi terbaru di bidang pengolahan ikan
		4. Perkembangan teknologi pengolahan ikan belum dapat digunakan secara maksimal oleh kelompok nelayan	1. Kapabilitas nelayan masih minim sehingga sulit untuk menggunakan teknologi pengolahan ikan 2. Belum optimalnya sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan
104.	Nilai tukar nelayan	1. Belum adanya Nilai Tukar Nelayan sebagai tolok ukur kesejahteraan nelayan	1. Belum optimal perhatian pemerintah dalam meningkatkan pembudi dayaan ikan kecil dan menurunkan biaya produksi
		2. Masih rendahnya pendapatan nelayan/pembudi daya ikan dan belum adanya fasilitas/pusat pemasaran produk perikanan/kelautan yang representatif	1. Daya beli masyarakat masih rendah 2. Belum ada teknologi pengolahan ikan karena dengan adanya pengolahan ikan, nilai jual ikan akan meningkat 3. Belum adanya standar jual untuk setiap jenis ikan dimana dengan adanya standar jual, hal tersebut dapat mencegah fluktuasi harga jual ikan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		3. Perlu adanya peningkatan life skills terhadap pelaku usaha dan UMKM	1. Pelatihan yang dilaksanakan belum optimal 2. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki
105.	Kecilnya persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa	1. Nilai bagi hasil kabupaten masih rendah, berdasarkan peraturan gubernur minimal 10%	1. Masih rendahnya pendapatan daerah Kabupaten Pangandaran
		2. Proses pencairan masih belum terlaksana	1. Proses pencairan masih mempertimbangkan skala prioritas
106.	Rendahnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (24% pada tahun 2022)	1. Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1. Terbatasnya sarana penunjang 2. Rendahnya motivasi 3. Pendidikan struktural masih belum menjadi prioritas
		2. Penyelenggaraan diklat aparatur dan diklat fungsional masih minim	1. Pelaksanaan diklat masih terbatas 2. Kuota diklat terbatas karena keterbatasan anggaran
		3. Belum optimalnya penguatan sumber daya manusia pada dunia pariwisata agar bisa lebih bersinergi dalam pengembangan pariwisata	1. Kemampuan ASN untuk menunjang pariwisata seperti kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing belum menjadi kemampuan komunikasi tambahan yang perlu dimiliki oleh ASN
107.	Rendahnya persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (10% pada tahun 2022)	Masih rendahnya jumlah Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, maupun fungsional	1. Terbatasnya sarana penunjang 2. Rendahnya motivasi 3. Pelaksanaan Diklat masih terbatas
108.	Masih rendahnya jumlah pegawai	Jumlah pegawai yang ada belum memenuhi kebutuhan yang ada	1. Kuota pegawai ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga jumlah pegawai yang ada belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan
109.	Rendahnya persentase implementasi rencana kelitbangan (66,67% pada tahun 2022)	1. Pengelolaan SDM aparatur belum optimal	1. Belum tersusunnya dokumen pendukung rencana Kelitbangan, diantaranya RIK dan Road Map 2. Masih terbatasnya jumlah SDM pendukung di Kelitbangan
		2. Masih perlunya pembenahan OPD diselaraskan dengan urusan	1. Kewenangan maupun fungsi Kelitbangan belum optimal yaitu masih



No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			berada pada tingkat Eselon IV dan baru dilaksanakan pada tahun 2019
110.	Rendahnya Tingkat kapabilitas APIP (level 2 pada tahun 2022)	1. Masih rendahnya tingkat kapabilitas APIP	1. Kurangnya peningkatan kapabilitas APIP 2. Kurangnya koordinasi di antara para pihak
111.	Masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai PEMDA (0,31% pada tahun 2019)	Masih rendahnya kemampuan aparatur	1. Rendahnya kedisiplinan ASN 2. Masih rendahnya tingkat profesionalisme ASN atau masih sedikit jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional maupun struktural
112.	Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi	Masih kurangnya pemahaman terkait reformasi birokrasi	1. Kurangnya sosialisasi penerapan reformasi birokrasi 2. Kurangnya komitmen seluruh perangkat daerah
113.	Masih adanya perangkat daerah yang terlambat dalam menyampaikan laporan barang milik daerah	Belum optimalnya pengelolaan aset barang milik daerah	1. Kurangnya SDM pengelola aset 2. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan aset 3. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan aset

Sumber: Data Diolah Penyusun, 2023

2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun hasil identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2. 86 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran**

No	Urusan	Bidang	Permasalahan
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	1) Belum adanya PAUD Negeri; 2) Belum optimalnya Angka Partisipasi Kasar Paket A; 3) Belum optimalnya Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Pangandaran; 4) Tingginya Angka Putus Sekolah (APS).
2.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Kesehatan	1) Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat; 2) Masih rendahnya program program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat; 3) Kurangnya SDM kesehatan; 4) Masih kurangnya program program promotif dan preventif dan preventif mengenai HIV/ AIDS; 5) Cakupan pelayanan balita masih fluktuatif; 6) Kurangnya sumber makanan bergizi untuk ibu; 7) Kurangnya dokter spesialis; 8) Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan baik dasar maupun rujukan.
3.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1) Belum optimalnya pengelolaan jalan mencapai kondisi Mantap; 2) Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi teknis mencapai kondisi baik; 3) Belum optimalnya Sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi.
4.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1) Belum optimalnya pengelolaan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum; 2) Belum optimalnya pengelolaan sanitasi.

No	Urusan	Bidang	Permasalahan
5.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1) Kurangnya Komunikasi informasi dan edukasi penanggulangan bencana. 2) Kurangnya minat masyarakat menjadi petugas Linmas; 3) Keterbatasan SDM dalam penanganan pelanggaran PERDA.
6.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	1) Jumlah PMKS yang tertangani bertambah dikarenakan adanya pandemi COVID-19; 2) Belum tersedia data PMKS yang valid; 3) Masih ditemukannya data penerima yang ganda/ <i>double</i> / tidak valid; 4) Kurangnya koordinasi <i>stakeholder</i> terkait; 5) Keterbatasan penerima manfaat; 6) Terdapat Panti Sosial yang tidak memperbaharui izin operasional kabupaten; 7) Minimnya SDM profesional dan fasilitas yang dimiliki.
7.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Tenaga Kerja	1) Terjadinya PHK Sepihak; 2) PMI Meninggal di tempat kerja; 3) Belum optimalnya pengadministrasian tenaga kerja; 4) Belum memiliki <i>database</i> ketenagakerjaan; 5) Pemda Pangandaran belum memiliki BLK (Balai Latihan Kerja).
8.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1) Belum optimalnya swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat; 2) Belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat.
9.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Pangan	1) Alih fungsi lahan dan perubahan alam; 2) Peningkatan produksi pangan berprotein tinggi; 3) Pandemi Covid-19 mempengaruhi daya beli dan jumlah makanan yang dikonsumsi menjadi berkurang; 4) Keterbatasan alat yang ada di dinas;

No	Urusan	Bidang	Permasalahan
			5) Kurang heterogenya makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
10.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Pertanahan	Masih adanya kasus sengketa batas wilayah.
11.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Lingkungan Hidup	1) Belum optimalnya pengelolaan SDM serta sarana dan prasarana; 2) Rendahnya ketaatan terhadap Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH; 3) Belum optimalnya pengawasan terhadap kegiatan yang telah mempunyai izin LH.
12.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai terkait Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik; 2) Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai terkait Penerbitan Kartu Keluarga; 3) Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai terkait Perekaman KTP Elektronik; 4) Kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya dokumen kependudukan untuk anaknya; 5) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan; 6) Regulasi terkait pernikahan (>19 tahun boleh menikah); 7) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan (kematian); 8) Jaringan pemanfaatan data difasilitasi oleh masing-masing OPD (sehingga tidak terintegrasi di Diskominfo).
13.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1) Persediaan bantuan yang terbatas; 2) Belum tersedianya data yang valid; 3) Bertambahnya data penerima manfaat akibat pandemi COVID-19; 4) Penyandang disabilitas binaan LKS mendapatkan

No	Urusan	Bidang	Permasalahan
			bantuan kebutuhan dasar dari lembaga yang bersangkutan; 5) Terbatasnya jumlah persediaan bantuan APBD Kabupaten; 6) Terbatasnya jumlah persediaan bantuan; 7) Lambatnya proses pelayanan masyarakat di desa; 8) Belum optimalnya akses pelayanan desa kepada masyarakat; 9) Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
14.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1) Belum optimalnya pengelolaan posyandu aktif; 2) Belum optimalnya swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat; 3) Belum Optimalnya Program Pemberdayaan Masyarakat; 4) Belum optimalnya pendataan anak per keluarga.
15.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Perhubungan	1) Bencana alam, jembatan runtuh; 2) Peningkatan kualitas jalan dari kelas 3 ke 2; 3) peningkatan kualitas jasa layanan angkutan; 4) Covid-19, fasilitas angkutan yang rusak dan dijual 5. banyak orang yang membeli angkutan roda empat dan roda dua; 5) Belum optimalnya pengelolaan izin trayek; 6) Belum optimalnya pengelolaan uji kir angkutan umum; 7) Belum optimalnya pengelolaan angkutan umum yang tidak memiliki KIR; 8) Belum optimalnya pemasangan rambu-rambu; 9) Belum optimalnya pengelolaan kendaraan di Kabupaten; 10) Belum optimalnya pengelolaan orang/barang yang terangkut angkutan umum; 11) Belum optimalnya pengelolaan orang/barang melalui dermaga;

No	Urusan	Bidang	Permasalahan
			12) Belum optimalnya pengelolaan orang/barang melalui terminal.
16.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Komunikasi dan Informasi	1) Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya penerapan pemerintahan berbasis elektronik; 2) Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik.
17.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Koperasi dan UMKM	1) Masih rendahnya kaderisasi generasi muda sebagai pengurus koperasi; 2) Masih rendahnya koperasi yang bergerak di sektor riil; 3) Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif; 4) Masih rendahnya kaderisasi generasi muda sebagai pengurus koperasi; 5) Masih rendahnya koperasi yang bergerak di sektor riil; 6) Potensi usaha mikro dan kecil sebagai muatan lokal belum terpetakan; 7) Minimnya usaha mikro dan kecil yang memiliki hak izin dan edar; 8) Terhambatnya promosi produk usaha mikro & kecil; 9) Belum ada formulasi untuk menghitung jumlah peningkatan presentasi kewirausahaan mikro dibagi jumlah penduduk; 10) Belum tersedianya display/ruang promosi untuk ajang promosi usaha mikro dan kecil bagi wisatawan; 11) Masih rendahnya pemberdayaan SDM usaha mikro dan kecil; 12) Belum optimalnya pemasaran produk usaha mikro dan kecil; 13) Masih rendahnya produksi produk UMKM yang belum memenuhi kriteria barang ekspor.
18.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Penanaman Modal	1) Belum adanya kajian investasi sektoral; 2) Tidak melaporkan kegiatan penanaman modal;

No	Urusan	Bidang	Permasalahan
			3) Sedikitnya investor yang masuk ke Kab. Pangandaran; 4) Kurangnya SDM yang berkompeten.
19.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Kepemudaan dan Olahraga	1) Rendahnya tingkat pembangunan terhadap Kepemudaan dan Olah Raga; 2) Belum optimalnya sistem kesehatan daerah, kualitas pelayanan pendidikan, dan peningkatan peran kepemudaan.
20.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Statistik	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi terkait pembagian tupoksi kerja antar <i>stakeholders</i> bidang statistik.
21.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Persandian	Belum optimalnya pengelolaan bidang persandian.
22.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Kebudayaan	1) Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah; 2) Kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan festival seni dan budaya; 3) Belum optimalnya pelaksanaan festival seni dan budaya; 4) Belum ditetapkannya situs dan kawasan cagar budaya di kabupaten Pangandaran; 5) Belum optimalnya perhatian dinas teknis terhadap cagar budaya; 6) Belum optimalnya pengembangan kearifan lokal sebagai daya tarik, baik dari arsitektur maupun budaya lokal; 7) Kajian tentang penetapan cagar budaya belum ada/belum disusun.
23.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Perpustakaan	1) Rendahnya kesadaran membaca masyarakat; 2) Varian kuantitas buku yang rendah; 3) Belum optimalnya fasilitas perpustakaan; 4) Belum adanya regulasi daerah berupa perda tentang pengelolaan perpustakaan; 5) Terbatasnya jumlah pustakawan daerah yang bersertifikat;

No	Urusan	Bidang	Permasalahan
			6) Kurangnya kuantitas tenaga ahli profesional; 7) Terbatasnya jumlah pengelola perpustakaan.
24.	Urusan Wajib Non Pelayanan dasar	Kearsipan	1) Belum adanya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten; 2) Kurangnya sumber daya kearsipan; 3) Rendahnya kualitas unit pengelola arsip; 4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan meliputi digital dan non-digital; 5) Rendahnya Kesadaran tentang pengelolaan arsip secara primer; 6) Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan kearsipan secara khusus; 7) Kurangnya tenaga profesional pengelola kearsipan; 8) Belum Adanya Regulasi Kearsipan Berupa Perda; 9) Belum tersedianya salinan otentik arsip terjaga.
25.	Unsur Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik	Partisipasi Pemilih/Masyarakat belum maksimal dalam menyalurkan hak pilihnya.
26.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	1) Ekspor ikan turun bahkan ditutup; 2) Belum optimalnya pengelolaan distribusi ikan; 3) kualitas nelayan yang ada masih belum mumpuni untuk memanfaatkan teknologi; 4) Belum optimalnya pendataan nelayan.
27.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Pariwisata	1) Masih rendahnya kompetensi SDM di bidang pariwisata; 2) Kurangnya promosi pariwisata; 3) Kurangnya event pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung; 4) Kurangnya promosi pariwisata; 5) Kurangnya <i>event</i> pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung; 6) Belum optimalnya pengembangan kearifan lokal sebagai daya tarik, baik dari

No	Urusan	Bidang	Permasalahan
			arsitektur maupun budaya lokal; 7) Pengembangan destinasi wisata tidak diimbangi dengan infrastruktur jalan dan lokasi yang memadai; 8) Belum optimalnya lahan Parkir; 9) Belum dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; 10) Belum optimalnya promosi daya tarik wisata; 11) Perlunya pengembangan daya tarik wisata alternatif selain wisata bahari; 12) Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata.
28.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Pertanian	1) Masih kurangnya sumber daya penyuluh pertanian; 2) Belum optimalnya pendampingan kelompok tani baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; 3) Kurangnya wawasan dalam pengembangan ternak kecil; 4) Kurangnya kemandirian petani dan kelompok tani dalam membangun agrowisata baik komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan; 5) Kurang Berkembangnya Kelompok peternakan besar, kecil dan unggas; 6) Belum meningkatnya kelembagaan ekonomi petani; 7) Sistem pertanian yang digunakan sebagian besar petani masih bersifat konvensional; 8) Kurangnya Subsidi Pemerintah khususnya sarana dan prasarana untuk gabungan kelompok tani (GAPOKTAN); 9) Belum optimalnya penggunaan kartu tani dan ERDKK.
29.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Perdagangan	1) Masih rendahnya SDM untuk ikut terlibat dan mengembangkan produk

No	Urusan	Bidang	Permasalahan
			unggulan Kabupaten Pangandaran; 2) Menurunnya daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.
30.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Perindustrian	Industri pengolahan yang berada di Kabupaten Pangandaran belum memberikan nilai tambah yang tinggi.
31.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Transmigrasi	1) Tidak Memiliki lahan dan kurangnya keterampilan SDM; 2) SDM yang memerlukan adaptasi budaya.
32.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Perkebunan	1) Banyak tanaman komoditas perkebunan yang sudah tidak produktif; 2) Belum punya hak paten varietas lokal tembakau di Kab. Pangandaran; 3) Bibit yang dihibahkan ke kelompok tani atau pihak ketiga selalu mengambil dari luar kab. Pangandaran; 4) Belum optimalnya sarana dan prasarana.
33.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Peternakan	1) Pembibitan Sapi yang Belum Bisa Dipertahankan Populasinya; 2) Keberadaan Pakan yang belum mampu menutupi biaya operasional budi daya; 3) Untuk Unggas Kondisi Kebutuhan Pakan yang belum optimal yang diselenggarakan secara mandiri; 4) Pemotongan hewan betina produktif; 5) Rendahnya jaminan daging yang ASUH; 6) Pengeluaran bibit ternak; 7) Resiko penyebaran penyakit hewan; 8) Cekaman stress di pasar hewan; 9) Penyediaan obat-obatan belum optimal; 10) Rendahnya Pengawasan Kesehatan Hewan; 11) Cekaman stres di pasar hewan; 12) Penyediaan obat-obatan belum optimal;

No	Urusan	Bidang	Permasalahan
			13) Rendahnya Pengawasan Kesehatan Hewan; 14) Penjualan hewan kurban yang tidak memenuhi syarat kurban; 15) Pemeriksaan hewan kurban pada saat <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> yang masih rendah; 16) Pemalsuan/pencampuran pangan asal hewan; 17) Rendahnya sanitasi dan higienis/cemaran mikroba; 18) Penggunaan bahan kimia; 19) Penjualan hewan kurban yang tidak memenuhi syarat kurban; 20) Pemeriksaan hewan kurban pada saat <i>ante mortem</i> dan <i>post mortem</i> yang masih rendah. 21) Belum adanya Fasilitas Rumah Potong Hewan; 22) Cekaman stres pada ternak (a) bebas dari rasa lapar dan haus ;b) bebas dari rasa tidak nyaman; c) bebas dari rasa takut dan tertekan; d) bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami); 23) Sebagai daerah pariwisata, Kabupaten Pangandaran perlu menjaga dan menjamin wilayahnya terbebas dari penyakit hewan menular strategis yang bersifat zoonosis seperti Rabies, Brucelosis, Antraks dan Avian Influenza; 24) Mulai meningkatnya jumlah <i>pet shop</i> dan <i>poultry shop</i> di wilayah Pangandaran.
34.	Urusan Pemerintahan Pilihan	Pertanahan	Masih adanya kasus sengketa batas wilayah.
35.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	1) Penetapan anggaran kesulitan karena sesuai dengan DPA; Dinamika politik; <i>refocusing</i> anggaran; 2) Dampak demokratisasi tidak didasari dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila, sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mengutamakan semangat gotong royong, saling menghormati, kesamaan tata nilai dan tata laku bangsa;

No	Urusan	Bidang	Permasalahan
			3) Keterbatasan kemampuan cakupan kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan; 4) Rendahnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.
36.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Masih rendahnya tingkat kesetaraan gender anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.
37.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan	1) Belum optimalnya pencapaian Nilai SAKIP Unsur Perencanaan yang baik; 2) Belum optimalnya pencapaian Nilai SAKIP Bappeda yang baik.
38.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Keuangan	Belum optimalnya kemampuan fiskal daerah.
39.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Kepegawaian	1) Belum optimalnya pengendalian rekomendasi yang diterbitkan serta yang ditindaklanjuti; 2) Belum optimalnya Rancangan Produk Hukum Daerah yang disinkronisasi dan diharmonisasi; 3) Keterlambatan penyampaian data dari SKPD terkait; 4) Jadwal kegiatan keagamaan yang belum pasti dan perubahan jadwal; 5) Belum optimalnya produktivitas kelembagaan; 6) Terlambatnya pengumpulan data; 7) Adanya kurang kesesuaian data yang diterima; 8) Kualitas dan kuantitas SDM; 9) Adanya kelambatan pengimportan data; 10) Adanya pengalihan versi aplikasi SPSE; 11) Belum optimalnya perawatan jaringan; 12) Belum optimalnya koordinasi SKPD urusan wajib pelayanan dasar dalam pelaporan; 13) Terlambatnya pengumpulan data; 14) Adanya kurang kesesuaian data yang diterima; 15) Kualitas dan kuantitas SDM;

No	Urusan	Bidang	Permasalahan
			16) Kurangnya sistem informasi IT Sakip. 17) Belum optimalnya kuantitas SDM dalam Pelaksanaan Kebijakan KDH yang telah di Evaluasi; 18) Belum Optimalnya penerapan SPM dalam pengendalian; 19) Belum optimalnya fasilitas pelayanan KDH/WKDH; 20) Belum lengkapnya data base di SKPD terkait; 21) Belum optimalnya sosialisasi terkait pembinaan hukum; 22) Jadwal kegiatan keagamaan yang belum pasti dan perubahan jadwal; 23) Belum adanya sistem evaluasi fisik realisasi anggaran.
40.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan dan Pelatihan	1) Rendahnya rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Diklat Formal; 2) Semakin menurunnya jumlah Total ASN.
41.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Penelitian dan Pengembangan	1) Belum optimalnya penyusunan kelitbangan dalam RKPD; 2) Belum optimalnya penyusunan kelitbangan dalam RPJMD; 3) Belum optimalnya pengelolaan Indeks Inovasi Daerah.
42.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengelolaan Perbatasan	1) Permasalahan terkait ODGJ belum sepenuhnya tertangani; 2) Belum adanya sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan PMKS; 3) Ketimpangan sarana dan prasarana kesehatan; 4) Penanganan dampak eksploitasi lingkungan di sekitar pantai dan laut; 5) Antisipasi akan adanya gangguan keamanan di wilayah pesisir seperti <i>illegal fishing</i> , <i>transshipment</i> , <i>drug smuggling</i> , <i>human trafficking</i> .
43.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Inspektorat Daerah	1) Terjadi temuan berulang di bidang fisik dan non fisik

No	Urusan	Bidang	Permasalahan
			sarana prasarana terkait nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD; 2) Evaluasi implementasi SPIP belum dilaksanakan secara menyeluruh; 3) Belum adanya komitmen dari tiap OPD terkait SPIP; 4) Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dalam mencapai nilai yang sangat baik; 5) Belum adanya komitmen dan kurangnya integritas SDM dalam meningkatkan Nilai SAKIP OPD.
44.	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	1) Kurangnya koordinasi antar desa di wilayah kecamatan maupun di wilayah perbatasan; 2) Pengembangan dan pemanfaatan potensi di tiap kecamatan masih kurang; 3) Masih kurangnya SDM dan sarpras penunjang di kecamatan.

Sumber: Data Diolah oleh Penyusun, 2023

Selain pada identifikasi permasalahan seperti tabel di atas, terjadinya pandemi virus Covid-19 telah mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat terutama pada tahun 2020 dan 2021, dampak tersebut juga dirasakan bagi masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dampak dari *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) bagi kehidupan masyarakat masuk ke berbagai lini sektor. Secara pendidikan, pelajar dan mahasiswa dalam melanjutkan pembelajaran menggunakan sistem

daring. Pembelajaran melalui sistem daring memberikan beberapa dampak bagi masyarakat, pelajar lebih mudah mengalami stres, karena kesulitan menerima pembelajaran tanpa penjelasan secara langsung, kendala internet dan kuota yang dialami pelajar dan wali murid, karena tidak semua daerah mendapatkan koneksi internet. Tidak hanya sampai di situ, penggunaan kuota yang dibutuhkan pelajar setiap harinya baik dalam menerima informasi materi pembelajaran, distribusi tugas dari pengajar sampai dengan kebutuhan untuk mengerjakan tugas, semua itu membutuhkan kuota yang tidak sedikit. Berkurangnya interaksi pelajar karena sistem daring, sedikit banyak akan mempengaruhi pertumbuhan emosional pelajar, karena berkurangnya interaksi antar pelajar sehingga berdampak pada pertumbuhan emosional pelajar.

Dalam kaitannya dengan sektor sosial dan ekonomi, masyarakat saat ini dalam menjalani kehidupan sehari-hari memiliki perasaan khawatir dan ketakutan karena virus Covid-19, dalam masa pandemi ini terjadi perubahan pola hidup, adanya transformasi dimana *physical distancing* harus secara tertib dan disiplin dilakukan oleh seluruh masyarakat agar menekan tingkat penyebaran virus Covid-19. Hal ini pemerintah daerah khususnya harus secara tegas dalam menertibkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjalani tertib protokol kesehatan, dan transformasi “*New Normal*” ini karena tidak semua masyarakat bersedia dan disiplin dalam menjalankannya. Dari segi perekonomian, tidak bisa dipungkiri bahwa terjadi krisis ekonomi di tengah masyarakat, baik dari segi sektor pariwisata, hotel, pusat perbelanjaan, sampai dengan menurunnya budaya konsumtif masyarakat. Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan masyarakat harus berjuang untuk bertahan hidup. Pemerintah daerah harus dapat mewadahi dan memberikan solusi untuk lapangan kerja bagi masyarakat. Karena pengangguran dan kemiskinan menjadi pemicu meningkatnya kejahatan yang mengancam rasa Aman.

Dari sisi kesehatan, masyarakat saat keluar dari rumah harus selalu menggunakan masker, tidak hanya itu pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan juga dapat membagikan vitamin, masker atau *hand sanitizer* kepada masyarakat atau menggalakkan cara mencuci tangan sesuai dengan yang dianjurkan. Sebagai penanggulangan penyebaran virus dan peningkatan sistem imun. Hal-hal dari uraian di atas merupakan kondisi masyarakat yang perlu adanya tindak lanjut dan perhatian dari pemerintah daerah, oleh karena itu dalam pelaksanaan perencanaan isu-isu tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam pembentukan program dan kegiatan ke depan.

2.5 Inovasi Daerah

Inovasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Ukuran seberapa kemajuan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari inovasi-inovasi yang dihasilkan. Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonomi baru tentunya dihadapkan dengan berbagai keterbatasan sumber daya. Apabila hanya bekerja dengan cara yang biasa saja tentu akan ketinggalan dari daerah lain.

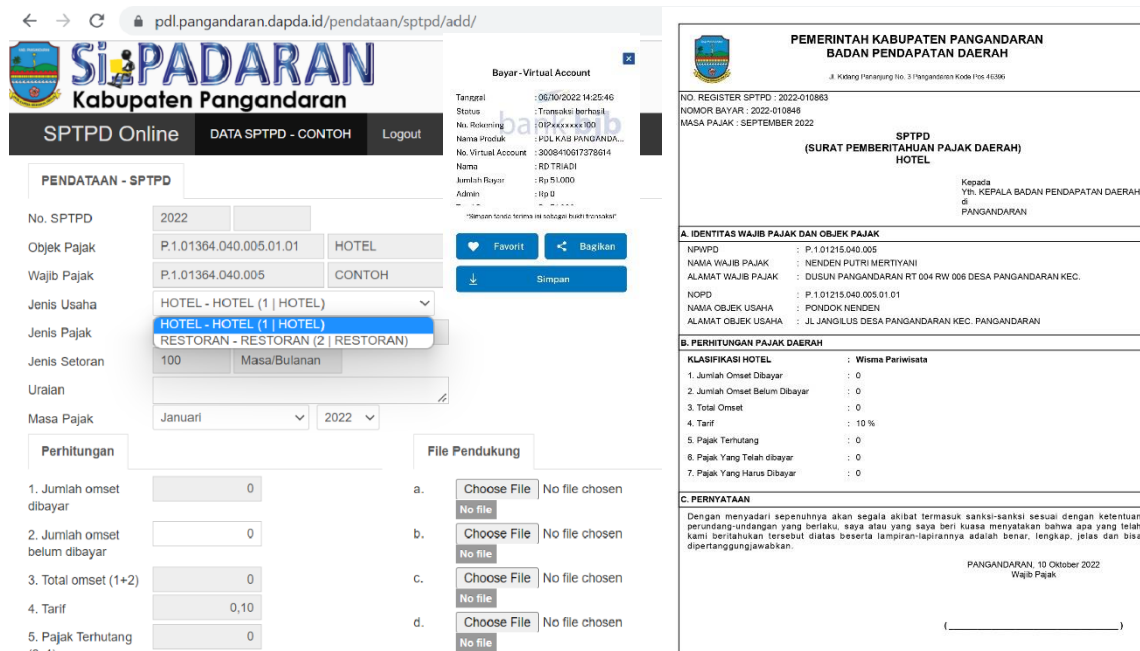
2.5.1 API Virtual Account Pembayaran Pajak Daerah

Pembagian pengelolaan pajak menurut kewenangan pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tanganya sendiri secara bertanggung jawab. Dalam upaya mendukung kinerja pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah secara aktif menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diimplementasikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada sektor pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan terus melakukan langkah-langkah maju dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, serta berkomitmen untuk mewujudkan *clean government* dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri dari beberapa Pajak Daerah, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Mineral Batuan Mineral Bukan Logam.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan pajak daerah di Kabupaten Pangandaran khususnya pada pajak daerah lainnya dapat menikmati layanan pembayaran secara online melalui Teller, ATM Bank BJB, Internet Banking dan channel lainnya. Pada awal tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pendapatan daerah berupaya semaksimal mungkin memfasilitasi agar penerimaan pajak daerah lebih optimal, salah satunya dengan membuka layanan pembayaran pajak daerah melalui *API Virtual Account* (VA) dan QRIS sebagai langkah dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), penambahan beberapa menu pada aplikasi pajak daerah untuk mempermudah dalam pencatatan dan pengolahan data pajak daerah.



The screenshot displays the SPTPD Online application interface for Kabupaten Pangandaran. The main form is titled "PENDATAAN - SPTPD" and includes fields for "No. SPTPD" (2022), "Objek Pajak" (P.1.01364.040.005.01.01 HOTEL), "Wajib Pajak" (P.1.01364.040.005 CONTOH), "Jenis Usaha" (HOTEL - HOTEL (1 | HOTEL)), "Jenis Pajak" (HOTEL - HOTEL (1 | HOTEL)), "Jenis Setoran" (100 Masa/Bulanan), and "Uraian" (Masa/Bulanan). The "Perhitungan" section shows the following values: 1. Jumlah omset dibayar (0), 2. Jumlah omset belum dibayar (0), 3. Total omset (1+2) (0), 4. Tarif (0,10), and 5. Pajak Terhutang (0). The "File Pendukung" section includes four upload buttons labeled a, b, c, and d, each with a "Choose File" button and a "No file chosen" message. The right side of the interface shows a summary of the taxpayer information, including the "PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH" and the "SPTPD (SURAT PEMBERITAHAUAN PAJAK DAERAH) HOTEL".

Gambar 2. 17 Aplikasi API Virtual Account Pembayaran Pajak Daerah

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran

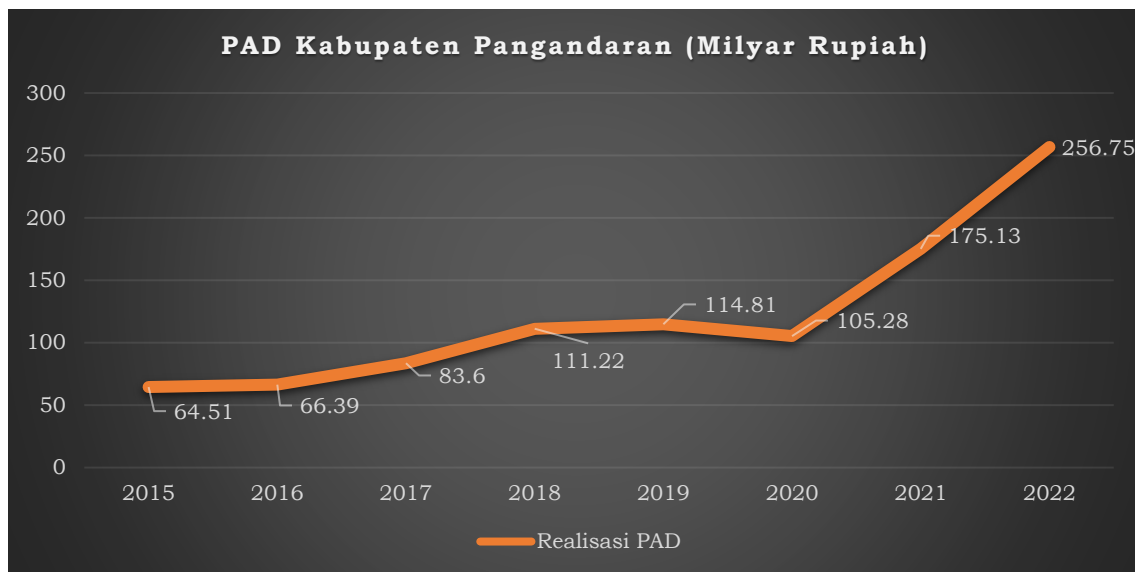
Para wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran berbasis online untuk pajak daerah lainnya melalui virtual account serta QRIS dianggap lebih cepat dan praktis. Wajib pajak tidak perlu melakukan konfirmasi pembayaran melalui pengiriman bukti transfer. Pembayaran tagihan akan menjadi lebih mudah untuk setiap transaksi, karena wajib pajak akan mendapatkan satu nomor ID VA yang unik sesuai dengan nominal transaksi.

Tujuan inovasi penerapan sistem aplikasi *API Virtual Account* (VA) antara lain:

- Menyediakan aplikasi *API Virtual Account* serta QRIS yang terhubungan dengan Bank BJB untuk pembayaran pajak daerah lainnya.
- Menyediakan *chanel* Pembayaran *Virtual Account* dan QRIS untuk pembayaran pajak daerah lainnya bagi wajib pajak.
- Mempermudah dalam pelayanan masyarakat di bidang perpajakan dengan bertambahnya *chanel* pembayaran melalui *Virtual Account* ataupun QRIS.

Pembayaran transaksi melalui *virtual account* serta QRIS dianggap lebih cepat dan praktis. Wajib pajak tidak perlu melakukan konfirmasi pembayaran melalui pengiriman bukti transfer. Pembayaran tagihan akan menjadi lebih mudah untuk setiap transaksi, karena wajib pajak akan mendapatkan satu nomor ID VA yang unik sesuai dengan nominal transaksi. Manfaat penerapan sistem aplikasi *API Virtual Account* adalah mempermudah para wajib pajak dalam melaksanakan transaksi pembayaran pajak berbasis online dan diharapkan dapat meningkatkan realisasi pendapatan daerah. Adapun dampak yang dapat dirasakan dengan diimplementasikannya inovasi *API Virtual Account* ini adalah adanya peningkatan realisasi pendapatan daerah yang cukup signifikan pada penerimaan PAD tahun 2022 yang bisa dilihat melalui grafik 2.6 dibawah ini.

**Grafik 2. 6 Realisasi PAD Kabupaten Pangandaran
Tahun 2015-2022**



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023

2.5.2 Perizinan Menjangkau Kampung Menggandeng Para Pedagang (Perjaka Gandang)

Pedagang di pelosok kampung yang belum memiliki izin usaha (NIB) menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangandaran. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengatur tentang persyaratan mendirikan usaha dan pendaftaran usaha di Indonesia. Pasal 26 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa setiap orang yang akan menjalankan usaha di Indonesia wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Meskipun memiliki dasar hukum, masih banyak pedagang yang belum memiliki legalitas usaha. Hal ini terjadi karena keterbatasan akses dan pemahaman teknologi informasi yang masih rendah. Selain itu, jarak yang jauh dari lokasi para pedagang yang berada di pelosok dengan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku *leading sector* dalam memberikan pelayanan perizinan di Kabupaten Pangandaran juga menjadi kendala dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam kondisi seperti ini, para pedagang menjadi rentan terhadap tindakan penegak hukum yang dapat mengganggu kegiatan usaha mereka.

Pada tahun 2022, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran membuat suatu ide atau gagasan untuk menghadirkan inovasi baru bernama Perjaka Gandang (Perizinan Menjangkau Kampung Menggandeng Para Pedagang), sebuah program perizinan yang menjangkau kampung-kampung terpencil dengan melibatkan para pedagang lokal. Program ini terinspirasi dari hasil survey lapangan yang menunjukkan bahwa masih banyak para pedagang di pelosok yang belum memiliki izin usaha (NIB) dan kesulitan dalam mengurus legalitas usaha mereka.

Perjaka Gandang bertujuan untuk memudahkan para pedagang dalam mendapatkan izin usaha dengan cara mendatangi mereka secara langsung. Hal ini menjadi solusi bagi para pedagang yang kesulitan

dalam mengurus legalitas usaha mereka karena jarak yang jauh dengan kantor DPMPTSP serta keterbatasan akses informasi dan teknologi di daerah mereka.

Program ini dilakukan dengan cara membentuk tim yang terdiri dari petugas DPMPTSP dan tenaga ahli teknologi informasi yang terjun ke lapangan untuk mendatangi kampung-kampung dan memfasilitasi para pedagang dalam mengurus izin usaha. Tim tersebut akan membantu para pedagang dalam mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang diperlukan secara online. Selain itu, tim juga memberikan edukasi dan pelatihan tentang pentingnya legalitas usaha serta tata cara mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Perjaka Gandang merupakan inovasi yang sangat penting bagi para pedagang di kampung-kampung terpencil yang selama ini merasa kesulitan dalam mengurus legalitas usaha mereka. Program ini juga mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di daerah melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), para pedagang akan mendapatkan legalitas usaha yang sah dan terlindungi, sehingga mereka dapat lebih leluasa dalam mengembangkan usahanya.

Dengan demikian, Perjaka Gandang adalah inovasi yang sangat baik dalam memajukan perekonomian daerah dan memberikan akses yang lebih mudah bagi para pelaku usaha di daerah terpencil. Diharapkan dengan adanya program ini, para pelaku usaha dapat lebih mudah dan cepat dalam mengurus legalitas usaha mereka dan dapat lebih leluasa dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

2.5.3 Rakyat Nanjeur, Cageur, tur Tahan Pangan (Rancatan)

Kabupaten Pangandaran memiliki potensi alam selain dimanfaatkan untuk pariwisata dan perikanan juga untuk bidang pertanian. Luas lahan sawah di Kabupaten Pangandaran tahun 2022 seluas 16.727 Ha dengan total produksi padi sebesar 210.144,68 Ton atau setara 131.761,82 ton beras. Sedangkan jumlah kebutuhan

konsumsi beras sebanyak 41.819,27 ton sehingga kondisi neraca beras di Kabupaten Pangandaran surplus/berlebih. Realita di lapangan, padi produksi Kabupaten Pangandaran banyak yang dijual ke luar daerah, diolah di luar daerah dan dipasarkan kembali ke Pangandaran. Adapun yang sudah digiling di Kabupaten Pangandaran sendiri masih dalam kondisi beras dengan kualitas rendah, maka perlu dilakukan proses colour sorter yang alatnya belum ada di Kabupaten Pangandaran yang menyebabkan petani perlu melakukannya di luar daerah Kabupaten Pangandaran untuk mendapatkan beras dengan kualitas bagus. Tidak banyak petani yang melakukan proses colour sorter. Selain membutuhkan biaya lebih juga jarak yang ditempuh terlalu jauh. Sehingga banyak petani yang hanya mengambil keuntungan dari segi produksi gabah saja atau beras dengan kualitas rendah.

Di sisi lain, jumlah lumbung pangan masyarakat di Kabupaten Pangandaran cukup banyak sekitar 195 lumbung yang tersebar di 10 Kecamatan. Keberadaan lumbung pangan masyarakat merupakan salah satu kearifan lokal di Kabupaten Pangandaran yang sudah lama berjalan hingga sekarang, namun masih dalam cakupan yang terbatas.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi produksi padi di Kabupaten Pangandaran tersebut perlu didukung mulai dari proses penyimpanan, pengolahan sampai pemasaran produk dengan memanfaatkan keberadaan Lumbung Pangan Masyarakat sehingga dapat meningkatkan motivasi dan nilai tambah bagi petani maka tercetuslah program Rancangan.

Rancangan merupakan istilah dalam bahasa Sunda yang artinya Pikulan berbahan bambu/kayu/besi untuk membawa barang/makanan oleh masyarakat pada jaman dahulu. Sedangkan arti dari kepanjangan Program Rancangan (Rakyat Nanjeur Cageur tur Tahan Pangan) yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Maju, Sehat dan Tahan Pangan.

Program Rancangan ini berupa pemberian bantuan stimulan berupa sarana prasaran pengolahan padi dan beras sebagai pendukung peningkatan kualitas produk beras serta pendampingan dan pelatihan

dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola lumbung hingga pelaporan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban Gapoktan.

Program Rancangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat telah berjalan selama 2 Tahun dengan pangsa pasar selain di daerah Kabupaten Pangandaran juga memiliki pangsa pasar diluar daerah seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Ciamis. Keberhasilan tersebut namun masih terhambat dengan sarana pendukung serta SDM yang terbatas.

Kebaharuan program Rancangan yaitu mengefisienkan proses produksi yang sebelumnya harus memproduksi beras kualitas baik diluar daerah. Dengan adanya program ini dapat memproduksi di daerah Kabupaten Pangandaran melalui bantuan berupa mesin colour sorter beras dan alat tes kadar air sebagai upaya penguatan modal lumbung pangan masyarakat serta pemberian Pelatihan kepada anggota Gapoktan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM dalam Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Diharapkan dengan bantuan tersebut Gapoktan Lumbung Pangan Masyarakat dapat memproduksi sendiri di daerah Kabupaten Pangandaran.

Selain pengembangan sarana produksi beras, Kebaharuan yang ditawarkan Rancangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat adalah melakukan Pendampingan kepada Gapoktan dalam pelaporan perkembangan lumbung pangan masyarakat secara online, berkala, realtime dan berkelanjutan sehingga memudahkan semua pihak dalam mengaksesnya serta membentuk tren data yang lengkap dan runtut. Hal tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban mereka yang telah menerima bantuan. Selain itu, bahan laporan tersebut akan disusun untuk dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan kedepannya.

Keberlanjutan Program ini diharapkan dapat menarik perhatian stakeholder terkait distribusi ketersediaan beras seperti Perum Bulog,

BumDes, Lembaga Zakat dan organisasi lainnya untuk bekerja sama dengan Gapoktan. Terkait penguatan modal, Gapoktan dapat bekerjasama dengan pihak perbankan dengan penawaran produknya yang lebih menguntungkan. Selain kerjasama dengan pihak lain, dengan program ini dapat memperoleh dukungan dari pemerintah Kabupaten Pangandaran sendiri untuk meningkatkan pangsa pasar yang lebih luas guna terwujudnya masyarakat yang maju, sehat dan tahan pangan. Adapun untuk indikator keberhasilan kegiatan Rancangan tahun 2024 sebagaimana gambar dibawah ini:



Gambar 2. 28 Indikator Kegiatan Rancangan

Sumber : Dinas Kelautan , Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran

BAB III

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2024

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kerangka ekonomi makro daerah dan keuangan daerah. Kerangka ekonomi makro daerah memberikan gambaran kondisi perekonomian terkini Kabupaten Pangandaran dan perkiraan perekonomian ke depan, sementara keuangan daerah memberikan gambaran kemampuan daerah dalam membiayai program-program pembangunan. Lebih jelasnya, dua informasi ini menggambarkan seperti apa kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan daerah, pelaksanaan program-program pembangunan tahun 2024 dan dampak program-program tersebut pada kesejahteraan masyarakat. Gambaran tersebut terefleksikan dari target/proyeksi kerangka ekonomi makro daerah Kabupaten Pangandaran.

Kerangka ekonomi daerah dan proyeksi perekonomian daerah dapat menjadi landasan untuk menentukan arah kebijakan alokasi keuangan daerah secara optimal. Hal tersebut dilakukan melalui suatu pendekatan, *money follow program*, yang bermuara pada alokasi anggaran daerah yang efektif dan efisien. Dalam menentukan kapasitas keuangan pada pendanaan program pembangunan yang akan datang, posisi realisasi anggaran pada tahun sebelumnya menjadi sangat penting. Sehingga jumlah kapasitas keuangan tersedia sesuai dengan target anggaran yang direncanakan Berdasarkan hasil evaluasi proyeksi anggaran atas kondisi keuangan yang ada maka kerangka ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Pangandaran akan dijelaskan dalam sub bab berikut:

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Arah

pembangunan ekonomi daerah berarti melaksanakan pembangunan ekonomi daerah sesuai dengan arah kebijakan daerah sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman pada perekonomian global, ekonomi nasional, ekonomi provinsi dan berlandaskan pada kondisi perekonomian di Kabupaten Pangandaran.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023, target tahun 2023, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2023 dan 2024. Pada awal tahun 2020 sampai dengan pertengahan tahun 2022, pandemi COVID-19 membuat kondisi ekonomi global memburuk yang memberikan dampak juga pada berkontraksinya kondisi ekonomi di Kabupaten Pangandaran.

Dampak pandemi COVID-19 terjadi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan saat ini. Dampak dalam aspek perekonomian ditimbulkan akibat dari ancaman pandemi Covid-19 pada kesehatan masyarakat dan penanganannya yang sehingga berujung aktivitas ekonomi yang menurun tajam. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Langkah penanganan yang ditempuh yakni dengan menggelontorkan stimulus ekonomi melalui instrumen fiskal dan moneter. Pada tahun 2023 kondisi kesehatan masyarakat akibat Covid-19 diprediksi akan membaik, sehingga perekonomian Kabupaten Pangandaran diperkirakan sudah mulai bangkit. Prediksi perbaikan kondisi perekonomian berdasarkan kepada asumsi meningkatnya aktivitas di beberapa sektor lapangan usaha, dimulainya kembali pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan digitalisasi perdagangan.

Pada tahun 2024 diproyeksikan masih melanjutkan perbaikan kondisi perekonomian yang jatuh pada tahun 2020 hingga tahun 2022 awal. Implementasi kebijakan 2023 dengan berbagai upaya pemulihan seperti halnya peningkatan ekosistem investasi, pemberdayaan UMKM,

kemudahan untuk berusaha, dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan terus diimplementasikan di tahun 2024 sebagai titik balik pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Perbaikan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024, menjadi dasar kebijakan prioritas pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Pangandaran di tahun tersebut. Oleh karena kebijakan ekonomi daerah yang merupakan bagian dari pembangunan daerah diharapkan dapat mengakomodasi dan mengelola sumber daya yang ada sehingga membantu proses pembangunan berlangsung secara optimal.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

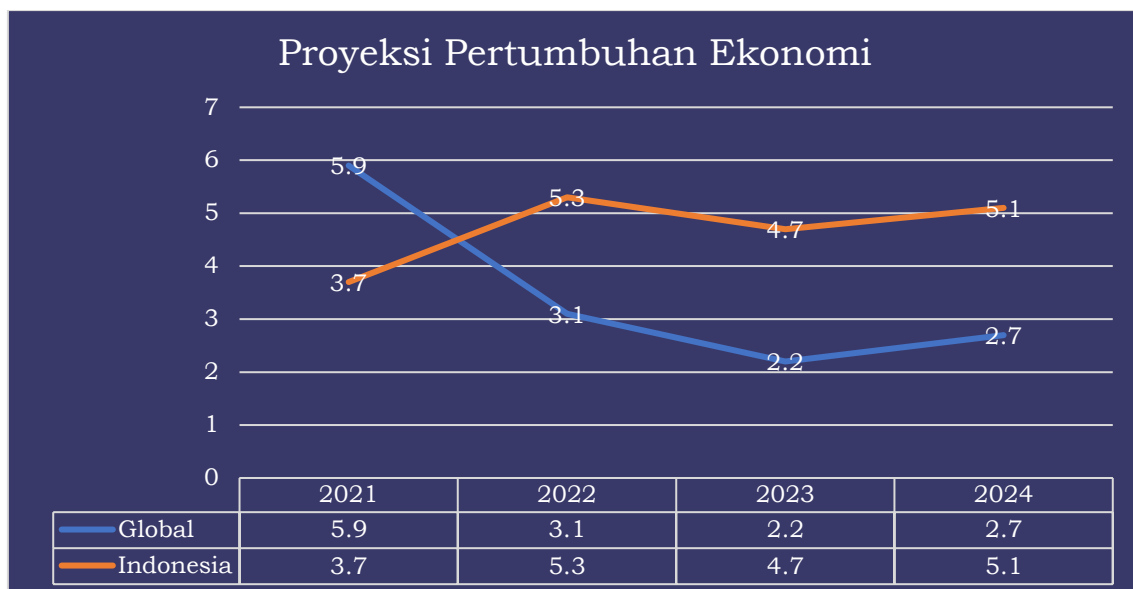
Arah kebijakan ekonomi nasional dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan oleh Dana Moneter Internasional pada tahun 2023 hanya tumbuh 2,7%, angka ini turun dibandingkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2022 yang diperkirakan tumbuh 3,2%. Angka ini menjadi yang terlemah sejak tahun 2001, kecuali untuk krisis keuangan global dan fase akut pandemi Covid-19, dan mencerminkan adanya perlambatan signifikan bagi ekonomi global. Hal ini dikarenakan adanya lonjakan inflasi di sejumlah negara, pengetatan kondisi keuangan di sebagian besar wilayah, konflik Rusia-Ukraina, dan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Penurunan *double-digit* pada produk domestik bruto (PDB) Ukraina dan pergolakan pada ekonomi Rusia selain memangkas pertumbuhan ekonomi, juga akan memicu adanya inflasi yang mana hal ini menciptakan efek rambatan terhadap seluruh negara di dunia. Kenaikan bahan bakar dan harga pangan yang cepat akan sangat berdampak pada masyarakat, utamanya di negara-negara dengan pendapatan rendah. Tentunya hal ini berimbas pula terhadap ekonomi Indonesia. Kontraksi PDB riil yang berlangsung setidaknya dua kuartal

berturut-turut juga terlihat di beberapa titik selama 2022-2023. Kontraksi terjadi sekitar 23%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Bank Dunia (*World Bank*) diproyeksikan stabil di kisaran 5%, Pada tahun 2022 ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh 5,1%, begitu pula pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh 5,1%. Proyeksi tersebut tumbuh pesat dibanding realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 yang hanya tumbuh 3,7%. Indonesia dikatakan lebih *resilience* dibandingkan negara-negara di Eropa yang mengalami penurunan proyeksi hingga 1%. Dalam laporan GEP, Bank Dunia juga menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia akan mendapat dorongan dari kenaikan harga komoditas karena kondisi pandemi yang mulai terkendali. Dalam laporan *Danareksa Research Institute* (DRI) optimis bahwa ekonomi Indonesia akan melanjutkan pertumbuhan dalam rentang 5,2%-5,35% pada tahun 2024. Perkiraan tersebut didasarkan pada perkembangan ekonomi terkini dan potensi serta tantangan ke depan bahwa perekonomian domestik diperkirakan akan terus pulih.

Grafik 3. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Ekonomi Global Tahun 2021-2024



Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), diolah 2023

Dalam laporan *Economic Outlook* November 2022, OECD lebih optimis dibanding proyeksi dari Bank Dunia yang menilai pertumbuhan ekonomi global bisa jatuh ke 0,5% pada tahun 2023 dan 2% pada tahun 2024. Perekonomian global menghadapi tantangan yang berat di tengah laju inflasi tinggi dan keyakinan pasar yang melemah, berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditopang kuatnya permintaan komoditas ekspor utama yang tertunda sejak pandemi. OECD juga menyebutkan ada sejumlah risiko yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti persoalan energi, pupuk, pangan dan ketegangan sosial menjelang pemilu 2024 sebagai resiko utama. Keadaan ini memaksa adanya kebijakan moneter yang ketat, sementara dukungan untuk rumah tangga rentan harus tetap terjaga.

Arah kebijakan ekonomi daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu dipahami pokok pokok kebijakan pembangunan umum nasional. Adapun kondisi perkembangan perekonomian Indonesia dan target pertumbuhannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Realisasi dan Target Pertumbuhan Struktur Ekonomi Nasional

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Outlook 2023	Proyeksi 2024
Pertumbuhan PDB	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,3	5,3-5,55	6,2,6,5
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,91	3,64	1,75	1,84	2,3	3,2-3,5	4,0-4,1
Pertambangan dan Penggalian	2,16	1,22	-1,95	4,00	4,4	4,1-4,3	2,0-2,2
Industri Pengolahan	4,27	3,80	-2,93	3,39	4,9	5,3-5,6	7,7-8,1
Pengadaan Listrik dan Gas	5,47	4,04	-2,34	5,55	6,6	5,3-5,6	5,7-6,1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,46	6,83	4,94	4,97	3,2	3,8-4,0	4,9-5,0
Konstruksi	6,09	5,76	-3,26	2,81	2,0	6,1-6,3	6,6-6,9
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,97	4,62	-3,72	4,65	5,5	5,6-5,8	6,4-6,8
Transportasi dan Pergudangan	7,01	6,40	-15,04	3,24	19,9	7,7-8,0	7,5-8,0

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Outlook 2023	Proyeksi 2024
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,66	5,80	-10,22	3,89	12,0	6,0-6,5	6,7-6,8
Informasi dan Komunikasi	7,04	9,41	10,58	6,81	7,7	7,8-8,0	9,1-9,8
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,17	6,60	3,25	1,56	1,9	3,4-3,6	7,3-7,8
Real Estate	3,58	5,74	2,32	2,78	1,7	2,9-3,4	5,3-5,4
Jasa Perusahaan	8,64	10,25	-5,44	0,73	8,8	4,7-5,1	8,7-8,8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,02	4,67	-0,03	-0,33	2,5	2,6-2,9	5,4-5,6
Jasa Pendidikan	5,36	6,29	2,63	0,11	0,6	2,5-2,8	5,7-5,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,13	8,68	11,60	6 10,46	2,7	3,7-3,8	8,5-8,6
Jasa Lainnya	8,99	10,55	-4,10	2,12	9,5	7,6-7,9	9,7-9,7

Sumber: BPS, RPJMN 2020-2024, RKP Nasional, diolah 2023

Kondisi perekonomian Indonesia pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami kondisi fluktuatif dan cenderung menurun karena adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020. Kondisi pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi menurun sampai dengan -2,07. Kondisi ini mulai membaik di tahun berikutnya karena penerapan kebijakan penanganan pandemi, sehingga memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II tahun 2022 mencapai Rp 4.919,9 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan II terhadap triwulan II 2021 tumbuh sebesar 5,23%. Pertumbuhan ini terjadi hampir semua lapangan usaha, kecuali konstruksi yang berkontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,15% dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 9,28%. Sementara itu, lapangan usaha pertambangan dan penggalian (3,56%); perdagangan besar dan eceran (2,17%); reparasi mobil dan sepeda motor (0,04%); serta industri pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha lainnya pertumbuhan signifikan, diantaranya jasa pendidikan sebesar 7,43%;

transportasi dan pergudangan sebesar 6,78%; dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 4,94%.

Penguatan ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2022 terlihat pada semua wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor utama dengan peranan sebesar 56,55% dari ekonomi nasional, dengan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,66% (y-on-y) dibanding triwulan II-2021. Angka tersebut terus meningkat sampai dengan akhir tahun 2022 yang dihitung berdasarkan PDB ADHK mencapai Rp 19.588,4 triliun atau tumbuh sebesar 5,31%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,36% (q to q), peningkatan tertinggi dari sisi produksi dan lapangan usaha administrasi pemerintah.

Tabel 3. 2 Sasaran Ekonomi Nasional Tahun 2024

Uraian	2022	2023 Outlook	2024	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% <i>yoy</i>)	5,3%	5,3-5,5	6,2-6,5	5,3-5,7
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>yoy</i>): Akhir Periode	5,5	3,6	2,7	1,5-3,5
Neraca Pembayaran				
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (% <i>yoy</i>)	25,80%	5,9-11,7%	N/A	9,8%
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	137,2	144,2-145,3	159,5	149,1-150,2
-dalam bulan impor	6,0	6,1-60	6,9	6,0-5,8
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	1,0	0,5-0,5	(1,7)	0,5-0,4
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,4%	9,6%	10,7-12,3%	9,9-10,2%
Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,4)	(0,8)	0,2-0,0	(0,0)-(0,4)

Uraian	2022	2023 Outlook	2024	
			RPJMN	Sasaran
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,4)	(2,8)	(1,5)-(1,7)	(2,2)-(2,6)
Rasio Utang Pemerintah (% PDB)	39,5	39,4	28,5-29,2	38,1-39,0
PMTB/Investasi				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	3,9	6,1-6,3	8,0-8,4	6,2-7,0
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.207,2	1.200-1.300	1.500	1.450-1.650
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,3-6,0	3,6-4,3	5,0-5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	8,5-9,0	6,0-7,0	6,5-7,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,375-0,378	0,360-0,374	0,374-0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,91	73,36-73,37	75,54	73,99-74,02
Penurunan Emisi GRK	26,87	27,02	27,3	27,27
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	107,33	105-107	105	105-108
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106,45	107-108	107	107-110

Sumber: Ranwal RKP Nasional 2024, diolah 2023

Sasaran ekonomi makro nasional tahun 2024 adalah mempercepat agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3-5,7% pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut yang akan meningkatkan GNI perkapita (Atlas Method) menjadi US\$4.970-5.510 dengan kategori *upper-middle income countries*. Stabilitas ekonomi makro tahun 2024 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dengan menjaga indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin kesinambungan dalam jangka menengah panjang. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 1,5-3,5% (*yoy*) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp14.800-Rp15.400 per US\$. Pada tahun 2024, TPT diupayakan turun menjadi 5,0-5,7%.

Demikian pula Rasio GINI turun menjadi 0,374–0,377. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,99–74,02. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 105–108 dan NTN pada kisaran 107–110.

Tabel 3. 3 Sasaran Fiskal Nasional Tahun 2024 (Persen PDB)

Uraian	2022	APBN 2023	2024	
			RPJMN	Sasaran/RKP
Pendapatan Negara dan Hibah	13,4	11,7	12,9-14,6	11,8-12,4
Penerimaan Perpajakan	10,4	9,6	10,7-12,3	9,9-10,2
PNBP	3,0	2,1	2,1-2,2	1,9-2,2
Belanja Negara	15,8	14,5	14,4-16,3	14,0-11,4
Belanja Pemerintah Pusat	11,6	10,7	9,5-11,2	10,4-11,4
TKDD	4,2	3,9	4,9-5,1	3,5-3,7
Keseimbangan Primer	(0,4)	(0,8)	0,2-0,0	(0,0)-(4)
Surplus/Defisit	(2,4)	(2,8)	(1,5)-(1,7)	(2,2)-(2,6)
Rasio Utang	39,5	39,4	28,5-29,2	38,1-39,0

Sumber: RPJMN 2020-2024 dan Ranwal RKP Nasional 2024, diolah 2023

Arah kebijakan ekonomi daerah harus selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Hal ini terdapat relevansi pokok-pokok kebijakan pembangunan umum nasional dengan arah kebijakan ekonomi daerah. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional antara lain sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Dalam memperkuat 7 agenda pembangunan nasional tersebut, perlu didukung adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sasaran ekonomi makro nasional tahun 2020-2024 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi per tahun yang mencapai 6,0%. Strategi pencapaian sasaran ekonomi makro nasional tahun 2020-2024 diantaranya:

1. Memperkuat permintaan domestik;
2. Diversifikasi ekspor dan stabilitas eksternal;
3. Menjaga kesinambungan fiskal;
4. Menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar;
5. Mengurangi ketimpangan wilayah; dan
6. Kebutuhan investasi dan pembiayaan.

Arah kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan konsolidatif untuk memberi ruang untuk pencapaian prioritas pembangunan yang berfokus pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi. Arah kebijakan fiskal tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara dan Hibah
 - a. Akselerasi reformasi kebijakan dan sistem administrasi perpajakan untuk secara gradual menggeser struktur

penerimaan pajak sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif;

- b. Sumber-sumber penerimaan pajak yang dapat mengurangi ketergantungan pada SDA dan mendukung transisi energi; serta; dan
- c. Optimalisasi PNBPN dari pemanfaatan aset negara dan layanan pemerintahan.

2. Belanja Negara

Kebijakan belanja dilakukan dengan menjaga kualitas belanja (*wise and better spending*) agar lebih efisien, produktif, dan bersifat *countercyclical* untuk menjadi *enabler* yang kuat bagi percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi berfokus pada SDM, infrastruktur, dan kelembagaan.

3. Defisit dan Pembiayaan Anggaran

- a. Pemanfaatan utang pemerintah lebih produktif untuk prioritas pembangunan, dikelola secara *prudent* dan akuntabel;
- b. Peningkatan inovasi pembiayaan, didukung pendalaman pasar keuangan yang kondusif dan melibatkan multi *stakeholders*, serta mendorong pengembangan skema Kerjasama Pemerintah. dan Badan Usaha (KPBU) yang *sustainable* dan lebih masif; serta
- c. Pemanfaatan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan *Special Vehicle Purpose* (SVP) yang tepat dan efisien.

Rencana pembangunan jangka menengah tersebut difokuskan pada agenda pembangunan dan arah kebijakan tahunan nasional berdasarkan RKP Nasional tahun 2024. Arah kebijakan ekonomi tahun 2024 berfokus pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka Panjang. Fokus kebijakan ekonomi Makro tahun 2024 sebagai berikut:

1. Percepatan transformasi ekonomi;
2. Pembangunan inklusif;

3. Pembangunan berkelanjutan;
4. Mewujudkan stabilitas ekonomi

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Nasional dengan Kabupaten Pangandaran Tahun 2022

Uraian	Capaian Nasional					Capaian Kabupaten Pangandaran				
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86	3,58	4,48	5,08	3,25	1,56
Tingkat Kemiskinan (%)	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57	8,12	7,71	8,99	9,65	9,32
Rasio Gini	0,384	0,380	0,385	0,381	0,381	0,303	0,31	0,335	0,32	0,294
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	67,44	68,21	68,06	68,28	69,03

Sumber: Bappenas, BPS Kabupaten Pangandaran, diolah 2023

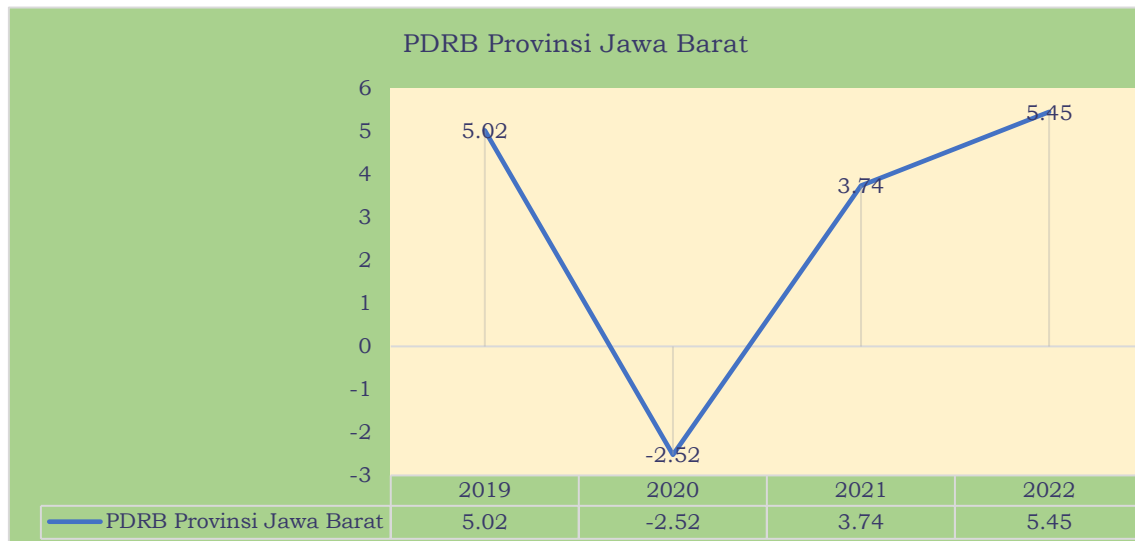
Data capaian tersebut diperoleh dari Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran. Data capaian kabupaten terhadap nasional dikatakan selaras, meskipun terdapat indikator yang masih berada di bawah capaian nasional. Indikator yang masih ada di bawah capaian nasional adalah Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung berdasarkan indeks pendidikan, indeks Kesehatan, dan indeks daya beli. Capaian Kabupaten Pangandaran selisih 3,88 angka lebih kecil dari capaian nasional. Namun, Kabupaten Pangandaran lebih unggul dalam penanganan pengangguran dengan perbandingan capaian nasional 5,86 sedangkan Kabupaten Pangandaran 1,56 di tahun 2022.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat

Kebijakan ekonomi daerah Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi nasional dan kontraksi ekonomi global. Berdasarkan laporan perekonomian Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan II 2022 mencatat pertumbuhan positif meningkat sebesar 5,68% dibandingkan triwulan I 2022 yang tumbuh sebesar 5,61%. Kondisi ini merupakan

manifestasi perbaikan perekonomian seiring dengan menurunnya kasus Covid-19 dan meningkatnya aktivitas serta mobilisasi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 3. 2 Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah 2023

Pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Jawa Barat mengalami pemulihan dengan capaian PDRB tahun 2022 mencapai 5,45%. Nilai PDRB Jawa Barat tahun 2022 mencapai Rp 2.422,78 triliun, yang secara nominal menunjukkan kenaikan sebesar Rp 218,12 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 yang nilainya Rp 2.204,66 triliun. Kenaikan ini tentu dipengaruhi oleh menguatnya pemulihan ekonomi Jawa Barat pasca pandemi Covid-19, sehingga mendorong membaiknya kinerja ekonomi di Jawa Barat. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, struktur ekonomi di Jawa Barat di dominasi oleh 4 kategori lapangan usaha, diantaranya adalah, industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi motor; pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta konstruksi. Rata-rata pertumbuhan dari 4 kategori lapangan usaha tersebut mencapai 73,7% terhadap PDRB Jawa Barat.

**Tabel 3. 5 Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Sisi Lapangan
Usaha Tahun 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022
Pertumbuhan PDB	-2,44	3,74	5,54
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,29	1,31	4,41
Pertambangan dan Penggalian	-4,11	0,82	-0,36
Industri Pengolahan	-4,22	4,22	7,00
Pengadaan Listrik dan Gas	-7,62	11,66	5,42
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,80	9,63	2,60
Konstruksi	-5,97	6,47	-0,46
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7,94	3,19	4,22
Transportasi dan Pergudangan	-4,18	(0,17)	11,09
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,60	(0,04)	11,27
Informasi dan Komunikasi	34,64	7,30	6,09
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15	5,69	-0,70
<i>Real Estate</i>	1,92	11,75	4,35
Jasa Perusahaan	-18,38	8,54	12,73
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-6,92	(2,02)	-1,79
Jasa Pendidikan	6,69	0,02	2,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-5,39	7,55	5,82
Jasa Lainnya	-2,63	0,81	10,07

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah 2023

Dari segi keuangan pemerintah, anggaran belanja Jawa Barat pada tahun 2022 secara keseluruhan mencapai Rp 169,6 triliun, yang mana angka ini turun 0,9% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 169,81 triliun. Penurunan pagu anggaran disebabkan oleh penurunan APBD Provinsi Jawa Barat akibat adanya peralihan distribusi Dana Bantuan Operasional (BOS) yang langsung disalurkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun tersebut juga anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat atau APBD nya mengalami surplus sebesar Rp 2 triliun yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan yang lebih tinggi.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,21%, dimana tingkat pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 5,47%, Pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 8,85%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 5,32% serta dari lain-lain PAD yang Sah sebesar 3,22%.

Tahapan pernormalan ekonomi pasca pandemi Covid-19 Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026 fokus pada program-program pemulihan sektor ekonomi dengan menggunakan pendekatan ekonomi inklusif, antara lain:

1. Peningkatan sistem produksi pangan berkelanjutan;
2. Pengembangan industri manufaktur dan sektor jasa;
3. Digitalisasi UMKM;
4. Pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif; dan
5. Peningkatan akses dan kesempatan kerja.

Tabel 3. 6 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Indikator Makro	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
Indeks Pembangunan Manusia	72,45	73,12	73,56	73,56
Angka Harapan Hidup	73,23	73,52	73,11	73,30
Harapan Lama Sekolah	12,61	12,62	12,56	12,63
Rata-rata Lama Sekolah	8,61	8,78	8,86	8,98
Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,74	5,45	5,28	5,42
Tingkat Pengangguran Terbuka	9,82	8,31	8,21	8,21
Persentase Penduduk Miskin	7,97	7,98	7,54	7,39
Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,381	0,412	0,410	0,408
Laju Pertumbuhan Penduduk	1,54	1,28	1,43	1,44
Pengeluaran Perkapita	10.934	11.277	11.390	11.504

Sumber: Ranwal RKPD Jawa Barat 2024, diolah 2023

Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sebesar 0,92% di atas rata-rata nilai nasional 0,86%.

Pertumbuhan ini didorong oleh kabupaten/kota yang memiliki rata-rata pertumbuhan 1,20%. Penurunan jumlah penduduk miskin Jawa Barat pada bulan September hingga Maret 2022 tertinggi se-Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat berkurang sebanyak 17.360 orang sementara secara nasional bertambah 202.110 orang.

Tabel 3. 7 Arah kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Uraian	Sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat 2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,42
Gini Ratio	0,408
Laju Pertumbuhan Sektor Industri	7,11
Laju Perdagangan Sektor Perdagangan	4,29
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,05
Nilai Tukar Petani (NTP)	101,67
Laju Pertumbuhan Pariwisata	26,87
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	532,22
Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	23,34
Persentase penduduk Miskin	7,39
Tingkat Pengangguran Terbuka	8,21
Skor Pola Harapan Pangan	90,46

Sumber: Ranwal RKPD Jawa Barat Tahun 2024, diolah 2023

Kerangka ekonomi diproyeksikan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam memperkuat pendanaan menggunakan penguatan *local taxing power* untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan pendapatan asli daerah. Kaitanya dengan kewenangan provinsi, diberlakukan skema pengutan Opsen Pajak yang merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota tanpa menambah beban wajib pajak dan berlaku efektif pada tahun 2025. Opsen Pajak juga diharapkan mampu mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah. Kebijakan pendanaan Provinsi Jawa Barat 2024-2026 sebagai berikut :

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Kantor dan Dinas/Balai Penghasil;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi;
- c. Koordinasi dan perhitungan lebih intensif antara pusat dan daerah;
- d. Meningkatkan dividen BUMD;
- e. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam membayar pajak;
- f. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah;
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pendapatan;
- h. Memantapkan kinerja organisasi dalam pelayanan kepada wajib pajak; dan
- i. Aparatur yang kompeten dan terpercaya dalam pelayanan.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Memprioritaskan belanja untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;
- b. Membiayai pemenuhan belanja Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
- c. Belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja;
- d. Belanja untuk fungsi Kesehatan sebesar 10% dari total belanja;
- e. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs);
- f. Mendanai kegiatan yang sudah ada MoU dan kegiatan lanjutan;
- g. Pendukung terhadap alokasi gaji dan tunjangan tenaga P3K;

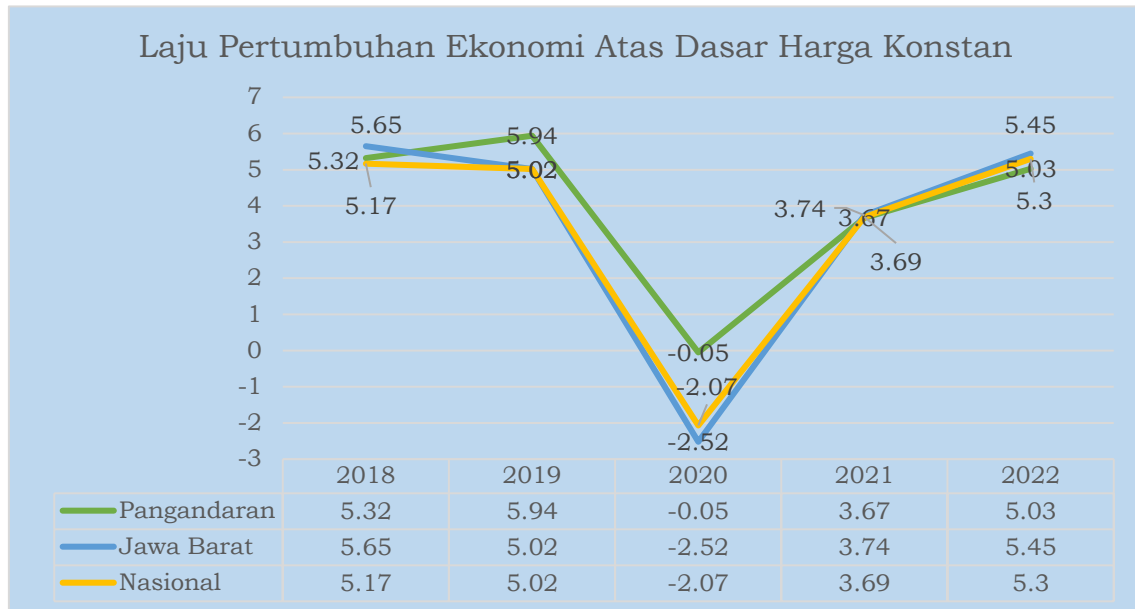
- h. Dukungan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak; dan
 - i. Membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas kepala daerah.
3. Kebijakan pembiayaan daerah
- a. Penerimaan pembiayaan direncanakan dari pencairan dana cadangan daerah; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran pokok utang, dan penyertaan modal bagi BUMD.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pangandaran

Tujuan pembangunan ekonomi adalah mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Kondisi perekonomian dan kinerja perekonomian di Kabupaten Pangandaran dapat tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Indikator yang dapat digunakan dalam menjelaskan kinerja ekonomi yakni Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam cakupan wilayah yang lebih kecil adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat memberikan gambaran umum mengenai ukuran ekonomi di Kabupaten Pangandaran.

PDRB dapat dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu. Dimana DRB pada harga konstan ini digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran 2018-2022 dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 3. 3 Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Diolah 2023

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 Kabupaten Pangandaran didorong oleh peningkatan produksi pada beberapa lapangan usaha, tanpa dipengaruhi inflasi. Percepatan pertumbuhan ekonomi Pangandaran pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 disebabkan karena hampir sebagian besar kategori lapangan usaha seperti kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; jasa perusahaan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi. Angka tersebut terus meningkat sampai dengan tahun 2022 dengan angka capaian pertumbuhan mencapai 5,03% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan oleh ada percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi

Covid-19 yang berdampak pada kembalinya pergerakan roda perekonomian khususnya sektor pariwisata.

Tabel 3. 8 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020-2022 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.855,81	1.898,15	1.963,55
B	Pertambangan dan Penggalian	48,29	52,63	53,10
C	Industri Pengolahan	382,61	403,46	437,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,54	6,09	6,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,12	1,24	1,28
F	Konstruksi	688,58	729,18	712,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.698,73	1.759,30	1.861,28
H	Transportasi dan Pergudangan	843,37	871,80	938,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	689,69	711,21	785,69
J	Informasi dan Komunikasi	222,49	238,55	248,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	152,08	161,19	168,19
L	Real Estate	260,40	286,18	308,27
M,N	Jasa Perusahaan	71,70	77,82	85,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	231,60	224,90	224,97
P	Jasa Pendidikan	426,00	437,07	446,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,52	19,86	21,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	142,43	144,15	163,61
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		7.738,97	8.022,78	8.426,40

Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran; Pangandaran dalam Angka 2022, diolah 2023

Struktur ekonomi Kabupaten Pangandaran mencerminkan besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap

kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama empat tahun terakhir (2018-2021) struktur perekonomian Pangandaran didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta konstruksi.

Selain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pariwisata memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan jumlah wisatawan pada awal tahun 2020 mencapai 41,39% (yoy) dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas pariwisata sebesar 35,46% (yoy). Sementara itu di tahun 2019, seluruh objek wisata di Pangandaran menyumbang pendapatan sebesar Rp.27,5 miliar, atau setara dengan 24% dari total PAD Kabupaten Pangandaran (Bank Indonesia Kantor Perwakilan Tasikmalaya, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong sektor lain ikut tumbuh, utamanya sektor pertanian.

Perkembangan terkini perekonomian Kabupaten Pangandaran sampai dengan tahun 2021 memberikan gambaran prospek kinerja ekonomi ke depan. Prospek perekonomian tergambarkan dari proyeksi kerangka ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin. Perkiraan kondisi perekonomian

Tabel 3. 9 Capaian Ekonomi Makro daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Manusia	67,44	68,21	68,06	68,28	69,03
Angka Kemiskinan	8,12	7,71	8,99	9,65	9,32
Angka Pengangguran	3,58	4,52	5,08	3,25	1,56
Pertumbuhan Ekonomi	5,32	5,94	(0,05)	3,67	5,03
Perdapatan Perkapita (Ribu Rupiah)	18.401	19.307	18.304	18.762	19.488

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Gini	0,303	0,310	0,335	0,320	0,294

Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran, diolah 2023



Gambar 3. 3 Arah Kebijakan Ekonomi 2024 Kabupaten Pangandaran

Sumber: Diolah Penyusun, 2023

Arah kebijakan ekonomi provinsi dan nasional yang didukung dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kinerja sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan kelautan berbasis Kawasan, komoditi unggulan dan korporasi;
- Perluasan fasilitas inkubasi bagi pelaku ekonomi kreatif;
- Peningkatan utilitas aktor ekonomi kreatif melalui kualitas sarana dan prasarana yang bermutu;
- Penguatan SDM dan daya saing produk ekonomi kreatif;

- e. Peningkatan kualitas Sumber Daya Potensial di berbagai sektor; dan
- f. Pengawasan percepatan realisasi proyek strategis yang sudah memiliki perizinan.

Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi, pemerintah Kabupaten Pangandaran mengacu kepada kebijakan nasional dan pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai kegiatan yang di leading sektori oleh Perangkat Daerah terkait urusan sektoral dan didukung oleh seluruh Perangkat Daerah yang lain. Kebijakan pemulihan ekonomi dalam rangka penanganan pandemi covid-19 beserta stakeholders adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

No	Kebijakan	Program	Anggaran 2024	Perangkat Daerah
1	Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat seperti UMKM, koperasi, KUBE, kelompok-kelompok pemberdayaan, pengrajin serta BUMDES dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19; melalui penyelenggaraan pelatihan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha	Program Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	330.000.000	Dinsos PMD
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100.000.000	Dinsos PMD
		Program Pengembangan UMKM	1.000.000.000	Diskopdagin
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100.000.000	Diskopdagin
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	200.000.000	Diskopdagin
2	Pengendalian harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	450.000.000	Diskopdagin

No	Kebijakan	Program	Anggaran 2024	Perangkat Daerah
	pokok agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat melalui operasi pasar, gelar pasar murah dan peningkatan koordinasi dalam upaya pengendalian inflasi daerah	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	230.000.000	Diskopdagin
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	155.000.000	Diskopdagin
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.420.946.250	Sekretariat Daerah
3	Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	9.402.500.000	DKPKP
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.137.800.000	DKPKP
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	580.800.000	DKPKP
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.781.500.000	DKPKP
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.810.000.000	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	21.733.560.332	Dinas Pertanian
4	Penguatan dan pemberdayaan kelompok pertanian dan perikanan, peningkatan kapasitas petani dan peternak melalui pendampingan dan pelatihan	Program Penyuluhan Pertanian	1.172.000.000	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	800.000.000	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	483.987.500	Dinas Pertanian

No	Kebijakan	Program	Anggaran 2024	Perangkat Daerah
		Program Perizinan Usaha Pertanian	50.000.000	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	26.948.372.000	DKPKP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	17.148.301.900	DKPKP
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.219.503.524	DKPKP
5	Pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu berupa layanan kesehatan dan pendidikan dasar gratis, rehabilitasi rutilahu, dan pemberian alat bantu disabilitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	225.425.887.831	Dinas Kesehatan
		Program Pengelolaan Pendidikan	805.450.255.400	Disdikpora
		Program Rutilahu	29.835.000.000	DPUTRPRKP
		Program Rehabilitasi Sosial	3.859.450.059	Dinsos PMD
6	Optimalisasi Sektor Ekonomi Unggulan melalui pengembangan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	34.314.241.047	Disparbud
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	408.039.550	Disparbud
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.157.812.623	Disparbud
7	Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan program magang	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.099.999.600	Dinas Ketenagakerjaan
		Program Penempatan Tenaga Kerja	496.092.500	Dinas Ketenagakerjaan

No	Kebijakan	Program	Anggaran 2024	Perangkat Daerah
8	Peningkatan dan pemberdayaan industri kecil	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.115.000.000	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	90.000.000	Diskopdagin
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	199.424.146	Diskopdagin
		Program Hubungan Industrial	349.999.760	Dinas Ketenagakerjaan
9	Peningkatan promosi daerah serta perbaikan sistem perizinan untuk mendorong iklim investasi	Program Pengembangan Ekspor	169.500.000	Diskopdagin
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	67.472.915	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	81.321.662	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	5.208.749.723	DPMPTSP
		Program Pemasaran Pariwisata	2.575.138.591	Disparbud
10	Optimalisasi PAD melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan kinerja perangkat daerah penghasil serta kolaborasi dengan instansi vertikal maupun swasta	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.180.257.928	Bapenda
11	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	30.100.000.000	Diskopdagin

Sumber : Diolah Penyusun, 2023

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal ditandai dengan pemberian wewenang bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan daerah serta menciptakan kemandirian fiskal agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan menjadi pedoman selama 1 (satu) tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dan program kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari *public private partnership* (PPP). Bentuk PPP antara lain seperti, kontrak servis, kontrak manajemen, kontrak sewa, kontrak *Build-Operate-Transfer*/BOT, dan kontrak konsesi.

Kebijakan keuangan Kabupaten Pangandaran tahun 2024 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan, aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Aspek belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Aspek pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menunjukkan bahwa diberikannya kesempatan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang aktif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam mengelola keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Dilihat dari segi pendapatan suatu daerah, keuangan daerah yang dapat dikatakan berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah



dibagi kedalam tiga komponen yaitu pendapatan asli daerah (pad), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 3. 11 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pangandaran

No	Uraian	Jumlah					Rata-Rata Pertumbuhan
		Realisasi Tahun (n-3) 2021	Realisasi Tahun (n-2) 2022	Proyeksi Tahun Berjalan (n-1) 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rancangan (n) 2024	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1) 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	1.332.348.261.465,00	1.536.995.565.513,00	961.739.324.853,00	1.828.306.972.551,09	1.896.035.745.182,08	17,9%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	175.130.968.912,00	296.136.212.846,00	239.685.021.000,00	255.798.304.028,81	276.658.451.426,14	16,2%
1.1.1	Pajak Daerah	50.029.272.430,00	86.225.000.000,00	113.410.000.000,00	88.455.534.094,74	95.622.681.700,95	22,4%
1.1.2	Retribusi Daerah	87.350.918.972,00	40.643.522.100,00	42.306.021.000,00	134.946.639.573,00	145.569.565.973,32	44,4%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	261.866.550,00	996.924.550,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	N/A
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	37.488.910.960,00	168.270.766.196,00	82.969.000.000,00	32.396.130.361,07	35.466.203.751,87	61,7%
1.2	Pendapatan Transfer	1.115.727.933.553,00	1.240.859.352.667,00	722.054.303.853,00	1.572.508.668.522,28	1.619.377.293.755,94	22,5%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	970.028.277.016,00	898.533.996.727,00	673.313.641.000,00	1.216.338.920.143,82	1.294.061.500.116,47	13,6%
1.2.2	Transfer antar - daerah	145.699.656.537,00	342.325.355.940,00	48.740.662.853,00	356.169.748.378,46	325.315.793.639,47	167,8%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	41.489.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A



No	Uraian	Jumlah					Rata-Rata Pertumbuhan
		Realisasi Tahun (n-3) 2021	Realisasi Tahun (n-2) 2022	Proyeksi Tahun Berjalan (n-1) 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rancangan (n) 2024	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1) 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	41.489.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A

Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi dan proyeksi pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Pangandaran oleh seluruh komponen mencapai 17,9% atau senilai Rp 1.828.306.972.551,09 pada tahun 2024. Realisasi dan proyeksi yang memiliki nilai tertinggi adalah bersumber dari pendapatan transfer, khususnya transfer pemerintah pusat. Untuk rata-rata pertumbuhan pendapat tertinggi bersumber dari pendapatan transfer antar pemerintah daerah, yang mana memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 167,8% sampai dengan tahun 2025. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, peningkatan pendapatan diarahkan pada penambahan yang signifikan pada komponen pendapatan asli daerah (PAD). Potensi peningkatan PAD yang dianalisis berdasarkan realisasi pendapatan daerah digunakan sebagai dasar penentuan arah kebijakan pendapatan Kabupaten Pangandaran. Adapun arah kebijakan pendapatan Kabupaten Pangandaran tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan pajak yang berasal dari pajak hotel dan pajak restoran, agar sesuai dengan proyeksi pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pungutan baru yang memenuhi kriteria dan mengurangi wajib pajak yang tidak bayar pajak;
2. Meningkatkan penerimaan retribusi yang berasal retribusi jasa usaha dengan menyesuaikan tarif retribusi dan sumber retribusi baru;
3. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dengan strategi intensifikasi yakni pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam antisipasi penyimpangan pelaksanaan pajak, tertib penetapan pajak, tertib pemungutan pajak, tertib administrasi pajak, dan tertib penyetoran pajak; dan
4. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dengan strategi ekstensifikasi yakni optimalisasi ketentuan tarif dan pengembangan penerimaan pajak dan retribusi lain.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL). Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan seperti, belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan meliputi, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Tabel 3. 12 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran

No	Uraian	Jumlah					Rata-Rata Pertumbuhan
		Realisasi Tahun (n-3) 2021	Realisasi Tahun (n-2) 2022	Proyeksi Tahun Berjalan (n-1) 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rancangan (n) 2024	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1) 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BELANJA	1.349.232.078.108,00	1.877.420.151.136,00	983.514.549.013,00	1.811.936.384.876,45	1.913.928.921.795,04	20,3%
2.1	Belanja Operasi	824.614.262.855,00	1.201.792.405.159,00	737.252.151.675,00	1.030.049.178.972,78	1.085.163.622.032,03	13%
2.1.1	Belanja Pegawai	369.586.967.802,00	460.595.490.694,00	336.745.244.047,00	458.582.043.517,94	489.307.040.433,64	10,1%
2.1.2	Belanja barang dan jasa	427.189.733.277,00	694.865.058.965,00	376.795.807.628,00	517.493.946.004,84	538.267.188.455,24	14,5%
2.1.3	Belanja bunga	14.128.402.776,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	N/A
2.1.4	Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
2.1.5	Belanja Hibah	12.986.259.000,00	29.451.355.500,00	20.631.100.000,00	50.600.163.150,00	53.990.374.081,05	62,2%
2.1.6	Belanja bantuan sosial	722.900.000,00	4.880.500.000,00	3.080.000.000,00	3.373.026.300,00	3.599.019.062,10	138,6%
	Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
2.2	Belanja Modal	375.711.955.154,00	475.105.702.853,00	59.666.379.763,00	553.901.209.903,67	586.097.978.343,01	193,2%
2.2.1	Belanja Tanah	2.993.281.680,00	80.000.000,00	500.000.000,00	5.620.650.000,00	5.997.233.550,00	354,6%



No	Uraian	Jumlah					Rata-Rata Pertumbuhan
		Realisasi Tahun (n-3) 2021	Realisasi Tahun (n-2) 2022	Proyeksi Tahun Berjalan (n-1) 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rancangan (n) 2024	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1) 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	119.772.760.262,00	142.108.598.136,00	16.015.109.763,00	168.555.900.000,00	179.680.589.400,00	222,2%
2.2.3	Belanja bangunan dan gedung	62.703.021.476,00	55.146.607.366,00	5.855.120.000,00	210.590.900.903,67	220.123.006.340,01	849,9%
2.2.4	Belanja Jalan, irigasi dan jalanan	189.278.450.786,00	273.897.130.586,00	24.750.000.000,00	168.571.800.000,00	179.697.538.800,00	135%
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	964.440.950,00	1.873.366.765,00	416.150.000,00	561.959.000,00	599.610.253,00	14,5%
2.2.6	Belanja aset lainnya	0,00	2.000.000.000,00	12.130.000.000,00	0,00	0,00	N/A
2.3	Belanja Tidak Terduga	4.618.091.483,00	4.418.000.000,00	5.500.000.000,00	7.732.200.000,00	8.142.006.600,00	16,5%
2.4	Belanja transfer	144.287.768.616,00	196.104.043.124,00	181.096.017.575,00	220.253.796.000,00	234.525.314.820,00	14,1%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	632.852.516,00	12.686.852.210,00	15.845.731.075,00	11.244.480.000,00	11.930.393.280,00	476%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	143.654.916.100,00	183.417.190.914,00	165.250.286.500,00	209.009.316.000,00	222.594.921.540,00	12,6%

Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, diolah 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi dan proyeksi target belanja Kabupaten Pangandaran oleh seluruh komponen mencapai 20,3% atau sebesar Rp 1.811.936.384.876,45 pada tahun 2024. Realisasi dan proyeksi yang memiliki nilai tertinggi adalah berfokus pada belanja modal, khususnya belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jalan, serta belanja peralatan dan mesin. Rata-rata realisasi dan proyeksi target tertinggi untuk komponen belanja ada pada sub komponen belanja bangunan dan gedung yakni mencapai 849,9% sampai dengan tahun 2025. Potensi peningkatan belanja modal yang dianalisis berdasarkan realisasi belanja dan proyeksi pendapatan daerah digunakan sebagai dasar penentuan arah kebijakan belanja Kabupaten Pangandaran. Adapun arah kebijakan belanja Kabupaten Pangandaran tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Optimalisasi belanja pada fungsi ekonomi khususnya yang berkaitan dengan subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan sesuai dengan PMK/102/2018 termasuk di dalamnya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya potensial di Kabupaten Pangandaran; dan
- b. Penguatan alokasi belanja khususnya untuk subfungsi penelitian, pengembangan, dan pembinaan pariwisata.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun periode tahun berikutnya. Komposisi pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Komponen penerimaan pembiayaan Kabupaten Pangandaran yang mempunyai porsi paling besar adalah SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan secara umum, penyertaan modal (investasi) daerah memiliki porsi besar dibandingkan dengan komponen yang lain, kemudian diikuti oleh transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah



yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.



Tabel 3. 13 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pangandaran

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah					
		Realisasi Tahun (n-3) 2021	Realisasi Tahun (n-2) 2022	Proyeksi Tahun Berjalan (n-1) 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rancangan (n) 2024	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1) 2025	Rata-rata pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pembiayaan	22.308.402.266,05	340.424.585.623,00	21.775.224.160,00	20.180.380.800,00	20.029.027.944,00	331,1%
3.1	Penerimaan Pembiayaan	222.308.402.266,05	495.424.585.623,00	26.775.224.160,00	20.180.380.800,00	20.029.027.944,00	0,7%
3.1.1	SiLPA	22.308.402.266,05	5.424.585.623,00	26.775.224.160,00	20.180.380.800,00	20.029.027.944,00	73,1%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000,00	490.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	N/A
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
3.1.6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A



No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah					
		Realisasi Tahun (n-3) 2021	Realisasi Tahun (n-2) 2022	Proyeksi Tahun Berjalan (n-1) 2023	Proyeksi/Target pada Tahun Rancangan (n) 2024	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1) 2025	Rata-rata pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000.000,00	155.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	N/A
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
3.2.2	Penyertaan modal daerah	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00	N/A
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	200.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	N/A
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
3.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perautran perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A

Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, diolah 2023

BAB IV

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan sering kali dihadapi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Setiap permasalahan harus dapat ditangani dan diantisipasi oleh Pemerintah. Adapun sumber permasalahan pembangunan dapat berasal dari internal Pemerintah maupun berasal dari permasalahan eksternal.

Demikian pula dengan berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran dalam beberapa kurun waktu yang lalu dapat diselesaikan. Hal tersebut menunjukkan adanya respon positif dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk dapat mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pembangunan. Setiap permasalahan pembangunan yang terjadi di Pemerintah Daerah pasti membawa implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, prioritas pembangunan dibutuhkan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan pembangunan tersebut.

Tujuan penyusunan prioritas pembangunan lebih diarahkan untuk mengetahui permasalahan pembangunan yang memiliki pengaruh lebih terhadap proses pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat berfungsi untuk dapat mengoptimalkan pendanaan yang bersifat terbatas agar tepat sasaran. Prioritas pembangunan merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang akan diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan OPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran

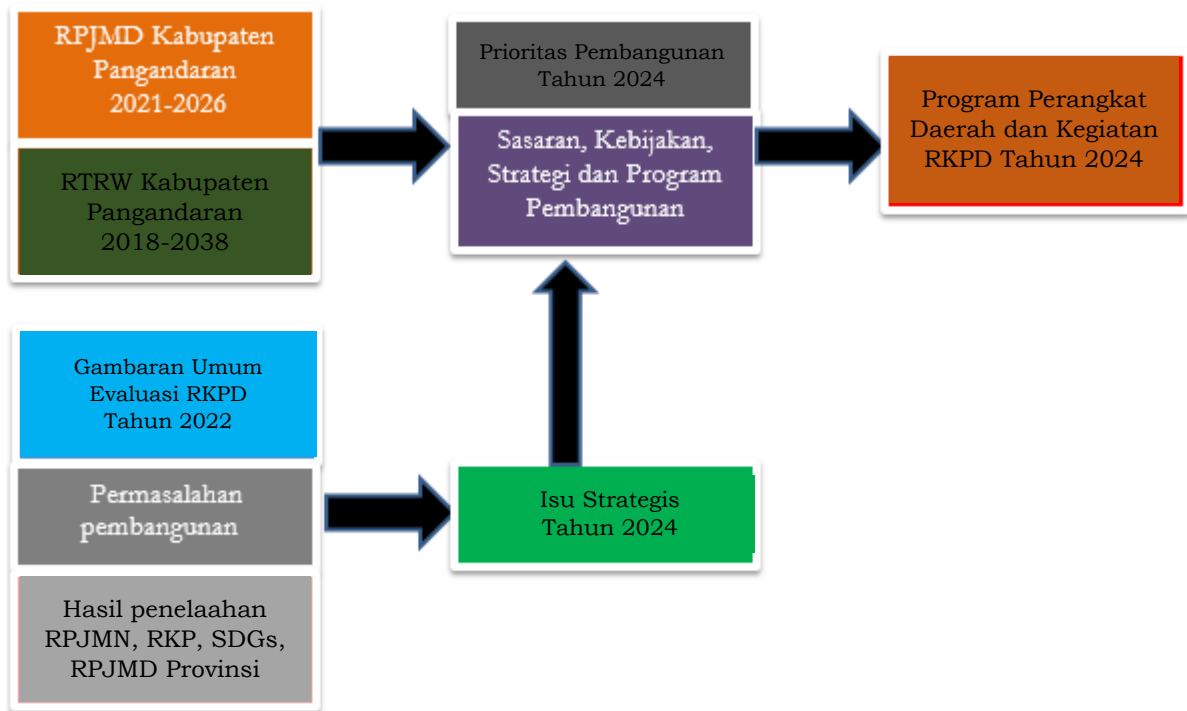
pembangunan daerah tahun rencana.

Dalam menentukan prioritas pembangunan terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah. Kemudian, akan diketahui semua faktor penyebab permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah itu, dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta dengan program prioritas. Perlu dipahami bahwa tidak keseluruhan program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, dan demikian juga dengan prioritas pembangunan yang telah tercapai di masa lalu, tidak perlu diprioritaskan kembali dimasa selanjutnya meskipun harus tetap dijaga kesinambungannya.

Secara ideal perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersinergi dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui korelasi antara dokumen perencanaan di Pemerintah Daerah dengan perencanaan di tingkat provinsi maupun pusat yang terkait dengan agenda-agenda prioritas. Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah, maka berikut ini disajikan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ketiga RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki

daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1 Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sumber: Hasil Analisa Bappeda Kabupaten Pangandaran, diolah 2023

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024 mengacu dan memperhatikan: (1) RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; (6) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya penerapan arah

kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Sasaran tersebut diwujudkan melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang, dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional tahun ke-4, yaitu: 1) Pilar kelembagaan politik dan hukum yang mantap; 2) Pilar kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; 3) Pilar struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan 4) Pilar terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan *major project*.

Ketujuh agenda pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah terintegrasi dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan.

- Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kuat dan berkelanjutan, sekaligus untuk menyejahterakan secara adil dan merata (*inklusif*). Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian, pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar yang merata. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Distribusi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d. Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
 - e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdayasaing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu dengan menjamin kualitas pendidikan

- yang inklusif untuk menjadikan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui:
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdayasaing, dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
- a. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
 - b. Memajukan kebudayaan;
 - c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
 - d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
 - e. Meningkatkan budaya literasi.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional dengan peningkatan investasi yang berkelanjutan. Pemerintah

Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - e. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup serta kerentanan bencana pada wilayah-wilayah yang rentan dalam menghadapi perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
 - c. Pembangunan rendah karbon.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta memberikan hak-hak asasi manusia dengan pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi, dan tata kelola

keamanan siber;

- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan melalui kegiatan pembangunan dengan emisi gas rumah kaca rendah dan penggunaan sumber daya alam yang efisien adalah Pembangunan Rendah Karbon, yang berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan emisi gas rumah kaca (karbon) (Bappenas, 2018). Pembangunan Rendah Karbon diharapkan dapat menjawab isu pada 3 (tiga) pilar tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), yaitu: (1) lingkungan, melalui pengurangan emisi gas rumah kaca; (2) pertumbuhan ekonomi; dan (3) sosial melalui pengurangan kemiskinan.

Dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB, setidaknya terdapat 11 (sebelas) tujuan yang terkait langsung dan diharapkan dapat dicapai melalui kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
4. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
5. Tujuan 8: Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu meningkatkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;

6. Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
7. Tujuan 11: Kota yang Berkelanjutan dan Komunitas, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
8. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
9. Tujuan 13: Tindakan terhadap Iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
10. Tujuan 14: Kehidupan di Bawah Air, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan; dan
11. Tujuan 15: Kehidupan di Darat, yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pembangunan rendah karbon telah dituangkan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut melalui penetapan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Komitmen Pemerintah Pusat dalam hal ini juga tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dimana pembangunan rendah karbon menjadi sasaran nasional ke-23. Terkait hal ini, Provinsi Jawa Barat melalui

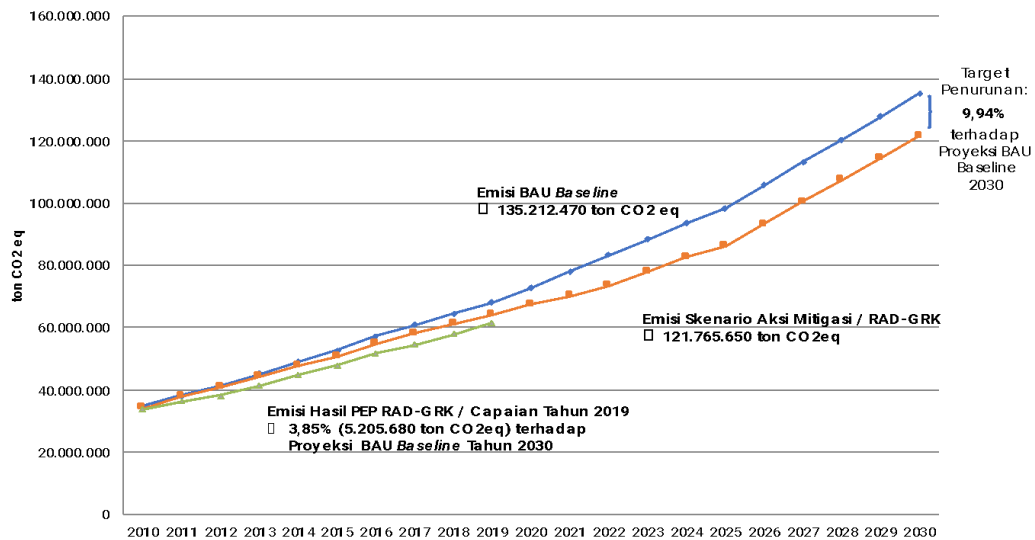
dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menuangkan kebijakan ini ke dalam salah satu sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu sasaran ke-13: “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat”. Sasaran ini dicapai melalui strategi, “Mengembangkan implementasi pembangunan rendah karbon” yang diturunkan ke dalam 2 (dua) arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik; dan
2. Meningkatkan upaya adaptasi perubahan iklim melalui perbaikan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat pada sektor-sektor terdampak.

Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Jawa Barat dalam rangka mentransformasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Menteri PPN/Bappenas pada tahun 2019. Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu dari 7 (tujuh) provinsi yang menjadi percontohan perencanaan pembangunan rendah karbon nasional. Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Jawa Barat saat ini masih disusun. Prinsip-prinsip pembangunan rendah karbon pada dasarnya telah tertuang pada program dan kegiatan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026; dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana dan program strategis, penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan proyek strategis, serta pengawasan ketaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Profil emisi gas rumah kaca Provinsi Jawa Barat dapat digambarkan melalui proyeksi besar emisi *baseline* tahun 2030 pada kondisi tanpa aksi mitigasi (*Business as Usual*), yaitu sebesar

135.212.470 ton CO₂ eq, dengan sumber emisi mencakup sektor energi (40,65%), transportasi (30,99%), kehutanan (11,75%), sampah dan limbah domestik (11%), dan pertanian (5,60%). Adapun target penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Jawa Barat sebesar 9,94% pada tahun 2030 dari proyeksi jumlah emisi pada kondisi *Business as Usual* (BAU) atau tanpa melakukan upaya apapun, sehingga emisi dapat diminimalkan hingga sebesar 121.765.650 ton CO₂ eq sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.2 Profil Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Barat

Sumber: Dokumen Kaji Ulang RAD-GRK Provinsi Jawa Barat (2018) dan Laporan PEP RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Kebijakan pembangunan rendah karbon Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan pada 3 (tiga) basis bidang yang terbagi atas 5 (lima) sektor, yaitu:

1. Bidang berbasis lahan, meliputi sektor kehutanan dan pertanian;
2. Bidang berbasis energi, meliputi sektor energi dan transportasi; dan
3. Bidang berbasis pengelolaan limbah, meliputi sampah dan air limbah domestik.

Kebijakan pembangunan rendah karbon pada ketiga bidang tersebut ditetapkan dengan target kontribusi penurunan emisi sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.3 Kontribusi Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

(Sumber: Dokumen Kaji Ulang RAD-GRK Provinsi Jawa Barat (2018) dan Laporan PEP RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2019)

Sektor yang ditargetkan menurunkan emisi paling besar adalah sektor kehutanan sebesar 32,92%, sedangkan sektor lainnya meliputi sektor energi (32,68%), pengelolaan limbah (25,15%), pertanian (6,17%), dan transportasi (3,09%). Adapun penurunan emisi pada sektor industri menjadi ranah implementasi dari RAN-GRK karena kewenangannya berada di pemerintah pusat.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan rendah karbon Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui:

1. Sektor kehutanan, meliputi penanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan hutan;
2. Sektor pertanian, meliputi peningkatan produktivitas padi melalui penggunaan teknologi budidaya *System Rice Intensification* (SRI) dan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), serta pembangunan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO);
3. Sektor energi, meliputi pengembangan energi baru terbarukan, diantaranya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), substitusi bahan bakar fosil ke biogas dan efisiensi energi serta substitusi bahan bakar fosil ke listrik antara lain dengan pemanfaatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB);
4. Sektor transportasi, meliputi pengembangan transportasi massal, pembangunan *Integrated Transportation System* (ITS) atau *Area*

Traffic Control System (ATCS), pelaksanaan *car free day*, peremajaan armada transportasi umum, penerapan manajemen parkir, dan pelatihan *eco-smart driving*; dan

5. Sektor pengelolaan sampah dan air limbah domestik, meliputi pembangunan dan operasional TPPAS Regional Lulut Nambo, Legok Nangka dan Cirebon Raya (Cira), pembangunan TPS Terpadu 3R (komposting dan daur ulang sampah), serta pembangunan IPAL domestik dan Sanimas.

4.1.2 Telaah Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Visi, misi berdasarkan Dokumen RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 disajikan sebagai berikut.

1. Iman dan takwa sebagai landasan dalam melaksanakan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan ajaran agama. Pengamalan ajaran secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat akan mewujudkan situasi yang kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah.
2. Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia dimaksudkan sebagai provinsi yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Keunggulan tersebut yaitu dalam 7 (tujuh) bidang yang sekaligus penciri Jawa Barat termaju di Indonesia Tahun 2025. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu (*beyond the expectation*), akuntabel dan berbasis ilmu pengetahuan; kedua, masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi; ketiga, pengelolaan pertanian dan kelautan; keempat, energi baru dan terbarukan; kelima, industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif; keenam, infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan serta ketujuh, pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Misi sebagai penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang memiliki makna yang penting. Setiap pernyataan misi dimaksudkan untuk mewujudkan visi sampai tahun 2025. Berikut ini merupakan misi dari Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025:

1. **Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing.** Membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani dan sosial, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang tinggi, memiliki daya saing, memiliki akhlak mulia, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, terpadu, dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
2. **Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah.** Mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional yang berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada segenap potensi yang ada di daerah, untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pertumbuhan yang tinggi, dan pemerataan yang berkeadilan. Perkembangan ekonomi regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan produktif, serta regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
3. **Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari.** Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

4. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**
Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi antar legislatif dan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik dan konsistensi dalam penegakan hukum.
5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.**
Mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana prasarana dasar, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

Indikasi pencapaian visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, ditandai dengan:

1. Provinsi termaju dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang bermutu, akuntabel, dan berbasis ilmu pengetahuan;
2. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi (*society development*);
3. Provinsi termaju dalam bidang pengelolaan pertanian dan kelautan;
4. Provinsi termaju dalam bidang energi baru dan terbarukan;
5. Provinsi termaju dalam bidang industri manufaktur, industri jasa, dan industri kreatif;
6. Provinsi termaju dalam bidang infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan; dan
7. Provinsi termaju dalam bidang pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
				Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,45	73,12	73,34	73,56	73,78	74,00	74,00
1.1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,61	8,73	8,86	8,98	9,11	9,24	9,24
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,61	12,54	12,56	12,63	12,69	12,76	12,76
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,23	73,09	73,11	73,30	73,49	73,68	73,68
1.3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp.000	10.934	11.277	11.390	11.504	11.619	11.735	11.735
1.4	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak,	Indeks Pembangunan Gender	Poin	89,36	89,42	90,02	90,07	90,12	90,17	90,17
1.5	Terkendalnya pertumbuhan dan distribusi penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,41	1,42	1,43	1,44	1,46	1,47	1,47
2	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,74	5,67	5,28	5,42	5,68	5,54	5,54
		Gini Ratio (poin)	Poin	0,406	0,412	0,410	0,408	0,406	0,404	0,404
2.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	4,22	6,90	7,00	7,11	7,22	7,32	7,32
		Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	3,19	4,21	4,25	4,29	4,34	4,38	4,38
2.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	1,31	3,02	3,04	3,05	3,07	3,08	3,08
2.3	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Laju Pertumbuhan Pariwisata	Persen	-0,04	25,83	26,35	26,87	27,41	27,96	27,96
2.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	501,52	511,55	521,78	532,22	542,86	553,72	553,72
		Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persen	21,67	22,21	22,77	23,34	23,92	24,52	24,52
2.5	Terkendalnya tingkat kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persen	8,43	7,98	7,54	7,39	7,24	7,10	7,10

NO	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
				Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
2.6	Meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,82	8,31	8,26	8,21	8,16	8,11	8,11
2.7	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87	88,14	89,29	90,46	91,65	92,85	92,85
2.8	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	4,23	4,75	5,22	5,43	5,65	5,87	5,87
		Indeks Risiko Bencana	Poin	134,94	132,24	129,60	127,00	124,46	121,98	121,98
3	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Infrastruktur (poin)	Poin							
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	Poin	62,69	63,32	63,95	64,59	65,24	65,89	65,89
3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	Tingkat Konektivitas	Persen	43,51	44	47	51,70	56,87	62,56	62,56
		Indeks Penggunaan Air	Poin	1,1913	1,1912	1,1902	1,1896	1,1890	1,1884	1,1884
		Konsumsi listrik per kapita	Kwh/kapita	1.280,53	1.293,34	1.306,27	1.319,33	1.332,52	1.345,85	1.345,85
		Persentase rumah tangga hunian layak	Persen	53,14	53,37	53,9	54,47	55,24	55,91	55,91
		Akses penanganan sampah di perkotaan	Persen	70,70	74,03	79,00	76,00	77,00	78,00	78,00
3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	43,09	43,31	43,52	43,74	43,96	44,18	44,18
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	87,42	88,29	89,18	90,07	90,97	91,88	91,88
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	79,34	79,74	80,14	80,54	80,94	81,34	81,34
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	40,78	41,39	42,01	42,64	43,28	43,93	43,93
4	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Inovasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	A	A	A	A	A	A
4.1	Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien	Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan	Peringkat	N/A	4	4	4	4	4	4,00
		Indeks SPBE	Poin	3,28	3,50	3,70	3,72	3,74	3,76	3,76



NO	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL			TARGET			KONDISI AKHIR
				Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	2024	2025	2026	
4.2	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	Indeks Sistem Merit	Poin	375,5	380,5	390	395,9	401,8	407,8	407,8
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	30,04	77	78	79	80	81	81,00
4.3	Terwujudnya pemerintahan daerah yang berkinerja tinggi, dan akuntabel	Nilai SAKIP	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.4	Terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	Poin	N/A	4	4,04	4,08	4,12	4,16	4,16
4.5	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Poin	62,82 (Sangat Inovatif)	69,15 (Sangat Inovatif)	69,15 (Sangat Inovatif)	69,15 (Sangat Inovatif)	69,15 (Sangat Inovatif)	69,15 (Sangat Inovatif)	69,15 (Sangat Inovatif)

Sumber: RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, 2023

Seluruh sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 sesuai tabel di atas dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPD Provinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah sebanyak 5 (lima) sasaran. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

4.1.3 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Seperti yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dijelaskan secara terperinci dalam tabel mengenai visi dan misi Kabupaten Pangandaran dibawah ini.

Tabel 4.2 Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

Visi	Misi
Pangandaran juara menuju wisata berkelas dunia yang berpijak pada nilai karakter bangsa	Misi 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama.
	Misi 2: Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan.
	Misi 3: Mengembangkan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan

Visi	Misi
	tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan.
	Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal.
	Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel.
	Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, 2023

Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 seperti yang tercantum didalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dijelaskan secara terperinci dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Hubungan Visi – Misi – Tujuan – Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Target		Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2026
1	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama	Menguatkan nilai-nilai karakter bangsa berbasis nilai luhur dan budaya lokal		Indeks Kesalehan Sosial	59	N/A	61	62,00	64
			Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	0,6481	0,554	0,2344	0,2579	0,3048
				Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	78	80,19	82,5	85	90
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun	0,73	0,7595	0,7691	0,7693	0,777
2	Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan	Terwujudnya pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien yang menjunjung nilai-nilai kearifan lokal		Persentase pemenuhan kriteria GSTC di destinasi pariwisata	0	25	30	40	60
			Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	2.215.287	646.250	660.000	690.000	750.000
3	Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan	Terwujudnya sumber daya manusia yang		Indeks Pembangunan Manusia	68,28	69,03	69,12-69,59	69,59-70,06	70,53-71,00



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Target		Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2026
	pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan	berkarakter dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Gender	89,92	90,20	89,99-90,05	90,06-90,09	90,16-90,20
			Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan	79,38	79,83	80,11-80,50	80,51-81,00	81,40-81,50
				Indeks Pendidikan	59,72	60,41	60,02	60,21-60,50	60,71-61,00
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,54	18,02	19,16	19,61	20,24
			Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi	Jumlah pemuda berprestasi yang mendapatkan penghargaan	42	47	100	110	130
			Melambatnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,24	1,17	0,59-0,56	0,60-0,57	0,62-0,59
			Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	75,98	76,09	74,58	74,59	74,61
4	Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Untuk		Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,67	5,03	5,21-5,50	5,51-5,90	6,21-6,60
				Persentase Penduduk Miskin	9,65	9,32	6,40-7,00	5,90-6,40	4,50-5,57

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Target		Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2026
	berkeadilan berbasis potensi lokal	Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	5,513	5,457	4,923	5,109	5,520
				Persentase Realisasi Nilai Investasi	1,27	1,24	7,24	7,6	8,38
				Rasio Kewirausahaan	21,74	22,69	3,95	4,15	4,5
				Indeks Ketahanan Pangan	80,64	81,12	83,0	83,5	84,5
			Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	86,54	87,12	74	74	75
			Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,25	1,56	4,90-4,25	4,80-4,00	4,60-3,50
			Meningkatnya cakupan penanganan PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	39,52	40,63	47	57	77
5	Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan		Indeks Reformasi Birokrasi	53,64	56,48 (CC)	64-68	69-73	79-84
			Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola	Nilai SAKIP	66,86	67,72 (B)	69,25-72,00	72,25-76,00	81,25-85,00
				Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	3	3

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Target		Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2026
		pelayanan publik yang prima	pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Indeks SPBE	2,38	2,82	3,05	3,1	3,25
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70	N/A	72	73	75
				Indeks Profesionalitas ASN	53,05	55,84	45,92	49,42	56,42
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Indeks Pelayanan Publik	3,14	3,42	2,66-2,75	2,86-2,95	3,06-3,15
6	Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan infrastruktur yang tangguh bencana		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	77,63	85,50	78,58	79,05	80,00
			Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	1,635	1,692	1,788	1,808	1,865
				Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur	38,73	38,97	44,94	48,28	54,64
			Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	129,21	137,36	141	139	135
				Indeks Kapasitas Daerah	117,89	N/A	142,0	139,2	136,44
			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,84	69,05	65,76	65,98	66,43

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, 2023

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2024, pemerintah pusat telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu, "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan 8 (delapan) arah kebijakan, yaitu: 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; 2) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; 3) Penguatan daya saing usaha; 4) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi; 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; 7) Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) pelaksanaan pemilu 2024.

Tema pembangunan RKP Tahun 2024 tersebut dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen Rancangan RKP tahun 2024, telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

A. Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024, yaitu:

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

B. Sasaran Nasional (SN) Tahun 2024, yaitu:

1. SN 1, Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan;
2. SN 2, Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi;
3. SN 3, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI);
4. SN 4, Terjaganya pertumbuhan ekonomi di tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI);
5. SN 5, Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
6. SN 6, Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
7. SN 7, Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
8. SN 8, Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
9. SN 9, Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
10. SN 10, Meningkatnya produktivitas dan daya saing;
11. SN 11, Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
12. SN 12, Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;

13. SN 13, Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
14. SN 14, Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
15. SN 15, Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
16. SN 16, Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif;
17. SN 17, Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
18. SN 18, Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
19. SN 19, Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
20. SN 20, Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
21. SN 21, Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
22. SN 22, Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
23. SN 23, Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;
24. SN 24, Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (grk) terhadap *baseline*;
25. SN 25, Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal;
26. SN 26, Optimalnya kebijakan luar negeri;
27. SN 27, Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap;
28. SN 28, Meningkatnya kualitas pelayanan publik; serta
29. SN 29, Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut, sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada tahun 2022 yaitu masih belum berakhirnya pandemi Covid-19, maka pada tahun 2024 prioritas pembangunan

nasional tahun 2023 ditekankan pada PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; PN-2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan; PN-3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan PN- 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Risiko dari adanya pandemi Covid-19 yaitu terjadinya perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, serta perubahan dan pergeseran rencana, namun di sisi lain juga menjadi pemicu terjadinya optimalisasi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Tabel 4.4 Keselarasan Antara Prioritas Nasional dengan Sasaran Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Nasional Tahun 2024	Sasaran Nasional Tahun 2024
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan
		Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)
		Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
		Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk



No	Prioritas Nasional Tahun 2024	Sasaran Nasional Tahun 2024
		Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan
		Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda
		Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan
		Meningkatnya produktivitas dan daya saing
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya
		Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan
		Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial
		Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa
		Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar
		Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar
		Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan
		Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan
		Meningkatnya layanan infrastruktur TIK
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim

No	Prioritas Nasional Tahun 2024	Sasaran Nasional Tahun 2024
		Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap <i>baseline</i>
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal
		Optimalnya kebijakan luar negeri
		Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		Terjaganya keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia

Sumber: Olahan Penyusun, 2023

4.2.2 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran nasional, isu strategis, pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2024 dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yang tertuang dalam Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024-2026 sangat erat. Terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Berdasarkan isu strategis tahun 2024, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat fokus pada peningkatan perekonomian dengan mengoptimalkan SDM dan infrastruktur yang berdaya saing.

Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah:

Tabel 4.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan

No	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat 2024	Arah Kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026
1	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi; 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah; 3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar; 4. Penguatan fasilitas kesehatan dan mutu pelayanan Kesehatan; 5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja; 6. Peningkatan Pelayanan Penyakit Menular (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) yang komprehensif; 7. Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Dalam Mencapai Jabar <i>Zero New Stunting</i>; 8. Pemenuhan tenaga kesehatan/SDMK; 9. Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular yang komprehensif; 10. Penguatan pembiayaan kesehatan 11. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi; 12. Penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha; 13. Peningkatan akses terhadap rumah layak huni; 14. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 15. Peningkatan perlindungan perempuan; 16. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 17. Pemenuhan hak dan perlindungan anak; 18. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup; 19. Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda; dan 20. Pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk.
2	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan yang Mengoptimalkan Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur, Pariwisata, Pertanian,	1. Penerapan <i>link and match industry</i> kecil-industri besar; 2. Pengembangan IKM dan industri hijau; 3. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu; 4. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital;

No	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat 2024	Arah Kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026
	Kehutanan, Serta dan Kelautan dan Perikanan	5. Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor; 6. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok; 7. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan; 8. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian; 9. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian; 10. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan; 11. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 12. Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas; 13. Penerapan prinsip UMKM hijau terutama yang mengembangkan potensi unggulan daerah; 14. Peningkatan perhutanan sosial; 15. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing; 16. Peningkatan dan perluasan promosi dan pemasaran pariwisata dan produk ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis; 17. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif; 18. Pengembangan budaya lokal yang mendukung pengembangan pariwisata; 19. Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi; 20. Promosi dan peningkatan layanan investasi; 21. Modernisasi koperasi dan penciptaan UMKM naik kelas; 22. Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global; 23. Perbaikan tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan; 24. Integrasi kultur (budaya) dalam peningkatan daya saing pangan lokal;

No	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat 2024	Arah Kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026
		25. Pengembangan <i>smart fishing</i> dan <i>sustainable aquaculture</i> ; 26. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian; 27. Pengembangan potensi konservasi energi dan baru terbarukan; 28. Penerapan <i>waste to energy</i> dan <i>circular economy</i> dalam pengelolaan persampahan, serta peningkatan pengendalian <i>food waste</i> dan <i>food loss</i> ; 29. Pencegahan dan penanganan penyakit akibat perubahan iklim secara terpadu dan cepat; 30. Peningkatan mitigasi dan adaptasi bencana termasuk bencana hidrometeorologi.
3	Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran secara terpadu	1. Perlindungan terhadap keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan; 2. Memberdayakan masyarakat miskin dan mencegah terjadinya kemiskinan baru; 3. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan memperkuat rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial; 4. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh; 5. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial; 6. Peningkatan keterampilan angkatan kerja; 7. Pengembangan pendidikan vokasional sesuai dengan kebutuhan kerja; 8. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan; 9. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha kecil.
4	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	1. Pembangunan pusat kegiatan baru untuk membuka akses, distribusi penduduk, dan/atau peningkatan ekonomi; 2. Pembangunan pusat kegiatan baru untuk membuka akses, distribusi; 3. penduduk, dan/atau peningkatan ekonomi; 4. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat; 5. Percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Selatan; 6. Peningkatan konektivitas antar wilayah terutama untuk mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan; 7. Pemanfaatan ruang yang efektif; 8. Pengembangan transportasi massal; 9. perkotaan yang ramah lingkungan; 10. Pemenuhan air bersih untuk rumah tangga, pertanian, dan industry;

No	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat 2024	Arah Kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026
		11. Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah; 12. Peningkatan layanan infrastruktur persampahan dan air limbah domestik; 13. Peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan/atau terdampak bencana dan program pemerintah; 14. Pengelolaan kelautan dan wilayah pesisir yang berkelanjutan; 15. Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup; 16. Peningkatan upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 17. Rehabilitasi hutan dan lahan Kritis
5	Penerapan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	1. Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (<i>Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance</i>) dalam mewujudkan <i>World Class Government</i> ; 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan; 3. Pengembangan <i>Smart Governance</i> yang unggul dalam rangka mewujudkan Jabar <i>Smart Province</i> ; 4. Penguatan dan Penataan Organisasi; 5. Penerapan sistem merit secara konsisten; 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN melalui pengembangan <i>corporate university</i> ; 7. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi; 8. Penataan proses bisnis dan SOP pelayanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi; 9. Optimalisasi inovasi daerah berbasis kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan potensi daerah.

Sumber: Ranwal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, diolah 2023

Prioritas pembangunan daerah dijabarkan menjadi program prioritas, penanggung jawab perangkat daerah untuk masing-masing program prioritas, indikator sasaran untuk prioritas pembangunan daerah, indikator kinerja untuk masing-masing program prioritas, keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja

program prioritas, serta tingkat keterkaitan indikator sasaran prioritas pembangunan dengan indikator kinerja program prioritas. Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep tematik, tingkat penerapan konsep holistik terkait perencanaan yang komprehensif dari hulu sampai hilir, serta penerapan konsep integratif terkait pelibatan perangkat daerah.

Pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2024 berdasarkan ranwal RKPD Provinsi Jawa Barat bertema **“Peningkatan SDM, Perekonomian, dan Infrastruktur yang Berdaya Saing”**. Pembangunan Tahun 2024 diarahkan pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan bonus demografi. Peningkatan kualitas diharapkan mampu mendorong daya saing SDM Jawa Barat untuk menjawab tantangan perkembangan zaman di era industrialisasi dan perkembangan IPTEK dan teknologi informatika yang pesat. SDM yang berdaya saing diarahkan dapat memenuhi kualifikasi tenaga kerja pada lapangan usaha yang ada di Jawa Barat serta mengembangkan kewirausahaan. Penekanan pembangunan juga diarahkan untuk Penyediaan Infrastruktur Wilayah Dan Infrastruktur Dasar yang layak dan memenuhi standar, dengan jangkauan ke seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Dukungan SDM dan infrastruktur diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha/bisnis. Capaian pembangunan diharapkan dapat Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Dan Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Jawa Barat.

4.2.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

Tabel 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Prioritas	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
1	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	1. Peningkatan akses permodalan; 2. Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran; 3. Pengembangan keterampilan dan layanan usaha; 4. Pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keberantaraan; 5. Peningkatan SDM petani menjadi petani profesional melalui pelatihan dan pemberian benih dan bibit ternak unggul; 6. Peningkatan SDM nelayan menjadi nelayan profesional melalui pelatihan dan penyediaan sarana prasarana nelayan tangkap maupun budidaya dan pengolahan; 7. Peningkatan nilai investasi guna memperluas kesempatan kerja; 8. Peningkatan produksi pertanian; dan 9. Pemberian akses pemanfaatan lahan pertanian kepada petani.
2	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	1. Perbaikan akses menuju wilayah destinasi wisata; 2. Perbaikan infrastruktur dan fasilitas yang ada di destinasi wisata; 3. Pelestarian dan pengembangan objek dan daya tarik destinasi pariwisata unggulan; 4. Penguatan sumber daya UMKM dan IKM secara berkesinambungan dan terintegrasi antar <i>stakeholder</i>; 5. Program penguatan sumber daya (modal, SDM, manajemen, jejaring) koperasi, UMKM dan IKM; 6. Penguatan sentra industri kecil berbasis kelompok atau masyarakat sebagai ciri khas pengembangan wilayah; 7. Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan; dan 8. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif daerah
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan <i>Stunting</i>	1. Peningkatan sistem manajemen pelayanan Kesehatan dan meningkatkan profesionalisme pelayanan; 2. Peningkatan pelayanan Kesehatan ibu, bayi, remaja dan lansia; 3. Pembangunan atau renovasi pos pembantu Kesehatan di desa; 4. Penyuluhan kesehatan pada pasien dan

No	Prioritas	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
		masyarakat; 5. Optimalisasi Operasional tim penggerak PKK; 6. Pembinaan usaha Kesehatan berbasis masyarakat; dan 7. Penanganan masalah gizi kurang, gizi buruk, pada bayi anak balita ibu hamil.
4	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesenjangan	1. Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah non formal/kesetaraan melalui optimalisasi pembangunan PAU DTPA; 2. Publikasi atau penyuluhan terkait Pendidikan kesetaraan kejar paket kepada masyarakat; dan 3. Pelatihan wirausaha bagi lulusan kesetaraan.
5	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	1. Peningkatan jalan dan jembatan yang merupakan akses menuju destinasi wisata, menuju wilayah pertanian, pendidikan, pusat peribadatan, jalan lingkungan; 2. Pembangunan jalan dan jembatan penghubung antar kabupaten/kota dan atau provinsi; 3. Pembangunan infrastruktur penghubung antar kawasan destinasi; 4. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pertanian; 5. Pembangunan drainase yang terintegrasi; 6. Optimalisasi penanggulangan atau penanganan sampah di Kabupaten Pangandaran melalui peningkatan sarana dan prasarana (<i>beach clean machine, road sweeper</i>); 7. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi masyarakat; dan 8. Optimalisasi penataan ruang.
6	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	1. Penataan struktur organisasi; 2. Penataan dan penguatan organisasi; 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; 4. Peningkatan kualitas layanan publik; 5. Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan upaya mewujudkan transformasi pemerintahan; 6. Pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan; 7. Pengembangan inovasi pelayanan publik; dan 8. Penguatan desa berbasis data elektronik melalui penguatan data desa presisi.

Sumber: Olahan Penyusun, 2023

4.2.4 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Kabupaten Pangandaran

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum dikelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang pengaruhnya signifikan bagi daerah sehingga harus mendapatkan prioritas perhatian dalam perencanaan program dan kegiatan. Jika isu tersebut berupa kelemahan/ancaman harus diantisipasi, dan jika isu tersebut berupa peluang/kekuatan dapat dimanfaatkan karena isu tersebut dapat meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka isu strategis itu dapat dimasukkan. Namun jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam (lebih dari) kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam dokumen. Berikut adalah identifikasi isu strategis yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan



keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Tabel 4. 7 Arah Kebijakan RKP 2024, Isu Strategis RPJMD, Permasalahan Pembangunan, Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026, dan Isu Strategis RKPD 2024

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2022	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Isu Strategis RKPD 2024
1	2	3	4	5
Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Penanganan kemiskinan ekstrim nasional dan PPKS	Belum tersedianya data yang akurat terkait dengan data penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal	Penanganan kemiskinan ekstrim nasional dan PPKS
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan	Peningkatan sistem perlindungan sosial	Kurangnya perhatian dan pembinaan pemerintah kabupaten terhadap penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	Peningkatan sistem perlindungan sosial
Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan	1. Pemasaran produk pertanian belum optimal 2. Masih rendahnya pembinaan teknologi di sektor pertanian 3. Pemasaran produk pertanian belum optimal 4. Masih rendahnya pembinaan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan



Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2022	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Isu Strategis RKPD 2024
1	2	3	4	5
		teknologi di sektor pertanian 5. Belum terselenggaranya pelaksanaan balai benih pertanian 6. Belum ada tenaga ahli dalam pembibitan 7. Masih rendahnya koordinasi antara pihak desa, Dinas Pariwisata dengan Dinas Pertanian 8. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi laut/perikanan yang tinggi 9. Masih rendahnya armada nelayan 10. Perkembangan teknologi pengolahan ikan belum dapat digunakan secara maksimal oleh kelompok nelayan 11. Belum adanya Nilai Tukar Nelayan sebagai tolok ukur kesejahteraan nelayan 12. Masih rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya ikan dan belum adanya fasilitas/pusat pemasaran produk perikanan/kelautan yang representatif		

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2022	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Isu Strategis RKPD 2024
1	2	3	4	5
Penguatan daya saing usaha	Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19		Peningkatan Daya Saing Daerah	Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19
Pembangunan rendah karbon dan transisi energi,	Peningkatan kapasitas Ketenagakerjaan	1. Masih rendahnya rasio daya serap tenaga kerja 2. Pemerintah Daerah belum memiliki Balai Latihan Kerja 3. Masih kurangnya pelatihan kewirausahaan	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Elektronik yang terintegrasi	Peningkatan kapasitas Ketenagakerjaan
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas	Tingginya tingkat inflasi daerah			Tingginya tingkat inflasi daerah
Percepatan pembangunan ibu kota nusantara	Belum optimalnya kemampuan fiskal daerah	1. Belum optimalnya pengelolaan dan penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Aktivitas perekonomian di Kabupaten Pangandaran masih rendah 3. Masih rendahnya investor yang berinvestasi di wilayah Kabupaten Pangandaran	Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal	Belum optimalnya kemampuan fiskal daerah
Pelaksanaan pemilu 2024	Sektor unggulan pariwisata belum memberikan kontribusi	1. Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan belum maksimal baru mencapai 57,14%	Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk	Sektor unggulan pariwisata belum memberikan kontribusi

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2022	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Isu Strategis RKPD 2024
1	2	3	4	5
	besar terhadap PDRB Kabupaten	pada tahun 2019 2. Kurangnya produk daerah untuk ekspor 3. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata dan pengelolaan daya tarik dan usaha pariwisata lainnya belum lengkap 4. Masih rendahnya SDM untuk ikut terlibat dan mengembangkan produk unggulan Kabupaten Pangandaran	Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal	besar terhadap PDRB Kabupaten
	Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, IKM, dan Koperasi	1. Perlu adanya peningkatan life skills terhadap pelaku usaha dan UMKM 2. Potensi UMKM sebagai muatan lokal belum terpetakn 3. Minimnya UMKM yang memiliki hak izin dan edar 4. Terhambatnya promosi produk UMKM 5. Belum tersedianya display/ruang promosi untuk ajang promosi UMKM bagi wisatawan 6. Pendapatan masyarakat yang masih rendah	Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal	Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, IKM, dan Koperasi

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2022	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Isu Strategis RKPD 2024
1	2	3	4	5
	Digitalisasi ekonomi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wisata, perekonomian, dan pemerintahan	Peningkatan Daya Saing Daerah	Digitalisasi ekonomi
	Belum optimalnya pemenuhan kriteria Global Sustainable Tourism Council Destinations (GSTC-D)	1. Belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata yang kewenangannya dibawah Pemda 2. Pengembangan dan persediaan daya tarik wisata potensial belum optimal 3. Pemantauan dan pelaporan retribusi wisata di daya tarik wisata yang belum optimal 4. Belum optimalnya penguatan sumber daya manusia pada dunia pariwisata agar bisa lebih bersinergi dalam pengembangan pariwisata 5. Pengembangan destinasi wisata tidak diimbangi dengan infrastruktur jalan dan lokasi yang memadai 6. Masih ada beberapa kriteria GSTC-D yang belum masuk kategori hijau	Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal	Belum optimalnya pemenuhan kriteria Global Sustainable Tourism Council Destinations (GSTC-D)

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2022	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Isu Strategis RKPD 2024
1	2	3	4	5
	Penerapan zero new stunting dan penanganan ATM	1. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program KB 2. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan 3. Program konseling mengenai KB belum optimal 4. Rendahnya keinginan masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi 5. Pengetahuan masyarakat mengenai KB masih perlu ditingkatkan	Peningkatan Daya Saing Daerah	Penerapan zero new stunting dan penanganan ATM
	Belum optimalnya sistem kesehatan daerah	Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	Belum optimalnya sistem kesehatan daerah

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2022	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Isu Strategis RKPD 2024
1	2	3	4	5
	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat	1. Rasio rumah sakit di Kabupaten Pangandaran masih kurang jika dibandingkan dengan rasio rumah sakit di Jawa Barat, dimana di Kabupaten Pangandaran hanya tersedia 1:422.615 sedangkan Jawa Barat 1:170.647 2. Rasio puskesmas Kabupaten Pangandaran terhadap Penduduk masih kurang jika dibandingkan dengan rasio puskesmas di Jawa Barat dimana di Kabupaten Pangandaran hanya tersedia 1:27.022 pada tahun 2021 sedangkan Jawa Barat yakni 1:45.458, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat
	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan dan peningkatan peran kepemudaan	1. Minimnya ruang bagi pemuda dan kaum milenial untuk mengekspresikan ide-ide dan juga ikut berpartisipasi dalam upaya pembangunan daerah 2. Masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap kepemudaan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan dan peningkatan peran kepemudaan

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2022	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Isu Strategis RKPD 2024
1	2	3	4	5
	Rendahnya Indeks Pendidikan karena belum optimalnya pendidikan kesetaraan	1. RLS masih rendah berdasarkan data tahun 2022 sebesar 8,73th 2. Minat belajar masyarakat Pangandaran masih rendah	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	Rendahnya Indeks Pendidikan karena belum optimalnya pendidikan kesetaraan
	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan kesetaraan, informal, dan inklusi	Minat belajar masyarakat Pangandaran masih rendah	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan kesetaraan, informal, dan inklusi
	Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pedesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi			Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pedesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi
	Belum optimalnya prasarana transportasi wilayah			Belum optimalnya prasarana transportasi wilayah
	Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman	Jaringan air bersih belum menjadi prioritas ke pemukiman kumuh	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2022	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Isu Strategis RKPD 2024
1	2	3	4	5
	Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah 2. Tingkat kekumuhan perumahan masih tinggi 3. Belum tersedianya sarana laboratorium lingkungan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi
	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa/Lingkungan Belum Terstruktur			Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa/Lingkungan Belum Terstruktur
	Penyelenggaraan pemilu serentak	Tingkat penindakan hukum/sanksi yang kurang tegas dalam implementasi kebijakan, bagi para pelanggar	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Elektronik yang terintegrasi	Penyelenggaraan pemilu serentak

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2024 berdasarkan hasil evaluasi RKPD 2022	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026	Isu Strategis RKPD 2024
1	2	3	4	5
	Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif dan efisien	1. Implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum berjalan secara efektif 2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi database 3. Pengamanan sistem informasi belum tersertifikasi	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Elektronik yang terintegrasi	Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif dan efisien

Sumber: Olahan Penyusun, 2023

4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2024 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ketiga RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Maka tema pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 adalah **“Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah”**.

Berdasarkan tema tersebut maka dapat dikelompokkan menjadi prioritas pembangunan yaitu:

1. Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja;
2. Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan *Stunting*;
4. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan;
5. Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi
6. Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu.

Tabel 4. 8 Prioritas Pembangunan 2024 dan Isu Strategis

No	Prioritas Pembangunan 2024	Isu Strategis	
1	2	3	
1	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	a	Penanganan kemiskinan ekstrim nasional dan PPKS
		b	Peningkatan sistem perlindungan sosial
		c	Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan

No	Prioritas Pembangunan 2024	Isu Strategis	
		d	Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19
		e	Peningkatan kapasitas Ketenagakerjaan
		f	Tingginya tingkat inflasi daerah
		g	Belum optimalnya kemampuan fiskal daerah
		h	Sektor unggulan pariwisata belum memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten
2	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	a	Digitalisasi ekonomi
		b	Belum optimalnya pemenuhan kriteria Global Sustainable Tourism Council Destinations (GSTC-D)
		c	Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM, IKM, dan Koperasi
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	a	Penerapan zero new stunting dan penanganan ATM
		b	Belum optimalnya sistem kesehatan daerah
		c	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat
4	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	a	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan dan peningkatan peran kepemudaan
		b	Rendahnya Indeks Pendidikan karena belum optimalnya pendidikan kesetaraan
		c	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan kesetaraan, informal, dan inklusi

No	Prioritas Pembangunan 2024	Isu Strategis	
5	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	a	Perlunya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pedesaan dalam mendukung pengembangan ekonomi
		b	Belum optimalnya prasarana transportasi wilayah
		c	Masih rendahnya cakupan layanan air minum, sanitasi dan permukiman
		d	Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana tsunami dan gempa bumi
		e	Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa/Lingkungan Belum Terstruktur
6	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	a	Penyelenggaraan pemilu serentak
		b	Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif dan efisien

Sumber: Diolah Penyusun, 2023

4.2.6 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, demikian juga untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2024; Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2024 dengan sasaran PN RKP Tahun 2024; Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan PN RKP Tahun

2024; serta Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 9 Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional-Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kreatif
	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan	Gerakan Membangun Desa	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja
Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesenjangan
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Nilai Investasi Melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	
	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran
Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	dan Penanganan <i>Stunting</i>
	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu

(Sumber: Olahan Penyusun, 2023)

Keterkaitan sasaran pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2023 dengan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 dan sasaran pembangunan nasional tahun 2023 disajikan pada table di bawah ini:

Tabel 4. 10 Persandingan antara Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024		Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024	
S1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modal bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S17	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	S2.1.1	Peningkatan Akses dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		S18	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	S4.1.1	Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
S2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S19	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	S4.1.3	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja
		S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S6.1.1	Meningkatnya kualitas dan konektivitas infrastruktur daerah
S4	Terjaganya pertumbuhan ekonomi di tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	S16	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri	S4.1.1	Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
		S11	Meningkatnya pembangunan dan	S1.1.2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024		Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024	
			pemberdayaan masyarakat desa		
S5	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	S5.1.1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
				S5.1.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Cepat dan Responsif
S6	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S3.1.2	Meningkatkan Jumlah Pemuda Berprestasi di Tingkat Nasional dan Internasional
				S3.1.4	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
				S4.1.2	Meningkatnya Permukiman Layak Huni
				S4.1.4	Meningkatnya Cakupan Penanganan PPKS
S7	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	S3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	S3.1.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kependidikan dan Kesehatan secara Komprehensif
		S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S3.1.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kependidikan dan Kesehatan secara Komprehensif
S8	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	S3	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	S3.1.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kependidikan dan Kesehatan secara Komprehensif
		S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S3.1.2	Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional
				S3.1.3	Melambatnya laju pertumbuhan penduduk
				S3.1.4	Meningkatnya Partisipasi

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024		Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024	
					Perempuan Dalam Pembangunan
		S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S3.1.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kependidikan dan Kesehatan secara Komprehensif
S9	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	S2	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	S3.1.2	Meningkatkan jumlah pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional
				S3.1.4	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan
				S4.1.4	Meningkatnya Cakupan Penanganan PPKS
S10	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S3.1.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kependidikan dan Kesehatan secara Komprehensif
S11	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S7	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	S1.1.1	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama
S12	Meningkatnya kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S7	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	S1.1.1	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama
S13	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S1.1.1	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024		Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024	
S14	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S1.1.1	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama
S15	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	S1.1.1	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama
S16	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	S5	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	S3.1.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kependidikan dan Kesehatan secara Komprehensif
S17	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S14	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik	S6.1.3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S6.1.2	Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah
				S6.1.3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
S18	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S6.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah
S19	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	S10	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	S6.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024		Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024	
S20	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	S9	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	S6.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah
S21	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	S5.1.1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
				S5.1.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Cepat dan Responsif
S22	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S6.1.3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
S23	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	S15	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	S6.1.2	Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah
		S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S6.1.2	Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah
S24	Meningkatnya capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	S13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	S6.1.2	Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah
				S6.1.3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
S25	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan,	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang	S5.1.1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024		Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024	
	menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal		smart, bersih dan akuntabel	S5.1.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Cepat dan Responsif
SN26	Optimalnya kebijakan luar negeri	S21	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.	S5.1.1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
SN27	Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S5.1.1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
SN28	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	S20	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	S5.1.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Cepat dan Responsif
SN29	Terjaganya keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	S21	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.	S1.1.1	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama
				S5.1.1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

(Sumber: Olahan Penyusun, 2022)

Adapun keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional dengan indikator prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dan indikator prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 4. 11 Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dengan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kabupaten Pangandaran Tahun 2024
Porsi EBT dalam bauran energi nasional (%)	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	Indeks Kapasitas Daerah
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (nilai)	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Indeks Ketahanan Pangan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan (WPP)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
Rasio kewirausahaan nasional (%)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	Rasio Kewirausahaan
Pertumbuhan PDB pertanian (%)	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
Pertumbuhan PDB perikanan (%)	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1) (%)	laju pertumbuhan sektor industri (%)	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1a) (%)	laju pertumbuhan sektor industri (%)	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
Nilai devisa pariwisata (8.9.1©)a) (miliar US\$)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan
Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1a) (%)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan
Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka
Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	Tingkat Efektivitas Kerja sama Daerah	Persentase Realisasi Nilai Investasi
Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kabupaten Pangandaran Tahun 2024
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun)	1. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan
	2. Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
	3. Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (triliun rupiah)	Persentase Realisasi Nilai Investasi
IPM KBI (nilai min-maks)	1. Umur Harapan Hidup	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk
	2. Harapan Lama Sekolah	Indeks Pendidikan
	3. Rata-rata lama sekolah	Indeks Pendidikan
	4. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Persentase penduduk miskin KBI (%)	Persentase Penduduk Miskin	Persentase PPKS yang Mandiri
Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR) (per wanita usia subur usia 15–49 tahun)	Umur Harapan Hidup	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk
Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	Umur Harapan Hidup	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Persentase PPKS yang Mandiri
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk
Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kabupaten Pangandaran Tahun 2024
Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Persentase PPKS yang Mandiri
Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Persentase PPKS yang Mandiri
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Kesehatan
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Kesehatan
Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Kesehatan
Persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun (%)	Usia Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup	Indeks Kesehatan
Nilai rata-rata hasil PISA:	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
Matematika (nilai)		
Membaca (nilai)		
Sains (nilai)		
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
Harapan lama sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin)	Indeks Pemberdayaan Gender
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Persen)	Indeks Pemberdayaan Gender
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks Pembangunan Pemuda	Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapatkan penghargaan
	(IPP) (nilai)	

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kabupaten Pangandaran Tahun 2024
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	Persentase PPKS yang Mandiri
Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Tingkat Pengangguran Terbuka
Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT)	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Tingkat Pengangguran Terbuka
Peringkat Global Innovation Index	Indeks Reformasi Birokrasi	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa
Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP
Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa
Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani
Nilai Budaya Literasi (nilai)	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa
Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak	Persentase Rumah Layak Huni
Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kabupaten Pangandaran Tahun 2024
Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %)	Nilai Tukar Petani	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %)	Indeks Penggunaan Air	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)
Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/ 100 km)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Konektivitas Wilayah
Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (%)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Konektivitas Wilayah
Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Konektivitas Wilayah
Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara (%)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Konektivitas Wilayah
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	Indeks Konektivitas Wilayah
Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%)	Indeks Kebahagiaan	Persentase Rumah Layak Huni
Rasio elektrifikasi (%)	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	Indeks SPBE
Rata-rata pemenuhan kebutuhan (Konsumsi) listrik (kWh/Kapita)	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	Indeks SPBE
Penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Risiko Bencana
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	indeks kualitas Lingkungan Hidup (poin)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kabupaten Pangandaran Tahun 2024
Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	Indeks Resiko bencana (poin)	Indeks Risiko Bencana
Persentase penurunan emisi GRK (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Risiko Bencana
Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Risiko Bencana
Indeks Demokrasi Indonesia (nilai)	Indeks Demokrasi (poin)	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa
Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	Nilai SAKIP
Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa
Indeks Pembangunan Hukum (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	Indeks Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan Publik Nasional (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	Indeks Pelayanan Publik
Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%)	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Poin)	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa

Sumber: Olahan Penyusun, 2023

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap dukungan pada Program Prioritas Nasional dalam Rancangan RKPD 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 12 Keselarasan Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Jawa Barat

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PANGANDARAN 2024
Pembangunan Wilayah Jawa - Bali	Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	- Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang kuat - Penguatan LPM - Mendorong Bumdes Juara - Kenaikan insentif perangkat desa, RT, RW, Linmas, BPD - Mendorong BUMD sehat dan Bumdes juara	Program Administrasi Pemerintahan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	- Persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Program Pengembangan Perumahan	- Bedah rumah tiap tahun - Pangandaran bebas rumah tak layak huni - Pembebasan pajak bumi	Program Kawasan Permukiman



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PANGANDARAN 2024
	Program Penanggulangan Bencana	bangunan bagi masyarakat kecil	Program Pengembangan Perumahan
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
Infrastruktur Perkotaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	- Pembangunan Terminal Tipe A Pangandaran - Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Majingklak	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Pelayaran Program Pengelolaan Perkeretaapian Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Program Kesejahteraan Rakyat Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Kerja Sama Desa		



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PANGANDARAN 2024
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	- Pengembangan Bandar Udara Nusawiru - Penerbangan Masuk pangandaran - Pembangunan Jembatan Sodongkopo - Pembangunan Jembatan Karangtirta I - Pembangunan Jembatan Karangtirta II	Program Pengembangan Permukiman Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyusunan RDTR K - Pembangunan Sistem - Penyediaan Air Minum (SPAM) - Perkotaan Pangandaran - Pembangunan Instalasi - Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Purbahayu - Pembangunan Breakwater Pantai Timur Pangandaran	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengelolaan Sumberdaya Air (SDA) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PANGANDARAN 2024
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Kawasan Permukiman Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu) Program Pengelolaan Tanah Kosong Program Penatagunaan Tanah		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Pembangunan Pusat Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kebudayaan	- Pengembangan Desa Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	- Destinasi Wisata Kabupaten Pangandaran (Desa Budaya Cikalong, Pantai Madasari, Geopark Pangandaran)	
	Program Pengelolaan Permuseuman		
		Pembangunan <i>Creative Center</i>	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PANGANDARAN 2024
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Mempermudah investasi, mulai dari perizinan dan lainnya	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	- Penyusunan Andalalin Pasar Pananjung - Relokasi Pasar Pananjung - Revitalisasi Pasar tradisional - Membuat toko pangandaran Juara	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
	Program Perekonomian dan Pembangunan		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Program Pengembangan Ekspor
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan	-Peningkatan kesejahteraan petani melalui intervensi pupuk/pakan, bibit, teknologi tepat guna, pengolahan pasca panen, dan penciptaan pasar	Program Penyuluhan Pertanian
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PANGANDARAN 2024
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	- Tambahan untuk subsidi pupuk - Gerakan kelapa hibrida	Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Program Penanganan Kerawanan Pangan
Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	- Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batukaras	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	- Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengembangan Kawasan Tambak Udang	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PANGANDARAN 2024
Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm) Program Pengembangan Umkm Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	- Mencetak lima ribu wirausaha muda dan pengembangan pelaku industri kreatif - Peningkatan dukungan dan fasilitasi bagi wirausaha baru	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Peningkatan kemandirian pengusaha mikro dan kecil	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi lulusan SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi - Pelatihan calon CPNS asal Pangandaran - Pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi lulusan - Pelatihan dan pendampingan kewirausahaan era industry 4.0 bagi Angkatan kerja	Program Pengembangan UMKM
			Program Perencanaan Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PANGANDARAN 2024
Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Peningkatan insentif guru honor - Ajengan Masuk Sekolah Plus - Beasiswa bagi tenaga pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-Melanjutkan Pelayanan Kesehatan gratis - Penguatan sistem Kesehatan daerah melalui penerapan adaptasi kebiasaan baru - Penyelenggaraan layanan kesehatan dasar gratis - Kartu sehat untuk lansia - Memperluas kepesertaan BPJS dan Kartu Kertawaluya serta memberikan asuransi jiwa bagi penderes kelapa, nelayan, dan kelompok usaha masyarakat mempunyai risiko tinggi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Konsolidasi Demokrasi	Program Kesejahteraan Rakyat	- Program penguatan kehidupan kerukunan beragama - Peningkatan sarana keagamaan - Menyelenggarakan Gerakan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PANGANDARAN 2024
		Maghrib ke masjid - Mengembangkan dan memperkuat Pendidikan keagamaan (RA/Madrasah dan TPQ) - Bantuan Pesantren - Beasiswa untuk santri yang berprestasi	
Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter	Program Pengelolaan Pendidikan	- Memperluas beasiswa sampai perguruan tinggi - Melanjutkan Pendidikan gratis - Penyelenggaraan Pendidikan berbasis pariwisata - Penyelenggaraan Pendidikan gratis dan beasiswa untuk lulusan SMA/SMK	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan	melanjutkan ke Perguruan Tinggi	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
		- Penyelenggaraan Pendidikan karakter - Lanjutan Pembangunan dan Pemenuhan Sarana Prasarana Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	- Membangun sport center - Pembangunan sarana dan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PANGANDARAN 2024
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	prasarana pengembangan minat dan bakat pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian penduduk dan program KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Penanganan Bencana	- Penajaman PKH - Percepatan pengentasan kemiskinan - Pembebasan pajak bumi bangunan bagi masyarakat kecil	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial			Program Rehabilitasi Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Pemberdayaan Sosial
			Program Penanganan Bencana
Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Optimalisasi penerapan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Pengelolaan Arsip Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	- Peningkatan efektivitas dan efisiensi hubungan kerja antar PD	Program Pengelolaan Arsip
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PANGANDARAN 2024
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program Perizinan Penggunaan Arsip		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Kepegawaian Daerah
Transformasi Digital		- Pembangunan Desa Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Program Pelayanan Penanaman Modal	- Peningkatan kualitas Pelayanan publik melalui inovasi sistem terintegrasi - Pemenuhan RC MPP	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Program Promosi Penanaman Modal		Program Pendaftaran Penduduk
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Program Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan mitigasi bencana	Program Penanggulangan Bencana



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PANGANDARAN 2024
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Bojongsari	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Sumber: Olahan Penyusun, 2023

Tabel 4. 13 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Optimalisasi pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Nilai Inflasi	0,69	Meningkatkan akses penunjang perekonomian melalui pendampingan, pelatihan, pemberdayaan, dan penyediaan sarana prasarana teknologi dan pemasaran serta promosi investasi	Menciptakan iklim usaha yang berdaya saing	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Tingkat Kualitas Pelayanan Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Pangandaran	85 % 66 Nilai	5.208.749.723,00	DPMPTSP
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor	2000 Investor	67.472.915,00	DPMPTSP
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin	100 %	90.000.000,00	DISKOPDAG IN



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Target PAD	255.798.30 4.028,81		Peningkatan kolaborasi pembangunan daerah dan Optimalisasi PAD melalui pengelolaan berbasis digital	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	100 % 100 % 100 %	8.937.347.000,00	BAPENDA
		PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri (Triliun)	5,109		Peningkatan program pemberdayaan petani dan nelayan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Indeks Pertanaman	1,5 % 3 % 1,6 % 200 Indeks	4.810.000.000,00	DINAS PERTANIAN
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	1,5 %	21.733.560.332,00	DINAS PERTANIAN



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	10 %	1.172.000.000,00	DINAS PERTANIAN
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,30 %	26.948.372.000,00	DKPKP
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,20 %	17.148.301.900,00	DKPKP
		% Pertumbuhan usaha mikro dan kecil	15	Pengembangan pelaku industri kreatif dan UMKM	Peningkatan kapasitas industri kreatif dan UMKM	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	75 %	1.115.000.000,00	DISKOPDAG IN
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	15 %	1.170.000.000,00	DISKOPDAG IN
						Program Pengembangan Umkm	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	0,1 %	1.000.000.000,00	DISKOPDAG IN



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatn ya cakupan penanganan PPKS	% Penduduk Miskin	5,90 - 6,40	Peningkatan sistem perlindungan dan kesejahteraan sosial	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan serta pemberian bantuan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	10 %	1.047.707.600, 00	DINSOS PMD
						Program Pemberdayaan Sosial	Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70 % 90 %	400.000.000,0 0	DINSOS PMD



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	72,22 %	450.000.000,00	DISKOPDAGIN
					Pembangunan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	8 %	3.859.450.059,00	DINSOS PMD
	Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase Rumah yang Layak Huni	74	Meningkatkan pemenuhan kualitas permukiman layak huni	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	25,89 %	32.070.518.631,00	DPUTRPRKP
		Cakupan Desa ODF (Open Defecation Free)	100	Penurunan tingkat BABS	Pembangunan sarana dan prasarana layak dan sehat serta pendampingan desa ODF di desa kumuh	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang terpenuhi	90%	3.335.000.000,00	DINKES



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	90 %	652.600.000,00	DINKES
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Layanan Teknis Air Minum Dan Air Bersih	74 %	77.400.000.000,00	DPUTRPRKP
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan ketersediaan layanan air limbah	60,50 %	4.719.004.140,00	DPUTRPRKP
						Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik	62 %	163.032.377.000,00	DPUTRPRKP



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,80 - 4,00	Peningkatan kualitas tenaga kerja dan kuantitas lapangan pekerjaan serta sarana/prasarana penunjang	Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja Meningkat	70 %	1.099.999.600,00	DISNAKER
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang diserap	70 %	496.092.500,00	DISNAKER
						Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus Ketenagakerjaan pada Perusahaan Menurun	90 %	349.999.760,00	DISNAKER
Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	Peningkatan akses dan daya tarik destinasi pariwisata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,51-5,90	Peningkatan iklim ekonomi dan investasi di bidang pariwisata	Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi	14 %	408.039.550,00	DISPARBUD



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi keratif yang berdaya saing	25 %	1.157.812.623,00	DISPARBUD
						Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor	15 %	169.500.000,00	DISKOPDAGIN
					Peningkatan promosi dan pengembangan potensi ekonomi daerah	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi Tingkat Efektifitas Kegiatan Promosi Penanaman Modal	10 % 15 Kegiatan	81.321.662,00	DPMPTSP
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	30,77 %	700.000.000,00	DISKOPDAGIN



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Digitalisasi ekonomi	Kerjasama untuk digitalisasi produk/ komoditas unggulan dan promosi dengan provider	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1,40 %	100.000.000,00	DISKOPDAGIN
		% Penenuhan Kriteria GSTC	40	Kolaborasi kegiatan stakeholders untuk pemenuhan kriteria GSTC untuk mendukung pariwisata berkelanjutan	Dukungan Penyelenggaraan GSTC dan pelaksanaan KPS dalam penyelenggaraan pariwisata/ MICE serta peningkatan promosi pariwisata berbasis digital	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	14 %	34.314.241.047,00	DISPARBUD
						Program Pemasaran Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan	35 %	2.575.138.591,00	DISPARBUD
					Peningkatan kualitas infrastruktur strategis kabupaten pendukung pariwisata	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	persentase PSU yang ditingkatkan	12 %	1.200.000.000,00	DPUTRPRKP



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan secara komprehensif	Indeks Kesehatan	80,51-81,00	Meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan kapasitas tenaga kesehatan	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi Persentase sistem informasi yang dikelola	90 % 90 % 90 %	205.131.712.260,00	DINKES
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90 %	5.858.400.000,00	DINKES
		Prevalensi Stunting	4,4	Penerapan zero new stunting dan penanganan ATM	Penanganan stunting dan ATM melalui kolaborasi dan inovasi penyelenggara	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase farmasi, alat kesehatan yang terpenuhi	90 %	1.420.000.000,00	DINKES
					raan pelayanan serta penyuluhan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang terpenuhi	90%	16.959.175.571,00	DINKES



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pengendalian Penduduk	Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA) Validitas data keluarga beresiko stunting	100 % 100 %	945.817.992,00	DKBP3A
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1) Prevalensi peserta KB aktif Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting	75,74 % 75 %	3.160.289.212,00	DKBP3A



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan	78,02 % 75 %	806.380.682,00	DKBP3A
						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi Angka Kecukupan Protein	2100 Angka 57 Angka	3.137.800.000,00	DKPKP
Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesenjangan	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan secara komprehensif	APK SD/MI/Paket A	98,0	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan kesetaraan, informal, dan inklusi	Mendorong pengembangan pendidikan non formal, kesetaraan dan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Layanan Pendidikan Non Formal Dan Informal Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Persentase Penerapan Pendidikan Berbasis Pariwisata	84 % 100 % 93 %	14.098.199.070,00	DISDIKPORA



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		APK SMP/MTs /Paket B	98,7							
		Indeks Pendidikan	60,21 - 60,50	Penerapan pendidikan berkarakter di sekolah	Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing melalui penyediaan sarana prasarana berbasis TIK dan penguatan penerapan pendidikan berkarakter	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi Persentase Tingkat Budi Pekerti Peserta Didik Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Persentase Pelaksanaan Sistem Pencapaian Mutu Pendidikan Pada Masa Dan PascaPandemi Persentase Penerapan Pendidikan Berbasis Pariwisata	93 % 90 % 100 % 90 % 93 %	813.943.355.182,00	DISDIKPORA



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pengembangan Kurikulum	persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Standar Isi	54 %	1.962.636.028,00	DISDIKPORA
						Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	56 %	2.358.000.000,00	DISDIKPORA
		Jumlah pemuda berprestasi yang mendapatkan penghargaan	110	Peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan peran kepemudaan	Pembangunan gedung pemuda juara dan peningkatan keterampilan pemuda melalui pelatihan dan pemberdayaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase pembinaan wirausaha muda dan Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan	80 %	181.147.912.148,00	DISDIKPORA
					Penggalian dan peningkatan atlet berprestasi melalui pembangunan sarana prasarana olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	80 %	12.483.362.310,00	DISDIKPORA



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah	% Kondisi Jalan Mantap	87,5	Meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastruktur daerah melalui peningkatan, pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur serta peningkatan kualitas sarana prasarana perhubungan	Peningkatan konektivitas wilayah melalui pemerataan pembangunan serta penerapan dan integrasi aplikasi serta database infrastruktur	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Baru Yang Terbangun Presentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	87,5 % 84,69 %	743.824.288.526,00	DPUTRPRKP
		% Drainase Dan Gorong - Gorong Kabupaten Dalam Kondisi Baik	59			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dan Gorong - Gorong Kabupaten Dalam Kondisi Baik	59 %	11.289.710.105,00	DPUTRPRKP
		% Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	71,57			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	71,57 %	79.448.057.000,00	DPUTRPRKP



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,98	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat melalui pemahaman pola hidup sehat kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM serta sarana prasarana pengelolaan sampah	Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan hidup	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Persampahan	85 %	1.300.000.000,00	DPUTRPRKP
						Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kualitas Air dan Udara yang memenuhi Baku Mutu	29,50 %	12.225.243.620,00	DLHK
						Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan layanan persampahan	27,90 %	94.446.676.998,00	DLHK
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Tutupan Lahan yang dikelola	0,80 %	11.431.173.428,00	DLHK



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Indeks Perilaku Peduli Lingkungan	36 %	122.999.750,00	DLHK
	Meningkatkan kemampuan mitigasi bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	139	Meningkatkan kualitas pelayanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana dengan membentuk dan meningkatkan pelatihan serta pembinaan desa tangguh bencana	Peningkatan kewaspadaan dini dan mitigasi bencana di wilayah rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	4.702.974.321,00	BPBD



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Penanganan Bencana	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	100 %	1.302.000.000, 00	DINSOS PMD
						Program Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	100 %	9.823.579.494, 00	SATPOL PP
						Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Korban Bencana yang ditangani	50 Rumah	1.200.000.000, 00	DPUTRPRKP



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah / Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	69,0 - 73,0	Optimalisasi komitmen dan integritas SDM dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Peningkatan kualitas SDM dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui pendampingan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	Program Kepegawaian Daerah	Persentase kegiatan layanan kepegawaian ASN yang terlaksana	100 %	5.857.954.307,00	BKPSDM
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Aparatur Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang mendapatkan sertifikat dalam pengembangan kompetensi jabatan fungsional kepemimpinan, manajerial dan prajabatan	100 % 91 %	4.171.372.167,00	BKPSDM



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat kematangan tata kelola SPBE	3,3 Indeks	1.495.798.306,00	DISKOMINFO
		Nilai AKIP	72,25 - 76,00		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan	100 % 100 %	347.870.870.950,00	BKAD
						Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	100 % 60 %	3.301.809.204,00	BAPPEDA



Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh	Persentase masyarakat yang memahami demokrasi	66	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban dan keamanan melalui peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan optimalisasi Linmas dalam masyarakat	Dukungan program dan kegiatan untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu serentak	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Presentase Masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri	66 %	44.148.920.000,00	BAKESBANG POL
					Sosialisasi dan peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan dan politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan	73 %	1.640.818.841,00	BAKESBANG POL

Sumber: Diolah Penyusun, 2023

Berdasarkan tabel di atas, bahwa program prioritas Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah cakupan pembangunan yang terdapat pada Perpres 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Program prioritas yang masuk dalam peraturan tersebut diantaranya adalah pembangunan Terminal Tipe A Pangandaran, TPA Bojongsari, SPAM Kabupaten Pangandaran dan IPLT Purbahayu. Semua program tersebut perlu didukung oleh program kegiatan penunjang untuk pemenuhan *readiness criteria*, misalnya penyusunan DED, penyediaan lahan, pembuatan kajian, fasilitasi dan koordinasi dengan OPD serta K/L teknis.

Terkait pembangunan Terminal Tipe A, kesiapan lahan dalam proses pembayaran tegakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran. Setelah itu lahannya akan dihibahkan ke Kementerian Perhubungan. Kemudian untuk TPA Bojongsari progres untuk *readiness criteria* sudah di selesaikan, dan saat ini dalam tahap pemenuhan rekomendasi teknis pengalihan alur sungai dari Kementerian PUPR. Berkaitan dengan SPAM Kabupaten Pangandaran pada tahun 2022 telah di susun DED pipa dan jaringan distribusi utama untuk daerah Putrappingan dan Parigi.

Selain itu, program prioritas tahun 2024 diarahkan pada pemulihan ekonomi masyarakat maupun daerah. Perekonomian daerah terutama ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tinggi-rendahnya PAD salah satunya dari tumbuh kembangnya kegiatan investasi suatu daerah yang akan menjadi pendorong roda penggerak perekonomian daerah yang ditentukan dari aspek kemanfaatan yang diperoleh pihak investor, masyarakat dan pemerintah daerah. Mayoritas investasi yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran berada di sektor pendukung pariwisata. Pariwisata merupakan sektor unggulan di Kabupaten Pangandaran yang menjadi penyumbang PAD terbesar.

Sebagai upaya dalam meningkatkan kunjungan wisata ke Pangandaran maka pada tahun 2023 akan dilaksanakan penyusunan dokumen Neraca Satelit Pariwisata. Neraca Satelit Pariwisata adalah suatu sistem, konsep dan metode tampilan informasi kuantitatif yang menyediakan perangkat analisis yang menyeluruh (*general*), kompak (*compact*), saling berkait (*interconnected*), konsisten (*consistent*) dan kontrol (*control*). Melalui perhitungan Nesparda dapat diukur dampak permintaan akhir terhadap output yang meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok serta ekspor barang dagangan. Sehingga bisa dikatakan bahwa melalui kajian Nesparda ini dapat diukur besar pengeluaran wisatawan baik mancanegara maupun nusantara dalam beraktivitas wisata selama kurun waktu tertentu di Kabupaten Pangandaran.

Dari hasil evaluasi terhadap capaian kinerja urusan pariwisata melalui indikator kunjungan wisatawan, dapat dilihat bahwa kegiatan pariwisata di Pangandaran mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendapatan asli daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung jika dikelola dengan baik. Sektor pariwisata Pangandaran dapat berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Pangandaran baik secara langsung ataupun tidak langsung. Di sisi lain, sektor pariwisata merupakan sektor yang cukup rentan, seperti saat terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2021-2022.

Selain sektor pariwisata, roda perekonomian masyarakat Kabupaten Pangandaran berasal dari sektor pertanian, dijelaskan bahwa sektor pertanian merupakan sektor prioritas dalam pembangunan daerah. Dijadikannya sektor pertanian sebagai sektor prioritas tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pangandaran hampir secara merata di tiap kecamatan, kenyataan ini menimbulkan anggapan umum bahwa hampir setiap daerah di Kabupaten Pangandaran mempunyai potensi pada sektor pertanian yang menyeluruh.

Potensi sektor pertanian yang merupakan faktor penggerak pembangunan serta berperan penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pangandaran perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu program prioritas tahun 2023 adalah untuk mendukung sektor pertanian, mulai dari penyediaan bibit, tenaga ahli, penyediaan peralatan, pengelolaan irigasi, dan pendistribusian komoditas pertanian, akses jalan untuk pendistribusian komoditas pertanian agar dapat berjalan dengan cepat.

Program prioritas lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak yang tahapan pelaksanaan kegiatannya sudah dimulai pada bulan Juni 2022 s.d. akhir tahun 2023. Kegiatan dimaksud terdiri dari, perencanaan program dan anggaran; penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu; pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu; penetapan peserta pemilu; penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; pencalonan anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden; dan akhir 2023 yaitu pelaksanaan kampanye pemilu. Adapun pengampu program kegiatan terkait Pilkada tersebut adalah Bakesbangpol, Satpol PP, Sekretariat Daerah, KPU dan Bawaslu.

Berkenaan dengan prioritas daerah Kabupaten Pangandaran kesatu yaitu Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja, pada tahun 2024 terdapat program prioritas untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui program penyediaan makanan, fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat, pembangunan rutilahu, gelar operasi pasar murah, dan lain sebagainya. Program-program tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang diprioritaskan untuk penanganan masalah perekonomian masyarakat yang disebabkan karena lonjakan angka inflasi serta dampak dari pandemi Covid-19.

Program prioritas lainnya yaitu mengembangkan kegiatan inovasi untuk Rancatan (Rakyat Nanjeur, Cageur, tur Tahan Pangan). Rancatan merupakan istilah dalam bahasa Sunda yang artinya pemikul berbahan bambu/besi untuk membawa barang/makanan oleh masyarakat pada jaman dahulu. Sedangkan arti dari kepanjangan Program Rancatan yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Maju, Sehat dan Tahan Pangan. Program Rancatan dilaksanakan untuk peningkatan ketersediaan pangan sebagai sumber ekonomi baru dan berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran yang sejalan dengan Tema RKP 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Inovasi Rancatan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, sehat dan tahan pangan digagas untuk pengembangan pengelolaan lumbung pangan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya, peningkatan cadangan pangan masyarakat serta mempusatkan kegiatan mulai dari produksi sampai dengan pemasaran pada lumbung pangan masyarakat tersebut. Pelaksanaan lumbung pangan masyarakat yang awalnya hanya sebagai tempat penyimpanan gabah milik kelompok, dengan adanya penyediaan infrastruktur lumbung pangan masyarakat dan sarana pendukung lainnya melalui Program Rancatan menjadikan lumbung pangan masyarakat berkembang dan menghasilkan produk beras yang layak jual di pasaran. Gapoktan yang menerima Program Rancatan ini sudah mengirimkan produknya ke kios-kios/pasar di wilayah Kabupaten Pangandaran, bahkan pengiriman sampai ke Tasikmalaya dan Kota Bandung. Namun hal ini masih perlu dukungan dalam hal registrasi PSAT sebagai syarat izin edar di masyarakat.

**Tabel 4. 14 Dukungan Program terhadap Prioritas Nasional (PN)
Tahun 2024**

No	Prioritas Nasional (PN)	Total Anggaran Tahun 2024 (APBD)	Persentase yang Mendukung PN
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;	1.648.751.391.605,00	37,713%
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;	1.385.688.423.082,00	30,855%
3.	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;	1.368.437.086.321,00	30,471%
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;	1.088.589.769.284,00	24,240%
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;	1.385.688.423.082,00	30,855%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan	146.982.557.924,00	3,273%
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	810.151.708.089,13	18,040%

Sumber: Diolah Penyusun, 2024

Dalam rangka mendukung prioritas nasional (PN), pemerintah Kabupaten Pangandaran terus berupaya untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan pusat. Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus mendukung prioritas nasional tahun 2024. Berdasarkan tabel diatas bahwasanya pada masing-masing prioritas nasional terdapat dukungan yang dibuktikan dengan persentase dukungan dari

perhitungan anggaran per prioritas. Pada PN 1 mengenai Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, sebesar 37,713% dari total anggaran yang mendukung. PN 2 mengenai Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan, sebesar 30,855% dari total anggaran yang mendukung. PN 3 mengenai Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, sebesar 30,471% dari total anggaran yang mendukung. PN 4 mengenai Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, sebesar 24,240% dari total anggaran yang mendukung. PN 5 mengenai Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, sebesar 30,855% dari total anggaran yang mendukung. PN 6 mengenai Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, sebesar 3,273% dari total anggaran yang mendukung. PN 7 mengenai Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, sebesar 18,040% dari total anggaran yang mendukung. Rincian program yang mendukung pada masing-masing PN sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Program yang Mendukung PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
1	Program Pemberdayaan Sosial	410.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	Program Rehabilitasi Sosial	3.994.720.176,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.101.278.360,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
4	Program Penanganan Bencana	1.397.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
5	Program Penataan Desa	209.330.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
6	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	110.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	10.276.250.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
8	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	500.000.000,00	Dinas Ketenagakerjaan
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	556.519.278,00	Dinas Ketenagakerjaan
10	Program Hubungan Industrial	425.000.000,00	Dinas Ketenagakerjaan
11	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	24.205.923,00	Dinas Ketenagakerjaan
12	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	269.298.496,00	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
13	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	240.054.720,00	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
14	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	843.969.224,00	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
15	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	225.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
16	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	125.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
17	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	100.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
18	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	200.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
19	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	870.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian



No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
20	Program Pengembangan Umkm	1.000.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
21	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	110.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
22	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.254.201.581,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
23	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	455.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
24	Program Pengembangan Ekspor	169.500.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
25	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	240.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
26	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	155.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
27	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	931.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
28	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	90.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
29	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	224.165.688,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
30	Program Promosi Penanaman Modal	221.526.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31	Program Pelayanan Penanaman Modal	327.757.570,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	45.099.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
33	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	17.596.500,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
34	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	7.653.250.000,00	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
35	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.901.580.000,00	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
36	Program Penanganan Kerawanan Pangan	638.880.000,00	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
37	Program Pengawasan Keamanan Pangan	199.650.000,00	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
38	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6.211.853.555,00	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
39	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	25.615.095.000,00	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
40	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	3.035.710.194,00	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
41	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.302.898.986,00	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
42	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	18.115.205.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
43	Program Pemasaran Pariwisata	3.734.830.500,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
44	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	412.120.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
45	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.169.390.500,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
46	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.820.015.255,00	Dinas Pertanian
47	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.863.590.000,00	Dinas Pertanian



No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
48	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	486.054.720,00	Dinas Pertanian
49	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	800.000.000,00	Dinas Pertanian
50	Program Perizinan Usaha Pertanian	50.000.000,00	Dinas Pertanian
51	Program Penyuluhan Pertanian	1.172.000.000,00	Dinas Pertanian
52	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	29.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
53	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
54	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
55	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.884.377.587,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
56	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.163.283.190,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
57	Program Pengembangan Permukiman	3.605.471.984,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
58	Program Penataan Bangunan Gedung	116.817.292.275,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
59	Program Penyelenggaraan Jalan	44.007.852.598,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
60	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5.070.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
61	Program Pengembangan Perumahan	1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
62	Program Kawasan Permukiman	12.979.699.142,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
63	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Sumber: Olahan Penyusun, 2023

Tabel 4. 16 Program yang Mendukung PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan

No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	29.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman



No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
3	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.884.377.587,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.163.283.190,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
6	Program Pengembangan Permukiman	3.605.471.984,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
7	Program Penataan Bangunan Gedung	116.817.292.275,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
8	Program Penyelenggaraan Jalan	44.007.852.598,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5.070.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
10	Program Pengembangan Perumahan	1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
11	Program Kawasan Permukiman	12.979.699.142,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Sumber: Olahan Penyusun, 2023

Tabel 4. 17 Program yang Mendukung PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
1	Program Pengelolaan Pendidikan	138.764.610.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.358.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	515.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	17.488.250.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	13.616.619.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	130.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	223.340.815.571,00	Dinas Kesehatan
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.858.400.000,00	Dinas Kesehatan



No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.420.000.000,00	Dinas Kesehatan
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	652.600.000,00	Dinas Kesehatan
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	572.400.000,00	Puskesmas Padaherang
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	223.500.000,00	Puskesmas Sindangwangi
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	292.600.000,00	Puskesmas Mangunjaya
14	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	494.700.000,00	Puskesmas Kalipucang
15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	508.800.000,00	Puskesmas Pangandaran
16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	238.900.000,00	Puskesmas Sidamulih
17	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	454.500.000,00	Puskesmas Cikembulan
18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	401.700.000,00	Puskesmas Parigi
19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	157.700.000,00	Puskesmas Selasari
20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	324.400.000,00	Puskesmas Cijulang
21	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	354.200.000,00	Puskesmas Cimerak
22	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	245.800.000,00	Puskesmas Legokjawa
23	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	379.300.000,00	Puskesmas Cigugur

No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
24	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	345.400.000,00	Puskesmas Langkaplancar
25	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	134.400.000,00	Puskesmas Jadikarya
26	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	41.034.000.000,00	RSUD PANDEGA

Sumber: Olahan Penyusun, 2023

Tabel 4. 18 Program yang Mendukung PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
1	Program Pengelolaan Pendidikan	138.764.610.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2.358.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	515.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	17.488.250.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	13.616.619.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	130.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
7	Program Pengembangan Kebudayaan	1.818.481.000,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
8	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	355.452.500,00	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
9	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.589.320.812,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
10	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.201.920.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
11	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.597.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
12	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	435.596.095,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
13	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.404.747.037,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
14	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	843.969.224,00	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
15	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	269.298.496,00	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sumber: Olahan Penyusun, 2023

Tabel 4. 19 Program yang Mendukung PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	29.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman



No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.900.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
3	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.884.377.587,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.163.283.190,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
6	Program Pengembangan Permukiman	3.605.471.984,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
7	Program Penataan Bangunan Gedung	116.817.292.275,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
8	Program Penyelenggaraan Jalan	44.007.852.598,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5.070.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
10	Program Pengembangan Perumahan	1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
11	Program Kawasan Permukiman	12.979.699.142,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Sumber: Olahan Penyusun, 2023

Tabel 4. 20 Program yang Mendukung PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
1	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.884.377.587,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.163.283.190,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5.070.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
6	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	285.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
7	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.598.870.475,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
9	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	75.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
10	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
11	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	123.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
12	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
13	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	55.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
14	Program Pengelolaan Persampahan	4.556.200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
15	Program Penanggulangan Bencana	2.232.427.787,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber: Olahan Penyusun, 2023

Tabel 4. 21 Program yang Mendukung PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	11.348.441.588,00	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Nama Program	Anggaran	Pengampu
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.128.295.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.938.911.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.771.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	400.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
6	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	225.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
7	Program Pelayanan Penanaman Modal	327.757.570,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.371.400.000,00	Inspektorat
9	Program Pendaftaran Penduduk	515.938.879,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
10	Program Pencatatan Sipil	243.957.556,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Sumber: Olahan Penyusun, 2023

BAB V

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2024

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 untuk RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024. Musrenbang menjadi media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Proses penyusunan program prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, bawah-atas (*bottom up*), atas-bawa (*top-down*), dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional tahun 2024. Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, dana umat, pinjaman daerah, obligasi daerah, serta sumber pendanaan lainnya. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pencapaian pembangunan tahun sebelumnya maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Kabupaten Pangandaran tahun 2024 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya mewujudkan tema yaitu “*Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah*”, dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yaitu:

1. Penguatan sektor unggulan dalam penanganan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja;
2. Pengembangan pusat ekonomi masyarakat melalui program ekonomi kreatif;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penanganan *stunting*;
4. Peningkatan kapasitas pendidikan kesetaraan;
5. Peningkatan nilai investasi melalui infrastruktur dan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
6. Reformasi birokrasi, inovasi daerah, dan dukungan penyelenggaraan pemilu.

Prioritas dimaksud akan dijabarkan pada rencana program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi dan janji politik kepala daerah sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026 serta daya dukung terhadap kebijakan pembangunan pemerintah yang tertuang pada RPJMN serta kebijakan teknis terbaru yaitu Peraturan Presiden RI nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rabana dan Jawa Barat Bagian Selatan serta kebijakan pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2024

Belanja daerah tahun 2024 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah. Selain itu, belanja daerah juga digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Rencana pendanaan dan belanja pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024 tertuang dalam tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5. 1 Proyeksi Belanja Daerah

No	Uraian	2024
2	Belanja Daerah	4.504.136.075.835
2.1	Belanja Operasi	2.399.762.463.547
2.1.1	Belanja Pegawai	504.440.247.870
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.682.247.562.222
2.1.3	Belanja Bunga	57.029.154.390
2.1.4	Belanja Subsidi	145.005.818.136
2.1.5	Belanja Hibah	11.039.680.930
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.865.720.549.775
2.2	Belanja Modal	5.620.650.000
2.2.1	Belanja Tanah	245.818.544.187
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	581.778.150.429
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	1.014.659.684.222
2.2.4	Belanja Jalan	561.959.000
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	17.281.561.936
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	7.732.200.000
2.3	Belanja Tidak Terduga	7.732.200.000
2.4	Belanja Transfer	230.920.862.513
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	21.911.546.513
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	209.009.316.000

Sumber: SIPD Kabupaten Pangandaran, 2023

Proyeksi belanja daerah selanjutnya dijabarkan dalam rencana program/kegiatan prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5.2 Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang bahwa terdapat 6

(enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 2 Rencana Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	Program
1. SPM PENDIDIKAN					
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3.	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan
2. SPM KESEHATAN					
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	Program
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	64%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	95%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	Program
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	87%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. SPM PEKERJAAN UMUM					
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	86%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. SPM PERUMAHAN RAKYAT					
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan	Program Pengembangan Perumahan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	Program
	bencana Kab/kota			Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
5. SPM TRANTIBUMLINMAS					
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	Program
		Evakuasi korban kebakaran			Penyelamatan Non Kebakaran
6. SPM SOSIAL					
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Sosial
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan berserta target kinerja dan anggaran pendukung capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 3 Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

No	SPM Bidang	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2024	Target Anggaran 2024 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25342 Orang	400.000.000,00	PAD, DAK NON FISIK
2	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5094 Orang	363.000.000,00	PAD, DAK NON FISIK
3	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5507 Orang	2.299.175.571,00	PAD, DAK NON FISIK
4	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5770 Orang	2.000.000.000,00	PAD, DAK NON FISIK
5	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	576 Orang	300.000.000,00	DAK NON FISIK, DAU
6	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75633 Orang	330.000.000,00	PAD, DAK NON FISIK



No	SPM Bidang	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2024	Target Anggaran 2024 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49757 Orang	330.000.000,00	PAD, DAK NON FISIK
8	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	255984 Orang	300.000.000,00	DAK NON FISIK, DAU
9	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	116524 Orang	300.000.000,00	DAK NON FISIK, DAU
10	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4147 Orang	300.000.000,00	DAK NON FISIK, DAU
11	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4627 Orang	300.000.000,00	DAK NON FISIK, DAU
12	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7625 Orang	300.000.000,00	DAK NON FISIK, DAU



No	SPM Bidang	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2024	Target Anggaran 2024 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	1000 Orang	100.000.000,00	PAD
15	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1500 Orang	175.000.000,00	PAD
16	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1700 Orang	300.000.000,00	PAD
17	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12 Dokumen	300.000.000,00	PAD
18	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	100.000.000,00	PAD
19	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar penanggulana n Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	12 Dokumen	229.200.000,00	PAD



No	SPM Bidang	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2024	Target Anggaran 2024 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabup aten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	100 Laporan	20.500.000.000,00	PAD
21	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabup aten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	161 Orang	300.000.000,00	PAD
22	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	687.600.000,00	PAD
23	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabup aten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	505.645.646,00	PAD
24	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabup aten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2 Laporan	50.000.000,00	PAD
25	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabup aten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 Laporan	130.000.000,00	PAD



No	SPM Bidang	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2024	Target Anggaran 2024 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	280 Rumah Tangga	2.000.000.000,00	PAD
27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	160 SR	62.800.000.000,00	PAD, BANKEU PROVINSI
28	Pendidikan	Pendidikan Dasar Usia Dini	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	30.000.000,00	DAU
29	Pendidikan	Pendidikan Dasar Usia Dini	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	100 Paket	14.999.999.959,00	BANKEU PROVINSI
30	Pendidikan	Pendidikan Dasar Usia Dini	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	8275 Peserta Didik	2.449.999.775,00	PAD
31	Pendidikan	Pendidikan Dasar Usia Dini	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	100.000.000,00	DAU
32	Pendidikan	Pendidikan Dasar Usia Dini	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	12499 Orang	8.506.999.920,00	DAU
33	Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7000 Orang	9.250.000.000,00	DAU
34	Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	870 Peserta Didik	529.999.976,00	DAU



No	SPM Bidang	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2024	Target Anggaran 2024 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Pendidikan	Pendidikan Kesenjangan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesenjangan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesenjangan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2000 Peserta Didik	339.999.840,00	PAD
36	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	15996 Orang	16.799.999.800,00	PAD
37	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	2.360.000.000,00	BANKEU PROVINSI
38	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	180.000.000,00	BANKEU PROVINSI
39	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	180.000.000,00	BANKEU PROVINSI
40	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	80.000.000,00	PAD
41	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	130.000.000,00	BANKEU PROVINSI
42	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	282 Satuan Pendidikan	7.549.996.228,00	PAD
43	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	33710 Peserta Didik	10.649.999.900,00	PAD
44	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	149.999.880,00	PAD



No	SPM Bidang	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2024	Target Anggaran 2024 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	284 Paket	423.013.442.525,00	PAD, BANKEU PROVINSI
46	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	31800 Peserta Didik	3.549.999.725,00	PAD
47	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	31.337 Unit	6.649.998.159,00	PAD
48	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	287 Satuan Pendidikan	115.000.000,00	DAK FISIK
49	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	190.000.000,00	BANKEU PROVINSI
50	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	190.000.000,00	BANKEU PROVINSI
51	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Unit	210.000.000,00	BANKEU PROVINSI
52	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	420.000.000,00	BANKEU PROVINSI
53	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	370.000.000,00	BANKEU PROVINSI
54	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	370.000.000,00	BANKEU PROVINSI
55	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	170.000.000,00	PAD



No	SPM Bidang	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2024	Target Anggaran 2024 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1.670.000.000,00	BANKEU PROVINSI
57	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	54 Satuan Pendidikan	2.662.489.848,00	PAD
58	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	12501 Peserta Didik	8.149.971.483,00	PAD
59	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	179.974.920,00	PAD
60	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	53 Paket	196.576.657.769,00	PAD, BANKEU PROVINSI
61	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	14100 Paket	4.565.594.105,00	PAD
62	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13545 Peserta Didik	2.430.024.000,00	PAD
63	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	54 Satuan Pendidikan	115.000.000,00	DAK NON FISIK-BOS REGULER
64	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9859 Orang	11.798.355.640,00	DAU
65	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	280.000.000,00	BANKEU PROVINSI
66	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan,	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	150.000.000,00	BANKEU PROVINSI



No	SPM Bidang	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2024	Target Anggaran 2024 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemuda dan Olah Raga							
67	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	240.000.000,00	BANKEU PROVINSI
68	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	240.000.000,00	BANKEU PROVINSI
69	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	85.000.000,00	BANKEU PROVINSI
70	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	150.000.000,00	PAD
71	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	125 Unit Rumah	29.275.000.000,00	PAD
72	Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	71 Orang	952.000.000,00	PAD



No	SPM Bidang	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2024	Target Anggaran 2024 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	175.000.000,00	PAD
74	Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	175.000.000,00	PAD
75	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	298.936.000,00	PAD



No	SPM Bidang	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2024	Target Anggaran 2024 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	37.273.069,00	PAD



No	SPM Bidang	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2024	Target Anggaran 2024 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	254.100.000,00	PAD
78	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	100.000.000,00	PAD



No	SPM Bidang	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2024	Target Anggaran 2024 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	300.000.000,00	PAD
80	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Keluarga	200.000.000,00	PAD



No	SPM Bidang	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2024	Target Anggaran 2024 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	18770 Orang	432.000.000,00	PAD
82	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	37.273.069,00	PAD



No	SPM Bidang	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2024	Target Anggaran 2024 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.218.593.240,00	PAD
84	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	50.547.750,00	PAD



No	SPM Bidang	Indikator SPM	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan 2024	Target Anggaran 2024 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	115666 Keluarga	415.707.600,00	PAD

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

5.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, selanjutnya dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2024 yang diharapkan juga untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026. Rencana program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024, dapat dilihat pada **lampiran II**. Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 5. 4 Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	194	191.058.476.460
2	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	56	49.159.669.768
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	223	600.505.598.896
4	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesenitaraan	180	1.311.207.350.421
5	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	187	1.562.522.449.429
6	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	1.011	650.218.205.885
Jumlah			4.364.671.750.859

Sumber: SIPD Kabupaten Pangandaran diolah, 2023

5.4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

Rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun anggaran 2024 yang telah dirumuskan dan prakiraan akan maju pada tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan urusan pemerintahan masing-masing dapat dilihat pada matriks yang tersaji pada lampiran 2.

BAB VI

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2024

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil atas penyelenggaraan pemerintah yang dihubungkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diimbangi suatu penyelenggara pemerintahan yang baik. Ukuran-ukuran keberhasilan inilah selanjutnya didefinisikan menjadi sebuah indikator yang mampu menggambarkan ketercapaian suatu kinerja yang telah dilaksanakan. Dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk mengetahui tingkat keberhasilannya diperlukan suatu indikator kinerja daerah yang mampu menggambarkan secara utuh terhadap pencapaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan setiap tahunnya. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator pencapaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja sasaran organisasi perangkat daerah serta program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Pangandaran dibagi menjadi dua kelompok yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan indikator makro rencana capaian kinerja Kepala Daerah, serta Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator yang menggambarkan rencana capaian indikator kinerja masing-masing urusan pemerintahan termasuk didalamnya program-program pembangunan prioritas. Rencana capaian masing-

masing indikator kinerja tahun 2024 yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang ditetapkan.

Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), dan Indeks Gini. Target Indikator Kinerja Makro tahun 2024 tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. 1 Indikator Makro Daerah

No	Indikator Kinerja Makro	Realisasi 2022	Target	
			2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,03	69,12-69,59	70,00
2	Persentase Penduduk Kemiskinan (%)	9,32	6,40-7,00	7,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,56	4,90-4,25	1,50
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,21-5,50	5,55
5	Rasio Gini	0,294	0,330-0,326	0,27
6	Penurunan Emisi GRK (%)	N/A*	64,91	66,91
7	PDRB per Kapita ADHK (Juta Rupiah)	19,488	20,324	20,59

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Pangandaran memiliki potensi untuk mencapai pembangunan daerah yang positif dengan mempertimbangkan hasil realisasi capaian pada Bab II. Pemerintah Kabupaten Pangandaran memproyeksikan indikator makro tahun 2024 dengan memperhatikan capaian tahun 2022 untuk mencapai target-target tersebut.

Kenaikan IPM tahun 2022 ke tahun 2023 diproyeksikan tidak terlalu tinggi karena masih dalam tahap pemulihan perekonomian menuju kondisi normal. Pada tahun 2023 diperkirakan aktivitas perekonomian sudah mulai normal, sehingga daya beli atau indeks pengeluaran yang merupakan komponen penyusun IPM diperkirakan sudah meningkat dan dapat tumbuh signifikan. Dengan meningkatnya IPM, diindikasikan

kualitas pendidikan meningkat sehingga dapat mendorong kesuksesan program pengendalian penduduk dan memicu penurunan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2022 dan 2023.

Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran akan tetap tumbuh positif. Selain itu, keberhasilan penanganan pasca pandemi Covid-19 akan meningkatkan mobilitas masyarakat ke tempat kerja sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran khususnya sektor pariwisata.

TPT tahun 2023 dan 2024 diperkirakan akan terus menurun sejalan dengan meningkatnya perekonomian dan kepercayaan investor untuk berinventasi di Kabupaten Pangandaran. Hal ini akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja yang akan berpengaruh terhadap penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Pangandaran. Penurunan TPT akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pengeluaran yang merupakan komponen garis kemiskinan. Hal ini akan mendorong penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pangandaran.

6.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus dipantau dalam rangka memenuhi penilaian kinerja Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator kinerja tersebut dicapai dengan upaya dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Pangandaran baik yang dapat dihitung secara langsung maupun tidak langsung. Masing-masing perangkat daerah memiliki peran yang berbeda terhadap capaian indikator kinerja dari setiap misi pembangunan Kabupaten Pangandaran.

Capaian target Indikator Kinerja Utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Peningkatan upaya pemulihan ekonomi pasca penanganan pandemi Covid-19, mempengaruhi kinerja pembangunan di Kabupaten Pangandaran, sehingga Indikator Kinerja

Utama Kabupaten Pangandaran tahun 2023 dan 2024 mengalami penyesuaian dengan merujuk pada RPJMD Tahun 2021-2026, yang dirangkum pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. 2 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	62,00
2	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	Angka	0,2579
3	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	%	85
4	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7693
5	Persentase pemenuhan kriteria GSTC di destinasi pariwisata (Persen)	%	40
6	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rp.	690.000
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,00
8	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,06-90,09
9	Indeks Kesehatan	Indeks	80,51-81,00
10	Indeks Pendidikan	Indeks	60,21-60,50
11	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	19,61
12	Jumlah Pemuda Berprestasi yang mendapat penghargaan	Jumlah	110
13	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	%	0,60-0,57
14	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	74,59
15	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,55
16	Persentase Penduduk Miskin	%	7,00
17	PDRB Sektor Pertanian, Perdagangan, Perikanan dan Industri	Rupiah	5.109
18	Persentase Realisasi Nilai Investasi	%	7,6
19	Rasio Kewirausahaan	Rasio	4,15
20	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,5
21	Persentase Rumah Layak Huni	%	74
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	1,5
23	Persentase PPKS yang Mandiri	%	57

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
24	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69-73
25	Nilai SAKIP	Nilai	72,25-76,00
26	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
27	Indeks SPBE	Indeks	3,1
28	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	73
29	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	49,42
30	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,86-2,95
31	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	79,05
32	Indeks Konektivitas Wilayah	%	1.808
33	Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur	%	48,28
34	Indeks Risiko Bencana	Indeks	139
35	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	139,2
36	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,98

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

6.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK)

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dan wakil bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Untuk mencapai indikator utama bupati tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator

kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*) yang dilaksanakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. IKK Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2023 merupakan bagian dari capaian pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026.



Tabel 6. 3 Target Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target	
				2023	2024
2.2	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
	Pertumbuhan PDRB	%	5,03	5,21-5,50	5,55
	Indeks Gini	Nilai	0,294	0,330-0,326	0,27
	Tingkat Kemiskinan	%	9,32	6,40-7,00	7,00
	Laju Inflasi	%	6,65	0,86	0,69
	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	69,03	69,12-69,59	70,00
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	79,92	65,45	65,60
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	1,56	4,90-4,25	1,50
	Penyelenggaraan Festival Seni Budaya	Event	14	8	8
	Jumlah Cabang Olahraga	Cabor	40*	31	32
2.3	PELAYANAN UMUM				
2.3.1	Pelayanan Umum Wajib Dasar				
2.3.1.1	Pendidikan				
	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	Angka	101,7	97,50	98,00
	Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	Angka	104	98,60	98,70
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Angka	96	93,00	94,00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Angka	84,97*	70,00	70,50
	Jumlah Guru Berijazah S1/DIV	Orang	4.171	3,85	3,91



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target	
				2023	2024
2.3.1.2	Kesehatan				
	Prevalensi Balita Stunting	%	2,21	4,7	4,4
	Angka Harapan Hidup	Angka	71,89	72,24	72,52
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi	%	100*	100	100
	Dokter Umum	Orang	63	68	75
	Dokter Gigi	Orang	20	16	17
	Bidan	Orang	456	479	527
	Ners	Orang	220*	258	284
	Perawat Terampil	Orang	300*	339	373
	Perawat Gigi	Orang	30*	35	39
	Pranata Labkes	Orang	51*	57	63
	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	Orang	23*	27	29
	Tenaga Gizi	Orang	16*	18	20
	Sanitarian/Kesling	Orang	12*	13	15
	Kesehatan Masyarakat	Orang	64*	74	81
	Fisioterapis	Orang	30*	34	37
	Apoteker	Orang	35*	41	45
	Asisten Apoteker	Orang	52*	62	68



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target	
				2023	2024
	Analisis Obat dan Makanan	Orang	1*	1	1
	Dokter Spesialis	Orang	20	25	28
	Radiografer	Orang	8*	10	11
	Teknisi Elektromedis	Orang	2*	2	3
	Asisten Penata Anestesi	Orang	3*	4	4
	Fisikawan Medis Ahli Pertama	Orang	1*	1	1
	Ahli Teknik Laboratorium Medik Terampil	Orang	11*	13	15
	Analisis Patologi Anatomi	Orang	1*	1	1
	Dietisien	Orang	1*	1	1
	Nutrisi Terampil	Orang	7*	8	9
	Sanitarian Ahli Pertama	Orang	5*	6	7
	Analisis Kebijakan Kesehatan	Orang	1*	1	1
	Penyuluh Kesehatan Ahli	Orang	3*	4	4
	Petugas CSSD/Perawat	Orang	3*	4	4
	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	%	100	100	100
2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	69,50*	70,57	71,57
	Persentase penduduk berakses air minum	%	64	73	74
	Persentase Jalan Baru yang Terbangun	%	32*	75,86	84,69



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target	
				2023	2024
	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	93,28	82,50	87,50
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Persampahan	%	15*	38	62
	Proporsi Drainase dan Gorong-gorong Kabupaten dalam kondisi baik	%	50*	56	59
	Persentase Sarana Pemerintahan yang Terbangun	%	11,43	43	57
	Persentase Penerapan Arsitektur Kawasan Khas Pangandaran pada Bangunan Pemerintah	%	1*	3	6
	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	%	36,19	42,54	45,04
2.3.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
	Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik	%	55*	59	62
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	26,40*	26,14	25,89
2.3.1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
	Kejadian Kebakaran Kabupaten Pangandaran	Kali	37	10	9
	Jumlah Pelanggaran K3 yang Dilaporkan Masyarakat dan Teridentifikasi oleh Satpol PP	Kali	24	10	11
2.3.1.6	Sosial				
	Persentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	%	100	8	8



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target	
				2023	2024
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100	88,50	89,00
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	98,75	99
2.3.2	Layanan Urusan Wajib Non-Dasar				
2.3.2.1	Tenaga Kerja				
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	76,43	70	75
	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	78,67	75	80
	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	15,13	25,49	25,89
2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	90,2	90,01	90,07
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	76,09	74,58	74,59
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	24,89	25,49	25,89
2.3.2.3	Pangan				
	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	81,12	81,5	82,0
	Skor PPH Konsumsi	Skor	93,3	80	85
2.3.2.4	Pertanahan				



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target	
				2023	2024
	Persentase Izin Lokasi dan/atau izin Penetapan Lokasi yang diterbitkan	%	100*	100	100
	Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah hak dan/atau tanah Garapan Yang Diselesaikan	%	100*	100	100
	Persentase Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan	%	100*	100	100
	Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah Kabupaten Pangandaran	%	100*	100	100
2.3.2.5	Lingkungan Hidup				
	Volume sampah yang terkelola	M ³	54.162	16.747,319	17.082,265
	Persentase Penanganan sampah	%	28,66	26,30	27,90
	Indeks Kualitas Air	Nilai	50	51,8	51,85
	Indeks Kualitas Udara	Nilai	88,16	79	79,5
	Indeks Kualitas Vegetasi/IKTL	Nilai	69,05	65,25	65,25
2.3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	%	98,35	100	100
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	93,85	100	100
	Cakupan Perekaman KTP Elektronik	%	98,89	100	100
	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	51,97	100	100
	Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	%	75,31	80	82



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target	
				2023	2024
	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	%	63,86	100	100
	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	%	99,68	100	100
	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	%	30*	35	57
2.3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	%	50*	80	100
2.3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	TFR /Total Fertility Rate	%	2,22	2,20	2,18
	CPR /Contraceptive Prevalenci Rate	%	69,81	61,96	62,43
	Unmet Need	%	19,7	15,40	14,93
	LPP /Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,17	0,59-0,56	0,60-0,57
	Ratio Akseptor KB	%	70,31	61,96	62,43
	ASFR /Age Spesific Fertility Rate	%	27	32	31
2.3.2.9	Perhubungan				
	Rasio Sarana Prasarana Perhubungan Yang Ada Dalam Kondisi Baik	%	96	75,08	93,31
	Persentase kecamatan yang terlayani angkutan umum	%	50	72,22	88,89
2.3.2.10	Komunikasi dan Informatika				
	Persentase aplikasi yang dimanfaatkan secara baik	%	45*	82	85



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target	
				2023	2024
	Persentase Penyebaran Informasi Publik	%	45*	60	65
2.3.2.11	Usaha Mikro Kecil Menengah				
	Persentase koperasi aktif	%	91,56	89,28	89,41
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	100	100	100
	Persentase pertumbuhan usaha mikro	%		15	15
2.3.2.12	Penanaman Modal				
	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	1.050*	183	201
2.3.2.14	Statistik				
	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	%	20*	30	35
2.3.2.15	Persandian				
	Persentase Pengamanan Informasi Daerah	%	55*	65	70
2.3.2.16	Kebudayaan				
	Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	Event	40*	8	8
	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	50*	62	64
	Jumlah Objek diduga Cagar budaya yang dilestarikan	Objek	3*	3	3
2.3.2.17	Perpustakaan				
	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan	%	N/A*	10	10
	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	Orang	14.740	16.560	27.720



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target	
				2023	2024
	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	Eksemplar	23.036	11.628	12.184
	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	Orang	364	346	386
	Jumlah masyarakat terlibat dalam kegiatan sosialisasi/promosi per tahun	Orang	6.500*	8.078	9.278
	Jumlah total perpustakaan	Perpus	695	642	648
	Jumlah Perpustakaan yang telah memiliki SNP di suatu wilayah	Perpus	210*	258	288
	Jumlah Anggota Perpustakaan	Orang	3.200*	3.993	4.533
2.3.2.18	Kearsipan				
	Kebijakan Kearsipan	%	N/A*	5,73	5,73
	Pembinaan Kearsipan	%	N/A*	13,16	13,16
	Pengolahan Arsip Inaktif Dengan Retensi Sekurang-Kurangnya 10 Tahun	%	4*	4	4
	Pengelolaan Arsip Statis	%	14,88*	14,88	14,88
	SDM Kearsipan	%	13,74*	13,74	13,74
	Persentase LAKE Kabupaten/Kota	%	66,13*	72,23	80,22
2.3.3	Urusan Pilihan				
2.3.3.1	Kelautan dan Perikanan				
	Kontribusi Produksi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	0,43	0,6	0,7



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target	
				2023	2024
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,5*	0,5	0,5
2.3.3.2	Pariwisata				
	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	N/A*	4	6
	Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	Rp.	29.383.788.500	20.000.000.000	22.000.000.000
	Persentase Tingkat hunian Akomodasi	%	5*	8	9
	Persentase Usaha Pariwisata Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	%	N/A*	12	12
	Persentase Pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	%	5*	20	20
2.3.3.3	Pertanian				
	PDRB sektor Pertanian	Rp.	1.963.550.000.000	1.802.321.770.000	1.833.461.950.000
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	17	15	15
	Jumlah kontribusi PDRB konstan dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	23,30	20	20
	Jumlah kontribusi PDRB harga berlaku dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	28,48	25	25
2.3.3.4	Perdagangan				
	Nilai ekspor daerah	Milyar	124,522*	118,55	127,20
	Persentase peningkatan nilai ekspor perdagangan	%	-26,47	6,80	7,29
	Nilai PDRB sektor perdagangan	Milyar	2.605,46	2.454,37	2.585,97



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target	
				2023	2024
2.3.3.5	Perindustrian				
	Jumlah Industri Baru	Industri	419	20	25
	Persentase Pertumbuhan Industri	%	11,71	0,006	0,007
	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	6	0,059	0,064
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	5,04	4,83	4,85
	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp.	663.410.000.000	594.201.920.102	617.201.920.102
2.3.3.6	Transmigrasi				
	Persentase Transmigran Swakarsa	%	0	3	5
2.3.4	Layanan Pendukung, Penunjang, Pengawasan Urusan Pemerintahan				
2.3.4.1	Perencanaan				
	Nilai SAKIP Unsur Perencanaan	%	22,10	22,70	22,85
	Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Daerah yang Berkualitas	%	95*	97,00	98,00
	Nilai SAKIP Bappeda	%	B (67,72)*	A (90)	AA (90,05)
	Persentase Nilai SAKIP PD Unsur Perencanaan di atas 26%	%	67,00*	71,29	74,29
2.3.4.1	Keuangan				
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WDP	WTP	WTP
	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	1,27*	1,29	1,55



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target	
				2023	2024
	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	25,90*	21,30	21,55
	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	12,24*	11,50	11,74
	Perbandingan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (BL)	Rasio	70:30*	60:40	60:40
	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Rasio	0,80*	0,68	0,87
2.3.4.2	Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan				
	Persentase ASN yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Teknis	%	5*	14	20
	Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi Manajerial	%	20*	31	40
2.3.4.3	Penelitian dan Pengembangan				
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	66,67	65-85	65-85
2.3.4.4	Pengawasan				
	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal	Nilai	17,33	7,80	7,95
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat	Nilai	89,6*	90	90
	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2	3	3
	Persentase PD yang mengimplementasikan Manajemen Risiko	%	23*	26	29
	Persentase PD yang membuat Kebijakan dan Pengendalian Korupsi	%	32*	35	40



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target	
				2023	2024
	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Level	3*	3	3
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	3*	3	3
2.3.4.5	Pemerintahan Umum				
	Persentase masyarakat yang memahami Kesatuan Bangsa	%	74*	78	82
	Persentase masyarakat yang memahami demokrasi	%	77	91	92
	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	B	A	A
2.3.4.6	Sekretariat Daerah				
	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	C	B	BB
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	N/A*	2,66 – 2,75	2,86 – 2,95
	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan	%	95*	85	90
2.3.4.7	Sekretariat Dewan				
	Persentase Kenaikan Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	%	85,28	63	66
2.3.4.1	Penanggulangan Bencana				
	Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	%	68,9*	70,2	71,6
	Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	23*	30	35

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2022	Target	
				2023	2024
	Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100*	100	100
2.4	DAYA SAING DAERAH				
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah				
	Pengeluaran Konsumsi per Kapita	Ribu Rp.	N/A	9.758,19	9.931,14
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur				
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Arus	30*	37,5	40
	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Izin	1	15	20
2.4.3	Fokus Iklim Investasi				
	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	1.050*	183	201
	PMDN/PMA (Nilai Investasi)	Milyar Rp.	1.781,4	389,74	428,71
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia				
	Lulusan S1	Orang	227*	320	370
	Lulusan S2	Orang	10*	20	25
2.4.5	Fokus Daya Saing Pariwisata				
	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	4.112.044	4.083.289	4.628.571
	PAD sektor pariwisata	Milyar	29,383	20	22,5

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

Tabel 6. 4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Pangandaran Tahun 2022, 2024, 2025

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2022	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1	Persentase Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi	86%	93 %	100%	Disdikpora
	Persentase Layanan Pendidikan Non Formal Dan Informal	80%	84 %	88%	
	Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan	100%	100 %	100%	
	Persentase Tingkat Budi Pekerti Peserta Didik	84%	90 %	96%	
2	Persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Standar Isi	N/A	54%	60%	
3	Persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	52%	56%	0%	Disdikpora
4	Persentase Layanan Literasi Siswa	31%	63%	65%	Disdikpora
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Persentase pembinaan wirausaha muda dan Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan	80%	80%	80%	Disdikpora
2	Persentase Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	80%	80%	80%	Disdikpora
3	Persentase Pemuda Yang aktif dalam Kepramukaan	N/A	80%	80%	Disdikpora
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase sistem informasi yang terkelola	82,50%	90 %	90%	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi		90 %	90%	
	Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang terpenuhi		90 %	90%	
2	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	65%	90%	90%	Dinas Kesehatan
3	Persentase farmasi, alat kesehatan yang terpenuhi	45%	90%	90%	Dinas Kesehatan



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggungjawab
		2022	2024	2025	
4	Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	85%	90%	90%	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	65%	90%	90%	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	65%	90%	90%	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	65%	90%	90%	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	65%	90%	90%	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	65%	90%	90%	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	65%	90%	90%	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	65%	90%	90%	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	65%	90%	90%	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	65%	90%	90%	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	65%	90%	90%	Dinas Kesehatan



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2022	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	65%	90%	90%	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	65%	90%	90%	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	65%	90%	90%	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	65%	90%	90%	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	65%	90%	90%	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1	Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi	82,50%	90%	90%	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	50,09%	71,57%	73,57%	DPUTRPRKP
2	Cakupan Layanan Teknis Air Minum Dan Air Bersih	118,80%	74%	76%	DPUTRPRKP
3	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Persampahan	38%	85%	100%	DPUTRPRKP
4	Cakupan ketersediaan layanan air limbah	19,60%	60,50%	61,50%	DPUTRPRKP
5	Persentase Drainase Dan Gorong - Gorong Kabupaten Dalam Kondisi Baik	N/A	59%	65%	DPUTRPRKP
6	Persentase Sarana Pemerintahan Yang Terbangun	10,06%	57,10%	95,70%	DPUTRPRKP
7	Persentase Jalan Baru Yang Terbangun Presentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	74,58%	87,5 % 84,69 %	100% 95,40%	DPUTRPRKP
8	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	40,04%	45,04%	50,00%	DPUTRPRKP



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2022	2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Jumlah Rumah Korban Bencana yang ditangani	N/A	50 Rumah	50 Rumah	DPUTRPRKP
2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	N/A	25,89%	25,39%	DPUTRPRKP
3	persentase PSU yang ditingkatkan	N/A	12%	17%	DPUTRPRKP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Persentase capaian SPM trantibum	100%	100 % 58 %	100% 61%	Satpol PP
2	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	100%	100%	-	Satpol PP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Persentase Penanggulangan Bencana	94,23%	100%	100%	BPBD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1	Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	60% 80%	90 % 70 %	100% 80%	Dinsos PMD
2	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkat Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	10%	10%	10%	Dinsos PMD
3	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhannya sehingga mampu Bertahan Hidup Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	100% 8%	100 % 8 %	100%	Dinsos PMD



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggungjawab
		2022	2024	2025	
4	Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	100%	100%	100%	Dinsos PMD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Presentase penataan desa	N/A	60%	70%	Dinsos PMD
2	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	N/A	12%	20%	Dinsos PMD
3	Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	50%	60%	70%	Dinsos PMD
4	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	100%	100%	Dinsos PMD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
1	Persentase Dokumen RTK yang Diselesaikan	52,74%	80%	100%	Disnaker
2	Persentase Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja Meningkat	49,83%	70%	90%	Disnaker
3	Persentase Tenaga Kerja yang diserap	20,99%	70%	85%	Disnaker
4	Persentase Kasus Ketenagakerjaan pada Perusahaan Menurun	79,99%	90%	100%	Disnaker
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
1	Persentase Rencana Kawasan Transmigrasi baru	N/A	50%	100%	Disnaker
2	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibangun	N/A	1 Lokasi	1 Lokasi	Disnaker
3	Persentase Laju Kemandirian Transmigran	N/A	50%	70%	Disnaker
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Persentase kelembagaan PUG aktif	92,31%	94,62 %	96,15%	DKBP3A
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	11,27%	14,98 %	18,55%	
2	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	N/A	85%	90%	DKBP3A
3	Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)	20%	60%	100%	DKBP3A
4	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid	N/A	70%	80%	DKBP3A



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggungjawab
		2022	2024	2025	
5	Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak Persentase pemenuhan kelompok hak anak	Madya (600-700) Nilai	Madya (600-700) Nilai 100 %	Nindya (700-800) Nilai 100%	DKBP3A
6	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	N/A	14%	10%	DKBP3A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA) Validitas data keluarga beresiko stunting	100 % 100 %	100 % 100 %	100% 100%	DKBP3A
2	Prevalensi peserta KB aktif Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting	75,64% 75%	75,74 % 75 %	75,84% 75%	DKBP3A
3	Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan	76,02% 75%	78,02 % 75 %	80,02% 75%	DKBP3A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
1	Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10%	20%	30%	DLHK
2	Persentase Kualitas Air dan Udara yang memenuhi Baku Mutu	30,77%	29,50%	31,50%	DLHK
3	Persentase Tutupan Lahan yang dikelola	0,17%	0,80%	1,00%	DLHK
4	Persentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dibina	14,50%	47%	51%	DLHK
5	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan PPLH PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemda	72,73%	72%	70%	DLHK
6	Persentase MHA yang Terdaftar dan terdata	N/A	25%	35%	DLHK
7	Indeks Perilaku Peduli Lingkungan	N/A	36%	44%	DLHK
8	Persentase Penerapan Adiwiyata Di Lingkungan Pemerintah Daerah	N/A	20%	27%	DLHK
9	Persentase Kasus Yang Ditangani Pemda	N/A	70%	76,67%	DLHK



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggungjawab
		2022	2024	2025	
10	Cakupan layanan persampahan	31,01%	27,90%	31,60%	DLHK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	109,34%	100%	100%	Disdukcapil
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	123,66%	100%	100%	Disdukcapil
3	Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik	100%	100%	100%	Disdukcapil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
1	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	N/A	25 %	30%	Dinas Perhubungan
	Presentase Pelayanan Izin Trayek	N/A	15 %	20%	
	Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	N/A	10 %	20%	
	Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	48%	65 %	75%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Persentase tata kelola komunikasi publik	60%	65 %	0%	Diskominfo
	Persentase tata kelola layanan informasi publik		65 %	75%	
2	Tingkat kematangan tata kelola SPBE	3,1 Indeks	3,3 Indeks	3.5 Indeks	Diskominfo
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
1	Persentase publikasi data statistik sektoral	N/A	65%	75%	Diskominfo
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
1	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	20%	30%	40%	Diskominfo
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
1	Persentase Koperasi yang patuh	48,61%	51,35%	55,00%	Diskopdagin
2	Persentase Koperasi sehat dan cukup sehat	3,03%	60%	70%	Diskopdagin
3	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	7,78%	40%	50%	Diskopdagin
4	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	N/A	5%	5%	Diskopdagin
5	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	1,10%	0,1 %	15%	Diskopdagin
	Persentase pertumbuhan wirausaha baru		15 %		



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2022	Target 2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
1	Persentase Peningkatan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	N/A	1,40%	2,00%	Diskopdagin
2	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	25%	30,77%	38,46%	Diskopdagin
3	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	71,43%	72,22%	83,00%	Diskopdagin
4	Persentase peningkatan nilai ekspor	10%	15%	20%	Diskopdagin
5	Persentase UTP yang tertib ukur	51,28%	53,85%	56,41%	Diskopdagin
6	Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	1%	2%	3,00%	Diskopdagin
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
1	Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	36,83%	75%	100%	Diskopdagin
2	Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin	100%	100%	100%	Diskopdagin
3	Persentase Jumlah Data Informasi Industri Kabupaten Pangandaran yang diinformasikan	10%	30%	50%	Diskopdagin
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
1	Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor	4934 Investor	201 Investor	3000 Investor	DPMPTSP
2	Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi	N/A	10%	20 Kegiatan	DPMPTSP
3	Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	100%	85%	70 Nilai	DPMPTSP
4	Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & PMA Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	1781 Milyar Rupiah	428,71 Milyar Rupiah	20 Kegiatan 0 Kegiatan	DPMPTSP
5	Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	N/A	10%	10 Dokumen	DPMPTSP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,18 Indeks	19,61 Indeks	20,24 Indeks	Dispusip
2	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan	N/A	10%	10%	Dispusip
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggungjawab
		2022	2024	2025	
1	Nilai LAKE Kabupaten/Kota	3930 Nilai	(A) 3353 Nilai	(AA) 4180 Nilai	Dispusip
2	Persentase LAKE Kabupaten/Kota	N/A	80,22%	100%	Dispusip
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
1	Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	N/A	8%	8%	DKPKP
2	Angka Kecukupan Energi Angka Kecukupan Protein	2100 Angka 57 Angka	2100 Angka 57 Angka	2100 Angka 57 Angka	DKPKP
3	Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)	6,45%	3%	1%	DKPKP
4	Persentase pangan segar aman	N/A	65%	75%	DKPKP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	-0,21%	0,30%	0,30%	DKPKP
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	-0,09%	0,20%	0,20%	DKPKP
3	Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan	N/A	5%	5%	DKPKP
4	Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan	10%	90%	90%	DKPKP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
1	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	33,33%	16%	20%	Disparbud
2	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	3,85%	9%	13%	Disparbud
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
1	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	100%	14%	18%	Disparbud
2	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan	25%	35%	45%	Disparbud
3	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi	5,88%	14%	18%	Disparbud
4	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi keratif yang berdaya saing	2,28%	25%	35%	Disparbud
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggungjawab
		2022	2024	2025	
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura	110,14%	1,5 %	2,0%	Dinas Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	74,01%	3 %	3%	
	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	15,17%	1,6 %	2,3%	
	Indeks Pertanaman	208 Indeks	200 Indeks	200 Indeks	
2	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	12,70%	1,50%	2%	Dinas Pertanian
3	Persentase Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan Yang ASUH & Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	N/A	10%	10%	Dinas Pertanian
4	Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	N/A	70%	75%	Dinas Pertanian
5	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	N/A	100%	100%	Dinas Pertanian
6	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	6,26%	10%	10%	Dinas Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
1	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Diselesaikan	6,02%	100%	100%	Sekretariat Daerah
2	Persentase Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan	N/A	100%	100%	Sekretariat Daerah
3	Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	96%	100%	100%	Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DAERAH					
1	Persentase Pelayanan Administrasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	47,77%	90 %	90%	Sekretariat Daerah
	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan Kerjasama yang dirumuskan		90 %	95%	
	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diharmonisasi		92 %	0%	
2	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Pengendalian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	54,15%	100 %	100%	Sekretariat Daerah
	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		90 %	90%	
	Persentase Penyusunan Program, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian Pembangunan Fisik dan Keuangan Sesuai Target		94 %	95%	



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2022	2024	Target 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
SEKRETARIAT DPRD					
1	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik	56,75%	66%	73%	Sekretariat DPRD
PERENCANAAN					
1	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	100% 73%	100 % 60 %	100% 62%	Bappeda
2	Prosentase perangkat daerah yang memiliki keselarasan program RPJMD dan RKPD Prosentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran	83,33% 86,96%	96 % 100 %	98% 100%	Bappeda
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1	Persentase Hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	60%	50%	60%	Bappeda
KEUANGAN					
1	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan	92% 100%	100 % 100 %	100% 100%	BKAD
2	Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100%	BKAD
KEUANGAN					
1	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	N/A	100 % 100 % 100 %	100% 100% 100%	Bapenda
KEPEGAWAIAN					
1	Persentase kegiatan layanan kepegawaian ASN yang terlaksana	100%	100%	100%	BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2022	Target 2024	2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Persentase Aparatur Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia	66%	89%	100%	BKPSDM
INSPEKTORAT DAERAH					
1	Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	58,57 Nilai 3,12% Nilai	72,25 Nilai 3,15 Nilai	-	Inspektorat
2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	67,71 Nilai 4 Unit Kerja	72,00 Nilai 4 Unit Kerja	-	Inspektorat
KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	Kec. Parigi
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	Kec. Parigi
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100%	100%	100%	Kec. Parigi
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	Kec. Parigi
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	Kec. Parigi
KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	Kec. Cijulang
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	Kec. Cijulang
3	Persentase KoordinasiKetentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	Kec. Cijulang
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	Kec. Cijulang
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	Kec. Cijulang
KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	Kec. Pangandaran



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggungjawab
		2022	2024	2025	
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	Kec. Pangandaran
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100%	100%	100%	Kec. Pangandaran
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	Kec. Pangandaran
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	Kec. Pangandaran
KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	Kec. Mangunjaya
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	Kec. Mangunjaya
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100%	100%	100%	Kec. Mangunjaya
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	Kec. Mangunjaya
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	Kec. Mangunjaya
KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	Kec. Padaherang
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	Kec. Padaherang
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100%	100%	100%	Kec. Padaherang
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	Kec. Padaherang
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	Kec. Padaherang
KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	Kec. Cigugur
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	Kec. Cigugur
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100%	100%	100%	Kec. Cigugur
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	Kec. Cigugur



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggungjawab
		2022	2024	2025	
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	Kec. Cigugur
KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	Kec. Sidamulih
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	Kec. Sidamulih
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100%	100%	100%	Kec. Sidamulih
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	Kec. Sidamulih
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	Kec. Sidamulih
KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	Kec. Langkaplancar
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	Kec. Langkaplancar
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100%	100%	100%	Kec. Langkaplancar
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	Kec. Langkaplancar
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	Kec. Langkaplancar
KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	Kec. Kalipucang
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	Kec. Kalipucang
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100%	100%	100%	Kec. Kalipucang
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	Kec. Kalipucang
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	Kec. Kalipucang
KECAMATAN					
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	Kec. Cimerak



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi	Target		Perangkat Daerah Penanggungjawab
		2022	2024	2025	
2	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	Kec. Cimerak
3	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100%	100%	100%	Kec. Cimerak
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	Kec. Cimerak
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	Kec. Cimerak
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1	Persentase Masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan	69%	73%	77%	Bakesbangpol
2	Persentase Masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri	61%	66%	70%	Bakesbangpol
3	Persentase Masyarakat yang memahami tentang pemberdayaan dan pengawasan ormas	61%	66%	70%	Bakesbangpol
4	Persentase masyarakat yang memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	75%	81%	87%	Bakesbangpol
5	Persentase pelaksanaan koordinasi kewaspadaan daerah	75%	80%	90%	Bakesbangpol

Sumber: SIPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2023

BAB VII

Penutup

RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pangandaran
2024

BAB VII

PENUTUP

Dengan tersusunya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2024, diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, selain itu RKPD juga dipergunakan sebagai pedoman:

- a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024;
- b. Penyusunan kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pangandaran Tahun 2024;
- c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2024;
- d. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- e. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkatan pemerintah.

RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 diharapkan mampu mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Pangandaran, yakni: **“Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah”**.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RKPD Kabupaten Pangandaran, apabila terjadi adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RKPD perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dokumen ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana.

BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN RKPD Kabupaten Pangandaran 2024



Pemerintah
Kabupaten Pangandaran



LAMPIRAN I

**Evaluasi Hasil
Terhadap RKPD
Kabupaten Pangandaran
Triwulan IV 2022**

LAMPIRAN I
EVALUASI HASIL TERHADAP RKPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
1	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA				2.580.734.222.016		368.570.835.685		444.836.426.449		397.558.143.467		89,37		766.128.979.152		29,69		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				2.423.719.039.149		365.918.168.462		437.391.941.837		389.064.011.217		88,95		754.982.179.679		31,15	Disdikpora	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	92,00	1.772.325.251.257	92,00	240.130.355.399	92,00	276.708.988.934	92,00	268.416.858.442	100,00	97,00	92,00	508.547.213.841	100,00	28,69	Disdikpora	
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	91,00	6.911.146.910	91,00	212.415.000	91,00	604.525.930	91,00	431.999.000	100,00	71,46	91,00	644.414.000	100,00	9,32	Disdikpora	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	36,00	2.533.795.410	2,00	63.785.000	6,00	42.770.000	2,00	36.900.000	33,33	86,28	4,00	100.685.000	11,11	3,97	Disdikpora	Di dalamnya terdapat honor untuk 2 orang operator perencanaan
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	50,00	80.000.000	-	-	10,00	8.000.000	5,00	5.848.000	50,00	73,10	5,00	5.848.000	10,00	7,31	Disdikpora	5 dokumen yang telah di capai telah memenuhi kebutuhan kinerja
7	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	50,00	80.000.000	-	-	10,00	4.999.930	4,00	3.273.000	40,00	65,46	4,00	3.273.000	8,00	4,09	Disdikpora	4 dokumen yang telah di capai telah memenuhi kebutuhan kinerja
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18,00	4.196.013.000	2,00	147.257.500	3,00	543.106.000	3,00	379.438.000	100,00	69,86	5,00	526.695.500	27,78	12,55	Disdikpora	
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6,00	21.338.500	3,00	1.372.500	1,00	5.650.000	1,00	6.540.000	100,00	115,75	4,00	7.912.500	66,67	37,08	Disdikpora	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												64,67	82,09						
Predikat Kinerja												(R)	(T)						
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Persen	100,00	1.583.436.856.121	100,00	218.366.880.244	100,00	242.759.527.985	100,00	248.217.376.552	100,00	102,25	100,00	466.584.256.796	100,00	29,47	Disdikpora	
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	16.584,00	1.582.673.256.121	2.492,00	218.325.780.244	2.692,00	242.698.110.985	2.692,00	248.171.772.552	100,00	102,26	5.184,00	466.497.552.796	31,26	29,48	Disdikpora	
12	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	25,00	136.900.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
13	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	18,00	454.200.000	5,00	41.100.000	3,00	42.000.000	2,00	31.800.000	66,67	75,71	7,00	72.900.000	38,89	16,05	Disdikpora	Di dalamnya terdapat honor untuk 2 orang operator keuangan
14	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanan Akuntansi SKPD	Kegiatan	15,00	78.000.000	-	-	3,00	4.700.000	1,00	4.700.000	33,33	100,00	1,00	4.700.000	6,67	6,03	Disdikpora	Ada efisiensi kegiatan yang tadinya 3 kegiatan menjadi 1 kegiatan
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	5,00	28.000.000	-	-	1,00	4.554.000	1,00	4.554.000	100,00	100,00	1,00	4.554.000	20,00	16,26	Disdikpora	
16	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	Dokumen	5,00	33.000.000	-	-	1,00	5.959.000	1,00	2.050.000	100,00	34,40	1,00	2.050.000	20,00	6,21	Disdikpora	
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	15,00	25.500.000	-	-	3,00	4.204.000	3,00	2.500.000	100,00	59,47	3,00	2.500.000	20,00	9,80	Disdikpora	
18	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5,00	8.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												83,33	78,64						
Predikat Kinerja												(T)	(T)						
19	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Jenis	1.932,00	2.859.400.000	322,00	256.800.000	322,00	313.361.018	322,00	256.114.720	100,00	81,73	644,00	512.914.720	33,33	17,94	Disdikpora	
20	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Dokumen	15,00	380.000.000	-	-	3,00	74.848.018	2,00	52.511.720	66,67	70,16	2,00	52.511.720	13,33	13,82	Disdikpora	Adanya efisiensi kegiatan
21	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	Kantor Dinas	5,00	463.400.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
22	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	70,00	55.000.000	-	-	12,00	7.964.000	12,00	1.403.000	100,00	17,62	12,00	1.403.000	17,14	2,55	Disdikpora	
23	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	5,00	11.000.000	-	-	1,00	1.174.000	1,00	800.000	100,00	68,14	1,00	800.000	20,00	7,27	Disdikpora	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
24	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	Laporan	220,00	15.000.000	-	-	12,00	1.375.000	12,00	1.000.000	100,00	72,73	12,00	1.000.000	5,45	6,67	Disdikpora	
25	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	36,00	1.805.000.000	12,00	256.800.000	1,00	228.000.000	1,00	200.400.000	100,00	87,89	13,00	457.200.000	36,11	25,33	Disdikpora	
26	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1.600,00	130.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												93,33	63,31						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
27	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	Persen	96,00	3.245.820.000	96,00	79.200.000	96,00	432.302.000	96,00	177.177.742	100,00	40,98	96,00	256.377.742	100,00	7,90	Disdikpora	
28	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	10,00	40.000.000	-	-	2,00	7.000.000	1,00	1.956.042	50,00	27,94	1,00	1.956.042	10,00	4,89	Disdikpora	1 unit yang telah di capai telah memenuhi kebutuhan kinerja
29	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	388,00	566.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
30	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	14,00	255.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
31	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	84,00	809.680.000	4,00	79.200.000	3,00	69.600.000	3,00	61.200.000	100,00	87,93	7,00	140.400.000	8,33	17,34	Disdikpora	
32	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	15,00	705.000.000	-	-	3,00	80.647.000	3,00	97.491.750	100,00	120,89	3,00	97.491.750	20,00	13,83	Disdikpora	
33	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Kegiatan Pegawai Pensiun yang dipulangkan	Pegawai	800,00	105.000.000	-	-	200,00	19.945.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas Dinas
34	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	500,00	235.140.000	-	-	100,00	45.836.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas Dinas
35	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	500,00	530.000.000	-	-	100,00	51.796.000	100,00	279.750	100,00	0,54	100,00	279.750	20,00	0,05	Disdikpora	
36	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	500,00	792.500.000	-	-	100,00	157.478.000	100,00	16.250.200	100,00	10,32	100,00	16.250.200	20,00	2,05	Disdikpora	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												64,29	35,37						
Predikat Kinerja												(R)	(SR)						
37	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	Persen	96,00	5.818.777.640	96,00	357.594.053	96,00	564.003.672	96,00	416.213.768	100,00	73,80	96,00	773.807.821	100,00	13,30	Disdikpora	
38	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	60,00	119.627.000	30,00	11.179.000	10,00	19.417.992	10,00	12.645.340	100,00	65,12	40,00	23.824.340	66,67	19,92	Disdikpora	
39	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	1.240.085.027	2,00	208.481.058	2,00	123.227.680	2,00	124.218.630	100,00	100,80	4,00	332.699.688	40,00	26,83	Disdikpora	
40	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20,00	164.824.292	1,00	24.213.331	4,00	23.160.000	4,00	10.636.057	100,00	45,92	5,00	34.849.388	25,00	21,14	Disdikpora	
41	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8,00	834.845.321	1,00	39.907.386	2,00	137.373.000	2,00	121.886.000	100,00	88,73	3,00	161.793.386	37,50	19,38	Disdikpora	
42	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	150,00	209.080.000	25,00	16.285.000	-	-	-	-			25,00	16.285.000	16,67	7,79	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
43	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Paket	25,00	14.875.000	-	-	1,00	2.585.000	1,00	2.580.000	100,00	99,81	1,00	2.580.000	4,00	17,34	Disdikpora	
44	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	5,00	64.000.000	-	-	1,00	12.190.000	1,00	24.331.000	100,00	199,60	1,00	24.331.000	20,00	38,02	Disdikpora	
45	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Laporan	2.250,00	2.576.641.000	25,00	51.128.278	375,00	228.650.000	154,00	119.916.741	41,07	52,45	179,00	171.045.019	7,96	6,64	Disdikpora	Adanya efisiensi kegiatan
46	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang dikelola	Dokumen	25,00	459.400.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
47	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5,00	135.400.000	1,00	6.400.000	1,00	17.400.000	-	-	-	-	1,00	6.400.000	20,00	4,73	Disdikpora	Tidak ada rekrutmen untuk operator web
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												80,13	81,55						
Predikat Kinerja												(T)	(T)						
48	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Persen	96,00	5.817.947.491	96,00	52.302.400	96,00	15.296.320.819	96,00	4.641.794.432	100,00	30,35	96,00	4.694.096.832	100,00	80,68	Disdikpora	
49	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	6,00	1.736.835.000	3,00	7.411.400	-	-	-	-			3,00	7.411.400	50,00	0,43	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
50	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang diadakan	Buah	1.015,00	907.750.000	-	-	-	-	-	28.145.250			-	28.145.250	-	3,10	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
51	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang diadakan	Buah	84,00	2.284.612.491	15,00	44.891.000	16,00	225.290.819	55,00	69.929.182	343,75	31,04	70,00	114.820.182	83,33	5,03	Disdikpora	Melebihi target kinerja karena membeli 1 jenis barang ada 50 buah
52	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	833.750.000	-	-	1,00	15.062.400.000	1,00	4.535.793.750	100,00	30,11	1,00	4.535.793.750	10,00	544,02	Disdikpora	
53	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	55.000.000	-	-	2,00	8.630.000	2,00	7.926.250	100,00	91,85	2,00	7.926.250	20,00	14,41	Disdikpora	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												181,25	51,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
54	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Persen	96,00	159.606.426.709	96,00	20.665.326.198	96,00	16.215.458.700	96,00	13.873.308.513	100,00	85,56	96,00	34.538.634.711	100,00	21,64	Disdikpora	
55	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5,00	88.750.000	-	-	1,00	15.750.000	1,00	4.679.750	100,00	29,71	1,00	4.679.750	20,00	5,27	Disdikpora	
56	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	18,00	152.164.516.709	4,00	19.917.669.738	3,00	15.232.870.000	3,00	13.290.332.913	100,00	87,25	7,00	33.208.002.651	38,89	21,82	Disdikpora	
57	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	10,00	221.960.000	2,00	15.063.545	2,00	7.788.700	2,00	7.778.350	100,00	99,87	4,00	22.841.895	40,00	10,29	Disdikpora	
58	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5,00	7.131.200.000	1,00	732.592.915	1,00	959.050.000	1,00	570.517.500	100,00	59,49	2,00	1.303.110.415	40,00	18,27	Disdikpora	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	69,08						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
59	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	Persen	96,00	4.628.876.386	96,00	139.837.504	96,00	523.488.810	96,00	402.873.715	100,00	76,96	96,00	542.711.219	100,00	11,72	Disdikpora	
60	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	204,00	592.103.386	3,00	82.305.887	34,00	91.486.580	28,00	89.347.061	82,35	97,66	31,00	171.652.948	15,20	28,99	Disdikpora	Jumlah unit kendaraan yang ada di Disdikpora sejumlah 32 unit
61	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	170,00	264.500.000	-	-	34,00	48.500.000	27,00	45.653.790	79,41	94,13	27,00	45.653.790	15,88	17,26	Disdikpora	Jumlah unit kendaraan yang ada di Disdikpora sejumlah 32 unit
62	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dikelola	Unit	40,00	26.000.000	-	-	8,00	4.746.000	3,00	4.500.000	37,50	94,82	3,00	4.500.000	7,50	17,31	Disdikpora	3 unit yang telah di capai telah memenuhi kebutuhan kinerja
63	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	Unit	120,00	272.810.000	20,00	29.022.000	20,00	69.250.000	-	-	-	-	20,00	29.022.000	16,67	10,64	Disdikpora	Kegiatan ini tidak tercover d DPA
64	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Buah	1.600,00	2.502.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
65	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	1.600,00	227.000.000	-	-	320,00	45.000.000	320,00	44.250.000	100,00	98,33	320,00	44.250.000	20,00	19,49	Disdikpora	
66	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	24,00	612.963.000	-	-	4,00	212.000.000	1,00	199.312.000	25,00	94,02	1,00	199.312.000	4,17	32,52	Disdikpora	1 unit yang telah di capai telah memenuhi kebutuhan kinerja
67	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Jenis	100,00	54.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
68	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Jenis	50,00	77.000.000	4,00	28.509.617	-	-	-	-	-	-	4,00	28.509.617	8,00	37,03	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
69	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas lokasi tanah yang dipelihara	ha	5,00	265.000.000	-	-	1,00	52.506.230	1,00	19.810.864	100,00	37,73	1,00	19.810.864	20,00	7,48	Disdikpora	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												60,61	73,81						
Predikat Kinerja												(R)	(S)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	70,39						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
70	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Layanan Pendidikan Non Formal Dan Informal	Persen	80,00	420.736.787.892	80,00	123.681.313.063	80,00	144.854.371.903	80,00	109.523.027.775	100,00	75,61	80,00	233.204.340.838	100,00	55,43	Disdikpora	
71		Persentase Pemenuhan Spm Pendidikan	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-				-	Disdikpora	
72		Persentase Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi	Persen	86,00		86,00		86,00		86,00		100,00	-				-	Disdikpora	
73		Persentase Pelaksanaan Sistem Pencapaian Mutu Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi	Persen	84,00		84,00		84,00		84,00		100,00	-				-	Disdikpora	
74		Persentase Penerapan Pendidikan Berbasis Pariwisata	Persen	86,00		86,00		86,00		86,00		100,00	-				-	Disdikpora	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
75		Persentase Tingkat Budi Pekerti Peserta Didik	Persen	84,00		84,00		84,00		84,00		100,00	-			-	Disdikpora		
76	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah satuan pendidikan SD yang dikelola	Sekolah	1.692,00	164.310.411.866	282,00	70.284.321.312	282,00	83.890.611.085	282,00	68.818.914.242	100,00	82,03	564,00	139.103.235.554	33,33	84,66	Disdikpora	
77	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruanagn Yang di Bangun	Ruang			-	-	1,00	170.000.000	1,00	168.662.500	100,00	99,21	1,00	168.662.500	-	-	Disdikpora	
78	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang di rehab	Ruang			2,00	153.345.065	2,00	804.379.314	2,00	799.460.214	100,00	99,39	4,00	952.805.279	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
79	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah bangunan perpustakaan sekolah	Ruang			-	-	6,00	1.020.000.000	6,00	1.014.767.700	100,00	99,49	6,00	1.014.767.700	-	-	Disdikpora	
80	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Bangunan/Sarana dan Prasarana Sekolah yang di Bangun	Ruang			1,00	203.896.956	1,00	446.864.400	1,00	967.114.784	100,00	216,42	2,00	1.171.011.740	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
81	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang di rehab	Satuan Pendidikan			170,00	13.172.635.359	282,00	11.665.938.957	282,00	11.518.195.557	100,00	98,73	452,00	24.690.830.916	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
82	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepsek yang di rehab	Ruang			5,00	317.649.622	8,00	720.859.551	8,00	716.876.551	100,00	99,45	13,00	1.034.526.173	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
83	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang di rehab	Ruang			6,00	237.063.884	3,00	460.187.841	3,00	457.908.541	100,00	99,50	9,00	694.972.425	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
84	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa SD	Paket			19,00	80.158.214	8,00	252.469.508	8,00	250.007.708	100,00	99,02	27,00	330.165.922	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
85	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah yang menerima perlengkapan alat bantu belajar	Sekolah			11,00	24.908.030.100	282,00	23.474.815.800	282,00	14.473.966.200	100,00	61,66	293,00	39.381.996.300	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
86	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	188.308,00	39.766.466.100	31.697,00	1.194.379.962	#####	1.600.000.000	31.137,00	1.212.346.000	100,00	75,77	62.834,00	2.406.725.962	33,37	6,05	Disdikpora	
87	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah yang memiliki Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket			14,00	585.000.000	10,00	5.016.370.464	10,00	7.006.850.264	100,00	139,68	24,00	7.591.850.264	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
88	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	1.420,00	1.229.481.668	-	34.123.200	284,00	110.000.000	284,00	191.206.000	100,00	173,82	284,00	225.329.200	20,00	18,33	Disdikpora	
89	Penyiapan dan Tidak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	1.420,00	1.935.462.000	-	-	284,00	74.999.950	284,00	65.190.000	100,00	86,92	284,00	65.190.000	20,00	3,37	Disdikpora	
90	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	11.250,00	63.761.214.822	-	20.450.000	2.250,00	4.418.867.950	2.160,00	1.514.251.000	96,00	34,27	2.160,00	1.534.701.000	19,20	2,41	Disdikpora	Target kinerja tidak tercapai karena ada 2 kegiatan yang tidak di laksanakan karena Disdikpora Pangandaran menjadi tuan rumah kegiatan FTBI Provinsi dan mepet ke batas waktu GU Nihil
91	Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	11.947,00	10.662.435.876	20,00	332.924.700	2.780,00	80.000.000	556,00	114.266.000	20,00	142,83	576,00	447.190.700	4,82	4,19	Disdikpora	Target kinerja tidak tercapai karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan mepet k batas waktu
92	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	2.070,00	46.380.351.400	284,00	725.573.310	284,00	5.118.088.050	284,00	815.150.000	100,00	15,93	568,00	1.540.723.310	27,44	3,32	Disdikpora	
93	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	1.420,00	575.000.000	284,00	28.319.090.940	284,00	28.076.769.300	284,00	27.532.695.223	100,00	98,06	568,00	55.851.786.163	40,00	9.713,35	Disdikpora	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
94	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang yang di bangun	Ruang			-	-	2,00	380.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Kode rekening kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar di aplikasi ebend tidak ada sehingga kegiatan tersebut di satukan dengan kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang ada di aplikasi SIPD
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												89,78	96,68						
Predikat Kinerja												(T)	(ST)						
95	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidikan SMP yang dikelola	Sekolah	318,00	172.387.805.130	53,00	43.338.825.351	53,00	41.754.082.865	53,00	36.698.926.680	100,00	87,89	106,00	80.037.752.031	33,33	46,43	Disdikpora	
96	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang bangun	Ruang	-	-	-	-	1,00	357.000.000	1,00	353.012.500	100,00	98,88	1,00	353.012.500	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
97	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Bangunan yang di Bangun	Ruang	-	-	-	-	1,00	157.500.000	1,00	155.492.000	100,00	98,73	1,00	155.492.000	-	-	Disdikpora	
98	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah bangunan perpustakaan sekolah	Ruang	-	-	-	-	2,00	694.000.000	2,00	684.222.700	100,00	98,59	2,00	684.222.700	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
99	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Yang di Bangunan	Ruang	-	-	-	-	2,00	800.000.000	2,00	787.850.000	100,00	98,48	2,00	787.850.000	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
100	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatn Sarana	Satuan Pendidikan	-	-	-	-	54,00	588.000.000	54,00	644.497.000	100,00	109,61	54,00	644.497.000	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
101	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang di rehab	Ruang	-	-	50,00	4.626.572.387	54,00	3.745.896.157	54,00	3.709.548.107	100,00	99,03	104,00	8.336.120.494	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
102	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Guru	Jumlah rehabilitasi ruang guru SMP	Ruang	-	-	11,00	1.704.280.843	1,00	977.211.433	1,00	973.931.433	100,00	99,66	12,00	2.678.212.276	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
103	Rehabilitasi Seding/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah rehabilitasi ruang perpustakaan SMP	Ruang	-	-	3,00	331.943.054	1,00	142.261.310	1,00	142.261.310	100,00	100,00	4,00	474.204.364	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
104	Rehabilitasi Seding/Berat Laboratorium	Jumlah laboratorium yang direhabilitasi	Ruang	-	-	13,00	2.406.433.241	10,00	1.864.124.745	10,00	1.858.458.445	100,00	99,70	23,00	4.264.891.686	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
105	Rehabilitasi Seding/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa SMP	Ruang	-	-	10,00	523.922.303	2,00	463.878.130	2,00	418.927.430	100,00	90,31	12,00	942.849.733	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
106	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan perlengkapan	Satuan Pendidikan	-	-	54,00	19.853.802.700	54,00	7.875.047.350	54,00	7.688.286.430	100,00	97,63	108,00	27.542.089.130	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
107	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Siswa yang mendapatkan SPM	Orang	69.910,00	25.500.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
108	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	67.725,00	36.485.000.000	-	-	#####	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Adanya efisiensi anggaran dan mengutamakan kegiatan yang prioritas
109	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	-	-	1,00	662.141.000	1,00	2.053.478.000	1,00	2.051.497.500	100,00	99,90	2,00	2.713.638.500	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
110	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	67.725,00	3.790.110.583	50,00	97.206.000	#####	149.999.970	13.545,00	69.969.000	100,00	46,65	13.595,00	167.175.000	20,07	4,41	Disdikpora	
111	Penyiapan dan Tidak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	270,00	706.440.250	24,00	13.803.000	54,00	50.000.000	54,00	28.512.000	100,00	57,02	78,00	42.315.000	28,89	5,99	Disdikpora	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
112	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Dididk	6.250,00	48.788.136.057	-	20.600.000	1.250,00	1.711.279.500	1.250,00	454.276.000	100,00	26,55	1.250,00	474.876.000	20,00	0,97	Disdikpora	
113	Pengembangan karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naisikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	4.769,00	8.545.084.040	-	-	779,00	241.739.000	383,00	60.945.000	49,17	25,21	383,00	60.945.000	8,03	0,71	Disdikpora	Adanya efisiensi anggaran dan mengutamakan kegiatan yang prioritas
114	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	270,00	34.969.588.200	37,00	245.912.000	54,00	2.341.828.250	54,00	1.096.370.000	100,00	46,82	91,00	1.342.282.000	33,70	3,84	Disdikpora	
115	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	270,00	13.603.446.000	53,00	12.852.208.823	54,00	16.970.530.700	54,00	15.054.789.505	100,00	88,71	107,00	27.906.998.328	39,63	205,15	Disdikpora	
116	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah ruang TU yang di rehab	Paket	-	-	-	-	1,00	421.152.720	1,00	417.059.720	100,00	99,03	1,00	417.059.720	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
117	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	umlah ruang kepala sekolah yang di rehab	Ruang	-	-	-	-	1,00	49.155.600	1,00	49.020.600	100,00	99,73	1,00	49.020.600	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena kegiatan tersebut merupakan DAK/BANPROV
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												92,82	80,01						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
118	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pendidikan PAUD yang dikelola	Lembaga	1.548,00	19.927.953.176	258,00	9.483.666.400	258,00	8.608.157.953	258,00	3.371.073.853	100,00	39,16	516,00	12.854.740.253	33,33	64,51	Disdikpora	
119	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Raug Kelas yang di bangun	Ruang	-	-	-	-	4,00	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Anggaran tidak tercover di DPA karena adanya refoocusing
120	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Bangunan yang di rehab	Ruang	-	-	-	-	5,00	194.753.953	5,00	194.753.953	100,00	100,00	5,00	194.753.953	-	-	Disdikpora	Kegiatan tidak ada di Renstra tetapi ada di RKPD karena anggaran kegiatan tersebut bersifat mendesak/urgent (bangunan sudah tidak layak/rusak berat)
121	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Gedung Yang di Pelihara	Satuan Pendidikan	-	-	-	-	75,00	15.000.000	75,00	15.000.000	100,00	100,00	75,00	15.000.000	-	-	Disdikpora	
122	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	40.375,00	12.291.865.000	-	6.954.666.400	8.075,00	1.051.204.000	8.075,00	581.719.900	100,00	55,34	8.075,00	7.536.386.300	20,00	61,31	Disdikpora	
123	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	6,00	1.194.785.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
124	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	375,00	410.795.250	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
125	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naisikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	275,00	4.060.545.726	-	-	55,00	75.000.000	55,00	75.000.000	100,00	100,00	55,00	75.000.000	20,00	1,85	Disdikpora	
126	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	1.300,00	1.419.962.200	50,00	2.529.000.000	260,00	7.242.200.000	260,00	2.504.600.000	100,00	34,58	310,00	5.033.600.000	23,85	354,49	Disdikpora	
127	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	5,00	550.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												83,33	64,99						
Predikat Kinerja												(T)	(R)						
128	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidikan non formal/kesetaraan yang dikelola	Lembaga	72,00	64.110.617.720	12,00	574.500.000	12,00	10.601.520.000	12,00	634.113.000	100,00	5,98	24,00	1.208.613.000	33,33	1,89	Disdikpora	
129	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang menerima biaya Pendidikan Gratis	Peserta	1.610,00	5.650.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
130	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Peserta Paket B dan Paket C	Peserta Didik	10.000,00	1.720.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
131	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	65,00	3.044.538.728	-	-	13,00	60.000.000	12,00	59.613.000	92,31	99,36	12,00	59.613.000	18,46	1,96	Disdikpora	Jumlah lembaga berkurang yang awalnya 13 lembaga menjadi 12 lembaga karena 1 lembaga tidak aktif dan sudah tidak tercatat di dapodik

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
132	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang	36.050,00	46.479.500.000	-	-	7.210,00	8.758.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Adanya refocusing anggaran
133	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1.565,00	3.064.308.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
134	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	65,00	3.602.270.870	3,00	574.500.000	13,00	1.783.020.000	13,00	574.500.000	100,00	32,22	16,00	1.149.000.000	24,62	31,90	Disdikpora	
135	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Satuan Pendidikan	1.300,00	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												64,10	43,86						
Predikat Kinerja												(R)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	53,77						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
136	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Standar Isi	Persen	58,00	9.815.000.000	-	-	50,00	136.981.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	
137	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	persentase dokumen kurikulum yang dibuat	Persen	58,00	5.000.000.000	-	-	50,00	115.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	
138	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	5,00	550.000.000	-	-	1,00	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
139	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	Dokumen	5,00	850.000.000	-	-	1,00	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	
140	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buah	5.000,00	2.550.000.000	-	-	1.000,00	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	
141	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang meningkatkan kompetensinya	Orang	500,00	1.050.000.000	-	-	100,00	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
142	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	persentase dokumen kurikulum yang dibuat	Persen	58,00	4.815.000.000	-	-	50,00	21.981.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
143	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	30,00	850.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
144	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	45,00	990.000.000	-	-	9,00	21.981.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
145	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia	Buku	50.740,00	2.975.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
146	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persen	60,00	218.317.000.000	52,00	2.106.500.000	52,00	15.591.600.000	52,00	10.805.675.000	100,00	69,30	52,00	12.912.175.000	86,67	5,91	Disdikpora	
147	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	persentase PTK berkompeten	Persen	50,00	218.317.000.000	-	2.106.500.000	50,00	15.591.600.000	50,00	10.805.675.000	100,00	69,30	25,00	12.912.175.000	50,00	5,91	Disdikpora	
148	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	235,00	218.317.000.000	-	2.106.500.000	47,00	15.591.600.000	47,00	10.805.675.000	100,00	69,30	47,00	12.912.175.000	20,00	5,91	Disdikpora	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	69,30						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	69,30						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
149	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	persentase Layanan Literasi Sswa	Persen	65,00	2.525.000.000	-	-	61,00	100.000.000	31,00	318.450.000	50,82	318,45	31,00	318.450.000	47,69	12,61	Disdikpora	Penyerapan anggaran melebihi target karena Kabupaten Pangandaran menjadi tuan rumah kegiatan FTBI Provinsi sehingga pada saat perubahan anggarannya di tambah
150	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan yang dilakukan	Persen	61,00	2.525.000.000	-	-	61,00	100.000.000	61,00	318.450.000	100,00	318,45	61,00	318.450.000	100,00	12,61	Disdikpora	Penyerapan anggaran melebihi target karena Kabupaten Pangandaran menjadi tuan rumah kegiatan FTBI Provinsi sehingga pada saat perubahan anggarannya di tambah
151	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah Cerita	Judul	25,00	1.050.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
152	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta Didik	500,00	1.050.000.000	-	-	100,00	100.000.000	100,00	318.450.000	100,00	318,45	100,00	318.450.000	20,00	30,33	Disdikpora	Penyerapan anggaran melebihi target karena Kabupaten Pangandaran menjadi tuan rumah kegiatan FTBI Provinsi sehingga pada saat perubahan anggarannya di tambah
153	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar	Dokumen	5,00	425.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	318,45						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	318,45						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												70,16	112,07						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(S)	(ST)						
154	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA				157.015.182.867		2.652.667.223		7.444.484.612		8.494.132.250		114,10		11.146.799.473		7,10	Disdikpora	
155	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	persentase pembinaan wirausaha muda dan Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan	Persen	80,00	102.992.219.155	80,00	1.202.667.223	80,00	4.566.656.415	80,00	2.308.431.000	100,00	50,55	80,00	3.511.098.223	100,00	3,41	Disdikpora	
156	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	persentase pembinaan wirausaha muda dan Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan	Persen	80,00	91.943.050.000	80,00	-	80,00	3.463.446.415	80,00	1.205.281.000	100,00	34,80	80,00	1.205.281.000	100,00	1,31	Disdikpora	
157	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	750,00	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
158	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Orang	160,00	82.764.300.000	-	-	32,00	2.856.962.500	32,00	600.000.000	100,00	21,00	32,00	600.000.000	20,00	0,72	Disdikpora	
159	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Dokumen	50,00	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
160	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	20,00	2.123.750.000	-	-	4,00	90.000.000	4,00	89.463.000	100,00	99,40	4,00	89.463.000	20,00	4,21	Disdikpora	
161	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang	300,00	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
162	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	750,00	4.955.000.000	-	-	150,00	516.483.915	150,00	515.818.000	100,00	99,87	150,00	515.818.000	20,00	10,41	Disdikpora	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	73,43						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
163	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase peserta yang mengikuti kegiatan	Persen	80,00	11.049.169.155	80,00	1.202.667.223	80,00	1.103.210.000	80,00	1.103.150.000	100,00	99,99	80,00	2.305.817.223	100,00	20,87	Disdikpora	
164	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	25,00	11.049.169.155	-	1.202.667.223	5,00	1.103.210.000	5,00	1.103.150.000	100,00	99,99	5,00	2.305.817.223	20,00	20,87	Disdikpora	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	99,99						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	67,40						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
165	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	persentase Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	Persen	80,00	53.422.963.712	80,00	1.450.000.000	80,00	2.877.828.197	80,00	6.185.701.250	100,00	214,94	80,00	7.635.701.250	100,00	14,29	Disdikpora	
166	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase peralatan yang disediakan	Persen	80,00	4.975.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
167	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	25,00	4.975.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
168	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah peserta yang mengikuti partisipasi dalam penyelenggaraan	Persen	80,00	20.027.963.712	80,00	100.000.000	80,00	2.245.912.112	80,00	1.981.214.000	100,00	88,21	80,00	2.081.214.000	100,00	10,39	Disdikpora	
169	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	35,00	5.340.000.000	-	-	7,00	336.600.112	7,00	97.700.000	100,00	29,03	7,00	97.700.000	20,00	1,83	Disdikpora	
170	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	2.000,00	14.687.963.712	2,00	100.000.000	400,00	1.909.312.000	400,00	1.883.514.000	100,00	98,65	402,00	1.983.514.000	20,10	13,50	Disdikpora	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	63,84						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
171	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	persentase juara yang diraih	Persen	80,00	11.020.000.000	-	-	80,00	56.916.085	80,00	129.487.250	100,00	227,51	80,00	129.487.250	100,00	1,18	Disdikpora	
172	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	20,00	4.200.000.000	-	-	4,00	56.916.085	4,00	54.487.250	100,00	95,73	4,00	54.487.250	20,00	1,30	Disdikpora	
173	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi KabKota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	24,00	995.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
174	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorol Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektorol Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkann	Dokumen	5,00	325.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
175	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang	30,00	5.500.000.000	-	-	-	-	-	75.000.000			-	75.000.000	-	1,36	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	95,73						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
176	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	persentase Organisasi yang di Bina	Persen	80,00	16.100.000.000	80,00	1.350.000.000	80,00	575.000.000	80,00	4.075.000.000	100,00	708,70	80,00	5.425.000.000	100,00	33,70	Disdikpora	
177	Standarisasi Organisasi Keolahragaan (Pembinaan Manajemen Olahraga)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Dokumen	5,00	650.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
178	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi yang di Bina	Organisasi	10,00	15.450.000.000	2,00	1.350.000.000	2,00	575.000.000	2,00	4.075.000.000	100,00	708,70	4,00	5.425.000.000	40,00	35,11	Disdikpora	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	708,70						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
179	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	persentase peserta yang mengikuti Festival Senam	Persen	80,00	1.300.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
180	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Festival Senam Jabar Juara)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	5,00	650.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
181	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Unit	5,00	650.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	341,47								
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)								
182	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	persentase Pemuda Yang aktif dalam Kepramukaan	Persen	80,00	600.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten		
183	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	persentase peserta yang mengikuti jambore	Orang	550,00	600.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten		
184	Partisipasi dan Kelikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	5,00	600.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdikpora	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-								
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-								
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												100,00	132,75								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(ST)								
1	DINAS KESEHATAN				2.787.732.061.745		251.363.446.329		406.139.647.972		206.904.971.696		50,94		458.268.418.025						
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.787.732.061.745		251.363.446.329		406.139.647.972		206.904.971.696		50,94		458.268.418.025						
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	90,00	1.041.097.296.164	90,00	53.545.182.194	90,00	193.921.283.400	85,00	69.037.500.965	94,44	35,60	175,00	122.582.683.159	194,44	11,77				
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100,00	1.272.384.000	100,00	52.584.000	100,00	928.583.000	100,00	890.442.900	100,00	95,89	100,00	1.549.450.396	100,00	121,78				
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24,00	1.272.384.000	4,00	52.584.000	4,00	928.583.000	6,00	890.442.900	150,00	95,89	10,00	943.026.900	41,67	74,11	Dinas Kesehatan			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												150,00	95,89								
Predikat kinerja												(ST)	(ST)								
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	454.047.276.821	100,00	48.400.082.035	100,00	55.268.205.479	100,00	60.997.386.663	100,00	110,37	200,00	91.040.737.801	200,00	20,05				
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	6.782,00	450.121.276.821	1.050,00	47.859.182.035	1.050,00	54.722.205.479	1.050,00	60.559.686.663	100,00	110,67	2.100,00	108.418.868.698	30,96	24,09	Dinas Kesehatan			
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6,00	3.926.000.000	1,00	540.900.000	1,00	546.000.000	1,00	437.700.000	100,00	80,16	2,00	978.600.000	33,33	24,93	Dinas Kesehatan			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	95,42								
Predikat kinerja												(ST)	(ST)								
9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100,00	3.947.000.000	100,00	566.400.000	100,00	637.850.000	90,00	513.249.250	90,00	80,47	190,00	853.398.580	-	21,62				
10	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				-	1,00	72.550.000	1,00	57.099.250	100,00	78,70	1,00	57.099.250	-	-				
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6,00	3.947.000.000	1,00	566.400.000	1,00	565.300.000	1,00	456.150.000	100,00	80,69	2,00	1.022.550.000	33,33	25,91	Dinas Kesehatan			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	79,70								
Predikat kinerja												(ST)	(T)								
12	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100,00	183.500.000	100,00	21.000.000		-	-	-			100,00	-	100,00	-				
13	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	6,00	183.500.000	1,00	21.000.000		-	-	-			1,00	21.000.000	16,67	11,44	Dinas Kesehatan			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-								
Predikat kinerja												(SR)	(SR)								
14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	3.035.400.000	100,00	348.000.000	100,00	2.064.780.000	90,00	1.121.319.940	90,00	54,31	190,00	2.131.239.934	190,00	70,21				
15	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	6,00	3.035.400.000	1,00	348.000.000	1,00	348.000.000	1,00	306.000.000	100,00	87,93	2,00	654.000.000	33,33	21,55	Dinas Kesehatan			
16	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen				-	1,00	204.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan			
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang				-	700,00	1.511.830.000	700,00	815.319.940	100,00	53,93	700,00	815.319.940	-	-	Dinas Kesehatan			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												66,67	47,29								
Predikat kinerja												(SR)	(SR)								
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah	%	100,00	3.724.364.950	100,00	255.161.657	100,00	585.000.000	100,00	395.018.755	100,00	67,52	100,00	558.087.705	100,00	14,98				

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja			%
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	257.460.850													Rasionalisasi Anggaran	
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6,00	75.000.000													Rasionalisasi Anggaran	
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	1.114.586.900	1,00	114.586.900	1,00	350.000.000	1,00	148.907.653	100,00	42,55	2,00	263.494.553	33,33	23,64	Dinas Kesehatan	
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	293.752.200	2,00	36.940.200	2,00	61.000.000	2,00	29.873.500	100,00	48,97	4,00	66.813.700	33,33	22,74	Dinas Kesehatan	
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6,00	90.000.000	1,00	13.660.000	1,00	24.000.000	1,00	12.400.000	100,00	51,67	2,00	26.060.000	33,33	28,96	Dinas Kesehatan	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6,00	1.893.565.000	1,00	89.974.557	1,00	150.000.000	1,00	203.837.602	100,00	135,89	2,00	293.812.159	33,33	15,52	Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	69,77						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
25	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90,00	51.786.540.000	90,00	9.990.000	90,00	2.060.811.266	90,00	573.454.900	100,00	27,83	90,00	1.053.327.328	100,00	2,03		
26	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	88,00	12.440.000.000													Rasionalisasi Anggaran	
27	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	80,00	4.500.000.000													Rasionalisasi Anggaran	
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	111,00	8.204.500.000	1,00	4.500.000	32,00	274.480.000	20,00	241.137.150	62,50	87,85	21,00	245.637.150	18,92	2,99	Dinas Kesehatan	
29	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4,00	24.000.000.000			1,00	239.050.000	1,00	238.735.250	100,00	99,87	1,00	238.735.250	25,00	0,99	Dinas Kesehatan	
30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	2.042.040.000			1,00	1.248.148.766	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15,00	600.000.000	1,00	5.490.000	1,00	299.132.500	1,00	93.582.500	100,00	31,28	2,00	99.072.500	13,33	16,51	Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												65,63	54,75						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
32	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90,00	20.503.142.960	90,00	3.009.197.135	90,00	4.463.868.701	100,00	4.070.423.959	111,11	91,19	95,00	5.879.944.499	105,56	28,68		
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6,00	65.551.000	1,00	4.500.000	1,00	10.000.000	1,00	9.500.000	100,00	95,00	2,00	14.000.000	33,33	21,36	Dinas Kesehatan	
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6,00	5.698.324.104	1,00	794.217.135	1,00	2.200.846.740	1,00	2.136.200.959	100,00	97,06	2,00	2.930.418.094	33,33	51,43	Dinas Kesehatan	
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6,00	14.739.267.856	1,00	2.210.480.000	1,00	2.253.021.961	1,00	1.924.723.000	100,00	85,43	2,00	4.135.203.000	33,33	28,06	Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	92,50						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
36	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90,00	7.204.664.740	90,00	882.767.367	90,00	508.188.700	90,00	476.204.598	100,00	93,71	180,00	649.465.190	200,00	9,01		
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	600,00	1.928.280.982	5,00	189.503.336	5,00	175.000.700	5,00	161.164.598	100,00	92,09	10,00	350.667.934	1,67	18,19	Dinas Kesehatan	
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	402,00	456.781.275	10,00	45.844.000	10,00	50.250.000	10,00	45.636.000	100,00	90,82	20,00	91.480.000	4,98	20,03	Dinas Kesehatan	
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	29,00	4.819.602.483	1,00	647.420.031	1,00	282.938.000	1,00	269.404.000	100,00	95,22	2,00	916.824.031	6,90	19,02	Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	92,71						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
40	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	%	100,00	495.393.022.694			100,00	127.403.996.254	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-		
41	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	80,00	495.393.022.694			16,00	127.403.996.254	16,00	89.743.557.433	100,00	70,44	16,00	89.743.557.433	20,00	18,12	Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	70,44						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												99,01	69,03						
Predikat kinerja												(ST)	(S)						
42	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi	%	90,00	1.596.903.179.911	90,00	168.675.122.936	90,00	202.037.099.579	165,00	135.455.675.991	183,33	67,04	127,50	232.802.399.652	141,67	14,58		

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
43	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%	90,00	866.782.929.113	90,00	101.455.274.005	90,00	63.335.107.219	90,00	53.815.077.744	100,00	84,97	90,00	95.136.416.991	100,00	10,98		
44	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	30,00	56.889.041.650	2,00	5.740.549.030	1,00	80.228.500	1,00	80.228.500	100,00	100,00	3,00	5.820.777.530	10,00	10,23	Dinas Kesehatan	
45	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	28,00	113.962.440.000	1,00	3.943.019.264		-									Dinas Kesehatan	Rasionalisasi Anggaran
46	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	70,00	21.150.000.000				-									Dinas Kesehatan	Rasionalisasi Anggaran
47	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	6,00	52.578.177.313	1,00	6.517.401.350	1,00	81.994.000	1,00	81.994.000	100,00	100,00	2,00	6.599.395.350	33,33	12,55	Dinas Kesehatan	
48	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	15,00	8.500.000.000				-									Dinas Kesehatan	
49	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	20,00	10.800.000.000				-									Dinas Kesehatan	
50	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	18,00	4.515.730.000	2,00	179.567.000		-									Dinas Kesehatan	
51	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	150,00	30.142.758.286	20,00	5.752.740.400	34,00	1.775.084.536	32,00	1.100.931.928	94,12	62,02	52,00	6.853.672.328	34,67	22,74	Dinas Kesehatan	
52	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	30,00	36.545.410.882	15,00	11.096.772.473	3,00	3.273.166.247	3,00	2.078.512.856	100,00	63,50	18,00	13.175.285.329	60,00	36,05	Dinas Kesehatan	
53	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	294,00	294.789.371.738	35,00	44.428.819.924	35,00	38.397.287.682	35,00	30.961.705.703	100,00	80,64	70,00	75.390.525.627	23,81	25,57	Dinas Kesehatan	
54	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit	5,00	1.027.300.000													Dinas Kesehatan	Rasionalisasi Anggaran
55	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	6,00	90.861.488.039	120,00	13.153.945.794	120,00	8.545.539.508	120,00	8.116.904.415	100,00	94,98	240,00	21.270.850.209	4.000,00	23,41	Dinas Kesehatan	
56	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	6,00	143.828.364.205	250,00	10.563.923.770	250,00	10.768.459.746	240,00	11.006.127.668	96,00	102,21	490,00	21.570.051.438	8.166,67	15,00	Dinas Kesehatan	
57	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	90,00	1.192.847.000	15,00	78.535.000	15,00	176.739.000	15,00	166.495.300	100,00	94,20	30,00	245.030.300	33,33	20,54	Dinas Kesehatan	
58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga					200,00	236.608.000	200,00	222.177.374	100,00	93,90	200,00	222.177.374	-	-	Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												98,90	87,94						
Predikat kinerja												(ST)	(T)						
59	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	90,00	719.489.341.943	90,00	66.799.624.051	90,00	138.553.958.360	90,00	81.628.497.247	100,00	58,91	180,00	148.428.121.298	200,00	20,63	Dinas Kesehatan	
60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	35.114,00	2.126.964.478	6.244,00	237.759.100	6.244,00	1.879.075.518	6.130,00	1.711.038.968	98,17	91,06	12.374,00	1.948.798.068	35,24	91,62	Dinas Kesehatan	
61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	33.515,00	13.500.720.950	5.960,00	655.099.350	5.960,00	1.051.715.000	5.869,00	298.316.750	98,47	28,36	11.829,00	953.416.100	35,29	7,06	Dinas Kesehatan	
62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	36.281,00	1.520.235.000	624,00	38.836.500	5.676,00	320.171.450	5.595,00	297.171.450	98,57	92,82	6.219,00	336.007.950	17,14	22,10	Dinas Kesehatan	
63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	149.549,00	7.883.352.900	2.820,00	1.034.361.250	22.638,00	4.700.000	22.638,00	4.700.000	100,00	100,00	25.458,00	1.039.061.250	17,02	13,18	Dinas Kesehatan	
64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	333.047,00	2.820.310.060	35.025,00	258.294.700	83.426,00	131.539.478	81.121,00	113.746.478	97,24	86,47	372.041.178	34,87	13,19	Dinas Kesehatan		
65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	#####	736.618.469			200,00	45.023.654	190,00	33.098.200	95,00	73,51	190,00	33.098.200	0,01	4,49	Dinas Kesehatan	
66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	462.858,00	1.140.286.915	87.152,00	120.762.600	87.152,00	202.230.000	86.984,00	184.109.500	99,81	91,04	#####	184.109.500	37,62	16,15	Dinas Kesehatan	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja			%
67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	582.238,00	500.000.000				-								Dinas Kesehatan	Rasionalisasi Anggaran	
68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	20.720,00	500.000.000				-								Dinas Kesehatan	Rasionalisasi Anggaran	
69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	3.325,00	630.081.600	170,00	17.283.600	450,00	158.000.000	450,00	46.299.500	100,00	29,30	620,00	46.299.500	18,65	7,35	Dinas Kesehatan	
70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	23.513,00	634.738.000	161,00	21.060.000		-								Dinas Kesehatan	Rasionalisasi Anggaran	
71	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	38.009,00	618.279.000	60,00	7.360.000		-								Dinas Kesehatan	Rasionalisasi Anggaran	
72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	6,00	33.901.540.429	1,00	2.112.203.200	1,00	1.950.045.000	1,00	615.879.450	100,00	31,58	2,00	615.879.450	33,33	1,82	Dinas Kesehatan	
73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	6,00	1.335.969.000	1,00	70.795.000										Dinas Kesehatan		
74	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	31,00	6.178.315.460	4,00	639.303.850	4,00	3.539.328.100	4,00	3.128.537.843	100,00	88,39	8,00	3.767.841.693	25,81	60,98	Dinas Kesehatan	
75	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	6,00	1.323.251.500	1,00	86.086.000		-								Dinas Kesehatan		
76	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	42,00	6.604.109.650	7,00	281.661.410	7,00	1.248.030.000	7,00	1.027.388.931	100,00	82,32	14,00	1.309.050.341	33,33	19,82	Dinas Kesehatan	
77	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	112,00	2.648.552.200	25,00	565.659.200	25,00	1.511.382.500	24,00	1.411.355.400	96,00	93,38	49,00	1.977.014.600	43,75	74,65	Dinas Kesehatan	
78	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	104,00	1.199.698.500				-								Dinas Kesehatan	Rasionalisasi Anggaran	
79	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	6,00	3.474.422.150	1,00	186.084.000	1,00	296.615.000	1,00	228.896.783	100,00	77,17	2,00	414.980.783	33,33	11,94	Dinas Kesehatan	
80	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	450,00	2.151.306.000	75,00	12.123.000	75,00	330.692.500	69,00	270.799.000	92,00	81,89	144,00	282.922.000	32,00	13,15	Dinas Kesehatan	
81	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	30,00	2.275.285.000	5,00	137.712.000	5,00	153.184.000	5,00	227.661.000	100,00	148,62	10,00	365.373.000	33,33	16,06	Dinas Kesehatan	
82	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	333,00	2.136.785.000				-								Dinas Kesehatan	Rasionalisasi Anggaran	
83	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	110,00	5.515.292.948	9,00	512.662.200	9,00	2.677.907.800	9,00	2.370.057.917	100,00	88,50	18,00	2.882.720.117	16,36	52,27	Dinas Kesehatan	
84	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	6,00	401.011.490.704	1,00	41.151.916.479	1,00	100.707.959.241	1,00	49.698.729.249	100,00	49,35	2,00	90.850.645.728	33,33	22,66	Dinas Kesehatan	
85	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	6,00	61.351.000	1,00	225.000		-								Dinas Kesehatan	Rasionalisasi Anggaran	
86	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	6,00	1.053.032.802	20,00	140.734.072	20,00	250.000.000	19,00	246.916.162	95,00	98,77	39,00	387.650.234	650,00	36,81	Dinas Kesehatan	
87	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine	Unit					36,00	520.364.000	36,00	514.226.000	100,00	98,82	36,00	514.226.000	#DIV/0!	-	Dinas Kesehatan	
88	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	6,00	52.683.930.000	1,00	2.937.908.336	1,00	5.498.711.284	1,00	5.274.225.472	100,00	95,92	2,00	8.212.133.808	33,33	15,59	Dinas Kesehatan	
89	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	6,00	82.824.041.731	1,00	8.822.079.768	1,00	13.894.050.168	1,00	5.274.225.472	100,00	37,96	2,00	14.096.305.240	33,33	17,02	Dinas Kesehatan	
90	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	6,00	68.549.024.836	1,00	5.889.458.436	1,00	1.583.768.477	1,00	8.439.402.512	100,00	532,87	2,00	14.328.860.948	33,33	20,90	Dinas Kesehatan	
91	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	24,00	4.923.971.422			4,00	387.749.980	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
92	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	5,00	1.221.989.000												Dinas Kesehatan	Rasionalisasi Anggaran	
93	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	6,00	124.802.000	1,00	2.475.000										Dinas Kesehatan	Rasionalisasi Anggaran	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
94	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	96,00	5.679.593.240	20,00	859.720.000	32,00	211.715.210	32,00	211.715.210	100,00	100,00	52,00	1.071.435.210	54,17	18,86	Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												94,59	95,75						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
95	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	%	90,00	4.716.679.768		-		-										Rasionalisasi Anggaran
96	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	5,00	100.329.280				-									Dinas Kesehatan	
97	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	5,00	1.580.000.000				-									Dinas Kesehatan	
98	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Unit	100,00	3.036.350.488				-									Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
99	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	90,00	5.914.229.086	90,00	420.224.880	90,00	148.034.000	75,00	12.101.000	83,33	8,17	165,00	432.325.880	183,33	7,31		
100	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	240,00	1.721.020.000	1,00	96.800.000	1,00	27.500.000	-	-	-	-	1,00	96.800.000	0,42	5,62	Dinas Kesehatan	
101	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	200,00	280.780.500				-									Dinas Kesehatan	
102	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	24,00	3.614.108.586	15,00	323.424.880	4,00	120.534.000	4,00	12.101.000	100,00	10,04	19,00	335.525.880	79,17	9,28	Dinas Kesehatan	
103	Penyusunan dan Pelaksanaan Pelayan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	5,00	298.320.000				-									Dinas Kesehatan	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												50,00	5,02						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												94,44	50,69						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
104	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	%	90,00	130.837.863.269	90,00	27.302.094.078	90,00	9.735.428.993	65,00	1.949.378.995	72,22	20,02	155,00	29.251.473.073	172,22	22,36		
105	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	%	90,00	1.551.275.000		-		-	-	-			-	-	-	-		
106	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	750,00	1.241.020.000				-									Dinas Kesehatan	Rasionalisasi Anggaran
107	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	5,00	310.255.000				-									Dinas Kesehatan	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
108	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	%	90,00	127.209.420.179	90,00	27.226.134.078	90,00	9.509.990.993	90,00	1.810.294.995	100,00	19,04	180,00	29.036.429.073	200,00	22,83		
109	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	7.266,00	126.645.320.179	1.211,00	27.226.134.078	1.211,00	9.509.990.993	1.211,00	1.810.294.995	100,00	19,04	2.422,00	29.036.429.073	33,33	22,93	Dinas Kesehatan	
110	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	5,00	564.100.000				-									Dinas Kesehatan	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	19,04						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
111	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	90,00	2.077.168.090	90,00	75.960.000	90,00	225.438.000	90,00	139.084.000	100,00	61,70	180,00	215.044.000	200,00	10,35		
112	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	1.575,00	2.077.168.090	150,00	75.960.000	150,00	225.438.000	150,00	139.084.000	100,00	61,70	300,00	215.044.000	19,05	10,35	Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	61,70						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	40,37						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja			%		
113	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase farmasi, alat kesehatan yang terpenuhi	%	90,00	3.291.309.284	90,00	67.199.125	90,00	279.889.500	45,00	300.469.245	50,00	107,35	135,00	367.668.370	150,00	11,17				
114	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	%	667,00	799.674.259			80,00	38.951.000	90,00	38.950.000	112,50	100,00	90,00	38.950.000	13,49	4,87				
115	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	54,00	250.841.603					-								Dinas Kesehatan			
116	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	607,00	273.832.656			72,00	38.951.000	50,00	38.950.000	69,44	100,00					Dinas Kesehatan			
117	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	250,00	275.000.000					-								Dinas Kesehatan			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												69,44	100,00								
Predikat kinerja												(SR)	(SR)								
118	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	%	90,00	951.740.000	90,00	44.760.000	90,00	150.036.000	90,00	71.946.250	100,00	47,95	180,00	116.706.250	200,00	12,26				
119	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	Dokumen	861,00	951.740.000	500,00	44.760.000	8,00	150.036.000	8,00	71.946.250	100,00	47,95	508,00	116.706.250	59,00	12,26	Dinas Kesehatan			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	47,95								
Predikat kinerja												(SR)	(SR)								
120	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	%	90,00	492.751.025					-	90,00	71.946.250									
121	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	4,00	492.751.025					-	1,00	71.946.250						Dinas Kesehatan			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-								
Predikat kinerja												(SR)	(SR)								
122	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	%	90,00	250.000.000					-	90,00	71.946.250			90,00	71.946.250	100,00	28,78			
123	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	4,00	250.000.000					-	1,00	71.946.250						Dinas Kesehatan			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-								
Predikat kinerja												(SR)	(SR)								
124	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	%	90,00	797.144.000	90,00	22.439.125	90,00	90.902.500	90,00	45.680.495	100,00	50,25	180,00	68.119.620	200,00	8,55				
125	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	450,00	547.144.000	400,00	22.439.125	75,00	90.902.500	75,00	45.680.495	100,00	50,25	475,00	68.119.620	105,56	12,45	Dinas Kesehatan			
126	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dokumen	8,00	250.000.000					-								Dinas Kesehatan			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	50,25								
Predikat kinerja												(ST)	(R)								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												104,17	66,07								
Predikat kinerja												(ST)	(S)								
127	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat/keompok masyarakat di bidang kesehatan yang diberdayakan	%	90,00	15.602.413.117	90,00	1.773.847.996	90,00	165.946.500	85,00	161.946.500	94,44	97,59	175,00	1.935.794.496	194,44	12,41				
128	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	90,00	11.336.873.438	90,00	1.432.926.662	90,00	165.946.500	90,00	161.946.500	100,00	97,59	180,00	1.594.873.162	200,00	14,07				
129	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	6,00	11.336.873.438	1,00	1.432.926.662	1,00	165.946.500	1,00	161.946.500	100,00	97,59	2,00	1.594.873.162	33,33	14,07	Dinas Kesehatan			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	97,59								
Predikat kinerja												(ST)	(ST)								
130	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	90,00	956.133.307					-	-	-	-	-	-	-	-				

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja			%
131	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	6,00	956.133.307		-		-								Dinas Kesehatan		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
132	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	%	90,00	3.309.406.372	90,00	340.921.334		-		-			90,00	340.921.334	100,00	10,30		
133	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	6,00	3.309.406.372	1,00	340.921.334										Dinas Kesehatan		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	97,59						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												98,89	65,52						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												SR	SR						
1	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				1.445.186.535.212		318.069.873.363		428.626.396.563		201.417.255.867		46,99		519.487.129.230		35,95		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.371.227.704.076		318.029.873.363		428.504.176.563		201.383.085.867		47,00		519.412.959.230		37,88		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	80,00	68.233.502.075	7.243.199.156	8.537.524.903	80,00	6.854.954.496	80,00	100,00	100,00	80,29	80,00	14.098.153.652	100,00	20,66	DPUTRPRKP	
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	80,00				80,00		80,00		100,00				-	-		
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	80,00				80,00		-		-				-	-		
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	80,00				80,00		100,00		125,00				-	-		
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%	80,00	3.382.515.969	177.904.400	80,00	358.898.000	100,00	181.700.202	125,00	50,63	100,00	359.604.602	125,00	10,63	DPUTRPRKP		
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	21,00	3.301.969.133	14,00	177.904.400	4,00	235.898.000	6,00	169.807.411	150,00	71,98	20,00	347.711.811	95,24	10,53	DPUTRPRKP	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	24,00	80.546.836	4,00	-	4,00	123.000.000	4,00	11.892.791	100,00	9,67	8,00	11.892.791	33,33	14,77	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												125,00	40,83						
Predikat kinerja												(ST)	(SR)						
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	80,00	36.798.735.131		4.527.015.741	80,00	6.539.267.743	80,00	5.466.650.552	100,00	83,60	80,00	9.993.666.293	100,00	27,16	DPUTRPRKP	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyesuaian gaji dan tunjangan	Bulan	72,00	35.494.057.683	12,00	4.251.230.741	12,00	6.292.547.743	12,00	5.258.970.777	100,00	83,57	24,00	9.510.201.518	33,33	26,79	DPUTRPRKP	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	72,00	1.234.925.000	12,00	275.785.000	12,00	236.220.000	12,00	201.890.651	100,00	85,47	24,00	477.675.651	33,33	38,68	DPUTRPRKP	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6,00	34.351.224	1,00	-	1,00	5.000.000	1,00	2.540.990	100,00	50,82	2,00	2.540.990	33,33	7,40	DPUTRPRKP	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	35.401.224	6,00	-	2,00	5.500.000	2,00	3.248.134	100,00	59,06	8,00	3.248.134	66,67	9,18	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	69,73						
Predikat kinerja												(ST)	(S)						
12	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	80,00	388.241.945		6.800.000	80,00	83.072.000	80,00	23.705.000	100,00	28,54	80,00	30.505.000	100,00	7,86	DPUTRPRKP	
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72,00	388.241.945	12,00	6.800.000	12,00	83.072.000	12,00	23.705.000	100,00	28,54	24,00	30.505.000	33,33	7,86	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	28,54						
Predikat kinerja												(ST)	(SR)						
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	80,00	6.232.062.303		523.449.990	80,00	398.400.000	80,00	395.880.365	100,00	99,37	80,00	919.330.355	100,00	14,75	DPUTRPRKP	
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	1.409.400.360	1,00	4.566.100	1,00	5.000.000	1,00	4.624.643	100,00	92,49	2,00	9.190.743	33,33	0,65	DPUTRPRKP	
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	1.617.311.437	1,00	117.277.076	1,00	150.000.000	1,00	135.232.000	100,00	90,15	2,00	252.509.076	33,33	15,61	DPUTRPRKP	
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00	408.850.000	1,00	-	1,00	26.000.000	1,00	62.158.722	100,00	239,07	2,00	62.158.722	33,33	15,20	DPUTRPRKP	
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6,00	846.750.506	1,00	110.940.000	1,00	46.000.000	1,00	22.465.000	100,00	48,84	2,00	133.405.000	33,33	15,75	DPUTRPRKP	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6,00	1.949.750.000	1,00	290.666.814	1,00	171.400.000	1,00	171.400.000	100,00	100,00	2,00	462.066.814	33,33	23,70	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	114,11						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	80,00	7.132.706.390		969.063.453	80,00	479.029.160	80,00	476.116.022	100,00	99,39	80,00	1.445.179.475	100,00	20,26	DPUTRPRKP	

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
21	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		1.527.238.830									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	125,00	2.741.467.560	10,00	408.061.768	25,00	229.029.160	70,00	226.338.222	280,00	98,83	80,00	634.399.990	64,00	23,14	DPUTRPRKP	Realisasi kinerja disesuaikan dengan kebutuhan
23	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18,00	2.864.000.000	3,00	561.001.685	3,00	250.000.000	3,00	249.777.800	100,00	99,91	6,00	810.779.485	33,33	28,31	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												190,00	99,37						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
24	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	98,00	653.707.962									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
25	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	398,00	210.787.962									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
26	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	442.920.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	80,00	10.417.358.757		778.490.782	80,00	514.508.000	56,30	379.444.862	70,37	73,75	56,30	1.157.935.644	70,37	11,12	DPUTRPRKP	
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72,00	2.174.114.625	12,00	-	12,00	10.000.000	12,00	10.000.000	100,00	100,00	24,00	10.000.000	33,33	0,46	DPUTRPRKP	
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72,00	3.966.000.000	12,00	472.302.626	12,00	160.000.000	12,00	104.164.177	100,00	65,10	24,00	576.466.803	33,33	14,54	DPUTRPRKP	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	204,00	4.277.244.132	9,00	306.188.156	30,00	344.508.000	14,00	265.280.685	46,67	77,00	23,00	571.468.841	11,27	13,36	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												82,22	80,70						
Predikat kinerja												(T)	(T)						
31	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	%	80,00	3.228.173.619		260.474.790	80,00	164.350.000	80,00	139.137.268	100,00	84,66	80,00	399.612.058	100,00	12,38	DPUTRPRKP	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	150,00	1.470.419.602	25,00	34.827.213	25,00	129.350.000	25,00	135.768.696	100,00	104,96	50,00	170.595.909	33,33	11,60	DPUTRPRKP	
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	72,00	1.757.754.017	12,00	225.647.577	12,00	35.000.000	12,00	3.368.572	100,00	9,62	24,00	229.016.149	33,33	13,03	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	57,29						
Predikat kinerja												(ST)	(R)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												95,77	78,51						
Predikat kinerja												(ST)	(T)						
34	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	69,57	149.255.491.224		27.525.475.000	69,57	65.576.244.000	50,09	39.210.906.709	72,00	59,79	50,09	66.736.381.709	72,00	44,71	DPUTRPRKP	
35	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah	Prosentase Wilayah sungai yang terlindungi	%	72,57	25.500.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		25.500.000.000						335.718.000			-	335.718.000	-	1,32	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di tw 4 digunakan untuk pembayaran hutang tahun 2021
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
37	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya	Persentase Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	69,57	123.755.491.224		27.525.475.000	69,57	65.576.244.000	69,57	39.210.906.709	100,00	59,79	69,57	66.736.381.709	100,00	53,93	DPUTRPRKP	
38	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	191,00	7.644.691.224	3,00	481.542.000	38,00	340.818.000	1,00	335.718.000	2,63	98,50	4,00	817.260.000	2,09	10,69	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di TW I digunakan untuk pembayaran hutang kegiatan di tahun 2021
39	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Bendung		7.500.000.000						-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
40	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukiman	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km				-	4,39	16.049.020.000	4,39	9.488.470.559	100,00	59,12	4,39	9.488.470.559	-	-	DPUTRPRKP	
41	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukiman	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km		9.200.000.000		-	5,97	5.772.650.000	5,97	4.600.406.000	100,00	79,69	5,97	4.600.406.000	-	50,00	DPUTRPRKP	
42	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	162,68	52.603.950.000	3,07	26.560.313.500	11,18	42.421.452.000	11,18	24.445.762.150	100,00	57,63	14,25	51.006.075.650	8,76	96,96	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di TW I digunakan untuk pembayaran hutang kegiatan di tahun 2021
43	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung		10.200.000.000						-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
44	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	34,84	20.006.850.000	0,39	483.619.500	6,97	992.304.000	-	340.550.000	-	34,32	0,39	824.169.500	1,13	4,12	DPUTRPRKP	
45	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung		6.000.000.000						-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
46	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir yang Terbangun	%		10.600.000.000						-			-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												60,53	65,85						
Predikat kinerja												(R)	(S)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	59,79						
Predikat kinerja												(ST)	(R)						
47	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Layanan Teknis Air Minum Dan Air Bersih	%	72,00	19.702.466.982		5.555.157.400	72,00	3.248.860.080	118,80	2.098.363.790	165,00	64,59	118,80	7.653.521.190	165,00	38,85	DPUTRPRKP	
48	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Terlayani akses Air Minum	%	72,00	19.702.466.982		5.555.157.400	72,00	3.248.860.080	118,80	2.098.363.790	165,00	64,59	118,80	7.653.521.190	165,00	38,85	DPUTRPRKP	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
49	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	2.130,00	11.536.000.000	100,00	5.555.157.400	200,00	3.248.860.080	330,00	2.098.363.790	165,00	64,59	430,00	7.653.521.190	20,19	66,34	DPUTRPRKP	Realisasi kinerja baru dapat dihitung di TW 4
50	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen		3.150.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
51	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/Detik		3.050.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
52	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	325,00	1.966.466.982									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												165,00	64,59						
Predikat kinerja												(ST)	(R)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												165,00	64,59						
Predikat kinerja												(ST)	(R)						
53	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Persampahan	%	38,00	10.299.880.189		-	38,00	699.827.900	38,00	44.707.900	100,00	6,39	38,00	44.707.900	100,00	0,43	DPUTRPRKP	
54	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terbangunnya sarana persampahan	%	38,00	10.299.880.189		-	38,00	699.827.900	38,00	44.707.900	100,00	6,39	38,00	44.707.900	100,00	0,43	DPUTRPRKP	
55	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga	29,00	10.299.880.189		-	1,00	699.827.900	1,00	44.707.900	100,00	6,39	1,00	44.707.900	3,45	0,43	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	6,39						
Predikat kinerja												(ST)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	6,39						
Predikat kinerja												(ST)	(SR)						
56	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan ketersediaan layanan air limbah	%	56,00	14.012.373.586		2.463.071.000	56,00	2.304.731.500	19,60	1.715.673.500	35,00	74,44	19,60	4.178.744.500	35,00	29,82	DPUTRPRKP	
57	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengguna sanitasi aman	%	56,00	14.012.373.586		2.463.071.000	56,00	2.304.731.500	19,60	1.715.673.500	35,00	74,44	19,60	4.178.744.500	35,00	29,82	DPUTRPRKP	
58	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	3,00	279.200.000	2,00	2.463.071.000	-	2.304.731.500	24,00	1.715.673.500	-	74,44	26,00	4.178.744.500	866,67	1.496,68	DPUTRPRKP	Kegiatan yang bersumber dana dari DAK
59	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		4.808.173.586									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
60	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga		8.925.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
61	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M2/Hari		-									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	74,44						
Predikat kinerja												(SR)	(S)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												35,00	74,44						
Predikat kinerja												(SR)	(S)						
62	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dan Gorong - Gorong Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	53,00	41.705.198.147		911.643.000	53,00	3.748.784.300	-	974.167.000	-	25,99	-	1.885.810.000	-	4,52	DPUTRPRKP	Capaian kinerja masih dalam proses perhitungan/pengerjaan
63	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah	Persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi baik	%	53,00	41.705.198.147		911.643.000	53,00	3.748.784.300	-	974.167.000	-	25,99	-	1.885.810.000	-	4,52	DPUTRPRKP	Capaian kinerja masih dalam proses perhitungan/pengerjaan
64	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	6,00	10.299.880.189		-	10,00	1.400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUTRPRKP	Refokusing Anggaran
65	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dokumen	5,00	31.405.317.958	1,00	911.643.000	1,00		-	974.167.000			1,00	1.885.810.000	20,00	6,00	DPUTRPRKP	Penyerapan anggaran di TW I digunakan untuk pembayaran utang kegiatan di tahun 2021
66	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	m						2.348.784.300	129,85	217.093.000	-	9,24	129,85	217.093.000	-	-	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	4,62						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	25,99						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
67	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Infrastruktur Kawasan Permukiman Dalam Kondisi Baik	%	56,00	40.466.466.983		62.549.663.250	56,00	73.875.289.250	56,00	22.412.957.650	100,00	30,34	56,00	84.962.620.900	100,00	209,96	DPUTRPRKP	
68	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	56,00	40.466.466.983		62.549.663.250	56,00	73.875.289.250	56,00	22.412.957.650	100,00	30,34	56,00	84.962.620.900	100,00	209,96	DPUTRPRKP	
69	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	44.500,00	32.766.466.983	8.000,00	62.549.663.250	3.000,00	73.875.289.250	3.000,00	22.412.957.650	100,00	30,34	11.000,00	84.962.620.900	24,72	259,30	DPUTRPRKP	
70	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan		7.700.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	30,34						
Predikat kinerja												(ST)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	30,34						
Predikat kinerja												(ST)	(SR)						
71	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Sarana Pemerintahan Yang Terbangun	%	28,50	725.577.190.184		12.148.420.921	28,50	32.275.184.531	10,06	17.064.753.531	35,29	52,87	10,06	29.213.174.452	35,29	4,03	DPUTRPRKP	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
72	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Persentase jumlah gedung kantor yang dibangun di pusat pemerintahan	%	28,50	725.577.190.184	12.148.420.921	28,50	32.275.184.531	10,06	17.064.753.531	35,29	52,87	10,06	29.213.174.452	35,29	4,03		DPUTRPRKP	
73	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	15,00	3.600.000.000	15,00	70.132.000	15,00	800.000.000	1,00	201.335.000	6,67	25,17	16,00	271.467.000	106,67	7,54	DPUTRPRKP	
74	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	35,00	721.977.190.184	5,00	12.078.288.921	15,00	31.475.184.531	34,00	16.863.418.531	226,67	53,58	39,00	28.941.707.452	111,43	4,01	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												116,67	39,37						
Predikat kinerja												(ST)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												35,29	52,87						
Predikat kinerja												(SR)	(R)						
75	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penerapan Arsitektur Kawasan Khas Pangandaran Pada Bangunan Pemerintah			6.866.586.794									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
76	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung kantor yang menerapkan arsitektur khas pangandaran			6.866.586.794									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
77	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/kota yang Disusun	Dokumen		1.954.010.736									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
78	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		4.912.576.058									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
79	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	%	78,50	289.229.207.213	197.722.081.786	78,50	236.326.568.249	74,58	109.128.558.441	95,00	46,18	74,58	306.850.640.227	95,00	106,09		DPUTRPRKP	
80	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jalan penghubung antar wilayah yang terbangun	%	36,30	289.229.207.213	197.722.081.786		236.326.568.249	74,58	109.128.558.441	-	46,18	74,58	306.850.640.227	205,44	106,09		DPUTRPRKP	
81	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advdis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	60,00	5.408.456.282	20,00	1.764.788.500	3,00	2.310.999.500	-	464.707.500	-	20,11	20,00	2.229.496.000	33,33	41,22	DPUTRPRKP	
82	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	KM	91,00	112.928.856.030	10,00	63.859.559.357	11,58	127.988.009.198	11,58	52.145.017.065	100,00	40,74	21,58	116.004.576.422	23,71	102,72	DPUTRPRKP	
83	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km	22,50	54.039.600.000	15,00	125.743.804.929	24,37	72.099.078.888	24,45	40.749.503.988	100,31	56,52	39,45	166.493.308.917	175,31	308,10	DPUTRPRKP	
84	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	0,50	6.608.500.800	1,00	4.363.150.000		12.823.347.763	10,07	1.389.413.863	-	10,84	11,07	5.752.563.863	2.213,80	87,05	DPUTRPRKP	
85	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	m	10,00	64.350.440.861	2,00	1.990.779.000	311,00	21.105.132.900	213,30	14.379.916.025	68,59	68,13	215,30	16.370.695.025	-	-	DPUTRPRKP	
86	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Prosentase Luas Lahan yang dibebaskan	%		10.544.252.292									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
87	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	m		2.500.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
88	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	m		7.500.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
89	Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	m		5.000.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
90	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	m		5.049.700.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
91	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	m		3.000.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
92	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	m		9.000.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
93	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	m		3.299.400.948									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												53,78	39,27						
Predikat kinerja												(R)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	46,18						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
94	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	%	40,04	5.879.340.697	1.911.161.850	40,04	1.911.161.850	40,04	1.660.949.850	100,00	86,91	40,04	3.572.111.700	100,00	60,76		DPUTRPRKP	
95	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW yang ditetapkan	Dokumen	1,00	3.344.659.868	1.396.191.750	1,00	1.396.191.750	1,00	1.393.186.750	100,00	99,78	1,00	2.789.378.500	100,00	83,40		DPUTRPRKP	
96	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	9,00	2.444.659.868	6,00	1.396.191.750	1,00	1.396.191.750	1,00	1.393.186.750	100,00	99,78	7,00	2.789.378.500	77,78	114,10	DPUTRPRKP	
97	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen		450.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
98	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen		450.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	99,78						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%				
99	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Perencanaan tata ruang daerah Kabupaten/kota yang dilaksanakan	%	50,00	967.609.871		317.050.100	50,00	317.050.100	50,00	135.650.100	100,00	42,79	50,00	452.700.200	100,00	46,79	DPUTRPRKP			
100	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	44,00	567.347.000	1,00	317.050.100	2,00	317.050.100	2,00	135.650.100	100,00	42,79	3,00	452.700.200	6,82	79,79	DPUTRPRKP			
101	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen		265.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP			
102	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Dokumen		135.262.871									-	-	-	-	DPUTRPRKP			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	42,79								
Predikat kinerja												(ST)	(SR)								
103	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				544.930.761									-	-	-	-	DPUTRPRKP			
104	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dok		334.930.761									-	-	-	-	DPUTRPRKP			
105	Sistem Informasi Penataan Ruang				210.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-								
Predikat kinerja												(SR)	(SR)								
106	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pengendalian tata ruang daerah Kabupaten/kota yang dilaksanakan	%	20,00	1.022.140.197		197.920.000	50,00	197.920.000	50,00	132.113.000	100,00	66,75	50,00	330.033.000	250,00	32,29	DPUTRPRKP			
107	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	8,00	352.140.197	2,00	197.920.000	1,00	197.920.000	1,00	132.113.000	100,00	66,75	3,00	330.033.000	37,50	93,72	DPUTRPRKP			
108	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen		245.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP			
109	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen		245.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP			
110	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus		180.000.000						35.630.000			-	35.630.000	-	19,79	DPUTRPRKP			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	66,75								
Predikat kinerja												(ST)	(S)								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												75,00	52,33								
Predikat kinerja												(S)	(R)								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												78,35	52,78								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												SR	SR								
111	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				73.958.831.136		40.000.000		122.220.000		17.815.000	-	14,58	-	57.815.000	-	0,08	DPUTRPRKP			
112	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Rumah	250,00	6.250.000.000		40.000.000	50,00	40.000.000	-	-	-	-	-	40.000.000	-	0,64	DPUTRPRKP	Refokusing Anggaran		
113	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			500.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP			
114	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen		500.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-								
Predikat kinerja												(SR)	(SR)								
115	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			500.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP			
116	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	jumlah kegiatan			250.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP			
117	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	jumlah kegiatan			250.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-								
Predikat kinerja												(SR)	(SR)								
118	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi program kabupaten yang terbangun	%	26,39	3.750.000.000		40.000.000		40.000.000	-	-	-	-	-	40.000.000	-	1,07	DPUTRPRKP	Refokusing Anggaran		
119	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/kota yang Terehabilitasi	Unit	25,00	750.000.000		40.000.000	50,00	40.000.000	-	-	-	-	-	40.000.000	-	5,33	DPUTRPRKP	Refokusing Anggaran		
120	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah yang dibangun	Unit		1.250.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP			
121	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau	Jumlah dokumen	Dokumen		500.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP			
122	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah Rumah yang dibangun akibat relokasi program kabupaten	Unit		1.250.000.000									-	-	-	-	DPUTRPRKP			

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		-	-						
										Predikat kinerja		(SR)	(SR)						
123	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang diserahkan			500.000.000								-	-	-	-	DPUTRPRKP		
124	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program	Jumlah Rumah	Unit		500.000.000								-	-	-	-	DPUTRPRKP		
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		-	-						
										Predikat kinerja		(SR)	(SR)						
125	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			500.000.000								-	-	-	-	DPUTRPRKP		
126	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah izin	Dokumen		300.000.000								-	-	-	-	DPUTRPRKP		
127	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Kegiatan	Laporan		200.000.000								-	-	-	-	DPUTRPRKP		
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		-	-						
										Predikat kinerja		(SR)	(SR)						
128	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)			500.000.000								-	-	-	-	DPUTRPRKP		
129	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Sertifikat	Dokumen		500.000.000								-	-	-	-	DPUTRPRKP		
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		-	-						
										Predikat kinerja		(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)		-	-						
										Predikat kinerja		(SR)	(SR)						
130	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Korban Bencana yang ditangani	%	50,00	62.008.831.136		-	26,39	82.220.000	-	17.815.000	-	21,67	-	17.815.000	-	0,03	DPUTRPRKP	
131	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi program kabupaten yang terbangun	Unit	50,00	62.008.831.136		-		82.220.000	-	17.815.000	-	21,67	-	17.815.000	-	0,03	DPUTRPRKP	
132	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit	1.550,00	51.209.550.000	72,00	-	50,00	82.220.000	-	17.815.000	-	21,67	72,00	17.815.000	4,65	0,03	DPUTRPRKP	
133	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran	Jumlah Dokumen	Dokumen		10.799.281.136		-			-				-		-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		-	21,67						
										Predikat kinerja		(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)		-	21,67						
										Predikat kinerja		(SR)	(SR)						
134	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase PSU yang ditingkatkan	%		5.700.000.000											-	-	DPUTRPRKP	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		-	-						
										Predikat Kinerja		(SR)	(SR)						
										Rata-rata capaian kinerja Program (%)		-	-						
										Predikat kinerja		(SR)	(SR)						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)		-	10,83						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		SR	SR						
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				133.948.806.550		5.695.056.091		6.746.009.519		5.792.514.368		85,87		11.487.570.459				
2	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				133.948.806.550		5.695.056.091		6.746.009.519		5.792.514.368		85,87		11.487.570.459			Bakesbangpol	
3	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				133.948.806.550		5.695.056.091		6.746.009.519		5.792.514.368		85,87		11.487.570.459		8,58	Bakesbangpol	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	49.607.811.979	100,00	2.496.853.091	100,00	3.509.706.269	100,00	2.649.261.450	100,00	75,48	100,00	5.146.114.541	100,00	10,37	Bakesbangpol	
		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	100,00		100,00		100,00		-	-	-	-	50,00		50,00		Bakesbangpol	
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Persen	100,00		100,00		100,00		-	-	-	-	50,00		50,00		Bakesbangpol	
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	Persen	100,00		100,00		100,00		7,00	-	7,00	-	53,50		53,50		Bakesbangpol	
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	100,00	571.061.000	100,00	41.261.500	100,00	48.297.000	100,00	36.918.000	100,00	76,44	100,00	78.179.500	100,00	13,69	Bakesbangpol	
		Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	100,00		100,00		100,00		-	-	-	-	50,00		50,00		Bakesbangpol	
		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	100,00		100,00		100,00		-	-	-	-	50,00		50,00		Bakesbangpol	
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6,00	268.038.000	4,00	22.661.750	6,00	27.342.000	6,00	20.142.000	100,00	73,67	10,00	42.803.750	166,67	15,97	Bakesbangpol	
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	dokumen	5,00	28.050.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
8	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	dokumen	5,00	28.050.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
9	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang dilaksanakan	dokumen	5,00	28.050.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
10	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	dokumen	5,00	28.050.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25,00	190.823.000	5,00	18.599.750	6,00	20.955.000	6,00	16.776.000	100,00	80,06	11,00	35.375.750	44,00	18,54	Bakesbangpol	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	76,86						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan	persen	100,00	30.109.623.394	100,00	1.642.869.108	100,00	2.740.577.384	100,00	2.103.412.249	100,00	76,75	100,00	3.746.281.357	100,00	12,44	Bakesbangpol	
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	orang	169,00	29.403.868.394	14,00	1.611.253.108	25,00	2.704.327.384	18,00	2.080.409.249	72,00	76,93	32,00	3.691.662.357	18,93	12,56	Bakesbangpol	
14	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	dokumen	125,00	110.400.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
15	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen hasil penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	60,00	256.001.000	1,00	21.286.000	12,00	30.078.000	12,00	21.574.000	100,00	71,73	13,00	42.860.000	21,67	16,74	Bakesbangpol	
16	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi SKPD yang dilaksanakan	Keg/Laporan	20,00	27.650.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Laporan	5,00	268.172.000	1,00	9.980.000	1,00	3.172.000	1,00	1.274.000	100,00	40,16	2,00	11.254.000	40,00	4,20	Bakesbangpol	
18	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	dokumen	32,00	6.900.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	73,00	19.902.000	1,00	350.000	18,00	3.000.000	1,00	155.000	5,56	5,17	2,00	505.000	2,74	2,54	Bakesbangpol	
20	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	Laporan	4,00	16.730.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												69,39	48,50						
Predikat Kinerja												(S)	(SR)						
21	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	jenis	138,00	929.583.000	100,00	21.388.000	100,00	26.210.000	100,00	19.356.000	100,00	73,85	200,00	40.744.000	144,93	4,38	Bakesbangpol	
22	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	dokumen	8,00	113.200.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
23	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan	jenis	24,00	113.200.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
24	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang dilaksanakan	kegiatan dan laporan	16,00	113.200.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
25	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaksanakan	kegiatan dan laporan	16,00	113.200.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
26	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	laporan	52,00	113.200.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
27	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	258.583.000	1,00	21.388.000	13,00	26.210.000	13,00	19.356.000	100,00	73,85	14,00	40.744.000	116,67	15,76	Bakesbangpol	
28	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD Yang Digunakan	jenis		105.000.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	73,85						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
29	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	Persen	100,00	1.155.388.750	100,00	17.400.000	100,00	17.400.000	100,00	15.300.000	100,00	87,93	100,00	32.700.000	100,00	2,83	Bakesbangpol	
30	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang ditingkatkan	jenis	28,00	163.100.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
31	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	set	128,00	52.608.750					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
32	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi kepegawaian yang dikelola	data	120,00	113.200.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
33	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	48,00	209.680.000	1,00	17.400.000	12,00	17.400.000	12,00	15.300.000	100,00	87,93	13,00	32.700.000	27,08	15,60	Bakesbangpol	
34	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	kegiatan dan laporan	120,00	111.200.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
35	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai yang Pensiun yang dipulangkan	orang	4,00	111.200.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
36	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pegawai Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang dipulangkan	orang	4,00	111.200.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
37	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	orang	8,00	111.200.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
38	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	orang	8,00	172.000.000									-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	87,93						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
39	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	Persen	100,00	6.624.226.637	100,00	402.166.761	100,00	314.423.976	100,00	177.814.335	100,00	56,55	100,00	579.981.096	100,00	8,76	Bakesbangpol	
40	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	150.123.031	6,00	598.000	10,00	1.531.009	4,00	536.500	40,00	35,04	10,00	1.134.500	1.000,00	0,76	Bakesbangpol	
41	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	4.211.120.106	67,00	332.175.900	73,00	119.672.467	38,00	72.622.500	52,05	60,68	105,00	404.798.400	#####	9,61	Bakesbangpol	
42	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	jenis	60,00	203.700.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
43	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	164.164.500	2,00	5.699.400	2,00	20.000.000	2,00	21.315.250	100,00	106,58	4,00	27.014.650	200,00	16,46	Bakesbangpol	
44	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12,00	133.320.000	7,00	3.790.000	7,00	7.800.000	7,00	5.880.000	100,00	75,38	14,00	9.670.000	116,67	7,25	Bakesbangpol	
45	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	jenis	24,00	100.700.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
46	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	orang	48,00	119.400.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
47	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	96,00	1.228.475.000	29,00	23.903.461	96,00	145.020.500	55,00	59.160.085	57,29	40,79	84,00	83.063.546	87,50	6,76	Bakesbangpol	
48	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	12,00	155.052.000	1,00	17.400.000	12,00	17.400.000	12,00	15.300.000	100,00	87,93	13,00	32.700.000	108,33	21,09	Bakesbangpol	
49	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12,00	158.172.000	1,00	18.600.000	1,00	3.000.000	1,00	3.000.000	100,00	100,00	2,00	21.600.000	16,67	13,66	Bakesbangpol	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												78,48	72,34						
Predikat Kinerja												(T)	(S)						
50	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Persen	100,00	7.335.310.000	100,00	200.800.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	100,00	100,00	320.800.000	100,00	4,37	Bakesbangpol	
51	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	unit	32,00	4.272.000.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
52	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	unit	12,00	405.200.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
53	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang diadakan	jenis	24,00	346.200.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
54	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang diadakan	jenis	32,00	138.100.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
55	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang diadakan	jenis	4,00	56.100.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
56	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak Berwujud Yang diadakan	jenis/unit	36,00	111.610.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
57	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	1.720.100.000	2,00	200.800.000	1,00	120.000.000	1,00	120.000.000	100,00	100,00	3,00	320.800.000	300,00	18,65	Bakesbangpol	
58	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Terpenuhi	jenis/unit	4,00	143.250.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
59	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Terpenuhi	jenis/unit	4,00	142.750.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
60	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Persen	100,00	1.277.610.798	100,00	118.780.435	100,00	156.326.461	100,00	101.211.427	100,00	64,74	100,00	219.991.862	100,00	17,22	Bakesbangpol	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%				
61	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60,00	27.276.900	130,00	1.500.000	1,00	2.200.000	1,00	1.700.000	100,00	77,27	131,00	3.200.000	218,33	11,73	Bakesbangpol			
62	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00	484.368.547	2,00	27.492.535	2,00	57.000.000	2,00	29.809.427	100,00	52,30	4,00	57.301.962	6,67	11,83	Bakesbangpol			
63	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pejabat Pengadaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	orang	20,00	-					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten		
64	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00	765.965.351	4,00	89.787.900	4,00	97.126.461	4,00	69.702.000	100,00	71,76	8,00	159.489.900	13,33	20,82	Bakesbangpol			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	67,11								
Predikat Kinerja												(ST)	(S)								
65	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	Persen	100,00	1.605.008.400	85,00	52.187.287	100,00	86.471.448	100,00	75.249.439	100,00	87,02	92,50	127.436.726	92,50	7,94	Bakesbangpol			
66	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	36,00	1.184.383.000	4,00	44.872.887	4,00	75.971.448	4,00	67.341.439	100,00	88,64	8,00	112.214.326	22,22	9,47	Bakesbangpol			
67	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	32,00	112.641.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten		
68	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dikelola	unit	16,00	18.900.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten		
69	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	60,00	41.500.000	11,00	3.020.000	8,00	10.500.000	8,00	7.908.000	100,00	75,31	19,00	10.928.000	31,67	26,33	Bakesbangpol			
70	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dikelola	unit	4,00	18.200.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten		
71	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dikelola	jenis	8,00	26.350.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten		
72	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5,00	34.794.400	1,00	4.294.400			-	-			1,00	4.294.400	20,00	12,34	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten		
73	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	jenis/unit	4,00	24.900.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten		
74	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	jenis/unit	4,00	5.500.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten		
75	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah luasan tanah yang dikelola	m2	4,00	137.840.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	81,98								
Predikat Kinerja												(ST)	(T)								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												91,67	71,54								
Predikat Kinerja												(ST)	(S)								
76	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan	Persen	69,00	4.228.705.131	67,00	39.062.000	69,00	38.984.950	69,00	32.611.750	100,00	83,65	68,00	71.673.750	98,55	1,69	Bakesbangpol			
77	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	dokumen	1,00	4.228.705.131	1,00	39.062.000	1,00	38.984.950	1,00	32.611.750	100,00	83,65	2,00	71.673.750	200,00	1,69	Bakesbangpol			
78	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	dokumen	20,00	1.574.435.316	35,00	7.242.000	70,00	38.984.950	70,00	32.611.750	100,00	83,65	105,00	39.853.750	525,00	2,53	Bakesbangpol			
79	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Bela Negara	kegiatan	4,00	154.291.250					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten		
80	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan	orang/kegiatan	500,00	173.297.438					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten		
81	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	3.000,00	2.137.629.377	150,00	31.820.000	-	-	-	-			150,00	31.820.000	5,00	1,49	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten		
82	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pemahaman Peserta dalam Memahami Ideologi Wawasan Kebangsaan	orang/kegiatan	1.200,00	189.051.750					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	83,65								

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.												
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja			%											
																			Predikat Kinerja		(ST)	(T)								
																			Rata-rata capaian kinerja Program (%)		100,00	83,65								
																			Predikat Kinerja		(ST)	(T)								
83	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	75,00	2.768.877.126	70,00	204.387.000	75,00	207.314.800	75,00	179.723.000	100,00	86,69	72,50	384.110.000	96,67	13,87	Bakesbangpol												
84	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis yang Tersusun	dokumen	1,00	2.768.877.126	1,00	204.387.000	1,00	207.314.800	1,00	179.723.000	100,00	86,69	2,00	384.110.000	200,00	13,87	Bakesbangpol												
85	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Penyusunan Program Kerja Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	kegiatan dan orang	400,00	274.251.072						-	-		-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten											
86	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	kegiatan dan orang	260,00	147.523.382						-	-		-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten											
87	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	kegiatan dan orang	150,00	1.547.685.667	30,00	152.882.000	29,00	176.300.000	30,00	166.083.000	103,45	94,20	60,00	318.965.000	40,00	20,61	Bakesbangpol	Realisasi melebihi target dikarenakan adanya perubahan SK Anggota											
88	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Buday dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	kegiatan dan orang	1.330,00	736.399.755	50,00	51.505.000	100,00	31.014.800	50,00	13.640.000	50,00	43,98	100,00	65.145.000	7,52	8,85	Bakesbangpol												
89	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pemahaman Masyarakat tentang Ketahanan Ekonomis, Sosial, dan Budaya	kegiatan	5,00	63.017.250						-	-		-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten											
																			Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		76,72	69,09								
																			Predikat Kinerja		(T)	(S)								
																			Rata-rata capaian kinerja Program (%)		100,00	86,69								
																			Predikat Kinerja		(ST)	(T)								
90	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri	Persen	61,00	58.549.268.000	60,00	1.836.709.000	61,00	1.506.737.000	61,00	1.558.201.030	100,00	103,42	60,50	3.394.910.030	99,18	5,80	Bakesbangpol												
91	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik 2. Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah 3. Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemantauan Situasi Politik	dokumen	1,00	58.549.268.000	1,00	1.836.709.000	1,00	1.506.737.000	1,00	1.558.201.030	100,00	103,42	2,00	3.394.910.030	200,00	5,80	Bakesbangpol												
92	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	dokumen	4,00	600.000.000	-	-	1,00	27.500.000	1,00	13.750.000	100,00	50,00	1,00	13.750.000	25,00	2,29	Bakesbangpol												
93	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, di Bidang Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, di Bidang Pelaksanaan Pemantauan Situasi Politik	dokumen	4,00	265.221.000						-	-		-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten											
94	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	30,00	56.330.047.000	1,00	1.836.709.000	8,00	1.439.918.000	8,00	1.428.867.030	100,00	99,23	9,00	3.265.576.030	30,00	5,80	Bakesbangpol												

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
95	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik d Daerah	orang	50,00	1.300.000.000	-	-	50,00	29.921.000	330,00	115.584.000	660,00	386,30	330,00	115.584.000	660,00	8,89	Bakesbangpol	Ada penambahan anggaran pada saat sub kegiatan sedang berjalan
96	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	5,00	54.000.000	-	-	1,00	9.398.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												215,00	133,88						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	103,42						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
97	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Masyarakat yang memahami tentang pemberdayaan dan pengawasan ormas	Persen	61,00	6.510.179.888	60,00	25.900.000	61,00	107.967.500	61,00	41.313.938	100,00	38,27	60,50	67.213.938	99,18	1,03	Bakesbangpol	
98	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	dokumen	1,00	6.510.179.888	1,00	25.900.000	1,00	107.967.500	1,00	41.313.938	100,00	38,27	2,00	67.213.938	200,00	1,03	Bakesbangpol	
99	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas , dibidang Pemberdayaan Ormas, dibidang Mediasi Sengketa Ormas, dibidang Pengawasan Ormas Asing di Daerah, dibidang Verifikasi dan Pengawasan Ormas	dokumen	4,00	543.177.448						-	-		-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
100	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas , dibidang Pemberdayaan Ormas, dibidang Mediasi Sengketa Ormas, dibidang Pengawasan Ormas Asing di Daerah, dibidang Verifikasi dan Pengawasan Ormas	dokumen	4,00	1.064.000.000						-	-		-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
101	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	392,00	3.449.002.440	1,00	25.900.000	82,00	107.967.500	34,00	41.313.938	41,46	38,27	35,00	67.213.938	8,93	1,95	Bakesbangpol	
102	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas , dibidang Pemberdayaan Ormas, dibidang Mediasi Sengketa Ormas, dibidang Pengawasan Ormas Asing di Daerah, dibidang Verifikasi dan Pengawasan Ormas	kegiatan	50,00	1.454.000.000						-	-		-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
103	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Pendaftaran Ormas yang Terverifikasi, Jumlah Pemberdayaan Ormas yang dilaksanakan, Jumlah Mediasi Sengketa Ormas, Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pengawasan Ormas, Jumlah Pengawasan Ormas Asing di Daerah	kegiatan	20,00	-						-	-		-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												41,46	38,27						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	38,27						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
104	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan koordinasi kewaspadaan daerah	Persen	75,00	12.283.964.426	65,00	1.092.145.000	75,00	1.375.299.000	75,00	1.331.403.200	100,00	96,81	70,00	2.423.548.200	93,33	19,73	Bakesbangpol	
105	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	dokumen	1,00	12.283.964.426	1,00	1.092.145.000	1,00	1.375.299.000	1,00	1.331.403.200	100,00	96,81	2,00	2.423.548.200	200,00	19,73	Bakesbangpol	
106	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Penyusunan Program Kerja di Bidang Pemantauan Orang Asing	kegiatan	12,00	605.510.000						-	-		-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
107	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Penyusunan Bahan Perumusan Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Jumlah Penyusunan Bahan Perumusan di Bidang Penanganan Konflik di Daerah	dokumen	4,00	1.015.872.000					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
108	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	535,00	3.508.369.878	33,00	384.060.000	33,00	371.900.000	33,00	357.584.000	100,00	96,15	66,00	741.644.000	12,34	21,14	Bakesbangpol	
109	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	408,00	1.453.161.746	51,00	88.250.000	62,00	148.400.000	62,00	126.245.000	100,00	85,07	113,00	214.495.000	27,70	14,76	Bakesbangpol	
110	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Bidang Kewaspadaan Dini yang terfasilitasi, Jumlah Kerjasama Intel, Jumlah Penanganan Konflik di Daerah	kali	24,00	762.091.802					-	-			-	-	-	-	Bakesbangpol	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
111	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	60,00	4.938.959.000	12,00	619.835.000	12,00	854.999.000	12,00	847.574.200	100,00	99,13	24,00	1.467.409.200	40,00	29,71	Bakesbangpol	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	93,45						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	96,81						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												87,79	80,72						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(T)	(T)						
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				71.615.192.487		12.706.080.051		14.538.376.278		13.364.437.073		91,93		25.889.440.474		36,15		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				71.615.192.487		12.706.080.051		14.538.376.278		13.364.437.073		91,93		25.889.440.474		36,15	SATPOL PP	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	100,00	22.819.544.989	100,00	2.293.428.051	100,00	3.730.393.756	100,00	3.487.188.768	100,00	93,48	100,00	5.780.616.819	100,00	25,33	SATPOL PP	
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	204.200.000	100,00	21.000.000	100,00	38.100.000	100,00	21.000.000	100,00	55,12	100,00	42.000.000	100,00	20,57	SATPOL PP	
		Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	72,00	204.200.000	6,00	21.000.000	12,00	38.100.000	12,00	21.000.000	100,00	55,12	18,00	42.000.000	25,00	20,57	SATPOL PP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	55,12						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100,00	15.022.476.929	100,00	1.589.561.351	100,00	2.385.334.365	100,00	2.246.409.618	100,00	94,18	100,00	3.835.970.969	100,00	25,53	SATPOL PP	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	126,00	14.354.979.929	16,00	1.516.011.351	22,00	2.265.637.365	21,00	2.138.984.618	95,45	94,41	37,00	3.654.995.969	29,37	25,46	SATPOL PP	Terdapat ASN yang Purna Bakti
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72,00	201.897.000	12,00	30.800.000	12,00	42.597.000	12,00	42.000.000	100,00	98,60	24,00	72.800.000	33,33	36,06	SATPOL PP	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6,00	462.600.000	1,00	42.750.000	1,00	77.100.000	1,00	65.425.000	100,00	84,86	2,00	108.175.000	33,33	23,38	SATPOL PP	

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18,00	3.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	SATPOL PP	Rasionalisasi anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												98,48	92,62						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
11	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100,00	203.999.700	100,00	21.000.000	100,00	37.999.750	100,00	21.000.000	100,00	55,26	100,00	42.000.000	100,00	20,59	SATPOL PP	
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72,00	203.999.700	12,00	21.000.000	12,00	37.999.750	12,00	21.000.000	100,00	55,26	24,00	42.000.000	33,33	20,59	SATPOL PP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	55,26						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	%	100,00	1.219.697.899	100,00	15.675.000	100,00	415.378.600	100,00	408.648.550	100,00	98,38	100,00	424.323.550	100,00	34,79	SATPOL PP	
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	12,00	1.041.777.899	3,00	1.075.000	3,00	395.378.600	3,00	391.248.550	100,00	98,96	6,00	392.323.550	50,00	37,66	SATPOL PP	
15	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	84,00	177.920.000	14,00	14.600.000	14,00	20.000.000	14,00	17.400.000	100,00	87,00	28,00	32.000.000	33,33	17,99	SATPOL PP	Efisiensi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	92,98						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	%	80,00	1.153.734.204	80,00	58.192.135	80,00	96.597.279	80,00	98.169.254	100,00	101,63	80,00	156.361.389	100,00	13,55	SATPOL PP	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24,00	15.594.998	4,00	472.500	4,00	2.597.499	4,00	2.582.000	100,00	99,40	8,00	3.054.500	33,33	19,59	SATPOL PP	
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	240,00	230.091.217	61,00	25.481.000	40,00	19.999.964	40,00	24.991.000	100,00	124,96	101,00	50.472.000	42,08	21,94	SATPOL PP	Penyesuaian Anggaran DPA
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	18,00	59.499.892	-	-	3,00	7.999.816	3,00	11.926.300	100,00	149,08	3,00	11.926.300	16,67	20,04	SATPOL PP	Penyesuaian Anggaran DPA
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	102,00	95.420.000	17,00	14.190.000	17,00	16.000.000	17,00	14.675.000	100,00	91,72	34,00	28.865.000	33,33	30,25	SATPOL PP	
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100,00	753.128.097	5,00	18.048.635	15,00	50.000.000	15,00	43.994.954	100,00	87,99	20,00	62.043.589	20,00	8,24	SATPOL PP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	110,63						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	%	75,00	1.233.396.353	75,00	207.441.000	75,00	150.000.000	75,00	150.000.000	100,00	100,00	75,00	357.441.000	100,00	28,98	SATPOL PP	
23	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	38,00	24.392.075	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	SATPOL PP	Rasionalisasi anggaran
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20,00	159.004.278	13,00	107.441.000	-	-	-	-			13,00	107.441.000	-	-	SATPOL PP	Rasionalisasi anggaran
25	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6,00	1.050.000.000	1,00	100.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	100,00	100,00	2,00	250.000.000	33,33	23,81	SATPOL PP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	2.087.949.183	100,00	190.318.917	100,00	300.420.562	100,00	281.670.348	100,00	93,76	100,00	471.989.265	100,00	22,61	SATPOL PP	
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72,00	20.187.500	12,00	2.425.000	12,00	1.500.000	3,00	850.000	25,00	56,67	15,00	3.275.000	20,83	16,22	SATPOL PP	Efisiensi Anggaran
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72,00	472.000.000	12,00	38.891.117	12,00	59.925.000	12,00	52.002.248	100,00	86,78	24,00	90.893.365	33,33	19,26	SATPOL PP	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	1.595.761.683	12,00	149.002.800	12,00	238.995.562	12,00	228.818.100	100,00	95,74	24,00	377.820.900	33,33	23,68	SATPOL PP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												75,00	79,73						
Predikat Kinerja												(S)	(T)						
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100,00	1.694.090.721	100,00	190.239.648	100,00	306.563.200	100,00	260.290.998	100,00	84,91	100,00	450.530.646	100,00	26,59	SATPOL PP	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	48,00	459.650.000	11,00	5.763.100	8,00	3.000.000	8,00	2.713.200	100,00	90,44	19,00	8.476.300	39,58	1,84	SATPOL PP	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33,00	561.370.272	-	-	6,00	3.000.000	5,00	2.961.700	83,33	98,72	5,00	2.961.700	15,15	0,53	SATPOL PP	Penyesuaian Unit Kendaraan Dinas
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	180,00	645.470.449	20,00	184.476.548	30,00	300.563.200	30,00	254.616.098	100,00	84,71	50,00	439.092.646	27,78	68,03	SATPOL PP	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	27.600.000					-	-							SATPOL PP	Rasionalisasi anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												94,44	91,29						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	85,40						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
35	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, keindahan)	%	100,00	48.795.647.498	100,00	10.412.652.000	100,00	10.455.182.522	100,00	9.524.448.305	100,00	91,10	100,00	19.756.023.655	100,00	40,49	SATPOL PP	
		Persentase capaian SPM trantibum	%	61,00				45,00		45,00		100,00		45,00		73,77		SATPOL PP	
36	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Kantrantibum	%	100,00	44.994.080.398	100,00	7.413.922.000	100,00	9.710.603.000	100,00	8.846.828.655	100,00	91,10	100,00	16.260.750.655	100,00	36,14	SATPOL PP	
37	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	600,00	40.937.368.948	28,00	7.413.922.000	100,00	9.710.603.000	85,00	8.580.698.655	85,00	88,36	113,00	15.994.620.655	18,83	39,07	SATPOL PP	Terdapat Hibah yang tidak terealisasi
38	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	15,00	450.081.450						-				-			SATPOL PP	Rasionalisasi anggaran
39	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	dokumen	5,00	226.000.000						-				-			SATPOL PP	Rasionalisasi anggaran
40	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	orang	1.167,00	3.175.630.000					189,00	266.130.000			189,00	266.130.000	16,20	8,38	SATPOL PP	
41	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	dokumen	4,00	80.000.000						-				-			SATPOL PP	Rasionalisasi anggaran
42	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	4,00	125.000.000		-		-	-	-			-	-	-	-	SATPOL PP	Rasionalisasi anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												85,00	88,36						
Predikat Kinerja												(T)	(T)						
43	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	%	75,00	3.781.567.100	33,30	2.998.730.000	100,00	744.579.522	100,00	677.619.650	100,00	91,01	100,00	3.495.273.000	100,00	92,43	SATPOL PP	
44	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	1,00	99.978.400		-	1,00	181.632.076	1,00	181.076.650	100,00	99,69					SATPOL PP	
45	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	24,00	174.998.700	1,00	13.250.000	4,00	50.000.000	5,00	40.213.000	125,00	80,43	6,00	53.463.000	25,00	30,55	SATPOL PP	
46	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	72,00	3.506.590.000	10,00	2.985.480.000	12,00	512.947.446	12,00	456.330.000	100,00	88,96	22,00	3.441.810.000	30,56	98,15	SATPOL PP	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												108,33	89,69						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
47	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan PPNS	%	5,00	20.000.000	-	-		-	-				-		-		SATPOL PP	Rasionalisasi anggaran
48	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1,00	20.000.000						-							SATPOL PP	Rasionalisasi anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	91,06						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
49	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	-			-	100,00	352.800.000	100,00	352.800.000	100,00	100,00	100,00	352.800.000	-		SATPOL PP	Program pindah dari BPBD

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%			
50	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase/Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	-	-	-	-	100,00	352.800.000	100,00	352.800.000	100,00	100,00	100,00	352.800.000	-	-	SATPOL PP		
51	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	dokumen					9,00	352.800.000	9,00	352.800.000	100,00	100,00	9,00	352.800.000	-	-	SATPOL PP		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													100,00	100,00						
Predikat Kinerja													(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)													100,00	100,00						
Predikat Kinerja													(ST)	(ST)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)													100,00	94,86						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													(ST)	(ST)						
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				51.400.795.694		5.728.231.706		8.831.928.944		9.527.117.712		107,87		15.255.349.418		29,68	BPBD		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	100,00	26.501.751.246	100,00	1.995.617.932	100,00	3.542.435.723	100,00	2.809.766.861	100,00	79,32	100,00	4.805.384.793	100,00	18,13	BPBD		
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase Dokumen Penganggaran Kinerja Yang Disusun Tepat waktu 3. Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Yang disusun Tepat Waktu	Persen	100,00	276.600.000	100,00	32.600.000	100,00	39.800.000	100,00	34.750.000	100,00	87,31	100,00	67.350.000	100,00	24,35	BPBD		
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	4,00	162.000.000	1,00	21.000.000	4,00	21.000.000	4,00	18.450.000	100,00	87,86	5,00	39.450.000	125,00	24,35	BPBD		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian penyusunan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5,00	114.600.000	1,00	11.600.000	4,00	18.800.000	4,00	16.300.000	100,00	86,70	5,00	27.900.000	100,00	24,35	BPBD		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													100,00	87,28						
Predikat Kinerja													(ST)	(T)						
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Persen	100,00	16.452.870.754	100,00	1.314.154.476	100,00	2.360.273.897	75,00	1.828.093.777	75,00	77,45	87,50	3.142.248.253	87,50	19,10	BPBD		
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Orang	17,00	16.234.370.754	17,00	1.293.154.476	24,00	2.339.273.897	24,00	1.809.643.777	100,00	77,36	41,00	3.102.798.253	241,18	19,11	BPBD	Ada Penambahan pegawai CPNS sebanyak 7 Orang	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12,00	162.000.000	12,00	21.000.000	12,00	21.000.000	12,00	18.450.000	100,00	87,86	24,00	39.450.000	200,00	24,35	BPBD		
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	6,00	56.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													100,00	82,61						
Predikat Kinerja													(ST)	(T)						
11	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	100,00	162.000.000	100,00	19.300.000	100,00	22.700.000	100,00	20.150.000	100,00	88,77	100,00	39.450.000	100,00	24,35	BPBD		
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	Jenis	150,00	162.000.000	1,00	19.300.000	12,00	22.700.000	12,00	20.150.000	100,00	88,77	13,00	39.450.000	8,67	24,35	BPBD		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													100,00	88,77						
Predikat Kinerja													(ST)	(T)						
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	Persen	100,00	427.100.000	100,00	16.000.000	100,00	18.800.000	100,00	16.700.000	100,00	88,83	100,00	32.700.000	100,00	7,66	BPBD		
14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapannya yang diadakan	set	85,00	210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten	
15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Data	30,00	75.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
16	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawalan yang dilaksanakan	Laporan	12,00	141.600.000	1,00	16.000.000	12,00	18.800.000	12,00	16.700.000	100,00	88,83	13,00	32.700.000	108,33	23,09	BPBD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	88,83						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	Persen	100,00	1.570.600.885	100,00	88.451.284	100,00	180.309.341	100,00	166.855.108	100,00	92,54	100,00	255.306.392	100,00	16,26	BPBD	
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	20,00	214.999.147	1,00	4.981.000	20,00	12.001.647	15,00	8.156.900	75,00	67,96	16,00	13.137.900	80,00	6,11	BPBD	
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	jenis	10,00	318.412.057	46,00	26.781.000	10,00	38.010.444	8,00	36.522.000	80,00	96,08	54,00	63.303.000	540,00	19,88	BPBD	
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pralatan Rumah Tangga yang Disediakan	jenis	50,00	111.984.681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
21	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	jenis	3,00	113.500.000	2.273,00	9.077.400	3,00	14.369.250	3,00	13.615.550	100,00	94,75	2.276,00	22.692.950	#####	19,99	BPBD	
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	30,00	120.700.000	59,00	6.377.500	20,00	14.990.000	20,00	12.265.000	100,00	81,82	79,00	18.642.500	263,33	15,45	BPBD	
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	40,00	691.005.000	9,00	41.234.384	30,00	100.938.000	28,00	96.295.658	93,33	95,40	37,00	137.530.042	92,50	19,90	BPBD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												89,67	87,21						
Predikat Kinerja												(T)	(T)						
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Persen	100,00	2.955.833.484	100,00	138.000.000	100,00	232.000.000	100,00	171.246.910	100,00	73,81	100,00	309.246.910	100,00	10,46	BPBD	
25	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	unit	1,00	1.476.333.484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
26	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	Paket	5,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	jenis	25,00	290.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
28	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	unit	2,00	989.500.000	3,00	138.000.000	2,00	232.000.000	2,00	171.246.910	100,00	73,81	5,00	309.246.910	250,00	31,25	BPBD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	73,81						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
29	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Persen	100,00	2.053.312.000	100,00	216.713.626	100,00	307.504.000	100,00	225.845.477	100,00	73,44	100,00	442.559.103	100,00	21,55	BPBD	
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	buah	700,00	110.500.000	2.033,00	7.250.000	12,00	10.000.000	12,00	9.960.000	100,00	99,60	2.045,00	17.210.000	292,14	15,57	BPBD	
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	rekening	6,00	1.044.600.000	4,00	114.709.626	12,00	160.500.000	12,00	123.571.888	100,00	76,99	16,00	238.281.514	266,67	22,81	BPBD	
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Orang	5,00	898.212.000	12,00	94.754.000	12,00	137.004.000	12,00	92.313.589	100,00	67,38	24,00	187.067.589	480,00	20,83	BPBD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	81,32						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	Persen	100,00	2.603.434.123	100,00	170.398.546	100,00	381.048.485	100,00	346.125.589	100,00	90,84	100,00	516.524.135	100,00	19,84	BPBD	
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	20,00	1.939.637.123	19,00	144.847.046	20,00	356.298.485	20,00	324.622.589	100,00	91,11	39,00	469.469.635	195,00	24,20	BPBD	
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	unit	6,00	174.000.000	19,00	15.827.000	3,00	24.750.000	3,00	21.503.000	100,00	86,88	22,00	37.330.000	366,67	21,45	BPBD	
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	unit	3,00	469.997.000	3,00	9.724.500	-	-	-	-	-	-	3,00	9.724.500	100,00	2,07	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
37	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang Disusun	Laporan	4,00	19.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	89,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												96,88	84,12						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
38	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	Persen	100,00	17.752.775.550	100,00	3.284.613.774	100,00	5.289.493.221	94,23	6.543.750.851	94,23	123,71	97,12	9.828.364.625	97,12	55,36	BPBD	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
39	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100,00	957.946.806	100,00	49.581.644	100,00	29.635.000	100,00	219.696.000	100,00	741,34	100,00	269.277.644	100,00	28,11	BPBD	
40	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	2,00	778.505.622	1,00	49.581.644	-	-	-	-	-	-	1,00	49.581.644	50,00	6,37	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
41	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kegiatan	4,00	179.441.184	-	-	3,00	29.635.000	3,00	219.696.000	100,00	741,34	3,00	219.696.000	75,00	122,43	BPBD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	741,34						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
42	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	100,00	4.525.671.647	100,00	230.360.000	100,00	1.456.642.050	76,92	2.518.667.230	76,92	172,91	88,46	2.749.027.230	88,46	60,74	BPBD	
43	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1,00	315.685.338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
44	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	8,00	231.115.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
45	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	unit	60,00	175.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
46	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Unit	80,00	47.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
47	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1,00	302.600.000	5,00	64.000.000	-	-	-	-	-	-	5,00	64.000.000	500,00	21,15	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
48	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	kegiatan	5,00	304.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
49	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	kegiatan	1,00	240.000.000	-	-	1,00	1.356.140.050	1,00	2.476.249.730	100,00	182,60	1,00	2.476.249.730	100,00	1.031,77	BPBD	
50	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	kegiatan	5,00	676.008.115	10,00	166.360.000	-	-	-	-	-	-	10,00	166.360.000	200,00	24,61	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
51	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah enyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen	1,00	686.963.194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
52	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	kegiatan	12,00	1.146.300.000	-	-	12,00	100.502.000	6,00	42.417.500	50,00	42,21	6,00	42.417.500	50,00	3,70	BPBD	
53	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen	2,00	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												75,00	112,40						
Predikat Kinerja												(S)	(ST)						
54	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100,00	9.825.013.095	100,00	3.004.672.130	100,00	3.441.616.171	100,00	3.638.387.621	100,00	105,72	100,00	6.643.059.751	100,00	67,61	BPBD	
55	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan	1,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
56	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	kejadian	12,00	1.735.571.500	1,00	255.301.640	12,00	224.200.000	12,00	179.500.000	100,00	80,06	13,00	434.801.640	108,33	25,05	BPBD	
57	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kejadian	4,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
58	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	paket	2.900,00	7.339.441.595	1.360,00	2.749.370.490	2.000,00	3.217.416.171	2.000,00	3.458.887.621	100,00	107,51	3.360,00	6.208.258.111	115,86	84,59	BPBD	
59	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	posko	1,00	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	93,78						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
60	Penataan Sistem Dasar penanggulangan Bencana	Persentase/Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	100,00	2.444.144.002	-	-	100,00	361.600.000	100,00	167.000.000	100,00	46,18	50,00	167.000.000	50,00	6,83	BPBD	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
61	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	48,00	1.030.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
62	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	informasi	12,00	1.146.000.000	-	-	12,00	361.600.000	12,00	167.000.000	100,00	46,18	12,00	167.000.000	100,00	14,57	BPBD	
63	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	kegiatan	1,00	268.144.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	46,18						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												94,23	266,54						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
64	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persen	100,00	7.146.268.898	100,00	448.000.000	100,00	-	25,00	173.600.000	25,00	-	62,50	621.600.000	62,50	8,70	BPBD	Program damkar telah tidak ada dan telah berpindah ke satpol PP
65	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase/Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	5.963.662.994	100,00	448.000.000	100,00	-	75,00	173.600.000	75,00	-	87,50	621.600.000	87,50	10,42	BPBD	Program damkar telah tidak ada dan telah berpindah ke satpol PP
66	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	4,00	4.125.600.000	30,00	448.000.000	4,00	-	3,00	173.600.000	75,00	-	33,00	621.600.000	825,00	15,07	BPBD	Program damkar telah tidak ada dan telah berpindah ke satpol PP
67	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	kejadian	15,00	275.229.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Program damkar telah tidak ada dan telah berpindah ke satpol PP
68	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	buah	6,00	41.766.862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Program damkar telah tidak ada dan telah berpindah ke satpol PP
69	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jenis	20,00	1.188.066.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Program damkar telah tidak ada dan telah berpindah ke satpol PP
70	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	23,00	333.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Program damkar telah tidak ada dan telah berpindah ke satpol PP
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												15,00	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
71	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase/Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persen	100,00	36.054.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Program damkar telah tidak ada dan telah berpindah ke satpol PP
72	Pendataan sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Pendataan sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	12,00	36.054.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Program damkar telah tidak ada dan telah berpindah ke satpol PP
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
73	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase/Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persen	100,00	1.146.551.184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Program damkar telah tidak ada dan telah berpindah ke satpol PP
74	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	kegiatan	2,00	246.551.184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Program damkar telah tidak ada dan telah berpindah ke satpol PP
75	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	kegiatan	4,00	675.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Program damkar telah tidak ada dan telah berpindah ke satpol PP
76	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Stel	15,00	225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPBD	Program damkar telah tidak ada dan telah berpindah ke satpol PP
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												25,00	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												97,12	101,51						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(ST)						
1	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				292.841.151.400		3.889.402.587		22.274.461.791		13.518.177.318		60,69		17.407.579.905		5,94	Dinsos PMD	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				92.638.007.590		3.889.402.587		9.983.238.183		5.915.278.667		59,25		9.804.681.254		10,58	Dinsos PMD	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	95,00	34.531.912.448	90,00	2.207.550.087	91,00	3.776.459.227	91,00	2.803.587.692	100,00	74,24	90,00	5.011.137.779	94,74	14,51	Dinsos PMD	
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100,00	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	100,00		Dinsos PMD	
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	95,00	-	90,00		91,00		91,00		100,00		90,00	-	94,74		Dinsos PMD	
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	100,00		Dinsos PMD	
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	483.192.548	100,00	35.300.000	100,00	53.867.550	100,00	44.248.000	100,00	82,14	100,00	79.548.000	100,00	16,46	Dinsos PMD	
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	100,00		Dinsos PMD	
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	100,00		Dinsos PMD	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14,00	483.192.548	2,00	35.300.000	2,00	53.867.550	2,00	44.248.000	100,00	82,14	4,00	79.548.000	28,57	16,46	Dinsos PMD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	82,14						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100,00	18.809.829.362	100,00	1.720.423.326	100,00	2.837.831.170	100,00	2.215.172.114	100,00	78,06	100,00	3.935.595.440	100,00	20,92	Dinsos PMD	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	Orang	111,00	18.390.538.814	16,00	1.658.243.326	20,00	2.796.331.170	20,00	2.176.016.114	100,00	77,82	36,00	3.834.259.440	32,43	20,85	Dinsos PMD	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	84,00	419.290.548	12,00	62.180.000	12,00	41.500.000	12,00	39.156.000	100,00	94,35	24,00	101.336.000	28,57	24,17	Dinsos PMD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	86,08						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
9	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Jenis	8,00	381.948.970	8,00	19.300.000	8,00	22.700.000	8,00	21.648.000	100,00	95,37	8,00	40.948.000	100,00	10,72	Dinsos PMD	
			Unit/ Buah	278,00	-	298,00		278,00		278,00		100,00		298,00	-	107,19		Dinsos PMD	
10	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Dokumen	7,00	179.627.500							-	-					Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	202.321.470	12,00	19.300.000	12,00	22.700.000	12,00	21.648.000	100,00	95,37	12,00	40.948.000	100,00	20,24	Dinsos PMD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	95,37						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	207.367.281	100,00	16.000.000	100,00	18.800.000	100,00	17.400.000	100,00	92,55	100,00	33.400.000	100,00	16,11	Dinsos PMD	
13	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	6,00	207.367.281	1,00	16.000.000	1,00	18.800.000	1,00	17.400.000	100,00	92,55	2,00	33.400.000	33,33	16,11	Dinsos PMD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	92,55						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	96,00	2.787.739.573	90,00	91.026.643	92,00	143.270.007	92,00	149.533.357	100,00	104,37	90,00	240.560.000	93,75	8,63	Dinsos PMD	
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	77.084.905	1,00	637.000	1,00	2.593.778	1,00	1.264.217	100,00	48,74	2,00	1.901.217	33,33	2,47	Dinsos PMD	
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Paket	6,00	917.804.262	1,00	49.436.433	1,00	45.000.702	1,00	78.723.058	100,00	174,94	2,00	128.159.491	33,33	13,96	Dinsos PMD	
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Paket	6,00	102.574.213			1,00	2.493.649	1,00	2.493.649	100,00	100,00	1,00	2.493.649	16,67	2,43	Dinsos PMD	
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00	131.651.983	1,00	2.603.750	1,00	2.507.878	1,00	2.367.878	100,00	94,42	2,00	4.971.628	33,33	3,78	Dinsos PMD	
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6,00	255.484.372	1,00	23.190.000	1,00	25.199.000	1,00	25.199.000	100,00	100,00	2,00	48.389.000	33,33	18,94	Dinsos PMD	
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan	690,00	1.303.139.839	17,00	15.159.460	50,00	65.475.000	50,00	39.485.555	100,00	60,31	67,00	54.645.015	9,71	4,19	Dinsos PMD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	96,40						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100,00	8.014.739.327			100,00	400.000.000	100,00	144.000.000	100,00	36,00	100,00	144.000.000	100,00	1,80	Dinsos PMD	
22	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	14,00	535.514.213			4,00				-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	65,00	3.257.353.614			18,00	250.000.000			-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
24	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	4.011.871.500	1,00	144.000.000	1,00	150.000.000	1,00	144.000.000	100,00	96,00	1,00	288.000.000	100,00	7,18	Dinsos PMD	
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	2,00	210.000.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	96,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	1.879.606.028	100,00	130.991.976	100,00	194.006.000	100,00	137.375.510	100,00	70,81	100,00	268.367.486	100,00	14,28	Dinsos PMD	
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72,00	73.051.000	12,00	1.000.000	12,00	2.000.000	12,00	1.000.000	100,00	50,00	24,00	2.000.000	33,33	2,74	Dinsos PMD	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72,00	750.165.920	12,00	39.991.976	12,00	75.406.000	12,00	44.575.510	100,00	59,11	12,00	84.567.486	16,67	11,27	Dinsos PMD	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	1.056.389.108	12,00	90.000.000	12,00	116.600.000	12,00	91.800.000	100,00	78,73	24,00	181.800.000	33,33	17,21	Dinsos PMD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	62,61						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	90,00	1.967.489.360	80,00	50.508.142	82,00	105.984.500	82,00	74.210.711	100,00	70,02	80,00	124.718.853	88,89	6,34	Dinsos PMD	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2,00	575.924.376	2,00	22.415.877	2,00	49.994.000	2,00	45.481.800	100,00	90,97	2,00	67.897.677	100,00	11,79	Dinsos PMD	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11,00	1.041.280.984	13,00	23.290.365	11,00	49.991.500	11,00	23.649.911	100,00	47,31	11,00	46.940.276	100,00	4,51	Dinsos PMD	
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	Unit	7,00	137.102.000	7,00	3.196.400	7,00	3.000.000	7,00	2.080.000	100,00	69,33	7,00	5.276.400	100,00	3,85	Dinsos PMD	
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	213.182.000	1,00	1.605.500	1,00	2.999.000	1,00	2.999.000	100,00	100,00	1,00	4.604.500	100,00	2,16	Dinsos PMD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	76,90						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	78,67						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
35	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	80,00	4.703.845.791	50,00	68.990.145	60,00	191.000.000	60,00	85.000.000	100,00	44,50	60,00	153.990.145	75,00	3,27	Dinsos PMD	
		Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100,00	-	70,00		80,00		80,00		100,00		80,00	-	80,00		Dinsos PMD	
36	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS	Orang	13,00	4.703.845.791	13,00	68.990.145	13,00	191.000.000	13,00	85.000.000	100,00	44,50	13,00	153.990.145	100,00	3,27	Dinsos PMD	
		Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Lembaga	1,00	-	1,00		1,00		1,00		100,00		1,00	-	100,00		Dinsos PMD	
37	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13,00	1.302.591.039	13,00	68.990.145	13,00	91.000.000	13,00	85.000.000	100,00	93,41	13,00	153.990.145	100,00	11,82	Dinsos PMD	
38	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1,00	3.401.254.752			1,00	100.000.000		-	-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Keterbatasan anggaran di kas daerah kabupaten pangandaran, SPM sudah diajukan ke BKAD dan sub kegiatan tersebut diajukan untuk dibayarkan pada tahun 2023
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												50,00	46,70						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	44,50						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
39	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	%	48,20	34.627.333.500	8,00	928.311.150	8,00	4.098.668.583	8,00	3.580.385.777	100,00	87,35	16,00	4.508.696.927	33,20	13,02	Dinsos PMD	
40	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina	Orang	7.964,00	5.447.678.499	179,00	197.211.150	1.040,00	464.202.583	1.040,00	444.319.777	100,00	95,72	1.219,00	641.530.927	15,31	11,78	Dinsos PMD	
41	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7.114,00	1.782.071.000	350,00	185.004.900	525,00	227.405.583	840,00	222.559.660	160,00	97,87	1.190,00	407.564.560	16,73	22,87	Dinsos PMD	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
42	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	175,00	305.433.339	9,00	8.606.250	20,00	34.997.000	20,00	25.338.617	100,00	12,56	29,00	33.944.867	16,57	11,11	Dinsos PMD	
43	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.734,00	3.360.174.160	-	3.600.000	110,00	201.800.000	110,00	196.421.500	100,00	97,33	110,00	200.021.500	6,34	5,95	Dinsos PMD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												120,00	69,25						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
44	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantl Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina	KK	607,00	29.179.655.001	36,00	731.100.000	150,00	3.634.466.000	149,00	3.136.066.000	99,33	86,29	185,00	3.867.166.000	30,48	13,25	Dinsos PMD	
45	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	607,00	364.663.303	36,00	5.600.000	150,00	37.600.000	149,00	29.200.000	99,33	77,66	185,00	34.800.000	30,48	9,54	Dinsos PMD	Setelah dilakukan verifikasi lapangan ada cpcl rutlilhau yang tidak memenuhi syarat
46	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	6,00	28.814.991.698	1,00	725.500.000	1,00	3.596.866.000	1,00	3.106.866.000	100,00	86,38	2,00	3.832.366.000	33,33	13,30	Dinsos PMD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												99,67	82,02						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												99,67	91,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
47	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	%	60,00	9.614.839.065	10,00	461.124.239	10,00	1.367.282.364	10,00	4.285.715.890	100,00	313,45	20,00	4.746.840.129	33,33	49,37	Dinsos PMD	
48	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan	Dokumen	7,00	9.614.839.065	1,00	461.124.239	1,00	1.367.282.364	1,00	4.285.715.890	100,00	313,45	2,00	4.746.840.129	28,57	49,37	Dinsos PMD	
49	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	22.711,00	4.607.226.928		345.185.689	#####	467.000.000	17.064,00	467.000.000	100,00	100,00	17.064,00	812.185.689	75,14	17,63	Dinsos PMD	
50	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	139.955,00	5.007.612.137		115.938.550	#####	260.282.364	105.151,00	243.825.790	100,00	93,68	#####	359.764.340	75,13	7,18	Dinsos PMD	
51	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang					300,00	640.000.000	19.320,00	3.574.890.100	6.440,00	558,58	19.320,00	3.574.890.100			Dinsos PMD	Sub Kegiatan tidak Masuk Ke renstra karena sub kegiatan baru yang bersumber dari DBCHT
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												2.213,33	250,75						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	313,45						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
52	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	%	100,00	8.204.547.418	100,00	191.766.966	100,00	449.828.129	100,00	518.396.494	100,00	115,24	100,00	710.163.460	100,00	8,66	Dinsos PMD	
53	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani	KK	2.500,00	1.658.500.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	
54	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2.500,00	829.250.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
55	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2.500,00	829.250.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
56	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina	Desa	14,00	6.546.047.418	2,00	191.766.966	2,00	449.828.129	2,00	518.396.494	100,00	115,24	4,00	710.163.460	28,57	10,85	Dinsos PMD	
57	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	471,00	6.546.047.418	55,00	191.766.966	61,00	449.828.129	61,00	518.396.494	100,00	115,24	116,00	710.163.460	24,63	10,85	Dinsos PMD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	115,24						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	115,24						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
58	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	%	100,00	955.529.368	100,00	31.660.000	100,00	99.999.880	100,00	71.703.151	100,00	71,70	100,00	103.363.151	100,00	10,82	Dinsos PMD	
59	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam	1,00	955.529.368	1,00	31.660.000	1,00	99.999.880	1,00	71.703.151	100,00	71,70	1,00	103.363.151	100,00	10,82	Dinsos PMD	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
60	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	31,00	955.529.368	31,00	31.660.000	31,00	99.999.880	31,00	71.703.151	100,00	71,70	31,00	103.363.151	100,00	10,82	Dinsos PMD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	71,70						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	71,70						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												100,00	78,61						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(T)						
61	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				200.203.143.810				12.291.223.608		7.602.898.651		61,86	-	7.602.898.651		3,80	Dinsos PMD	
62	Program Penataan Desa	Presentase penataan desa	%	70,00	1.212.893.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	
63	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang di tata	Desa	93,00	1.212.893.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	
64	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	118,00	305.255.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
65	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewengannya	Desa	211,00	433.153.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
66	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	93,00	474.485.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
67	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	20	20,00	94.583.500.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	
68	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Desa	24	24,00	94.583.500.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	
69	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	383.500.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
70	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	94.200.000.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
71	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	%	70,00	58.313.095.235	50,00	54.070.000	50,00	970.074.159	50,00	638.256.365	100,00	65,79	50,00	692.326.365	71,43	1,19	Dinsos PMD	
72	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	93,00	58.313.095.235	93,00	54.070.000	93,00	970.074.159	93,00	638.256.365	100,00	65,79	93,00	692.326.365	100,00	1,19	Dinsos PMD	
73	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	6,00	1.084.439.946							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
74	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	6,00	1.564.547.396							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
75	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	6,00	2.850.000.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
76	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	6,00	1.016.802.440	1,00	16.000.000	1,00	18.800.000	1,00	225.037.500	100,00	1.197,01	2,00	241.037.500	33,33	23,71	Dinsos PMD	
77	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	3.457,00	3.076.462.892			372,00	102.474.000	372,00	31.959.000	100,00	31,19	372,00	31.959.000	10,76	1,04	Dinsos PMD	
78	evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	93,00	610.510.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
79	pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	6,00	40.663.164.325							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
80	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	93,00	2.700.000.000			17,00	800.000.159	17,00	363.859.865	100,00	45,48	17,00	363.859.865	18,28	13,48	Dinsos PMD	
81	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	120,00	305.255.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
82	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	6,00	852.317.856	1,00	16.000.000	1,00	18.800.000	1,00	17.400.000	100,00	92,55	2,00	33.400.000	33,33	3,92	Dinsos PMD	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
83	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	6,00	488.408.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
84	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	558,00	731.300.000			93,00	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Keterbatasan anggaran di kas daerah kabupaten pangandaran, SPM sudah diajukan ke BKAD dan sub kegiatan tersebut diajukan untuk dibayarkan pada tahun 2023
85	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	7,00	2.369.887.380	1,00	22.070.000					-	-	1,00	22.070.000	14,29	0,93	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												80,00	273,25						
Predikat Kinerja												(T)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	65,79						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
86	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	46.093.655.575	100,00	1.285.935.250	100,00	11.321.149.449	100,00	7.655.249.336	100,00	67,62	100,00	8.941.184.586	100,00	19,40	Dinsos PMD	
87	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga	5,00	46.093.655.575	5,00	1.285.935.250	5,00	11.321.149.449	5,00	7.655.249.336	100,00	67,62	5,00	8.941.184.586	100,00	19,40	Dinsos PMD	
88	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	6,00	33.411.909.964	1,00	164.500.000	1,00	8.783.202.609	1,00	6.155.782.786	100,00	70,09	2,00	6.320.282.786	33,33	18,92	Dinsos PMD	
89	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	6,00	631.000.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
90	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	7,00	1.014.765.000							-	-	-	-	-	-	Dinsos PMD	Rasionalisasi anggaran dan bukan prioritas kabupaten
91	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	18,00	4.180.880.611	3,00	589.435.250	3,00	1.750.346.840	3,00	714.666.550	100,00	40,83	6,00	1.304.101.800	33,33	31,19	Dinsos PMD	
92	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	6,00	6.855.100.000	1,00	532.000.000	1,00	787.600.000	1,00	784.800.000	100,00	99,64	2,00	1.316.800.000	33,33	19,21	Dinsos PMD	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	70,19						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	67,62						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												100,00	66,71						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(S)						
1	DINAS KETENAGAKERJAAN																		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				37.220.370.093		3.378.361.120		3.699.952.671		3.219.492.091		87,01		4.701.980.190		12,63	Disnaker	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	85,00	23.679.557.322	60,00	1.791.656.920	65,00	2.872.520.671	64,84	2.429.423.648	99,75	84,57	62,42	4.221.080.568	73,44	17,83	Disnaker	Rasionalisasi Anggaran dan pembatasan belanja modal sehingga mempengaruhi capaian kinerja yang tidak maksimal
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	95,00	-	70,00	-	75,00	-	72,58	-	96,78	-	71,29	-	75,04	-	Disnaker	
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	85,00	-	60,00	-	65,00	-	64,84	-	99,75	-	62,42	-	73,44	-	Disnaker	
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	95,00	-	70,00	-	75,00	-	72,58	-	96,78	-	71,29	-	75,04	-	Disnaker	
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%	95,00	1.123.365.200	70,00	103.130.000	75,00	42.392.000	75,00	34.532.000	100,00	81,46	72,50	137.662.000	76,32	12,25	Disnaker	
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%	95,00	-	70,00	-	75,00	-	75,00	-	100,00	-	72,50	-	76,32	-	Disnaker	
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	95,00	-	70,00	-	75,00	-	75,00	-	100,00	-	72,50	-	76,32	-	Disnaker	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja			%
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24,00	198.270.000	4,00	22.750.000	4,00	26.700.000	4,00	22.405.000	100,00	83,91	8,00	45.155.000	33,33	22,77	Disnaker	
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5,00	41.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
8	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5,00	41.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
9	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5,00	41.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
10	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5,00	41.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12,00	720.095.200	52	80.380.000	2,00	15.692.000	2,00	12.127.000	100,00	77,28	2,00	92.507.000	16,67	12,85	Disnaker	
12	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10,00	41.000.000	-	-	2,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	80,60						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	95,00	14.459.188.524	70,00	1.382.209.980	75,00	1.991.130.169	75,00	1.688.140.880	100,00	84,78	72,50	3.070.350.860	76,31	21,23	Disnaker	
14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	24,00	13.773.613.524	19,00	1.352.776.980	20,00	1.941.944.169	10,00	1.648.979.880	50,00	84,91	10,00	3.001.756.860	41,67	21,79	Disnaker	Jumlah ASN kurang dari target
15	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5,00	41.000.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
16	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	216,00	439.575.000	36,00	29.433.000	36,00	49.186.000	36,00	39.161.000	100,00	79,62	72,00	68.594.000	33,33	15,60	Disnaker	
17	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	5,00	41.000.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10,00	41.000.000	-	-	2,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
19	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	10,00	41.000.000	-	-	2,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	70,00	41.000.000	-	-	14,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
21	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	5,00	41.000.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												75,00	82,27						
Predikat Kinerja												(S)	(T)						
22	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	95,00	186.000.000	70,00	-	75,00	25.700.000	75,00	20.880.000	100,00	81,25	72,50	20.880.000	76,31	11,23	Disnaker	
23	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
24	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	-	-	12,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
25	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	70,00	186.000.000	-	24.000.000	14,00	25.700.000	14,00	20.880.000	100,00	81,25	14,00	44.880.000	20,00	24,13	Disnaker	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	81,25						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
26	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	%	95,00	450.000.000	-	-	75,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Kegiatan prioritas
27	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	235,00	350.000.000	-	-	45,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
28	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-	-	12,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
29	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	-	5,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
30	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	110,00	50.000.000	-	-	20,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
31	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	110,00	50.000.000	-	-	20,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
32	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	95,00	2.653.619.074	49,78	51.717.900	75,00	242.706.917	73,56	197.715.148	98,08	81,46	36,78	249.433.048	38,72	9,40	Disnaker	
33	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	302,00	75.000.000	-	-	50,00	5.999.000	34,00	3.477.000	68,00	57,96	34,00	3.477.000	-	4,64	Disnaker	Rasionalisasi Anggaran sehingga mempengaruhi capaian kinerja yang tidak maksimal
34	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	500,00	1.453.720.674	2100	37.290.000	100,00	94.878.912	100,00	86.439.748	100,00	91,11	100,00	123.729.748	-	8,51	Disnaker	
35	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	302,00	341.940.400	260	1.940.400	50,00	39.998.155	38,00	27.089.000	76,00	67,73	38,00	29.029.400	-	8,49	Disnaker	Rasionalisasi Anggaran sehingga mempengaruhi capaian kinerja yang tidak maksimal
36	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	200,00	56.250.000	-	-	30,00	4.800.000	30,00	4.800.000	100,00	100,00	30,00	4.800.000	-	8,53	Disnaker	
37	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60,00	60.000.000	-	-	12,00	12.000.000	12,00	10.000.000	100,00	83,33	12,00	10.000.000	-	16,67	Disnaker	
38	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
39	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	360,00	666.708.000	2020	12.487.500	60,00	85.030.850	60,00	65.909.400	100,00	77,51	60,00	78.396.900	-	11,76	Disnaker	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												90,67	79,61						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
40	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	95,00	2.225.000.000	70,00	110.000.000	75,00	195.279.681	75,00	198.944.000	100,00	101,88	72,50	308.944.000	76,32	13,89	Disnaker	
41	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
42	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	350,00	1.445.000.000	-	-	70,00	45.289.681	70,00	48.954.000	100,00	108,09	70,00	48.954.000	-	3,39	Disnaker	
43	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
44	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	780.000.000	1,00	110.000.000	1,00	149.990.000	1,00	149.990.000	100,00	100,00	2,00	259.990.000	-	33,33	Disnaker	
45	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	104,05						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
46	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	95,00	1.404.409.940	68,14	63.262.140	75,00	216.607.880	75,00	179.342.820	100,00	82,80	37,50	242.604.960	39,47	17,27	Disnaker	
47	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	634,00	250.852.500	347,00	850.000	12,00	40.773.880	12,00	29.902.000	100,00	73,34	359,00	30.752.000	56,62	12,26	Disnaker	
48	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	63,00	335.517.440	312	31.012.140	12,00	30.175.000	12,00	26.970.820	100,00	89,38	12,00	57.982.960	-	17,28	Disnaker	
49	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	-	-	-	-	2,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
50	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	62,00	818.040.000	122	31.400.000	12,00	145.659.000	12,00	122.470.000	100,00	84,08	12,00	153.870.000	-	18,81	Disnaker	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	82,27						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
51	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100,00	1.177.974.584	75,00	81.336.900	80,00	158.704.024	80,00	109.868.800	100,00	69,23	77,50	191.205.700	77,50	16,23	Disnaker	
52	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00	549.694.584	6,00	48.906.900	6,00	132.049.024	6,00	83.808.800	100,00	63,47	12,00	132.715.700	200,00	24,14	Disnaker	
53	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	-	-	-	2,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
54	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	180,00	50.000.000	-	-	30,00	5.000.000	30,00	5.000.000	100,00	100,00	30,00	5.000.000	16,67	10,00	Disnaker	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
55	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	3,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
56	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6,00	325.040.000	1 300	29.200.000	1,00	4.995.000	1,00	4.400.000	100,00	88,09	1,00	33.600.000	-	10,34	Disnaker	
57	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6,00	253.240.000	30 1	3.230.000	1,00	16.660.000	1,00	16.660.000	100,00	100,00	1,00	19.890.000	-	7,85	Disnaker	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	87,89						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												99,79	83,26						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
58	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen RTK yang Diselesaikan	%	100,00	1.207.127.638	50,00	59.654.000	60,00	59.900.000	52,74	52.315.000	87,90	87,34	51,37	111.969.000	51,37	9,28	Disnaker	Penyusunan Dokumen RTK Makro tidak dianggarkan sehingga tidak disusun sehingga capaian kegiatan tidak maksimal
59	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK	Dokumen	2,00	1.207.127.638	1,00	59.654.000	2,00	59.900.000	1,00	52.315.000	50,00	87,34	2,00	111.969.000	100,00	9,28	Disnaker	Penyusunan Dokumen RTK Makro tidak dianggarkan sehingga tidak disusun sehingga capaian kegiatan tidak maksimal
60	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	5,00	105.249.247	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
61	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan	11,00	1.101.878.391	1,00	59.654.000	2,00	59.900.000	2,00	52.315.000	100,00	87,34	3,00	111.969.000	27,27	10,16	Disnaker	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	87,34						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												50,00	87,34						
Predikat Kinerja												(SR)	(T)						
62	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja Meningkat	%	90,00	4.794.388.353	40,00	1.199.228.050	50,00	655.812.000	49,83	653.617.043	99,67	99,67	44,92	1.852.845.093	49,91	38,65	Disnaker	
63	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan	Orang	1.200,00	4.614.388.353	200,00	1.199.228.050	200,00	655.812.000	290,00	653.617.043	145,00	99,67	490,00	1.852.845.093	40,83	40,15	Disnaker	Capaian melebihi target karena terdapat penambahan anggaran yang bersumber dari DBHCHT sehingga menambah kegiatan dan peserta pelatihan
64	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2022	Orang	1.200,00	3.709.679.835	200,00	1.199.228.050	200,00	655.812.000	290,00	653.617.043	145,00	99,67	490,00	1.852.845.093	40,83	49,95	Disnaker	Capaian melebihi target karena terdapat penambahan anggaran yang bersumber dari DBHCHT sehingga menambah kegiatan dan peserta pelatihan
65	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2022	Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
66	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	1,00	904.708.518	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												145,00	99,67						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
67	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	%	100,00	180.000.000		-	60,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Kegiatan prioritas
68	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	119,00	180.000.000	-	-	19,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												145,00	99,67						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
69	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang diserap	%	85,00	1.148.895.484	40,00	27.374.000	50,00	50.000.000	21,00	24.198.000	42,00	48,40	30,50	51.572.000	35,88	4,49	Disnaker	Hanya terdapat satu dari dua kegiatan yang dianggarkan sehingga hanya satu program yang terealisasi dan berpengaruh terhadap capaian program penempatan tenaga kerja
70	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi dalam mencari kerja	Orang	3.750,00	487.895.484	-	-	650,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Kegiatan prioritas
71	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	-	-	-	-	60,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
72	Pelayanan antar Kerja	"Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL"	Orang	-	-	-	-	30,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
73	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	3.750,00	487.895.484	-	-	650,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
74	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	-	-	-	-	20,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
75	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah kasus CPMI dan PMI menurun	%	100,00	661.000.000	80,00	27.374.000	80,00	50.000.000	40,60	24.198.000	50,75	48,40	60,30	51.572.000	60,30	7,80	Disnaker	Kasus PMI yang terjadi kurang dari target
76	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	50,00	661.000.000	5,00	27.374.000	7,00	50.000.000	4,00	24.198.000	57,14	48,40	9,00	51.572.000	18,00	7,80	Disnaker	Kasus PMI yang terjadi kurang dari target
77	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	-	-	-	-	20,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
78	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	-	-	-	-	40,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												57,14	48,40						
Predikat Kinerja												(R)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												50,75	48,40						
Predikat Kinerja												(R)	(SR)						
79	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Ketenagakerjaan pada Perusahaan Menurun	%	100,00	695.169.047	40,00	22.396.000	80,00	40.000.000	80,00	39.452.400	99,99	98,63	60,00	61.848.400	60,00	8,90	Disnaker	
80	Pengesahan Pengaturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang difasilitasi untuk Pengesahan Peraturan Perusahaannya	Dokumen	60,00	400.169.047	10,00	22.396.000	10,00	40.000.000	10,00	39.452.400	100,00	98,63	20,00	61.848.400	33,33	15,46	Disnaker	
81	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	62,00	188.879.385	10,00	22.396.000	10,00	-	-	-			10,00	22.396.000	16,13	11,86	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
82	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	"Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama"	Perusahaan	-	-	-	-	10,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
83	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	62,00	211.289.662	-	-	10,00	40.000.000	10,00	39.452.400	100,00	98,63	10,00	39.452.400	16,13	-	Disnaker	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	98,63						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
84	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang ditangani	Kegiatan	25,00	295.000.000	-	5,00	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Kegiatan prioritas
85	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	43,00	150.000.000	-	-	5,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
86	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	59,00	145.000.000	-	-	5,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
87	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	-	-	-	-	10,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
88	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	-	-	-	-	700,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	98,63						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												90,33	83,72						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(T)						
89	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											-		-	-				
90	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											-		-	-				
91	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	%	100,00	3.690.226.842	35,00	272.990.350	40,00	15.565.000	36,83	14.331.000	92,07	92,07	35,91	287.321.350	35,91	7,79	Disnaker	Perubahan SOTK
92	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	%	90,00	3.690.226.842	40,00	272.990.350	50,00	15.565.000	46,04	14.331.000	92,07	92,07	86,04	287.321.350	95,60	7,79	Disnaker	Perubahan SOTK
93	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	3,00	138.267.500	1,00	10.152.250	-	-	-	-			1,00	10.152.250	-	7,34	Disnaker	Perubahan SOTK

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
94	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	110,00	400.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Perubahan SOTK
95	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	85,00	651.173.170	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Perubahan SOTK
96	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	95,00	450.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Perubahan SOTK
97	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	111,00	2.050.786.172	1,00	262.838.100	20,00	15.565.000	5,00	14.331.000	25,00	92,07	6,00	277.169.100	5,41	13,52	Disnaker	Perubahan SOTK
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												25,00	92,07						
Predikat Kinerja												(SR)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												92,07	92,07						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
98	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin	%	100,00	410.000.000	100,00	-	100,00	365.000	100,00	365.000	100,00	100,00	100,00	365.000	100,00	0,09	Disnaker	Perubahan SOTK
99	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IUI Kecil dan Menengah yang difasilitasi perizinannya	Dokumen	150,00	410.000.000	-	-	20,00	365.000	4,00	365.000	20,00	100,00	4,00	365.000	2,67	0,09	Disnaker	Perubahan SOTK
100	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	122,00	190.000.000	-	-	20,00	365.000	4,00	365.000	20,00	100,00	4,00	365.000	3,28	0,19	Disnaker	Perubahan SOTK
101	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	122,00	220.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Perubahan SOTK
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												20,00	100,00						
Predikat Kinerja												(SR)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												20,00	100,00						
Predikat Kinerja												(SR)	(ST)						
102	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah Data Informasi Industri Kabupaten Pangandaran yang diformasikan	%	50,00	854.408.417	5,00	5.061.800	10,00	3.600.000	10,00	3.600.000	100,00	100,00	7,50	8.661.800	15,00	1,01	Disnaker	Perubahan SOTK
103	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia	Data	135,00	854.408.417	20,00	5.061.800	20,00	3.600.000	4,00	3.600.000	20,00	100,00	24,00	8.661.800	17,78	1,01	Disnaker	Perubahan SOTK
104	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	40,00	725.113.500	5,00	5.061.800	5,00	3.600.000	2,00	3.600.000	40,00	100,00	7,00	8.661.800	17,50	1,19	Disnaker	Perubahan SOTK
105	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	20,00	129.294.917	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Perubahan SOTK
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												40,00	100,00						
Predikat Kinerja												(SR)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												20,00	100,00						
Predikat Kinerja												(SR)	(ST)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												97,36	97,36						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(ST)						
106	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										-			-	-			Disnaker	
107	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				740.596.990		-		2.190.000		2.190.000			-	2.190.000			Disnaker	
108	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Rencana Kawasan Transmigrasi baru	%	100,00	235.000.000	-	-	10,00	2.190.000	-	2.190.000	-	100,00	-	2.190.000	-	0,93	Disnaker	Anggaran dipakai untuk koordinasi tetapi tidak mencapai target karena belum ada lokasi kawasan transmigrasi yang direncanakan
109	Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lokasi Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi	Lokasi	5,00	235.000.000	-	-	1,00	2.190.000	-	2.190.000	-	100,00	-	2.190.000	-	0,93	Disnaker	
110	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Dokumen	5,00	115.000.000	-	-	1,00	2.190.000	-	2.190.000	-	100,00	-	2.190.000	-	1,90	Disnaker	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
111	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	5,00	120.000.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	100,00						
Predikat Kinerja												(SR)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	100,00						
Predikat Kinerja												(SR)	(ST)						
112	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibangun	Lokasi	5,00	320.000.000		-	1,00	-		-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Program prioritas
113	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang diberangkatkan	KK	25,00	320.000.000		-	5,00	-		-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Kegiatan prioritas
114	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5,00	145.000.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
115	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga	25,00	175.000.000	-	-	5,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
116	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	-	-	-	-	10,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
117	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	-	-	-	-	24,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
118	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Laju Kemandirian Transmigran	%	70,00	185.596.990		-	25,00	-		-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Program prioritas
119	Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	Jumlah Transmigran yang sudah mandiri di Kawasan Transmigrasi	Orang	122,00	185.596.990	-	-	19,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Kegiatan prioritas
120	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	25,00	185.596.990	-	-	5,00	-	-	-			-	-	-	-	Disnaker	Bukan Sub Kegiatan prioritas
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												-	100,00						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(SR)	(ST)						
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN																		
2	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				77.671.980.400		8.096.262.039		14.670.243.377		13.233.770.983		90,21		21.330.033.022		27,46	DLHK	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	100,00	31.829.189.248	100,00	4.185.979.733	100,00	5.326.213.418	100,00	5.074.474.535	100,00	95,27	100,00	9.260.454.268	100,00	29,09	DLHK	
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	%	100,00	163.000.000	100,00	21.000.000	100,00	21.450.000	100,00	18.900.000	100,00	88,11	100,00	39.900.000	100,00	24,48	DLHK	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24,00	163.000.000	4,00	21.000.000	4,00	21.450.000	4,00	18.900.000	100,00	88,11	7,00	39.900.000	29,17	24,48	DLHK	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	88,11						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	%	100,00	21.404.099.010	100,00	3.114.930.595	100,00	3.848.054.841	100,00	3.595.811.486	100,00	93,44	100,00	6.710.742.081	100,00	31,35	DLHK	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	38,00	21.209.659.010	36,00	3.070.350.595	37,00	3.826.604.841	37,00	3.576.911.486	100,00	93,47	37,00	6.647.262.081	97,37	31,34	DLHK	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36,00	194.440.000	6,00	44.580.000	1,00	21.450.000	1,00	18.900.000	100,00	88,11	10,00	63.480.000	27,78	32,65	DLHK	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	90,79						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
9	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100,00	163.000.000	100,00	21.000.000	100,00	22.027.000	100,00	19.477.000	100,00	88,42	100,00	40.477.000	100,00	24,83	DLHK	
10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24,00	163.000.000	4,00	21.000.000	4,00	22.027.000	4,00	19.477.000	100,00	88,42	7,00	40.477.000	29,17	24,83	DLHK	

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.										
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja			%									
																			Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100,00	88,42						
																			Predikat Kinerja		(ST)	(T)						
11	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	%	100,00	207.000.000	100,00	21.000.000	100,00	21.909.000	100,00	19.359.000	100,00	88,36	100,00	40.359.000	100,00	19,50	DLHK										
12	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	3,00	44.000.000	-	-			-	-			-	-	-	-	DLHK	Adanya Rasionalisasi Anggaran									
13	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	24,00	163.000.000	1,00	21.000.000	1,00	21.909.000	1,00	19.359.000	100,00	88,36	4,00	40.359.000	16,67	24,76	DLHK										
																			Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100,00	88,36						
																			Predikat Kinerja		(ST)	(T)						
14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	701.520.000	100,00	3.000.000	100,00	17.400.000	100,00	15.300.000	100,00	87,93	100,00	18.300.000	100,00	2,61	DLHK										
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	111,00	126.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	Adanya rasionalisasi Anggaran									
16	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	48,00	125.520.000	8,00	3.000.000	8,00	17.400.000	8,00	15.300.000	100,00	87,93	14,00	18.300.000	29,17	14,58	DLHK										
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	108,00	450.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	Adanya rasionalisasi Anggaran									
																			Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100,00	87,93						
																			Predikat Kinerja		(ST)	(T)						
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	1.954.511.179	100,00	112.868.200	100,00	167.890.647	100,00	210.217.927	100,00	125,21	100,00	323.086.127	100,00	16,53	DLHK										
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	19.475.000	1,00	975.000	1,00	1.849.076	1,00	1.832.000	100,00	99,08	2,00	2.807.000	33,33	14,41	DLHK										
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9,00	351.518.089	1,00	21.518.000	1,00	40.000.000	1,00	40.000.000	100,00	100,00	2,00	61.518.000	22,22	17,50	DLHK										
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3,00	21.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	Adanya rasionalisasi anggaran									
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30,00	637.053.500	5,00	41.953.500	5,00	44.596.071	5,00	92.076.250	100,00	206,47	9,00	134.029.750	30,00	21,04	DLHK										
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	12,00	139.104.890	2,00	19.500.000	2,00	19.979.000	2,00	18.900.000	100,00	94,60	4,00	38.400.000	33,33	27,61	DLHK										
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	388,00	671.159.700	23,00	24.721.700	35,00	42.866.500	33,00	42.109.677	94,29	98,23	38,00	66.831.377	9,79	9,96	DLHK										
25	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	11,00	115.200.000	1,00	4.200.000	2,00	18.600.000	2,00	15.300.000	100,00	82,26	3,00	19.500.000	27,27	16,93	DLHK										
																			Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		99,05	113,44						
																			Predikat Kinerja		(ST)	(ST)						
26	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100,00	1.337.000.000	100,00	120.000.000	100,00	100.000.000	100,00	110.000.000	100,00	110,00	200,00	230.000.000	200,00	17,20	DLHK										
27	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang diadakan	Unit	1,00	397.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	Kegiatan ada di Tahun 2023									
28	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sewa Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	7,00	940.000.000	2,00	120.000.000	1,00	100.000.000	1,00	110.000.000	100,00	110,00	2,00	230.000.000	28,57	24,47	DLHK										
																			Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100,00	110,00						
																			Predikat Kinerja		(ST)	(ST)						
29	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	1.110.996.323	100,00	133.355.938	100,00	162.059.776	100,00	145.987.922	100,00	90,08	100,00	279.343.860	100,00	25,14	DLHK										
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6,00	20.500.000	1,00	800.000	1,00	600.000	1,00	700.000	100,00	116,67	2,00	1.500.000	33,33	7,32	DLHK										
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	218.816.323	2,00	35.755.938	2,00	43.609.976	2,00	40.738.922	100,00	93,42	4,00	76.494.860	33,33	34,96	DLHK										
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	46,00	871.680.000	6,00	96.800.000	8,00	117.849.800	8,00	104.549.000	100,00	88,71	14,00	201.349.000	30,43	23,10	DLHK										
																			Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100,00	99,60						
																			Predikat Kinerja		(ST)	(ST)						
33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100,00	4.788.062.736	100,00	638.825.000	100,00	965.422.154	100,00	939.421.200	100,00	97,31	100,00	1.578.246.200	100,00	32,96	DLHK										
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	25,00	4.700.806.196	20,00	637.375.000	20,00	962.722.154	20,00	936.721.850	100,00	97,30	20,00	1.574.096.850	80,00	33,49	DLHK										

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	37,00	30.256.540	2,00	1.450.000	7,00	2.700.000	7,00	2.699.350	100,00	99,98	3,00	4.149.350	8,11	13,71	DLHK	
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8,00	57.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	Kegiatan Dilaksanakan Pada Tahun 2023-2026
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	98,64						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	94,86						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
37	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Kualitas Air dan Udara yang memenuhi Baku Mutu	%	31,50	1.870.165.000	25,00	30.740.000	27,50	574.104.350	30,77	570.953.000	111,89	99,45	25,00	601.693.000	79,37	32,17	DLHK	
38	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penjegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Kegiatan	10,00	1.870.165.000	1,00	30.740.000	1,00	40.989.350	1,00	37.838.000	100,00	92,31	2,00	68.578.000	20,00	3,67	DLHK	
39	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	6,00	726.445.000	1,00	25.100.000	1,00	40.989.350	1,00	37.838.000	100,00	92,31	2,00	62.938.000	33,33	8,66	DLHK	
40	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2,00	543.720.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	Kegiatan dilaksanakan Tahun 2023 dan 2024
41	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	2,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	Kegiatan dilaksanakan Tahun 2023 dan 2024
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	92,31						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
42	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	Kegiatan	-	-	-	5.640.000	1,00	533.115.000	1,00	533.115.000	100,00	100,00	1,00	538.755.000	-	-	DLHK	
43	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Dokumen	-	-	-	5.640.000	1,00	533.115.000	1,00	533.115.000	100,00	100,00	1,00	538.755.000	-	-	DLHK	Tidak Ada dalam Renstra
44	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	Kegiatan dilaksanakan Tahun 2023
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	92,31						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
45	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	30,00	2.689.783.500	5,00	32.228.000	10,00	218.185.200	10,00	218.183.000	100,00	100,00	6,50	250.411.000	21,67	9,31	DLHK	
46	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun	Dokumen	4,00	1.169.000.000	-	-	1,00	9.020.200	1,00	9.018.000	100,00	99,98	1,00	9.018.000	25,00	0,77	DLHK	
47	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1,00	619.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	Kegiatan Dilaksanakan Tahun 2023
48	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00	550.000.000	-	-	1,00	9.020.200	1,00	9.018.000	100,00	99,98	1,00	9.018.000	25,00	1,64	DLHK	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	99,98						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
49	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	Dokumen	15,00	1.520.783.500	1,00	32.228.000	2,00	209.165.000	2,00	209.165.000	100,00	100,00	1,00	241.393.000	6,67	-	DLHK	
50	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/kota yang Disusun	Dokumen	12,00	1.288.555.000	-	-	2,00	209.165.000	2,00	209.165.000	100,00	100,00	4,00	209.165.000	33,33	16,23	DLHK	
51	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/kota yang Disusun	Dokumen	3,00	232.228.500	1,00	32.228.000	-	-	-	-			1,00	32.228.000	33,33	13,88	DLHK	Adanya Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
52	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan PPLH PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemda	%	70,00	395.461.600	65,00	10.461.600	74,00	9.857.350	72,73	19.405.622	98,28	196,86	55,00	29.867.222	78,57	7,55	DLHK	
53	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Pelaku Usaha	25,00	395.461.600	3,00	10.461.600	4,00	9.857.350	4,00	19.405.622	100,00	196,86	3,00	29.867.222	12,00	7,55	DLHK	
54	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pengawas Lingkungan Hidup yang mengikuti bimbingan teknis lingkungan hidup	Orang	1,00	80.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	Adanya Rasionalisasi Anggaran

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
55	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	6,00	315.461.600	1,00	10.461.600	1,00	9.857.350	1,00	19.405.622	100,00	196,86	3,00	29.867.222	50,00	9,47	DLHK	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	196,86						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	196,86						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
56	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dibina	%	51,00	426.000.000			43,00	7.817.050	14,50	5.690.000	33,72	72,79	14,50	5.690.000	28,43	1,34	DLHK	Kurangnya Sosialisasi dan Pengawasan terhadap pelaku usaha
57	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil LB3 yang memenuhi ketentuan	pelaku usaha	100,00	426.000.000			10,00	7.817.050	10,00	5.690.000	100,00	72,79	10,00	5.690.000	10,00	1,34	DLHK	
58	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	3,00	223.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	Adanya Rasionalisasi Anggaran
59	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	5,00	203.000.000	-	-	1,00	7.817.050	1,00	5.690.000	100,00	72,79	1,00	5.690.000	20,00	2,80	DLHK	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	72,79						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	72,79						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
60	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan layanan persampahan	%	31,60	28.382.473.153	29,22	2.712.806.400	24,60	7.498.468.000	31,01	6.559.898.440	126,06	87,48	19,00	9.272.704.840	60,13	32,67	DLHK	
61	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terkelola	Ton	17.772,39	28.382.473.153	15.418,94	2.712.806.400	#####	7.498.468.000	16.418,94	6.559.898.440	100,00	87,48	12.045,00	9.272.704.840	67,77	32,67	DLHK	
62	Penyusunan Kebijakan dan Stretegi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	1,00	600.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	Adanya Rasionalisasi Anggaran
63	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Paket	23,00	23.498.523.153	1,00	2.712.806.400	3,00	3.529.048.000	3,00	2.797.057.340	100,00	79,26	4,00	5.509.863.740	17,39	23,45	DLHK	
64	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	15,00	-	-	-	3,00	967.000.000	3,00	760.421.100	100,00	78,64	3,00	760.421.100	20,00	-	DLHK	Anggaran DAK Fisik
65	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	1,00	4.283.950.000	-	-	1,00	3.002.420.000	1,00	3.002.420.000	100,00	100,00	1,00	3.002.420.000	100,00	70,09	DLHK	Anggaran APBD Pronsi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	85,97						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	87,48						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
66	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang Terdaftar dan terdata	%	35,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
67	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terdaftar dan terdata	MHA	2,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
68	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	3,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	Adanya Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
69	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Indeks Perilaku Peduli Lingkungan	%	44,00	612.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
70	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat yang peduli lingkungan hidup	lembaga masyarakat	25,00	612.000.000	-	-	-	-	-	-			-	DLhk	-	-	DLHK	
71	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga Masyarakat	21,00	212.000.000	-	-	-	-	-	-			-	DLHK	-	-	DLHK	Adanya Rasionalisasi Anggarn
72	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	15,00	400.000.000	-	-	-	-	-	-			-	D.LHK	-	-	DLHK	Adanya Rasionalisasi Anggarn
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
73	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Yang Ditangani Pemda	%	76,67	245.000.000					-				-	-	-	-	DLHK	
74	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Kasus	21,00	245.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
75	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan Kasus Lingkungan	Dokumen	26,00	245.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	Adanya Rasionalisasi Anggarn
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
76	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penerapan Adiwiyata Di Lingkungan Pemerintah Daerah	%	27,00	255.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
77	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah Berperilaku Peduli dan Berbudaya Lingkungan	sekolah	6,00	255.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	
78	Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dibina dalam Program Adiwiyata	Organisasi	18,00	255.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	Adanya Rasionalisasi Anggarn
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
79	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Tutupan Lahan yang dikelola	%	1,00	10.766.907.899	0,20	1.124.046.306	0,60	1.035.598.009	0,17	785.166.386	28,33	75,82	0,37	1.909.212.692	37,00	17,73	DLHK	Kurangnya Kegiatan Penanaman Pohon
80	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Keanekaragaman hayati yang dikelola	Ha	131,40	10.766.907.899	50,00	1.124.046.306	51,40	1.035.598.009	51,40	785.166.386	100,00	75,82	24,00	1.909.212.692	18,26	17,73	DLHK	
81	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1,00	240.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DLHK	Adanya Rasionalisasi Anggarn
82	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Lokasi	11,00	9.876.907.899	11,00	1.124.046.306	11,00	1.035.598.009	11,00	797.767.533	100,00	77,03	11,00	1.921.813.839	100,00	19,46	DLHK	
83	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	5,00	650.000.000	-	-	-	-	-	4.849.000			-	4.849.000	-	0,75	DLHK	Kegiatan Dilaksanakan Pada Tahun 2023
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	77,03						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												28,33	75,82						
Predikat Kinerja												(SR)	(T)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												85,47	103,95						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(T)	(ST)						
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				50.089.691.761		2.371.492.876		5.731.921.154		4.624.789.230		80,68		6.996.282.106			Disdukcapil	
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				50.089.691.761		2.371.492.876		5.731.921.154		4.624.789.230		80,68		6.996.282.106			Disdukcapil	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100,00	44.855.219.451	100,00	2.195.492.876	100,00	5.009.205.004	100,00	4.030.937.980	100,00	80,47	100,00	6.226.430.856	100,00	13,88	Disdukcapil	Tidak semua kegiatan mendapatkan prioritas
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00							
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00							
		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00							
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
		Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	464.159.250	100,00	20.760.000	100,00	341.080.000	100,00	323.247.500	100,00	94,77	100,00	344.007.500	100,00	74,11		
		Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Disdukcapil	Tidak semua sub kegiatan mendapatkan prioritas
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	45,00	184.104.250	5,00	20.760.000	8,00	31.480.000	8,00	25.147.500	100,00	79,88	13,00	45.907.500	28,89	24,94	Disdukcapil	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	7,00	31.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5,00	11.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
8	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5,00	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
9	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5,00	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30,00	99.105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24,00	115.600.000	-	-	4,00	309.600.000	4,00	298.100.000	100,00	96,29	4,00	298.100.000	16,67	257,87	Disdukcapil	Sumber Dana Sub Kegiatan Bersumber dari SILPA DAK Non Fisik Tahun 2021, Dianggarkan kembali di Anggaran Perubahan Tahun 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	88,08						
Predikat Kinerja												(S)	(T)						
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100,00	20.366.881.220	100,00	1.846.816.373	100,00	2.701.534.733	100,00	2.194.015.658	100,00	81,21	100,00	4.040.832.031	100,00	19,84	Disdukcapil	Tidak semua sub kegiatan mendapatkan prioritas
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	25,00	18.422.006.220	17,00	1.827.006.373	25,00	2.672.250.483	17,00	2.171.890.658	68,00	81,28	17,00	3.998.897.031	68,00	21,71	Disdukcapil	-
14	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72,00	187.600.000	12,00	19.300.000	12,00	26.100.000	12,00	21.285.000	100,00	81,55	24,00	40.585.000	33,33	21,63	Disdukcapil	-
15	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	72,00	986.110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6,00	725.865.000	1,00	510.000	1,00	1.494.000	1,00	640.000	100,00	42,84	2,00	1.150.000	33,33	0,16	Disdukcapil	-
17	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	60,00	14.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	90,00	25.000.000	-	-	18,00	1.690.250	5,00	200.000	27,78	11,83	5,00	200.000	5,56	0,80	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
19	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10,00	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												73,94	54,37						
Predikat Kinerja												(S)	(R)						
20	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100,00	214.100.000	100,00	19.300.000	100,00	25.029.500	100,00	21.294.500	100,00	85,08	100,00	40.594.500	100,00	18,96	Disdukcapil	Tidak semua sub kegiatan mendapatkan prioritas
21	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	60,00	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
22	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	70,00	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
23	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	82,00	183.100.000	12,00	19.300.000	14,00	25.029.500	12,00	21.294.500	85,71	85,08	24,00	40.594.500	29,27	22,17	Disdukcapil	-
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												85,71	85,08						
Predikat Kinerja												(T)	(T)						
24	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	1.017.690.000	100,00	16.000.000	100,00	81.231.860	100,00	79.131.860	100,00	97,41	100,00	95.131.860	100,00	9,35	Disdukcapil	Tidak semua sub kegiatan mendapatkan prioritas
25	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	265,00	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
26	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	72,00	133.800.000	12,00	16.000.000	12,00	18.800.000	12,00	16.700.000	100,00	88,83	24,00	32.700.000	33,33	24,44	Disdukcapil	-
27	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3,00	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
28	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1,00	25.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
29	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	53,00	408.370.000	-	-	53,00	62.431.860	53,00	62.431.860	100,00	100,00	53,00	62.431.860	100,00	15,29	Disdukcapil	Sumber Dana Sub Kegiatan Bersumber dari SILPA DAK Non Fisik Tahun 2021, Dianggarkan kembali di Anggaran Perubahan Tahun 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	94,41						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
30	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	13.888.812.739	100,00	22.242.060	100,00	1.435.643.815	100,00	1.085.929.823	100,00	75,64	100,00	1.108.171.883	100,00	7,98	Disdukcapil	-
31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	87,00	50.873.180	12,00	825.000	15,00	5.874.772	15,00	2.930.000	100,00	49,87	27,00	3.755.000	31,03	7,38	Disdukcapil	-
32	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	112,00	12.671.541.577	12,00	14.822.060	20,00	1.170.366.275	10,00	981.677.098	50,00	83,88	22,00	996.499.158	19,64	7,86	Disdukcapil	Efisiensi anggaran pada sub kegiatan
33	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	87,00	32.596.632	12,00	1.550.000	15,00	2.391.418	15,00	2.036.000	100,00	85,14	27,00	3.586.000	31,03	11,00	Disdukcapil	-
34	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	51,00	53.900.000	1,00	1.945.000	10,00	8.592.000	10,00	1.292.250	100,00	15,04	11,00	3.237.250	21,57	6,01	Disdukcapil	Rasionalisasi anggaran sub kegiatan
35	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96,00	54.810.000	12,00	1.800.000	24,00	960.000	24,00	960.000	100,00	100,00	36,00	2.760.000	37,50	5,04	Disdukcapil	-
36	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	72,00	228.750.000	-	-	12,00	9.996.000	12,00	4.596.000	100,00	45,98	12,00	4.596.000	16,67	2,01	Disdukcapil	-
37	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	237,00	778.612.400	12,00	1.300.000	45,00	237.463.350	45,00	92.438.475	100,00	38,93	57,00	93.738.475	24,05	12,04	Disdukcapil	-
38	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2,00	17.728.950	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												92,86	59,83						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
39	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100,00	3.934.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Kegiatan tidak prioritas
40	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	24,00	920.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
41	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	9,00	370.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
42	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00	945.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
43	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	974.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
44	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	725.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
45	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	2.497.485.674	100,00	241.925.943	100,00	262.304.000	100,00	198.165.539	100,00	75,55	100,00	440.091.482	100,00	17,62	Disdukcapil	Tidak semua sub kegiatan mendapatkan prioritas
46	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72,00	87.438.000	12,00	670.000	12,00	3.240.000	12,00	915.000	100,00	28,24	24,00	1.585.000	33,33	1,81	Disdukcapil	Rasionalisasi anggaran sub kegiatan
47	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72,00	1.860.723.674	12,00	190.919.943	12,00	207.264.000	12,00	152.350.539	100,00	73,51	24,00	343.270.482	33,33	18,45	Disdukcapil	-
48	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00	80.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
49	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	469.324.000	12,00	50.336.000	12,00	51.800.000	12,00	44.900.000	100,00	86,68	24,00	95.236.000	33,33	20,29	Disdukcapil	-
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	62,81						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
50	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100,00	2.472.090.568	100,00	28.448.500	100,00	162.381.096	100,00	129.153.100	100,00	79,54	100,00	157.601.600	100,00	6,38	Disdukcapil	Tidak semua sub kegiatan mendapatkan prioritas
51	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	19,00	515.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
52	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9,00	794.590.568	9,00	26.198.500	9,00	112.381.096	9,00	106.653.100	100,00	94,90	9,00	132.851.600	100,00	16,72	Disdukcapil	-
53	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150,00	897.500.000	24,00	2.250.000	20,00	50.000.000	20,00	22.500.000	100,00	45,00	44,00	24.750.000	29,33	2,76	Disdukcapil	-

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
54	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	130.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
55	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	135.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	69,95						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	84,17						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
56	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan identitas Kependudukan	%	100,00	2.837.458.679	89,32	32.000.000	100,00	318.905.000	109,34	257.110.000	109,34	80,62	99,33	289.110.000	99,33	10,19	Disdukcapil	Ada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas pendanaan; Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Administrasi Kependudukan.
57	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan pendafaran penduduk	Desa	93,00	506.833.679	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Kegiatan tidak prioritas
58	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen hasil pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	465,00	306.833.679	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
59	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	5,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
60	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang terlayani dalam pendaftaran penduduk	Orang	326.052,00	2.280.625.000	-	32.000.000	#####	318.905.000	59.482,00	257.110.000	97,51	80,62	59.482,00	289.110.000	18,24	12,68	Disdukcapil	Tidak semua sub kegiatan mendapatkan prioritas
61	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	12,00	342.600.000	2,00	32.000.000	2,00	37.600.000	2,00	33.400.000	100,00	88,83	4,00	65.400.000	33,33	19,09	Disdukcapil	Pendataan penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan sebagai upaya Mitigasi pada Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
62	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	317.315,00	230.400.000	-	-											Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
63	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	266.000,00	1.375.200.000	-	-	#####	243.705.000	56.359,00	195.210.000	110,51	80,10	56.359,00	195.210.000	21,19	14,20	Disdukcapil	-
64	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	Laporan	31.131,00	64.825.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
65	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	38.331,00	267.600.000	-	-	5.000,00	37.600.000	3.123,00	28.500.000	62,46	75,80	3.123,00	28.500.000	8,15	10,65	Disdukcapil	-
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												90,99	81,58						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
66	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang terlaksana	Laporan	60,00	50.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Kegiatan tidak prioritas
67	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	20,00	50.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												97,51	80,62						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
68	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100,00	1.332.796.009	97,30	96.000.000	100,00	145.893.900	123,66	122.300.000	123,66	83,83	110,48	218.300.000	110,48	16,38	Disdukcapil	Ada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas pendanaan; Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Akta-Akta Pencatatan Sipil.
69	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil	Orang	70.000,00	1.177.679.936	-	96.000.000	#####	145.893.900	11.723,00	122.300.000	90,18	83,83	11.723,00	218.300.000	16,75	18,54	Disdukcapil	Ada beberapa sub kegiatan yang tidak menjadi prioritas
70	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	22.588,00	183.380.062	-	-	424,00	14.988.900	254,00	12.425.000	59,91	82,89	254,00	12.425.000	1,12	6,78	Disdukcapil	-
71	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	3,00	802.800.000	3,00	96.000.000	3,00	130.905.000	3,00	109.875.000	100,00	83,93	6,00	205.875.000	200,00	25,64	Disdukcapil	-
72	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen	20,00	24.151.648	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
73	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	5,00	167.348.226	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												79,95	83,41						
Predikat Kinerja												(T)	(T)						
74	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil yang terlaksana	Laporan	60,00	137.780.513	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Kegiatan tidak prioritas
75	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	5,00	137.780.513					-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
76	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang diselenggarakan	Layanan	4,00	17.335.560	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Kegiatan tidak prioritas
77	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	20,00	17.335.560	-	-			-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												90,18	83,83						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
78	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik	%	100,00	1.064.217.622	100,00	48.000.000	100,00	257.917.250	100,00	214.441.250	100,00	83,14	100,00	262.441.250	100,00	24,66	Disdukcapil	Ada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak mendapat prioritas
79	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dokumen	30,00	515.603.998	-	16.000.000	6,00	72.874.750	6,00	33.598.750	100,00	46,10	6,00	49.598.750	20,00	9,62	Disdukcapil	Beberapa Sub kegiatan tidak mendapat prioritas
80	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	125,00	186.814.750	10,00	16.000.000	2,00	71.614.750	2,00	32.338.750	100,00	45,16	12,00	48.338.750	9,60	25,88	Disdukcapil	-
81	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	23,00	74.589.248	-	-	4,00	1.260.000	1,00	1.260.000	25,00	100,00	1,00	1.260.000	4,35	1,69	Disdukcapil	-
82	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	60,00	254.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												62,50	72,58						
Predikat Kinerja												(R)	(S)						
83	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan	Jenis	3,00	472.040.000	-	32.000.000	3,00	185.042.500	3,00	180.842.500	100,00	97,73	3,00	212.842.500	100,00	45,09	Disdukcapil	-
84	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	120,00	322.040.000	-	32.000.000	12,00	37.600.000	12,00	33.400.000	100,00	88,83	12,00	65.400.000	10,00	20,31	Disdukcapil	-
85	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	1,00	150.000.000	-	-	1,00	147.442.500	1,00	147.442.500	100,00	100,00	1,00	147.442.500	100,00	98,30	Disdukcapil	-
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	94,41						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
86	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	60,00	51.573.624	-	-			-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Kegiatan tidak prioritas
87	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	20,00	51.573.624	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
88	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diterbitkan	Dokumen	10,00	25.000.000	-	-			-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Kegiatan tidak prioritas
89	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	22,00	25.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disdukcapil	Sub Kegiatan Tdak Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	71,92						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												108,25	82,02						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(T)						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
1	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				53.048.805.701		6.888.190.076		9.562.942.406		9.006.735.664		94,18		5.467.801.738		10,31		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK				31.126.024.130		2.763.421.999		3.471.448.406		3.411.592.168		98,28		5.467.801.738		17,57		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	100,00	26.692.147.381	80,00	2.530.764.494	80,00	3.094.651.656	80,00	2.347.183.101	100,00	75,85	80,00	4.877.947.595	80,00	18,27	DKBP3A	
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00									
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	100,00		80,00		80,00		100,00									
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00		100,00		100,00		100,00									
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	420.800.000	100,00	36.700.000	100,00	38.400.000	100,00	37.000.000	100,00	96,35	100,00	73.700.000	100,00	17,51	DKBP3A	
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00									
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00									
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14,00	370.800.000	2,00	36.700.000	2,00	38.400.000	2,00	37.000.000	100,00	96,35	4,00	73.700.000	28,57	19,88	DKBP3A	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	21,00	50.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	96,35						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100,00	16.613.486.781	100,00	2.079.595.341	100,00	2.468.814.261	100,00	2.453.124.433	100,00	99,36	100,00	4.532.719.774	100,00	27,28		
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	23,00	16.321.886.781	15,00	2.043.005.341	16,00	2.447.814.261	14,00	2.433.824.433	87,50	99,43	15,00	4.476.829.774	65,22	27,43	DKBP3A	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	98,00	261.600.000	12,00	36.590.000	14,00	21.000.000	14,00	19.300.000	100,00	91,90	26,00	55.890.000	26,53	21,36	DKBP3A	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	30.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	126,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	7,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												93,75	95,67						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
13	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Jenis dan Unit	32 dan 420	222.000.000	22 dan 236	19.300.000	32 dan 380	21.000.000	24 dan 257	21.000.000	68,00	100,00	24 dan 257	40.300.000	68,00	18,15		
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	74,00	222.000.000	12,00	19.300.000	12,00	21.000.000	12,00	21.000.000	100,00	100,00	24,00	40.300.000	32,43	18,15	DKBP3A	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
15	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	981.720.000	100,00	25.800.000	100,00	34.800.000	100,00	32.000.000	100,00	91,95	100,00	57.800.000	100,00	5,89		
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Set	520,00	252.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
17	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	168,00	384.720.000	24,00	25.800.000	24,00	34.800.000	22,00	32.000.000	91,67	91,95	46,00	57.800.000	27,38	15,02	DKBP3A	
18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25,00	85.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
19	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100,00	130.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100,00	130.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												91,67	91,95						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
21	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	2.646.053.641	100,00	56.269.036	100,00	236.167.427	100,00	223.781.341	100,00	94,76	100,00	280.050.377	100,00	10,58		

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	49,00	55.362.295	3,00	216.840	6,00	4.240.000	6,00	4.240.000	100,00	100,00	9,00	4.456.840	18,37	8,05	DKBP3A	
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	349,00	1.083.660.377	10,00	22.352.206	46,00	130.905.615	46,00	131.428.398	100,00	100,40	56,00	153.780.604	16,05	14,19	DKBP3A	
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	205,00	830.879.619	21,00	5.031.318	27,00	9.138.725	27,00	7.745.443	100,00	84,75	48,00	12.776.761	23,41	1,54	DKBP3A	
25	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	42,00	100.746.650	3,00	2.872.100	3,00	6.508.087	3,00	6.506.150	100,00	99,97	6,00	9.378.250	14,29	9,31	DKBP3A	
26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	9,00	87.120.000	7,00	6.000.000	9,00	5.580.000	9,00	5.300.000	100,00	94,98	7,00	11.300.000	77,78	12,97	DKBP3A	
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	342,00	488.284.700	16,00	19.796.572	50,00	79.795.000	50,00	68.561.350	100,00	85,92	66,00	88.357.922	19,30	18,10	DKBP3A	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	94,34						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
28	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100,00	2.961.041.306	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	100,00	100,00	240.000.000	100,00	8,11		
29	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	75,00	690.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
30	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	300,00	244.517.575	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	281,00	1.009.523.731	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
32	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	5,00	225.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
33	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	21,00	792.000.000	3,00	120.000.000	3,00	120.000.000	3,00	120.000.000	100,00	100,00	6,00	240.000.000	28,57	30,30	DKBP3A	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
34	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	1.291.079.612	100,00	116.614.215	100,00	117.869.896	100,00	112.777.164	100,00	95,68	100,00	229.391.379	100,00	17,77		
35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	84,00	42.400.000	12,00	1.151.500	12,00	3.500.000	12,00	3.500.000	100,00	100,00	24,00	4.651.500	28,57	10,97	DKBP3A	
36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	252,00	197.299.612	36,00	19.967.715	36,00	22.569.896	36,00	21.677.164	100,00	96,04	72,00	41.644.879	28,57	21,11	DKBP3A	
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	420,00	1.051.380.000	60,00	95.495.000	60,00	91.800.000	60,00	87.600.000	100,00	95,42	120,00	183.095.000	28,57	17,41	DKBP3A	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	97,16						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
38	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100,00	1.555.966.041	100,00	76.485.902	100,00	57.600.072	100,00	54.712.592	100,00	94,99	100,00	131.198.494	100,00	8,43		
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1,00	199.643.718	1,00	17.725.814	1,00	20.684.540	1,00	23.986.320	100,00	115,96	1,00	41.712.134	100,00	20,89	DKBP3A	
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	61,00	261.629.823	37,00	52.929.950	32,00	31.665.532	32,00	25.476.272	100,00	80,45	37,00	78.406.222	60,66	29,97	DKBP3A	
41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	258,00	163.692.500	17,00	5.830.138	14,00	5.250.000	14,00	5.250.000	100,00	100,00	31,00	11.080.138	12,02	6,77	DKBP3A	
42	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	5,00	100.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	
43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12,00	831.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	98,81						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												96,00	96,64						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
44	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	18,55	1.700.521.063	9,48	157.701.505	11,27	175.400.000	11,27	171.199.888	100,00	97,61	9,48	328.901.393	72,35	19,34		
		2. Persentase Kelembagaan PUG aktif	%	96,15		90,00		92,31		92,31		100,00							
45	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun	Dokumen	132,00	341.191.909	1,00	17.585.000	1,00	8.000.000	1,00	8.000.000	100,00	100,00	2,00	25.585.000	1,52	7,50		

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
46	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	12,00	122.873.125	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
47	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	230,00	72.772.728	2,00	17.585.000	1,00	8.000.000	1,00	8.000.000	100,00	100,00	3,00	25.585.000	1,30	35,16	DKBP3A	
48	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	40,00	73.273.028	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
49	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	40,00	72.273.028	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
50	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Orang	100,00	1.220.729.154	4.634,00	140.116.505	100,00	167.400.000	100,00	163.199.888	100,00	97,49	100,00	303.316.393	100,00	24,85		
51	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	14,00	1.013.729.154	4,00	140.116.505	1,00	150.000.000	1,00	148.599.888	100,00	99,07	5,00	288.716.393	35,71	28,48	DKBP3A	
52	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Organisasi	7,00	207.000.000	-	-	1,00	17.400.000	1,00	14.600.000	100,00	83,91	1,00	14.600.000	14,29	7,05	DKBP3A	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	91,49						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
53	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	Lembaga	9,00	138.600.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
54	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	9,00	46.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
55	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	15,00	46.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
56	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2,00	46.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	98,75						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
57	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	%	90,00	473.129.341	83,00	17.400.000	-	-	-	-			83,00	17.400.000	92,22	3,68		
58	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan yang dilaksanakan	Regulasi (Perda/Perbup)	7,00	129.522.674	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
59	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	7,00	64.761.337	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
60	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	13,00	64.761.337	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
61	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	Kasus	13,00	84.561.335	2,00	17.400.000	-	-	-	-			2,00	17.400.000	15,38	20,58		
62	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	13,00	19.800.000	2,00	17.400.000	-	-	-	-			2,00	17.400.000	15,38	87,88	DKBP3A	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
63	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	13,00	64.761.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
64	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	Lembaga	1,00	259.045.332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5,00	64.761.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
66	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	7,00	64.761.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
67	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	20,00	64.761.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
68	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	6,00	64.761.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
69	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)	%	100,00	1.191.664.670	-	-	20,00	172.000.000	20,00	158.000.000	100,00	91,86	20,00	158.000.000	20,00	13,26		
70	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PEKKA yang mendapatkan pelatihan	Kelompok	7,00	1.191.664.670	-	-	1,00	172.000.000	1,00	158.000.000	100,00	91,86	1,00	158.000.000	14,29	13,26		
71	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	9,00	165.832.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
72	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	62,00	1.025.832.335	-	-	12,00	172.000.000	12,00	158.000.000	100,00	91,86	12,00	158.000.000	19,35	15,40	DKBP3A	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	91,86						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	91,86						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
73	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid	%	80,00	133.832.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
74	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak yang tersusun	Dokumen	5,00	133.832.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
75	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	5,00	81.916.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
76	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	51.916.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
77	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1. Persentase pemenuhan kelompok hak anak	%	100,00	88.665.868	100,00	57.556.000	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	Efisiensi Anggaran	
		2. Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak	Nilai Pratama	Nindya (700-800)	469.398.802	-	-	500-600	29.396.750	Madya (600-700)	27.996.750	115,00	5,96	#VALUE!	85.552.750	-	18,23		
78	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelembagaan PHA yang terbentuk	Lembaga	7,00	88.665.868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
79	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	21,00	44.332.933	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
80	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	44.332.935	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													-		-				
Predikat Kinerja													(SR)		(SR)				
81	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	Lembaga	9,00	469.398.802	2,00	57.556.000	1,00	29.396.750	1,00	27.996.750	100,00	95,24	3,00	85.552.750	33,33	18,23		
82	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	41,00	44.332.934	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
83	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Dokumen	35,00	144.332.934	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
84	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	44.332.934	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
85	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	7,00	236.400.000	1,00	57.556.000	1,00	29.396.750	1,00	27.996.750	100,00	95,24	2,00	85.552.750	28,57	36,19	DKBP3A	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													100,00		95,24				
Predikat Kinerja													(ST)		(ST)				
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)													100,00		95,24				
Predikat Kinerja													(ST)		(ST)				
86	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	%	10,00	376.664.670	-	-	18,00	-	-	-			-	-	-	-		
87	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Lembaga	11,00	210.665.868	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
88	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	20,00	155.332.934	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
89	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	20,00	55.332.934	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													-		-				
Predikat Kinerja													(SR)		(SR)				
90	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tersedia	Lembaga	10,00	55.332.934	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
91	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10,00	55.332.934	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													-		-				
Predikat Kinerja													(SR)		(SR)				
92	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	Lembaga	10,00	110.665.868	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
93	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	15,00	55.332.934	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
94	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	25,00	55.332.934	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													-		-				
Predikat Kinerja													(SR)		(SR)				
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)													-		-				
Predikat Kinerja													(SR)		(SR)				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)													103,75		67,82				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													(ST)		(S)				

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
95	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				21.922.781.571		4.124.768.077		6.091.494.000		5.595.143.496		91,85		9.719.911.573		44,34		
96	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA)	%	100,00	1.617.448.429	-	-	100,00	113.000.000	100,00	124.921.400	100,00	110,55	100,00	124.921.400	100,00	7,72		
		2. Validitas data keluarga beresiko stunting	%	100,00	-	-	-	100,00	15.980.000	100,00	15.980.000	100,00	100,00	100,00	15.980.000	100,00	-		
97	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah koordinasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dilaksanakan	Kali kegiatan	5,00	1.069.907.324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
98	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	25.029.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
99	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Dokumen	1,00	16.024.174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
100	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Dokumen	1,00	16.024.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
101	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen	5,00	91.793.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
102	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Dokumen	5,00	91.793.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
103	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	91.793.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
104	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	91.793.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
105	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan	5,00	93.293.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
106	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Laporan	5,00	93.293.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
107	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Dokumen	5,00	91.793.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
108	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisasi	5,00	91.793.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
109	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisasi	5,00	93.293.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
110	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Laporan	5,00	91.793.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
111	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	5,00	90.397.865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
112	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen pemetaan pengendalian penduduk cakupan daerah yang disusun	Dokumen	5,00	547.541.105	-	-	1,00	113.000.000	1,00	124.921.400	100,00	110,55	1,00	124.921.400	20,00	22,81		
		2. Jumlah dokumen data keluarga beresiko stunting	Dokumen	10,00	-	-	-	2,00	15.980.000	2,00	15.980.000	100,00	100,00	2,00	15.980.000	20,00	-		

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.				
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja			%			
113		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit	6,00	97.793.130	-	-	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	100,00	100,00	1,00	5.000.000	16,67	5,11	DKBP3A			
114		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	10,00	85.793.130	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran		
115		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1. Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	17,00	82.793.130	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran		
			2. Jumlah dokumen data keluarga beresiko stunting tingkat RT	Dokumen	15.980,00	-	-	-	3.196,00	15.980.000	3.196,00	15.980.000	100,00	100,00	3.196,00	15.980.000	20,00	-	DKBP3A			
116		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	17,00	100.575.455	-	-	-	-	1,00	15.000.000			1,00	15.000.000	5,88	14,91	DKBP3A	Efisiensi Anggaran		
117		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	72,00	87.793.130	-	-	12,00	108.000.000	12,00	104.921.400	100,00	97,15	12,00	104.921.400	16,67	119,51	DKBP3A			
118		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	6,00	92.793.130	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran		
												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100,00	99,05							
												Predikat Kinerja		(ST)	(ST)							
												Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)		100,00	105,27							
												Predikat Kinerja		(ST)	(ST)							
119		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Prevalensi peserta KB aktif	%	75,84	16.407.224.196	64,46	4.124.768.077	75,64	3.236.310.000	75,64	3.170.474.100	100,00	97,97	64,46	7.295.242.177	84,99	44,46				
			2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting	%	75,00	-	-	-	75,00	196.000.000	75,00	192.200.000	100,00	98,06	75,00	192.200.000	100,00	-				
120		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1. Jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan	Kali Kegiatan	17,00	7.236.271.658	4,00	1.113.544.100	2,00	694.015.000	2,00	672.900.250	100,00	96,96	6,00	1.786.444.350	35,29	24,69				
			2. Jumlah kali rakor tentang stunting tingkat kecamatan	Kali Kegiatan	60,00	-	-	-	12,00	196.000.000	12,00	192.200.000	100,00	98,06	12,00	192.200.000	20,00	-				
121		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	4,00	239.840.277	-	-	4,00	4.375.000	4,00	4.000.000	100,00	91,43	4,00	4.000.000	100,00	1,67	DKBP3A			
122		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1,00	84.672.588	-	-	1,00	25.000.000	1,00	24.990.000	100,00	29,51	1,00	24.990.000	100,00	29,51	DKBP3A	Efisiensi Anggaran		
123		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	63,00	106.207.317	4,00	326.369.250	-	-	-	-			4,00	326.369.250	6,35	307,29	DKBP3A	Dalam kolom Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 melebihi 100% dikarenakan dalam perencanaan tahunan ada penambahan DAK		
124		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	4,00	1.255.419.434	-	-	4,00	70.640.000	4,00	69.640.000	100,00	98,58	4,00	69.640.000	100,00	5,55	DKBP3A			
125		Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah media yang digunakan dalam pencitraan program KKBPK	Jenis	24,00	338.765.739	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran		
126		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1. Jumlah laporan mekanisme operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi	Laporan	62,00	280.816.454	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran		
			2. Jumlah peserta rakor tentang stunting tingkat kecamatan	Orang	1.560,00	-	-	-	1.560,00	156.000.000	1.560,00	154.200.000	100,00	98,85	1.560,00	154.200.000	100,00	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran		
127		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	72,00	601.920.739	12,00	555.788.850	12,00	405.000.000	12,00	392.770.250	100,00	96,98	24,00	948.559.100	33,33	157,59	DKBP3A			
128		Pengendalian Program KKBPK	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	84,00	4.328.629.110	12,00	231.386.000	12,00	189.000.000	12,00	181.500.000	100,00	96,03	24,00	412.886.000	28,57	9,54	DKBP3A			
				2. Jumlah TPK (Tim Pendamping Keluarga) yang di audit	Orang	320,00	-	-	-	320,00	40.000.000	320,00	38.000.000	100,00	95,00	320,00	38.000.000	100,00	-	DKBP3A		
												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100,00	86,63							
												Predikat Kinerja		(ST)	(T)							
129		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan	Orang	63,00	998.843.403	63,00	446.400.000	63,00	446.400.000	63,00	446.400.000	100,00	100,00	63,00	892.800.000	100,00	89,38				

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
130	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	4,00	117.927.498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
131	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	24,00	134.132.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
132	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	72,00	184.078.218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
133	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1.123,00	562.704.893	1.123,00	446.400.000	1.123,00	446.400.000	1.123,00	446.400.000	100,00	100,00	1.123,00	892.800.000	100,00	158,66	DKBP3A	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
134	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan	Kali kegiatan	2.064,00	5.516.020.561	204,00	2.058.703.977	336,00	1.561.145.000	336,00	1.516.733.850	100,00	97,16	540,00	3.575.437.827	26,16	64,82		
135	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	72,00	553.125.442	12,00	43.978.500	12,00	7.650.000	12,00	7.639.000	100,00	99,86	24,00	51.617.500	33,33	9,33	DKBP3A	
136	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Petugas yang mengikuti peningkatan kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang	16,00	77.304.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
137	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	32.867,00	3.020.487.506	12.619,00	1.088.188.227	1.817,00	471.651.000	1.817,00	434.707.600	100,00	92,17	14.436,00	1.522.895.827	43,92	50,42	DKBP3A	
138	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	72,00	172.713.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
139	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	72,00	85.831.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
140	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	37,00	884.179.568	29,00	926.537.250	10,00	1.073.444.000	10,00	1.065.987.250	100,00	99,31	39,00	1.992.524.500	105,41	225,35	DKBP3A	
141	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang	1.787,00	86.783.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
142	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	72,00	185.850.735	-	-	12,00	8.400.000	12,00	8.400.000	100,00	100,00	12,00	8.400.000	16,67	4,52	DKBP3A	
143	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	1.787,00	113.324.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
144	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	86,00	223.095.562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
145	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	17,00	113.324.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	97,83						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
146	Pembinaan dan Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kampung KB yang mendapat pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Kampung kb	31,00	2.656.088.574	5,00	506.120.000	31,00	534.750.000	31,00	534.440.000	100,00	99,94	31,00	1.040.560.000	100,00	39,18		
147	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	4,00	123.557.536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
148	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	72,00	833.719.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
149	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	31,00	865.092.058	12,00	506.120.000	31,00	534.750.000	31,00	534.440.000	100,00	99,94	31,00	1.040.560.000	100,00	120,28	DKBP3A	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
150	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	72,00	833.719.490	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													100,00	99,94					
Predikat Kinerja													(ST)	(ST)					
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)													100,00	98,65					
Predikat Kinerja													(ST)	(ST)					
151	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1. Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera	%	80,02	3.898.108.946	-	-	76,02	691.964.000	76,02	676.878.000	100,00	97,82	76,02	676.878.000	95,00	17,36		
		2. Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan	%	75,00	-	-	-	75,00	1.838.240.000	75,00	1.414.689.996	100,00	76,96	75,00	1.414.689.996	100,00	-		
152	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	Kelompok	387,00	2.305.929.556	-	-	2,00	691.964.000	2,00	676.878.000	100,00	97,82	2,00	676.878.000	0,52	29,35		
		2. Jumlah pembinaan tentang stunting yang dilaksanakan	Kali Kegiatan	60,00	-	-	-	12,00	1.838.240.000	12,00	1.414.689.996	100,00	76,96	12,00	1.414.689.996	20,00	-		
153	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	120,00	-	-	-	40,00	641.964.000	39,00	629.055.500	97,50	97,99	39,00	629.055.500	32,50	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
154	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	72,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
155	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	25,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
156	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1. Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	500,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
		2. Jumlah sasaran pembinaan stunting	Orang	13.500,00	-	-	-	#####	1.838.240.000	13.500,00	1.414.689.996	100,00	76,96	13.500,00	1.414.689.996	100,00	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
157	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	100,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
158	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	60,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
159	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	10,00	1.969.057.800	-	-	2,00	50.000.000	2,00	47.822.500	100,00	95,65	2,00	47.822.500	20,00	2,43	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
160	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	1,00	64.478.626	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
161	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	1,00	64.478.626	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
162	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	30,00	64.478.626	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
163	Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	30,00	64.478.626	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
164	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	2,00	78.957.252	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Efisiensi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													99,17	90,20					
Predikat Kinerja													(ST)	(ST)					
165	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kelompok	5,00	1.592.179.390	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
166	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	20,00	592.393.130	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
167	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	4,00	592.393.130	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
168	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	20,00	407.393.130	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKBP3A	Bukan Termasuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	87,39						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												100,00	96,89						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(ST)						
1	DINAS PERHUBUNGAN																		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				112.156.209.750		10.657.542.008		65.202.433.468		56.860.532.522								
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	100,00	78.986.992.000	100,00	9.300.514.294	80,00	10.997.861.118	80,00	10.747.939.087	100,00	97,73	90,00	20.048.453.381	90,00	25,38	DISHUB	
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00						
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	100,00		100,00		80,00		80,00		100,00	90,00	90,00					
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	100,00					
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	346.053.896	100,00	19.860.000	100,00	46.367.000	100,00	23.517.500	100,00	50,72	100,00	43.377.500	100,00	12,53	DISHUB	
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00						
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00						
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4,00	333.442.343	3,00	19.860.000	4,00	45.367.000	4,00	23.517.500	100,00	51,84	3,50	43.377.500	87,50	13,01	Refocusing Anggaran	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,00	12.611.553	-	-	4,00	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												50,00	25,92						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100,00	15.471.984.706	100,00	1.973.245.293	100,00	2.600.002.465	100,00	2.330.672.694	100,00	89,64	100,00	4.303.917.987	100,00	27,82	DISHUB	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	20,00	14.705.344.416	20,00	1.926.555.293	20,00	2.498.102.465	18,00	2.240.222.694	90,00	89,68	19,00	4.166.777.987	95,00	28,34		
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	206.758.410	12,00	19.300.000	12,00	23.950.000	12,00	21.000.000	100,00	87,68	12,00	40.300.000	100,00	19,49		
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3,00	559.881.880	2,00	27.390.000	3,00	77.950.000	3,00	69.450.000	100,00	89,10	2,50	96.840.000	83,33	17,30		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												96,67	88,82						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
11	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100,00	162.000.000	100,00	19.300.000	100,00	22.700.000	100,00	21.000.000	100,00	92,51	90,00	40.300.000	90,00	24,88	DISHUB	
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	162.000.000	12,00	19.300.000	12,00	22.700.000	12,00	21.000.000	100,00	92,51	12,00	40.300.000	100,00	24,88		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	92,51						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
13	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	%	100,00	1.335.600.000	100,00	135.300.000	100,00	158.700.000	100,00	147.000.000	100,00	92,63	90,00	282.300.000	90,00	21,14	DISHUB	
14	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12,00	1.335.600.000	12,00	135.300.000	12,00	158.700.000	12,00	147.000.000	100,00	92,63	12,00	282.300.000	100,00	21,14		

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	92,63						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
15	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	157.440.000	100,00	20.420.000	100,00	23.400.000	100,00	26.720.000	100,00	114,19	90,00	47.140.000	90,00	29,94	DISHUB	Pelaksanaan realisasi kinerja anggaran s/d triwulan ke-4 tercapai 194,40% dikarenakan adanya penambahan anggaran di perubahan penjabaran
16	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5,00	137.520.000	5,00	11.600.000	5,00	18.400.000	5,00	17.000.000	100,00	92,39	5,00	28.600.000	100,00	20,80		
17	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	12,00	19.920.000	12,00	8.820.000	12,00	5.000.000	12,00	9.720.000	100,00	194,40	12,00	18.540.000	100,00	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	143,40						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	2.447.812.592	100,00	328.576.747	100,00	325.388.853	100,00	289.911.776	100,00	89,10	90,00	618.488.523	90,00	25,27	DISHUB	Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	65.040.654	5,00	9.150.500	5,00	4.990.788	5,00	4.988.000	100,00	99,94	5,00	14.138.500	100,00	21,74		
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	997.005.887	5,00	209.134.125	5,00	149.997.131	5,00	69.637.000	100,00	46,43	5,00	278.771.125	100,00	27,96		
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30,00	88.268.282	26,00	10.519.000	30,00	9.995.934	30,00	9.524.000	100,00	95,28	28,00	20.043.000	93,33	22,71		
22	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20,00	145.784.769	17,00	21.435.600	20,00	10.050.000	80,00	7.723.833	100,00	76,85	48,50	29.159.433	242,50	20,00		
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	10,00	99.600.000	-	10,00	14.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	1.052.113.000	12,00	78.337.522	12,00	135.435.000	12,00	198.038.943	100,00	146,22	12,00	276.376.465	100,00	26,27		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												83,33	77,45						
Predikat Kinerja												(T)	(T)						
25	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100,00	1.072.612.000	100,00	100.000.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	100,00	100,00	220.000.000	100,00	20,51	DISHUB	Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Unit	4,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	2,00	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	842.612.000	1,00	100.000.000	1,00	120.000.000	1,00	120.000.000	100,00	100,00	1,00	220.000.000	100,00	26,11		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
29	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	55.892.773.985	100,00	6.580.399.597	100,00	7.455.953.800	100,00	7.578.446.791	100,00	101,64	90,00	14.158.846.388	90,00	25,33	DISHUB	Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	20.229.790	12,00	2.520.000	12,00	2.900.000	12,00	2.200.000	100,00	75,86	12,00	4.720.000	100,00	23,33		
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	53.714.023.120	12,00	6.405.939.597	12,00	7.182.603.800	12,00	7.336.009.291	100,00	102,14	12,00	13.741.948.888	100,00	25,58		
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15,00	2.158.521.075	15,00	171.940.000	15,00	270.450.000	15,00	240.237.500	100,00	88,83	15,00	412.177.500	100,00	19,10		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	88,94						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	%	100,00	2.100.714.822	100,00	123.412.657	100,00	245.349.000	100,00	210.670.326	100,00	85,87	90,00	334.082.983	90,00	15,90	DISHUB	Efisiensi Anggaran
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11,00	1.843.128.672	11,00	112.382.657	11,00	230.000.000	11,00	206.315.326	100,00	89,70	11,00	318.697.983	100,00	17,29		
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23,00	141.352.000	23,00	11.030.000	23,00	10.050.000	23,00	4.355.000	100,00	43,33	23,00	15.385.000	100,00	10,88		
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4,00	116.234.150	-	-	4,00	5.299.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												66,67	44,35						
Predikat Kinerja												(S)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	90,70						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
37	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	%	20,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB	
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	20,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					33.169.217.750		1.357.027.714		54.204.572.350		46.112.593.435		85,07		47.469.621.149		143,11		

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
		Presentase Pelayanan Izin Trayek	%	30,00		-		-		-		-		-		-			
		Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	%	75,00		45,00		50,00		48,00		96,00		46,50		62,00			
38	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	6,00	3.381.596.000	-	-	1,00	535.553.500	1,00	514.020.500	100,00	95,98	16,67	514.020.500	16,67	15,20		
39	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00	3.111.596.000	-	-	4,00	535.553.500	1,00	514.020.500	25,00	95,98	1,00	514.020.500	25,00	-	DISHUB	
40	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00	180.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
41	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	3,00	90.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												25,00	95,98						
Predikat Kinerja												(SR)	(ST)						
42	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	7.480,00	17.354.191.750		697.817.172	5.500,00	53.042.171.350	2.173,00	45.098.472.935	29,05	85,02	27,39	45.796.290.107	27,39	263,89		
43	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	1,00	390.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
44	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	7.480,00	14.026.223.000	5.000,00	316.541.363	2.140,00	52.790.064.950	4.070,00	44.995.272.935	190,19	85,23	9.070,00	45.311.814.298	121,26	323,05	DISHUB	Pelaksanaan realisasi anggaran pada kegiatan tersebut s/d triwulan ke-4 mencapai rata-rata 85,02%
45	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Unit	344,00	788.336.750	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Terdapat realisasi kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi (Bankeu Provinsi), Pelaksanaan realisasi kinerja anggaran s/d triwulan ke-4 tercapai 85,23%
46	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	695,00	2.149.632.000	500,00	381.275.809	500,00	252.106.400	193,00	103.200.000	38,60	40,94	693,00	484.475.809	99,71	22,54		Pelaksanaan realisasi anggaran s/d triwulan ke-4 tercapai 40,49%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												114,39	63,08						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
47	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terminal	2,00	779.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
48	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	1,00	160.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
49	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Pembangunan Gedung Terminal	Unit	-		-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
50	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Unit	10,00	300.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
51	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Unit	8,00	160.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
52	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Orang	40,00	159.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
53	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Laporan	12,00	628.000.000		-	12,00		-	-			-	-	-	-		
54	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
55	Koordinasi dan Sinkronasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12,00	628.000.000	-	-	5,00		-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
56	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	12,00	1.910.840.000		22.100.000	12,00	32.400.000	12,00	29.500.000	100,00	91,05	12,00	51.600.000	100,00	2,70		
57	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	40,00	932.840.000	12,00	22.100.000	12,00	32.400.000	12,00	29.500.000	100,00	91,05	24,00	51.600.000	60,00	5,53		
58	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
59	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	13.300,00	104.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
60	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	1.200,00	360.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
61	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2,00	245.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
62	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
63	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	1,00	120.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
64	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
65	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1,00	100.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
66	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1,00	49.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	91,05						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
67	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12,00	5.693.040.000		637.110.542	12,00	544.515.000	12,00	470.600.000	100,00	86,43	25,00	1.107.710.542	25,00	19,46	DISHUB	
68	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12,00	4.840.040.000	12,00	637.110.542	12,00	544.515.000	12,00	470.600.000	100,00	86,43	12,00	1.107.710.542	100,00	22,89		
69	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	1,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
70	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	464.000.000	-	-	5,00	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
71	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	48,00	144.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
72	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1,00	45.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	86,43						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
73	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12,00	389.116.500	-	-	1,00	49.932.500	-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB	Pelaksanaan realisasi anggaran pada kegiatan tersebut s/d triwulan ke-4 mencapai rata-rata 0,00% belum terselesainya kegiatan tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi antara pemangku kebijakan selaku pelaksana teknis dan kurangnya SDM dalam memahami kegiatan yang akan dilaksanakan dimaksud
74	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	5,00	126.576.500	-	-	5,00	49.932.500	-	-	-	-	-	-	-	-		Pelaksanaan realisasi anggaran s/d triwulan ke-4 tercapai 0,00% dikarenakan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
75	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Orang	7,00	112.540.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
76	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
77	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin yang dilaksanakan	Laporan	60,00	150.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
78	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Laporan	5,00	799.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
79	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Orang	20,00	227.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
80	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	12,00	165.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
81	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	60,00	300.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
82	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	25,00	100.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
83	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	12,00	7.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
84	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	18,00	315.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
85	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
86			Laporan	60,00	315.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
87	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	215.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
88	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	180.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
89	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi	1,00	35.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
90	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	492.306.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
91	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	125.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
92	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	213.678.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
93	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	153.627.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
94	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	234.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
95	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	100.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
96	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	134.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
97	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
98	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
99	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
100	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12,00	200.000.000			-	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
101	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
102	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4,00	200.000.000			-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
103	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
104	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
105	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
106	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12,00	777.627.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DISHUB	Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
107	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	375.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
108	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	250.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
109	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5,00	152.627.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Tidak menjadi target tahun anggaran 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												65,81	71,70						
Predikat Kinerja												(S)	(S)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												62,00	91,40						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(R)	(ST)						
1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				51.522.319.503	163,00	4.612.864.000	174,10	4.541.352.590		3.033.775.488		66,80					Diskominfo	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				48.755.319.632	163,00	4.612.864.000	174,10	4.541.352.590		4.052.632.393		89,24					Diskominfo	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	%	95,00	47.467.401.632	148,00	4.583.464.000	154,10	4.523.952.590	95,00	4.037.332.393		89,24						Diskominfo	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	95,00	26.583.937.878	90,00	2.431.889.565	91,00	3.689.268.920	91,00	3.174.670.328	100,00	86,05	91,00	5.606.559.893	95,79	21,09	Diskominfo	
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik																	
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur																	
		4. Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas																	
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%	95,00	215.900.000	90,00	21.000.000	91,00	21.000.000	91,00	18.450.000	100,00	87,86	91,00	39.450.000	95,79	18,27	Diskominfo	
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu																	
		3. Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu																	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dilaksanakan	laporan	5,00	3.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	15,00	212.800.000	3,00	21.000.000	3,00	21.000.000	3,00	18.450.000	100,00	87,86	3,00	39.450.000	100,00	18,54	Diskominfo	Pengumpulan dokumen perencanaan
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	87,86						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	95,00	15.794.252.148	90,00	1.938.497.374	91,00	2.650.897.663	91,00	2.383.876.717	100,00	89,93	91,00	4.322.374.091	95,79	27,37	Diskominfo	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	30,00	15.559.352.148	20,00	1.914.497.374	23,00	2.629.897.663	23,00	2.365.426.717	100,00	89,94	18,00	4.279.924.091	85,71	27,51	Diskominfo	Melakukan pembayaran gaji dan tunjangan setiap bulan
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	15,00	230.800.000	3,00	24.000.000	3,00	21.000.000	3,00	18.450.000	100,00	87,86	3,00	42.450.000	100,00	18,39	Diskominfo	Melakukan rekon setiap bulan
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dilaksanakan	laporan	5,00	2.050.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang tersusun	laporan	5,00	2.050.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	88,90						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
13	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	unit	1.550,00	212.800.000	250,00	21.000.000	250,00	21.000.000	250,00	18.450.000	100,00	87,86	500,00	39.450.000	32,26	18,54	Diskominfo	
14	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	5,00	212.800.000	1,00	21.000.000	1,00	21.000.000	1,00	18.450.000	100,00	87,86	1,00	39.450.000	14,29	18,54	Diskominfo	Melakukan rekon setiap bulan
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	87,86						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
15	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima perangkat daerah	%	5,00	169.500.000	5,00	19.800.000	5,00	19.800.000	5,00	17.400.000	100,00	87,88	10,00	37.200.000	100,00	21,95	Diskominfo	
16	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	5,00	169.500.000	1,00	19.800.000	1,00	19.800.000	1,00	17.400.000	100,00	87,88	1,00	37.200.000	100,00	21,95	Diskominfo	Penagihan surat retribusi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	87,88						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
17	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	%	95,00	153.320.000	90,00	17.400.000	91,00	17.400.000	91,00	15.300.000	100,00	87,93	91,00	32.700.000	95,79	21,33	Diskominfo	
18	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	15,00	153.320.000	3,00	17.400.000	3,00	17.400.000	3,00	15.300.000	100,00	87,93	3,00	32.700.000	100,00	21,33	Diskominfo	Melakukan administrasi kepegawaian secara berkala
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	87,93						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	%	95,00	3.478.469.630	90,00	82.093.300	91,00	242.516.288	91,00	136.830.365	100,00	56,42	91,00	218.923.665	95,79	6,29	Diskominfo	
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1,00	33.043.030	1,00	685.000	1,00	1.940.520	1,00	714.000	100,00	36,79	1,00	1.399.000	20,00	4,23	Diskominfo	Membelanjakan kebutuhan alat listrik
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1,00	1.287.690.950	2,00	33.052.000	2,00	113.571.143	2,00	74.017.365	100,00	65,17	1,00	107.069.365	100,00	8,31	Diskominfo	Membelanjakan kebutuhan ATK dan belanja modal
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1,00	46.565.650	1,00	2.955.700	1,00	2.998.625	1,00	2.059.500	100,00	68,68	1,00	5.015.200	100,00	10,77	Diskominfo	Membeli bahan peralatan rumah tangga
23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1,00	15.063.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	3,00	114.870.000	3,00	3.712.000	3,00	6.010.000	3,00	4.304.500	100,00	71,62	1,00	8.016.500	33,33	6,98	Diskominfo	Membelanjakan penggandaan, penjiilidan dan cetak banner
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	5,00	149.400.000	1,00	15.360.000	1,00	18.000.000	1,00	15.360.000	100,00	85,33	6,00	30.720.000	100,00	20,56	Diskominfo	Pembayaran koran setiap bulan
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	138,00	1.831.837.000	24,00	26.328.600	24,00	99.996.000	24,00	40.375.000	100,00	40,38	12,00	66.703.600	50,00	3,64	Diskominfo	Melakukan koordinasi keluar daerah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	61,33						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
27	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	%	95,00	2.137.500.000	90,00	100.000.000	91,00	100.000.000	91,00	100.000.000	100,00	100,00	91,00	200.000.000	95,79	9,36	Diskominfo	
28	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	unit	25,00	172.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
29	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	5,00	810.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	100,00	100,00	1,00	200.000.000	100,00	24,69	Diskominfo	Sewa gedung kantor selama 1 tahun
30	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	unit	2,00	700.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
31	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	4,00	350.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	42,00	105.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	95,00	3.182.079.552	90,00	152.244.931	91,00	489.160.000	91,00	407.873.346	100,00	83,38	91,00	560.118.277	95,79	17,60	Diskominfo	
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	230,00	58.100.000	1,00	3.638.500	1,00	7.000.000	1,00	3.025.350	100,00	43,22	1,00	6.663.850	2,50	11,47	Diskominfo	Membelanjakan materi dan mengirim surat penagihan retribusi

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	25,00	2.030.591.552	5,00	35.568.931	5,00	356.940.000	5,00	311.991.996	100,00	87,41	3,00	347.560.927	60,00	17,12	Diskominfo	Pembayaran listrik dan internet setiap bulan
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	15,00	1.093.388.000	3,00	113.036.500	3,00	125.220.000	3,00	92.856.000	100,00	74,15	4,00	205.892.500	100,00	18,83	Diskominfo	Menyediakan makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan jamuan tamu
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	68,26						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	95,00	1.240.116.548	90,00	79.853.960	91,00	127.494.969	91,00	76.489.900	100,00	59,99	91,00	156.343.860	95,79	12,61	Diskominfo	
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	17,00	871.181.548	3,00	71.048.260	2,00	99.999.969	2,00	60.992.800	100,00	60,99	2,00	132.041.060	100,00	15,16	Diskominfo	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, BBM, pelumas dan belanja suku cadang
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	24,00	276.895.000	2,00	7.130.700	3,00	15.000.000	3,00	9.572.100	100,00	63,81	3,00	16.702.800	100,00	6,03	Diskominfo	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional, BBM, pelumas dan belanja suku cadang
40	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	34,00	55.100.000	10,00	1.675.000	5,00	7.500.000	5,00	5.925.000	100,00	79,00	5,00	7.600.000	100,00	13,79	Diskominfo	Pemeliharaan dan service laptop, printer, monitor dan AC
41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5,00	36.940.000	-	-	1,00	4.995.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	dilaksanakan di triwulan 4
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												75,00	50,95						
Predikat Kinerja												(S)	(R)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	82,36						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
42	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tata kelola layanan informasi publik, Persentase tata kelola komunikasi publik	%	75,00	11.674.139.974	55,00	767.615.906	60,00	575.114.920	60,00	640.018.565	100,00	111,29	60,00	1.407.634.471	80,00	12,06	Diskominfo	
43	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan konten yang dipublikasikan, Persentase pengelolaan media massa dan lainnya	%	80,00	11.674.139.974	55,00	767.615.906	60,00	575.114.920	60,00	640.018.565	100,00	111,29	60,00	1.407.634.471	75,00	12,06	Diskominfo	
44	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1. Jumlah kebijakan teknis bidang informasi publik yang dijalankan dengan baik; 2. Jumlah kebijakan teknis bidang komunikasi publik yang dijalankan dengan baik	dokumen	30,00	520.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
45	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah yang diinformasikan kepada publik	dokumen	139,00	223.999.974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
46	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah yang diinformasikan kepada publik	dokumen	10,00	193.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
47	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah konten yang dipublikasikan	dokumen	5,00	215.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
48	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	dokumen	10,00	580.340.000	2,00	29.526.000	2,00	58.915.000	2,00	54.071.565	100,00	91,78	1,00	83.597.565	100,00	14,40	Diskominfo	Peliputan dalam daerah
49	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	dokumen	5,00	346.800.000	1,00	16.200.000	1,00	16.200.000	1,00	14.250.000	100,00	87,96	1,00	30.450.000	100,00	8,78	Diskominfo	Pengumpulan dokumen DIP (Data Informasi Publik)
50	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	orang	200,00	170.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	
51	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	dokumen	15,00	9.000.000.000	3,00	721.889.906	3,00	499.999.920	3,00	571.697.000	100,00	114,34	3,00	1.293.586.906	100,00	14,37	Diskominfo	Mempublikasikan berita setiap bualn
52	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang dikelola	unit	47,00	425.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	98,03						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	111,29						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
53	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan tata kelola SPBE	Indeks	3,50	9.209.323.780	3,00	1.383.958.529	3,10	259.568.750	3,10	222.643.500	100,00	85,77	6,10	1.606.602.029	87,14	17,45	Diskominfo	
54	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	1. Persentase domain yang terkelola; 2. Persentase sub domain yang terkelola	%	100; 85	3.058.000.000	-	12.578.200	-	-	-	-	-	-	-	12.578.200	-	0,41	Diskominfo	
55	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah domain yang berjalan dengan baik; 2. Jumlah sub domain yang berjalan dengan baik	dokumen	5,00	248.000.000	1,00	12.578.200	-	-	-	-	-	-	1,00	12.578.200	0,20	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
56	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terhubung ke jaringan intra pemerintah daerah	unit	40,00	2.810.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
57	Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD yang memiliki layanan publik berbasis sistem elektronik	%	75,00	6.151.323.780	59,00	1.371.380.329	62,00	259.568.750	62,00	222.643.500	100,00	85,77	62,00	1.594.023.829	82,67	25,91	Diskominfo	
58	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	unit	23,00	1.274.000.000	3,00	143.985.600	-	-	-	-	-	-	3,00	143.985.600	0,13	11,30	Diskominfo	Refocusing anggaran

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
59	sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah dokumen sinkronisasi pengelolaan rencana induk yang disusun	dokumen	2,00	400.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
60	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	unit	30,00	1.169.800.000	4,00	109.800.000	4,00	125.068.750	4,00	96.300.000	100,00	77,00	2,00	206.100.000	50,00	17,62	Diskominfo	Pengelolaan website secara berkala
61	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dokumen	5,00	1.901.523.780	1,00	1.117.594.729	1,00	134.500.000	1,00	126.343.500	100,00	93,94	1,00	1.243.938.229	100,00	65,42	Diskominfo	Pengelolaan Command Ceter
62	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	1. Jumlah pengembangan infrastruktur Kabupaten cerdas; 2. Cakupan pengelolaan ekosistem Kabupaten Cerdas	dokumen	4,00	1.210.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
63	Monitoring evaluasi dan Pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi SPBE	dokumen	4,00	196.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	85,47						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	85,77						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												100,00	94,37						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(ST)						
64	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				2.766.999.871		-		-		-				-			Diskominfo	
65	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase publikasi data statistik sektoral	%	75,00	2.766.999.871	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
66	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang dipu	publikasi	15,00	2.766.999.871	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	
67	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1. Jumlah koordinasi pemenuhan dan analisis data statistik sektoral dengan OPD; 2. Jumlah pengumpulan dan pengolahan data; 3. Jumlah analisis dan diseminasi data statistik sektoral	dokumen	5,00	1.236.999.871	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
68	Peningkatan Kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya	orang	150,00	310.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
69	Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang disusun	dokumen	15,00	590.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
70	Pengembangan infrastruktur	Jumlah infrastruktur statistik sektoral yang dikelola	unit	5,00	630.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												-	-						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(SR)	(SR)						
71	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		%	20,00	1.287.918.000	15,00	29.400.000	20,00	17.400.000	20,00	15.300.000	100,00	87,93	35,00	44.700.000	87,50	3,47	Diskominfo	
72	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	%	40,00	1.287.918.000	15,00	29.400.000	20,00	17.400.000	20,00	15.300.000	100,00	87,93	35,00	44.700.000	87,50	3,47	Diskominfo	
73	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	40,00	999.998.000	1,00	12.000.000	-	-	-	-			1,00	12.000.000	2,50	1,20	Diskominfo	
74	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang diuji keamanannya	laporan	5,00	999.998.000	1,00	12.000.000	-	-	-	-			1,00	12.000.000	0,20	-	Diskominfo	Refocusing anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
75	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prosedur komunikasi sandi antar perangkat daerah yang disusun	prosedur	16,00	287.920.000	1,00	17.400.000	1,00	17.400.000	1,00	15.300.000	100,00	87,93	2,00	32.700.000	6,67	11,36	Diskominfo	
76	Operasionalisasi Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	perangkat daerah	5,00	287.920.000	1,00	17.400.000	1,00	17.400.000	1,00	15.300.000	100,00	87,93	2,00	32.700.000	6,67	11,36	Diskominfo	Pengelolaan email sanapati
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	87,93						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	87,93						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												100,00	87,93						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(T)						
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				21.288.314.523		2.994.870.527		5.561.328.819		2.931.798.753		52,72		5.926.669.280		27,84		
		1. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase (%)	90,00		138,23		71,00		68,25	2.153.124.323	96,13		103,24	4.503.583.999				

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.									
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja			%								
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	Persentase (%)	90,00	17.453.490.774	138,23	2.350.459.676	71,00	4.689.022.746	68,25	-	96,13	45,92	103,24	-	114,71	26,44	DPMPTSP									
3. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		Persentase (%)	20,00	4,70		55,00		15,00		-	27,27	9,85		-													
4. Persentase peningkatan kompetensi aparatur		Persentase (%)	56,00	16,70		20,00		15,00		-	75,00	15,85		-													
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	1. Persentase (%) 2. Persentase (%) 3. Persentase (%) 3. Persentase (%)	90,00	167.704.000	138,23	24.444.000	71,00	30.979.000	71,00	24.953.180	100,00	80,55	104,62	49.397.180	116,24	29,45	DPMPTSP									
2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu																											
3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu																											
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12,00	-	3,00	-	3,00	-	-	-			3,00	-	25,00	-	DPMPTSP									
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36,00	136.840.000	6,00	19.300.000	6,00	22.700.000	6,00	20.150.000	100,00	88,77	12,00	39.450.000	33,33	28,83	DPMPTSP	Adanya ketentuan Pengurangan Honorarium Non PNS menjadi 50% pada Okt s.d Des 2022								
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18,00	30.864.000	3,00	5.144.000	3,00	8.279.000	3,00	4.803.180	100,00	58,02	6,00	9.947.180	33,33	32,23	DPMPTSP									
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	73,39														
Predikat Kinerja												(ST)	(S)														
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Persentase (%)	90,00	13.217.926.115	138,23	1.912.432.060	71,00	2.140.512.425	71,00	1.624.005.883	100,00	75,87	104,62	3.536.437.943	116,24	26,75	DPMPTSP									
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	16,00	12.966.546.115	16,00	1.871.712.060	16,00	2.112.863.175	16,00	1.945.923.203	100,00	92,10	16,00	3.817.635.263	100,00	29,44	DPMPTSP	Keterbatasan APBDP Kabupaten								
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	9.876.000	2,00	1.656.000	2,00	1.644.000	2,00	1.622.000	100,00	98,66	4,00	3.278.000	33,33	33,19	DPMPTSP									
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6,00	104.664.000	1,00	19.764.000	1,00	3.305.250	1,00	1.622.000	100,00	49,07	2,00	21.386.000	33,33	20,43	DPMPTSP									
12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6,00	136.840.000	1,00	19.300.000	1,00	22.700.000	1,00	20.150.000	100,00	88,77	2,00	39.450.000	33,33	28,83	DPMPTSP	Adanya ketentuan Pengurangan Honorarium Non PNS menjadi 50% pada Okt s.d Des 2022								
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	82,15														
Predikat Kinerja												(ST)	(T)														
13	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	Persentase (%)	90,00	134.840.000	138,23	19.300.000	71,00	22.700.000	71,00	20.150.000	100,00	88,77	104,62	39.450.000	116,24	29,26	DPMPTSP									
14	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	6,00	134.840.000	1,00	19.300.000	1,00	22.700.000	1,00	20.150.000	100,00	88,77	2,00	39.450.000	33,33	29,26	DPMPTSP	Adanya ketentuan Pengurangan Honorarium Non PNS menjadi 50% pada Okt s.d Des 2022								
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	88,77														
Predikat Kinerja												(ST)	(T)														
15	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Jenis dan Unit/Buah	366,00	136.840.000	4,70	19.300.000	55,00	22.700.000	55,00	20.150.000	100,00	88,77	59,70	39.450.000	16,31	28,83	DPMPTSP									
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6,00	136.840.000	1,00	19.300.000	1,00	22.700.000	1,00	20.150.000	100,00	88,77	2,00	39.450.000	33,33	28,83	DPMPTSP	Adanya ketentuan Pengurangan Honorarium Non PNS menjadi 50% pada Okt s.d Des 2022								
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	88,77														
Predikat Kinerja												(ST)	(T)														
17	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	Persentase (%)	56,00	164.956.208	16,70	16.000.001	20,00	29.800.000	20,00	27.627.000	100,00	92,71	18,35	43.627.001	32,77	26,45	DPMPTSP									
18	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	6,00	113.856.000	1,00	16.000.000	1,00	18.800.000	1,00	16.700.000	100,00	88,83	2,00	32.700.000	33,33	28,72	DPMPTSP	Adanya ketentuan Pengurangan Honorarium Non PNS menjadi 50% pada Okt s.d Des 2022								
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP									
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	16,00	-	-	-	32,00	11.000.000	16,00	10.927.000	50,00	99,34	16,00	10.927.000	100,00	-	DPMPTSP									
21	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	1,00	0	-	-	-	-			1,00	0	-	-	DPMPTSP									
22	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	-	0	-	-	-	-			-	0	-	-	DPMPTSP									
23	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	51.100.208	-	0	-	-	-	-			-	0	-	0,00	DPMPTSP									
24	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP									
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												75,00	94,08														
Predikat Kinerja												(S)	(ST)														
25	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	Persentase (%)	90,00	1.132.296.095	138,23	139.574.439	71,00	143.001.821	71,00	154.824.489	100,00	108,27	104,62	294.398.928	116,24	26,00	DPMPTSP									

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
26	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1,00	21.485.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36,00	113.458.473	4,00	12.180.115	4,00	23.277.000	4,00	13.820.000	100,00	59,37	8,00	26.000.115	22,22	22,92	DPMPTSP	
28	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30,00	13.810.310	3,00	344.000	5,00	2.169.608	3,00	1.000.000	60,00	46,09	6,00	1.344.000	20,00	9,73	DPMPTSP	
29	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	36,00	95.909.648	4,00	8.565.152	4,00	6.846.100	4,00	4.631.850	100,00	67,66	8,00	13.197.002	22,22	13,76	DPMPTSP	
30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	90,00	93.600.000	12,00	11.949.100	12,00	9.200.000	10,00	9.200.000	83,33	100,00	22,00	21.149.100	24,44	22,60	DPMPTSP	
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	347,00	487.354.800	26,00	53.601.392	27,00	62.208.000	14,00	86.872.534	51,85	139,65	40,00	140.473.926	11,53	28,82	DPMPTSP	
32	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	420,00	306.677.864	69,00	52.934.680	69,00	39.301.113	69,00	39.300.105	100,00	100,00	138,00	92.234.785	32,86	30,08	DPMPTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												82,53	85,46						
Predikat Kinerja												(T)	(T)						
33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Persentase (%)	90,00	1.422.586.381	138,23	133.558.168	71,00	154.245.000	71,00	146.893.120	100,00	95,23	104,62	280.451.288	116,24	19,71	DPMPTSP	
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	182,00	13.920.710	110,00	2.000.000	110,00	3.102.000	110,00	3.100.000	100,00	99,94	220,00	5.100.000	120,88	36,64	DPMPTSP	
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	313.009.404	2,00	46.841.360	2,00	48.000.000	2,00	48.000.000	100,00	100,00	4,00	94.841.360	33,33	30,30	DPMPTSP	
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36,00	1.095.656.267	12,00	84.716.808	5,00	103.143.000	5,00	95.793.120	100,00	92,87	17,00	180.509.928	47,22	16,48	DPMPTSP	Adanya ketentuan Pengurangan Honorarium Non PNS menjadi 50% pada Okt s.d Des 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	97,60						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
37	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi.	Persentase (%)	20,00	562.084.908	4,70	7.550.000	55,00	2.026.135.000	3,00	23.583.125	5,45	1,16	3,85	31.133.125	19,25	5,54	DPMPTSP	
38	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00	171.243.400	-	-	4,00	2.015.850.000	1,00	14.233.125	25,00	0,71	1,00	14.233.125	20,00	8,31	DPMPTSP	Keterbatasan APBDP Kabupaten
39	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7,00	153.176.000	1,00	7.550.000	1,00	10.285.000	1,00	9.350.000	100,00	90,91	2,00	16.900.000	28,57	11,03	DPMPTSP	
40	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		103.617.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
41	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
42	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
43	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		134.048.508	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												62,50	45,81						
Predikat Kinerja												(R)	(SR)						
44	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	Persentase (%)	20,00	514.257.067	4,70	78.301.008	55,00	118.949.500	52,00	110.937.526	94,55	93,26	28,35	189.238.534	141,75	36,80	DPMPTSP	
45	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	36,00	39.280.400	2,00	7.360.000	1,00	9.950.000	1,00	8.025.000	100,00	80,65	3,00	15.385.000	8,33	39,17	DPMPTSP	
46	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00	193.384.154	1,00	29.881.765	1,00	43.500.000	1,00	48.494.242	100,00	111,48	2,00	78.376.007	33,33	40,53	DPMPTSP	Keterbatasan APBDP Kabupaten
47	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30,00	261.265.619	5,00	39.657.943	5,00	57.999.500	5,00	49.048.284	100,00	84,57	10,00	88.706.227	33,33	33,95	DPMPTSP	
48	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	26,00	20.326.894	5,00	1.401.300	15,00	7.500.000	14,00	5.370.000	93,33	71,60	19,00	6.771.300	73,08	33,31	DPMPTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												98,33	87,08						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												88,89	80,51						
Predikat Kinerja												(T)	(T)						
49	PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor	Jumlah Investor	1.151,00	552.960.735	127,00	-	166,00	100.963.000	4.934,00	100.109.800	2.972,29	99,15	5.061,00	100.109.800	439,70	18,10	DPMPTSP	
50	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibi­dang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis Dokumen/Laporan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibi­dang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Dokumen/ Laporan	12,00	221.937.670	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
51	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1,00	210.749.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
52	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	2,00	11.188.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
53	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jenis Dokumen/Laporan	12,00	331.023.065	-	-	1,00	100.963.000	1,00	100.109.800	100,00	99,15	1,00	100.109.800	8,33	30,24	DPMPTSP	
54	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	210.749.000	-	-	1,00	100.963.000	1,00	100.109.800	100,00	99,15	1,00	100.109.800	100,00	47,50	DPMPTSP	
55	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	120.274.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	99,15						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	99,15						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
56	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi	%	10,00	392.487.860	10,00	62.290.000	10,00	-	-	-	-	-	10,00	62.290.000	100,00	15,87	DPMPTSP	
57	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah/Jenis Dokumen/Laporan Event Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan/Dokumen/Laporan	12,00	392.487.860	1,00	62.290.000	-	-	-	-	-	-	1,00	62.290.000	8,33	15,87	DPMPTSP	
58	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	
59	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	36,00	379.987.860	1,00	62.290.000	-	-	-	-	-	-	1,00	62.290.000	2,78	16,39	DPMPTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
60	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase (%)	95,00	2.413.814.149	100,00	240.639.051	100,00	380.226.918	100,00	330.119.630	100,00	86,82	100,00	570.758.681	105,26	23,65	DPMPTSP	
61	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jangka Waktu Penerbitan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang Tepat Waktu Sesuai SOP	Persentase (%)	95,00	2.413.814.149	100,00	240.639.051	100,00	380.226.918	100,00	330.119.630	100,00	86,82	100,00	570.758.681	105,26	23,65	DPMPTSP	
62	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	2.130,00	430.966.632	2,00	39.117.051	305,00	129.370.250	3.138,00	120.832.530	1.028,85	93,40	3.140,00	159.949.581	147,42	37,11	DPMPTSP	Terdapat pembaharuan/update pada aplikasi OSS, sehingga data pelaku usaha yang sudah terdata di tahun sebelum 2021 terupdate menjadi data baru yang menyebabkan realisasinya sangat tinggi.
63	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	2.130,00	1.359.264.223	2.010,00	191.449.000	305,00	93.350.000	3.138,00	88.200.000	1.028,85	94,48	5.148,00	279.649.000	241,69	20,57	DPMPTSP	
64	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	600,00	114.535.679	25,00	10.073.000	25,00	49.376.168	40,00	21.038.000	160,00	42,61	65,00	31.111.000	10,83	27,16	DPMPTSP	
65	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	2.130,00	509.047.615	2.010,00	0	305,00	108.130.500	3.138,00	100.049.100	1.028,85	92,53	5.148,00	100.049.100	241,69	19,65	DPMPTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												811,64	80,75						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	86,82						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
66	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & PMA Terhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	2.485,17	399.112.650	795,65	341.481.800	354,31	391.116.155	1.781,00	348.445.000	502,67	89,09	2.576,65	689.926.800	103,68	172,87	DPMPTSP	
67	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah/Jenis Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jenis Kegiatan/Dokumen/Laporan	18,00	399.112.650	3,00	341.481.800	3,00	391.116.155	3,00	348.445.000	100,00	89,09	6,00	689.926.800	33,33	172,87	DPMPTSP	
68	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	100,00	50.820.000	2.010,00	50.820.000	305,00	30.100.000	3.138,00	26.075.000	1.028,85	86,63	5.148,00	76.895.000	5.148,00	151,31	DPMPTSP	Terdapat pembaharuan/update pada aplikasi OSS, sehingga data pelaku usaha yang sudah terdata di tahun sebelum 2021 terupdate menjadi data baru yang menyebabkan realisasinya sangat tinggi.
69	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	50,00	227.201.800	2.010,00	196.281.800	305,00	249.117.155	3.138,00	210.466.000	1.028,85	84,48	5.148,00	406.747.800	#####	179,02	DPMPTSP	
70	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	219,00	121.090.850	2.010,00	94.380.000	305,00	111.899.000	3.138,00	111.904.000	1.028,85	100,00	5.148,00	206.284.000	2.350,68	170,35	DPMPTSP	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												1.028,85	90,37						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	89,09						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
71	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase (%)	10,00	76.448.355	-	-	10,00	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
72	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%)	10,00	76.448.355	-	-	10,00	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
73	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	48,00	76.448.355	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	DPMPTSP	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												912,15	80,25						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(T)						
1	DINAS KOPERASI UKM PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN				57.404.555.421			4.262.810.516		4.705.719.226		4.891.326.084		103,94		9.154.136.600	15,95		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				37.603.142.542			3.897.401.266		3.737.010.540		3.755.572.100		100,50		7.652.973.366	20,35		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	100,00	26.164.054.210	100,00	2.804.255.786	100,00	3.406.098.229	100,00	3.324.022.324	100,00	97,59	100,00	6.128.278.110	100,00	23,42	Diskopdagin	
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00									
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	100,00		100,00		100,00		100,00									
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00		100,00		100,00		100,00									
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu (%)	%	100,00	329.684.000	100,00	23.839.000	100,00	35.572.000	100,00	29.640.000	100,00	83,32	100,00	53.479.000	100,00	16,22	Diskopdagin	
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu (%)	%	100,00		100,00		100,00		100,00									
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu (%)	%	100,00		100,00		100,00		100,00									
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12,00	210.493.000	2,00	19.300.000	2,00	29.572.000	2,00	23.640.000	100,00	79,94	4,00	42.940.000	33,33	20,40	Diskopdagin	
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	15,00	11.944.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	15,00	11.944.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
8	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	15,00	11.944.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
9	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	15,00	11.944.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15,00	29.810.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18,00	41.605.000	3,00	4.539.000	3,00	6.000.000	3,00	6.000.000	100,00	100,00	6,00	10.539.000	33,33	25,33	Diskopdagin	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	89,97						
Predikat kinerja												(ST)	(T)						
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik (%)	%	100,00	16.433.260.485	100,00	1.787.847.874	100,00	2.495.354.007	100,00	2.474.499.536	100,00	99,16	100,00	4.262.347.410	100,00	25,94		
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	137,00	16.057.678.335	15,00	1.761.482.124	24,00	2.466.991.007	24,00	2.449.349.536	100,00	99,28	39,00	4.210.831.660	28,47	26,22	Diskopdagin	
14	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72,00	209.610.000	12,00	19.300.000	12,00	24.206.000	12,00	20.150.000	100,00	83,24	24,00	39.450.000	33,33	18,82	Diskopdagin	
15	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	60,00	25.082.400	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	72,00	100.402.750	1,00	7.065.750	1,00	4.157.000	1,00	5.000.000	100,00	120,28	2,00	12.065.750	2,78	12,02	Diskopdagin	
17	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	10,00	11.944.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12,00	12.983.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
19	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10,00	15.560.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,94						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
20	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100,00	263.856.200	100,00	19.300.000	100,00	24.206.000	100,00	21.235.000	100,00	87,73	100,00	40.535.000	100,00	15,36		
21	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10,00	11.944.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
22	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	5,00	5.662.000	10,00	-	-	-	-	-			10,00	-	200,00	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
23	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5,00	9.625.400	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
24	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60,00	14.332.800	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
25	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72,00	209.032.000	6,00	19.300.000	12,00	24.206.000	12,00	21.235.000	100,00	87,73	18,00	40.535.000	25,00	19,39	Diskopdagin	
26	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4,00	13.260.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	87,73						
Predikat kinerja												(ST)	(T)						
27	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	%	100,00	1.374.079.300	100,00	88.900.000	100,00	134.606.000	100,00	119.465.000	100,00	88,75	100,00	208.365.000	100,00	15,16		
28	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	5,00	139.230.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
29	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	2.368,00	1.051.713.300	1,00	69.600.000	1,00	110.400.000	1,00	97.800.000	100,00	88,59	2,00	167.400.000	0,08	15,92	Diskopdagin	
30	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	72,00	183.136.000	2,00	19.300.000	12,00	24.206.000	12,00	21.665.000	100,00	89,50	14,00	40.965.000	19,44	22,37	Diskopdagin	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	89,04						
Predikat kinerja												(ST)	(T)						
31	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	781.434.660	100,00	495.509.300	100,00	37.675.000	100,00	33.475.000	100,00	88,85	100,00	528.984.300	100,00	67,69		
32	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	220,00	125.366.860	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
33	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	72,00	241.067.800	12,00	16.000.000	12,00	36.200.000	12,00	32.000.000	100,00	88,40	24,00	48.000.000	33,33	19,91	Diskopdagin	
34	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	120,00	415.000.000	15,00	479.509.300	15,00	1.475.000	-	1.475.000	-	100,00	15,00	480.984.300	12,50	115,90	Diskopdagin	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												50,00	94,20						
Predikat kinerja												(SR)	(ST)						
35	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	2.940.759.360	100,00	102.778.588	100,00	252.073.722	100,00	233.400.651	100,00	92,59	100,00	336.179.239	100,00	11,43		
36	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	9.784.884	1,00	301.000	1,00	1.357.272	1,00	1.200.000	100,00	88,41	2,00	1.501.000	33,33	15,34	Diskopdagin	
37	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	453.890.381	1,00	35.698.565	1,00	42.800.000	1,00	52.501.978	100,00	122,67	2,00	88.200.543	33,33	19,43	Diskopdagin	
38	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6,00	113.538.552	1,00	3.447.300	1,00	7.794.450	1,00	5.890.864	100,00	75,58	2,00	9.338.164	33,33	8,22	Diskopdagin	
39	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	27.120.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
40	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	20,00	329.431.858	1,00	19.422.125	1,00	58.056.000	1,00	57.517.430	100,00	99,07	2,00	76.939.555	10,00	23,36	Diskopdagin	
41	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60,00	85.380.576	120,00	10.500.000	120,00	12.000.000	120,00	12.000.000	100,00	100,00	240,00	22.500.000	400,00	26,35	Diskopdagin	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
42	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5,00	49.269.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
43	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60,00	65.692.000	-	-	12,00	11.000.000	12,00	10.417.500	100,00	94,70	12,00	10.417.500	20,00	15,86	Diskopdagin	
44	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	165,00	1.521.781.949	21,00	23.259.598	100,00	100.266.000	100,00	77.172.879	100,00	76,97	121,00	100.432.477	73,33	6,60	Diskopdagin	
45	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	60,00	135.000.000	-	-	-	-									Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
46	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	72,00	149.870.160	3,00	10.150.000	12,00	18.800.000	12,00	16.700.000	100,00	88,83	15,00	26.850.000	20,83	17,92	Diskopdagin	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	93,28						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
47	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100,00	1.748.851.810	100,00	100.000.000	100,00	132.000.000	100,00	132.000.000	100,00	100,00	100,00	232.000.000	100,00	13,27		
48	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	6,00	191.904.100	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
49	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6,00	224.700.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
50	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	40,00	138.752.586	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
51	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14,00	331.855.124	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
52	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12,00	861.640.000	2,00	100.000.000	2,00	132.000.000	2,00	132.000.000	100,00	100,00	4,00	232.000.000	33,33	26,93	Diskopdagin	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
53	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	1.212.752.587	100,00	117.025.189	100,00	160.215.000	100,00	146.335.823	100,00	91,34	100,00	263.361.012	100,00	21,72		
54	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3.005,00	25.810.972	12,00	1.658.500	12,00	2.640.000	12,00	2.489.200	100,00	94,29	24,00	4.147.700	0,80	16,07	Diskopdagin	
55	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	62,00	417.820.065	2,00	47.262.789	12,00	65.700.000	12,00	66.661.623	100,00	101,46	14,00	113.924.412	22,58	27,27	Diskopdagin	
56	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	769.121.550	12,00	68.103.900	12,00	91.875.000	12,00	77.185.000	100,00	84,01	24,00	145.288.900	33,33	18,89	Diskopdagin	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	93,25						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
57	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100,00	1.079.375.808	100,00	69.055.835	100,00	134.396.500	100,00	133.971.314	100,00	99,68	100,00	203.027.149	100,00	18,81		
58	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	72,00	311.726.748	1,00	24.500.414	1,00	45.050.000	1,00	44.276.106	100,00	98,28	2,00	68.776.520	2,78	22,06	Diskopdagin	
59	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	100,00	613.105.200	7,00	37.629.321	8,00	74.178.500	8,00	72.537.608	100,00	97,79	15,00	110.166.929	15,00	17,97	Diskopdagin	
60	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	72,00	19.707.600	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
61	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100,00	95.580.000	12,00	5.873.600	12,00	10.500.000	12,00	11.622.000	100,00	110,69	24,00	17.495.600	24,00	18,30	Diskopdagin	
62	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	72,00	39.256.260	5,00	1.052.500	2,00	4.668.000	2,00	5.535.600	100,00	118,59	7,00	6.588.100	9,72	16,78	Diskopdagin	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	106,34						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	92,38						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
63	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	%	2,00	-	0,50	-	-	-	-	-			0,50	-	25,00	#DIV/0!		
64	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dalam satu tahun (%)	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dalam satu tahun (%)	%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-			100,00	-	100,00	#DIV/0!		
65	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Akhir berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja		
Predikat kinerja											(SR)	(SR)						
66	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang dalam satu tahun (%)	%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-		100,00	-	100,00	#DIV/0!		
67	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat kinerja											(SR)	(SR)						
68	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri dalam satu tahun (%)	%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-		100,00	-	100,00	#DIV/0!		
69	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
70	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat kinerja											(SR)	(SR)						
71	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri	Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri dalam satu tahun (%)	%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-		100,00	-	100,00	#DIV/0!		
72	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
73	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat kinerja											(SR)	(SR)						
74	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat dalam satu tahun (%)	%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-		100,00	-	100,00	#DIV/0!		
75	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat kinerja											(SR)	(SR)						
76	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam satu tahun (%)	%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-		100,00	-	100,00	#DIV/0!		
77	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
78	Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
79	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat kinerja											(SR)	(SR)						
80	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) dalam satu tahun (%)	%	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-		100,00	-	100,00	#DIV/0!	Diskopdagin	
81	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)											-	-						
Predikat kinerja											(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)											-	-						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%			
82	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	%	38,46	5.694.351.541	17,86	992.563.000	25,00	193.446.000	25,00	304.315.250	100,00	157,31	42,86	1.296.878.250	111,44	22,77			
83	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Unit	5,00	4.749.991.541	-	950.263.000	2,00	193.446.000	2,00	299.315.250	100,00	154,73	2,00	1.249.578.250	40,00	26,31			
84	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	6,00	4.512.991.541	-	950.263.000	1,00	193.446.000	1,00	299.315.250	100,00	154,73	1,00	1.249.578.250	16,67	27,69	Diskopdagin		
85	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	12,00	237.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	154,73							
Predikat kinerja												(SR)	(SR)							
86	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya	Orang	375,00	944.360.000	75,00	42.300.000	-	-	-	5.000.000			75,00	47.300.000	20,00	5,01			
87	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	6,00	279.360.000	1,00	42.300.000	-	-	-	-			1,00	42.300.000	16,67	15,14	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas	
88	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	5,00	665.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000			-	5.000.000	-	0,75	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-							
Predikat kinerja												(SR)	(SR)							
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	154,73							
Predikat kinerja												(ST)	(ST)							
89	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	%	83,00	2.619.991.791	71,00	48.000.000	71,43	82.740.000	71,43	76.600.000	100,00	92,58	71,43	124.600.000	86,06	4,76			
90	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terjamin ketersediannya	Barang pokok dan penting	18,00	975.000.000	-	-	18,00	36.140.000	18,00	32.100.000	100,00	88,82	18,00	32.100.000	100,00	3,29			
91	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	60,00	325.000.000	-	-	5,00	36.140.000	5,00	32.100.000	100,00	88,82	5,00	32.100.000	8,33	9,88	Diskopdagin		
92	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	60,00	325.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas	
93	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	60,00	325.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	88,82							
Predikat kinerja												(ST)	(T)							
94	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya	Barang Pokok	21,00	1.287.491.791	21,00	48.000.000	21,00	46.600.000	21,00	44.500.000	100,00	95,49	42,00	92.500.000	100,00	7,18			
95	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	60,00	375.000.000	1,00	48.000.000	5,00	17.400.000	5,00	15.300.000	100,00	87,93	6,00	63.300.000	10,00	16,88	Diskopdagin		
96	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	60,00	512.491.791	-	-	4,00	4.200.000	4,00	4.200.000	100,00	100,00	4,00	4.200.000	6,67	0,82	Diskopdagin		
97	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	6,00	400.000.000	-	-	4,00	25.000.000	4,00	25.000.000	100,00	100,00	4,00	25.000.000	66,67	6,25	Diskopdagin		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	95,98							
Predikat kinerja												(ST)	(ST)							
98	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk dan pestisida yang diterima oleh masyarakat	Jenis Pupuk	4,00	357.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			
99	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	4,00	102.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas	
100	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	5,00	127.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas	
101	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	5,00	127.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-							
Predikat kinerja												(SR)	(SR)							
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	92,16							
Predikat kinerja												(ST)	(ST)							
102	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	20,00	881.500.000	-	-	-	-	-	10,00	-		10,00	-	50,00	-			

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
103	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Ekspor Unggulan yang meningkat penjualannya	Produk	15,00	881.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
104	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha	15,00	260.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
105	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	10,00	255.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
106	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	10,00	260.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
107	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	15,00	41.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
108	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	15,00	39.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
109	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	15,00	25.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
110	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTPP yang tertib ukur	%	56,41	1.421.245.000	51,00	52.582.480	51,28	54.726.311	51,28	50.634.526	100,00	92,52	51,28	103.217.006	90,91	7,26		
111	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTPP yang ditera, tera ulang, dan diawasi	Unit	2.500,00	1.421.245.000	1.431,00	52.582.480	2.000,00	54.726.311	2.000,00	50.634.526	100,00	92,52	3.431,00	103.217.006	137,24	7,26		
112	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	12.300,00	894.745.000	5,00	52.582.480	40,00	54.726.311	40,00	50.634.526	100,00	92,52	45,00	103.217.006	0,37	11,54	Diskopdagin	
113	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	32,00	271.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
114	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	10,00	255.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	92,52						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	92,52						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
115	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	%	3,00	822.000.000	-	-	-	-	1,00	-			1,00	-	33,33	-		
116	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang meningkat omsetnya	Produk	17,00	822.000.000	-	-	-	-	3,00	-			3,00	-	17,65	-		
117	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	25,00	127.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
118	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	15,00	266.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
119	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	5,00	399.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
120	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	90,00	30.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												100,00	110,00						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(ST)						
121	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI UKM		Orang		14.132.398.199		87.357.100		480.371.940		658.700.978		137,12		746.058.078		5,28		
122	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	%	70,00	-	100,00	-	-	-	-	-			100,00	-	142,86	#DIV/0!		
123	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlayani (%)	%	100,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	#DIV/0!		
124	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%				
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)										-	-								
Predikat kinerja										(SR)	(SR)								
125	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terlayani (%)	%	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!			
126	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)										-	-								
Predikat kinerja										(SR)	(SR)								
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)										-	-								
Predikat kinerja										(SR)	(SR)								
127	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang patuh	%	55,00	1.300.367.000	49,00	58.880.000	48,61	46.466.000	48,61	41.751.000	100,00	89,85	97,61	100.631.000	177,47	7,74		
128	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	Jumlah koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Koperasi	37,00	1.300.367.000	38,00	58.880.000	35,00	46.466.000	35,00	41.751.000	100,00	89,85	73,00	100.631.000	197,30	7,74		
129	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	205,00	1.050.367.000	10,00	58.880.000	72,00	46.466.000	72,00	41.751.000	100,00	89,85	82,00	100.631.000	40,00	9,58	Diskopdagin	
130	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Unit Usaha	175,00	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)										100,00	89,85								
Predikat kinerja										(ST)	(T)								
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)										100,00	89,85								
Predikat kinerja										(ST)	(T)								
131	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang meningkat status kesehatannya	%	70,00	625.000.000	-	-	-	-	3,03	-			3,03	-	4,33	-		
132	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah koperasi yang meningkat status kesehatannya	Koperasi	23,00	625.000.000	-	-	-	-	1,00	-			1,00	-	4,35	-		
133	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	103,00	375.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
134	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	5,00	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)										-	-								
Predikat kinerja										(SR)	(SR)								
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)										-	-								
Predikat kinerja										(SR)	(SR)								
135	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	%	50,00	640.000.000	-	-	7,78	400.800.000	7,78	399.498.000	100,00	99,68	7,78	399.498.000	15,56	62,42		
136	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	Pengelola Koperasi	23,00	560.000.000	-	-	25,00	400.800.000	25,00	399.498.000	100,00	99,68	25,00	399.498.000	108,70	71,34		
137	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	145,00	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskopdagin	
138	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM UKM yang meningkat kapasitasnya	Pelaku UKM	30,00	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskopdagin	
139	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM yang memahami pengetahuan Kewirausahaan	Pelaku UKM	120,00	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskopdagin	
140	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Usaha Mikro yang meningkat kapasitasnya	Pelaku Usaha Mikro	30,00	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskopdagin	
141	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM Usaha mikro yang memahami pengetahuan Kewirausahaan	Pelaku Usaha Mikro	120,00	40.000.000	-	-	30,00	400.800.000	30,00	399.498.000	100,00	99,68					Diskopdagin	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)										100,00	99,68								
Predikat kinerja										(ST)	(ST)								
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)										100,00	99,68								
Predikat kinerja										(ST)	(ST)								
142	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya	%	5,00	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
143	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang meningkat volume usahanya	Kopeasi	21,00	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
144	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	150,00	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
145	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	%	15,00	4.135.000.000	-	-	1,10	33.105.940	1,10	217.451.978	100,00	656,84	1,10	217.451.978	7,33	5,26		
146	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya	Wirausaha Baru	5.000,00	4.135.000.000	-	-	120,00	33.105.940	120,00	217.451.978	100,00	656,84	120,00	217.451.978	2,40	5,26		
147	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	151.000,00	1.310.000.000	-	-	45.000,00	33.105.940	45.000,00	217.451.978	100,00	656,84	45.000,00	217.451.978	29,80	16,60	Diskopdagin	
148	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	240,00	1.550.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
149	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	240,00	280.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
150	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	150,00	535.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
151	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	150,00	270.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
152	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	120,00	190.000.000	-	-	-	-	-	-							Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	656,84						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	656,84						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
153	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	%	0,10	6.432.031.199	0,10	28.477.100	0,05	-	0,05	-			0,15	28.477.100	150,00	0,44		
154	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang naik kelas	Pelaku	500,00	6.432.031.199	100,00	28.477.100	-	-	-	-			100,00	28.477.100	20,00	0,44		
155	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	600,00	6.432.031.199	100,00	28.477.100	-	-	-	-			100,00	28.477.100	16,67	0,44	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												100,00	282,12						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(ST)						
156	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				5.669.014.680		278.052.150		488.336.746		477.053.006			-	755.105.156				
157	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	%	100,00	4.289.424.846	35,00	272.990.350	40,00	456.921.746	40,00	448.573.006	100,00	98,17	75,00	721.563.356	75,00	-		
158	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	%	90,00	4.289.424.846	40,00	272.990.350	50,00	456.921.746	50,00	448.573.006	100,00	98,17	90,00	721.563.356	100,00	-		
159	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	3,00	110.000.000	1,00	10.152.250	-	-	-	-			1,00	10.152.250	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
160	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	42,00	400.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
161	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	53,00	651.173.170	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
162	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	25,00	450.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
163	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	6,00	1.339.125.838	1,00	262.838.100	20,00	456.921.746	20,00	448.573.006	100,00	98,17	21,00	711.411.106	350,00	-	Diskopdagin	
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	5,00	1.339.125.838	-	-	-	-	-	-							Diskopdagin	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	98,17						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	98,17						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
164	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin	%	100,00	410.000.000	100,00	-	-	-	15,00	-			100,00	-	100,00	-		
165	Penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IUI Kecil dan Menengah yang difasilitasi perizinannya	Dokumen	45,00	410.000.000	-	-	-	-	4,00	-			4,00	-	8,89	-		
166	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	150,00	190.000.000	-	-	-	-	4,00	-			4,00	-	2,67	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
167	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	150,00	220.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat kinerja												(SR)	(SR)						
168	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah Data Informasi Industri Kabupaten Pangandaran yang diinformasikan	%	50,00	969.589.834	5,00	5.061.800	10,00	31.415.000	10,00	28.480.000	100,00	90,66	15,00	33.541.800	30,00	-		
169	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia	Data	30,00	969.589.834	20,00	5.061.800	20,00	31.415.000	20,00	28.480.000	100,00	90,66	40,00	33.541.800	133,33	-		
170	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	63,00	711.000.000	5,00	5.061.800	5,00	31.415.000	5,00	28.480.000	100,00	90,66	10,00	33.541.800	15,87	-	Diskopdagin	
171	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	17,00	129.294.917	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Diskopdagin	Bukan Kegiatan Prioritas
172	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	17,00	129.294.917	-	-	-	-	-	-								
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	90,66						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	90,66						
Predikat kinerja												(ST)	(ST)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												100,00	94,42						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(ST)						
1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				38.474.184.325		3.031.706.124		8.893.321.682		8.721.313.595								
2	URUSAN PERPUSTAKAAN				36.623.429.487		2.983.536.124		8.850.289.682		8.661.805.095								
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	94,00	31.945.445.945	89,00	2.327.255.474	90,00	2.752.618.468	90,00	2.691.585.918	100,00	97,78	89,50	5.018.841.392	95,21	15,71	Disusip	
4	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2 Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3 Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	75,00	450.652.076	55,00	23.799.750	50,00	35.867.500	61,69	30.762.000	123,38	85,77	58,35	54.561.750	77,79	12,11	Disusip	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	12,00	439.457.856	2,00	22.599.750	2,00	32.821.500	2,00	27.716.000	100,00	84,44	4,00	50.315.750	33,33	11,45	Disusip	Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan gaji Non ASN Bulan Oktober-Desember 2022 hanya diserap 50%

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6,00	11.194.220	1,00	1.200.000	1,00	3.046.000	1,00	3.046.000	100,00	100,00	2,00	4.246.000	33,33	37,93	Disupusip	Ketepatan perencanaan Anggaran Kas merupakan faktor pendukung tercapainya target kegiatan dan penyerapan anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	92,22						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	75,00	20.418.064.853	55,00	1.689.794.604	55,00	1.973.372.845	52,78	1.956.745.470	95,96	99,16	53,89	3.646.540.074	71,85	17,86		
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	20,00	19.249.497.477	16,00	1.611.439.604	16,00	1.927.579.095	16,00	1.916.161.720	100,00	99,41	16,00	3.527.601.324	80,00	18,33	Disupusip	Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan honor pengelola keuangan tidak terserap
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72,00	427.542.799	12,00	35.680.000	12,00	39.625.000	12,00	34.415.000	100,00	86,85	24,00	70.095.000	33,33	16,39	Disupusip	Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan gaji Non ASN Bulan Oktober-Desember 2022 hanya diserap 50%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6,00	728.790.228	1,00	41.625.000	1,00	3.700.000	1,00	3.700.000	100,00	100,00	2,00	45.325.000	33,33	6,22	Disupusip	Ketepatan perencanaan Anggaran Kas merupakan faktor pendukung tercapainya target kegiatan dan penyerapan anggaran
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	6,00	12.234.349	2,00	1.050.000	1,00	2.468.750	1,00	2.468.750	100,00	100,00	3,00	3.518.750	50,00	28,76	Disupusip	Ketepatan perencanaan Anggaran Kas merupakan faktor pendukung tercapainya target kegiatan dan penyerapan anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	96,56						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
12	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Jenis	45,00	468.121.838	12,00	38.600.000	41,00	45.800.000	41,00	36.768.000	100,00	80,28	26,50	75.368.000	58,89	16,10		
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	Jenis	45,00	468.121.838	12,00	38.600.000	12,00	45.800.000	12,00	36.768.000	100,00	80,28	12,00	75.368.000	26,67	16,10	Disupusip	Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan gaji Non ASN Bulan Oktober-Desember 2022 hanya diserap 50%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	80,28						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	85,00	204.548.892	81,00	16.250.000	81,00	19.300.000	80,00	18.232.000	98,77	94,47	80,50	34.482.000	94,71	16,86		
15	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	Laporan	72,00	204.548.892	12,00	16.250.000	12,00	19.300.000	12,00	18.232.000	100,00	94,47	12,00	34.482.000	16,67	16,86	Disupusip	Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan gaji Non ASN Bulan Oktober-Desember 2022 hanya diserap 50%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	94,47						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	85,00	1.724.663.990	80,00	65.366.283	81,00	68.653.754	80,00	80.974.700	98,77	117,95	80,00	146.340.983	94,12	8,49		
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis	30,00	161.365.686	20,00	12.237.454	20,00	1.753.180	14,00	3.526.000	70,00	201,12	34,00	15.763.454	113,33	9,77	Disupusip	Capaian kinerja tidak maksimal dikarenakan komponen instalasi listrik masih berfungsi dengan normal sehingga tidak perlu diganti, sedangkan penyerapan anggaran melebihi target karena anggaran Renja lebih kecil daripada DPA
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Jenis	35,00	254.414.044	35,00	20.141.941	35,00	31.988.946	35,00	31.988.322	100,00	100,00	35,00	52.130.263	100,00	20,49	Disupusip	Capaian sudah mencapai target baik capaian kinerja maupun capaian penyerapan anggaran dikarenakan pengadaan alat tulis kantor melalui mitra bissmarket
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	2,00	165.637.205	2,00	11.305.000	2,00	7.998.128	2,00	11.652.378	100,00	145,69	2,00	22.957.378	100,00	13,86	Disupusip	Penyerapan Anggaran melebihi target karena anggaran Renja lebih kecil daripada DPA
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	5,00	79.377.182	3,00	5.860.000	3,00	2.200.000	3,00	3.060.000	100,00	139,09	3,00	8.920.000	60,00	11,24	Disupusip	Penyerapan Anggaran melebihi target karena anggaran Renja lebih kecil daripada DPA
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	390,00	1.063.869.873	54,00	15.821.888	50,00	24.713.500	38,00	30.748.000	76,00	124,42	92,00	46.569.888	23,59	4,38	Disupusip	Capaian Kinerja tidak tercapai karena kesalahan perhitungan pada saat menyusun RKA DPA, sedangkan Penyerapan Anggaran melebihi target karena anggaran Renja lebih kecil daripada DPA
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												89,20	142,06						
Predikat Kinerja												(T)	(ST)						
22	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100,00	2.070.582.931	60,00	106.650.000	60,00	100.000.000	50,00	100.000.000	83,33	100,00	55,00	206.650.000	55,00	9,98		
23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	45,00	1.192.070.215	18,00	6.650.000	17,00	-	-	-			18,00	6.650.000	40,00	0,56	Disupusip	Tidak mengganggu Pengadaan Peralatan Kantor karena adanya himbauan dari BKD untuk tidak mengadakan pengadaan barang

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
24	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	6,00	878.512.716	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	100,00	100,00	2,00	200.000.000	33,33	22,77	Disupusip	Capaian sudah mencapai target baik capaian kinerja maupun capaian penyerapan anggaran dikarenakan survey harga yang sesuai dengan standar harga yang ada
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
25	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	85,00	4.557.572.222	65,00	286.654.437	65,00	410.533.500	53,53	367.798.948	82,35	89,59	59,26	654.453.385	69,72	14,36		
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Laporan	700,00	9.445.121	92,00	920.000	100,00	2.200.000	100,00	2.200.000	100,00	100,00	192,00	3.120.000	27,43	33,03	Disupusip	
27	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Rekening	60,00	1.712.208.187	60,00	138.336.287	60,00	189.300.000	60,00	168.981.948	100,00	89,27	60,00	307.318.235	100,00	17,95	Disupusip	Penyerapan Anggaran tidak maksimal dikarenakan di terapkannya hidup hemat energi pada kantor Disupusip
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Orang	17,00	2.835.918.914	15,00	147.398.150	15,00	219.033.500	15,00	196.617.000	100,00	89,77	15,00	344.015.150	88,24	12,13	Disupusip	Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan gaji Non ASN Bulan Oktober-Desember 2022 hanya diserap 50%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	93,01						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
29	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	85,00	2.051.239.143	65,00	100.140.400	65,00	99.090.869	35,21	100.304.800	54,17	101,23	50,10	200.445.200	58,95	9,77		
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7,00	1.542.411.057	4,00	91.140.400	4,00	90.090.869	4,00	91.304.800	100,00	101,35	4,00	182.445.200	57,14	11,83	Disupusip	Penyerapan Anggaran melebihi target karena anggaran Renja lebih kecil daripada DPA
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	Unit	40,00	508.828.086	20,00	9.000.000	20,00	9.000.000	14,00	9.000.000	70,00	100,00	34,00	18.000.000	85,00	3,54	Disupusip	Target Kinerja tidak tercapai karena penganggaran Renstra dan Renja tidak sama tetapi target renstra dan renjis sama
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												85,00	100,67						
Predikat Kinerja												(T)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												92,09	96,05						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
32	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	20,24	3.572.509.508	17,45	656.280.650	18,56	6.097.671.214	18,18	5.970.219.177	97,95	97,91	17,82	6.626.499.827	88,02	185,49		
33	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aspek pembangunan literasi masyarakat	Aspek	7,00	2.309.729.689	7,00	544.441.550	7,00	1.549.233.168	7,00	1.527.150.100	100,00	98,57	7,00	2.071.591.650	100,00	89,69		
34	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	10,00	289.472.239	5,00	406.545.550	5,00	107.533.168	5,00	102.098.800	100,00	94,95	5,00	508.644.350	50,00	175,71	Disupusip	Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan gaji Non ASN Bulan Oktober-Desember 2022 hanya diserap 50%
35	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	2,00	362.647.679	1,00	62.445.000	2,00	-	-	-			1,00	62.445.000	50,00	17,22	Disupusip	Tidak ada penganggaran
36	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi bahan pustaka khas daerah	Perpustakaan	60,00	116.025.333	-	-	10,00	-	-	-			-	-	-	-	Disupusip	Tidak ada penganggaran
37	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah bimbingan minat dan bakat pada pengelola perpustakaan dan pemustaka pada satuan pendidikan dasar	Perpustakaan	20,00	163.000.000	-	-	12,00	23.000.000	12,00	23.300.000	100,00	101,30	12,00	23.300.000	60,00	14,29	Disupusip	
38	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan perpustakaan khusus	Perpustakaan	30,00	163.000.000	-	-	10,00	14.600.000	10,00	14.555.000	100,00	99,69	10,00	14.555.000	33,33	8,93	Disupusip	Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan gaji Non ASN Bulan Oktober-Desember 2022 hanya diserap 50%
39	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti BIMTEK	Orang	556,00	59.000.000	-	-	93,00	-	-	-			-	-	-	-	Disupusip	Tidak ada penganggaran
40	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	10,00	92.820.266	-	-	2,00	25.600.000	2,00	26.416.500	100,00	103,19	2,00	26.416.500	20,00	28,46	Disupusip	Penyerapan Anggaran melebihi target karena anggaran Renja lebih kecil daripada DPA
41	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	Eksemplar	2.100,00	253.128.064	276,00	20.766.000	300,00	1.314.500.000	1.816,00	1.302.269.300	605,33	99,07	2.092,00	1.323.035.300	99,62	522,67	Disupusip	Capaian kinerja Jauh melebihi Terget karena ada penambahan pengadaan buku bantuan dari Provinsi Jawa Barat, sedangkan capaian penyerapan kurang dari target dikarenakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi untuk koordinasi tidak diserap semua

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
42	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang diolah	Eksemplar	2.100,00	439.786.108	276,00	48.835.000	300,00	64.000.000	1.816,00	58.510.500	605,33	91,42	2.092,00	107.345.500	99,62	24,41	Disupusip	Capaian kinerja Jauh melebihi Target karena ada penambahan pengadaan buku bantuan dari Provinsi Jawa Barat, sedangkan penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan gaji Non ASN Bulan Oktober-Desember 2022 hanya diserap 50%
43	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	370.850.000	1,00	5.850.000	1,00	-	-	-			1,00	5.850.000	100,00	1,58	Disupusip	Tidak ada penganggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												268,44	98,27						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
44	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Budaya Gemar Membaca	Nilai	1.616,00	1.262.779.819	1.169,00	111.839.100	13,98	4.548.438.046	14,09	4.443.069.077	100,79	97,68	1.183,09	4.554.908.177	73,21	360,70		
45	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	70,00	516.886.450	50,00	74.948.450	50,00	25.807.000	35,00	23.840.000	70,00	92,38	85,00	98.788.450	121,43	19,11	Disupusip	Capaian kinerja tidak maksimal! dikarenakan kegiatan pemilihan duta baca tidak dilaksanakan, sedangkan penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan gaji Non ASN Bulan Oktober-Desember 2022 hanya diserap 50%
46	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadikan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadikan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	4,00	140.002.719	-	-	1,00	4.426.500.546	1,00	4.325.898.577	100,00	97,73	1,00	4.325.898.577	25,00	3.089,87	Disupusip	Capaian Kinerja sudah tercapai karena koordinasi yang baik dalam proyek perluasan Gedung Perpustakaan, sedangkan penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan efisiensi anggaran atas dasar negosiasi harga dari harga yg diajukan oleh penyedia
47	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	27,00	438.890.650	6,00	36.890.650	6,00	56.106.000	6,00	55.670.000	100,00	99,22	12,00	92.560.650	44,44	21,09	Disupusip	Penyerapan Anggaran kurang maksimal dikarenakan adanya selisih antara standar harga dengan harga pembelian piala penghargaan, sehingga tidak diserap semua
48	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	69,00	74.000.000	-	-	10,00	-	-	-			-	-	-	-	Disupusip	Tidak ada penganggaran
49	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang	600,00	93.000.000	-	-	100,00	40.024.500	100,00	37.660.500	100,00	94,09	100,00	37.660.500	16,67	40,50	Disupusip	Penyerapan Anggaran Kurang maksimal dikarenakan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi tidak diserap karena memakai kendaraan pribadi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												92,50	95,86						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,39	98,13						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
50	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan	%	10,00	1.105.474.034	-	-	10,00	-	-	-			-	-	-	-		
51	Pelestarian Naskah kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang didigitalisasi/Alih aksarakan	Dokumen	1,00	883.089.053	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-		
52	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	60,00	616.227.078	-	-	10,00	-	-	-			-	-	-	-	Disupusip	Tidak ada penganggaran
53	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksemplar	6,00	266.861.975	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Disupusip	Tidak ada penganggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
54	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan seleksi budaya etnis nusantara	Kegiatan	2,00	222.384.981	-	-	2,00	-	-	-			-	-	-	-		
55	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Eksemplar	6,00	162.969.146	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Disupusip	Tidak ada penganggaran
56	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Eksemplar	6,00	59.415.835	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Disupusip	Tidak ada penganggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												98,98	97,85						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(ST)						
57	URUSAN KEARSIPAN				1.850.754.838		48.170.000		43.032.000		59.508.500								

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
58	Program Pengelolaan Arsip	Nilai LAKE Kabupaten/Kota	Nilai	4.180,00	1.353.179.085	2.532,00	48.170.000	2.764,00	43.032.000	3.930,00	59.508.500	142,19	138,29	3.231,00	107.678.500	77,30	7,96		
59	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD taat perundang-undangan	SKPD	24,00	553.373.569	-	-	24,00	19.472.000	24,00	31.394.500	100,00	161,23	24,00	31.394.500	100,00	5,67		
60	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah SKPD yang Tertib Instumen Kearsipan	SKPD	24,00	258.711.406	-	-	24,00	19.472.000	24,00	31.394.500	100,00	161,23	24,00	31.394.500	100,00	12,13	Disupusip	
61	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Perda Penyelenggaraan Kearsipan	Perda	6,00	294.662.163	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Disupusip	Tidak ada penganggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	161,23						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
62	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dikelola	Dokumen	150,00	227.825.190	19,00	47.200.000	75,00	-	-	-			19,00	47.200.000	12,67	20,72		
63	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Naskah yang ditelusuri	Naskah	78,00	160.060.488	-	-	13,00	-	-	-			-	-	-	-	Disupusip	Tidak ada penganggaran
64	Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang di Perservasi	Dokumen	100,00	67.764.702	18,00	47.200.000	20,00	-	-	-			18,00	47.200.000	18,00	69,65	Disupusip	Tidak ada penganggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
65	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan simpul jaringan informasi	Jaringan	1,00	571.980.326	1,00	970.000	1,00	23.560.000	1,00	28.114.000	100,00	119,33	1,00	29.084.000	100,00	5,08		
66	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Informasi Kearsipan melalui JIKN	Pengguna	1,00	282.875.676	-	-	1,00	18.800.000	1,00	22.256.000	100,00	118,38	1,00	22.256.000	100,00	7,87	Disupusip	Penyerapan Anggaran melebihi target karena anggaran Renja lebih kecil daripada DPA
67	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan di SKPD	Orang	100,00	289.104.650	10,00	970.000	100,00	4.760.000	63,00	5.858.000	63,00	123,07	73,00	6.828.000	73,00	2,36	Disupusip	Capaian Kinerja tidak maksimal karena kurangnya tenaga kearsipan di tiap-tiap OPD yang ada di Kabupaten Pangandaran, sedangkan Penyerapan Anggaran melebihi target karena anggaran Renja lebih kecil daripada DPA
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												81,50	120,73						
Predikat Kinerja												(T)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	140,28						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
68	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase LAKE Kabupaten/Kota	%	100,00	497.575.753	-	-	66,13	-	-	-			-	-	-	-		
69	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah dokumen Penyusutan Arsip Inaktif	Dokumen	24,00	312.255.184	-	-	50,00	-	-	-			-	-	-	-		
70	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah dokumen arsip yang di musnahkan	Dokumen	24,00	262.025.184	-	-	4,00	-	-	-			-	-	-	-	Disupusip	Tidak ada penganggaran
71	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi Arsip di Bawah 10 Tahun	Jumlah Dokumen arsip yang di nilai dan di tetapkan	Dokumen	8,00	50.230.000	-	-	4,00	-	-	-			-	-	-	-	Disupusip	Tidak ada penganggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
72	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kearsipan yang teridentifikasi dan terselamatkan	Dokumen	400,00	61.019.292	-	-	50,00	-	-	-			-	-	-	-		
73	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Terselamatkan	Dokumen	60,00	61.019.292	-	-	10,00	-	-	-			-	-	-	-	Disupusip	Tidak ada penganggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
74	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Dokumen	2,00	62.157.397	-	-	2,00	-	-	-			-	-	-	-		
75	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Pemekaran Desa	Dokumen	6,00	62.157.397	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Disupusip	Tidak ada penganggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
76	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang di Alih Mediakan melalui Autentikasi	Naskah	78,00	62.143.880	-	-	13,00	-	-	-			-	-	-	-		
77	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai persyaratan Penjaminan keabsahan Arsip	Jumlah Arsip Statis yang dialihmediakan melalui autentifikasi	Naskah	78,00	62.143.880	-	-	13,00	-	-	-			-	-	-	-	Disupusip	Tidak ada penganggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												142,19	138,29						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(ST)						
1	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN				269.853.904.367		6.278.706.010		18.009.333.078	-	12.856.252.634		71,39	-	19.134.958.644	-	7,09		

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				82.601.431.992		3.652.141.410		10.235.179.078	-	9.198.348.215		89,87	-	12.850.489.625	-	15,56		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	90,00	30.136.440.992	90,00	2.594.508.656	90,00	3.901.629.078	90,00	3.497.892.415	100,00	89,65	90,00	6.092.401.071	100,00	20,22	DKPKP	
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	90,00		90,00		90,00		90,00		100,00		90,00		100,00			
		3. Persentase peningkatan	%	90,00		90,00		90,00		90,00		100,00		90,00		100,00			
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	90,00		90,00		90,00		90,00		100,00		90,00		100,00			
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	2,00	638.429.816	2,00	49.397.300	2,00	68.097.750	2,00	66.575.414	100,00	97,76	2,00	115.972.714	100,00	18,17	DKPKP	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7,00	406.849.564	7,00	31.413.300	7,00	50.489.500	7,00	49.617.164	100,00	98,27	7,00	81.030.464	100,00	19,92	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	24,00	231.580.252	24,00	17.984.000	24,00	17.608.250	24,00	16.958.250	100,00	96,31	24,00	34.942.250	100,00	15,09	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	97,29						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen	4,00	24.631.642.058	4,00	2.154.701.618	4,00	3.322.238.209	4,00	2.938.159.229	100,00	88,44	8,00	5.092.860.847	200,00	20,68	DKPKP	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang bulan	546,00	24.005.742.802	294,00	2.116.013.618	322,00	3.293.970.209	444,00	2.911.334.229	137,89	88,38	369,00	5.027.347.847	67,58	20,94	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12,00	241.479.752	12,00	22.128.000	12,00	25.428.000	12,00	24.525.000	100,00	96,45	12,00	46.653.000	100,00	19,32	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1,00	338.947.252	1,00	15.785.000	2,00	2.065.000	1,00	1.525.000	50,00	73,85	1,00	17.310.000	100,00	5,11	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	13,00	45.472.252	13,00	775.000	13,00	775.000	12,00	775.000	92,31	100,00	12,50	1.550.000	96,15	3,41	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												95,05	89,67						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
12	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	dokumen	1,00	217.559.752	1,00	21.250.000	1,00	21.250.000	1,00	20.400.000	100,00	96,00	2,00	41.650.000	200,00	19,14	DKPKP	
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12,00	217.559.752	12,00	21.250.000	12,00	21.250.000	12,00	20.400.000	100,00	96,00	12,00	41.650.000	100,00	19,14	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	96,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
14	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	dokumen	1,00	203.259.752	1,00	21.070.000	1,00	21.140.000	1,00	20.150.000	100,00	95,32	2,00	41.220.000	200,00	20,28	DKPKP	
15	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	12,00	203.259.752	12,00	21.070.000	12,00	21.140.000	12,00	20.150.000	100,00	95,32	12,00	41.220.000	100,00	20,28	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	95,32						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
16	Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen	1,00	139.134.752	1,00	3.375.000	1,00	5.550.000	-	-	-	-	1,00	3.375.000	100,00	2,43	DKPKP	
17	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	39,00	139.134.752	39,00	3.375.000	39,00	5.550.000	-	-	-	-	19,50	3.375.000	50,00	2,43	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen	1,00	2.159.059.704	1,00	153.291.245	1,00	230.524.845	1,00	229.434.991	100,00	99,53	2,00	382.726.236	200,00	17,73	DKPKP	
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	10,00	56.288.772	10,00	995.000	10,00	2.439.080	10,00	2.426.800	100,00	99,50	10,00	3.421.800	100,00	6,08	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah adanya tagihan listrik setiap bulan
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	72,00	599.103.447	72,00	81.102.900	85,00	74.959.365	72,00	74.838.600	84,71	99,84	72,00	155.941.500	100,00	26,03	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah untuk operasional kantor
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	5,00	372.454.752	5,00	21.191.000	3,00	58.132.750	5,00	57.865.800	166,67	99,54	5,00	79.056.800	100,00	21,23	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah untuk operasional kantor
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	5,00	86.218.477	5	4.804.000	5,00	9.043.650	5,00	9.043.200	100,00	100,00	5,00	13.847.200	100,00	16,06	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah untuk operasional kantor

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	204,00	192.268.252	204,00	11.460.000	204,00	11.820.000	204,00	11.165.000	100,00	94,46	204,00	22.625.000	100,00	11,77	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi informasi di kantor
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	laporan	12,00	290.434.752	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dokumen	14,00	562.291.252	14,00	33.738.345	20,00	74.130.000	11,00	74.095.591	55,00	99,95	12,50	107.833.936	89,29	19,18	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												101,06	98,88						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dokumen	3,00	1.507.991.053	3,00	130.797.293	3,00	152.297.500	3,00	143.524.694	100,00	94,24	6,00	274.321.987	200,00	18,19	DKPKP	
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12,00	62.791.634	12,00	2.277.000	12,00	3.738.000	12,00	3.704.000	100,00	99,09	12,00	5.981.000	100,00	9,53	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah untuk operasional kantor
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12,00	347.627.134	12,00	37.489.893	12,00	46.347.000	12,00	41.608.994	100,00	89,78	12,00	79.098.887	100,00	22,75	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah adanya tagihan listrik setiap bulan
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12,00	1.097.572.285	12,00	91.030.400	7,00	102.212.500	7,00	98.211.700	100,00	96,09	9,50	189.242.100	79,17	17,24	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	94,98						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dokumen	3,00	639.364.105	3,00	60.626.200	3,00	80.530.774	3,00	79.648.087	100,00	98,90	6,00	140.274.287	200,00	21,94	DKPKP	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	11,00	419.922.556	11,00	50.599.200	11,00	63.946.458	11,00	63.087.787	100,00	98,66	11,00	113.686.987	100,00	27,07	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah untuk operasional kantor
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10,00	117.469.915	10,00	4.529.000	10,00	8.984.316	10,00	8.964.300	100,00	99,78	10,00	13.493.300	100,00	11,49	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah untuk operasional kantor
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3,00	101.971.634	3,00	5.498.000	3,00	7.600.000	3,00	7.596.000	100,00	99,95	3,00	13.094.000	100,00	12,84	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah untuk operasional kantor
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	99,46						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												87,50	83,77						
Predikat Kinerja												(T)	(T)						
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				52.464.991.000		1.057.632.754		6.333.550.000		5.700.455.800		90,00		6.758.088.554		12,88	DKPKP	
35	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	%	8,00	35.104.325.000	1,00	489.075.000	8,00	5.518.320.000	-	4.994.586.000	-	90,51	1,00	5.483.661.000	12,50	15,62	DKPKP	Pada TA 2022 tidak ada penambahan cadangan pangan daerah
36	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan	dokumen	1,00	35.104.325.000	1,00	489.075.000	1,00	5.518.320.000	1,00	4.994.586.000	100,00	90,51	2,00	5.483.661.000	200,00	15,62	DKPKP	
37	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	unit	5,00	35.104.325.000	4,00	489.075.000	11,00	5.518.320.000	5,00	4.994.586.000	45,45	90,51	4,50	5.483.661.000	90,00	15,62	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah proses pengadaan barang dan jasa lebih cepat, proses salur anggaran dari pusat ke daerah lebih cepat, proses pemenuhan syarat penyaluran lebih cepat
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												45,45	90,51						
Predikat Kinerja												(SR)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	90,51						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
38	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Angka Kecukupan Energi	Kcal	2.100,00	13.411.880.500	2.100,00	533.662.654	2.100,00	752.199.250	2.100,00	643.185.200	100,00	85,51	2.100,00	1.176.847.854	100,00	8,77	DKPKP	
		2. Angka Kecukupan Protein	gr	57,00		57,00		57,00		57,00		100,00		57,00		100,00		DKPKP	
39	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kotadalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten / Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	dokumen	2,00	257.950.500	2,00	43.726.600	2,00	108.400.000	3,00	8.075.000	150,00	7,45	2,50	51.801.600	125,00	20,08	DKPKP	
40	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	desa	1,00	51.386.500	1,00	31.239.400	-	-	-	-			1,00	31.239.400	100,00	60,79	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
41	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	dokumen	24,00	206.564.000	24,00	12.487.200	24,00	108.400.000	24,00	8.075.000	100,00	7,45	24,00	20.562.200	100,00	9,95	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	7,45						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
42	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten /Kota	dokumen	1,00	610.510.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	
43	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	10,00	610.510.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-							
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)							
44	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	dokumen	1,00	12.543.420.000	1,00	489.936.054	1,00	643.799.250	1,00	635.110.200	100,00	98,65	2,00	1.125.046.254	200,00	8,97	DKPKP		
45	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	12,00	12.543.420.000	1,00	489.936.054	12,00	643.799.250	12,00	635.110.200	100,00	98,65	13,00	1.125.046.254	108,33	8,97	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang n	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	98,65							
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												125,00	53,05							
Predikat Kinerja												(ST)	(R)							
46	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)	%	5,00	3.033.020.500	2,00	34.895.100	5,00	63.030.750	6,45	62.684.600	129,00	99,45	8,45	97.579.700	169,00	3,22	DKPKP		
47	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	dokumen	1,00	610.510.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP		
48	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1,00	610.510.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-							
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)							
49	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	2,00	2.422.510.500	2,00	34.895.100	2,00	63.030.750	2,00	62.684.600	100,00	99,45	4,00	97.579.700	200,00	4,03	DKPKP		
50	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	laporan	12,00	511.277.000	12,00	12.059.500	12,00	8.400.000	12,00	8.075.000	100,00	96,13	12,00	20.134.500	100,00	3,94	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya	
51	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1,00	1.911.233.500	1,00	22.835.600	1,00	54.630.750	1,00	54.609.600	100,00	99,96	1,00	77.445.200	100,00	4,05	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah Telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidang nya	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	98,05							
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	99,45							
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)							
52	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman	%	0,55	915.765.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP		
53	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	2,00	915.765.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP		
54	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1,00	305.255.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran	
55	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1,00	610.510.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-							
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-							
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												82,25	91,28							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(T)	(ST)							
56	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				187.252.472.374		2.626.564.600		7.774.154.000		3.657.904.419		47,05	-	6.284.469.019		3,36	DKPKP		
57	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	4,18	37.779.476.281	2,01	1.362.150.600	0,20	3.201.804.000	-	0,09	1.531.182.132	-	45,00	47,82	1,92	2.893.332.732	45,93	7,66	DKPKP
58	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen izin usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan	Dokumen	2,00	1.221.020.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP		
59	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan	Dokumen	1,00	610.510.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran	
60	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha yang Diterbitkan	Dokumen	5,00	610.510.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-							

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
61	Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	Jumlah dokumen kelayakan usaha Pembudidaya ikan Kecil skala kecil	Dokumen	4,00	11.354.672.550	4,00	235.581.400	4,00	1.728.604.000	4,00	370.310.500	100,00	21,42	4,00	605.891.900	100,00	5,34	DKPKP	
62	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	41,00	8.454.750.050	10,00	235.581.400	10,00	1.728.604.000	20,00	370.310.500	200,00	21,42	30,00	605.891.900	73,17	7,17	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah antusias kelompok untuk mengikuti pengembangan kapasitas
63	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	60,00	610.510.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi anggaran
64	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	35,00	763.137.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi anggaran
65	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	29,00	1.526.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												200,00	21,42						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
66	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDOPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen izin usaha Pembudidaya Ikan Kecil	Dokumen	50,00	1.098.846.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	
67	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDOPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	rekomendasi	60,00	610.510.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
68	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDOPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	rekomendasi	240,00	488.336.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
69	Pengelolaan pembudidayaan ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	707,00	24.104.937.731	323,00	1.126.569.200	250,00	1.473.200.000	417,00	1.160.871.632	166,80	78,80	740,00	2.287.440.832	104,67	9,49	DKPKP	
70	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	305.255.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
71	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2,00	7.326.120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
72	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	16,00	8.994.815.231	4,00	1.126.569.200	5,00	1.473.200.000	4,00	1.160.871.632	80,00	78,80	8,00	2.287.440.832	50,00	25,43	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah proses pengadaan barang dan jasa lebih cepat, proses salur anggaran dari pusat ke daerah lebih cepat, proses pemenuhan syarat penyaluran lebih cepat
73	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	dokumen	1,00	1.068.392.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
74	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	orang	50,00	305.255.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
75	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Hektar	29,00	3.052.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
76	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	orang	290,00	3.052.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												80,00	78,80						
Predikat Kinerja												(T)	(T)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												133,40	50,11						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
77	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan	%	0,90	6.040.835.246	-	-	90,00	1.386.750.000	10,00	498.184.887	11,11	35,92	10,00	498.184.887	1.111,11	8,25	DKPKP	
78	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen izin usaha Pengolahan hasil Perikanan	Dokumen	5,00	723.267.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	
79	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	1,00	723.267.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
80	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	Dokumen	1,00	1.250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%			
81	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	unit usaha	1,00	1.250.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-							
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)							
82	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/	Jumlah laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	Dokumen	2,00	4.067.568.016	-	-	2,00	1.386.750.000	2,00	498.184.887	100,00	35,92	2,00	498.184.887	100,00	12,25	DKPKP		
83	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	30,00	1.567.568.016	-	-	5,00	979.750.000	-	96.186.871	-	9,82	-	96.186.871	-	6,14	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran	
84	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	pelaku usaha	50,00	2.500.000.000	-	-	50,00	407.000.000	50,00	401.998.016	100,00	98,77	50,00	401.998.016	100,00	16,08	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah besarnya antusias kelompok yang membutuhkan bantuan Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												50,00	54,29							
Predikat Kinerja												(SR)	(R)							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	35,92							
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)							
85	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,30	129.493.812.501	0,20	1.259.209.000	0,30	2.985.600.000	-	0,21	1.628.537.400	-	0,01	2.887.746.400	-	3,33	2,23	DKPKP	
86	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan Ikan	Dokumen	3,00	107.907.432.216	3,00	1.056.639.100	3,00	833.648.000	3,00	73.328.800	100,00	8,80	3,00	1.129.967.900	100,00	1,05	DKPKP		
87	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Peraliran Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1,00	1.035.765.000	1,00	38.995.000	-	-	-	-			1,00	38.995.000	100,00	3,76	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran	
88	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	unit	6,00	68.015.414.500	2,00	831.013.300	-	-	-	-			2,00	831.013.300	33,33	1,22	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran	
89	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	unit	39,00	38.856.252.716	5,00	186.630.800	13,00	833.648.000	5,00	73.328.800	38,46	8,80	10,00	259.959.600	25,64	0,67	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah proses pengadaan barang dan jasa lebih cepat, proses salur anggaran dari pusat ke daerah lebih cepat, proses pemenuhan syarat penyaluran lebih cepat	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												38,46	8,80							
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)							
90	Pengelolaan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Nelayan Kecil	laporan	3,00	11.931.360.285	3,00	33.000.900	3,00	1.856.952.000	3,00	1.449.554.800	100,00	78,06	6,00	1.482.555.700	200,00	12,43	DKPKP		
91	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	500,00	9.688.360.285	100,00	33.000.900	500,00	1.856.952.000	100,00	1.449.554.800	20,00	78,06	200,00	1.482.555.700	40,00	15,30	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah antusias nelayan untuk mengikuti pengembangan kapasitas	
92	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagannya	Kelompok	2,00	935.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran	
93	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	unit usaha	1,00	1.308.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												20,00	78,06							
Predikat Kinerja												(SR)	(T)							
94	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan(TPI)	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	2,00	6.144.420.000	2,00	169.569.000	2,00	295.000.000	1,00	105.653.800	50,00	35,81	1,50	275.222.800	75,00	4,48	DKPKP		
95	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	1,00	1.221.020.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran	
96	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	layanan	8,00	4.923.400.000	8,00	169.569.000	8,00	295.000.000	8,00	105.653.800	100,00	35,81	8,00	275.222.800	100,00	5,59	DKPKP	Faktor pendorong sub kegiatan ini adalah layanan yang di selenggarakan untuk TPI	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	35,81							
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)							
97	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Dokumen	2,00	1.170.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP		
98	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1,00	585.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran	
99	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	rekomendasi	10,00	585.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-							
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)							
100	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Dokumen	2,00	1.170.200.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	DKPKP		

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
101	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1,00	585.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
102	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	rekomendasi	1,00	585.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
103	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	Jumlah dokumen Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Dokumen	2,00	1.170.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	
104	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	1,00	585.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
105	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	rekomendasi	1,00	585.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												83,33	40,89						
Predikat Kinerja												(T)	(SR)						
106	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan	%	5,00	13.938.348.347	3,00	5.205.000	5,00	200.000.000	-	-	-	-	3,00	5.205.000	60,00	0,04	DKPKP	
107	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Jumlah dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Dokumen	2,00	13.938.348.347	2,00	5.205.000	2,00	200.000.000	-	-	-	-	2,00	5.205.000	100,00	0,04	DKPKP	
108	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yangdapat Diusahakan dalamKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	dokumen	2,00	13.449.940.347	2,00	5.205.000	2,00	200.000.000	-	-	-	-	2,00	5.205.000	100,00	0,04	DKPKP	Kegiatan bukan prioritas
109	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	dokumen	2,00	488.408.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKPKP	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												-	25,97	34,57					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(SR)	(SR)						
1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				237.418.746.741		17.609.850.171		22.429.893.165		16.100.542.790		71,78		33.710.392.961				
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				219.551.426.185		16.968.198.721		21.840.650.165		15.650.395.790		71,66		32.618.594.511				
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	90,00	71.308.320.379	98,80	4.346.485.909	90,00	7.547.785.469	100,00	6.896.584.401	111,11	91,37	99,40	11.243.070.310	110,44	15,77	Disparbud	
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	90,00		100,00		90,00		100,00	-	111,11		100,00		111,11			
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	90,00		100,00		90,00		100,00		111,11		100,00		111,11			
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	90,00		100,00		90,00		100,00		111,11		100,00		111,11			
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%	90,00	686.460.601	100,00	47.525.000	90,00	53.700.000	100,00	45.885.000	111,11	85,45	100,00	93.410.000	111,11	13,61	Disparbud	
		Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%	90,00		100,00		90,00		100,00		111,11		100,00		111,11			
		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	90,00		100,00		90,00		100,00		111,11		100,00		111,11			
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	423.910.351	11,00	44.100.000	10,00	46.390.000	16,00	39.690.000	160,00	85,56	27,00	83.790.000	540,00	19,77	Disparbud	Penyusunan Dokumen Perencanaan
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	12.752.513	-	-	1,00	610.000	1,00	610.000	100,00	100,00	1,00	610.000	100,00	4,78	Disparbud	Dokumen RKA SKPD
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	12.752.513	-	-	1,00	610.000	1,00	240.000	100,00	39,34	1,00	240.000	100,00	1,88	Disparbud	Dokumen Perubahan RKA SKPD
8	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	12.752.513	-	-	1,00	240.000	5,00	610.000	500,00	254,17	5,00	610.000	500,00	4,78	Disparbud	Dokumen DPA SKPD Murni 1 dan Pergeseran 4
9	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	12.752.513	-	-	1,00	240.000	2,00	240.000	200,00	100,00	2,00	240.000	200,00	1,88	Disparbud	Dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dan Pergeseran 1

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16,00	178.535.175	-	-	16,00	2.480.000	17,00	1.365.000	106,25	55,04	17,00	1.365.000	106,25	0,76	Disparbud	Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3,00	33.005.025	3,00	3.425.000	3,00	3.130.000	3,00	3.130.000	100,00	100,00	6,00	6.555.000	200,00	19,86	Disparbud	Penyusunan Laporan Evaluasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												180,89	104,87						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	90,00	39.852.357.954	100,00	3.406.547.009	90,00	6.201.775.011	100,00	5.976.937.799	111,11	96,37	100,00	9.383.484.808	111,11			
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	42,00	39.206.761.925	34,00	3.342.367.009	43,00	6.146.775.011	41,00	5.931.547.799	95,35	96,50	75,00	9.273.914.808	178,57	23,65	Disparbud	
14	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2,00	12.752.513	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
15	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	210.870.150	1,00	37.700.000	1,00	23.000.000	1,00	19.940.000	100,00	86,70	2,00	57.640.000	200,00	27,33	Disparbud	
16	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2,00	153.030.150	-	-	2,00	23.000.000	1,00	18.450.000	50,00	80,22	1,00	18.450.000	50,00	12,06	Disparbud	
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	197.630.150	1,00	23.680.000	1,00	5.000.000	1,00	5.000.000	100,00	100,00	2,00	28.680.000	200,00	14,51	Disparbud	
18	Pengelolaan dan Penyipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3,00	25.505.025	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1,00	30.505.025	1,00	2.800.000	1,00	4.000.000	1,00	2.000.000	100,00	50,00	2,00	4.800.000	200,00	15,74	Disparbud	
20	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	15.303.015	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												89,07	82,68						
Predikat Kinerja												(T)	(T)						
21	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Jenis	30,00	487.585.426	22,00	42.000.000	30,00	44.500.000	24,00	36.900.000	80,00	82,92	46,00	78.900.000	153,33			
		Unit/Buah	900,00				900,00		1.057,00		1.057,00	117,44		1.057,00	117,44				
22	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	25.505.025	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
23	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	25.505.025	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
24	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1,00	25.505.025	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
25	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	25.505.025	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
26	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	153.030.150	-	-	12,00	23.000.000	12,00	18.450.000	100,00	80,22	12,00	18.450.000	100,00	12,06	Disparbud	
27	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	207.030.150	23,00	42.000.000	1,00	21.500.000	1,00	18.450.000	100,00	85,81	24,00	60.450.000	2.400,00	29,20	Disparbud	
28	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	25.505.025	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	83,02						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
29	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	%	30,00	584.805.526	21,53	42.000.000	10,00	44.080.000	75,93	37.980.000	759,29	86,16	97,46	79.980.000	324,86			
30	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	76.515.075	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
31	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1,00	76.515.075	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
32	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	1,00	76.515.075	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
33	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	2,00	153.030.150	-	-	2,00	22.000.000	2,00	18.450.000	100,00	83,86	2,00	18.450.000	100,00	12,06	Disparbud	Pengolahan PAD
34	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1 Dokumen	202.230.150	1,00	42.000.000	1,00	22.080.000	1,00	19.530.000	100,00	88,45	2,00	61.530.000	-	30,43	Disparbud	Pelaporan PAD
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	86,16						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
35	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	90,00	2.268.488.687	100,00	30.000.000	90,00	32.000.000	100,00	28.400.000	111,11	88,75	100,00	58.400.000	111,11			
36	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1,00	229.545.225	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
37	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	42,00	127.525.125	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
38	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Dokumen	1,00	295.254.271	10,00	15.000.000	1,00	15.500.000	1,00	13.700.000	100,00	88,39	11,00	28.700.000	1.100,00	9,72	Disparbud	
39	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	Dokumen	1,00	162.377.638	1,00	15.000.000	1,00	16.500.000	1,00	14.700.000	100,00	89,09	2,00	29.700.000	200,00	18,29	Disparbud	
40	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1,00	25.505.025	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
41	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	42,00	459.090.451	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
42	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	42,00	459.090.451	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
43	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	42,00	510.100.501	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	88,74						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
44	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	90,00	5.722.324.570	100,00	326.044.192	90,00	443.999.828	100,00	294.248.555	111,11	66,27	100,00	620.292.747	111,11			
45	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20,00	81.477.651	2,00	4.736.000	1,00	9.999.828	1,00	1.845.000	100,00	18,45	3,00	6.581.000	15,00	8,08	Disparbud	
46	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4.000,00	2.676.178.356	54,00	247.399.287	2,00	200.000.000	1,00	175.556.932	50,00	87,78	55,00	422.956.219	1,38	15,80	Disparbud	
47	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3,00	127.525.125	-	-	1,00	6.000.000	-	1.650.000	-	27,50	-	1.650.000	-	1,29	Disparbud	
48	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	59.936.809	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
49	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30,00	136.139.375	3,00	4.612.150	2,00	20.000.000	2,00	18.315.200	100,00	91,58	5,00	22.927.350	16,67	16,84	Disparbud	
50	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	17,00	228.748.200	3,00	12.810.000	27,00	22.460.000	27,00	14.510.000	100,00	64,60	30,00	27.320.000	176,47	11,94	Disparbud	
51	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	6,00	25.505.025	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
52	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	3.000,00	382.575.376	-	-	25,00	20.000.000	13,00	8.199.000	52,00	41,00	13,00	8.199.000	0,43	2,14	Disparbud	
53	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150,00	1.703.279.357	2,00	56.486.755	150,00	165.540.000	33,00	74.172.423	22,00	44,81	35,00	130.659.178	23,33	7,67	Disparbud	Perjalanan Dinas
54	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2,00	25.505.025	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
55	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2,00	275.454.271	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												60,57	53,67						
Predikat Kinerja												(R)	(R)						
56	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	90,00	13.823.723.577	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
57	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5,00	2.958.582.906	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
58	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3,00	3.366.663.307	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
59	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3,00	510.100.501	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
60	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6,00	612.120.601	-	-	10,00	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
61	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	1.275.251.253	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
62	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2,00	510.100.501	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
63	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	3.570.703.507	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
64	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15,00	1.020.201.002	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
65	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	90,00	4.660.867.653	100,00	312.865.692	90,00	492.730.630	100,00	342.662.970	111,11	69,54	100,00	655.528.662	111,11			
66	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.000,00	208.537.185	1.407,00	12.600.000	2,00	13.600.000	2,00	11.100.000	100,00	81,62	1.409,00	23.700.000	140,90	11,36	Disparbud	Surat Masuk dan Keluar
67	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36,00	1.955.225.623	3,00	131.298.192	3,00	282.230.630	3,00	158.642.970	100,00	56,21	6,00	289.941.162	16,67	14,83	Disparbud	Rekening Listrik, PDAM dan Intenet
68	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	153.030.150	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
69	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	2.344.074.694	12,00	168.967.500	5,00	196.900.000	5,00	172.920.000	100,00	87,82	17,00	341.887.500	141,67	14,59	Disparbud	Kebersihan, Keamanan, Sopir dan Administrasi Kantor

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	75,22						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
70	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	90,00	3.221.706.385	83,97	139.504.016	90,00	235.000.000	93,96	133.570.077	104,40	56,84	88,96	273.074.093	98,85			
71	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	11,00	1.391.609.657	13,00	74.284.016	11,00	200.000.000	10,00	128.195.077	90,91	64,10	23,00	202.479.093	209,09	14,55	Disparbud	
72	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4,00	510.100.501	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
73	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15,00	137.775.125	2,00	5.220.000	13,00	10.000.000	7,00	4.500.000	53,85	45,00	9,00	9.720.000	60,00	7,05	Disparbud	
74	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	3,00	25.505.025	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
75	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1,00	76.515.075	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
76	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	1.080.201.002	2,00	60.000.000	2,00	25.000.000	1,00	875.000	50,00	3,50	3,00	60.875.000	150,00	5,64	Disparbud	Rehab Gedung Kantor
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												64,92	37,53						
Predikat Kinerja												(R)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												189,75	79,04						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
77	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	%	18,00	113.428.792.733	13,68	11.965.594.599	10,00	11.441.164.289	100,00	7.637.093.889	1.000,00	66,75	113,68	19.602.688.488	631,58			
78	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang dikelola	%	18,00	12.984.608.253	-	-	10,00	119.538.500	35,71	101.720.000	357,14	85,09	35,71	101.720.000	198,41			
79	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lokasi	2,00	255.050.251	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
80	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	3,00	2.295.452.255	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
81	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	5,00	10.128.045.447	-	-	2,00	119.538.500	5,00	101.720.000	250,00	85,09	5,00	101.720.000	100,00	1,00	Disparbud	
82	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	306.060.301	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												250,00	85,09						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
83	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	%	18,00	9.801.581.127	-	-	10,00	500.000.000	100,00	4.540.000	1.000,00	0,91	100,00	4.540.000	555,56			
84	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	3,00	4.080.804.008	-	-	1,00	500.000.000	1,00	4.540.000	100,00	0,91	1,00	4.540.000	33,33	0,11	Disparbud	Ripparda
85	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	5,00	2.550.502.505	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
86	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	262.701.758	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
87	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	1,00	2.907.572.856	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	0,91						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
88	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola	%	18,00	88.099.853.099	4,21	11.806.546.599	10,00	10.634.325.789	2,31	7.393.753.889	23,15	69,53	6,53	19.200.300.488	36,25			
89	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	9.436.859.269	-	-	10,00	1.820.787.000	10,00	49.565.250	100,00	2,72	10,00	49.565.250	-	0,53	Disparbud	Dokumen Perencanaan Pengembangan Destinasi Wisata
90	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	5,00	43.700.469.405	36,00	368.356.787	5,00	4.413.538.789	5,00	3.977.273.139	100,00	90,12	41,00	4.345.629.926	820,00	9,94	Disparbud	Timsus, Balawista
91	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	10,00	21.178.244.981	2,00	9.095.718.000	13,00	4.200.000.000	3,00	3.227.660.500	23,08	76,85	5,00	12.323.378.500	50,00	58,19	Disparbud	Pemeliharaan Sarpras Objek Wisata
92	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	1,00	6.697.317.454	-	2.094.988.312	-	-	-	-			-	2.094.988.312	-	31,28	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
93	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi	5,00	7.086.961.991	-	247.483.500	1,00	200.000.000	1,00	139.255.000	100,00	69,63	1,00	386.738.500	20,00	5,46	Disparbud	GSTC

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja			%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												80,77	59,83						
Predikat Kinerja												(T)	(R)						
94	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	%	18,00	2.542.750.255	47,33	159.048.000	10,00	187.300.000	100,00	137.080.000	1.000,00	73,19	73,67	296.128.000	409,26			
95	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	50,00	429.675.376	300,00	34.800.000	50,00	37.300.000	50,00	30.600.000	100,00	82,04	350,00	65.400.000	700,00	15,22	Disparbud	Fasilitasi Pendaftaran TDUP, Capaian besar karena pembagiannya hanya jumlah Usaha Pariwisata yang mendaftar TDUP
96	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	3,00	1.858.024.628	2,00	124.248.000	3,00	150.000.000	2,00	106.480.000	66,67	70,99	4,00	230.728.000	133,33	12,42	Disparbud	
97	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	2,00	255.050.251	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												83,33	76,51						
Predikat Kinerja												(T)	(T)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												595,07	57,18						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
98	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan	%	45,00	20.497.443.058	10,52	99.115.000	25,00	2.172.240.407	25,00	460.552.500	100,00	21,20	35,52	559.667.500	78,93			
99	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipasarkan dan dipromosikan	%	45,00	20.497.443.058	10,52	99.115.000	25,00	2.172.240.407	25,00	460.552.500	100,00	21,20	35,52	559.667.500	78,93			
100	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2,00	6.333.279.281	1,00	51.680.000	1,00	88.103.000	1,00	76.248.000	100,00	86,54	2,00	127.928.000	100,00	2,02	Disparbud	Promosi Medsos dan Website Promosi
101	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	2,00	9.946.959.770	-	-	1,00	1.993.991.407	1,00	347.813.000	100,00	17,44	1,00	347.813.000	50,00	3,50	Disparbud	Pan Hash
102	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1,00	881.550.752	1,00	47.155.000	1,00	41.156.000	1,00	35.691.500	100,00	86,72	2,00	82.846.500	200,00	9,40	Disparbud	Penyediaan Database Kepariwisataaan
103	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2,00	530.100.501	-	280.000	-	-	-	-			-	280.000	-	0,05	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
104	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	5,00	2.805.552.756	-	-	2,00	48.990.000	2,00	800.000	100,00	1,63	2,00	800.000	40,00	0,03	Disparbud	Kajian Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	48,09						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	21,20						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
105	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi	%	18,00	7.779.327.615	11,76	17.400.000	10,00	22.400.000	5,88	15.300.000	58,82	68,30	17,65	32.700.000	98,04			
106	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi,	Persentase parasana kreatif yang dibangun	%	18,00	2.805.552.756	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
107	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Zona Kreatif	1,00	2.805.552.756	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
108	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	18,00	4.973.774.860	11,76	17.400.000	10,00	22.400.000	2,44	15.300.000	24,39	68,30	14,20	32.700.000	78,91			
109	Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	1,00	510.100.501	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
110	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	1,00	1.046.001.002	2,00	17.400.000	1,00	22.400.000	1,00	15.300.000	100,00	68,30	3,00	32.700.000	300,00	3,13	Disparbud	Database Ekonomi Kreatif
111	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	2,00	1.020.201.002	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
112	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	7,00	1.887.371.854	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
113	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	2,00	255.050.251	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
114	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	1,00	255.050.251	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	68,30						
Predikat Kinerja												(S)	(S)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												24,39	68,30						
Predikat Kinerja												(SR)	(S)						
115	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing	%	35,00	6.537.542.399	4,27	539.603.213	15,00	657.060.000	2,28	640.865.000	15,18	97,54	6,55	1.180.468.213	18,72			
116	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas tingkat dasar	%	35,00	5.338.806.222	4,27	539.603.213	15,00	632.060.000	76,92	615.865.000	512,82	97,44	81,20	1.155.468.213	231,99			

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
117	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	150,00	1.921.752.359	15,00	257.753.356	220,00	505.628.000	160,00	490.474.000	72,73	97,00	175,00	748.227.356	116,67	38,93	Disparbud	Penambahan volume kegiatan yang berasal dari DAK Non Fisik
118	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	75,00	1.071.601.609	180,00	281.849.857	40,00	126.432.000	40,00	125.391.000	100,00	99,18	220,00	407.240.857	293,33	38,00	Disparbud	Penambahan volume kegiatan yang berasal dari DAK Non Fisik
119	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	150,00	1.530.301.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
120	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	25,00	560.100.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
121	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1,00	255.050.251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												86,36	98,09						
Predikat Kinerja												(T)	(ST)						
122	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	%	35,00	1.198.736.177	-	-	15,00	25.000.000	50,00	25.000.000	333,33	100,00	50,00		142,86			
123	Pelatihan, Bimbingan teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	60,00	688.635.676	-	-	20,00	25.000.000	15,00	25.000.000	75,00	100,00	15,00	25.000.000	25,00	3,63	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
124	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	10,00	510.100.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												75,00	100,00						
Predikat Kinerja												(S)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												423,08	98,72						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												257,02	69,03						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(S)						
125	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				17.867.320.556		641.651.450		589.243.000		450.147.000		76,39		1.091.798.450				
126	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	%	20,00	14.277.822.074	20,00	606.851.450	12,00	561.000.000	33,33	429.940.000	277,78	76,64	53,33	1.036.791.450	266,67			
127	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebudayaan masyarakat lokal yang dikelola	%	20,00	10.608.128.617	20,00	606.851.450	12,00	461.000.000	30,00	383.950.000	250,00	83,29	50,00	990.801.450	250,00			
128	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	2,00	9.558.082.891	-	606.851.450	1,00	461.000.000	1,00	383.950.000	100,00	83,29	1,00	990.801.450	50,00	10,37	Disparbud	Penyusunan Dokumen Database Kebudayaan
129	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	100,00	1.050.045.726		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	83,29						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
130	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional masyarakat lokal yang dilestarikan	%	20,00	1.374.241.202	-	-	12,00	100.000.000	25,00	45.990.000	208,33	45,99	25,00	45.990.000	125,00			
131	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	1,00	1.119.190.952	-	-	1,00	100.000.000	1,00	45.990.000	100,00	45,99	1,00	45.990.000	100,00	4,11	Disparbud	Pakem Budaya Lokal
132	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	2,00	255.050.251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	45,99						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
133	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang dibina	%	20,00	2.295.452.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
134	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	3,00	1.275.251.253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
135	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang	200,00	1.020.201.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												229,17	64,64						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
136	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	%	20,00	1.275.251.253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
137	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan kesenian masyarakat lokal yang dilakukan	%	20,00	1.275.251.253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
138	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	50,00	510.100.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
139	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	Sertifikat	10,00	510.100.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
140	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	5,00	255.050.251	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
141	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan sejarah yang dilakukan	%	20,00	510.100.501	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
142	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan sejarah lokal yang dilakukan	%	20,00	510.100.501	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
143	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	25,00	510.100.501	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
144	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	%	13,00	1.804.146.728	69,77	34.800.000	5,00	28.243.000	3,85	20.207.000	76,92	71,55	73,61	55.007.000	566,26			
145	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	13,00	1.192.026.127	-	34.800.000	5,00	28.243.000	3,85	20.207.000	76,92	71,55	3,85	55.007.000	29,59			
146	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	10,00	528.895.476	1,00	34.800.000	5,00	28.243.000	4,00	20.207.000	80,00	71,55	5,00	55.007.000	50,00	10,40	Disparbud	
147	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	3,00	663.130.651	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												80,00	71,55						
Predikat Kinerja												(T)	(S)						
148	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	%	13,00	612.120.601	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
149	Peindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	3,00	612.120.601	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Disparbud	Tidak Masuk Skala Prioritas
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												76,92	71,55						
Predikat Kinerja												(T)	(S)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												177,35	74,09						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(S)						
1	DINAS PERTANIAN																		
2	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				106.304.804.758				41.341.263.558		13.455.022.348				25.689.959.442				
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	90,00	48.754.413.791	90,00	5.669.633.378	90,00	8.031.283.333	90,00	7.554.848.301	100,00	94,07	90,00	13.224.481.679	100,00	27,12	Dinas Pertanian	
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	90,00		90,00		90,00		90,00		100,00	94,07	90,00					
		Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	90,00		90,00		90,00		90,00		100,00	94,07	90,00					
		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	20,00		20,00		20,00		20,00		100,00	94,07	20,00					
5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	90,00	1.889.606.500	90,00	37.200.000	90,00	58.592.300	90,00	57.853.300	100,00	98,74	90,00	95.053.300	100,00	5,03	Dinas Pertanian	
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	42,00	625.551.500	7,00	21.000.000	7,00	34.020.800	7,00	33.961.300	100,00	99,83	14,00	54.961.300	33,33	8,79	Dinas Pertanian	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	30,00	348.290.000	5,00	16.200.000	5,00	24.571.500	5,00	23.892.000	100,00	97,23	10,00	40.092.000	33,33	11,51	Dinas Pertanian	
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	6,00	915.765.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	98,53						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	90,00	38.414.530.286	90,00	5.000.343.724	90,00	7.059.207.110	90,00	6.647.166.909	100,00	94,16	90,00	11.647.510.633	100,00	30,32	Dinas Pertanian	
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	95,00	37.182.513.786	70,00	4.934.038.924	71,00	7.018.527.110	71,00	6.606.486.909	100,00	94,13	71,00	11.540.525.833	74,74	31,04	Dinas Pertanian	
11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	72,00	1.154.489.000	12,00	37.200.000	12,00	40.680.000	12,00	40.680.000	100,00	100,00	24,00	77.880.000	33,33	6,75	Dinas Pertanian	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	6,00	64.862.500	1,00	29.104.800	-	-	-	-			1,00	29.104.800	16,67	44,87	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	6,00	12.665.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	97,06						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
14	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	jenis	3,00	215.573.000	3,00	21.000.000	3,00	21.000.000	3,00	21.000.000	100,00	100,00	3,00	42.000.000	100,00	19,48	Dinas Pertanian	
15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	72,00	215.573.000	12,00	21.000.000	12,00	21.000.000	12,00	21.000.000	100,00	100,00	24,00	42.000.000	33,33	19,48	Dinas Pertanian	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
16	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	90,00	789.277.000	90,00	16.200.000	90,00	17.650.000	90,00	17.650.000	100,00	100,00	90,00	33.850.000	100,00	4,29	Dinas Pertanian	
17	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	72,00	178.767.000	12,00	16.200.000	12,00	17.650.000	12,00	17.650.000	100,00	100,00	24,00	33.850.000	33,33	18,94	Dinas Pertanian	
18	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	6,00	305.255.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	50,00	305.255.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
20	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	90,00	1.891.427.523	90,00	127.322.553	90,00	168.564.775	90,00	157.101.810	100,00	93,20	90,00	284.424.363	100,00	15,04	Dinas Pertanian	
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6,00	34.514.479	1,00	1.372.500	1,00	4.000.000	1,00	3.994.000	100,00	99,85	2,00	5.366.500	33,33	15,55	Dinas Pertanian	
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6,00	592.175.941	1,00	72.880.900	1,00	74.947.845	1,00	74.721.230	100,00	99,70	2,00	147.602.130	33,33	24,93	Dinas Pertanian	
23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	6,00	51.124.403	1,00	3.150.450	1,00	7.499.430	1,00	7.499.100	100,00	100,00	2,00	10.649.550	33,33	20,83	Dinas Pertanian	
24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12,00	159.262.000	2,00	2.813.450	2,00	12.857.000	2,00	12.856.985	100,00	100,00	4,00	15.670.435	33,33	9,84	Dinas Pertanian	
25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	13.104,00	173.657.500	154,00	14.145.000	223,00	21.030.000	223,00	9.800.000	100,00	46,60	377,00	23.945.000	2,88	13,79	Dinas Pertanian	
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	360,00	703.853.000	6,00	16.760.253	10,00	31.880.500	10,00	31.880.495	100,00	100,00	16,00	48.640.748	4,44	6,91	Dinas Pertanian	
27	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	12,00	176.840.200	2,00	16.200.000	2,00	16.350.000	2,00	16.350.000	100,00	100,00	4,00	32.550.000	33,33	18,41	Dinas Pertanian	Pelaksanaan sub kegiatan sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	92,31						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
28	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	10,00	2.170.550.500	10,00	175.063.258	10,00	182.250.380	10,00	177.506.565	100,00	97,40	10,00	352.569.823	100,00	16,24	Dinas Pertanian	
29	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	85,00	305.255.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	4.800,00	707.954.000	3,00	40.063.258	91,00	44.750.380	91,00	40.540.446	100,00	90,59	94,00	80.603.704	1,96	11,39	Dinas Pertanian	
31	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	6,00	1.157.341.500	1,00	135.000.000	1,00	137.500.000	1,00	136.966.119	100,00	99,61	2,00	271.966.119	33,33	23,50	Dinas Pertanian	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	95,10						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
32	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	10,00	2.639.249.850	10,00	247.377.533	10,00	409.879.500	10,00	367.058.689	100,00	89,55	10,00	614.436.222	100,00	23,28	Dinas Pertanian	
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12,00	54.982.350	2,00	2.460.000	2,00	5.000.000	2,00	5.000.000	100,00	100,00	4,00	7.460.000	33,33	13,57	Dinas Pertanian	
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	6,00	852.417.500	1,00	66.517.533	1,00	110.479.500	1,00	68.458.689	100,00	61,97	2,00	134.976.222	33,33	15,83	Dinas Pertanian	
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	6,00	1.731.850.000	1,00	178.400.000	1,00	294.400.000	1,00	293.600.000	100,00	99,73	2,00	472.000.000	33,33	27,25	Dinas Pertanian	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	87,23						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
36	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	20,00	744.199.132	20,00	45.126.310	20,00	114.139.268	20,00	109.511.028	100,00	95,95	20,00	154.637.338	100,00	20,78	Dinas Pertanian	
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	24,00	677.898.132	4,00	44.539.810	4,00	104.539.268	4,00	100.203.678	100,00	95,85	8,00	144.743.488	33,33	21,35	Dinas Pertanian	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	120,00	66.301.000	3,00	586.500	32,00	9.600.000	32,00	9.307.350	100,00	96,95	35,00	9.893.850	29,17	14,92	Dinas Pertanian	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	96,40						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	96,12						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
39	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman	Indeks	200,00	9.860.035.152		728.880.200	200,00	7.636.005.000	208,00	455.772.170	104,00	5,97	208,00	1.184.652.370	104,00	12,01	Dinas Pertanian	
		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	3,00				3,00		74,01		2.467,00	5,97	74,01		2.467,00			Tingginya Tingkat Capaian Kinerja dikarenakan adanya pertambahan tanaman yang ditahun sebelumnya belum menghasilkan, ditahun 2022 menjadi tanaman menghasilkan (panen).
		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	2,30				1,00		15,17		1.517,00	5,97	15,17		659,57			Tingginya Tingkat Capaian Kinerja dikarenakan adanya peningkatan pemotongan hewan lokal. Hal tersebut terjadi karena lalu lintas ternak dibatasi saat PMK sehingga terjadi pemotongan hewan ternak di dalam Pangandaran.
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura	%	2,00				1,00		110,14		11.014,00	5,97	110,14		5.507,00			Tingginya Tingkat Capaian Kinerja dikarenakan adanya anomali cuaca dan pergeseran masa panen
40	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Frekuensi Pelaksanaan	bulan	12,00	8.307.634.040	12,00	728.880.200	12,00	3.980.000	1,00	3.780.000	8,33	94,97	13,00	732.660.200	108,33	8,82	Dinas Pertanian	
41	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	laporan	6,00	3.220.563.121	1,00	728.880.200	1,00	3.980.000	1,00	3.780.000	100,00	94,97	2,00	732.660.200	33,33	22,75	Dinas Pertanian	
42	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	6,00	5.087.070.919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	94,97						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
43	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah komoditi yang dikelola	jenis	4,00	1.395.000.000	1,00	1.095.000.000	7,00	12.201.697.400	2,00	15.399.600	28,57	0,13	3,00	1.110.399.600	75,00	79,60	Dinas Pertanian	
44	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	4,00	1.395.000.000	1,00	1.095.000.000	-	-	-	-	-	-	1,00	1.095.000.000	25,00	78,49	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
45	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	dokumen	-	-	-	-	7,00	12.201.697.400	2,00	15.399.600	28,57	0,13	2,00	15.399.600	-	-	Dinas Pertanian	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												28,57	0,13						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
46	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	%	10,00	739.556.312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	
47	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tana Skala Kecil	laporan	5,00	659.556.312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
48	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	laporan	1,00	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
49	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	ekor	184,00	812.844.800	-	-	308,00	7.632.025.000	110,00	436.592.570	35,71	5,72	110,00	436.592.570	59,78	53,71	Dinas Pertanian	
50	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ekor	184,00	812.844.800	-	-	308,00	7.632.025.000	110,00	436.592.570	35,71	5,72	110,00	436.592.570	59,78	53,71	Dinas Pertanian	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												35,71	5,72						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												24,21	33,61						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
51	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	%	3,00	18.862.620.821	2,00	3.490.704.200	1,00	10.741.070.250	12,70	3.259.243.838	1.270,00	30,34	14,70	6.749.948.038	490,00	35,78	Dinas Pertanian	Tingginya Tingkat Capaian Kinerja terjadi karena adanya pertambahan pembangunan yang cukup banyak dikarenakan adanya pembangunan yang berasal dari sumber dana DAK, APBN, DBHCHT, dan APBD sehingga terjadi peningkatan yang signifikan
52	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian	unit	9,00	6.570.385.254	1,00	761.352.300	2,00	314.664.250	2,00	307.681.430	100,00	97,78	3,00	1.069.033.730	33,33	16,27	Dinas Pertanian	
53	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	dokumen	3,00	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
54	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	dokumen	3,00	3.000.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdana
55	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	laporan	3,00	570.385.254	1,00	761.352.300	2,00	314.664.250	2,00	307.681.430	100,00	97,78	3,00	1.069.033.730	100,00	187,42	Dinas Pertanian	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	97,78						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
56	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	unit	50,00	11.843.235.567	20,00	2.729.351.900	57,00	10.426.406.000	25,00	2.951.562.408	43,86	28,31	45,00	5.680.914.308	90,00	47,97	Dinas Pertanian	
57	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi ,dan Dipelihara	unit	9,00	1.546.000.104	5,00	670.807.500	19,00	2.768.348.000	11,00	922.885.800	57,89	33,34	16,00	1.593.693.300	177,78	103,08	Dinas Pertanian	
58	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdana
59	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	11,00	1.228.400.000	-	-	21,00	4.057.858.000	7,00	612.296.200	33,33	15,09	7,00	612.296.200	63,64	49,85	Dinas Pertanian	
60	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	-	-	10,00	1.198.734.200	-	-	-	-			10,00	1.198.734.200	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdana
61	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdana
62	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	-	-	4,00	597.668.000	1,00	600.000.000	1,00	506.764.608	100,00	84,46	5,00	1.104.432.608	-	-	Dinas Pertanian	
63	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	30,00	9.068.835.463	1,00	262.142.200	16,00	3.000.200.000	6,00	909.615.800	37,50	30,32	7,00	1.171.758.000	23,33	12,92	Dinas Pertanian	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												57,18	40,80						
Predikat Kinerja												(R)	(SR)						
64	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	unit	1,00	449.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	
65	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Dididentifikasi dan Ditetapkan	ha	2,00	449.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdana
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												71,93	63,04						
Predikat Kinerja												(S)	(R)						
66	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan Yang ASUH & Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	%	10,00	2.839.889.078	-	-	10,00	203.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	
67	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hewan dalam keadaan sehat	%	50,00	2.700.000.000	-	-	50,00	203.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	
68	Pengendalian dan Penanggulangan an Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	laporan	4,00	900.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdana
69	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota	laporan	4,00	900.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdana
70	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	laporan	4,00	900.000.000	-	-	1,00	203.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdana
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
71	Pengawasan Pemasakan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Pelaksanaan	bulan	12,00	139.889.078	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	
72	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	laporan	4,00	139.889.078	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdana
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
73	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	60,00	5.259.432.259	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	
74	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	ha	1.900,00	5.259.432.259	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	
75	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	ha	1.900,00	2.991.329.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdana
76	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	ha	1.900,00	2.268.103.259	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdana
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja tahun yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
77	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	%	100,00	85.832.335	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	
78	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	buah	50,00	85.832.335	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	
79	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	laporan	5,00	85.832.335	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
80	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	%	10,00	19.247.581.322	4,85	1.250.719.316	10,00	2.527.407.575	6,26	2.169.758.439	62,60	85,85	11,11	3.420.477.755	111,10	17,77	Dinas Pertanian	
81	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang Skornya Naik	kelompok	112,00	19.247.581.322	112,00	1.250.719.316	112,00	2.527.407.575	-	2.169.758.439	-	85,85	112,00	3.420.477.755	100,00	17,77	Dinas Pertanian	Capaian kinerja program masih dalam proses perhitungan
82	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	10,00	2.952.181.322	1,00	27.880.800	-	-	-	-			1,00	27.880.800	10,00	0,94	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
83	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	10,00	14.900.400.000	1,00	1.120.338.516	1,00	2.456.407.575	1,00	2.098.764.839	100,00	85,44	1,00	3.219.103.355	10,00	21,60	Dinas Pertanian	
84	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	-	-	10,00	102.500.000	10,00	71.000.000	10,00	70.993.600	100,00	99,99	20,00	173.493.600	-	-	Dinas Pertanian	
85	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	unit	60,00	1.395.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Dinas Pertanian	Tidak Terdanai
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	92,72						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	85,85						
Predikat Kinerja												(SR)	(T)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												1.041,62	43,25						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(SR)						
1	SEKRETARIAT DAERAH			2.691,58	342.779.002.296	1.543,02	28.173.699.318	90,00	60.375.544.954		49.142.675.828		81,40	1.543,02	77.316.375.146	57,33	22,56		
2	URUSAN PERTANAHAN	Indeks Tertib Administrasi	Indeks	95,00	1.856.930.738	2,00	505.829.519	85,00	169.930.000		145.200.000		85,45	2,00	651.029.519	2,11	35,06	Sekretariat Daerah	
3	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Izin LokasiYang Diterbitkan	%	100,00	255.050.251	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
4	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5,00	255.050.251	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Laporan	5,00	255.050.251	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Diselesaikan	%	100,00	594.632.860	-	504.377.719	100,00	19.930.000	6,02	1.200.000	6,02	6,02	6,02	505.577.719	6,02	85,02	Sekretariat Daerah	
7	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	594.632.860	3,00	504.377.719	100,00	19.930.000	6,02	1.200.000	6,02	6,02	9,02	505.577.719	9,02	85,02	Sekretariat Daerah	
8	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	26,00	441.602.710	1,00	504.377.719	-	-	-	-			1,00	504.377.719	3,85	114,22	Sekretariat Daerah	
9	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	25,00	153.030.150	-	-	5,00	19.930.000	1,00	1.200.000	20,00	6,02	1,00	1.200.000	4,00	0,78	Sekretariat Daerah	Terhambat Karna hanya ada musyawarah dan belum adanya tindaklanjut sengketa tanah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												20,00	6,02						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												6,02	6,02						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
10	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan	%	100,00	76.515.075	-	-	100,00	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
11	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase PenyelesaianMasalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanahuntuk Pembangunanoleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota	%	100,00	76.515.075	-	-	100,00	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	20,00	76.515.075	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat Daerah	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		-	-						
										Predikat Kinerja		(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)		-	-						
										Predikat Kinerja		(SR)	(SR)						
13	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	831.019.652	1,00	1.451.800	100,00	150.000.000	96,00	144.000.000	96,00	96,00	97,00	145.451.800	97,00	17,50	Sekretariat Daerah	
14	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	60,00	831.019.652	12,00	1.451.800	12,00	150.000.000	11,00	144.000.000	91,67	96,00	23,00	145.451.800	38,33	17,50	Sekretariat Daerah	
15	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	60,00	255.050.251	-	-	12,00	50.000.000	12,00	50.000.000	100,00	100,00	12,00	50.000.000	20,00	19,60	Sekretariat Daerah	
16	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen	60,00	255.050.251	-	-	12,00	50.000.000	12,00	47.000.000	100,00	94,00	12,00	47.000.000	20,00	18,43	Sekretariat Daerah	
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	31,00	320.919.151	12,00	1.451.800	6,00	50.000.000	6,00	47.000.000	100,00	94,00	18,00	48.451.800	58,06	15,10	Sekretariat Daerah	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		100,00	96,00						
										Predikat Kinerja		(ST)	(ST)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)		91,67	96,00						
										Predikat Kinerja		(ST)	(ST)						
18	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Cakupan Laporan Penetapan Tanah	laporan	1,00	99.712.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
19	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	laporan	1,00	99.712.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan	1,00	99.712.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah	
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		-	-						
										Predikat Kinerja		(SR)	(SR)						
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)		-	-						
										Predikat Kinerja		(SR)	(SR)						
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)		51,01	51,01						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		(R)	(R)						
21	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				340.922.071.558		25.330.743.874		60.205.614.954		48.997.475.828								
22	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan Kerjasama yang dirumuskan 2. Persentase Pelayanan Administrasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat 3. Persentase Produk Hukum Daerah yang Diharmonisasi	%	95,00	109.992.902.292	28,00	4.871.637.032	85,00	17.679.546.980	47,77	9.936.629.190	56,20	56,20	75,77	14.808.266.222	79,76	13,46	Sekretariat Daerah	
23	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	Tinggi	14.919.416.326	89,81	1.110.978.890	20,00	1.637.118.000	20,00	1.247.334.065	100,00	76,19	109,81	2.358.312.955	-	15,81	Sekretariat Daerah	
24	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	36,00	4.411.346.005	2,00	1.110.978.890	6,00	217.031.000	5,00	116.553.800	83,33	53,70	7,00	1.227.532.690	19,44	27,83	Sekretariat Daerah	Terhambat Karna PAD Tidak Tercapai Mengakibatkan Belanja Program dan Kegiatan di APBD tidak Maksimal
25	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	10,00	3.060.603.006	-	-	2,00	71.100.000	3,00	66.659.006	150,00	93,75	3,00	66.659.006	30,00	2,18	Sekretariat Daerah	Terdukung karna sesuai dengan kerangka acuan kerja
26	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	60,00	7.447.467.315	-	-	12,00	1.348.987.000	12,00	1.064.121.259	100,00	78,88	12,00	1.064.121.259	20,00	14,29	Sekretariat Daerah	Terhambat Karna PAD Tidak Tercapai Mengakibatkan Belanja Program dan Kegiatan di APBD tidak Maksimal
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)		111,11	75,45						
										Predikat Kinerja		(ST)	(T)						
27	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	Kebijakan	1.445,00	85.879.802.171	57,85	3.385.201.961	281,00	13.856.657.530	95,00	7.025.239.999	33,81	50,70	152,85	10.410.441.960	10,58	12,12	Sekretariat Daerah	
28	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	185,00	24.268.295.188	11,00	1.230.000.000	37,00	3.531.371.850	37,00	3.076.735.025	100,00	87,13	48,00	4.306.735.025	25,95	17,75	Sekretariat Daerah	Capaian kinerja maksimal
29	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	1.080,00	55.716.346.902	8,85	610.052.460	216,00	9.825.285.680	30,00	3.553.951.974	13,89	36,17	38,85	4.164.004.434	3,60	7,47	Sekretariat Daerah	Pembayaran pembangunan pondok pesantren tidak dapat dilaksanakan di tahun 2022, karena kemampuan APBD terbatas

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
30	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	180,00	5.895.160.081	38,00	1.545.149.501	28,00	500.000.000	28,00	394.553.000	100,00	78,91	66,00	1.939.702.501	36,67	32,90	Sekretariat Daerah	Capaian kinerja maksimal
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												71,30	67,40						
Predikat Kinerja												(S)	(S)						
31	Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselenggarakan	Kegiatan	15,00	7.733.292.542	3,00	342.451.381	3,00	1.985.772.950	3,00	1.596.305.126	100,00	80,39	6,00	1.938.756.507	40,00	25,07	Sekretariat Daerah	
32	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	198,00	2.028.528.908	55,00	82.193.081	33,00	499.680.000	55,00	294.614.196	166,67	58,96	110,00	376.807.277	55,56	18,58	Sekretariat Daerah	Karena jumlah harmonisasi produk hukum dari SKPD melebihi dari target kinerja yang direncanakan (tentative)
33	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	18,00	4.378.333.200	1,00	221.453.100	3,00	1.306.292.950	3,00	1.144.704.330	100,00	87,63	4,00	1.366.157.430	22,22	31,20	Sekretariat Daerah	Faktor Pendorong: 1. Kasus yang dihadapi selesai dengan musyawarah, 2. apabila kasus yang dihadapi inkraact pada tahap mediasi atau tahap pengadilan negeri. sehingga SDM dan Anggaran yang digunakan tidak terlalu tinggi penghambat capaian kegiatan: Data yang diperlukan tidak terarsipkan dengan baik pada perangkat daerah, tahapan penyelesaian sangat panjang. 3. penyelesaian kasus masih lanjutan dari triwulan I
34	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	228,00	1.326.430.434	55,00	38.805.200	33,00	179.800.000	55,00	156.986.600	166,67	87,31	110,00	195.791.800	48,25	14,76	Sekretariat Daerah	Karena jumlah pendokumentasian produk hukum yang telah diharmonisasi melebihi dari target kinerja yang direncanakan (tentative)
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												144,44	77,97						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
35	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	35,00	1.460.391.253	7,00	33.004.800	7,00	199.998.500	4,00	67.750.000	57,14	33,88	11,00	100.754.800	31,43	6,90	Sekretariat Daerah	
36	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	35,00	1.460.391.253	7,00	33.004.800	7,00	199.998.500	4,00	67.750.000	57,14	33,88	7,00	100.754.800	20,00	6,90	Sekretariat Daerah	Terjadinya perubahan anggaran hibah yang menyebabkan serapan anggaran menjadi kecil
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												57,14	33,88						
Predikat Kinerja												(R)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												72,74	60,29						
Predikat Kinerja												(S)	(R)						
37	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	%	96,00	27.551.672.488	76,00	2.554.505.894	87,00	4.319.015.374	54,15	2.688.127.360	62,24	62,24	65,07	5.242.633.254	67,79	19,03	Sekretariat Daerah	
38	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	%	100,00	8.637.568.658	100,00	694.612.031	100,00	719.781.324	47,76	343.733.798	47,76	47,76	73,88	1.038.345.829	73,88	12,02	Sekretariat Daerah	
39	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	24,00	2.121.812.327	4,00	264.095.218	4,00	186.750.872	4,00	164.045.654	100,00	87,84	8,00	428.140.872	33,33	20,18	Sekretariat Daerah	Capaian kinerja maksimal
40	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen	18,00	6.085.486.559	3,00	430.516.813	3,00	308.457.452	3,00	122.791.096	100,00	39,81	6,00	553.307.909	33,33	9,09	Sekretariat Daerah	Capaian kinerja maksimal walaupun banyak keterlambatan data dari dinas terkait
41	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	100,00	430.269.773	-	-	20,00	224.573.000	20,00	56.897.048	100,00	25,34	20,00	56.897.048	20,00	13,22	Sekretariat Daerah	Capaian kinerja maksimal
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	51,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
42	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kegiatan	20,00	561.110.551	-	-	10,00	198.528.900	10,00	85.167.702	100,00	42,90	10,00	85.167.702	50,00	15,18	Sekretariat Daerah	
43	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	60,00	330.596.135	-	-	10,00	175.528.900	10,00	74.793.902	100,00	42,61	10,00	74.793.902	16,67	22,62	Sekretariat Daerah	capaian kinerja maksimal meskipun ada hambatan dalam koordinasi dan keterlambatan data dilapangan
44	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	60,00	230.514.416	-	-	10,00	23.000.000	10,00	10.373.800	100,00	45,10	10,00	10.373.800	16,67	4,50	Sekretariat Daerah	capaian kinerja maksimal meskipun ada hambatan dalam koordinasi dan keterlambatan data
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	43,86						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
45	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Keberhasilan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	%	100,00	11.259.745.679	95,00	1.008.946.900	100,00	2.135.086.500	52,34	1.117.487.508	52,34	52,34	73,67	2.126.434.408	73,67	18,89	Sekretariat Daerah	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
46	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	24,00	4.080.714.579	2,00	347.129.900	4,00	1.093.319.500	6,00	523.034.305	150,00	47,84	8,00	870.164.205	33,33	21,32	Sekretariat Daerah	Target Kinerja tercapai bahkan tahun ini melebihi target dikarenakan kenaikan harga bbm sehingga harga barang secara otomatis perlu adanya perubahan standar harga
47	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	72,00	2.593.548.959	12,00	661.817.000	12,00	160.497.000	11,00	85.919.800	91,67	53,53	23,00	747.736.800	31,94	28,83	Sekretariat Daerah	Dikarenakan jumlah SDM pegawai sangat minim sehingga kinerja tidak maksimal, namun laporan untuk Bantuan Keuangan Provinsi sesuai jadwal,
48	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	120,00	4.585.482.141	-	-	24,00	881.270.000	19,00	508.533.403	79,17	57,70	19,00	508.533.403	15,83	11,09	Sekretariat Daerah	Dikarenakan jumlah SDM pegawai sangat minim sehingga kinerja tidak maksimal, namun laporan pengelolaan evaluasi beberapa progres pembangunan strategis terlaporkan dengan baik
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												106,94	53,03						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
49	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Penggunaan E-Procurement	Nilai	100,00	7.093.247.600	59,11	850.946.963	60,00	1.265.618.650	54,13	1.141.738.352	90,21	90,21	113,24	1.992.685.315	113,24	28,09	Sekretariat Daerah	
50	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	3.598,00	3.000.201.180	132,00	850.946.963	727,00	267.018.650	1.144,00	223.819.602	157,36	83,82	1.276,00	1.074.766.565	35,46	35,82	Sekretariat Daerah	Hambatannya banyak SKPD/OPD yang tidak melaksanakan Konsolidasi Paket Pekerjaan sehingga mengakibatkan banyaknya Paket Tender maupun Non Tender. Adapun Upaya yang dilakukan adalah dengan mengusulkan Konsolidasi Paket Pekerjaan ke tiap-tiap SKPD/OPD.
51	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	3.598,00	330.545.125	-	-	727,00	98.400.000	1.144,00	249.068.750	157,36	253,12	1.144,00	249.068.750	31,80	75,35	Sekretariat Daerah	Hambatannya banyak SKPD/OPD yang tidak melaksanakan Konsolidasi Paket Pekerjaan sehingga mengakibatkan banyaknya Paket Tender maupun Non Tender. Adapun Upaya yang dilakukan adalah dengan mengusulkan Konsolidasi Paket Pekerjaan ke tiap-tiap SKPD/OPD.
52	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	800,00	3.762.501.295	-	-	160,00	900.200.000	160,00	668.850.000	100,00	74,30	160,00	668.850.000	20,00	17,78	Sekretariat Daerah	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												138,24	137,08						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												72,58	58,30						
Predikat Kinerja												(S)	(R)						
53	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%	100,00	203.377.496.778	100,00	17.904.600.948	100,00	38.207.052.600	94,70	36.372.719.278	94,70	95,20	97,35	54.277.320.226	97,35	26,69	Sekretariat Daerah	
54	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	168.404.503	100,00	19.300.000	100,00	221.000.000	95,33	216.390.000	95,33	97,91	97,67	235.690.000	97,67	139,95	Sekretariat Daerah	
55	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24,00	168.404.503	4,00	19.300.000	4,00	221.000.000	4,00	216.390.000	100,00	97,91	8,00	235.690.000	33,33	139,95	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	97,91						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
56	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100,00	86.222.953.637	75,61	10.985.778.414	100,00	15.778.688.132	92,97	14.669.326.340	92,97	92,97	84,29	25.655.104.754	84,29	29,75	Sekretariat Daerah	
57	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	90,00	84.328.810.278	83,00	10.797.878.414	90,00	15.560.688.132	90,00	14.462.176.340	100,00	92,94	90,00	25.260.054.754	100,00	29,95	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
58	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	20,00	1.554.468.359	20,00	187.900.000	4,00	216.000.000	4,00	207.150.000	100,00	95,90	24,00	395.050.000	120,00	25,41	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
59	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6,00	228.737.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah	Efisiensi anggaran
60	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	6,00	110.938.000	-	-	1,00	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah	Efisiensi anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												66,67	62,95						
Predikat Kinerja												(S)	(R)						
61	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	60,00	446.723.509	12,00	57.900.000	12,00	63.000.000	11,00	45.400.000	91,67	72,06	23,00	103.300.000	38,33	23,12	Sekretariat Daerah	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
62	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60,00	446.723.509	12,00	57.900.000	12,00	63.000.000	12,00	45.400.000	100,00	72,06	24,00	103.300.000	40,00	23,12	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	72,06						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
63	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	12,00	3.068.973.765	2,00	273.997.300	2,00	493.400.000	2,00	456.287.800	100,00	92,48	4,00	730.285.100	33,33	23,80	Sekretariat Daerah	
64	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5,00	1.582.299.758	1,00	257.997.300	-	-	-	-			1,00	257.997.300	20,00	16,31	Sekretariat Daerah	
65	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12,00	118.168.017	8,00	16.000.000	2,00	65.400.000	2,00	63.597.500	100,00	97,24	10,00	79.597.500	83,33	67,36	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
66	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	175,00	1.368.505.990	-	-	35,00	428.000.000	35,00	392.690.300	100,00	91,75	35,00	392.690.300	20,00	28,69	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	94,50						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
67	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keberhasilan Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	%	100,00	20.707.475.339	95,00	1.036.325.862	95,00	3.310.315.400	97,90	3.411.435.371	103,05	103,05	96,45	4.447.761.233	96,45	21,48	Sekretariat Daerah	
68	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	222,00	225.885.661	37,00	17.275.000	37,00	19.896.250	27,00	16.804.300	72,97	84,46	64,00	34.079.300	28,83	15,09	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
69	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30,00	10.738.334.668	1,00	148.156.580	5,00	1.638.759.650	5,00	1.158.539.517	100,00	70,70	6,00	1.306.696.097	20,00	12,17	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
70	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6,00	662.978.980	1,00	51.875.000	1,00	448.302.000	3,00	438.821.820	300,00	97,89	4,00	490.696.820	66,67	74,01	Sekretariat Daerah	Setelah perubahan, terdapat rekening belanja baru yang menambah paket pekerjaan sehingga capaian melebihi dari target
71	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00	1.446.912.934	1,00	193.132.500	1,00	105.117.500	1,00	103.852.500	100,00	98,80	2,00	296.985.000	33,33	20,53	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
72	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	643.298.396	2,00	107.925.000	2,00	102.000.000	2,00	107.960.000	100,00	105,84	4,00	215.885.000	33,33	33,56	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
73	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.740,00	6.990.064.700	232,00	517.961.782	232,00	996.240.000	232,00	1.585.457.234	100,00	159,14	464,00	2.103.419.016	26,67	30,09	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												128,83	102,80						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
74	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang dibeli	Jenis	4,00	1.122.546.652	-	-	4,00	347.500.000	3,00	244.267.850	75,00	70,29	3,00	244.267.850	75,00	21,76	Sekretariat Daerah	
75	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	35,00	602.142.636	-	-	7,00	300.000.000	1,00	197.810.350	14,29	65,94	1,00	197.810.350	2,86	32,85	Sekretariat Daerah	Dalam tahun berjalan terlaksana 1 paket kegiatan yang sudah mencakup belanja beberapa pengadaan yang dibutuhkan
76	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	520.404.016	-	-	2,00	47.500.000	2,00	46.457.500	100,00	97,81	2,00	46.457.500	20,00	8,93	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												57,14	81,87						
Predikat Kinerja												(R)	(T)						
77	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	41.323.984.093	95,00	4.584.137.129	100,00	8.961.501.188	96,91	8.684.459.837	96,91	96,91	95,95	13.268.596.966	95,95	32,11	Sekretariat Daerah	
78	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	42,00	127.927.027	7,00	3.900.000	7,00	10.000.000	7,00	10.000.000	100,00	100,00	14,00	13.900.000	33,33	10,87	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
79	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	18,00	5.986.358.460	3,00	439.545.679	3,00	2.205.611.188	3,00	2.061.609.117	100,00	93,47	6,00	2.501.154.796	33,33	41,78	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
80	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1.200,00	6.107.470.366	200,00	820.336.500	200,00	1.501.950.000	129,00	1.368.000.277	64,50	91,08	329,00	2.188.336.777	27,42	35,83	Sekretariat Daerah	Target Kinerja belum mencapai target sebab menyesuaikan dengan kegiatan pada tahun berjalan
81	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	54,00	29.102.228.240	9,00	3.320.354.950	9,00	5.243.940.000	10,00	5.244.850.443	111,11	100,02	19,00	8.565.205.393	35,19	29,43	Sekretariat Daerah	Pada saat perubahan anggaran terdapat rekening belanja baru, sehingga capaian kinerja melebihi dari target pada tahun berjalan
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												93,90	96,14						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
82	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang di Pelihara	Jenis	61,00	7.602.184.433	28,00	1.350.203.514	7,00	2.069.332.000	7,00	1.754.489.073	100,00	84,79	35,00	3.104.692.587	57,38	40,84	Sekretariat Daerah	
83	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	108,00	3.903.918.000	52,00	780.068.734	18,00	749.760.000	18,00	750.235.227	100,00	100,06	70,00	1.530.303.961	64,81	39,20	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
84	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	170,00	2.404.702.599	-	-	34,00	290.300.000	34,00	300.265.839	100,00	103,43	34,00	300.265.839	20,00	12,49	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
85	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	42,00	77.240.240	7,00	8.500.000	7,00	9.900.000	-	-	-	-	7,00	8.500.000	16,67	11,00	Sekretariat Daerah	Efisiensi anggaran
86	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12,00	1.216.323.594	2,00	561.634.780	2,00	1.019.372.000	4,00	703.988.007	200,00	69,06	6,00	1.265.622.787	50,00	104,05	Sekretariat Daerah	Capaian Kinerja melebihi dari target, sebab terdapat lebih dari 2 unit pemeliharaan/rehabilitasi yang terjadi pada tahun berjalan.
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	68,14						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
87	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100,00	9.976.693.813	95,00	866.281.891	100,00	1.114.972.630	92,27	1.213.355.581	92,27	108,82	2,00	2.079.637.472	2,00	20,84	Sekretariat Daerah	
88	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	2,00	5.576.847.983	100,00	566.074.300	2,00	840.799.630	2,00	770.741.678	100,00	91,67	2,00	1.336.815.978	100,00	23,97	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
89	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	10,00	1.297.750.280	2,00	180.356.000	2,00	174.051.000	2,00	173.151.800	100,00	99,48	4,00	353.507.800	40,00	27,24	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
90	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	48,00	1.134.984.360	8,00	119.851.591	8,00	100.122.000	9,00	69.501.181	112,50	69,42	17,00	189.352.772	35,42	16,68	Sekretariat Daerah	Pelaksanaan MCU KDH WNDH melebihi dari target, sebab kegiatan tersebut tentative
91	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	100,00	1.967.111.190	-	-	-	-	2,00	199.960.922			2,00	199.960.922	2,00	10,17	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												104,17	86,86						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
92	Fasilitas Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Jenis Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi	Jenis	2,00	4.133.865.000	2,00	25.000.000	2,00	685.575.000	2,00	676.783.500	100,00	98,72	2,00	701.783.500	100,00	16,98	Sekretariat Daerah	
93	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	10,00	1.748.745.000	-	-	2,00	298.375.000	2,00	294.250.100	100,00	98,62	2,00	294.250.100	20,00	16,83	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
94	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	10,00	1.389.300.000	-	-	2,00	238.025.000	2,00	234.050.640	100,00	98,33	2,00	234.050.640	20,00	16,85	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
95	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	10,00	995.820.000	2,00	25.000.000	2,00	149.175.000	2,00	148.482.760	100,00	99,54	4,00	173.482.760	40,00	17,42	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	98,83						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
96	Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi yang dilaksanakan	%	100,00	12.304.392.755	95,00	354.890.739	100,00	1.637.970.250	110,27	1.806.167.792	110,27	110,27	102,63	2.161.058.531	102,63	17,56	Sekretariat Daerah	
97	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	27,00	4.111.375.407	11,00	219.289.220	4,00	520.668.500	4,00	564.556.151	100,00	108,43	15,00	783.845.371	55,56	19,07	Sekretariat Daerah	Pendorong tercapainya kinerja adalah tersedianya anggaran serta kerjasama dari Perangkat Daerah; Penghambat kerjanya karena kurangnya SDM di Bagian Organisasi sehingga pelaksanaan tugas memerlukan waktu yang lebih lama.
98	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	8,00	2.152.624.114	-	-	2,00	415.488.000	2,00	487.799.540	100,00	117,40	2,00	487.799.540	25,00	22,66	Sekretariat Daerah	Faktor pendorong tercapainya kinerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai dan adanya kerjasama dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Pangandaran. Faktor penghambat kinerja adalah Sumberdaya Manusia di Bagian Organisasi masih belum memadai.
99	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	7,00	2.798.348.004	2,00	77.908.542	1,00	329.407.500	1,00	265.379.118	100,00	80,56	3,00	343.287.660	42,86	12,27	Sekretariat Daerah	Pendorong tercapainya kinerja tersedianya anggaran dan yang menjadi Penghambat kurangnya SDM pada bagian organisasi
100	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	100,00	972.098.001	90,00	57.692.977	2,00	43.540.000	2,00	19.731.000	100,00	45,32	92,00	77.423.977	92,00	7,96	Sekretariat Daerah	Faktor pendorong tercapainya kinerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai dan adanya kerjasama dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Pangandaran. Faktor penghambat kinerja adalah Sumberdaya Manusia di Bagian Organisasi masih belum memadai.
101	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	5,00	2.269.947.229	-	-	1,00	328.866.250	1,00	468.701.983	100,00	142,52	1,00	468.701.983	20,00	20,65	Sekretariat Daerah	Kinerja tercapai sesuai dengan anggaran dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, yang menjadi penghambat kurangnya SDM pada bagian organisasi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	98,85						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
102	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan	%	100,00	16.299.299.279	70,80	1.982.235.186	100,00	3.523.798.000	90,65	3.194.356.134	90,65	90,65	80,73	5.176.591.320	80,73	31,76	Sekretariat Daerah	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
103	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	32,00	3.287.328.878	16,00	395.109.321	16,00	486.960.000	16,00	457.165.300	100,00	93,88	32,00	852.274.621	100,00	25,93	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
104	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1.875,00	4.490.813.298	375,00	227.996.600	375,00	494.800.000	364,00	347.141.127	97,07	70,16	739,00	575.137.727	39,41	12,81	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
105	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	31,00	8.521.157.103	5,00	1.359.129.265	5,00	2.542.038.000	5,00	2.390.049.707	100,00	94,02	10,00	3.749.178.972	32,26	44,00	Sekretariat Daerah	Kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												99,02	86,02						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												95,68	93,24						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												71,05	71,21						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(S)	(S)						
1	SEKRETARIAT DPRD				281.849.926.924		28.773.894.767		38.795.214.178		34.286.435.502		88,38		63.060.330.269		22,37		
2	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				281.849.926.924		28.773.894.767		38.795.214.178		34.286.435.502		88,38		63.060.330.269		22,37		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, peningkatan kompetensi aparatur, perencanaan dan evaluasi yang berkualitas, sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	90,00	181.215.623.051	63,13	23.629.366.938	90,00	29.350.882.778	87,59	27.451.692.282	97,33	93,53	150,72	51.081.059.220	167,47	28,19	Sekretariat DPRD	
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja, dokumen penganggaran kinerja, dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	90,00	422.922.863	92,86	35.826.750	90,00	49.990.000	78,57	44.495.000	87,30	89,01	171,43	80.321.750	190,48	18,99	Sekretariat DPRD	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40,00	335.886.582	8,00	35.826.750	8,00	43.400.000	5,00	40.300.000	62,50	92,86	13,00	76.126.750	32,50	22,66	Sekretariat DPRD	
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5,00	5.101.005	-	-	1,00	875.000	1,00	740.000	100,00	84,57	1,00	740.000	20,00	14,51	Sekretariat DPRD	
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5,00	5.101.005	-	-	1,00	875.000	1,00	740.000	100,00	84,57	1,00	740.000	20,00	14,51	Sekretariat DPRD	
8	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5,00	22.444.422	-	-	1,00	1.925.000	1,00	1.357.500	100,00	70,52	1,00	1.357.500	20,00	6,05	Sekretariat DPRD	
9	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5,00	22.444.422	-	-	1,00	1.925.000	1,00	1.357.500	100,00	70,52	1,00	1.357.500	20,00	6,05	Sekretariat DPRD	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	26.844.422	5,00	-	1,00	265.000	1,00	-	100,00	-	6,00	-	120,00	-	Sekretariat DPRD	
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	5.101.005	-	-	1,00	725.000	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												94,64	57,58						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Persen	90,00	27.122.961.624	92,86	2.807.124.800	90,00	3.722.599.878	88,33	3.371.889.158	98,15	90,58	181,19	6.179.013.958	201,32	22,78	Sekretariat DPRD	
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25,00	25.786.147.590	24,00	2.750.660.700	30,00	3.678.649.878	25,00	3.331.589.158	83,33	90,57	49,00	6.082.249.858	196,00	23,59	Sekretariat DPRD	
14	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60,00	397.412.302	12,00	36.699.100	12,00	42.250.000	12,00	40.300.000	100,00	95,38	24,00	76.999.100	40,00	19,38	Sekretariat DPRD	
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00	924.368.917	1,00	19.765.000	1,00	500.000	1,00	-	100,00	-	2,00	19.765.000	40,00	2,14	Sekretariat DPRD	
16	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	5,00	2.550.503	-	-	1,00	250.000	1,00	-	100,00	-	1,00	-	20,00	-	Sekretariat DPRD	
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	70,00	8.401.508	2,00	-	14,00	500.000	12,00	-	85,71	-	14,00	-	20,00	-	Sekretariat DPRD	
18	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10,00	4.080.804	-	-	2,00	450.000	2,00	-	100,00	-	2,00	-	20,00	-	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												94,84	30,99						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
19	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	90,00	463.418.084	27,91	50.800.650	90,00	69.840.000	97,67	52.570.810	108,53	75,27	125,58	103.371.460	139,53	22,31	Sekretariat DPRD	
20	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10,00	4.335.854	-	-	2,00	225.000	2,00	-	100,00	-	2,00	-	20,00	-	Sekretariat DPRD	
21	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10,00	77.739.316	-	-	2,00	16.840.000	2,00	15.670.810	100,00	93,06	2,00	15.670.810	20,00	20,16	Sekretariat DPRD	

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
22	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	10,00	4.080.804	-	-	2,00	245.000	2,00	-	100,00	-	2,00	-	20,00	-	Sekretariat DPRD	
23	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5,00	12.752.513	-	-	1,00	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
24	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	120,00	15.303.015	-	-	24,00	530.000	24,00	-	100,00	-	24,00	-	20,00	-	Sekretariat DPRD	
25	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60,00	349.206.582	12,00	50.800.650	12,00	42.000.000	12,00	36.900.000	100,00	87,86	24,00	87.700.650	40,00	25,11	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												83,33	30,15						
Predikat Kinerja												(T)	(SR)						
26	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	Persen	90,00	3.436.313.016	49,44	276.217.000	90,00	461.937.400	100,00	487.053.532	111,11	105,44	149,44	763.270.532	166,04	22,21	Sekretariat DPRD	
27	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	5,00	714.140.701	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
28	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	60,00	156.927.135	12,00	16.000.000	12,00	29.200.000	12,00	30.600.000	100,00	104,79	24,00	46.600.000	40,00	29,70	Sekretariat DPRD	
29	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	25,00	667.625.626	-	-	25,00	39.500.000	25,00	190.387.500	100,00	481,99	25,00	190.387.500	100,00	28,52	Sekretariat DPRD	
30	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50,00	360.810.301	7,00	39.410.000	50,00	36.420.000	50,00	23.750.000	100,00	65,21	57,00	63.160.000	114,00	17,51	Sekretariat DPRD	
31	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	180,00	1.536.809.253	25,00	220.807.000	25,00	356.817.400	25,00	242.316.032	100,00	67,91	50,00	463.123.032	27,78	30,14	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	179,98						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
32	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	Persen	90,00	13.548.876.221	1,17	1.003.872.150	90,00	2.691.105.500	92,40	2.295.112.155	102,66	85,29	93,56	3.298.984.305	103,96	24,35		
33	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5,00	492.236.135	13,00	33.073.800	1,00	42.003.199	1,00	19.553.000	100,00	46,55	14,00	52.626.800	280,00	10,69	Sekretariat DPRD	
34	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	15,00	1.877.797.980	7,00	198.078.500	3,00	426.221.886	3,00	437.442.000	100,00	102,63	10,00	635.520.500	66,67	33,84	Sekretariat DPRD	
35	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	10,00	293.337.851	35,00	35.365.500	1,00	77.588.850	2,00	76.444.310	200,00	98,52	37,00	111.809.810	370,00	38,12	Sekretariat DPRD	
36	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	20,00	1.084.964.444	4,00	224.797.550	4,00	343.148.355	4,00	160.995.000	100,00	46,92	8,00	385.792.550	40,00	35,56	Sekretariat DPRD	
37	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	5,00	876.450.812	7,00	228.732.250	1,00	377.352.210	1,00	189.481.400	100,00	50,21	8,00	418.213.650	160,00	47,72	Sekretariat DPRD	
38	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	65,00	490.282.411	13,00	79.145.000	13,00	72.000.000	13,00	71.845.000	100,00	99,78	13,00	150.990.000	20,00	30,80	Sekretariat DPRD	
39	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	5,00	1.034.073.185	-	-	1,00	11.525.000	1,00	10.915.000	100,00	94,71	1,00	10.915.000	20,00	1,06	Sekretariat DPRD	
40	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1.200,00	971.868.980	-	-	240,00	628.730.000	200,00	647.639.825	83,33	103,01	200,00	647.639.825	16,67	66,64	Sekretariat DPRD	
41	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2.500,00	6.162.612.164	101,00	204.679.550	500,00	660.336.000	480,00	630.696.620	96,00	95,51	581,00	835.376.170	23,24	13,56	Sekretariat DPRD	
42	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	60,00	265.252.261	-	-	12,00	52.200.000	12,00	50.100.000	100,00	95,98	12,00	50.100.000	20,00	18,89	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												107,93	83,38						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
43	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	Persen	90,00	2.235.840.578	100,00	148.052.000	90,00	160.000.000	63,64	159.254.000	70,71	99,53	163,64	307.306.000	181,82	13,74	Sekretariat DPRD	
44	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5,00	510.100.501	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
45	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10,00	597.455.826	3,00	69.732.000	2,00	-	-	-			3,00	69.732.000	30,00	11,67	Sekretariat DPRD	
46	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	720.203.850	2,00	78.320.000	2,00	-	2,00	-	100,00		4,00	78.320.000	40,00	10,87	Sekretariat DPRD	
47	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
48	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	10,00	-	-	-	2,00	80.000.000	2,00	79.254.000	100,00	99,07	2,00	79.254.000	20,00	-	Sekretariat DPRD	
49	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3,00	408.080.401	-	-	3,00	80.000.000	3,00	80.000.000	100,00	100,00	3,00	80.000.000	100,00	19,60	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	99,53						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
50	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Persen	90,00	13.683.070.929	94,65	2.372.588.985	90,00	3.010.450.000	97,39	3.024.800.443	108,21	100,48	192,04	5.397.389.428	213,38	39,45	Sekretariat DPRD	
51	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5.750,00	113.063.075	1.608,00	14.409.000	1.150,00	23.000.000	1.150,00	16.917.000	100,00	73,55	2.758,00	31.326.000	47,97	27,71	Sekretariat DPRD	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
52	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00	2.732.852.255	17,00	519.681.813	8,00	492.000.000	8,00	530.076.732	100,00	107,74	25,00	1.049.758.545	41,67	38,41	Sekretariat DPRD	
53	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	80.000.000	1,00	1.758.498.172	-	-	-	-			1,00	1.758.498.172	100,00	2.198,12	Sekretariat DPRD	
54	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	540,00	10.757.155.600	1,00	80.000.000	108,00	2.495.450.000	75,00	2.477.806.711	69,44	99,29	76,00	2.557.806.711	14,07	23,78	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												89,81	93,53						
Predikat Kinerja												(T)	(ST)						
55	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	90,00	5.706.968.141	100,00	930.686.175	90,00	988.534.000	85,71	937.926.681	95,24	94,88	92,86	1.868.612.856	103,17	32,74	Sekretariat DPRD	
56	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	35,00	1.615.842.888	12,00	300.559.300	7,00	234.990.000	7,00	272.932.008	100,00	116,15	19,00	573.491.308	54,29	35,49	Sekretariat DPRD	
57	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	100,00	1.763.367.317	7,00	235.558.300	20,00	231.220.000	15,00	307.924.173	75,00	133,17	22,00	543.482.473	22,00	30,82	Sekretariat DPRD	
58	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	75,00	127.525.125	-	-	15,00	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	
59	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	320,00	771.777.134	13,00	113.117.375	64,00	75.250.000	64,00	83.646.000	100,00	111,16	77,00	196.763.375	24,06	25,49	Sekretariat DPRD	
60	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	135,00	127.525.125	-	-	27,00	82.800.000	27,00	48.430.000	100,00	58,49	27,00	48.430.000	20,00	37,98	Sekretariat DPRD	
61	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	535.779.801	3,00	281.451.200	3,00	289.322.000	3,00	167.926.500	100,00	58,04	6,00	449.377.700	200,00	83,87	Sekretariat DPRD	
62	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	255.050.251	-	-	3,00	21.952.000	3,00	20.230.000	100,00	92,16	3,00	20.230.000	100,00	7,93	Sekretariat DPRD	
63	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	1,00	510.100.501	-	-	1,00	42.000.000	1,00	36.838.000	100,00	87,71	1,00	36.838.000	100,00	7,22	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												84,38	82,11						
Predikat Kinerja												(T)	(T)						
64	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan yang tersedia	Persen	90,00	107.248.059.419	17,95	15.080.415.828	90,00	17.522.690.000	100,00	16.477.704.503	111,11	94,04	117,95	31.558.120.331	131,05	29,43	Sekretariat DPRD	
65	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang	40,00	104.895.969.462	40,00	14.751.610.628	40,00	17.442.690.000	40,00	16.477.704.503	100,00	94,47	80,00	31.229.315.131	200,00	29,77	Sekretariat DPRD	
66	Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakain Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	5,00	1.864.009.556	5,00	292.613.200	1,00	-	-	-			5,00	292.613.200	100,00	15,70	Sekretariat DPRD	
67	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	40,00	488.080.401	25,00	36.192.000	40,00	80.000.000	-	-	-	-	25,00	36.192.000	62,50	7,42	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												50,00	47,23						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
68	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang tersedia	Persen	90,00	7.347.192.176	54,43	923.782.600	90,00	673.736.000	72,22	600.886.000	80,25	89,19	126,65	1.524.668.600	140,73	20,75	Sekretariat DPRD	
69	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	360,00	1.166.089.745	-	-	6,00	33.180.000	1,00	510.000	16,67	1,54	1,00	510.000	0,28	0,04	Sekretariat DPRD	
70	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	60,00	6.181.102.431	43,00	923.782.600	12,00	640.556.000	12,00	600.376.000	100,00	93,73	55,00	1.524.158.600	91,67	24,66	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												58,33	47,63						
Predikat Kinerja												(R)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												97,33	92,37						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
71	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik	Persen	63,00	100.634.303.873	64,60	5.144.527.829	60,00	9.444.331.400	56,75	6.834.743.220	94,58	72,37	121,35	11.979.271.049	192,62	11,90	Sekretariat DPRD	
72	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	Peraturan	15,00	21.504.616.342	11,00	1.181.127.200	24,00	1.593.648.750	30,00	1.158.360.740	125,00	72,69	41,00	2.339.487.940	273,33	10,88	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah terlaksana, ada tambahan Peraturan daerah dari kabupaten sehingga menambah target kinerja
73	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	45,00	510.100.501	-	-	9,00	78.503.000	9,00	69.960.000	100,00	89,12	9,00	69.960.000	20,00	13,71	Sekretariat DPRD	
74	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	45,00	16.050.581.182	11,00	1.181.127.200	9,00	901.041.750	11,00	496.897.550	122,22	55,15	22,00	1.678.024.750	48,89	10,45	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah terlaksana, ada tambahan Peraturan daerah dari kabupaten sehingga menambah target kinerja
75	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	Dokumen	10,00	255.050.251	-	-	2,00	18.125.000	2,00	5.750.000	100,00	31,72	2,00	5.750.000	20,00	2,25	Sekretariat DPRD	
76	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	20,00	4.488.884.409	-	-	4,00	595.979.000	4,00	585.753.190	100,00	98,28	4,00	585.753.190	20,00	13,05	Sekretariat DPRD	
77	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib yang tersusun	Dokumen	1,00	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.										
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja			%									
																			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		109,44	69,39						
																			Predikat Kinerja		(ST)	(S)						
78	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan anggaran yang tersusun	Dokumen	35,00	6.656.811.538	-	-	7,00	870.184.000	7,00	582.461.810	100,00	66,94	7,00	582.461.810	20,00	8,75	Sekretariat DPRD										
79	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	5,00	1.326.261.303	-	-	1,00	239.655.000	1,00	133.489.610	100,00	55,70	1,00	133.489.610	20,00	10,07	Sekretariat DPRD										
80	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	5,00	1.326.261.303	-	-	1,00	125.312.000	1,00	122.938.000	100,00	98,11	1,00	122.938.000	20,00	9,27	Sekretariat DPRD										
81	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	5,00	1.326.261.303	-	-	1,00	239.655.000	1,00	108.212.200	100,00	45,15	1,00	108.212.200	20,00	8,16	Sekretariat DPRD										
82	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	5,00	1.326.261.303	-	-	1,00	141.275.000	1,00	101.792.000	100,00	72,05	1,00	101.792.000	20,00	7,68	Sekretariat DPRD										
83	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	10,00	25.505.025	-	-	2,00	4.000.000	2,00	-	100,00	-	2,00	-	20,00	-	Sekretariat DPRD										
84	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	5,00	1.326.261.303	-	-	1,00	120.287.000	1,00	116.030.000	100,00	96,46	1,00	116.030.000	20,00	8,75	Sekretariat DPRD										
																			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100,00	61,25						
																			Predikat Kinerja		(ST)	(R)						
85	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	Dokumen	1.540,00	3.688.177.612	-	-	272,00	479.556.500	243,00	175.377.000	89,34	36,57	243,00	175.377.000	15,78	4,76	Sekretariat DPRD										
86	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	360,00	464.347.547	-	-	60,00	61.155.000	60,00	19.170.000	100,00	31,35	60,00	19.170.000	16,67	4,13	Sekretariat DPRD										
87	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	300,00	519.516.956	-	-	60,00	61.155.000	60,00	29.475.000	100,00	48,20	60,00	29.475.000	20,00	5,67	Sekretariat DPRD										
88	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	360,00	464.347.547	-	-	60,00	61.155.000	60,00	11.475.000	100,00	18,76	60,00	11.475.000	16,67	2,47	Sekretariat DPRD										
89	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	360,00	464.347.547	-	-	60,00	61.155.000	60,00	11.200.000	100,00	18,31	60,00	11.200.000	16,67	2,41	Sekretariat DPRD										
90	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	140,00	382.575.376	-	-	28,00	17.030.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD										
91	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	5,00	464.347.547	-	-	1,00	-	1,00	-	100,00		1,00	-	20,00	-	Sekretariat DPRD										
92	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	10,00	464.347.547	-	-	2,00	111.632.000	1,00	-	50,00	-	1,00	-	10,00	-	Sekretariat DPRD										
93	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	5,00	464.347.547	-	-	1,00	106.274.500	1,00	104.057.000	100,00	97,91	1,00	104.057.000	20,00	22,41	Sekretariat DPRD										
																			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		81,25	30,65						
																			Predikat Kinerja		(T)	(SR)						
94	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan kapasitas DPRD	Dokumen	30,00	20.047.024.558	6,00	916.636.000	45,00	2.242.968.800	71,00	2.022.849.700	157,78	90,19	77,00	2.939.485.700	256,67	14,66	Sekretariat DPRD										
95	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	40,00	500.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD										
96	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	30,00	15.414.427.904	6,00	801.885.000	6,00	1.684.438.800	6,00	1.526.149.700	100,00	90,60	12,00	2.328.034.700	40,00	15,10	Sekretariat DPRD										
97	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	60,00	294.999.761	24,00	13.046.000	12,00	69.210.000	12,00	27.800.000	100,00	40,17	36,00	40.846.000	60,00	13,85	Sekretariat DPRD										
98	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	12,00	612.120.601	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD										
99	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6,00	1.836.361.804	-	-	6,00	252.000.000	6,00	273.000.000	100,00	108,33	6,00	273.000.000	100,00	14,87	Sekretariat DPRD										
100	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	120,00	1.343.205.443	14,00	101.705.000	28,00	232.910.000	28,00	192.400.000	100,00	82,61	42,00	294.105.000	35,00	21,90	Sekretariat DPRD										
101	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	5,00	45.909.045	-	-	1,00	4.410.000	1,00	3.500.000	100,00	79,37	1,00	3.500.000	20,00	7,62	Sekretariat DPRD										
																			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100,00	80,22						
																			Predikat Kinerja		(ST)	(T)						
102	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang tersusun	Dokumen	140,00	19.703.861.667	241,00	1.446.456.500	28,00	1.446.138.000	28,00	1.215.502.250	100,00	84,05	269,00	2.661.958.750	192,14	13,51	Sekretariat DPRD										
103	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	120,00	3.010.991.908	161,00	185.934.000	24,00	107.665.000	24,00	60.260.000	100,00	55,97	185,00	246.194.000	154,17	8,18	Sekretariat DPRD										
104	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	5,00	178.535.175	-	-	1,00	4.800.000	1,00	4.800.000	100,00	100,00	1,00	4.800.000	20,00	2,69	Sekretariat DPRD										
105	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	15,00	16.514.334.583	80,00	1.260.522.500	3,00	1.333.673.000	3,00	1.150.442.250	100,00	86,26	83,00	2.410.964.750	553,33	14,60	Sekretariat DPRD										
																			Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100,00	80,74						
																			Predikat Kinerja		(ST)	(T)						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
106	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun	Dokumen	6,00	594.730.816	-	-	1,00	59.009.350	1,00	28.740.000	100,00	48,70	1,00	28.740.000	16,67	4,83	Sekretariat DPRD	
107	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1,00	95.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Rasionalisasi Anggaran
108	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	5,00	499.730.816	-	-	1,00	59.009.350	1,00	28.740.000	100,00	48,70	1,00	28.740.000	20,00	5,75	Sekretariat DPRD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	48,70						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
109	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah yang tersusun	Dokumen	165,00	4.764.945.923	15,00	675.677.000	33,00	784.000.000	33,00	532.000.000	100,00	67,86	48,00	1.207.677.000	29,09	25,35	Sekretariat DPRD	
110	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	165,00	4.764.945.923	15,00	675.677.000	33,00	784.000.000	33,00	532.000.000	100,00	67,86	48,00	1.207.677.000	29,09	25,35	Sekretariat DPRD	Kegiatan sudah dilaksanakan, berupa MOU dengan Surat kabar (absolut target indikator)
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	67,86						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
111	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi DPRD yang terlaksana	Dokumen	205,00	23.674.135.418	50,00	924.631.129	41,00	1.968.826.000	41,00	1.119.451.720	100,00	56,86	91,00	2.044.082.849	44,39	8,63	Sekretariat DPRD	
112	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	80,00	21.712.058.325	50,00	924.631.129	16,00	1.285.416.000	16,00	648.864.700	100,00	50,48	66,00	1.573.495.829	82,50	7,25	Sekretariat DPRD	
113	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	5,00	127.525.125	-	-	1,00	9.250.000	1,00	8.000.000	100,00	86,49	-	8.000.000	-	6,27	Sekretariat DPRD	
114	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	60,00	1.103.455.525	-	-	12,00	137.124.000	12,00	22.830.000	100,00	16,65	12,00	22.830.000	20,00	2,07	Sekretariat DPRD	
115	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	60,00	731.096.442	-	-	12,00	537.036.000	12,00	439.757.020	100,00	81,89	12,00	439.757.020	20,00	60,15	Sekretariat DPRD	
116	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	58,88						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												109,01	65,48						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												95,96	88,38						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(T)						
1	INSPEKTORAT																		
2	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				93.233.882.217		5.937.459.321		9.156.370.932		7.179.669.433		78,41		13.117.128.754		14,07		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	90,00	67.142.871.579	90,00	4.596.885.214	90,00	6.827.915.932	90,00	6.029.435.933	100,00	88,31	78,75	10.626.321.147	87,50	15,83	Inspektorat	
		2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik	Persen	90,00		90,00		90,00		90,00		100,00		78,75		87,50			
		3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persen	90,00		90,00		90,00		90,00		100,00		78,75		87,50			
		4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	Persen	90,00		90,00		90,00		90,00		100,00		78,75		87,50			
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	90,00	1.335.194.000	90,00	22.318.900	90,00	102.939.500	90,00	64.900.000	100,00	63,05	78,75	87.218.900	87,50	6,53	Inspektorat	
		2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	90,00		90,00		90,00		90,00		100,00		78,75		87,50			
		3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	90,00		90,00		90,00		90,00		100,00		78,75		87,50			
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	70,00	505.690.000	14,00	22.048.900	14,00	32.224.500	14,00	20.900.000	100,00	64,86	28,00	42.948.900	40,00	8,49	Inspektorat	
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	60,00	54.000.000	-	-	1,00	-	1,00	-	100,00		1,00	-	1,67	-		
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	60,00	54.000.000	-	-	1,00	-	1,00	-	100,00		1,00	-	1,67	-		
8	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	60,00	54.000.000	-	-	1,00	-	1,00	-	100,00		1,00	-	1,67	-		
9	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	60,00	54.000.000	-	-	1,00	-	1,00	-	100,00		1,00	-	1,67	-		
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	60,00	571.104.000	1,00	270.000	15,00	70.715.000	12,00	44.000.000	80,00	62,22	13,00	44.270.000	21,67	7,75	Inspektorat	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	42.400.000	-	-	4,00	-	-	-			-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												96,67	63,54						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Laporan Kinerja Keuangan dengan baik	Persen	90,00	54.181.396.051	90,00	3.972.729.406	90,00	5.111.307.785	90,00	5.214.831.546	100,00	102,03	78,75	9.187.560.952	87,50	16,96	Inspektorat	
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	200,00	53.523.728.051	35,00	3.950.179.406	40,00	5.081.801.285	40,00	5.196.381.546	100,00	102,25	75,00	9.146.560.952	37,50	17,09	Inspektorat	
14	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	140,00	274.561.000	28,00	21.000.000	28,00	24.955.000	28,00	18.450.000	100,00	73,93	56,00	39.450.000	40,00	14,37	Inspektorat	
15	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12,00	89.400.000	-	-	12,00	-	-	-			-	-	-	-		Rasionalisasi Anggaran
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00	203.805.000	1,00	850.000	4,00	2.491.500	1,00	-	25,00	-	2,00	850.000	40,00	0,42	Inspektorat	Efisiensi Anggaran
17	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	4,00	12.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	25,00	36.302.000	5,00	700.000	12,00	2.060.000	-	-	-	-	5,00	700.000	20,00	1,93	Inspektorat	Sub Kegiatan tidak dilaksanakan
19	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12,00	41.600.000	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												56,25	44,05						
Predikat Kinerja												(R)	(SR)						
20	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Unit	273,00	448.662.350	273,00	21.000.000	273,00	24.120.000	273,00	18.450.000	100,00	76,49	546,00	39.450.000	200,00	8,79	Inspektorat	
21	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1,00	31.800.000	-	-	1,00	-	1,00	-	100,00		1,00	-	100,00	-		
22	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	100,00	41.000.000	-	-	1,00	-	1,00	-	100,00		1,00	-	1,00	-		
23	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12,00	62.400.000	-	-	12,00	-	12,00	-	100,00		12,00	-	100,00	-		
24	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	8.000.000	-	-	12,00	-	12,00	-	100,00		12,00	-	100,00	-		
25	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	31.200.000	-	-	12,00	-	12,00	-	100,00		12,00	-	100,00	-		
26	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60,00	262.262.350	60,00	21.000.000	12,00	24.120.000	12,00	18.450.000	100,00	76,49	72,00	39.450.000	120,00	15,04	Inspektorat	
27	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	316,00	12.000.000	-	-	1,00	-	1,00	-	100,00		1,00	-	0,32	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	76,49						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
28	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	Persen	90,00	2.638.070.000	90,00	109.290.000	90,00	480.786.800	90,00	222.692.422	100,00	46,32	90,00	331.982.422	100,00	12,58	Inspektorat	
29	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	60,00	221.670.000	12,00	17.400.000	12,00	20.520.000	12,00	15.300.000	100,00	74,56	24,00	32.700.000	40,00	14,75	Inspektorat	
30	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	10,00	62.400.000	-	-	2,00	-	-	-			-	-	-	-		
31	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	200,00	2.354.000.000	25,00	91.890.000	40,00	460.266.800	28,00	207.392.422	70,00	45,06	53,00	299.282.422	26,50	12,71	Inspektorat	Tidak terpenggantinya oleh Instansi Penyelenggara, dan banyaknya kegiatan Bimtek yang dialihkan ke Online
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												85,00	59,81						
Predikat Kinerja												(T)	(R)						
32	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	Persen	90,00	2.947.032.347	90,00	129.501.307	90,00	172.786.965	90,00	127.532.056	100,00	73,81	90,00	257.033.363	100,00	8,72	Inspektorat	
33	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	56.600.000			1,00	2.022.862	-	-			-	-	-	-	Inspektorat	
34	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	345.009.108	1,00	62.790.325	1,00	26.393.103	1,00	22.945.181	100,00	86,94	2,00	85.735.506	40,00	24,85	Inspektorat	
35	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15,00	91.360.700	1,00	3.127.012	1,00	8.650.000	2,00	3.680.850	200,00	42,55	3,00	6.807.862	20,00	7,45	Inspektorat	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
36	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60,00	118.000.000	12,00	8.820.000	12,00	14.000.000	12,00	9.795.000	100,00	69,96	24,00	18.615.000	40,00	15,78	Inspektorat	
37	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12,00	206.750.000			6,00	-	-	-			-	-	-	-		
38	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40,00	1.848.642.539	23,00	37.363.970	40,00	103.281.000	44,00	75.811.025	110,00	73,40	67,00	113.174.995	167,50	6,12	Inspektorat	
39	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	26.000.000			1,00	-	-	-			-	-	-	-		
40	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12,00	254.670.000	12,00	17.400.000	12,00	18.440.000	12,00	15.300.000	100,00	82,97	24,00	32.700.000	200,00	12,84	Inspektorat	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												122,00	71,17						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
41	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Persen	90,00	2.224.046.185	90,00	150.000.000	90,00	512.374.650	90,00	150.000.000	100,00	29,28	90,00	300.000.000	100,00	13,49	Inspektorat	
42	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	455.000.000	-	-	1,00	144.275.650	-	-	-	-	-	-	-	-		Efisiensi Anggaran, di tahun 2022 tidak ada pengadaaan
43	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12,00	769.046.185	-	-	1,00	218.099.000	-	-	-	-	-	-	-	-		Dipindahkan ke tahun 2023 menjadi Piutang belanja 2023
44	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00	1.000.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	150.000.000	100,00	100,00	2,00	300.000.000	40,00	30,00	Inspektorat	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												33,33	33,33						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
45	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Persen	90,00	1.705.044.112	90,00	145.546.361	90,00	194.430.232	90,00	138.629.886	100,00	71,30	90,00	284.176.247	100,00	16,67	Inspektorat	
46	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60,00	25.125.000	12,00	953.000	12,00	1.600.000	12,00	465.000	100,00	29,06	24,00	1.418.000	40,00	5,64	Inspektorat	
47	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60,00	448.400.000	12,00	49.190.281	12,00	69.220.000	12,00	46.070.806	100,00	66,56	24,00	95.261.087	40,00	21,24	Inspektorat	
48	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2,00	26.000.000				-	-	-			-	-	-	-		Rasionalisasi Anggaran
49	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00	1.205.519.112	12,00	95.403.080	12,00	123.610.232	12,00	92.094.080	100,00	74,50	24,00	187.497.160	40,00	15,55	Inspektorat	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	56,71						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
50	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	Persen	90,00	1.663.426.534	90,00	46.499.240	90,00	229.170.000	90,00	92.400.023	100,00	40,32	90,00	138.899.263	100,00	8,35	Inspektorat	
51	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5,00	290.235.056	1,00	22.205.740	1,00	30.000.000	1,00	19.385.200	100,00	64,62	2,00	41.590.940	40,00	14,33	Inspektorat	
52	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60,00	1.183.441.478	12,00	20.622.300	12,00	191.670.000	12,00	66.849.823	100,00	34,88	24,00	87.472.123	40,00	7,39	Inspektorat	
53	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5,00	10.000.000	-	-	5,00	-	-	-			-	-	-	-		Rasionalisasi Anggaran
54	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	17.000.000	1,00	300.000	1,00	-	-	-			1,00	300.000	100,00	1,76	Inspektorat	Rasionalisasi Anggaran
55	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20,00	162.750.000	16,00	3.371.200	20,00	7.500.000	21,00	6.165.000	105,00	82,20	37,00	9.536.200	185,00	5,86	Inspektorat	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												101,67	60,56						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	62,82						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
56	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD	Nilai	67,25	17.374.899.500	67,25	792.945.707	67,25	1.849.329.000	58,57	833.312.500	87,09	45,06	125,82	1.626.258.207	187,09	9,36	Inspektorat	
		Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	Nilai	3,05		3,05		3,05		3,12		102,30		6,17	-	202,30	-	Inspektorat	
57	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Hasil Pelaksanaan Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	Laporan	95,00	12.187.027.000	95,00	589.931.707	95,00	1.021.448.500	30,00	595.751.500	31,58	58,32	125,00	1.185.683.207	131,58	9,73	Inspektorat	
58	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20,00	3.423.137.500	3,00	214.514.040	4,00	277.891.000	4,00	213.954.000	100,00	76,99	7,00	428.468.040	35,00	12,52	Inspektorat	
58	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	40,00	2.214.240.000	8,00	54.849.000	8,00	197.113.500	8,00	92.988.500	100,00	47,18	16,00	147.837.500	40,00	6,68	Inspektorat	
59	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Pelaksanaan Reviu kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	10,00	532.870.000	2,00	24.955.000	2,00	110.290.000	2,00	43.511.000	100,00	39,45	4,00	68.466.000	40,00	12,85	Inspektorat	
59	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Reviu keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	10,00	383.620.000	2,00	31.306.000	2,00	24.578.000	2,00	24.578.000	100,00	100,00	4,00	55.884.000	40,00	14,57	Inspektorat	
60	Pengawasan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Desa	Laporan	10,00	2.658.627.500	2,00	260.395.571	2,00	227.415.000	2,00	164.717.000	100,00	72,43	4,00	425.112.571	40,00	15,99	Inspektorat	
60	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksanaan kerjasama pengawasan internal	Laporan	1,00	1.090.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Rasionalisasi Anggaran
61	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Pelaksanaan Monev TLPB BPK-RI dan APIP	Laporan	60,00	1.884.032.000	12,00	3.912.096	4,00	184.161.000	12,00	56.003.000	300,00	30,41	24,00	59.915.096	40,00	3,18	Inspektorat	Target Kinerja menjadi 12 Laporan, dikarenakan pelaporannya per bulan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												133,33	61,08						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
62	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	26,00	5.187.872.500	26,00	203.014.000	26,00	827.880.500	6,00	237.561.000	23,08	28,70	32,00	440.575.000	123,08	8,49	Inspektorat	
63	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah	Laporan	50,00	2.049.875.000	10,00	71.807.500	10,00	106.000.000	1,00	8.240.500	10,00	7,77	11,00	80.048.000	22,00	3,91	Inspektorat	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
64	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	80,00	3.137.997.500	16,00	131.206.500	16,00	721.880.500	16,00	229.320.500	100,00	31,77	32,00	360.527.000	40,00	11,49	Inspektorat	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												55,00	19,77						
Predikat Kinerja												(R)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												27,33	43,51						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
65	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	62,00	8.716.111.138	62,00	547.628.400	62,00	479.126.000	67,71	316.921.000	109,21	66,15	129,71	864.549.400	209,21	9,92	Inspektorat	

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
65	DAN ASISTENSI	Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	Unit Kerja	4,00		4,00		4,00		4,00		100,00		8,00	-	200,00	-	Inspektorat	
66	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang dirumuskan	Dokumen	4,00	152.000.000	-	-	2,00	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
67	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dirumuskan	Dokumen	10,00	76.000.000	-	-	1,00	15.000.000	1,00	-	100,00	-	1,00	-	10,00	-		Kinerja tercapai, Pencairan anggaran ditanggihkan (Efisiensi Anggaran)
68	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah kebijakan Teknis di Bidang fasilitas Pengawasan yang dirumuskan	Dokumen	10,00	76.000.000	-	-	1,00	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												50,00	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
69	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen laporan hasil pendampingan dan asistensi yang tersusun	Laporan	17,00	8.564.111.138	14,00	547.628.400	18,00	449.126.000	3,00	316.921.000	16,67	70,56	17,00	864.549.400	100,00	10,10	Inspektorat	
70	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	12,00	405.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	5,00	1.076.815.000	1,00	33.790.000	1,00	40.280.000	1,00	36.097.000	100,00	89,62	2,00	69.887.000	40,00	6,49	Inspektorat	
72	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	60,00	4.071.871.000	12,00	2.113.400	4,00	336.479.000	4,00	250.784.000	100,00	74,53	16,00	252.897.400	26,67	6,21	Inspektorat	
73	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	20,00	3.010.175.138	4,00	511.725.000	4,00	72.367.000	4,00	30.040.000	100,00	41,51	8,00	541.765.000	40,00	18,00	Inspektorat	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	68,55						
Predikat Kinerja												(S)	(S)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												8,33	35,28						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												99,77	66,50						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(S)	(S)						
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				126.227.942.168		8.665.837.946		13.502.244.316		10.398.820.590		77,02		19.064.658.536		15,10		
2	URUSAN PERENCANAAN				116.656.732.043		8.126.120.591		12.811.968.326		9.671.495.366		75,49		17.797.615.957		15,26		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana pasarana kantor yang terpenuhi	%	95,00	62.364.196.528	90,35	4.302.229.614	91,00	5.724.515.941	119,25	3.805.699.151	131,04	66,48	209,60	8.107.928.765	220,63	13,00	Bappeda	
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	%	98,00		92,50		95,00		22,50		23,68		115,00		117,35		Bappeda	
		Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	98,00		100,00		95,00		100,00		105,26		200,00		204,08		Bappeda	
		Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	98,00		100,00		95,00		100,00		105,26		200,00		204,08		Bappeda	
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	786.972.200	100,00	21.435.000	100,00	49.738.000	100,00	21.497.000	100,00	43,22	100,00	42.932.000	100,00	5,46	Bappeda	
		Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00		100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		Bappeda	
		Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		80,00		80,00		100,00		100,00		Bappeda	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	4,00	607.170.200	4,00	21.435.000	4,00	30.338.000	4,00	19.215.000	100,00	63,34	8,00	40.650.000	1,00	0,03	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	Laporan	10,00	179.802.000	-	-	1,00	19.400.000	1,00	2.282.000	100,00	11,76	1,00	2.282.000	0,10	0,01	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	37,55						
Predikat Kinerja												(S)	(SR)						
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100,00	36.145.962.603	100,00	3.334.063.417	100,00	4.145.620.137	100,00	4.099.637.699	100,00	98,89	200,00	7.433.701.116	200,00	20,57	Bappeda	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	Orang/bulan	45,00	34.612.524.345	27,00	3.266.388.917	45,00	4.092.220.137	45,00	4.051.971.949	100,00	99,02	72,00	7.318.360.866	1,00	0,12	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	24,00	816.202.858	12,00	45.659.500	1,00	45.600.000	1,00	39.865.750	100,00	87,42	13,00	85.525.250	0,04	0,05	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Laporan	1,00	580.454.000	1,00	22.015.000	1,00	6.050.000	1,00	6.050.000	100,00	100,00	2,00	28.065.000	1,00	0,01	Bappeda	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	1,00	136.781.400	-	-	1,00	1.750.000	1,00	1.750.000	100,00	100,00	1,00	1.750.000	1,00	0,01		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	96,61						
Predikat Kinerja												(S)	(S)						
12	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100,00	243.404.940	100,00	21.000.000	100,00	21.125.000	100,00	18.450.000	100,00	87,34	200,00	39.450.000	200,00	16,21	Bappeda	
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	Laporan	12,00	243.404.940	938,00	21.000.000	3,00	21.125.000	3,00	18.450.000	100,00	87,34	941,00	39.450.000	0,25	0,08	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	87,34						
Predikat Kinerja												(S)	(T)						
14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	244.532.280	100,00	20.745.000	100,00	22.825.000	100,00	20.250.000	100,00	88,72	200,00	40.995.000	200,00	16,76	Bappeda	
15	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	Dokumen	12,00	244.532.280	12,00	20.745.000	1,00	22.825.000	1,00	20.250.000	100,00	88,72	13,00	40.995.000	0,08	0,08	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	88,72						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	11.375.829.629	100,00	218.357.371	100,00	484.162.804	100,00	210.354.313	100,00	43,45	200,00	428.711.684	200,00	3,77	Bappeda	
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1,00	144.141.473	2,00	9.241.000	1,00	9.284.820	1,00	4.706.364	100,00	50,69	3,00	13.947.364	1,00	0,03	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor disediakan	Paket	2,00	6.249.164.164	57,00	73.131.200	1,00	68.087.728	1,00	68.012.462	100,00	99,89	58,00	141.143.662	0,50	0,01	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1,00	2.022.773.571	10,00	30.642.011	1,00	35.194.256	1,00	19.277.818	100,00	54,78	11,00	49.919.829	1,00	0,01	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1,00	181.002.378	1,00	5.988.027	1,00	14.750.000	1,00	8.728.000	100,00	59,17	2,00	14.716.027	1,00	0,05	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1,00	253.431.600	15,00	13.610.000	1,00	32.628.000	1,00	6.450.000	100,00	19,77	16,00	20.060.000	1,00	0,03	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
23	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Paket	1,00	424.470.343	1,00	52.922.955		-		-		-	1,00	52.922.955	-	-	Bappeda	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	12,00	1.946.100.000	12,00	32.822.178	12,00	299.888.000	12,00	89.879.669	100,00	29,97	24,00	122.701.847	1,00	0,05	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
25	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilaksanakan	Dokumen	1,00	154.746.100	-	-	1,00	24.330.000	1,00	13.300.000	100,00	54,67	1,00	13.300.000	1,00	0,09	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	42,32						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
26	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100,00	3.549.335.679	100,00	202.633.500	100,00	35.600.000	12,50	55.604.000	12,50	156,19	112,50	258.237.500	112,50	7,28	Bappeda	
27	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	1,00	681.557.100	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	Bappeda	Tahun 2022 tidak ada pengadaan mebel
28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	16,00	2.219.637.879	15,00	103.633.500	16,00	35.600.000	2,00	55.604.000	12,50	156,19	17,00	159.237.500	0,13	0,03	Bappeda	Sudah disesuaikan dengan kebutuhan
29	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1,00	648.140.700	1,00	99.000.000	-	-	-	-		-	1,00	99.000.000	-	-	Bappeda	Tahun 2022 tidak ada pengadaan gedung/kantor
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												12,50	156,19						
Predikat Kinerja												(SR)	(ST)						
30	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	7.633.388.393	100,00	403.643.288	100,00	763.245.000	100,00	479.097.606	100,00	62,77	200,00	882.740.894	200,00	11,56	Bappeda	
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Laporan	1,00	56.302.970	1,00	2.390.000	1,00	3.000.000	1,00	1.800.000	100,00	60,00	2,00	4.190.000	1,00	0,03	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Laporan	1,00	4.043.620.000	12,00	179.160.617	1,00	480.000.000	1,00	243.195.481	100,00	50,67	13,00	422.356.098	1,00	0,06	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1,00	3.533.465.423	1,00	222.092.671	1,00	280.245.000	1,00	234.102.125	100,00	83,53	2,00	456.194.796	1,00	0,07	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	64,73						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100,00	2.384.770.804	100,00	80.352.038	100,00	202.200.000	100,00	109.668.045	100,00	54,24	200,00	190.020.083	200,00	7,97	Bappeda	
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	24,00	1.773.020.804	12,00	55.934.129	12,00	157.200.000	12,00	90.922.363	100,00	57,84	24,00	146.856.492	0,50	0,05	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	Unit	1,00	611.750.000	1,00	24.417.909	1,00	45.000.000	1,00	18.745.682	100,00	41,66	2,00	43.163.591	1,00	0,03	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	49,75						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												89,06	79,35						
Predikat Kinerja												(T)	(T)						
37	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	20.413.490.580		2.027.302.497	100,00	2.806.506.942	100,00	2.083.735.258	100,00	74,25	100,00	4.111.037.755	100,00	20,14	Bappeda	
		Persentase realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	%	62,00				58,00			73,80		127,24						
38	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD	Dokumen	12,00	13.155.395.852	12,00	1.489.806.098	12,00	1.770.962.970	12,00	1.529.965.555	100,00	86,39	24,00	3.019.771.653	200,00	22,95	Bappeda	
		Jumlah Aplikasi yang dikelola	Aplikasi	1,00	-		-	1,00	-		-		-		-		-		
39	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD (Forum PD)	Berita Acara	4,00	180.657.352	4,00	12.000.000	4,00	16.650.970	4,00	15.165.250	100,00	91,08	8,00	27.165.250	1,00	0,08	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
40	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD (Musrenbang Kabupaten)	Berita Acara	1,00	1.464.124.750	1,00	61.520.000	1,00	251.477.000	1,00	178.000.131	100,00	70,78	2,00	239.520.131	1,00	0,12	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
41	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	11.510.613.750	1,00	1.416.286.098	3,00	1.502.835.000	3,00	1.336.800.174	100,00	88,95	4,00	2.753.086.272	1,50	0,12	Bappeda	Ada penyerapan di triwulan IV untuk penyusunan tahapan RKPD 2024
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	83,60						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
42	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan Data Perencanaan Pembangunan daerah	%	87,00	2.328.743.728	77,00	531.775.649	77,00	165.243.000	100,00	54.734.571	129,87	33,12	177,00	586.510.220	203,45	25,19	Bappeda	
43	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data perencanaan pembangunan Daerah	Manuskrip	2,00	1.177.440.000	1,00	58.150.000	1,00	165.243.000	1,00	54.734.571	100,00	33,12	2,00	112.884.571	0,50	0,05	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
44	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Sistem informasi data pembangunan daerah yang dikelola	Orang	70,00	1.151.303.728	70,00	473.625.649	-	-	-	-	-	-	70,00	473.625.649	-	-	Bappeda	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	33,12						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
45	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	%	62,00	4.929.351.000	58,00	5.720.750	58,00	870.300.972	73,80	499.035.132	127,24	57,34	131,80	504.755.882	212,58	10,24	Bappeda	
46	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan evaluasi RKPD triwulanan	Laporan	12,00	4.929.351.000	4,00	5.720.750	4,00	870.300.972	4,00	499.035.132	100,00	57,34	8,00	504.755.882	0,33	0,10	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	57,34						
Predikat Kinerja												(R)	(R)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												119,04	58,95						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
47	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki keselarasan program RPJMD dan RKPD	%	98,00	33.879.044.935		1.796.588.480	94,00	4.280.945.443	83,33	2.573.201.445	88,65	60,11	83,33	4.369.789.925	85,03	12,90	Bappeda	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran	%	100,00				100,00		86,96		86,96						Bappeda	
48	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	Dokumen	2,00	9.922.838.052	2,00	888.407.355	2,00	690.446.000	2,00	624.085.550	100,00	90,39	4,00	1.512.492.905	200,00	15,24	Bappeda	
		Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	Laporan	3,00				3,00		1,00	-							Bappeda	
49	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2,00	4.320.019.115	2,00	717.452.405	2,00	330.000.000	2,00	583.365.350	100,00	176,78	4,00	1.300.817.755	1,00	0,14	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
50	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Asistansi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	1,00	-	1,00	21.522.550	-	-	-	-			1,00	21.522.550	-	-	Bappeda	
51	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1,00	1.109.042.000	2,00	127.443.400	1,00	50.000.000	-	-	-	-	2,00	127.443.400	-	-	Bappeda	Ada refocusing anggaran
52	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2,00	1.671.318.000	1,00	21.989.000	1,00	250.000.000	1,00	40.720.200	100,00	16,29	2,00	62.709.200	0,50	0,02	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
53	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Asistansi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	15,00	2.458.074.093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	
54	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	15,00	364.384.844	-	-	5,00	60.446.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda	Ada refocusing anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												50,00	48,27						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
55	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	Dokumen	6,00	3.757.300.483	6,00	56.225.361	6,00	255.910.250	6,00	118.390.576	100,00	46,26	12,00	174.615.937	200,00	4,65	Bappeda	
56	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1,00	1.297.300.483	2,00	36.415.361	1,00	100.000.000	1,00	49.370.200	100,00	49,37	3,00	85.785.561	1,00	0,04	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
57	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistansi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	4,00	480.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bappeda	
58	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	4,00	530.000.000	-	-	4,00	20.000.000	4,00	10.121.000	100,00	50,61	4,00	10.121.000	1,00	0,02	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
59	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1,00	640.000.000	1,00	19.300.000	1,00	115.910.250	1,00	50.065.376	100,00	43,19	2,00	69.365.376	1,00	0,08	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
60	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistansi Perencanaan SDA	Perangkat Daerah	2,00	380.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bappeda	
61	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	2,00	430.000.000	1,00	510.000	2,00	20.000.000	2,00	8.834.000	100,00	44,17	3,00	9.344.000	1,00	0,02	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	46,83						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja			%	
62	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	Dokumen	13,00	20.198.906.400	13,00	851.955.764	18,00	3.334.589.193	24,00	1.830.725.319	133,33	54,90	37,00	2.682.681.083	284,62	13,28	Bappeda		
		Jumlah Peta Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	Dokumen	10,00				10,00		10,00								Bappeda		
63	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di koordinasikan	Dokumen	1,00	650.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bappeda		
64	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur yang Diasistensikan	Perangkat Daerah	15,00	650.000.000	-	-	5,00	72.808.000	5,00	17.696.994	100,00	24,31	5,00	17.696.994	0,33	0,03	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan	
65	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Evaluasi Infrastruktur	Perangkat Daerah	15,00	650.000.000	-	-	5,00	4.500.000	5,00	3.000.000	100,00	66,67	5,00	3.000.000	0,33	0,00	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan	
66	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4,00	3.219.362.837	3,00	99.761.761	4,00	1.330.275.943	4,00	887.305.626	100,00	66,70	7,00	987.067.387	1,00	0,28	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan	
67	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang di koordinasikan	Dokumen	1,00	650.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bappeda		
68	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Wilayah yang Diasistensikan	Perangkat Daerah	15,00	650.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bappeda		
69	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Perangkat Daerah	15,00	650.750.000	-	-	10,00	4.500.000	10,00	3.000.000	100,00	66,67	10,00	3.000.000	0,67	0,00	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan	
70	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Laporan	4,00	13.078.793.563	5,00	752.194.003	10,00	1.922.505.250	10,00	919.722.699	100,00	47,84	15,00	1.671.916.702	2,50	0,07	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	54,44							
Predikat Kinerja												(ST)	(R)							
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												111,11	63,85							
Predikat Kinerja												(ST)	(R)							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												93,32	66,95							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(S)							
71	URUSAN PENELITIAN DAN PENGAMBANGAN				9.571.210.125		539.717.355		690.275.990		727.325.224			-	1.267.042.579		13,24			
72	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		Persentase Hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	%	60,00	9.571.210.125		539.717.355	40,00	690.275.990	60,00	727.325.224	150,00	105,37	60,00	1.267.042.579	100,00	13,24	Bappeda	
73	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen pemelitan dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Dokumen	-	1.245.398.154	-	246.267.432	-	31.420.000	-	21.971.000	-	69,93	-	268.238.432	-	21,54	Bappeda		
		Jumlah laporan pemelitan dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Laporan	2,00				2,00		-	-							Bappeda		
74	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bappeda		
75	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Dokumen	2,00	317.904.400	1,00	224.113.100	-	-	-	-			1,00	224.113.100	-	-	Bappeda		
76	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Laporan	3,00	927.493.754	3,00	22.154.332	2,00	31.420.000		21.971.000	-	69,93	3,00	44.125.332	-	0,02	Bappeda	Refocussing anggaran, hanya ada koordinasi saja	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	69,93							
Predikat Kinerja												(SR)	(ST)							
77	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	1,00	1.279.901.000	1,00	4.793.800		-	-	-			1,00	4.793.800	100,00	0,37	Bappeda	Refocusing Anggaran	
78	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	-	1.000.000.000	-	-		-	-	-			-	-	-	-	Bappeda		
79	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1,00	279.901.000	-	4.793.800				-			-	4.793.800	-	-	Bappeda		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-							
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)							
80	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	1,00	5.845.910.971	1,00	288.656.123	1,00	653.799.990	2,00	624.096.840	200,00	95,46	3,00	912.752.963	300,00	15,61	Bappeda		

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
81	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1,00	1.438.619.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bappeda	
82	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1,00	3.001.828.371	-	1.475.000	1,00	231.999.990	1,00	202.386.240	100,00	87,24	1,00	203.861.240	1,00	0,07	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
83	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1,00	1.405.463.100	-	287.181.123	1,00	421.800.000	1,00	421.710.600	100,00	99,98	1,00	708.891.723	1,00	0,30	Bappeda	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	93,61						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
84	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	2,00	1.200.000.000	2,00	-	2,00	5.056.000	1,00	81.257.384	50,00	1.607,15	3,00	81.257.384	150,00	6,77	Bappeda	
85	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1,00	400.000.000	-	-	1,00	5.056.000	1,00	81.257.384	100,00	1.607,15	1,00	81.257.384	1,00	0,20	Bappeda	Pergeseran penggunaan anggaran dalam rangka pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi inovasi daerah
86	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1,00	800.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bappeda	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	1.607,15						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	82,69						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												150,00	105,37						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(ST)						
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-			2.362.111.423.475		107.432.160.542		249.125.276.534		126.663.867.501		50,84		203.080.925.523				
2	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN				2.362.111.423.475		107.432.160.542		249.125.276.534		126.663.867.501		50,84		203.080.925.523				
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	% % % %	95,00 100,00 96,00 97,00	147.247.921.000	- 100,00 100,00 100,00	7.150.062.841	91,00 97,00 85,00 92,00	9.018.878.700	78,46 100,00 95,00 100,25	7.991.812.614	86,22 103,09 111,76 108,97	88,61	70,46 25,00 20,00 61,25	13.777.686.344	74,17 25,00 20,83 63,14	9,36	BKAD	
4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	% % %	98,00 98,00 98,00	1.637.512.365	100,00 100,00 100,00	46.145.750	95,00 95,00 95,00	163.400.000	100,00 100,00 100,00	94.965.500	105,26 105,26 105,26	58,12	50,00 50,00 75,00	98.086.750	51,02 51,02 76,53	5,99	BKAD	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4,00	767.770.019	4,00	30.156.250	4,00	96.000.000	6,00	42.700.500	150,00	44,48	4,00	63.808.250	100,00	8,31	BKAD	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,00	869.742.346	4,00	15.989.500	4,00	67.400.000	4,00	52.265.000	100,00	77,54	4,00	34.278.500	100,00	3,94	BKAD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												125,00	61,01						
Predikat Kinerja												(R)	(R)						
7	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	99,00	99.591.577.983	100,00	5.731.555.066	85,00	5.769.850.518	100,00	5.784.379.272	117,65	100,25	12,00	11.515.934.338	12,12	11,56	BKAD	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	300,00	98.064.417.433	40,00	5.676.208.316	50,00	5.700.150.518	40,00	5.751.037.772	80,00	100,89	80,00	11.427.246.088	26,67	11,65	BKAD	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	30,00	859.499.019	5,00	22.599.750	5,00	52.200.000	5,00	31.263.500	100,00	59,89	10,00	53.863.250	33,33	6,27	BKAD	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6,00	357.000.000	1,00	32.747.000	1,00	10.000.000	1,00	1.905.000	100,00	19,05	2,00	34.652.000	33,33	9,71	BKAD	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72,00	172.186.719	-	-	1,00	7.500.000	1,00	173.000	100,00	2,31	1,00	173.000	1,39	0,10	BKAD	
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	6,00	138.474.813	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	BKAD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												95,00	45,54						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
13	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	90,00	844.079.019	90,00	19.319.500	78,00	45.000.000	70,00	19.406.000	89,74	43,12	70,00	38.725.500	77,78	4,59	BKAD	
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72,00	844.079.019	12,00	19.319.500	12,00	45.000.000	12,00	19.406.000	100,00	43,12	24,00	38.725.500	33,33	4,59	BKAD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	43,12						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
15	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	%	5,00	156.300.000	207,84	32.163.000	5,00	2.800.000	-	2.758.000	-	98,50	-	34.921.000	-	22,34	BKAD	
16	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	33,00	156.300.000	11,00	32.163.000	11,00	2.800.000	1,00	2.758.000	9,09	98,50	12,00	34.921.000	36,36	22,34	BKAD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												9,09	98,50						
Predikat Kinerja												(SR)	(ST)						
17	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	99,00	2.935.556.210	100,00	31.790.000	95,00	99.800.000	100,00	38.028.500	105,26	38,10	25,00	69.818.500	25,25	2,38	BKAD	
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	18,00	2.062.022.559	-	-	3,00	-	-	-			-	-	-	-	BKAD	
19	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	30,00	873.533.651	5,00	31.790.000	5,00	99.800.000	4,00	38.028.500	80,00	38,10	9,00	69.818.500	30,00	7,99	BKAD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												80,00	38,10						
Predikat Kinerja												(T)	(SR)						
20	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	99,00	14.589.909.478	175,00	224.578.500	92,00	330.961.160	100,00	251.795.359	108,70	76,08	25,00	476.373.859	25,25	3,27	BKAD	
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	500.775.969	1,00	1.196.500	1,00	6.000.000	1,00	4.434.000	100,00	73,90	2,00	5.630.500	33,33	1,12	BKAD	
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	5.950.331.675	1,00	156.180.000	1,00	125.000.000	1,00	122.875.000	100,00	98,30	2,00	279.055.000	33,33	4,69	BKAD	
23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	18,00	1.358.218.821	3,00	22.685.000	3,00	23.268.160	3,00	24.592.100	100,00	105,69	6,00	47.277.100	33,33	3,48	BKAD	
24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	161.789.061	2,00	5.870.000	2,00	7.000.000	2,00	5.850.000	100,00	83,57	4,00	11.720.000	33,33	7,24	BKAD	
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	600,00	6.618.793.953	48,00	38.647.000	100,00	169.693.000	38,00	94.044.259	38,00	55,42	86,00	132.691.259	14,33	2,00	BKAD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												87,60	83,38						
Predikat Kinerja												(T)	(T)						
26	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	36,00	7.233.808.327	33,33	74.050.000	27,00	531.400.940	96,45	520.962.330	357,22	98,04	70,00	595.012.330	194,44	8,23	BKAD	
27	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	8,00	1.285.000.000	-	-	-	-	1,00	39.656.250			1,00	39.656.250	12,50	3,09		
28	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	30,00	465.763.697	-	-	50,00	-	-	-			-	-	-	-		
29	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	525,00	1.808.018.631	-	-	75,00	168.400.940	90,00	149.850.000	120,00	88,98	90,00	149.850.000	17,14	8,29	BKAD	
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	125,00	1.378.137.000	-	-	18,00	263.000.000	16,00	236.456.080	88,89	89,91	16,00	236.456.080	12,80	17,16	BKAD	
31	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18,00	2.296.889.000	3,00	74.050.000	2,00	100.000.000	3,00	95.000.000	150,00	95,00	6,00	169.050.000	33,33	7,36	BKAD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												119,63	91,30						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
32	KegiatanPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	99,00	11.758.898.928	69,14	706.654.112	90,00	1.258.543.182	100,00	815.851.720	111,11	64,83	169,14	1.522.505.832	170,85	12,95	BKAD	
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72,00	80.874.288	12,00	600.000	12,00	4.000.000	12,00	3.787.500	100,00	94,69	24,00	4.387.500	33,33	5,43	BKAD	
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72,00	6.364.172.830	12,00	486.152.612	12,00	669.990.252	12,00	578.055.220	100,00	86,28	24,00	1.064.207.832	33,33	16,72	BKAD	
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	5.313.851.811	12,00	219.901.500	12,00	584.552.930	12,00	234.009.000	100,00	40,03	24,00	453.910.500	33,33	8,54	BKAD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	73,67						
Predikat Kinerja												(S)	(S)						
36	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	98,00	8.500.278.690	154,69	283.806.913	94,00	817.122.900	100,00	463.665.933	106,38	56,74	70,00	747.472.846	71,43	8,79	BKAD	
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	360,00	3.785.595.339	107,00	109.604.913	60,00	373.972.900	112,00	259.936.433	186,67	69,51	219,00	369.541.346	60,83	9,76	BKAD	
38	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	525,00	156.312.000	-	-	75,00	22.000.000	24,00	14.060.000	32,00	63,91	24,00	14.060.000	4,57	8,99	BKAD	
39	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	225,00	1.934.427.080	12,00	53.340.000	25,00	221.150.000	100,00	109.656.000	400,00	49,58	112,00	162.996.000	49,78	8,43	BKAD	
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	42,00	2.623.944.272	8,00	120.862.000	7,00	200.000.000	9,00	80.013.500	128,57	40,01	17,00	200.875.500	40,48	7,66	BKAD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												186,81	55,75						
Predikat Kinerja												(R)	(R)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												122,37	70,42						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
41	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100,00	2.074.636.779.800	100,00	92.620.145.751	85,00	234.266.794.834	92,00	115.436.321.663	108,24	49,28	92,00	180.044.979.411	92,00	8,68	BKAD	
		Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		50,00		50,00			
42	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Persentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA	%	100,00	38.745.450.050	100,00	4.850.114.000	100,00	3.859.179.000	100,00	4.028.122.914	100,00	104,38	50,00	8.878.236.914	50,00	22,91	BKAD	
		Persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		50,00		50,00			
		Persentase skpd yang melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan anggaran	%	100,00		100,00		94,00		100,00		106,38		50,00		50,00			
43	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2,00	3.038.266.500	2,00	354.510.000	2,00	244.800.000	2,00	244.800.000	100,00	100,00	2,00	599.310.000	100,00	19,73	BKAD	
44	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2,00	3.041.334.000	2,00	344.100.000	2,00	250.000.000	2,00	244.800.000	100,00	97,92	2,00	588.900.000	100,00	19,36	BKAD	
45	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	36,00	2.466.790.000	35,00	340.000.000	36,00	186.810.000	16,00	306.000.000	44,44	163,80	51,00	646.000.000	141,67	26,19	BKAD	
46	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	36,00	2.538.403.500	35,00	505.300.000	35,00	313.200.000	35,00	313.200.000	100,00	100,00	35,00	818.500.000	97,22	32,24	BKAD	
47	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	36,00	2.542.319.500	35,00	251.500.000	35,00	195.789.000	21,00	368.194.500	60,00	188,06	56,00	619.694.500	155,56	24,38	BKAD	
48	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	36,00	3.316.507.000	35,00	590.428.000	35,00	368.180.000	35,00	377.100.000	100,00	102,42	35,00	967.528.000	97,22	29,17	BKAD	
49	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2,00	5.209.462.000	6,00	684.605.000	2,00	502.500.000	33,00	515.293.765	1.650,00	102,55	-	1.199.898.765	-	23,03	BKAD	
50	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	6,00	8.103.945.000	24,00	1.214.186.000	12,00	634.200.000	8,00	676.087.879	66,67	106,60	3,00	1.890.273.879	50,00	23,33	BKAD	
51	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	36,00	3.415.529.950	4,00	357.175.000	4,00	421.232.500	1,00	380.483.000	25,00	90,33	5,00	737.658.000	13,89	21,60	BKAD	
52	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	25,00	1.555.300.800	7,00	28.045.000	25,00	204.800.000	1,00	167.554.915	4,00	81,81	8,00	195.599.915	32,00	12,58	BKAD	
53	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	29,00	1.616.500.800	22,00	180.265.000	29,00	110.097.500	2,00	75.228.855	6,90	68,33	24,00	255.493.855	82,76	15,81	BKAD	
54	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	20,00	1.195.617.000	-	-	20,00	100.000.000	36,00	90.980.000	180,00	90,98	36,00	90.980.000	180,00	7,61	BKAD	
55	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	72,00	705.474.000	-	-	35,00	327.570.000	35,00	268.400.000	100,00	81,94	35,00	268.400.000	48,61	38,05	BKAD	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												195,15	105,75						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
56	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan	%	98,00	14.627.072.250	115,27	1.071.630.464	85,00	893.200.000	100,00	800.419.650	117,65	89,61	215,27	1.872.050.114	219,66	12,80	BKAD	
57	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12,00	3.317.760.500	12,00	525.906.977	12,00	500.000.000	12,00	473.331.500	100,00	94,67	3,00	999.238.477	25,00	30,12	BKAD	
58	Pembiayaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	35,00	978.843.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKAD	
59	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	35,00	1.388.333.000	35,00	102.664.500	35,00	232.800.000	35,00	201.239.150	100,00	86,44	35,00	303.903.650	100,00	21,89	BKAD	
60	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	8,00	2.433.185.500	35,00	332.938.487	-	-	-	-	-	-	-	332.938.487	-	13,68	BKAD	
61	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	1,00	1.827.176.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKAD	
62	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12,00	1.305.126.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKAD	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.			
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja			%		
63	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	4.700,00	1.574.642.000	7.570,00	110.120.500	4.700,00	160.400.000	5.697,00	125.849.000	121,21	78,46	1.575,00	235.969.500	33,51	14,99	BKAD			
64	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	85,00	1.802.004.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKAD			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												80,30	64,89								
Predikat Kinerja												(T)	(R)								
65	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Peresentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akrual)	%	100,00	16.865.766.000	80,00	2.008.512.900	80,00	2.312.100.000	92,00	2.021.188.400	115,00	87,42	92,00	4.029.701.300	92,00	23,89	BKAD			
66	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	9,00	1.098.086.000	-	211.000.000	12,00	146.000.000	12,00	252.500.000	100,00	172,95	12,00	463.500.000	133,33	42,21	BKAD			
67	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	35,00	1.552.472.500	12,00	218.529.000	12,00	253.500.000	12,00	41.030.500	100,00	16,19	24,00	259.559.500	68,57	16,72	BKAD			
68	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	1,00	2.223.368.000	1,00	184.000.000	12,00	159.200.000	10,00	432.679.000	83,33	271,78	11,00	616.679.000	1.100,00	27,74	BKAD			
69	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	1,00	6.170.041.000	1,00	890.852.400	12,00	1.061.000.000	9,00	825.902.500	75,00	77,84	10,00	1.716.754.900	1.000,00	27,82	BKAD			
70	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	3.883.254.000	2,00	504.131.500	12,00	692.400.000	12,00	469.076.400	100,00	67,75	-	973.207.900	-	25,06	BKAD			
71	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	85,00	1.938.544.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	BKAD			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												91,67	121,30								
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)								
72	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan	%	98,00	2.000.919.690.000	49,37	83.595.457.137	87,00	226.771.915.834	58,31	108.223.851.699	67,02	47,72	107,68	191.819.308.836	109,88	9,59	BKAD			
73	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	72,00	1.776.138.166.000	12,00	78.344.513.138	12,00	#####	12,00	104.153.067.113	100,00	50,23	24,00	182.497.580.251	33,33	10,27	BKAD			
74	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1,00	42.500.000.000	1,00	4.618.091.483	1,00	1.838.000.000	-	-	-	-	1,00	4.618.091.483	100,00	10,87	BKAD			
75	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	558,00	182.281.524.000	-	632.852.516	93,00	17.561.937.180	93,00	4.070.784.586	100,00	23,18	93,00	4.703.637.102	16,67	2,58	BKAD			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												66,67	24,47								
Predikat Kinerja												(S)	(SR)								
76	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan	Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik	%	100,00	3.478.801.500	50,00	1.094.431.250	100,00	430.400.000	100,00	362.739.000	100,00	84,28	150,00	1.457.170.250	150,00	41,89	BKAD			
77	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	12,00	684.084.000	-	-	12,00	96.000.000	12,00	57.096.500	100,00	59,48	12,00	57.096.500	100,00	8,35	BKAD			
78	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1,00	2.794.717.500	1,00	1.094.431.250	12,00	334.400.000	20,00	305.642.500	166,67	91,40	21,00	1.400.073.750	2.100,00	50,10	BKAD			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												133,33	75,44								
Predikat Kinerja												(ST)	(T)								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,36	82,68								
Predikat Kinerja												(ST)	(T)								
79	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel oleh Perangkat Daerah	%	100,00	87.932.178.424	85,00	7.661.951.950	90,00	5.181.598.000	100,00	3.235.733.224	111,11	62,45	25,00	10.897.685.174	25,00	12,39	BKAD			
80	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terinventarisir	%	100,00	87.932.178.424	-	7.661.951.950	95,00	5.181.598.000	100,01	3.235.733.224	105,27	62,45	100,01	10.897.685.174	100,01	12,39	BKAD			
		Presentase PD yang melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sesuai standar	%	100,00		100,00		100,00		100,00		25,00		-	25,00						
81	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	6,00	67.796.635.000	1,00	6.962.141.080	1,00	37.559.000	1,00	15.446.000	100,00	41,12	2,00	6.977.587.080	33,33	10,29	BKAD			
82	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1,00	353.832.000	1,00	25.000.000	1,00	50.000.000	1,00	45.335.000	100,00	90,67	2,00	70.335.000	200,00	19,88	BKAD			
83	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	737.998.910	1,00	88.644.000	1,00	237.039.000	1,00	58.359.234	100,00	24,62	2,00	147.003.234	200,00	19,92	BKAD			

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%			
84	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	3,00	1.744.728.178	-	17.604.000	1,00	1.130.000.000	1,00	1.012.642.208	100,00	89,61	1,00	1.030.246.208	33,33	59,05	BKAD		
85	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	8,00	5.247.928.970	9,00	353.533.670	12,00	595.000.000	9,00	478.136.820	75,00	80,36	3,00	831.670.490	37,50	15,85	BKAD		
86	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	72,00	7.681.551.516	58,00	22.719.700	12,00	2.003.000.000	12,00	1.034.871.616	100,00	51,67	70,00	1.057.591.316	97,22	13,77	BKAD		
87	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	35,00	2.298.680.000	37,00	128.574.500	12,00	629.000.000	12,00	273.444.460	100,00	43,47	35,00	402.018.960	100,00	17,49	BKAD		
88	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1,00	810.823.850	2,00	63.735.000	12,00	300.000.000	10,00	117.497.886	83,33	39,17	3,00	181.232.886	300,00	22,35	BKAD		
89	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	35,00	1.260.000.000	-	-	35,00	200.000.000	40,00	200.000.000	114,29	100,00	40,00	200.000.000	114,29	15,87	BKAD		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												96,96	62,30							
Predikat Kinerja												(ST)	(R)							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												102,64	62,45							
Predikat Kinerja												(ST)	(R)							
90	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	%	100,00	52.294.544.251	80,10	2.978.362.180	-	658.005.000	-	556.224.500	-	-	-	3.534.586.680	-	6,76	BKAD	Program telah dipindahkan ke Bapenda	
		Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	%	100,00		90,90		-		-		-				-				
		Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	%	100,00		86,13		-		-		-				-				
91	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutakhirkan	%	100,00	52.294.544.251	-	2.978.362.180	-	658.005.000	-	556.224.500	-	-	-	3.534.586.680	-	6,76	BKAD		
		persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	%	100,00		100,00		-		-		-				-				
		Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	Wajib Pajak	150,00		322,00		-		-		-				-				
		persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	%	100,00		100,00		-		-		-				-				
		Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	Dokumen	12,00		12,00		-		-		-				-				
		Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	%	100,00		90,00		-		-		-				-				
92	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1,00	3.244.119.046	1,00	296.727.750	-	15.425.000	-	12.022.500	-	-	1,00	308.750.250	100,00	9,52	BKAD		
93	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	2,00	1.136.383.844	3,00	1.438.435.743	-	585.000.000	-	487.630.000	-	-	3,00	1.926.065.743	150,00	169,49	BKAD		
94	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	650,00	3.449.064.304	150,00	21.915.000	-	-	-	-	-	-	150,00	21.915.000	23,08	0,64	BKAD		
95	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	110,00	3.892.692.300	-	36.015.400	-	-	-	-	-	-	3,00	36.015.400	2,73	0,93	BKAD		
96	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	4,00	2.857.213.988	1,00	17.820.000	-	5.780.000	-	5.780.000	-	-	1,00	23.600.000	25,00	0,83	BKAD		
97	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	100.000,00	1.611.210.864	-	27.495.000	-	-	-	-	-	-	35,00	27.495.000	0,04	1,71	BKAD		
98	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	2.986,00	5.441.381.000	736,00	94.370.137	-	-	-	7.000.000	-	-	3,00	101.370.137	0,10	1,86	BKAD		
99	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	7.000,00	1.616.614.581	20.535,00	241.050.000	-	7.000.000	-	-	-	-	20.535,00	241.050.000	293,36	-	BKAD		
100	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	8.000,00	19.743.026.591	6.865,00	193.892.500	-	11.200.000	-	10.192.000	-	-	6.865,00	204.084.500	85,81	1,03	BKAD		
101	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	3.000,00	2.748.754.858	1.950,00	129.911.900	-	-	-	-	-	-	3,00	129.911.900	0,10	4,73	BKAD		
102	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	4.200,00	1.590.384.352	6.316,00	436.865.750	-	33.600.000	-	33.600.000	-	-	6.316,00	470.465.750	150,38	29,58	BKAD		
103	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	345,00	915.886.326	-	40.240.000	-	-	-	-	-	-	35,00	40.240.000	10,14	4,39	BKAD		
104	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	60,00	3.027.807.459	7,00	3.623.000	-	-	-	-	-	-	3,00	3.623.000	5,00	0,12	BKAD		

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%			
105	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	150,00	1.020.004.739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKAD		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-							
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-							
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												105,91	50,08							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(R)							
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				81.633.312.789		8.228.750.988		12.531.748.661		8.957.389.848		71,48		17.186.140.836		0,21			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN				61.270.590.685		6.541.238.188		9.293.663.250		7.858.511.418		84,56		14.399.749.606		0,24			
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpenuhi	%	95,00	32.455.757.623	95,00	3.639.633.823	95,00	5.268.980.543	100,00	4.643.450.407	105,26	88,13	97,50	8.283.084.230	1,03	0,26	BKPSDM		
		Persentase peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan	%	95,00		95,00		100,00		105,26		97,50		1,03						
		Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	%	95,00		95,00		100,00		105,26		97,50		1,03						
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	%	95,00	821.771.510	95,00	129.838.000	95,00	102.100.000	100,00	67.758.800	105,26	66,37	97,50	197.596.800	1,03	0,24	BKPSDM		
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	23,00	248.678.500	2,00	22.138.000	4,00	35.000.000	4,00	27.440.600	100,00	78,40	6,00	49.578.600	0,26	0,20	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	72,00	551.725.160	12,00	107.700.000	12,00	64.600.000	12,00	39.690.000	100,00	61,44	24,00	147.390.000	0,33	0,27	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24,00	21.367.850	-	-	4,00	2.500.000	4,00	628.200	100,00	25,13	4,00	628.200	0,17	0,03	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	54,99							
Predikat Kinerja												(ST)	(R)							
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	%	95,00	24.316.680.817	95,00	2.809.889.180	95,00	3.603.677.452	100,00	3.376.487.372	105,26	93,70	97,50	6.186.376.552	1,03	0,25	BKPSDM		
9	Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	178,00	24.046.581.917	28,00	2.788.347.180	30,00	3.571.812.452	28,00	3.354.465.372	93,33	93,91	56,00	6.142.812.552	0,31	0,26	BKPSDM	Anggaran besar bertujuan untuk mengakomodir bilamana ada pegawai yang akan di mutasikan ke BKPSDM	
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	227.363.200	2,00	21.542.000	2,00	31.790.000	2,00	21.947.000	100,00	69,04	4,00	43.489.000	0,33	0,19	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00	21.367.850	-	-	1,00	75.000	1,00	75.000	100,00	100,00	1,00	75.000	0,20	0,00	BKPSDM		
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	65,00	21.367.850	-	-	13,00	-	13,00	-	100,00		13,00	-	0,20	-	BKPSDM	Anggaran terdampak oleh refocusing	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												98,33	87,65							
Predikat Kinerja												(ST)	(T)							
13	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	%	100,00	242.625.950	100,00	21.000.000	100,00	24.600.000	100,00	18.558.000	100,00	75,44	100,00	39.558.000	1,00	0,16	BKPSDM		
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	35,00	15.262.750	-	-	13,00	2.000.000	13,00	108.000	100,00	5,40	13,00	108.000	0,37	0,01	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan	
15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72,00	227.363.200	12,00	21.000.000	12,00	22.600.000	12,00	18.450.000	100,00	81,64	24,00	39.450.000	0,33	0,17	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	43,52							
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)							
16	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	%	95,00	1.711.409.496	95,00	222.838.604	95,00	481.404.000	100,00	423.123.595	105,26	87,89	97,50	645.962.199	1,03	0,38	BKPSDM		
17	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	6,00	162.848.892	1,00	17.400.000	1,00	17.400.000	1,00	15.300.000	100,00	87,93	1,00	32.700.000	0,17	0,20	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan	
18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	582,00	1.548.560.604	30,00	205.438.604	72,00	464.004.000	72,00	407.823.595	100,00	87,89	70,00	613.262.199	0,12	0,40	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	87,91							
Predikat Kinerja												(ST)	(T)							
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang Disediakan	%	95,00	2.044.187.571	95,00	183.957.669	95,00	447.606.848	100,00	331.737.893	105,26	74,11	97,50	515.695.562	1,03	0,25	BKPSDM		
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	90,00	63.950.383	15,00	2.633.000	15,00	8.995.418	15,00	3.885.000	100,00	43,19	30,00	6.518.000	0,33	0,10	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan	
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	514.735.346	1,00	86.026.830	1,00	76.618.683	1,00	76.109.514	100,00	99,34	2,00	162.136.344	0,33	0,31	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan	

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6,00	81.760.589	1,00	3.989.000	1,00	8.998.906	1,00	5.509.837	100,00	61,23	2,00	9.498.837	0,33	0,12	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6,00	244.454.388	1,00	16.410.000	1,00	34.999.841	1,00	25.477.300	100,00	72,79	2,00	41.887.300	0,33	0,17	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	102,00	150.272.865	17,00	18.425.000	17,00	20.700.000	17,00	20.700.000	100,00	100,00	34,00	39.125.000	0,33	0,26	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72,00	989.014.000	12,00	56.473.839	12,00	297.294.000	12,00	200.056.242	100,00	67,29	24,00	256.530.081	0,33	0,26	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	73,97						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
26	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	%	100,00	852.358.026	100,00	70.000.000	100,00	275.709.467	14,00	101.406.350	14,00	36,78	57,00	171.406.350	0,57	0,20	BKPSDM	
27	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
28	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
29	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	17,00	154.667.793	-	-	3,00	23.985.778	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	Anggaran berdampak refocusing
30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	52,00	139.282.233	-	-	10,00	171.723.689	1,00	21.406.350	10,00	12,47	0,50	21.406.350	0,01	0,15	BKPSDM	Anggaran berdampak refocusing
31	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6,00	558.408.000	1,00	70.000.000	1,00	80.000.000	1,00	80.000.000	100,00	100,00	1,00	150.000.000	0,17	0,27	BKPSDM	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												36,67	37,49						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
32	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	%	95,00	1.300.677.918	95,00	144.921.920	95,00	197.797.864	100,00	184.516.876	105,26	93,29	97,50	329.438.796	1,03	0,25	BKPSDM	
33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6,00	35.525.500	1,00	3.652.000	1,00	5.000.000	1,00	4.278.000	100,00	85,56	1,00	7.930.000	0,17	0,22	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
34	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72,00	462.303.728	12,00	52.348.120	12,00	77.998.864	12,00	77.438.935	100,00	99,28	21,00	129.787.055	0,29	0,28	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	802.848.690	12,00	88.921.800	12,00	114.799.000	12,00	102.799.941	100,00	89,55	21,00	191.721.741	0,29	0,24	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	91,46						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
36	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD yang dilaksanakan	%	95,00	1.166.046.335	95,00	57.188.450	95,00	136.084.912	100,00	139.861.521	105,26	102,78	97,50	197.049.971	1,03	0,17	BKPSDM	
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	36,00	1.009.734.135	6,00	53.853.450	6,00	125.085.912	6,00	132.011.521	100,00	105,54	12,00	185.864.971	0,33	0,18	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2.027,00	85.261.200	330,00	3.000.000	332,00	6.000.000	332,00	3.130.000	100,00	52,17	662,00	6.130.000	0,33	0,07	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
39	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11,00	71.051.000	1,00	335.000	1,00	4.999.000	1,00	4.720.000	100,00	94,42	2,00	5.055.000	0,18	0,07	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	84,04						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												93,20	78,79						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
40	Program Kepegawaian Daerah	Persentase kegiatan layanan kepegawaian ASN yang terlaksana	%	95,00	28.814.833.062	90,00	2.901.604.365	92,00	4.024.682.707	100,00	3.215.061.011	108,70	79,88	95,00	6.116.665.376	1,00	0,21	BKPSDM	
41	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelayanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	%	100,00	10.345.058.475	100,00	893.513.343	100,00	658.823.318	100,00	690.196.206	100,00	104,76	100,00	1.583.709.549	1,00	0,15	BKPSDM	
42	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	12,00	9.125.817.244	2,00	816.281.000	2,00	611.609.818	2,00	651.254.196	100,00	106,48	2,00	1.467.535.196	0,17	0,16	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
43	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	6,00	323.635.500	1,00	6.658.600	1,00	3.560.000	1,00	3.213.000	100,00	90,25	1,00	9.871.600	0,17	0,03	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
44	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	6,00	107.125.838	1,00	4.084.000	1,00	4.720.000	1,00	3.102.000	100,00	65,72	1,00	7.186.000	0,17	0,07	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
45	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	14,00	788.479.892	1,00	66.489.743	1,00	38.933.500	1,00	32.627.010	100,00	83,80	1,00	99.116.753	0,07	0,13	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	86,56						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
46	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelayanan Mutasi dan Promosi ASN	%	95,00	4.885.809.784	83,00	940.443.422	85,00	760.098.500	100,00	583.049.453	117,65	76,71	91,50	1.523.492.875	0,96	0,31	BKPSDM	
47	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	6,00	229.098.500	1,00	8.300.000	-	-	1,00	-	-	-	1,00	8.300.000	0,17	0,04	BKPSDM	Anggaran berdampak refocusing
48	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	12,00	1.446.357.892	2,00	176.913.600	2,00	290.525.000	2,00	272.130.500	100,00	93,67	2,00	449.044.100	0,17	0,31	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
49	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Hasil Promosi ASN	Dokumen	11,00	3.210.353.392	1,00	755.229.822	2,00	469.573.500	2,00	450.458.353	100,00	95,93	1,50	1.205.688.175	0,14	0,38	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	94,80						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
50	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang terealisasi	%	95,00	10.700.060.475	87,00	770.670.150	89,00	994.637.389	100,00	819.888.960	112,36	82,43	93,50	1.590.559.110	0,98	0,15	BKPSDM	
51	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	65,00	8.988.586.000	8,00	407.403.800	8,00	708.701.000	8,00	552.339.800	100,00	77,94	8,00	959.743.600	0,12	0,11	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
52	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	6,00	1.711.474.475	1,00	363.266.350	1,00	285.936.389	1,00	267.549.160	100,00	93,57	1,00	630.815.510	0,17	0,37	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	85,75						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
53	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelayanan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	%	96,00	2.883.904.328	87,00	296.977.450	89,00	1.611.123.500	100,00	461.077.441	112,36	28,62	93,50	758.054.891	0,97	0,26	BKPSDM	
54	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	6,00	861.422.500	1,00	33.286.000	1,00	1.125.949.500	1,00	520.198.762	100,00	46,20	1,00	553.484.762	0,17	0,64	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
55	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	690,00	1.019.369.328	90,00	204.397.650	100,00	260.474.000	100,00	230.592.750	100,00	88,53	95,00	434.990.400	0,14	0,43	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
56	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	6,00	1.003.112.500	1,00	59.293.800	1,00	224.700.000	1,00	231.595.480	100,00	103,07	1,00	290.889.280	0,17	0,29	BKPSDM	Realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	79,27						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												110,59	73,13						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												106,98	84,01						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(T)						
57	Bidang Pendidikan dan Pelatihan				20.362.722.104		1.687.512.800		3.238.085.411		3.060.630.100		94,52		4.748.142.900		0,23	BKPSDM	
58	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan sertifikat dalam pengembangan kompetensi jabatan fungsional kepemimpinan, manajerial dan prajabatan	%	93,00	20.362.722.104	100,00	1.687.512.800	85,00	3.238.085.411	66,00	3.060.630.100	77,65	94,52	83,00	4.748.142.900	0,89	0,23	BKPSDM	
59	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan yang dilaksanakan	%	93,00	20.362.722.104	83,00	1.687.512.800	85,00	3.238.085.411	66,00	3.060.630.100	77,65	94,52	74,50	4.748.142.900	0,80	0,23	BKPSDM	
60	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Laporan	18,00	20.362.722.104	3,00	1.687.512.800	3,00	3.238.085.411	3,00	3.060.630.100	100,00	94,52	3,00	4.748.142.900	0,17	0,23	BKPSDM	realisasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	94,52						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												77,65	94,52						
Predikat Kinerja												(T)	(ST)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												77,65	94,52						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(T)	(ST)						
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH				199.542.465.251		9.989.465.021		17.409.754.303		11.602.980.176		66,65						
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen Persen Persen Persen	95,00 100,00 96,00 97,00	147.247.921.000	- 100,00 100,00 100,00	7.011.102.841	91,00 97,00 85,00 92,00	10.043.769.811	95,00 95,00 80,00 95,00	7.648.617.642	104,40 97,94 94,12 103,26	76,15	85,00 190,00 170,00 165,00	54.845.750	89,47 190,00 177,08 170,10	0,04	Bapenda	
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Persen Persen Persen	98,00 98,00 98,00	1.637.512.365	100,00 100,00 100,00	46.145.750	92,00 92,00 92,00	75.000.000	95,00 95,00 90,00	25.330.000	103,26 103,26 97,83	33,77	195,00 195,00 190,00	71.475.750	198,98 198,98 193,88	4,36	Bapenda	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4,00	767.770.019	4,00	30.156.250	4,00	63.000.000	4,00	25.330.000	100,00	40,21	8,00	55.486.250	200,00	7,23	Bapenda	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,00	869.742.346	4,00	15.989.500	4,00	12.000.000	-	-	-	-	4,00	15.989.500	100,00	1,84	Bapenda	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												50,00	20,10						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	Persen	99,00	99.591.577.983	100,00	5.698.808.066	82,00	4.267.683.131	82,96	3.351.421.744	101,17	78,53	182,96	9.050.229.810	184,81	9,09	Bapenda	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	420,00	98.064.417.433	40,00	5.676.208.316	20,00	4.179.683.131	18,00	3.331.889.744	90,00	79,72	58,00	9.008.098.060	13,81	9,19	Bapenda	
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	30,00	859.499.019	5,00	22.599.750	5,00	63.000.000	5,00	19.532.000	100,00	31,00	10,00	42.131.750	33,33	4,90	Bapenda	

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Laporan	5,00	357.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Bapenda	Bapenda baru terbentuk di tahun ini sehingga belum adanya laporan keuangan akhir tahun
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan aparatur Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18,00	172.186.719	-	-	1,00	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapenda	
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	6,00	138.474.813	-	-	1,00	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapenda	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												47,50 (SR)	27,68 (SR)						
Predikat Kinerja																			
12	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Persen	90,00	844.079.019	90,00	19.319.500	74,00	63.900.000	83,00	18.474.500	112,16	28,91	173,00	37.794.000	192,22	4,48	Bapenda	
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	18,00	844.079.019	3,00	19.319.500	3,00	63.900.000	3,00	18.474.500	100,00	28,91	6,00	37.794.000	33,33	4,48	Bapenda	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00 (ST)	28,91 (SR)						
Predikat Kinerja																			
14	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	Persen	10,00	156.300.000					-	-							Bapenda	
15	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	22,00	156.300.000					-	-							Bapenda	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												- (SR)	- (SR)						
Predikat Kinerja																			
16	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	Persen	99,00	2.935.556.210	100,00	31.790.000	93,00	228.991.300	90,57	176.258.800	97,39	76,97	190,57	208.048.800	192,50	7,09	Bapenda	
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1.080,00	2.062.022.559	-	-	2,00	193.736.300	2,00	159.540.000	100,00	82,35	2,00	159.540.000	0,19	7,74	Bapenda	
18	Koordinasi dan Pelaksaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	30,00	873.533.651	5,00	31.790.000	5,00	35.255.000	4,00	16.718.800	80,00	47,42	9,00	48.508.800	30,00	5,55	Bapenda	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												90,00 (T)	64,89 (R)						
Predikat Kinerja																			
19	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	Persen	99,00	14.589.909.478	175,00	224.578.500	90,00	1.529.288.371	90,42	1.389.884.268	100,47	90,88	265,42	1.614.462.768	268,10	11,07	Bapenda	
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36,00	500.775.969	6,00	1.196.500	1,00	210.915.000	1,00	181.158.500	100,00	85,89	7,00	182.355.000	19,44	36,41	Bapenda	
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	690,00	5.950.331.675	68,00	156.180.000	1,00	932.283.171	1,00	785.091.440	100,00	84,21	69,00	941.271.440	10,00	15,82	Bapenda	
22	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30,00	1.358.218.821	5,00	22.685.000	1,00	228.146.200	1,00	222.832.000	100,00	97,67	6,00	245.517.000	20,00	18,08	Bapenda	
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	32,00	161.789.061	4,00	5.870.000	4,00	11.280.000	1,00	300.000	25,00	2,66	5,00	6.170.000	15,63	3,81	Bapenda	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	800,00	6.618.793.953	48,00	38.647.000	100,00	146.664.000	98,00	200.502.328	98,00	136,71	146,00	239.149.328	18,25	3,61	Bapenda	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												84,60 (T)	81,43 (T)						
Predikat Kinerja																			
25	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Persen	36,00	7.233.808.327	33,33	74.050.000	25,00	354.384.000	30,00	276.782.250	120,00	78,10	63,33	276.782.250	175,92	3,83	Bapenda	
26	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	25,00	1.285.000.000	-	-	6,00	195.000.000	6,00	178.540.000	100,00	91,56	6,00	178.540.000	24,00	13,89	Bapenda	
27	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	10,00	465.763.697													Bapenda	
28	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	111,00	1.808.018.631	-	-	1,00	159.384.000	1,00	98.242.250	100,00	61,64	1,00	98.242.250	0,90	5,43	Bapenda	
29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	217,00	1.378.137.000													Bapenda	
30	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	18,00	2.296.889.000													Bapenda	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00 (ST)	76,60 (T)						
Predikat Kinerja																			
31	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Persen	99,00	11.758.898.928	69,00	706.654.112	87,00	2.790.023.077	90,00	1.795.775.351	103,45	64,36	159,00	2.502.429.463	160,61	21,28	Bapenda	
32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	7.580,00	80.874.288	80,00	600.000	1,00	6.000.000	1,00	7.100.000	100,00	118,33	81,00	7.700.000	1,07	9,52	Bapenda	
33	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24,00	6.364.172.830	4,00	486.152.612	4,00	408.370.107	4,00	207.914.245	100,00	50,91	8,00	694.066.857	33,33	10,91	Bapenda	
34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	71,00	5.313.851.811	11,00	219.901.500	4,00	2.375.652.970	4,00	1.580.761.106	100,00	66,54	15,00	1.800.662.606	21,13	33,89	Bapenda	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00 (ST)	78,60 (T)						
Predikat Kinerja																			
35	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	Persen	98,00	8.500.278.690	154,69	283.806.913	92,00	734.499.932	16,67	614.690.729	18,12	83,69	171,36	898.497.642	174,85	10,57	Bapenda	
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	435,00	3.785.595.339	107,00	109.604.913	25,00	251.379.932	25,00	176.575.028	100,00	70,24	132,00	286.179.941	30,34	7,56	Bapenda	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
37	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dikelola	Unit	111,00	156.312.000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	Bapenda	Rasionalisasi Anggaran
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	42,00	1.934.427.080	12,00	53.340.000	40,00	151.500.000	40,00	125.025.000	100,00	82,52	52,00	178.365.000	123,81	9,22	Bapenda	
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	42,00	2.623.944.272	8,00	120.862.000	1,00	331.620.000	1,00	313.090.701	100,00	94,41	9,00	433.952.701	21,43	16,54	Bapenda	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	82,39						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												94,28	66,90						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
40	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	Persen	100,00	52.294.544.251	80,10	2.978.362.180	100,00	7.365.984.492	97,00	3.954.362.534	97,00	53,68	177,10	6.932.724.714	177,10	13,26	Bapenda	
		2. Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	Persen	100,00		90,90		82,00		82,00		172,90		172,90					
		3. Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	Persen	100,00		86,13		87,40		87,40		173,53		173,53					
41	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase objek pajak PBB - BPHTB yang termutakhirkan	Persen	20,00	52.294.544.251	-	2.978.362.180	20,00	7.365.984.492	20,00	3.954.362.534	100,00	53,68	20,00	6.932.724.714	100,00	13,26	Bapenda	
		2. persentase pengaduan wajib pajak PBB BPHTB yang terlayani	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		200,00		200,00					
		3. Jumlah wajib pajak baru sektor pajak daerah lainnya yang terdaftar	Wajib Pajak	150,00		322,00		485,00		323,33		807,00		538,00					
		4. persentase pengaduan wajib pajak Daerah lainnya yang terlayani	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		200,00		200,00					
		5. Jumlah dokumen evaluasi pengelolaan pendapatan	Dokumen	12,00		12,00		12,00		100,00		24,00		200,00					
		6. Persentase Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak sesuai aturan yang berlaku	Persen	80,00		90,00		74,00		80,00		108,11		170,00		212,50			
42	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	5,00	3.244.119.046	3,00	296.727.750	3,00	659.709.000	3,00	316.523.450	100,00	47,98	6,00	613.251.200	120,00	18,90	Bapenda	
43	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	60,00	1.136.383.844	3,00	1.438.435.743	1,00	170.708.000	1,00	67.789.000	100,00	39,71	4,00	1.506.224.743	6,67	132,55	Bapenda	
44	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	25,00	3.449.064.304	150,00	21.915.000	12,00	649.360.000	12,00	822.531.150	100,00	126,67	162,00	844.446.150	648,00	24,48	Bapenda	
45	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	10,00	3.892.692.300	-	36.015.400	5,00	616.780.000	5,00	408.982.400	100,00	66,31	5,00	444.997.800	50,00	11,43	Bapenda	
46	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	15,00	2.857.213.988	1,00	17.820.000	2,00	1.562.105.000	2,00	209.370.100	100,00	13,40	3,00	227.190.100	20,00	7,95	Bapenda	
47	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	100.000,00	1.611.210.864	-	27.495.000	3,00	232.400.000	-	-	-	-	-	27.495.000	-	1,71	Bapenda	Rasionalisasi Anggaran
48	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	10,00	5.441.381.000	-	94.370.137	#####	227.428.000	55,00	339.980.250	0,28	149,49	55,00	434.350.387	550,00	7,98	Bapenda	
49	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	30.000,00	1.616.614.581	-	241.050.000	2,00	214.803.000	2,00	44.013.000	100,00	20,49	2,00	285.063.000	0,01	17,63	Bapenda	
50	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	6.000,00	19.743.026.591	-	193.892.500	6.000,00	928.499.100	5,00	674.210.600	0,08	72,61	5,00	868.103.100	0,08	4,40	Bapenda	Masih menggunakan target renja dari BKAD
51	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	21.000,00	2.748.754.858	-	129.911.900	1.500,00	421.858.000	1,00	178.439.800	0,07	42,30	1,00	308.351.700	0,00	11,22	Bapenda	Masih menggunakan target renja dari BKAD
52	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1.225,00	1.590.384.352	-	436.865.750	4.200,00	1.053.005.392	823,00	517.370.100	19,60	49,13	823,00	954.235.850	67,18	60,00	Bapenda	
53	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	300,00	915.886.326	-	40.240.000	245,00	22.000.000	2,00	1.365.000	0,82	6,20	2,00	41.605.000	0,67	4,54	Bapenda	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah sudah termasuk di sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
54	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	100,00	3.027.807.459	-	3.623.000	60,00	552.902.000	44,00	373.787.684	73,33	67,60	44,00	377.410.684	44,00	12,46	Bapenda	Pada tahun 2022 pemeriksaan hotel dan restoran dilaksanakan di 44 Wajib pajak dengan rincian 2 Objek Pajak Hiburan, 1 Objek Pajak Restoran, dan 41 Objek Pajak Hotel
55	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	60,00	1.020.004.739	-	-	20,00	54.427.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Bapenda	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												49,58	50,14						
Predikat Kinerja												(SR)	(R)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												138,57	53,68						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												94,36	64,92						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(R)						
1	KECAMATAN PADAHERANG			100,00	16.689.754.510	88,00	1.248.828.221	100,00	1.599.997.478		1.297.280.581		81,08	88,00	2.546.108.802	88,00	15,26		
2	URUSAN KEWILAYAHAN			100,00	16.689.754.510	88,00	1.248.828.221	100,00	1.599.997.478		1.297.280.581		81,08	88,00	2.546.108.802	88,00	15,26		

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00	14.647.589.358	91,00	1.096.828.221	100,00	1.599.997.478	81,08	1.297.280.581	81,08	81,08	86,04	2.394.108.802	86,04	16,34		
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	235.491.128	92,00	18.260.000	100,00	22.700.000	88,77	20.150.000	88,77	88,77	90,38	38.410.000	90,38	16,31		
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4,00	204.813.000	4,00	18.260.000	4,00	22.700.000	4,00	20.150.000	75,00	88,77	4,00	38.410.000	100,00	18,75	Kec. Padaherang	Realisasi anggaran tidak sesuai target karena disesuaikan dengan kebutuhan
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	6.105.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	6.105.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
8	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	6.105.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
9	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	6.105.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3,00	6.257.728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												75,00	88,77						
Predikat Kinerja												(S)	(T)						
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100,00	10.695.051.470	90,00	894.056.041	100,00	1.313.697.478	78,20	1.027.249.541	78,20	78,20	84,10	1.921.305.582	84,10	17,96		
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	11,00	10.477.753.270	11,00	873.821.041	11,00	1.290.997.478	11,00	1.007.099.541	100,00	78,01	11,00	1.880.920.582	100,00	17,95	Kec. Padaherang	
13	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6,00	205.088.000	3,00	20.235.000	3,00	22.700.000	3,00	20.150.000	100,00	88,77	6,00	40.385.000	100,00	19,69	Kec. Padaherang	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	6.105.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5,00	6.105.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	83,39						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
16	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100,00	217.488.200	26,00	20.262.500	26,00	22.700.000	24,00	20.150.000	92,31	88,77	50,00	40.412.500	50,00	18,58		
17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milim Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	12.210.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	205.278.000	1,00	20.262.500	12,00	22.700.000	12,00	20.150.000	100,00	88,77	13,00	40.412.500	108,33	19,69	Kec. Padaherang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	88,77						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
19	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	642.704.251	100,00	11.950.000	100,00	13.600.000	80,00	12.100.000	80,00	88,97	90,00	24.050.000	90,00	3,74		
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	25,00	57.017.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
21	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	17,00	255.650.909	8,00	11.950.000	12,00	13.600.000	12,00	12.100.000	100,00	88,97	20,00	24.050.000	117,65	9,41	Kec. Padaherang	
22	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	11,00	19.780.524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
23	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11,00	310.255.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	88,97						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
24	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	483.351.797	99,00	39.693.000	100,00	38.322.100	104,73	40.136.000	104,73	104,73	101,87	79.829.000	101,87	16,52		
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	51.137.939	2,00	20.500.000	2,00	4.815.000	2,00	7.015.000	100,00	145,69	4,00	27.515.000	100,00	53,81	Kec. Padaherang	
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60,00	132.246.980	38,00	11.366.000	38,00	16.087.100	38,00	17.375.000	100,00	108,01	38,00	28.741.000	63,33	21,73	Kec. Padaherang	

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	66.288.302	2,00	4.677.000	2,00	8.500.000	2,00	9.071.000	100,00	106,72	4,00	13.748.000	100,00	20,74	Kec. Padaherang	
28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2,00	38.315.376	1,00	3.150.000	1,00	3.600.000	1,00	3.450.000	100,00	95,83	2,00	6.600.000	100,00	17,23	Kec. Padaherang	
29	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5,00	12.210.200	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90,00	183.153.000	-	-	90,00	5.320.000	56,00	3.225.000	62,22	60,62	56,00	3.225.000	62,22	1,76	Kec. Padaherang	Realisasi anggaran tidak sesuai target karena disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												92,44	103,37						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
31	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100,00	689.520.563	-	-	-	-	2,00	15.000.000			2,00	15.000.000	2,00	2,18		
32	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2,00	225.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
33	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8,00	402.969.563	-	-	-	-	2,00	15.000.000			2,00	15.000.000	25,00	3,72	Kec. Padaherang	Terdapat pengalihan sub kegiatan, sehingga sub kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Renja/RKPD
34	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	61.051.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
35	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	1.288.771.882	96,00	105.194.680	100,00	155.009.571	79,89	123.831.140	79,89	79,89	87,94	229.025.820	87,94	17,77		
36	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	240,00	12.088.098	-	-	240,00	600.000	240,00	600.000	100,00	100,00	240,00	600.000	100,00	4,96	Kec. Padaherang	
37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2,00	241.478.601	2,00	48.322.180	2,00	50.100.000	2,00	26.956.140	100,00	53,80	2,00	75.278.320	100,00	31,17	Kec. Padaherang	
38	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00	1.035.205.183	12,00	56.872.500	60,00	104.309.571	9,00	96.275.000	15,00	92,30	21,00	153.147.500	35,00	14,79	Kec. Padaherang	Realisasi anggaran tidak sesuai target karena disesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												71,67	82,03						
Predikat Kinerja												(S)	(T)						
39	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100,00	395.210.068	100,00	7.412.000	100,00	33.968.329	113,82	38.663.900	113,82	113,82	106,91	46.075.900	106,91	11,66		
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00	283.978.603	6,00	883.000	6,00	30.218.329	8,00	31.163.900	133,33	103,13	7,00	32.046.900	116,67	11,28	Kec. Padaherang	
41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14,00	83.334.615	-	-	14,00	3.750.000	11,00	7.500.000	78,57	200,00	11,00	7.500.000	78,57	9,00	Kec. Padaherang	Realisasi anggaran tidak sesuai target karena disesuaikan dengan kebutuhan
42	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00	27.896.850	2,00	6.529.000	-	-	-	-			2,00	6.529.000	40,00	23,40	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												105,95	151,56						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												91,10	91,88						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
43	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	1.450.346.496	52,00	152.000.000	-	-	-	-			52,00	152.000.000	52,00	10,48		
44	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100,00	1.450.346.496	52,00	152.000.000	-	-	-	-			52,00	152.000.000	52,00	10,48		
45	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00	119.415.756	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
46	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	11,00	1.330.930.740	11,00	152.000.000	-	-	-	-			11,00	152.000.000	100,00	11,42	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
47	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100,00	61.051.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
48	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100,00	61.051.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
49	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	14,00	61.051.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Padaherang	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.						
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja			%					
Predikat Kinerja																			(SR)	(SR)				
50	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	%	100,00	42.735.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
51	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum	%	100,00	42.735.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
52	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan harmonisasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	14,00	42.735.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Padaherang Anggaran dirasionalisasi						
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-											
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)											
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-											
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)											
53	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	12.210.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
54	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	%	100,00	12.210.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
55	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	10,00	12.210.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Padaherang Anggaran dirasionalisasi						
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-											
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)											
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-											
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)											
56	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	475.821.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
57	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa	%	100,00	475.821.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
58	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	14,00	54.945.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Padaherang Anggaran dirasionalisasi						
59	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	5,00	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Padaherang Anggaran dirasionalisasi						
60	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1,00	301.984.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Padaherang Anggaran dirasionalisasi						
61	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	14,00	109.891.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Padaherang Anggaran dirasionalisasi						
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-											
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)											
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-											
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												81,08	81,08											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(T)	(T)											
1	KECAMATAN MANGUNJAYA			100,00	11.945.324.116	88,00	1.331.980.289	100,00	1.737.104.670		1.639.139.083		94,36		2.971.119.372		24,87							
2	UNSUR KEWILAYAHAN			100,00	11.945.324.116	88,00	1.331.980.289	100,00	1.737.104.670		1.639.139.083		94,36		2.971.119.372		24,87							
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00	11.000.468.601	91,00	1.262.800.289	100,00	1.737.104.670	92,10	1.639.139.083	92,10	94,36	91,55	2.901.939.372	91,55	26,38	Kec. Mangunjaya						
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	267.783.595	92,00	19.825.000	100,00	22.700.000	92,51	21.000.000	92,51	92,51	92,26	40.825.000	92,26	15,25	Kec. Mangunjaya						
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4,00	221.139.386	4,00	19.680.000	4,00	22.700.000	4,00	21.000.000	100,00	92,51	4,00	40.680.000	100,00	18,40	Kec. Mangunjaya Realisasi sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu						
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	10.304.533	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya Anggaran dirasionalisasi						
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	10.304.534	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya Anggaran dirasionalisasi						
8	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	10.304.534	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya Anggaran dirasionalisasi						
9	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	10.304.534	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya Anggaran dirasionalisasi						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4,00	145.000	-	-	-	-	-	-			-				Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3,00	5.281.074	2,00	145.000	3,00	-	-	-			2,00	145.000	66,67	2,75	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	92,51						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100,00	8.095.785.005	90,00	1.074.500.584	100,00	1.410.246.538	98,70	1.391.879.783	98,70	98,70	14,00	2.466.380.367	14,00	30,46	Kec. Mangunjaya	
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	11,00	7.793.247.280	11,00	1.048.680.584	11,00	1.380.446.538	11,00	1.364.279.783	100,00	98,83	11,00	2.412.960.367	100,00	30,96	Kec. Mangunjaya	Realisasi sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
14	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	3,00	293.191.962	3,00	25.820.000	3,00	29.800.000	3,00	27.600.000	100,00	92,62	3,00	53.420.000	100,00	18,22	Kec. Mangunjaya	
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	4.842.911	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5,00	4.502.852	-	-	5,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	95,72						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
17	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100,00	195.157.534	84,00	17.840.000	100,00	24.400.000	93,03	22.700.000	93,03	93,03	88,52	40.540.000	88,52	20,77	Kec. Mangunjaya	
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	23.494.297	-	17.840.000	12,00	-	-	-			-	17.840.000	-	75,93	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	171.663.237	1,00	17.840.000	12,00	24.400.000	12,00	22.700.000	100,00	93,03	13,00	40.540.000	108,33	23,62	Kec. Mangunjaya	Realisasi sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	93,03						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	487.252.594	54,00	7.090.000	100,00	13.600.000	92,65	12.600.000	92,65	92,65	73,32	19.690.000	73,32	4,04	Kec. Mangunjaya	
21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	25,00	46.854.495	-	-	25,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
22	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	24,00	141.896.673	11,00	11.090.000	12,00	13.600.000	12,00	12.600.000	100,00	92,65	23,00	23.690.000	95,83	16,70	Kec. Mangunjaya	Realisasi sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
23	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12,00	15.951.745	-	-	12,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11,00	282.549.681	-	-	11,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	92,65						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
25	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	299.045.631	99,00	8.270.000	100,00	33.305.298	93,56	31.161.300	93,56	93,56	96,28	39.431.300	96,28	13,19	Kec. Mangunjaya	
26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	16.338.663	2,00	970.000	2,00	1.860.000	2,00	1.843.500	100,00	99,11	2,00	2.813.500	100,00	17,22	Kec. Mangunjaya	Realisasi sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	228,00	88.147.971	34,00	5.365.000	38,00	16.485.298	38,00	16.582.800	100,00	100,59	72,00	21.947.800	31,58	24,90	Kec. Mangunjaya	Realisasi sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	16.486.660	2,00	1.030.000	2,00	2.000.000	2,00	2.000.000	100,00	100,00	2,00	3.030.000	100,00	18,38	Kec. Mangunjaya	Realisasi sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00	23.933.537	1,00	600.000	1,00	3.600.000	1,00	3.600.000	100,00	100,00	1,00	4.200.000	100,00	17,55	Kec. Mangunjaya	Realisasi sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
30	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5,00	61.746.938	-	-	5,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90,00	92.391.862	4,00	305.000	90,00	9.360.000	71,00	7.135.000	78,89	76,23	75,00	7.440.000	83,33	8,05	Kec. Mangunjaya	Realisasi anggaran tidak sesuai target karena disealkan dengan kebutuhan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												95,78	95,19						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
32	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100,00	501.691.963	-	-	100,00	59.738.214	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
33	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1,00	92.145.817	-	-	1,00	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
34	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8,00	353.008.626	-	-	8,00	53.738.214	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	56.537.520	-	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
												Predikat Kinerja	(SR)	(SR)					
36	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	845.038.248	96,00	112.028.705	100,00	139.066.110	93,95	130.655.600	93,95	93,95	94,98	242.684.305	94,98	28,72	Kec. Mangunjaya	
37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	240,00	5.288.249	32,00	320.000	60,00	600.000	40,00	400.000	66,67	66,67	72,00	720.000	30,00	13,62	Kec. Mangunjaya	Realisasi anggaran tidak sesuai target karena disesuaikan dengan kebutuhan
38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2,00	168.706.339	2,00	27.214.705	2,00	30.000.000	2,00	27.152.100	100,00	90,51	2,00	54.366.805	100,00	32,23	Kec. Mangunjaya	Realisasi sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60,00	671.043.660	12,00	84.494.000	60,00	108.466.110	60,00	103.103.500	100,00	95,06	60,00	187.597.500	100,00	27,96	Kec. Mangunjaya	Realisasi sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	88,89	84,08					
												Predikat Kinerja	(T)	(T)					
40	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100,00	308.714.031	100,00	19.246.000	100,00	31.588.510	92,26	29.142.400	92,26	92,26	96,13	48.388.400	96,13	15,67	Kec. Mangunjaya	
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6,00	255.291.496	6,00	14.685.000	6,00	27.595.510	6,00	26.172.200	100,00	94,84	6,00	40.857.200	100,00	16,00	Kec. Mangunjaya	Realisasi sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
42	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14,00	34.713.601	2,00	3.885.000	8,00	3.000.000	6,00	2.970.200	75,00	99,01	8,00	6.855.200	57,14	19,75	Kec. Mangunjaya	Realisasi anggaran tidak sesuai target karena disesuaikan dengan kebutuhan
43	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00	18.708.934	2,00	676.000	5,00	993.000	-	-	-	-	2,00	676.000	40,00	3,61	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	58,33	64,62					
												Predikat Kinerja	(R)	(R)					
												Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	82,08	82,08					
												Predikat Kinerja	(T)	(T)					
44	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	640.877.415	52,00	59.180.000	100,00	-	-	-	-	-	52,00	59.180.000	52,00	9,23	Kec. Mangunjaya	
45	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100,00	628.522.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
46	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	320,00	628.522.278	16,00	59.180.000	11,00	-	-	-	-	-	16,00	59.180.000	5,00	9,42	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-					
												Predikat Kinerja	(SR)	(SR)					
47	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100,00	12.355.137	52,00	-	100,00	-	-	-	-	-	52,00	-	52,00	-	Kec. Mangunjaya	
48	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00	12.355.137	-	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-					
												Predikat Kinerja	(SR)	(SR)					
												Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-					
												Predikat Kinerja	(SR)	(SR)					
49	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100,00	15.580.939	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
50	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100,00	15.580.939	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
51	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	5,00	15.580.939	-	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-					
												Predikat Kinerja	(SR)	(SR)					
												Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-					
												Predikat Kinerja	(SR)	(SR)					
52	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	%	100,00	14.454.059	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
53	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100,00	14.454.059	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
54	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5,00	14.454.059	-	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	-	-					
												Predikat Kinerja	(SR)	(SR)					
												Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	-	-					
												Predikat Kinerja	(SR)	(SR)					
55	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	15.936.375	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	
56	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100,00	15.936.375	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
57	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	10,00	15.936.375	-	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-	-	-	-	-		
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)	-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-	-	-	-	-		
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)	-	-	-	-		
58	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	258.006.727	100,00	10.000.000	100,00	2.460.000	-	-	-	-	100,00	10.000.000	100,00	3,88	Kec. Mangunjaya	
59	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawai Pemerintah Desa	%	100,00	258.006.727	100,00	10.000.000	100,00	-	-	-	-	-	100,00	10.000.000	100,00	3,88	Kec. Mangunjaya	
60	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	5,00	12.378.166	-	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
61	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1,00	12.354.927	-	-	1,00	2.460.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
62	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1,00	209.788.540	-	10.000.000	1,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	4,77	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
63	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	5,00	23.485.094	-	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mangunjaya	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-	-	-	-	-		
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)	-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-	-	-	-	-		
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)	-	-	-	-		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												46,05	47,18	-	-	-	-		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(SR)	(SR)	-	-	-	-		
1	KECAMATAN KALIPUCANG			100,00	17.669.910.173		1.378.813.233	100,00	1.642.009.709		1.462.969.609		89,10		2.545.799.850		14,41		
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00	15.866.186.881	7,89	1.252.358.733	100,00	1.630.555.924	86,17	1.451.553.859	86,17	89,02	94,07	2.703.912.592	94,07	17,04	Kec. Kalipucang	
3	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	389.098.850	5,13	19.948.000	100,00	23.725.000	92,83	22.025.000	92,83	92,83	97,96	41.973.000	97,96	10,79	Kec. Kalipucang	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Operator Perencanaan	Orang/ Bulan	72,00	343.301.542	5,67	19.480.000	12,00	22.700.000	12,00	21.000.000	100,00	92,51	17,67	40.480.000	24,55	11,79	Kec. Kalipucang	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA – SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	5,00	10.457.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Kegiatan tidak prioritas
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA – SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	5,00	8.852.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Kegiatan tidak prioritas
7	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA – SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	5,00	8.852.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Kegiatan tidak prioritas
8	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	5,00	8.852.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Kegiatan tidak prioritas
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	32,00	8.782.728	5,00	468.000	5,00	1.025.000	5,00	1.025.000	100,00	100,00	10,00	1.493.000	31,25	17,00	Kec. Kalipucang	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	96,26	-	-	-	-		
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)	-	-	-	-		
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100,00	11.238.934.208	9,33	1.048.645.398	100,00	1.347.694.168	86,27	1.162.668.446	86,27	86,27	95,60	2.211.313.844	95,60	19,68	Kec. Kalipucang	
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS yang dibayarkan	Orang	12,00	10.718.718.380	12,00	1.028.605.398	12,00	1.323.429.168	12,00	1.140.103.446	100,00	86,15	12,00	2.168.708.844	100,00	20,23	Kec. Kalipucang	
12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Operator Keuangan	Orang/ Bulan	72,00	343.361.542	12,00	19.740.000	12,00	22.700.000	12,00	21.000.000	100,00	92,51	24,00	40.740.000	33,33	11,87	Kec. Kalipucang	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	Dokumen	72,00	25.242.473	12,00	300.000	12,00	745.000	12,00	745.000	100,00	100,00	24,00	1.045.000	33,33	4,14	Kec. Kalipucang	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Penyusunan Keuangan Semesteran / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	24,00	151.611.813	-	-	4,00	820.000	4,00	820.000	100,00	100,00	4,00	820.000	16,67	0,54	Kec. Kalipucang	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	94,66	-	-	-	-		
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)	-	-	-	-		
15	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100,00	364.607.290	4,94	18.017.100	100,00	22.700.000	100,00	22.700.000	100,00	100,00	104,94	40.717.100	104,94	11,17	Kec. Kalipucang	
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	Laporan	72,00	21.245.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah SDM SIMDA BMD setiap bulan	Orang	72,00	343.361.542	5,25	18.017.100	12,00	22.700.000	12,00	22.700.000	100,00	100,00	17,25	40.717.100	23,95	11,86	Kec. Kalipucang	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00	-	-	-	-		

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	669.407.443	1,59	10.640.000	100,00	13.600.000	100,00	13.600.000	100,00	100,00	101,59	24.240.000	101,59	3,62	Kec. Kalipucang	
19	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang di adakan	Paket	132,00	68.844.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	
20	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah SDM Kepegawaian setiap bulan	Orang	60,00	207.397.560	5,13	10.640.000	12,00	13.600.000	12,00	13.600.000	100,00	100,00	17,13	24.240.000	28,55	11,69	Kec. Kalipucang	
21	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	72,00	15.384.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
22	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	72,00	347.780.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
23	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3,00	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
24	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	650.513.579	2,71	17.616.750	100,00	39.128.434	72,16	45.843.607	72,16	117,16	74,87	45.843.607	74,87	7,05	Kec. Kalipucang	
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	120,00	18.322.432	6,22	1.140.000	24,00	3.531.000	23,85	4.041.000	99,37	114,44	30,07	4.041.000	25,06	22,05	Kec. Kalipucang	Tidak mencapai target karena menyesuaikan dengan kebutuhan
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan disediakan	Paket	225,00	142.520.480	6,06	8.643.000	45,00	16.241.184	45,00	17.910.000	100,00	110,28	51,06	17.910.000	22,70	12,57	Kec. Kalipucang	
27	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	20,00	68.511.595	4,82	3.301.250	4,00	5.186.250	4,00	7.719.250	100,00	148,84	8,82	7.719.250	44,09	11,27	Kec. Kalipucang	
28	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	20,00	40.590.600	7,56	3.070.000	4,00	3.600.000	4,00	3.600.000	100,00	100,00	11,56	3.600.000	57,82	8,87	Kec. Kalipucang	
29	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Paket	25,00	12.210.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Kegiatan tidak prioritas
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.630,00	368.358.272	0,40	1.462.500	326,00	10.570.000	297,89	12.573.357	91,38	118,95	298,29	12.573.357	18,30	3,41	Kec. Kalipucang	Tidak mencapai target karena menyesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												98,15	118,50						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
31	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	%	100,00	430.409.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
32	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	110,00	155.680.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
33	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	25,00	195.363.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
34	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan yang disediakan	Unit	60,00	79.366.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
35	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	1.603.750.946	7,51	120.462.385	100,00	146.033.322	88,69	148.415.206	88,69	101,63	96,20	148.415.206	96,20	9,25	Kec. Kalipucang	
36	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.800,00	12.190.262	6,32	770.000	360,00	1.820.000	226,20	1.962.000	62,83	107,80	232,52	1.962.000	12,92	16,09	Kec. Kalipucang	Tidak mencapai target karena menyesuaikan dengan kebutuhan
37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Laporan	120,00	349.238.832	4,93	17.209.385	24,00	24.180.000	17,80	18.715.706	74,17	77,40	22,73	18.715.706	18,94	5,36	Kec. Kalipucang	Tidak mencapai target karena menyesuaikan dengan kebutuhan
38	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lapoan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	60,00	1.242.321.852	8,25	102.483.000	12,00	120.033.322	11,64	127.737.500	97,00	106,42	19,89	127.737.500	33,15	10,28	Kec. Kalipucang	Tidak mencapai target karena menyesuaikan dengan kebutuhan
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												78,00	97,21						
Predikat Kinerja												(T)	(ST)						
39	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100,00	519.465.015	3,28	17.029.100	100,00	37.675.000	90,92	36.301.600	90,92	96,35	94,20	36.301.600	94,20	6,99	Kec. Kalipucang	
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	25,00	411.600.750	3,96	16.279.100	5,00	35.425.000	5,00	33.501.600	100,00	94,57	8,96	33.501.600	35,82	8,14	Kec. Kalipucang	
41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	70,00	90.084.615	0,83	750.000	14,00	2.250.000	13,80	2.800.000	98,57	124,44	14,63	2.800.000	20,90	3,11	Kec. Kalipucang	Tidak mencapai target karena menyesuaikan dengan kebutuhan
42	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ di rehabilitasi	Unit	5,00	17.779.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												99,29	109,51						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												90,13	99,18						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
43	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	1.176.147.856	8,98	105.600.000	-	-	-	-	-	-	8,98	105.600.000	8,98	8,98	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
44	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang baik	%	100,00	1.054.732.100	10,01	105.600.000	-	-	-	-	-	-	10,01	105.600.000	10,01	10,01	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
45	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	60,00	1.050.752.100	10,05	105.600.000	-	-	-	-	-	-	10,05	105.600.000	16,75	10,05	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
46	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	3.600,00	3.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
47	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100,00	121.415.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
48	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	60,00	121.415.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
49	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100,00	26.648.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
50	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	%	100,00	26.648.881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
51	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	45,00	26.648.881	-	-	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
52	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	%	100,00	21.123.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Kegiatan tidak prioritas
53	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum	%	100,00	21.123.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Kegiatan tidak prioritas
54	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	45,00	21.123.646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Kegiatan tidak prioritas
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
55	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	62.149.918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
56	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	%	100,00	62.149.918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
57	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	30,00	62.149.918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
58	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	517.652.991	4,03	20.854.500	100,00	11.453.785	99,67	11.415.750	99,67	99,67	103,70	11.415.750	103,70	2,21	Kec. Kalipucang	
59	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100,00	517.652.991	4,03	20.854.500	100,00	11.453.785	99,67	11.415.750	99,67	99,67	103,70	11.415.750	103,70	2,21	Kec. Kalipucang	
60	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	45,00	123.945.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
61	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif	Dokumen	55,00	250.871.480	8,31	20.854.500	11,00	11.453.785	11,00	11.415.750	100,00	99,67	19,31	11.415.750	35,11	4,55	Kec. Kalipucang	
62	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	45,00	142.835.755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Kalipucang	Ada Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	99,67						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												99,67	99,67						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												92,92	94,34						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(ST)						
1	KECAMATAN PANGANDARAN			100,00	15.816.790.840		75	100,00	1.499.405.561		1.024.536.488		68,33		1.024.536.563		6,48		

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	100,00	13.964.189.056	80,00	79	100,00	1.499.405.561	91,62	1.396.378.710	91,62	93,13	85,81	1.396.378.789	85,81	10,00	Kec. Pangandaran	
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	100,00	278.081.728	23,00	17.600.000	100,00	22.700.000	100,00	22.700.000	100,00	100,00	61,50	40.300.000	61,50	14,49	Kec. Pangandaran	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Operator Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	84,00	241.298.500	15,00	17.600.000	13,00	22.700.000	13,00	22.700.000	100,00	100,00	33,33	40.300.000	39,68	16,70	Kec. Pangandaran	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6,00	7.631.375	1,00	-	1,00	-	1,00	-	100,00		2,00	-	33,33	-	Kec. Pangandaran	
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	6,00	7.631.375	1,00	-	1,00	-	1,00	-	100,00		2,00	-	33,33	-	Kec. Pangandaran	
7	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	6,00	7.631.375	1,00	-	1,00	-	1,00	-	100,00		2,00	-	33,33	-	Kec. Pangandaran	
8	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	6,00	7.631.375	1,00	-	1,00	-	1,00	-	100,00		2,00	-	33,33	-	Kec. Pangandaran	
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24,00	6.257.728	4,00	-	4,00	-	4,00	-	100,00		8,00	-	33,33	-	Kec. Pangandaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100,00	10.062.809.048	77,00	873.992.510	100,00	1.202.802.477	100,00	1.107.821.234	100,00	92,10	88,50	1.981.813.744	88,50	19,69	Kec. Pangandaran	
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS yang dibayarkan	Orang/Bulan	11,00	9.672.217.675	11,00	856.392.510	11,00	1.180.102.477	11,00	1.085.121.234	100,00	91,95	11,00	1.941.513.744	100,00	20,07	Kec. Pangandaran	
12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Operator Keuangan Jumlah dokumen Keuangan	Dokumen	360,00	243.639.500	60,00	17.600.000	60,00	22.700.000	60,00	22.700.000	100,00	100,00	120,00	40.300.000	33,33	16,54	Kec. Pangandaran	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6,00	23.952.473	1,00	-	1,00	-	1,00	-	100,00		2,00	-	33,33	-	Kec. Pangandaran	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	30,00	122.999.400	5,00	-	5,00	-	5,00	-	100,00		10,00	-	33,33	-	Kec. Pangandaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	95,98						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
15	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100,00	262.544.248	24,00	17.600.000	100,00	22.700.000	100,00	22.700.000	100,00	100,00	62,00	40.300.000	62,00	15,35	Kec. Pangandaran	
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60,00	21.245.748	12,00	-	12,00	-	12,00	-	100,00		24,00	-	40,00	-	Kec. Pangandaran	
17	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Operator Aset Jumlah dokumen BMD	Laporan	72,00	241.298.500	12,00	17.600.000	12,00	22.700.000	12,00	22.700.000	100,00	100,00	24,00	40.300.000	33,33	16,70	Kec. Pangandaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	560.119.332	24,00	9.600.000	100,00	13.600.000	100,00	9.600.000	100,00	70,59	62,00	19.200.000	62,00	3,43	Kec. Pangandaran	
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Paket	6,00	63.750.980	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
20	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Operator Kepegawaian Jumlah dokumen Kepegawaian	Dokumen	72,00	165.227.500	12,00	9.600.000	12,00	13.600.000	12,00	13.600.000	100,00	100,00	24,00	23.200.000	33,33	14,04	Kec. Pangandaran	
21	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	72,00	15.384.852	12,00	-	12,00	-	12,00	-	100,00		24,00	-	33,33	-	Kec. Pangandaran	
22	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	55,00	315.756.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
23	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	543.155.724	64,00	14.502.600	100,00	42.688.036	91,00	49.641.397	91,00	116,29	77,50	64.143.997	77,50	11,81	Kec. Pangandaran	
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan Jumlah Komponen Listrik yang dibeli	Paket	6,00	13.861.513	1,00	84.000	1,00	2.995.000	1,00	4.030.000	100,00	134,56	2,00	4.114.000	33,33	29,68	Kec. Pangandaran	
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	Paket	6,00	132.859.516	1,00	8.718.400	1,00	18.004.786	1,00	18.085.897	100,00	100,45	2,00	26.804.297	33,33	20,17	Kec. Pangandaran	
26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang di Cetak dan digandakan	Paket	6,00	64.291.595	1,00	900.200	1,00	4.698.250	1,00	4.950.500	100,00	105,37	2,00	5.850.700	33,33	9,10	Kec. Pangandaran	

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang dibeli setiap bulannya	Dokumen	1.584,00	78.995.100	160,00	4.800.000	1,00	3.000.000	1,00	3.700.000	100,00	123,33	161,00	8.500.000	10,16	10,76	Kec. Pangandaran	
28	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5,00	39.469.500	-	-	1,00	-	1,00	8.785.000	100,00		1,00	8.785.000	20,00	22,26	Kec. Pangandaran	
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	1.630,00	213.678.500	72,00	-	95,00	13.990.000	86,00	10.090.000	90,53	72,12	158,00	10.090.000	9,69	4,72	Kec. Pangandaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												98,42	107,17						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
30	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100,00	396.831.500	-	-	100,00	20.832.380	50,00	15.000.000	50,00	72,00	50,00	15.000.000	50,00	3,78	Kec. Pangandaran	
31	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15,00	122.102.000	-	-	4,00	20.832.380	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Pangandaran	Sub Kegiatan tidak terealisasi
32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20,00	213.678.500	-	-	1,00	-	1,00	15.000.000	100,00		1,00	15.000.000	5,00	7,02	Kec. Pangandaran	Mendapat tambahan Khusus dari BKAD untuk pengadaan Laptop karena sangat dibutuhkan dan mengalihkan dari sub kegiatan lainnya
33	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15,00	61.051.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												50,00	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
34	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	1.455.734.176	90,00	88.765.500	100,00	128.086.788	91,95	125.922.279	91,95	98,31	90,97	214.687.779	90,97	14,75	Kec. Pangandaran	
35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.440,00	19.665.360	240,00	220.000	240,00	2.400.000	226,00	2.265.000	94,17	94,38	466,00	2.485.000	32,36	12,64	Kec. Pangandaran	
36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	216,00	236.113.100	36,00	21.505.000	36,00	33.240.000	36,00	27.946.279	100,00	84,07	72,00	49.451.279	33,33	20,94	Kec. Pangandaran	
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	1.199.955.716	12,00	67.040.500	12,00	92.446.788	12,00	95.711.000	100,00	103,53	24,00	162.751.500	33,33	13,56	Kec. Pangandaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												98,06	93,99						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
38	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100,00	404.913.300	4,00	44.547.100	100,00	45.995.880	100,00	42.993.800	100,00	93,47	52,00	87.540.900	52,00	21,62	Kec. Pangandaran	
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	Unit	18,00	295.674.500	3,00	17.347.100	3,00	38.495.880	3,00	33.693.800	100,00	87,53	6,00	51.040.900	33,33	17,26	Kec. Pangandaran	
40	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70,00	61.051.000	-	-	14,00	7.500.000	14,00	4.500.000	100,00	60,00	14,00	4.500.000	20,00	7,37	Kec. Pangandaran	
41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5,00	48.187.800	1,00	27.200.000	1,00	-	1,00	4.800.000	100,00		2,00	32.000.000	40,00	66,41	Kec. Pangandaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	73,76						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												91,62	92,85						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
42	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	1.475.187.703	12,00	140.800.000	-	-	-	-			12,00	140.800.000	12,00	9,54	Kec. Pangandaran	Rasionalisasi Anggaran
43	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	1.349.636.343	12,00	140.800.000	-	-	-	-			12,00	140.800.000	12,00	10,43	Kec. Pangandaran	
44	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	72,00	1.349.636.343	12,00	140.800.000	-	-	-	-			12,00	140.800.000	16,67	10,43	Kec. Pangandaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
45	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100,00	125.551.360	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
46	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	64,00	125.551.360	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
47	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100,00	17.063.755	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	Rasionalisasi Anggaran
48	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100,00	17.063.755	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
49	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	48,00	17.063.755	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
50	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	%	100,00	5.433.539	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	Rasionalisasi Anggaran
51	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100,00	5.433.539	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
52	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	48,00	5.433.539	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
53	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	10.561.823	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	Rasionalisasi Anggaran
54	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kali	48,00	10.561.823	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
55	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	40,00	10.561.823	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
56	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	344.354.964	1,00	9.122.000	100,00	-	-	-			1,00	9.122.000	1,00	2,65	Kec. Pangandaran	Rasionalisasi Anggaran
57	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100,00	344.354.964	1,00	9.122.000	100,00	-	-	-			-	9.122.000	-	2,65	Kec. Pangandaran	
58	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	72,00	74.161.945	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
59	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah DURKPDs yang Tersusun Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan	6,00	187.937.600	1,00	9.122.000	1,00	-	-	-			1,00	9.122.000	16,67	4,85	Kec. Pangandaran	
60	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Dokumen	72,00	82.255.419	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Pangandaran	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												91,62	93,13						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(ST)						
1	KECAMATAN SIDAMULIH			100,00	17.339.207.691	88,00	925.937.104	100,00	1.647.940.749		1.495.643.020		90,76	88,00	2.421.580.124	88,00	13,97		
2	UNSUR KEWILAYAHAN			100,00	17.339.207.691	88,00	925.937.104	100,00	1.647.940.749		1.495.643.020		90,76	88,00	2.421.580.124	88,00	13,97		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00	15.626.218.994	91,00	876.514.104	100,00	1.638.589.749	90,76	1.487.135.020	90,76	90,76	90,88	2.363.649.124	90,88	15,13	Kec. Sidamulih	
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	470.275.147	92,00	41.450.000	100,00	21.000.000	87,86	18.450.000	87,86	87,86	179,86	59.900.000	179,86	12,74	Kec. Sidamulih	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	84,00	379.116.619	1,00	15.900.000	4,00	21.000.000	4,00	18.450.000	100,00	87,86	5,00	34.350.000	5,95	9,06	Kec. Sidamulih	Realisasi Sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30,00	36.600.000	1,00	25.550.000	-	-	-	-			1,00	25.550.000	3,33	69,81	Kec. Sidamulih	Anggaran dirasionalisasi
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	12.210.200	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	Anggaran dirasionalisasi

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
8	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	12.030.200	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	Anggaran dirasionalisasi
9	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	12.030.200	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	Anggaran dirasionalisasi
10	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	12.030.200	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	Anggaran dirasionalisasi
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	6.257.728	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	87,86						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100,00	11.894.492.539	90,00	777.112.114	100,00	1.189.755.994	90,71	1.079.237.886	90,71	90,71	90,36	1.856.350.000	90,36	15,61		
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	11,00	11.507.277.505	11,00	762.912.114	12,00	1.168.755.994	12,00	1.060.787.886	100,00	90,76	10,00	1.823.700.000	90,91	15,85	Kec. Sidamulih	Realisasi Sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
14	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60,00	376.140.383	1,00	14.200.000	5,00	21.000.000	4,00	18.450.000	80,00	87,86	5,00	32.650.000	8,33	8,68	Kec. Sidamulih	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	5.738.794	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Anggaran dirasionalisasi
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1,00	5.335.857	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												90,00	89,31						
Predikat Kinerja												(T)	(T)						
17	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100,00	273.691.633	-	-	100,00	21.000.000	87,86	18.450.000	87,86	87,86	87,86	18.450.000	87,86	6,74		
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	27.839.256	-	-	12,00	21.000.000	12,00	18.450.000	100,00	87,86	12,00	18.450.000	100,00	66,27	Kec. Sidamulih	Realisasi Sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12,00	245.852.377	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	87,86						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	563.727.840	-	-	100,00	12.600.000	88,10	11.100.000	88,10	88,10	88,10	11.100.000	88,10	1,97		
21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	25,00	55.539.316	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Anggaran dirasionalisasi
22	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12,00	152.627.500	-	-	12,00	12.600.000	12,00	9.600.000	100,00	76,19	12,00	9.600.000	100,00	6,29	Kec. Sidamulih	Realisasi Sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
23	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	26,00	19.780.524	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Anggaran dirasionalisasi
24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11,00	335.780.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	76,19						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
25	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	472.086.228	99,00	6.165.750	100,00	26.499.695	84,27	22.332.000	84,27	84,27	91,64	28.497.750	91,64	6,04		
26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	2,00	4.920.729	-	-	1,00	710.809	1,00	694.000	100,00	97,64	1,00	694.000	50,00	14,10	Kec. Sidamulih	Realisasi Sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	180,00	144.369.254	61,00	3.501.000	1,00	15.363.636	1,00	14.987.500	100,00	97,55	62,00	18.488.500	34,44	12,81	Kec. Sidamulih	Realisasi Sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	48,00	30.227.310	6,00	454.000	1,00	3.890.250	1,00	2.545.500	100,00	65,43	7,00	2.999.500	14,58	9,92	Kec. Sidamulih	Realisasi Sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	24,00	23.480.099	11,00	1.275.000	1,00	1.260.000	-	-	-	-	11,00	1.275.000	45,83	5,43	Kec. Sidamulih	Anggaran dirasionalisasi
30	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	5,00	73.261.200	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Anggaran dirasionalisasi
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36,00	195.827.636	2,00	935.750	6,00	5.275.000	6,00	4.105.000	100,00	77,82	8,00	5.040.750	22,22	2,57	Kec. Sidamulih	Realisasi Sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												80,00	67,69						
Predikat Kinerja												(T)	(S)						
32	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100,00	669.275.165	-	-	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	100,00	100,00	20.000.000	100,00	2,99		
33	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	16,00	40.449.865	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Anggaran dirasionalisasi

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
34	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	7,00	567.774.300	-	-	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	100,00	100,00	1,00	20.000.000	14,29	3,52	Kec. Sidamulih	Realisasi Sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1,00	61.051.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
36	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	897.275.539	96,00	24.930.040	100,00	298.149.608	91,24	272.038.334	91,24	91,24	93,62	296.968.374	93,62	33,10		
37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	240,00	6.593.508	-	-	50,00	500.000	48,00	400.000	96,00	80,00	48,00	400.000	20,00	6,07	Kec. Sidamulih	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Rekening	2,00	180.642.068	2,00	11.700.040	2,00	23.000.000	2,00	13.279.184	100,00	57,74	2,00	24.979.224	100,00	13,83	Kec. Sidamulih	Realisasi Sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	60,00	710.039.963	12,00	13.230.000	12,00	274.649.608	12,00	258.359.150	100,00	94,07	24,00	271.589.150	40,00	38,25	Kec. Sidamulih	Realisasi Sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												98,67	77,27						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
40	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100,00	385.394.903	100,00	26.856.200	100,00	49.584.452	94,88	45.526.800	94,88	91,82	97,44	72.383.000	97,44	18,78		
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6,00	295.588.603	4,00	9.000.000	6,00	33.804.452	4,00	29.560.000	66,67	87,44	8,00	38.560.000	133,33	13,05	Kec. Sidamulih	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	6,00	38.410.800	4,00	356.200	6,00	2.250.000	4,00	1.886.800	66,67	83,86	8,00	2.243.000	133,33	5,84	Kec. Sidamulih	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
43	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	14,00	21.367.850	-	-	7,00	5.250.000	4,00	5.455.000	57,14	103,90	4,00	5.455.000	28,57	25,53	Kec. Sidamulih	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan
44	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/dirhabilitasi	Unit	1,00	30.027.650	1,00	17.500.000	1,00	8.280.000	1,00	8.625.000	100,00	104,17	2,00	26.125.000	200,00	87,00	Kec. Sidamulih	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												72,62	94,84						
Predikat Kinerja												(S)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												90,61	90,23						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
45	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	1.303.077.704	52,00	41.600.000	-	-	-	-			52,00	41.600.000	52,00	3,19		
46	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100,00	1.303.077.704	52,00	41.600.000	-	-	-	-			52,00	41.600.000	52,00	3,19	Kec. Sidamulih	
47	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5,00	82.042.544	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Anggaran dirasionalisasi
48	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	66,00	1.221.035.160	80,00	41.600.000	-	-	-	-			80,00	41.600.000	121,21	3,41	Kec. Sidamulih	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
49	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100,00	19.749.999	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
50	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100,00	19.749.999	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
51	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	7,00	19.749.999	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
52	Program Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketertarikan dan keteriban umum	%	100,00	19.749.999	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
53	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum	Kali	7,00	19.749.999	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
54	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	7,00	19.749.999	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
55	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	21.276.274	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
56	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kali	5,00	21.276.274	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
57	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Dokumen	10,00	21.276.274	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
58	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	349.134.721	100,00	7.823.000	100,00	9.351.000	90,98	8.508.000	90,98	90,98	95,49	16.331.000	95,49	4,68		
59	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa	%	100,00	349.134.721	100,00	7.823.000	100,00	9.351.000	90,98	8.508.000	90,98	90,98	95,49	16.331.000	95,49	4,68		
60	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7,00	14.640.030	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Sidamulih	
61	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	42,00	252.442.147	7,00	7.823.000	7,00	9.351.000	7,00	8.508.000	100,00	90,98	14,00	16.331.000	33,33	6,47	Kec. Sidamulih	Realisasi Sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu
62	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	7,00	82.052.544	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	90,98						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												90,98	90,98						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												90,87	90,87						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(ST)						
1	KECAMATAN PARIGI				13.994.087.897		1.256.172.440		1.535.736.877		1.280.278.427		83,37		2.536.450.867		18,13		
2	URUSAN KEWILAYAHAN				13.994.087.897		1.256.172.440		1.535.736.877		1.280.278.427		83,37		2.536.450.867		18,13	Kec. Parigi	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00	12.096.535.971	91,00	1.134.875.940	100,00	1.522.246.488	83,41	1.266.788.427	83,41	83,22	87,20	2.401.664.367	87,20	19,85	Kec. Parigi	
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	296.028.127	92,00	17.600.000	100,00	24.400.000	99,10	22.700.000	99,10	93,03	95,55	40.300.000	95,55	13,61	Kec. Parigi	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	14,00	280.190.377	10,00	17.600.000	14,00	24.400.000	12,00	22.700.000	85,71	93,03	11,00	40.300.000	78,57	14,38	Kec. Parigi	Realisasi anggaran tidak sesuai target karena disesuaikan dengan kebutuhan
6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	4,00	575.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	1,00	3.052.550	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi
8	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	1,00	3.052.550	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi
9	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	1,00	3.052.550	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi
10	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	1,00	3.052.550	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	Dokumen	1,00	3.052.550	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												85,71	93,03						
Predikat Kinerja												(T)	(ST)						
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100,00	9.012.190.739	90,00	954.071.700	100,00	1.279.070.198	82,09	1.050.019.645	82,09	82,09	172,09	2.004.091.345	172,09	22,24	Kec. Parigi	
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan	Orang/Bulan	11,00	8.708.236.262	11,00	936.471.700	11,00	1.254.670.198	7,00	1.027.319.645	63,64	81,88	7,00	1.963.791.345	63,64	22,55	Kec. Parigi	Realisasi anggaran tidak sesuai target karena disesuaikan dengan kebutuhan
14	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60,00	278.699.377	23,00	17.600.000	60,00	24.400.000	60,00	22.700.000	100,00	93,03	41,50	40.300.000	69,17	14,46	Kec. Parigi	Realisasi melebihi target dikarenakan ada anggaran hutang tahun 2021
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Laporan	1,00	21.627.550	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Laporan	1,00	3.627.550	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												81,82	87,46								
Predikat Kinerja												(T)	(T)								
17	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100,00	281.556.177	61,00	15.900.000	100,00	26.100.000	95,46	24.400.000	95,46	93,49	78,23	40.300.000	78,23	14,31	Kec. Parigi			
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	Laporan	12,00	3.052.550	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi		
19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	Laporan	4,00	278.503.627	1,00	15.900.000	4,00	26.100.000	4,00	24.400.000	100,00	93,49	5,00	40.300.000	125,00	14,47	Kec. Parigi			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	93,49								
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)								
20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	216.456.792	54,00	9.600.000	100,00	15.600.000	93,59	14.600.000	93,59	93,59	73,79	24.200.000	73,79	11,18	Kec. Parigi			
21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Paket	11,00	31.555.350	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi		
22	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	Dokumen	12,00	162.848.892	11,00	9.600.000	12,00	15.600.000	12,00	14.600.000	100,00	93,59	11,50	24.200.000	95,83	14,86	Kec. Parigi			
23	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12,00	3.052.550	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi		
24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	11,00	19.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	93,59								
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)								
25	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	378.186.828	99,00	18.455.500	100,00	24.797.920	99,47	24.666.050	99,47	99,47	99,23	43.121.550	99,23	11,40	Kec. Parigi			
26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	2,00	22.668.335	2,00	3.081.000	2,00	3.855.000	2,00	3.852.900	100,00	99,95	2,00	6.933.900	100,00	30,59	Kec. Parigi	Realisasi sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu		
27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Paket	38,00	109.547.512	14,00	11.052.900	38,00	16.392.920	43,00	16.563.750	113,16	101,04	28,50	27.616.650	75,00	25,21	Kec. Parigi			
28	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2,00	31.722.950	2,00	1.421.600	2,00	2.450.000	2,00	2.449.400	100,00	99,98	2,00	3.871.000	100,00	12,20	Kec. Parigi	Realisasi sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu		
29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	Dokumen	2,00	28.380.400	2,00	1.600.000	2,00	2.100.000	2,00	1.800.000	100,00	85,71	4,00	3.400.000	200,00	11,98	Kec. Parigi	Realisasi sesuai dengan target ditunjang dengan laporan yang tepat waktu		
30	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Bahan / Material yang disediakan	Paket	1,00	9.282.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi		
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	90,00	176.585.631	4,00	1.300.000	-	-	-	-			4,00	1.300.000	4,44	0,74	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												103,29	96,67								
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)								
32	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100,00	316.856.168	-	-	-	22.110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Parigi			
33	Pengadaan Meubel	Jumlah mebel yang diadakan	Jenis	2,00	102.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi		
34	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jenis	6,00	188.856.168	-	-	6,00	22.110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi		
35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Jenis	1,00	26.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-								
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)								
36	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	971.064.690	96,00	70.903.410	100,00	93.790.000	93,44	87.635.485	93,44	93,44	94,72	158.538.895	94,72	16,33	Kec. Parigi			
37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Laporan	240,00	24.417.850	32,00	820.000	240,00	500.000	240,00	500.000	100,00	100,00	136,00	1.320.000	56,67	5,41	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi		
38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Laporan	2,00	211.353.000	2,00	18.540.910	2,00	22.000.000	2,00	14.830.485	100,00	67,41	2,00	33.371.395	100,00	15,79	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi		
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12,00	735.293.840	12,00	51.542.500	12,00	71.290.000	12,00	72.305.000	100,00	101,42	12,00	123.847.500	100,00	16,84	Kec. Parigi	Realisasi melebihi target dikarenakan ada anggaran hutang tahun 2021		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	89,61								
Predikat Kinerja												(ST)	(T)								
40	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100,00	624.196.450	100,00	48.345.330	100,00	36.378.370	117,57	42.767.247	117,57	117,56	117,57	91.112.577	117,57	14,60	Kec. Parigi			
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Paket	6,00	469.906.500	6,00	27.695.330	6,00	30.378.370	8,00	30.547.247	133,33	100,56	8,00	58.242.577	133,33	12,39	Kec. Parigi			
42	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	Paket	14,00	88.261.200	2,00	1.450.000	14,00	6.000.000	14,00	7.500.000	100,00	125,00	14,00	8.950.000	100,00	10,14	Kec. Parigi			
43	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Paket	2,00	66.028.750	2,00	19.200.000	-	-	2,00	4.720.000			2,00	23.920.000	100,00	36,23	Kec. Parigi			
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												116,67	112,78								
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)								
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												85,09	84,08								
Predikat Kinerja												(T)	(T)								

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
44	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	1.483.125.500	52,00	115.200.000	-	-	-	-			-	115.200.000	-	7,77	Kec. Parigi	
45	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100,00	1.483.125.500	52,00	115.200.000	100,00	-	-	-			-	115.200.000	-	7,77	Kec. Parigi	
46	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Laporan	4,00	30.525.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi
47	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi pemerintahan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait yang di selenggarakan	Laporan	12,00	1.452.600.000	12,00	115.200.000	-	-	-	-			-	115.200.000	-	7,93	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
48	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100,00	23.623.850	-	-	100,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
49	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100,00	23.623.850	-	-	100,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
50	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di monitoring pelaksanaan musrenbangnya	Lembaga Kemasyarakatan	10,00	23.623.850	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
51	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	%	100,00	6.105.100	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
52	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum	Kali	10,00	6.105.100	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
53	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan harmonisasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	10,00	6.105.100	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
54	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	15.262.750	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
55	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kali	10,00	15.262.750	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	
56	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen verifikasi bantuan keuangan Desa	Dokumen	10,00	15.262.750	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
57	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	369.434.726	100,00	6.096.500	100,00	13.490.389	100,00	13.490.000	100,00	100,00	100,00	19.586.500	100,00	5,30	Kec. Parigi	
58	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa	%	100,00	369.434.726	100,00	6.096.500	100,00	13.490.389	100,00	13.490.000	100,00	100,00	100,00	19.586.500	100,00	5,30	Kec. Parigi	
59	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	10,00	80.525.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi
60	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah DURKPDes yang tersusun dan Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Dokumen	2,00	258.383.726	2,00	6.096.500	2,00	13.490.389	2,00	13.490.000	100,00	100,00	2,00	19.586.500	100,00	7,58	Kec. Parigi	
61	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pembangunan desa wisata dan Jumlah Fasilitasi Desa Wisata	Laporan	4,00	30.525.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Parigi	Anggaran dirasionalisasi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												100,00	100,00						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												91,70	91,61						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(ST)						
1	KECAMATAN CIJULANG				16.286.717.324		1.165.102.597		1.422.985.433		1.220.032.264		85,74		2.385.134.861		14,64		
2	UNSUR KEWILAYAHAN				16.286.717.324		1.165.102.597		1.422.985.433		1.220.032.264		85,74		2.385.134.861		14,64		

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00	13.781.286.041	100,00	1.054.822.597	100,00	1.403.185.433	100,00	1.202.632.264	100,00	85,71	200,00	2.257.454.861	-	16,38	Kec. Cijulang	
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Persen	100,00	450.136.265	100,00	19.300.000	100,00	22.700.000	100,00	21.000.000	100,00	92,51	200,00	40.300.000	-	8,95	Kec. Cijulang	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	84,00	360.502.957	15,00	19.300.000	13,00	22.700.000	13,00	21.000.000	100,00	92,51	28,00	40.300.000	33,33	11,18	Kec. Cijulang	
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6,00	17.161.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	6,00	17.161.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
8	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	6,00	17.161.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
9	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	6,00	17.161.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	4,00	798.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	25,00	20.190.748	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	92,51						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100,00	9.103.274.576	100,00	889.402.394	100,00	1.021.528.363	100,00	908.089.113	100,00	88,90	100,00	1.797.491.507	100,00	19,75	Kec. Cijulang	
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	76,00	8.584.688.801	10,00	867.522.394	9,00	998.828.363	8,00	887.089.113	88,89	88,81	18,00	1.754.611.507	23,68	20,44	Kec. Cijulang	Pada saat perencanaan jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dimaksimalkan sedangkan pada realisasi sampai september hanya ada 8 orang ASN
14	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	360,00	356.111.957	60,00	19.300.000	60,00	22.700.000	60,00	21.000.000	100,00	92,51	120,00	40.300.000	33,33	11,32	Kec. Cijulang	
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6,00	13.265.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	30,00	149.208.363	1,00	2.580.000	-	-	-	-	-	-	1,00	2.580.000	3,33	1,73	Kec. Cijulang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												94,44	90,66						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
17	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Buah	418,00	388.540.905	61,00	17.600.000	61,00	24.400.000	61,00	22.700.000	100,00	93,03	122,00	40.300.000	29,19	10,37	Kec. Cijulang	
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	48,00	33.455.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72,00	355.084.957	1,00	17.600.000	12,00	24.400.000	12,00	22.700.000	100,00	93,03	13,00	40.300.000	18,06	11,35	Kec. Cijulang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	93,03						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	Persen	100,00	611.153.664	100,00	10.600.000	100,00	23.936.600	100,00	16.321.600	100,00	68,19	200,00	26.921.600	-	4,41	Kec. Cijulang	
21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	366,00	74.047.575	-	-	21,00	9.336.600	21,00	2.721.600	100,00	29,15	21,00	2.721.600	5,74	3,68	Kec. Cijulang	
22	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	72,00	168.616.137	1,00	10.600.000	12,00	14.600.000	12,00	13.600.000	100,00	93,15	13,00	24.200.000	18,06	14,35	Kec. Cijulang	
23	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	43,00	21.489.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	69,00	347.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	61,15						
Predikat Kinerja												(ST)	(R)						
25	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	Persen	100,00	758.295.410	100,00	10.939.250	100,00	68.687.690	100,00	35.400.214	100,00	51,54	100,00	46.339.464	-	6,11	Kec. Cijulang	

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	41.724.345	1,00	288.000	1,00	1.774.096	1,00	1.625.000	100,00	91,60	2,00	1.913.000	33,33	4,58	Kec. Cijulang	
27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	204.786.881	1,00	4.276.000	1,00	24.607.141	1,00	14.774.000	100,00	60,04	2,00	19.050.000	33,33	9,30	Kec. Cijulang	
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	288,00	69.727.751	48,00	2.976.000	48,00	10.000.453	48,00	7.772.250	100,00	77,72	96,00	10.748.250	33,33	15,41	Kec. Cijulang	
29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	360,00	40.230.600	36,00	2.720.000	15,00	1.500.000	15,00	1.500.000	100,00	100,00	51,00	4.220.000	14,17	10,49	Kec. Cijulang	
30	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Paket	4,00	16.108.366	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.956,00	385.717.467	2,00	679.250	12,00	30.806.000	13,00	9.728.964	108,33	31,58	15,00	10.408.214	0,77	2,70	Kec. Cijulang	Disesuaikan dengan SPDP Luar Daerah yang dilaksanakan, dan yang bisa diserap hanya SPDP luar daerah dan melebihi rencana
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												101,67	72,19						
Predikat Kinerja												(ST)	(S)						
32	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	Persen	100,00	408.364.227	-	-	100,00	5.965.175	100,00	8.685.000	100,00	145,60	100,00	8.685.000	-	2,13	Kec. Cijulang	
33	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	100,00	158.550.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
34	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	28,00	210.414.227	-	-	1,00	5.965.175	2,00	8.685.000	200,00	145,60	-	-	-	-	Kec. Cijulang	Realisasi melebihi target dikarenakan belanja sesuai kebutuhan
35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	33,00	39.400.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												200,00	145,60						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
36	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Persen	100,00	1.537.167.936	100,00	93.054.753	100,00	183.043.233	100,00	151.670.637	100,00	82,86	100,00	244.725.390	-	15,92	Kec. Cijulang	
37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.440,00	13.824.000	10,00	100.000	120,00	1.200.000	120,00	1.200.000	100,00	100,00	130,00	1.300.000	9,03	9,40	Kec. Cijulang	
38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	144,00	336.103.200	2,00	21.927.753	24,00	38.500.000	24,00	25.932.837	100,00	67,36	26,00	47.860.590	18,06	14,24	Kec. Cijulang	
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24,00	1.187.240.736	11,00	71.027.000	12,00	143.343.233	12,00	124.537.800	100,00	86,88	23,00	195.564.800	95,83	16,47	Kec. Cijulang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	84,75						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
40	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	Persen	100,00	524.353.058	100,00	13.926.200	100,00	52.924.372	100,00	38.765.700	100,00	73,25	100,00	52.691.900	-	10,05	Kec. Cijulang	
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32,00	404.959.083	4,00	13.286.200	5,00	37.924.372	5,00	24.940.700	100,00	65,76	9,00	38.226.900	28,13	9,44	Kec. Cijulang	
42	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	84,00	106.655.325	3,00	400.000	10,00	15.000.000	10,00	13.825.000	100,00	92,17	13,00	14.225.000	15,48	13,34	Kec. Cijulang	
43	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6,00	12.738.650	1,00	240.000	-	-	-	-			1,00	240.000	16,67	1,88	Kec. Cijulang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	78,97						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	86,98						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
44	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	1.771.088.543	100,00	91.200.000	100,00	6.600.000	100,00	5.800.000	100,00	87,88	100,00	97.000.000	-	5,48	Kec. Cijulang	
45	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	1.606.008.316	100,00	86.600.000	-	-	-	-			100,00	86.600.000	-	5,39	Kec. Cijulang	
46	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	72,00	1.606.008.316	4,00	86.600.000	-	-	-	-			4,00	86.600.000	5,56	5,39	Kec. Cijulang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
47	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100,00	165.080.227	100,00	4.600.000	100,00	6.600.000	100,00	5.800.000	100,00	87,88	100,00	10.400.000	-	6,30	Kec. Cijulang	
48	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	24,00	165.080.227	10,00	4.600.000	4,00	6.600.000	4,00	5.800.000	100,00	87,88	14,00	10.400.000	58,33	6,30	Kec. Cijulang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	87,88						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	87,88						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
49	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100,00	53.905.644	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	
50	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100,00	53.905.644	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cijulang	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
51	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	42,00	53.905.644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
52	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	%	100,00	32.323.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
53	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	32.323.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
54	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	28,00	32.323.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
55	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	89.866.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
56	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	%	100,00	89.866.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
57	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Dokumen	28,00	89.866.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cijulang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
58	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100,00	558.247.522	100,00	19.080.000	100,00	13.200.000	100,00	11.600.000	100,00	87,88	100,00	30.680.000	-	5,50	Kec. Cijulang	
59	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persen	100,00	558.247.522	100,00	19.080.000	100,00	13.200.000	100,00	11.600.000	100,00	87,88	100,00	30.680.000	-	5,50	Kec. Cijulang	
60	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	27,00	175.875.227	10,00	4.600.000	4,00	6.600.000	4,00	5.800.000	100,00	87,88	14,00	10.400.000	51,85	5,91	Kec. Cijulang	
61	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	6,00	217.292.067	2,00	9.880.000	-	-	-	-	-	-	2,00	9.880.000	33,33	4,55	Kec. Cijulang	
62	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	24,00	165.080.227	10,00	4.600.000	4,00	6.600.000	4,00	5.800.000	100,00	87,88	14,00	10.400.000	58,33	6,30	Kec. Cijulang	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	87,88						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	87,88						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												100,00	87,15						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(T)						
1	KECAMATAN CIMERAK				14.961.037.751		1.040.445.047	100,00	1.487.843.290		1.148.140.276		77,17		2.188.585.323		14,63		
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00	12.550.873.428	100,00	899.271.047	100,00	1.464.406.358	100,00	1.125.354.274	100,00	76,85	100,00	2.024.625.321	100,00	16,13	Kec.Cimerak	
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	317.995.303	100,00	21.000.000	100,00	21.000.000	100,00	19.300.000	100,00	91,90	200,00	40.300.000	200,00	12,67	Kec.Cimerak	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	84,00	265.783.985	14,00	21.000.000	14,00	21.000.000	10,00	19.300.000	71,43	91,90	24,00	40.300.000	28,57	15,16	Kec.Cimerak	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	25,00	36.736.785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	25,00	2.136.785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
7	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	25,00	2.136.785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
8	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	25,00	2.136.785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	25,00	9.064.178	-	-	-	-	-	-	71,43 (S)	91,90 (ST)	-	-	-	-	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												71,43 (S)	91,90 (ST)						
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100,00	8.652.701.174	100,00	743.649.987	100,00	1.012.041.112	54,00	715.663.533	54,00	70,71	154,00	1.459.313.520	154,00	16,87	Kec.Cimerak	
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	66,00	8.256.420.677	11,00	722.649.987	11,00	991.041.112	4,00	694.663.533	36,36	70,09	15,00	1.417.313.520	22,73	17,17	Kec.Cimerak	Anggaran tidak terseerap keseluruhan, jumlah ASN hanya 4orang
12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	300,00	265.783.985	60,00	21.000.000	60,00	21.000.000	50,00	19.300.000	83,33	91,90	110,00	40.300.000	36,67	15,16	Kec.Cimerak	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	15,00	4.578.825	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	5,00	125.917.688	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												59,85 (R)	81,00 (T)						
15	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100,00	248.886.612	100,00	21.000.000	100,00	21.000.000	60,00	21.000.000	60,00	100,00	160,00	42.000.000	160,00	16,88	Kec.Cimerak	
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	60,00	4.102.627	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	305,00	244.783.985	61,00	21.000.000	61,00	21.000.000	60,00	19.300.000	98,36	91,90	121,00	40.300.000	39,67	16,46	Kec.Cimerak	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												98,36 (ST)	91,90 (ST)						
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	%	100,00	321.986.692	100,00	11.600.000	100,00	13.600.000	100,00	12.600.000	100,00	92,65	200,00	24.200.000	200,00	7,52	Kec.Cimerak	
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	130,00	41.209.425	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
20	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	60,00	149.892.415	12,00	11.600.000	12,00	13.600.000	12,00	12.600.000	100,00	92,65	24,00	24.200.000	40,00	16,14	Kec.Cimerak	
21	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	60,00	15.384.852	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
22	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	11,00	115.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00 (ST)	92,65 (ST)						
23	Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	1.215.209.303	100,00	20.157.050	100,00	57.632.632	83,33	36.115.139	83,33	62,66	183,33	56.272.189	183,33	4,63	Kec.Cimerak	
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30,00	28.116.331	5,00	769.000	5,00	2.677.760	4,00	2.677.000	80,00	99,97	9,00	3.446.000	30,00	12,26	Kec.Cimerak	
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	270,00	119.072.908	30,00	8.345.200	45,00	13.157.994	45,00	12.343.000	100,00	93,81	75,00	20.688.200	27,78	17,37	Kec.Cimerak	
26	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24,00	62.609.073	4,00	4.762.850	4,00	4.012.878	4,00	3.348.900	100,00	83,45	8,00	8.111.750	33,33	12,96	Kec.Cimerak	
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36,00	53.417.616	4,00	3.300.000	6,00	3.560.000	4,00	3.324.000	66,67	93,37	8,00	6.624.000	22,22	12,40	Kec.Cimerak	
28	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	25,00	12.210.200	-	-	5,00	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.996,00	939.783.175	181,00	2.980.000	326,00	26.724.000	155,00	17.225.239	47,55	64,46	336,00	20.205.239	16,83	2,15	Kec.Cimerak	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												65,70 (S)	72,51 (S)						
30	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	%	100,00	403.200.000	100,00	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
31	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15,00	220.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12,00	105.500.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
33	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jenis	1,00	77.600.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												- (SR)	- (SR)						
34	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	763.440.300	100,00	37.957.905	100,00	298.792.226	180,00	287.026.669	180,00	96,06	340,00	-	-	-	Kec.Cimerak	
35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.440,00	14.613.832	240,00	450.000	240,00	1.200.000	240,00	1.200.000	100,00	100,00	480,00	1.650.000	28,00	11,29	Kec.Cimerak	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	18,00	275.907.513	3,00	16.245.505	3,00	24.180.000	3,00	14.941.519	100,00	61,79	6,00	31.187.024	12,00	11,30	Kec.Cimerak	
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72,00	472.918.955	12,00	21.262.400	12,00	273.412.226	10,00	270.885.150	83,33	99,08	22,00	292.147.550	12,00	61,78	Kec.Cimerak	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												94,44	86,96						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
38	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100,00	627.454.044	100,00	43.906.105	100,00	40.340.388	24,00	33.648.933	24,00	83,41	124,00	-	124,00	-	Kec.Cimerak	
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12,00	373.124.154	12,00	16.461.105	12,00	32.090.388	10,00	27.728.933	83,33	86,41	12,00	44.190.038	100,00	11,84	Kec.Cimerak	
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	12,00	168.945.275	2,00	25.400.000	-	-	-	-			2,00	-	-	-	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14,00	85.384.615	14,00	2.045.000	14,00	8.250.000	14,00	5.920.000	100,00	71,76	28,00	7.965.000	200,00	9,33	Kec.Cimerak	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												91,67	79,08						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												75,17	74,68						
Predikat Kinerja												(T)	(S)						
42	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	1.859.056.684	100,00	122.400.000	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
43	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	60,00	148.430.694	8,00	122.400.000	-	-	-	-			8,00	122.400.000	13,33	82,46	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
44	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	60,00	148.430.694	8,00	1.200.000	-	-	-	-			8,00	1.200.000	13,33	0,81	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
45	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	%	100,00	1.710.625.990	50,00	121.200.000	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
46	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	72,00	1.710.625.990	6,00	121.200.000	-	-	-	-			6,00	121.200.000	8,33	7,09	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
47	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	%	100,00	23.382.881	100,00	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
48	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	laporan	100,00	23.382.881	100,00	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
49	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	laporan	11,00	23.382.881	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
50	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100,00	46.954.324	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
51	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum	laporan	11,00	46.954.324	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
52	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	11,00	46.954.324	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
#REF!	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	9.157.650	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	
#REF!	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Dokumen	30,00	9.157.650	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
#REF!	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	30,00	9.157.650	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
WREF1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemeintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	471.612.784	100,00	18.774.000	100,00	23.436.932	97,00	22.786.000	97,00	97,22	-	-	-	-	Kec.Cimerak	
WREF1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa	%	100,00	471.612.784	100,00	18.774.000	100,00	23.436.932	2,00	22.786.000	2,00	97,22	-	-	-	-	Kec.Cimerak	
WREF1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	10,00	133.036.234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
		Jumlah desa yang melaksanakan PILKADes serentak (tahun 2022)	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
WREF1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah DURKPDes yang tersusun	Laporan	2,00	212.109.966	2,00	16.186.000	2,00	23.436.932	2,00	22.786.000	100,00	97,22	2,00	38.972.000	2,00	18,37	Kec.Cimerak	
		Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
WREF1	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	8,00	126.466.584	1,00	2.588.000	-	-	-	-	-	-	1,00	2.588.000	12,50	2,05	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
		Jumlah Fasilitas Desa Wisata	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec.Cimerak	Rasionalisasi Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	97,22						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												2,00	97,22						
Predikat Kinerja												(SR)	(ST)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												65,67	58,02						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(S)	(R)						
1	KECAMATAN CIGUGUR				10.594.793.521		1.467.422.964		1.443.248.888		1.331.739.005		92,27		2.823.230.244		26,65		
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	persen	100,00	9.436.003.803	100,00	1.320.139.964	100,00	1.432.168.888	100,00	1.320.672.005	100,00	92,21	100,00	2.664.880.244	100,00	28,24	Kec. Cigugur	
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	persen																
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	persen																
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	persen																
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	persen	100,00	258.402.500	100,00	29.900.000	100,00	22.700.000	100,00	20.150.000	100,00	88,77	200,00	50.900.000	200,00	19,70	Kec. Cigugur	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24,00	242.547.000	7,00	28.400.000	14,00	22.700.000	14,00	20.150.000	100,00	88,77	21,00	49.400.000	66,67	20,37	Kec. Cigugur	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5,00	1.802.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5,00	1.802.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
7	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	5,00	1.802.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
8	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5,00	1.802.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
9	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17,00	8.647.500	4,00	1.500.000	-	-	-	-	-	-	4,00	1.500.000	23,53	17,35	Kec. Cigugur	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	88,77						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	persen	100,00	7.331.630.056	100,00	896.815.162	12,00	1.159.238.745	12,00	1.121.820.023	100,00	96,77	112,00	2.053.746.752	112,00	28,01	Kec. Cigugur	
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	Orang/bulan	56,00	7.080.112.056	12,00	865.425.162	11,00	1.136.538.745	11,00	1.101.670.023	100,00	96,93	23,00	2.001.356.752	41,07	28,27	Kec. Cigugur	
12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	264,00	221.898.500	24,00	28.400.000	1,00	22.700.000	1,00	20.150.000	100,00	88,77	25,00	49.400.000	9,47	22,26	Kec. Cigugur	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Laporan	9,00	20.152.000	4,00	2.990.000	-	-	-	-	-	-	4,00	2.990.000	44,44	14,84	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	5,00	9.467.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	92,85						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
15	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat D	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	persen	100,00	181.980.000	100,00	28.400.000	1,00	22.700.000	1,00	20.150.000	100,00	88,77	102,00	49.400.000	102,00	27,15	Kec. Cigugur	
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	laporan	60,00	1.802.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dikelola	Laporan	61,00	180.178.000	12,00	28.400.000	1,00	22.700.000	1,00	20.150.000	100,00	88,77	103,00	49.400.000	24,59	27,42	Kec. Cigugur	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	88,77						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	persen	100,00	201.450.000	100,00	14.800.000	24,00	13.600.000	24,00	12.100.000	100,00	88,97	109,00	27.400.000	109,00	13,60	Kec. Cigugur	
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Paket	2,00	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
20	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	Dokumen	61,00	133.800.000	12,00	14.800.000	24,00	13.600.000	24,00	12.100.000	100,00	88,97	21,00	27.400.000	34,42	20,48	Kec. Cigugur	

No	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
21	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	60,00	7.650.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
22	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	55,00	50.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	88,97						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
23	Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	persen	100,00	496.963.091	100,00	226.563.200	100,00	72.607.363	57,69	38.609.050	57,69	53,18	141,00	255.340.750	141,00	51,38	Kec. Cigugur	
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	5,00	13.415.884	1,00	580.000	2,00	4.184.000	2,00	3.268.000	100,00	78,11	3,00	3.848.000	60,00	28,68	Kec. Cigugur	
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Paket	1,00	246.583.732	1,00	214.783.200	20,00	32.963.363	20,00	18.992.500	100,00	57,62	10,00	233.775.700	1.000,00	94,81	Kec. Cigugur	
26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	15,00	23.920.475	1,00	2.540.000	3,00	4.220.000	4,00	2.599.750	133,33	61,61	5,00	5.139.750	33,33	21,49	Kec. Cigugur	
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	240,00	24.095.000	2,00	6.460.000	3,00	4.110.000	4,00	4.110.000	133,33	100,00	6,00	10.570.000	2,50	43,87	Kec. Cigugur	
28	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1,00	10.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Laporan	475,00	178.948.000	100,00	2.200.000	95,00	27.130.000	30,00	9.638.800	31,58	35,53	130,00	11.838.800	27,37	6,62	Kec. Cigugur	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												99,65	66,57						
Predikat Kinerja												(ST)	(SR)						
30	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	persen	100,00	96.426.475	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
31	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	2,00	54.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang diadkan	Unit	8,00	37.426.475	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
33	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Unit	1,00	5.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
34	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	persen	100,00	771.517.335	100,00	102.695.906	100,00	90.560.000	68,18	76.328.684	68,18	84,29	275,00	180.505.798	275,00	23,40	Kec. Cigugur	
35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Laporan	60,00	11.178.000	12,00	770.000	170,00	1.360.000	110,00	860.000	64,71	63,24	122,00	1.770.000	203,33	15,83	Kec. Cigugur	
36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik disediakan	Laporan	120,00	146.793.000	2,00	19.285.906	2,00	27.000.000	2,00	18.968.684	100,00	70,25	4,00	38.495.798	3,33	26,22	Kec. Cigugur	
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	Laporan	240,00	613.546.335	12,00	82.640.000	4,00	62.200.000	4,00	56.500.000	100,00	90,84	16,00	140.240.000	6,67	22,86	Kec. Cigugur	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												88,24	79,09						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
38	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	persen	100,00	97.634.346	100,00	20.965.696	8,00	50.762.780	6,00	31.514.248	75,00	62,08	115,00	47.586.944	115,00	48,74	Kec. Cigugur	
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	25,00	56.004.346	5,00	15.134.596	5,00	38.762.780	5,00	30.014.248	100,00	77,43	20,00	40.255.844	80,00	71,88	Kec. Cigugur	
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajakdan Perisinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	6,00	3.500.000	5,00	771.100	-	-	-	-			5,00	771.100	83,33	22,03	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/ dir ehabilitasi	Unit	62,00	32.300.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
42	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya yang dikelola	Unit	5,00	5.830.000	3,00	5.060.000	3,00	12.000.000	1,00	1.500.000	33,33	12,50	3,00	6.560.000	60,00	112,52	Kec. Cigugur	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												66,67	44,97						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												75,11	70,35						
Predikat Kinerja												(T)	(S)						
43	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persen	100,00	562.405.000	100,00	128.000.000	-	-	-	-			100,00	128.000.000	100,00	22,76	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
44	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persen	100,00	562.405.000	100,00	128.000.000	-	-	-	-			100,00	128.000.000	100,00	22,76	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
45	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Laporan	60,00	66.750.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
46	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	persen	100,00	495.655.000	100,00	128.000.000	-	-	-	-			100,00	128.000.000	-	-	Kec. Cigugur	Refocusing Anggaran

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
47	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah koordinasi pemerintahan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait yang di selenggarakan	Laporan	60,00	495.655.000	5,00	128.000.000	-	-	-	-			5,00	128.000.000	8,33	25,82	Kec. Cigugur	Refocushing Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100,00	73.293.850	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocushing Anggaran
49	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persen	100,00	73.293.850	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocushing Anggaran
50	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di monitoring pelaksanaan musenbangnya	Lembaga	105,00	24.293.850	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocushing Anggaran
51	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	39,00	49.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocushing Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
52	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persen	100,00	21.457.850	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocushing Anggaran
53	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100,00	21.457.850	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocushing Anggaran
54	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan harmonisasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	60,00	21.457.850	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocushing Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
55	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persen	100,00	17.704.790	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocushing Anggaran
56	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	persen	100,00	17.704.790	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocushing Anggaran
57	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen verifikasi bantuan keuangan Desa	Dokumen	35,00	17.704.790	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocushing Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
58	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemeintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemeintahan Desa	persen	100,00	483.928.228	100,00	19.283.000	100,00	11.080.000	100,00	11.067.000	100,00	99,88	100,00	30.350.000	100,00	6,27	Kec. Cigugur	
59	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa	persen	100,00	483.928.228	100,00	19.283.000	100,00	11.080.000	100,00	11.067.000	100,00	99,88	100,00	30.350.000	100,00	6,27	Kec. Cigugur	
60	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	35,00	143.566.300	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	
61	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah DURKPDs yang tersusun	Dokumen	5,00	256.795.628	1,00	19.283.000	2,00	11.080.000	2,00	11.067.000	100,00	99,88	3,00	30.350.000	60,00	11,82	Kec. Cigugur	
62	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pembangunan desa wisata	Laporan	35,00	83.566.300	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Cigugur	Refocushing Anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	99,88						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												100,00	99,88						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)												100,00	96,05						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM												(ST)	(ST)						
1	KECAMATAN LANGKAPLANCAR			100,00	16.391.944.484	88,00	1.582.100.289	100,00	1.453.633.190		1.189.228.363		81,81		2.771.328.652		16,91		
2	UNSUR KEWILAYAHAN			100,00	16.391.944.484	88,00	1.582.100.289	100,00	1.453.633.190		1.189.228.363		81,81		2.771.328.652		16,91		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00	15.220.790.059	91,00	1.262.800.289	100,00	1.453.633.190	100,00	1.189.228.363	100,00	81,81	116,11	2.452.028.652	116,11	16,11	Kec. Langkaplancar	
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100,00	269.804.775	92,00	19.825.000	100,00	26.100.000	100,00	23.550.000	100,00	90,23	192,00	43.375.000	116,29	16,08	Kec. Langkaplancar	

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Rentra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	14,00	182.174.640	6,00	21.000.000	12,00	26.100.000	12,00	23.550.000	100,00	90,23	18,00	44.550.000	128,57	24,45	Kec. Langkaplancar	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5,00	33.600.000	5,00	33.600.000	5,00	-	-	-			5,00	33.600.000	100,00	100,00	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6,00	7.631.375	1,00	-	-	-	-	-			1,00	-	16,67	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
8	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6,00	7.631.375	1,00	-	-	-	-	-			1,00	-	16,67	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
9	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen dan Penyusunan DPA-SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	6,00	7.631.375	1,00	-	-	-	-	-			1,00	-	16,67	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
10	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD yang dilaksanakan	Dokumen	6,00	7.631.375	1,00	-	-	-	-	-			1,00	-	16,67	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan	Laporan	15,00	23.504.635	15,00	-	-	-	-	-			15,00	-	100,00	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	90,23						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100,00	12.058.981.459	90,00	1.074.500.584	100,00	1.146.870.940	100,00	948.212.463	100,00	82,68	95,00	2.022.713.047	95,00	16,77		
13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat fasilitas penyediaan gaji dan tunjangan	Orang	7,00	11.608.945.557	7,00	1.076.629.603	10,00	1.120.770.940	10,00	924.662.463	100,00	82,50	8,50	2.001.292.066	121,43	17,24	Kec. Langkaplancar	
14	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60,00	188.279.740	23,00	21.000.000	12,00	26.100.000	12,00	23.550.000	100,00	90,23	37,00	44.550.000	61,67	23,66	Kec. Langkaplancar	
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dilaksanakan	Laporan	1,00	115.233.762	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Laporan	1,00	146.522.400	1,00	-	1,00	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	86,37						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
17	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	Jenis, Unit/Buah	61 dan 170	179.489.940	84,00	17.840.000		26.100.000	12,00	23.550.000		90,23	18,00	41.390.000	4,12	23,06		
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan	Laporan	12,00	12.210.200	-	-	12,00	-	0	-			-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	72,00	167.279.740	-	-	12,00	26.100.000	12,00	23.550.000	100,00	90,23	12,00	23.550.000	4,12	14,08	Kec. Langkaplancar	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	90,23						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	413.437.372	54,00	7.090.000	100,00	15.600.000	100,00	14.100.000	100,00	90,38	15,00	21.190.000	62,50	5,13		
21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Paket	100,00	42.735.700	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	
22	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	Dokumen	60,00	142.370.932	-	-	12,00	15.600.000	12,00	14.100.000	100,00	90,38	12,00	14.100.000	20,00	9,90	Kec. Langkaplancar	
23	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	60,00	14.652.240	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	11,00	213.678.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												100,00	90,38						
Predikat Kinerja												(ST)	(ST)						
25	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	379.004.670	99,00	36.691.211	100,00	41.386.250	78,75	10.630.000	78,75	25,68	88,88	47.321.211	88,88	12,49		
26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	2,00	162.259.700	2,00	21.842.400	2,00	22.620.000	-	-	-	-	57,00	21.842.400	96,55	13,46	Kec. Langkaplancar	
27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	Jenis	30,00	122.496.020	30,00	11.373.811	45,00	18.136.750	30,00	9.246.000	66,67	50,98	60,00	20.619.811	200,00	16,83	Kec. Langkaplancar	
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	195,00	54.532.840	45,00	1.250.000	30,00	29.500	30,00	784.000	100,00	2.657,63	75,00	2.034.000	38,46	3,73	Kec. Langkaplancar	
29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	2,00	24.453.360	2,00	2.225.000	3,00	600.000	3,00	600.000	100,00	100,00	2,50	2.825.000	125,00	11,55	Kec. Langkaplancar	
30	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Bahan / Material yang disediakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kegiatan	90,00	15.262.750	4,00	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												66,67	702,15						
Predikat Kinerja												(S)	(ST)						
32	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100,00	384.621.300	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
33	Pengadaan Meubel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	16,00	125.154.550	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
34	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	7,00	183.153.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%		
35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpenuhi	Unit	1,00	76.313.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
36	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	860.256.764	100,00	112.028.705	100,00	111.405.000	194,34	105.377.000	194,34	94,59	41,20	217.405.705	69,85	25,27		
37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Buah	1.650,00	10.657.650	240,00	1.500.000	250,00	1.500.000	500,00	850.000	200,00	56,67	740,00	2.350.000	44,85	22,05	Kec. Langkaplancar	
38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	Rekening	3,00	109.525.494	-	-	3,00	23.505.000	3,00	17.202.000	100,00	73,18	15,00	17.202.000	12,50	15,71	Kec. Langkaplancar	
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12,00	740.073.620	12,00	92.050.000	12,00	86.400.000	12,00	87.325.000	100,00	101,07	15,00	179.375.000	12,50	24,24	Kec. Langkaplancar	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												133,33	76,97						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
40	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100,00	675.193.779	-	-	100,00	86.171.000	37,50	63.808.900	37,50	74,05	37,50	63.808.900	37,50	9,45		
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Unit	7,00	228.025.485	-	-	7,00	41.750.000	2,00	29.488.900	28,57	70,63	2,00	29.488.900	28,57	12,93	Kec. Langkaplancar	
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Unit	7,00	18.901.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	
43	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	Unit	20,00	91.576.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
44	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	1,00	336.690.394	-	-	1,00	44.421.000	1,00	37.320.000	100,00	84,01	1,00	37.320.000	100,00	11,08	Kec. Langkaplancar	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												64,29	77,32						
Predikat Kinerja												(R)	(T)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												101,76	78,26						
Predikat Kinerja												(ST)	(T)						
45	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	685.261.200	52,00	315.000.000	-	-	-	-	-	-	52,00	315.000.000	-	45,97		
46	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100,00	685.261.200	52,00	315.000.000	-	-	-	-	-	-	52,00	315.000.000	-	45,97	Kec. Langkaplancar	
47	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Kali	15,00	73.261.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
48	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12,00	612.000.000	12,00	315.000.000	-	-	-	-	-	-	12,00	315.000.000	100,00	51,47	Kec. Langkaplancar	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
49	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	100,00	24.396.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100,00	24.396.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	
51	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di monitoring pelaksanaan musrenbangnya	Desa	15,00	24.396.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
52	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	%	100,00	18.315.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum	Kali	15,00	18.315.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	
54	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan harmonisasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Desa	5,00	18.315.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)												-	-						
Predikat Kinerja												(SR)	(SR)						
55	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100,00	22.894.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
56	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kali	15,00	22.894.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	
57	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen verifikasi bantuan keuangan Desa	Dokumen	30,00	22.894.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Program kegiatan pada Perubahan Renja PD 2022)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)		Target Renstra PD Tahun 2021-2026		Realisasi capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2022 (Tahun berjalan) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
		Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	%	Kinerja	Rp	Kinerja	%				
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		-	-								
										Predikat Kinerja		(SR)	(SR)								
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)		-	-								
										Predikat Kinerja		(SR)	(SR)								
58	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	420.287.150	100,00	4.300.000	-	-	-	-			-	4.300.000	-	1,02				
59	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa	%	100,00	420.287.150	100,00	4.300.000	-	-	-	-			-	4.300.000	-	1,02	Kec. Langkaplancar			
60	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Kali	15,00	91.576.500	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran		
61		Jumlah desa yang melaksanakan PILKADes serentak (tahun 2022)	Desa	15,00	10.000.000	1,00	4.300.000	-	-	-	-			-	4.300.000	-	43,00	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran		
62	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah DURKPDes yang tersusun	Dokumen	15,00	9.157.650	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran		
63		Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	Kegiatan	2,00	187.453.000	2,00	-	-	-	-	-			2,00	-	100,00	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran		
64	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pembangunan desa wisata	Kali	15,00	122.100.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran		
65		Jumlah Fasilitasi Desa Wisata	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	Kec. Langkaplancar	Kegiatan tidak terealisasi karena adanya refocusing anggaran		
										Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		-	-								
										Predikat Kinerja		(SR)	(SR)								
										Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)		-	-								
										Predikat Kinerja		(SR)	(SR)								
										RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (%)		100,00	81,81								
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		(ST)	(T)								
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :																				1. Adanya komitmen yang tinggi dari aparatur pelaksana kegiatan dan pemahaman terhadap tugas dan fungsinya, sehingga dapat melaksanakan kegiatan sesuai target kinerja;	
																				2. Adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur pelaksana kegiatan;	
																				3. Adanya kerja sama yang baik antar stakeholder;	
																				4. Adanya kegiatan evaluasi internal di SKPD secara berkala;	
																				5. Ketersediaan dana tepat waktu;	
																				6. Adanya bantuan pendanaan di luar APBD;	
																				7. Adanya inovasi penunjang capaian kinerja.	
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				1. Adanya perubahan SOTK sesuai Perbup Nomor 70 tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi serta tata kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;	
																				2. Kurangnya kuantitas SDM di beberapa Perangkat Daerah;	
																				3. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai;	
																				4. Untuk beberapa urusan pilihan seperti perikanan dan pertanian terdapat indikator yang capaian kinerjanya rendah karena dipengaruhi oleh faktor eksternal (cuaca, iklim, dan suhu) yang tidak menentu;	
																				5. Belum optimalnya fungsi pengendalian dan evaluasi di tiap Perangkat Daerah;	
																				6. Adanya perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk penanganan kemiskinan ekstrim dan pemulihan paska pandemi covid 19 yang mengakibatkan harus dilakukan perubahan proporsi anggaran belanja.	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				-	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya :																				Meningkatkan koordinasi dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap program kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.	

LAMPIRAN II

Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2024

LAMPIRAN II
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA						1,303,129,428,217							487,618,517,000	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,110,348,553,759							457,394,648,000	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1,110,348,553,759							457,394,648,000	
1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	95% 95% 85% 96%			93 % 83 % 93 % 94 %	277,534,593,699						95% 95% 85% 96%	313,739,038,000	
	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	95%			93 % 93 % 94 % 93 %	759,109,800						95%	826,850,000	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	76,550,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		88,200,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15,999,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		16,500,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	16,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		16,500,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	646,960,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		702,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3,600,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		3,650,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%			98 %	271,940,627,027					-	100%	280,839,780,000	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2800 Orang/bulan	271,803,013,420	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		280,700,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	27,379,752	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		27,680,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	75,791,560	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		76,100,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	15,590,580	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		15,900,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional					Daerah				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,583,940	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		5,900,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	1	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	6,573,775	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		6,900,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	5,095,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		5,400,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1,599,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		1,900,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	322unit/jenis			322 jenis	425,138,090					-	322unit/jenis	515,380,000				
	1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	76,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		76,500,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	6,448,090	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		93,180,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	1	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	11,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		11,500,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,190,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		2,700,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		3,500,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	3,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		3,500,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	300,900,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		301,500,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	1	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	25,600,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		26,500,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%			98 %	672,223,870					-	100%	730,863,000				
	1	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	8,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		8,500,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	67,511,070	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		114,700,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	51,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		51,500,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	142,100,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		144,100,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	141,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		141,500,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	01	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		25 Orang	21,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		21,500,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100 Orang	47,027,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		47,528,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		260 Orang	68,084,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		70,900,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		30 Orang	126,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		130,635,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	98 %	945,041,808				-	100%	1,037,655,750				
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	21,193,596	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		21,300,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	138,247,350	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		206,800,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	8,800,950	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		27,600,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	139,180,330	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		139,400,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	34,879,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		34,980,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	2,899,440	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		3,075,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		2 Laporan	50,700,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		53,250,750	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	434,441,932	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		436,050,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	91,710,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		91,980,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	22,988,310	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		23,220,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	98 %	934,585,760				-	100%	1,088,400,000				
1	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	326,775,332	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		343,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		203 Unit	179,975,977	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		182,550,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	380,818,818	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		382,100,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	39,700,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		168,750,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	7,315,633	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		12,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%		98 %	1,365,686,372					-	100%	27,746,610,000	
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	17,738,820	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		18,750,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	241,000,945	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		26,501,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	36,146,607	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		37,660,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,070,800,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		1,189,200,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%		98 %	492,180,972					-	100%	953,499,250	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				34 Unit	98,735,606	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		98,950,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		53,100,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
					Jumlah Mebel yang Dipelihara				8 Unit	5,115,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		5,400,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	33,600,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		69,349,250	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				320 Unit	81,250,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		500,600,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud													
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				320 Unit	44,250,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		45,600,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	100,347,807	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		100,600,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	10,722,559	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		11,100,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	15,360,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		15,600,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
						Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				3 Ha	52,800,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		53,200,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Dan Pasca Pandemi Persentase Layanan Pendidikan Non Formal Dan Informal Persentase Pemenuhan SPM Pendidikan Persentase Tingkat Budi Pekerti Peserta Didik	100% 88% 96% 100%		93 % 84 % 100 % 90 %	828,041,554,252						100% 88% 96% 100%	138,764,610,000		
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah satuan pendidikan SD yang dikelola	285sekolah		285 sekolah	488,853,435,586					-		285sekolah	66,360,000,000	
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	180,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	80,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		90,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	180,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	130,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		150,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	190,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	190,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	190,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				284 Paket	423,013,442,525	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		150,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				31800 Peserta Didik	3,549,999,725	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		3,550,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	149,999,880	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		150,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				33710 Peserta Didik	10,649,999,990	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		10,700,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				15996 Orang	16,799,999,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		16,850,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				282 Satuan Pendidikan	7,549,996,228	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		7,600,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				287 Satuan Pendidikan	115,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		120,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				30438 Orang	15,999,999,670	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		16,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	349,999,724	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		400,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				31.337 Paket	6,649,998,159	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		6,700,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	210,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		220,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik													
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				10 Satuan Pendidikan	114,999,975	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		120,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	2,360,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		2,360,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidikan SMP yang dikelola	53sekolah		53 sekolah	241,645,577,545					-	53sekolah	44,320,000,000	
	1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	370,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		380,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	170,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		180,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah													
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	370,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		380,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium													
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	420,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		430,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				8 Unit	1,670,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		1,670,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
						Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	240,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		250,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	60,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		75,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1										8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	150,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		170,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	280,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		290,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	85,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		100,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				53 Paket	196,576,657,769	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				13545 Peserta Didik	2,430,024,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		2,600,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	179,974,920	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		200,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				12501 Peserta Didik	8,149,971,483	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		8,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				9859 Orang	11,798,355,640	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		10,810,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				54 Satuan Pendidikan	2,662,489,848	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		6,700,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				54 Satuan Pendidikan	115,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		120,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				11244 Orang	10,000,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				54 Dokumen	102,509,980	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		125,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				54 Satuan Pendidikan	639,999,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		660,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	370,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		380,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				14100 Paket	4,565,594,105	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		5,150,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	240,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		250,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional	Daerah					
1																				
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah pendidikan PAUD yang dikelola Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	263lembaga			262 lembaga 262 Lembaga	83,444,342,051				-	263lembaga	13,747,000,000		
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	30,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD														
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD														
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				100 Paket	14,999,999,959	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	0	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD					8225 Peserta Didik	599,999,920	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD														
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				100 Paket	54,703,899,840	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	0	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				8225 Peserta Didik	200,999,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	201,500,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				12499 Orang	8,506,999,920	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	8,277,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				262 Satuan Pendidikan	268,943,303	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	279,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
							Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				262 Orang	109,999,734	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	115,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	1,400,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik														
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				5 Peserta didik	73,499,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	74,500,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				8275 Paket	2,449,999,775	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	2,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidikan non formal/kesetaraan yang dikelola	13lembaga			12 lembaga	14,098,199,070					-	13lembaga	14,337,610,000	
	1	01	02	2.04	0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	2,000,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	2,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				870 Peserta Didik	529,999,976	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	535,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				7000 Orang	9,250,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		9,300,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				322 Orang	599,999,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		650,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				4 Satuan Pendidikan	679,999,950	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		725,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				15 Orang	109,999,724	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		115,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik														
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				20 Peserta Didik	588,199,780	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		642,610,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar				2000 Peserta Didik	339,999,840	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		370,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
3	1	01	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Standar Isi	60%			54 %	1,962,636,028						60%	2,018,000,000	
	1	01	03	2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	persentase dokumen kurikulum yang dibuat	60% 60%			58 %	999,636,280					persentase dokumen kurikulum yang dibuat	60% 60%	1,020,000,000	
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
						Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	169,700,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	persentase dokumen kurikulum yang dibuat		175,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
						Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				1000 Buku	509,936,280	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	persentase dokumen kurikulum yang dibuat		515,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
						Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				100 Orang	210,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	persentase dokumen kurikulum yang dibuat		215,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	110,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	persentase dokumen kurikulum yang dibuat		115,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	01	03	2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	persentase dokumen kurikulum yang dibuat	60% 60%			56 %	962,999,748					-	60% 60%	998,000,000	
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
						Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	198,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		213,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
						Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				10942 Buku	594,999,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		605,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
						Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	169,999,848	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		180,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah							
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
4	1	01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	0%			56 %	2,358,000,000						0%	2,358,000,000				
	1	01	04	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan persentase PTK berkompeten	52% 0%			0 % 0 %	2,358,000,000					persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	0% 0%	2,358,000,000				
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	2,358,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	persentase Capaian Standar Nasional Pendidikan Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		2,358,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
5	1	01	06		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	persentase Layanan Literasi Siswa	65%			63 %	451,769,780						65%	515,000,000				
	1	01	06	2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase Layanan Literasi Sowa persentase layanan yang dilakukan	65% 65%			64 % 63 %	451,769,780					-	65% 65%	515,000,000				
	1	01	06	2.01	0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota																
						Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi				4050 Buku	152,969,780	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		215,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
	1	01	06	2.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				2150 Peserta Didik	214,250,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		215,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
	1	01	06	2.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun				1 Dokumen	84,550,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		85,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						192,780,874,458							30,223,869,000				
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						192,780,874,458							30,223,869,000				
6	2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase pembinaan wirausaha muda dan Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan	80%			80 %	180,177,512,148						80%	16,477,250,000				
	2	19	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda Yang mengikuti pembinaan	80%			80 %	179,117,250,698					-	80%	15,405,250,000				
	2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula																
						Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				203 Orang	399,955,848	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		475,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
	2	19	02	2.01	0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan																
						Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				3060 Orang	12,118,240,750	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		14,306,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
	2	19	02	2.01	0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional	Daerah					
1																				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	59,999,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	65,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	02	2.01	0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan				4 Unit	166,429,294,750	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	439,250,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda															
						Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				20 Orang	109,759,450	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2	19	02	2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentasi peserta yang mengikuti kegiatan	80%			80 %	1,060,261,450					-	80%	1,072,000,000		
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1,060,261,450	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	1,072,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
7	2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	80%			80 %	12,483,362,310						80%	13,616,619,000		
	2	19	03	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase peralatan yang disediakan	80%			80 %	2,702,100,000					-	80%	2,899,619,000		
2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				8 Unit	2,702,100,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	2,899,619,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2	19	03	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase jumlah peserta yang mengikuti partisipasi dalam penyelenggaraan	80%			80 %	3,262,625,000					-	80%	3,315,000,000		
2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1,025,125,000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	1,047,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Kelikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan															
						Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				24 Orang	2,237,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	2,268,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
	2	19	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	persentase juara yang diraih	80%			80 %	1,545,332,310					-	80%	2,332,000,000		
2	19	03	2.03	0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)															
						Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				100 Pelatda	197,426,750	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	910,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota															
						Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				4 Orang	188,476,560	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	202,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	03	2.03	0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota															
						Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				7 Orang	1,095,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	1,150,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
2	19	03	2.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga															
						Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	64,429,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2																
2	19	03	2.04				80 %	2,719,325,000					-		80%	2,790,000,000	
2	19	03	2.04	0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan												
							1 Dokumen	119,325,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		140,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	03	2.04	0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan												
							2 Organisasi	2,600,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		2,650,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	03	2.05				80 %	2,253,980,000					-		80%	2,280,000,000	
2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi												
							1 Dokumen	125,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		140,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi												
							11 Unit	2,128,980,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		2,140,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
8	2	19	04				80 %	120,000,000							80%	130,000,000	
	2	19	04	2.01			1 organisasi 80 %	120,000,000					-		1 organisasi	130,000,000	
2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan												
							1 Organisasi	120,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		130,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
					DINAS KESEHATAN											313,473,315,571	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											313,473,315,571	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											313,473,315,571	
9	1	02	01														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	32,500,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		32,500,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%		100 %	348,000,000					-	100%	348,000,000		
	1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	348,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		348,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah	100%		100 %	865,000,000					-	100%	865,000,000		
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		100,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	300,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		300,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	50,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		50,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				14 Dokumen	15,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		15,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	400,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		400,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%		90 %	14,944,000,000					-	90%	14,944,000,000		
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				22 Unit	3,110,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		3,110,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	1,000,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		1,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				70 Unit	2,000,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		2,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	8,000,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		8,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	484,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		484,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	350,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		350,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%		90 %	4,622,000,000					-	90%	4,701,000,000		
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		12,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1,910,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		1,989,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional			Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2,700,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		2,700,000,000	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%			90 %	793,000,000					-	90%	793,000,000					
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	297,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		297,000,000	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				67 Unit	56,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		56,000,000	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	440,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		440,000,000	DINAS KESEHATAN				
10	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sistem informasi yang dikelola Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang terpenuhi	90% 90% 90%			90 % 90 % 90 %	221,685,887,831						90% 90% 90%	208,210,815,571					
	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			90 %	105,385,072,260					-	-	89,300,000,000					
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas																	
						Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	18,000,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Selasari Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Jadikarya Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		18,000,000,000	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	7,085,072,260	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		5,000,000,000	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas																	
						Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				3 Unit	1,000,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		1,000,000,000	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
						Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				16 Unit	5,000,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		3,500,000,000	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																	
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				4 Unit	3,150,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		3,150,000,000	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
						Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Unit	1,000,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		1,000,000,000	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional			Daerah			
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											75633 Orang	330,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		330,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
											116524 Orang	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		300,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
											4147 Orang	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		300,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
											576 Orang	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		300,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
											4627 Orang	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		300,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
											7625 Orang	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		300,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
											1 Dokumen	2,200,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		2,200,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
											1 Dokumen	110,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		110,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
											6 Dokumen	3,960,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		3,960,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
											1 Dokumen	1,430,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		1,430,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				7 Dokumen	1,250,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		1,250,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				15 Dokumen	1,550,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		1,550,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	284,350,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		284,350,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1,430,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		1,430,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				75 Orang	370,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		370,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	242,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		242,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	2,970,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		2,970,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	77,260,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		81,000,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	110,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		110,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		300,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				36 Unit	520,290,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		520,290,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	10,330,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		10,000,000,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota															
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				2 Unit	500,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	500,000,000	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	220,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	220,000,000	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah															
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	55,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	55,000,000	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)															
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				16 Unit	1,100,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kertayasa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	1,100,000,000	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	-		90 %	1,195,000,000				Pegawai Dinas Kesehatan	-	395,000,000				
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1,195,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	Pegawai Dinas Kesehatan	395,000,000	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		90 %	392,000,000				Pegawai Dinas Kesehatan	-	392,000,000				
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya															
						Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	34,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	Pegawai Dinas Kesehatan	34,000,000	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				16 Unit	66,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	Pegawai Dinas Kesehatan	66,000,000	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan															
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				4 Unit	220,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	Pegawai Dinas Kesehatan	220,000,000	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan															
						Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	72,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	Pegawai Dinas Kesehatan	72,000,000	DINAS KESEHATAN			
11	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%		90 %	5,858,400,000					90%	5,858,400,000				
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	90%		90 %	302,000,000				Pegawai Dinas Kesehatan	90%	302,000,000				
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				242 Dokumen	242,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	Pegawai Dinas Kesehatan	242,000,000	DINAS KESEHATAN			
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	60,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	Pegawai Dinas Kesehatan	60,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%			90 %	5,056,400,000					-	90%	5,056,400,000	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	56,400,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	56,400,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	5,000,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	5,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90%			90 %	500,000,000					-	90%	500,000,000	
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				268 Orang	500,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	500,000,000	DINAS KESEHATAN	
12	1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase farmasi, alat kesehatan yang terpenuhi	90%			90 %	1,420,000,000						90%	820,000,000	
	1	02	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90%			90 %	600,000,000					-	90%	200,000,000	
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				12 Dokumen	600,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	200,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	90%			90 %	20,000,000					-	90%	20,000,000	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	20,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	02	04	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	90%			90 %	200,000,000					-	90%	200,000,000	
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah						
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		200,000,000	DINAS KESEHATAN		
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	90%		90 %	200,000,000					-	90%	200,000,000			
1 02 04 2.05 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																					
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		200,000,000	DINAS KESEHATAN		
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	90%		90 %	400,000,000					-	90%	200,000,000			
1 02 04 2.06 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																					
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				75 Unit	400,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		200,000,000	DINAS KESEHATAN		
13	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	90% 90%		90 %	652,600,000						90% 90%	652,600,000			
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		90 %	182,600,000					-	-	182,600,000			
1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																					
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	182,600,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		182,600,000	DINAS KESEHATAN		
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		90 %	140,000,000					-	-	140,000,000			
1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																					
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	140,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		140,000,000	DINAS KESEHATAN		
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90%		90 %	330,000,000					-	90%	330,000,000			
1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																					
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	330,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		330,000,000	DINAS KESEHATAN		
											4,125,700,000										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										4,125,700,000										
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										4,125,700,000									
14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90% 90% 90% 90%		90 %	3,738,000,000						90% 90% 90% 90%	3,098,000,000			
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%		90 %	98,000,000					-	90%	98,000,000			
1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							2 Laporan	98,000,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangpawitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		98,000,000	PUSKESMAS PADAHERANG
	1 02 01 2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%		100 %	3,640,000,000					-	100%	3,000,000,000	
	1 02 01 2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	3,640,000,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangpawitan	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		3,000,000,000	PUSKESMAS PADAHERANG
15	1 02 03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%		90 %	387,700,000						90%	572,400,000	
	1 02 03 2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%		90 %	387,700,000					-	90%	572,400,000	
	1 02 03 2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			54 Orang	387,700,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Karangpawitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		572,400,000	PUSKESMAS PADAHERANG
			PUSKESMAS SINDANGWANGI						1,853,500,000						1,773,500,000	
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,853,500,000						1,773,500,000	
	1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,853,500,000						1,773,500,000	
16	1 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90% 90% 90% 90%		90 %	1,630,000,000						90% 90% 90% 90%	1,550,000,000	
	1 02 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%		90 %	50,000,000					-	90%	50,000,000	
	1 02 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	50,000,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Sindangwangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		50,000,000	PUSKESMAS SINDANGWANGI
	1 02 01 2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%		100 %	1,580,000,000					-	100%	1,500,000,000	
	1 02 01 2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1,580,000,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Sindangwangi	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		1,500,000,000	PUSKESMAS SINDANGWANGI
17	1 02 03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%		90 %	223,500,000						90%	223,500,000	
	1 02 03 2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%		90 %	223,500,000					-	90%	223,500,000	
	1 02 03 2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			32 Orang	223,500,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Sindangwangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		223,500,000	PUSKESMAS SINDANGWANGI
			PUSKESMAS MANGUNJAYA						3,215,600,000						2,345,600,000	
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,215,600,000						2,345,600,000	
	1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,215,600,000						2,345,600,000	
18	1 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90% 90% 90% 90%		90 %	2,923,000,000						90% 90% 90% 90%	2,053,000,000	
	1 02 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dsaerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%		90 %	53,000,000					-	90%	53,000,000	
	1 02 01 2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	53,000,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		53,000,000	PUSKESMAS MANGUNJAYA
	1 02 01 2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%		100 %	2,870,000,000					-	100%	2,000,000,000	
	1 02 01 2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	2,870,000,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		2,000,000,000	PUSKESMAS MANGUNJAYA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah				
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%			90 %	292,600,000						90%	292,600,000	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%			90 %	292,600,000			-			90%	292,600,000	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				42 Orang	292,600,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		292,600,000	PUSKESMAS MANGUNJAYA
						PUSKESMAS KALIPUCANG					4,051,700,000							3,371,700,000	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,051,700,000							3,371,700,000	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4,051,700,000							3,371,700,000	
20	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90% 90% 90%			90 %	3,557,000,000						90% 90% 90%	2,877,000,000	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%			90 %	77,000,000					-	90%	77,000,000	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	77,000,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Kalipucang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		77,000,000	PUSKESMAS KALIPUCANG
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%			100 %	3,480,000,000					-	100%	2,800,000,000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3,480,000,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Kalipucang	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		2,800,000,000	PUSKESMAS KALIPUCANG
21	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%			90 %	494,700,000						90%	494,700,000	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%			90 %	494,700,000			-			90%	494,700,000	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				62 Orang	494,700,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Kalipucang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		494,700,000	PUSKESMAS KALIPUCANG
						PUSKESMAS PANGANDARAN					5,943,800,000							4,583,800,000	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5,943,800,000							4,583,800,000	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5,943,800,000							4,583,800,000	
22	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90% 90% 90%			90 %	5,435,000,000						90% 90% 90%	4,075,000,000	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%			90 %	75,000,000					-	90%	75,000,000	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	75,000,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Babakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		75,000,000	PUSKESMAS PANGANDARAN
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%			100 %	5,360,000,000					-	100%	4,000,000,000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	5,360,000,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Babakan	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		4,000,000,000	PUSKESMAS PANGANDARAN
23	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%			90 %	508,800,000						90%	508,800,000	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%			90 %	508,800,000			-			90%	508,800,000	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							75 Orang	508,800,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Babakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		508,800,000	PUSKESMAS PANGANDARAN			
				PUSKESMAS SIDAMULIH					1,398,900,000						339,700,000				
	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1,398,900,000						339,700,000				
	1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1,398,900,000						339,700,000				
24	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90% 90% 90% 90%		90 %	1,160,000,000				90% 90% 90% 90%	100,800,000				
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%		90 %	10,000,000			-	90%	800,000				
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	10,000,000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	800,000	PUSKESMAS SIDAMULIH		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%		100 %	1,150,000,000			-	100%	100,000,000				
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1,150,000,000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	100,000,000	PUSKESMAS SIDAMULIH		
25	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%		90 %	238,900,000					90%	238,900,000			
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%		90 %	238,900,000			-	90%	238,900,000				
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			30 Orang	238,900,000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	238,900,000	PUSKESMAS SIDAMULIH		
					PUSKESMAS CIKEMBULAN					2,334,500,000					664,500,000				
	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2,334,500,000					664,500,000					
	1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2,334,500,000					664,500,000					
26	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90% 90% 90% 90%		90 %	1,880,000,000				90% 90% 90% 90%	210,000,000				
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%		90 %	60,000,000			-	90%	60,000,000				
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	60,000,000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	60,000,000	PUSKESMAS CIKEMBULAN		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%		100 %	1,820,000,000			-	100%	150,000,000				
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1,820,000,000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	150,000,000	PUSKESMAS CIKEMBULAN		
27	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%		90 %	454,500,000					90%	454,500,000			
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%		90 %	454,500,000			-	90%	454,500,000				
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			59 Orang	454,500,000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	454,500,000	PUSKESMAS CIKEMBULAN		
					PUSKESMAS PARIGI					3,321,700,000					731,700,000				
	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3,321,700,000					731,700,000					
	1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3,321,700,000					731,700,000					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90% 90% 90% 90%			90 %	2,920,000,000						90% 90% 90% 90%	330,000,000	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%			90 %	80,000,000					-	90%	80,000,000	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	80,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		80,000,000	PUSKESMAS PARIGI
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%			100 %	2,840,000,000					-	100%	250,000,000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,840,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		250,000,000	PUSKESMAS PARIGI
29	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%			90 %	401,700,000						90%	401,700,000	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%			90 %	401,700,000					-	90%	401,700,000	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				53 Orang	401,700,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		401,700,000	PUSKESMAS PARIGI
						PUSKESMAS SELASARI					1,263,700,000							1,203,700,000	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,263,700,000							1,203,700,000	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,263,700,000							1,203,700,000	
30	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90% 90% 90% 90%			90 %	1,106,000,000						90% 90% 90% 90%	1,046,000,000	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%			90 %	46,000,000					-	90%	46,000,000	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	46,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Selasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		46,000,000	PUSKESMAS SELASARI
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%			100 %	1,060,000,000					-	100%	1,000,000,000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,060,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Selasari	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		1,000,000,000	PUSKESMAS SELASARI
31	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%			90 %	157,700,000						90%	157,700,000	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%			90 %	157,700,000					-	90%	157,700,000	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				23 Orang	157,700,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Selasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		157,700,000	PUSKESMAS SELASARI
						PUSKESMAS CIJULANG					3,259,400,000							2,679,400,000	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,259,400,000							2,679,400,000	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,259,400,000							2,679,400,000	
32	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90% 90% 90% 90%			90 %	2,935,000,000						90% 90% 90% 90%	2,355,000,000	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%			90 %	55,000,000					-	90%	55,000,000	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	55,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		55,000,000	PUSKESMAS CIJULANG
	1 02 01 2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%			100 %	2,880,000,000					-	100%	2,300,000,000	
	1 02 01 2.10	0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,880,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangajajar	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		2,300,000,000	PUSKESMAS CIJULANG
33	1 02 03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%			90 %	324,400,000					-	90%	324,400,000	
	1 02 03 2.02				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%			90 %	324,400,000					-	90%	324,400,000	
	1 02 03 2.02	0002			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				46 Orang	324,400,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangajajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		324,400,000	PUSKESMAS CIJULANG
					PUSKESMAS CIMERAK						2,589,200,000							2,409,200,000	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,589,200,000							2,409,200,000	
	1 02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,589,200,000							2,409,200,000	
34	1 02 01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90% 90% 90% 90%			90 %	2,235,000,000						90% 90% 90% 90%	2,055,000,000	
	1 02 01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%			90 %	55,000,000					-	90%	55,000,000	
	1 02 01 2.08	0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	55,000,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		55,000,000	PUSKESMAS CIMERAK
	1 02 01 2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%			100 %	2,180,000,000					-	100%	2,000,000,000	
	1 02 01 2.10	0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,180,000,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		2,000,000,000	PUSKESMAS CIMERAK
35	1 02 03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%			90 %	354,200,000					-	90%	354,200,000	
	1 02 03 2.02				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%			90 %	354,200,000					-	90%	354,200,000	
	1 02 03 2.02	0002			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				48 Orang	354,200,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		354,200,000	PUSKESMAS CIMERAK
					PUSKESMAS LEGOKJAWA						2,475,800,000							1,805,800,000	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,475,800,000							1,805,800,000	
	1 02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,475,800,000							1,805,800,000	
36	1 02 01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90% 90% 90% 90%			90 %	2,230,000,000						90% 90% 90% 90%	1,560,000,000	
	1 02 01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%			90 %	60,000,000					-	90%	60,000,000	
	1 02 01 2.08	0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	60,000,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Legokjawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		60,000,000	PUSKESMAS LEGOKJAWA
	1 02 01 2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%			100 %	2,170,000,000					-	100%	1,500,000,000	
	1 02 01 2.10	0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,170,000,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Legokjawa	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		1,500,000,000	PUSKESMAS LEGOKJAWA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
37	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%			90 %	245,800,000					90%	245,800,000			
		1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%			90 %	245,800,000			-		90%	245,800,000		
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				43 Orang	245,800,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Legokjawa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		245,800,000	PUSKESMAS LEGOKJAWA	
						PUSKESMAS CIGUGUR					2,916,300,000							2,416,300,000		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2,916,300,000								2,416,300,000		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2,916,300,000								2,416,300,000		
38	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90% 90% 90% 90%			90 %	2,537,000,000						90% 90% 90% 90%	2,037,000,000		
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%			90 %	37,000,000				-		90%	37,000,000		
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	37,000,000	Kab. Pangandaran, Cigugur, Cigugur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		37,000,000	PUSKESMAS CIGUGUR	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD			100 %	2,500,000,000					-		100%	2,000,000,000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,500,000,000	Kab. Pangandaran, Cigugur, Cigugur	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		2,000,000,000	PUSKESMAS CIGUGUR	
39	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%			90 %	379,300,000						90%	379,300,000		
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%			90 %	379,300,000				-		90%	379,300,000		
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				53 Orang	379,300,000	Kab. Pangandaran, Cigugur, Cigugur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		379,300,000	PUSKESMAS CIGUGUR	
						PUSKESMAS LANGKAPLANCAR					3,025,400,000							2,385,400,000		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3,025,400,000								2,385,400,000		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3,025,400,000								2,385,400,000		
40	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90% 90% 90% 90%			90 %	2,680,000,000						90% 90% 90% 90%	2,040,000,000		
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%			90 %	40,000,000				-		90%	40,000,000		
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	40,000,000	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bangunjaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		40,000,000	PUSKESMAS LANGKAPLANCAR	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD			100 %	2,640,000,000					-		100%	2,000,000,000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2,640,000,000	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bangunjaya	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		2,000,000,000	PUSKESMAS LANGKAPLANCAR	
41	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%			90 %	345,400,000						90%	345,400,000		
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%			90 %	345,400,000				-		90%	345,400,000		
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				53 Orang	345,400,000	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Bangunjaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		345,400,000	PUSKESMAS LANGKAPLANCAR
						PUSKESMAS JADIKARYA						1,714,400,000						1,541,400,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,714,400,000						1,541,400,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,714,400,000						1,541,400,000	
42	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90% 90% 90% 90%			90 %	1,580,000,000						90% 90% 90% 90%	1,407,000,000	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%			90 %	10,000,000					-	90%	7,000,000	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10,000,000	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Jadikarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		7,000,000	PUSKESMAS JADIKARYA
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%			100 %	1,570,000,000					-	100%	1,400,000,000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,570,000,000	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Jadikarya	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		1,400,000,000	PUSKESMAS JADIKARYA
43	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang kompetensinya meningkat	90%			90 %	134,400,000						90%	134,400,000	
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90%			90 %	134,400,000					-	90%	134,400,000	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				19 Orang	134,400,000	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Jadikarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		134,400,000	PUSKESMAS JADIKARYA
						RSUD PANDEGA						185,534,000,000						113,034,000,000	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						185,534,000,000						113,034,000,000	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						185,534,000,000						113,034,000,000	
44	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparaturnya Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	90% 90% 90% 90%			90 % 90 % 90 % 90 %	80,000,000,000						90% 90% 90% 90%	74,500,000,000	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%			100 %	80,000,000,000					-	100%	74,500,000,000	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	80,000,000,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	PENDAPATAN DARI BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		74,500,000,000	RSUD PANDEGA
45	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang terpenuhi dan layak fungsi	90% 90% 90%			90 %	105,534,000,000						90% 90% 90%	38,534,000,000	
	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			90 %	95,000,000,000					-	-	28,000,000,000	
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya													
						Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	12,000,000,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		12,000,000,000	RSUD PANDEGA
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	6,000,000,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		6,000,000,000	RSUD PANDEGA
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
														Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional	Daerah						
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	72,500,000,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		8,000,000,000	RSUD PANDEGA		
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				10 Paket	4,500,000,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	DANA TRANSFER KHUSUS DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		2,000,000,000	RSUD PANDEGA		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90% 90% 90%		90 %	10,500,000,000					-	90% 90% 90%	10,500,000,000			
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	6,500,000,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		6,500,000,000	RSUD PANDEGA		
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	4,000,000,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		4,000,000,000	RSUD PANDEGA		
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		90 %	34,000,000					-	-	34,000,000			
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																
						Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	34,000,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		34,000,000	RSUD PANDEGA		
											DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								235,591,188,380		
1											URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		1,399,789,417,964						235,591,188,380		
1	03											URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1,365,318,899,333						219,911,489,238	
46	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				95 %	14,100,994,882							96%	12,385,099,539		
						Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	96%	96%													
						Persentase peningkatan kompetensi aparatur	96%	96%													
						Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	96%	96%													
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	95.89%		94.88 %	295,900,000					-	95.89%	660,071,251			
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	280,900,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		642,071,251	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	15,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	95.89%		94.88 %	5,243,577,120					-	95.89%	6,213,000,000			
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	5,037,648,120	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	193,929,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	6,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	95,89%			94,88 %	71,521,400			-		95,89%	75,871,623	
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	71,521,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75,871,623	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	95,89 %			94,88 %	120,900,000			-		95,89 %	128,479,032	
	1	03	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				400 Unit	36,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		43,479,032	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				60 Dokumen	84,900,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		85,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	95,89 %			94,88 %	1,109,837,020			-		95,89 %	1,179,584,942	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	298,752,600	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	299,447,920	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	99,967,500	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	111,909,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		179,584,942	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	299,760,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	95,89 %			94,88 %	4,452,916,142			-		-	1,409,877,210	
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	295,974,792	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	2,847,409,350	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	326,812,660	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		309,877,210	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	492,719,340	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	490,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		550,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	95,89 %		94,88 %	1,972,643,200					-	95,89 %	2,092,820,128				
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	372,800,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		492,820,128	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	799,988,200	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	799,855,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	95,89 %		94,88 %	833,700,000					-	95,89 %	625,395,353				
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	436,200,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		275,395,353	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	397,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
47	1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan irigasi dalam Kondisi Baik	73,57%			71,57 %	79,448,057,000						73,57%	29,600,000,000				
	1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Wilayah sungai yang terlindungi	72,57%			71,57 %	27,000,000,000					-	72,57%	7,000,000,000				
	1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				100 Lembaga	5,100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		5,100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	03	02	2.01	0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																
						Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				15 Unit	21,900,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		1,900,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Genangan yang tertangani Persentase Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	72,57% 72,57%		71,57 % 71,57 %	52,448,057,000					-	72,57% 72,57%	22,600,000,000				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				4 KM	5,050,457,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		3,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				8 KM	37,950,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		9,800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi														
						Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				20 Bendung	1,800,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		1,800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				14 KM	4,147,600,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		4,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	02	2.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														
						Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Bendung	1,600,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		1,600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
						Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				38 Dokumen	1,900,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		1,900,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
48	1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Layanan Teknis Air Minum Dan Air Bersih	76%			74 %	77,400,000,000						76%	4,900,000,000		
	1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Terlayani akses Air Minum	76%			74 %	77,400,000,000					-	76%	4,900,000,000		
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				6 Dokumen	600,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				160 Liter/Detik	62,800,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		4,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
						Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				500 SR	14,000,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
49	1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Persampahan	100%			85 %	1,300,000,000						100%	700,000,000		
	1	03	04	2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terbangunnya sarana persampahan	100%			85 %	1,300,000,000					-	100%	700,000,000		
	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
						Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				200 Ton/hari	1,300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan ketersediaan layanan air limbah	61,50%			60,50 %	4,719,004,140						61,50%	4,884,377,587	
		1	03	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengguna sanitasi aman	61,50%		60,50 %	4,719,004,140					-	61,50%	4,884,377,587	
1 03 05 2.01 0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																			
						Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				280 M³/Hari	2,000,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 05 2.01 0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																			
						Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				300 M³/Hari	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		0	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 05 2.01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																			
						Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				260 Rumah Tangga	1,800,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		1,800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 05 2.01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dokumen	919,004,140	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		1,084,377,587	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
51	1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dan Gorong - Gorong Kabupaten Dalam Kondisi Baik	65%			59 %	11,289,710,105						65%	4,163,283,190	
		1	03	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi baik	65,00%		59,00 %	11,289,710,105					-	65,00%	4,163,283,190	
1 03 06 2.01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																			
						Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				2000 M	9,250,457,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 06 2.01 0018 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan																			
						Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan				0 Orang	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		0	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 06 2.01 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																			
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				2 Dokumen	2,039,253,105	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		2,163,283,190	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
52	1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Sarana Pemerintahan Yang Terbangun	95,70%			57,10 %	266,699,667,680						95,70%	116,817,292,275	
		1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase jumlah gedung kantor yang dibangun di pusat pemerintahan	95,70%		57,10 %	266,699,667,680					-	95,70%	116,817,292,275	
1 03 08 2.01 0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																			
						Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	400,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		450,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	264,640,165,610	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		114,575,103,481	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																	
						Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				- Orang	959,502,070	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		992,188,794	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																	
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				25 Dokumen	700,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
53	1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Baru Yang Terbangun Presentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	95,40% 100%			87,5 % 84,69 %	905,356,665,526						95,40% 100%	41,391,436,647					
	1	03	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Jalan penghubung antar wilayah yang terbangun Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	100% 95,40%			87,5 % 84,69 %	905,356,665,526						100% 95,40%	41,391,436,647					
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																	
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				8 Dokumen	800,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan																	
						Jumlah Jembatan yang Diganti				40 Jembatan	1,500,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan																	
						Panjang Jalan yang Dibangun				15 KM	110,696,265,526	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		20,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan																	
						Panjang Jalan yang Direkonstruksi				1,5 KM	695,833,400,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																	
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1 KM	9,000,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																	
						Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				40 Jembatan	500,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah				
1																			
						Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				40 Jembatan	1,000,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan													
						Jumlah Jembatan yang Dibangun				40 Jembatan	82,635,200,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		11,091,436,647	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan													
						Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				40 Jembatan	2,000,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan													
						Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	391,800,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	10	2.01	0048	Pelebaran Jembatan													
						Jumlah Jembatan yang Dilebarkan				40 Jembatan	1,000,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
54	1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	50,00%			45,04 %	5,004,800,000						50,00%	5,070,000,000	
	1	03	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTRW yang ditetapkan	3Dokumen			1 Dokumen	2,500,000,000					-	1Dokumen	2,300,000,000	
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang													
						Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				3 Dokumen	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota													
						Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2,000,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang													
						Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				2 Orang	200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	12	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Perencanaan tata ruang daerah Kabupaten/kota yang dilaksanakan	100%			100 %	317,400,000					-	100%	500,000,000	
	1	03	12	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	17,400,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	03	12	2.02	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang													
						Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pemanfaatan tata ruang daerah Kabupaten/kota yang dilaksanakan	85%			72 %	650,000,000				-	85%	650,000,000					
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																	
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	150,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																	
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	500,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pengendalian tata ruang daerah Kabupaten/kota yang dilaksanakan	45%			30 %	1,537,400,000				-	45%	1,620,000,000					
	1	03	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang																	
							Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1 Kasus	1,200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	1,200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				2 Dokumen	220,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	220,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	03	12	2.04	0007	Pengenaaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR																	
							Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				1 Kasus	17,400,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal																	
							Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						34,470,518,631						15,679,699,142					
55	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Rumah Korban Bencana yang ditangani	50Rumah			50 Rumah	1,200,000,000					50Rumah	1,200,000,000					
						Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50dokumen			50 dokumen	200,000,000				-	50dokumen	200,000,000					
	1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				50 Dokumen	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
						Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	15kegiatan			3 kegiatan	100,000,000				-	3kegiatan	100,000,000					
	1	04	02	2.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				70 Orang	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1 04 02 2.02 0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				70 Orang	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi program kabupaten yang terbangun	250dokumen			50 dokumen	650,000,000					-	50dokumen	650,000,000	
	1 04 02 2.03 0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				2 Unit Rumah	150,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1 04 02 2.03 0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				3 Unit Rumah	250,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1 04 02 2.03 0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				3 Unit Rumah	250,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1 04 02 2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang diserahkan	50rumah			50 rumah	50,000,000					-	50rumah	50,000,000	
	1 04 02 2.04 0003	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah				3 Rumah Tangga	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10izin			10 izin	100,000,000					-	10izin	100,000,000	
	1 04 02 2.06 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				10 Dokumen	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1 04 02 2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	10sertifikat			10 sertifikat	100,000,000					-	10sertifikat	100,000,000	
	1 04 02 2.07 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				10 Laporan	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
56	1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	25,39%			25,89 %	32,070,518,631					-	25,39%	12,979,699,142	
	1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	persentase jumlah rumah yang layak huni di kawasan kumuh	25,39%			25,89 %	32,070,518,631					-	25,39%	12,979,699,142	
	1 04 03 2.03 0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				125 Unit Rumah	29,275,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		10,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1 04 03 2.03 0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				125 Dokumen	2,235,518,631	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		2,979,699,142	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1 04 03 2.03 0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				28 Unit	560,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		0	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
57	1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase PSU yang ditingkatkan	17%			12 %	1,200,000,000						17%	1,500,000,000		
	1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan	17%			12 %	1,200,000,000					-	17%	1,500,000,000		
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				2 Lokasi	850,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		1,150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				4 Laporan	150,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA														17,677,755,436	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														17,677,755,436	
	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														17,677,755,436	
58	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 100 % 100 %	5,553,797,895						100% 100% 100% 100%	5,201,018,848		
	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100% 100% 100%			100 % 100 % 100 %	32,134,250					-	100% 100% 100%	32,134,250		
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	32,134,250	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		32,134,250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%			100 %	3,622,100,000					-	100%	3,622,100,000		
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	3,500,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,500,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	45,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		45,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	77,100,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		77,100,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%			100 %	32,134,280					-	100%	32,134,280		
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	32,134,280	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		32,134,280	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	100%			100 %	200,639,626					-	100%	205,724,793	
1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	169,505,416	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		174,590,583	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				14 Dokumen	31,134,210	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		31,134,210	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	100%			100 %	234,595,201					-	100%	234,696,901	
1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3,497,767	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,497,767	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	51,999,174	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		51,999,174	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	12,999,960	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		12,999,960	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				17 Dokumen	16,100,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		16,200,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	149,998,300	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		150,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	100%			90 %	630,000,000					-	100%	250,000,000	
1 05 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel																			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	230,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		250,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%			100 %	353,978,624					-	100%	354,228,624	
1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,750,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	99,538,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		99,538,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	250,940,624	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		250,940,624	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%		100 %	448,215,914					-	100%	470,000,000		
1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	110,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		110,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	308,215,914	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		320,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	30,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		40,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
59	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Persentase capaian SPM tranribum	61% 100%		100 % 58 %	23,630,645,646						61% 100%	11,348,441,588		
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Kantrantibum	100%		100 %	22,945,000,000					-	100%	10,662,795,942		
1 05 02 2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																				
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 02 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																				
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				161 Orang	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		300,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 02 2.01 0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																				
						Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		20,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																				
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				100 laporan	20,500,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		9,917,795,942	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 02 2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																				
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				15 Laporan	200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		200,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 02 2.01 0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				2 Laporan	25,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		25,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 02 2.01 0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum vane Tersedia				7 Unit	1,700,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1			2																
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	100%			100 %	685,645,646			-	100%	685,645,646		
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	130,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		130,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	505,645,646	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		505,645,646	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2 Laporan	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
60	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	-			100 %	9,823,579,494					-	1,128,295,000	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	9,673,579,494					-	953,295,000	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				12 Dokumen	687,600,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		687,600,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	54,450,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		59,895,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran													
						Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				15 Orang	85,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		95,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)													
						Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				1 Desa/Kelurahan	8,462,862	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		10,800,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				30 Unit	8,838,066,632	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		100,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-			100 %	100,000,000					-	125,000,000	
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran													
						Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		75,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaihan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				10 Dokumen	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-			100 %	50,000,000				-	-		50,000,000		
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				50 Orang	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					10,559,494,321								6,661,181,963		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					10,559,494,321								6,661,181,963		
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					10,559,494,321								6,661,181,963		
61	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 100 % 100 %	5,856,520,000							100% 100% 100% 100%	4,428,754,176	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2.Persentase Dokumen Penganggaran Kinerja Yang Disusun Tepat waktu 3.Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Yang disusun Tepat Waktu	100%			100 %	49,920,000				-			100%	49,920,000	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	27,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				- Dokumen	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				- Dokumen	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	22,920,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22,920,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				- Laporan	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%			100 %	3,038,000,000				-	-		100%	2,544,728,459	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	3,000,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2,505,728,459	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				- Dokumen	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	27,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				- Laporan	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	11,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%		100 %	27,000,000					-	100%	27,000,000					
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				- Laporan	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	27,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%		100 %	498,920,000					-	100%	199,920,000					
	1	05	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				- Unit	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	160,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				23 Dokumen	16,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	22,920,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22,920,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%		100 %	408,000,000					-	100%	328,505,717					
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				22 Paket	40,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	60,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		71,505,717	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				38 Paket	20,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				- Paket	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	18,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				22 Dokumen	20,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			35 Laporan	250,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		130,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%		100 %	380,000,000					-	100%	445,000,000		
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			- Unit	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan			2 Unit	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Unit	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	80,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			2 Unit	200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		180,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			- Unit	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			- Unit	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%		100 %	344,680,000					-	100%	348,680,000		
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			600 Laporan	18,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			6 Laporan	178,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		180,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			- Laporan	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	148,680,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		148,680,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%		100 %	1,110,000,000					-	100%	485,000,000		
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			20 Unit	500,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			5 Unit	500,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya			- Unit	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
												Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Jumlah Mebel yang Dipelihara			- Unit	0	Kab. Pangandaran, Parigi, Cibenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	30,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		35,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	80,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Unit	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
62	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	100%											
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%							100%	2,232,427,787			
	1	05	03	2.01															
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota													
						Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal			1 Dokumen	341,505,717	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat	-	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)													
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			1000 Orang	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	35,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%											
	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan													
						Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			3 Kawasan	180,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat	-	65,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota													
						Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya			50 Orang	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat	-	35,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontinjensi													
						Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi			2 Dokumen	350,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat	-	250,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
						Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan			1500 Orang	175,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat	-	240,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.02	0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana													
						Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi			1 Dokumen	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat	-	200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota													
						Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani			1 Kegiatan	38,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	40,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota													
						Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal			1 Dokumen	350,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional					Daerah			
1				2																		
						Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				5 Unit	250,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				400 Kawasan	610,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	47,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																
						Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				2 laporan	200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%		100 %	875,000,000					-	100%	694,930,592				
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																
						Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				2 Laporan	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat	-	60,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				12 Dokumen	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	275,040,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				20 Orang	75,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	45,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1700 Orang	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	249,890,592	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	65,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase/Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%		100 %	883,468,604					-	100%	615,497,195				
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	120,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				12 Dokumen	259,268,604	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat	-	280,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat	-	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																
						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				12 Dokumen	229,200,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat	-	229,200,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota															
						Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan					1 Kegiatan	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-			50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													27,602,600,007		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													13,435,169,013		
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													13,435,169,013		
63	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase peningkatan kompetensi aparaturnya Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	95% 95% 100% 100%			100 % 100 % 93 % 93 %	5,916,176,729							95% 95% 100% 100%	6,399,070,477	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100% 100% 100%			100 % 100 % 100 %	86,490,800					-	100% 100% 100%	95,139,880		
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen				2 Dokumen	86,490,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	2 Dokumen	95,139,880	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%			100 %	3,203,388,053					-	100%	3,523,726,858		
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan				22 Orang/bulan	3,141,097,253	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	16 Orang/bulan	3,455,206,978	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen				1 Dokumen	62,290,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Dokumen	68,519,880	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	8 dan 278Unit/Buah			8 dan 278 Unit/Buah	66,187,000					-	0Unit/Buah	72,805,700		
	1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7 Dokumen				1 Dokumen	30,250,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Dokumen	33,275,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	1	06	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	84 Laporan				12 Laporan	35,937,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	12 Laporan	39,530,700	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%			100 %	36,556,520					-	100%	40,212,172		
	1	06	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian															
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7 Dokumen				1 Dokumen	36,556,520	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Dokumen	40,212,172	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	96%			96 %	450,612,470					-	96%	495,673,717		
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	12,100,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Paket	13,310,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	171,360,200	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Paket	188,496,220	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	15,373,050	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Paket	16,910,355	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket			1 Paket	19,148,250	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Paket	21,063,075	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen			1 Dokumen	45,641,200	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Dokumen	50,205,320	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	690 Laporan			90 Laporan	186,989,770	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100 Laporan	205,688,747	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%			100 %	1,406,135,086					-	100%	1,438,024,670	
1	06	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 Unit			1 Unit	40,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Unit	44,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	34 Unit			6 Unit	503,485,086	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	3 Unit	345,109,670	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	06	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit			1 Unit	862,650,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Unit	948,915,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			0 Unit	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Unit	100,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%			100 %	335,266,800					-	100%	368,793,480	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84 Laporan			12 Laporan	12,100,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	12 Laporan	13,310,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			12 Laporan	133,100,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	12 Laporan	146,410,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan			12 Laporan	190,066,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	12 Laporan	209,073,480	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	90%			86 %	331,540,000					-	90%	364,694,000	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	101,640,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	2 Unit	111,804,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	1	06	01	2.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	181,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	11 Unit	199,650,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	1	06	01	2.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	24,200,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	7 Unit	26,620,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	1	06	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	24,200,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Unit	26,620,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
64	1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase meningkatkan peran perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Presentase meningkatkan peran lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	80% 100%		90 % 70 %	400,000,000					80% 100%	410,000,000				
	1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah partisipasi lembaga dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Jumlah Peningkatan Kemampuan SDM PSKS	1Lembaga 13Orang		1 Lembaga 13 Orang	400,000,000				-	1Lembaga 13Orang	410,000,000				
	1	06	02	2.03	0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota															
					Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang		13 Orang	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	13 Orang	110,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	1	06	02	2.03	0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota															
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga		1 Lembaga	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	1 Lembaga	300,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
65	1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	8%		-	3,859,450,059					8%	3,994,720,176				
	1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	7964Orang		-	590,309,069				-	1200Orang	649,339,976				
	1	06	04	2.01	0001 Penyediaan Permakanan															
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5954 Orang		1000 Orang	254,100,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	10000 Orang	279,510,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	1	06	04	2.01	0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga															
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	205 Orang		20 Orang	37,273,069	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	20 Orang	41,000,376	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	1	06	04	2.01	0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota															
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1233 Orang		180 Orang	298,936,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	180 Orang	328,829,600	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional					Daerah			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	1	06	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS yang dibina	900KK			150 KK	3,269,140,990					-	150KK	3,345,380,200				
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1155 Orang			200 Orang	50,547,750	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	200 Orang	55,602,525	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6 Dokumen			1 Dokumen	3,218,593,240	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	1 Dokumen	3,289,777,675	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
66	1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	10%			10 %	1,047,707,600						10%	1,101,278,360				
	1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang berhak mendapatkan Bantuan	7Dokumen			1 Dokumen	1,047,707,600					-	1Dokumen	1,101,278,360				
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	22711 Orang			18770 Orang	432,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	22711 Orang	444,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	139955 Keluarga			115666 Keluarga	415,707,600	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	139955 Keluarga	457,278,360	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Keluarga			300 Keluarga	200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	300 Keluarga	200,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
67	1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup Presentase PPKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	100%			100 % 8 %	1,302,000,000						100%	1,397,000,000				
	1	06	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar yang dibina	2500KK			500 KK 1200 Orang	350,000,000					-	500KK	385,000,000				
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan																
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang			500 Orang	175,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	500 Orang	192,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang																
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakalan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang			500 Orang	175,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	500 Orang	192,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	1	06	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk serta dibina	14Desa			2 Desa	952,000,000					-	2Desa	1,012,000,000				
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	471 Orang			71 Orang	952,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	81 Orang	1,012,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
68	1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan yang di Kelola	100%			100 %	121,000,000						100%	133,100,000		
	1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1Taman Makam			1 Taman Makam	121,000,000					-	1Taman Makam	133,100,000		
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
						Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	31 Makam			31 Makam	121,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	31 Makam	133,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						27,739,589,594						14,167,430,994			
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						27,739,589,594						14,167,430,994			
69	2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase penataan desa	70%			60 %	12,280,300,000						70%	209,330,000		
	2	13	02	2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang di tata	93Desa			93 Desa	12,280,300,000					-	93Desa	209,330,000		
	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa														
						Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	98 Desa			24 Desa	60,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	25 Desa	66,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa														
						Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	191 Desa			24 Desa	36,300,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	25 Desa	39,930,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	93 Unit			93 Unit	12,183,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	93 Unit	102,850,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
70	2	13	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	20%			12 %	100,000,000						20%	110,000,000		
	2	13	03	2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Desa	24Desa			4 Desa	100,000,000					-	4Desa	110,000,000		
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen			1 Dokumen	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Dokumen	110,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
71	2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	70%			60 %	3,067,089,594						70%	3,571,850,994		
	2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	93Desa			93 Desa	3,067,089,594					-	93Desa	3,571,850,994		
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7 Dokumen			1 Dokumen	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Dokumen	150,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen			1 Dokumen	335,814,923	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Dokumen	299,396,416	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	6 Dokumen			1 Dokumen	550,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Dokumen	500,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	7 Dokumen			1 Dokumen	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Dokumen	133,802,440	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
						Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	3457 Orang			186 Orang	352,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	186 Orang	200,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	5 Dokumen			1 Dokumen	121,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Dokumen	133,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	7 Dokumen			1 Dokumen	330,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Dokumen	300,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	93 Laporan			0 Laporan	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	0 Laporan	1,000,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100 Laporan			20 Laporan	60,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	20 Laporan	66,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
						Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	7 Dokumen			1 Dokumen	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Dokumen	55,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5 Dokumen			1 Dokumen	96,800,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Dokumen	106,480,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
						Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	465 Orang			93 Orang	200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	93 Orang	220,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	17 Dokumen			1 Dokumen	370,474,671	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1 Dokumen	407,522,138	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
72	2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%			100 %	12,292,200,000						100%	10,276,250,000		
	2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	5Lembaga			5 Lembaga	12,292,200,000					-	5Lembaga	10,276,250,000		
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7 Dokumen			1 Dokumen	8,550,700,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	1 Dokumen	8,485,600,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen			1 Dokumen	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-	1 Dokumen	110,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7 Laporan			1 Laporan	181,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-	1 Laporan	199,650,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah				
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				47 Paket	69,998,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		70,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	17,400,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		17,400,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				22 Orang	9,999,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		10,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	95%		85 %	487,890,110					-	95%	476,794,077	
2 07 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				60 Paket	15,843,527	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		15,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	234,061,815	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		243,794,077	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				60 Paket	69,994,102	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		60,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				40 Paket	19,999,270	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		20,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	17,991,484	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		18,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	129,999,912	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		120,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	95%		85 %	329,905,825					-	95%	330,000,000	
2 07 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel																			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				70 Unit	199,995,825	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		200,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	129,910,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		130,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	95%		85 %	259,964,530					-	95%	260,000,000	
2 07 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	49,990,630	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		50,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	59,974,500	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		60,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	149,999,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		150,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%		90 %	265,838,121					-	100%	265,690,000	
2 07 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	99,999,970	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		100,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel																			
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				35 Unit	40,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		40,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	55,838,151	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		55,690,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	70,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		70,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
74	2	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen RTK yang Diselesaikan	100%			80 %	129,999,596						100%	130,000,000	
	2	07	02	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK	2Dokumen			2 Dokumen	129,999,596					-	2Dokumen	130,000,000	
2 07 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																			
						Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	109,999,832	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		110,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 02 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																			
						Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				2 Orang	19,999,764	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		20,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
75	2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja Meningkat	90%			70 %	1,099,999,600						90%	500,000,000	
	2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan	200Orang			200 Orang	1,059,999,660					-	200Orang	460,000,000	
2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																			
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				200 Orang	859,999,888	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		260,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 03 2.01 0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	199,999,772	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		200,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	80%			70 %	39,999,940					-	80%	40,000,000	
	2	07	03	2.02	0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				19 Lembaga	39,999,940	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		40,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
76	2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang diserap	85%			70 %	496,092,500						85%	556,519,278	
	2	07	04	2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi dalam mencari kerja	850Orang			750 Orang	196,092,675					-	850Orang	201,519,278	
	2	07	04	2.01	0002 Pelayanan antar Kerja														
						Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				100 Orang	99,999,755	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		100,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	04	2.01	0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				150 Orang	26,092,950	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		21,519,278	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	04	2.01	0005 Perluasan Kesempatan Kerja														
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				500 Orang	69,999,970	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		80,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	04	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Kegiatan Pengelolaan IPK yang Terlaksana	1Kegiatan			1 Kegiatan	199,999,982					-	1Kegiatan	240,000,000	
	2	07	04	2.03	0003 Job Fair/Bursa Kerja														
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				100 Orang	199,999,982	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		240,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	04	2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Kasus CPMI dan PMI menurun	100%			90 %	99,999,843					-	100%	115,000,000	
	2	07	04	2.04	0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
						Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				9 Orang	99,999,843	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		115,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
77	2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Ketenagakerjaan pada Perusahaan Menurun	100%			90 %	349,999,760						100%	425,000,000	
	2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang difasilitasi untuk Pengesahan Peraturan Perusahaannya	10Dokumen			10 Dokumen	134,999,760					-	10Dokumen	160,000,000	
	2	07	05	2.01	0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
						Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				5 Perusahaan	59,999,760	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		70,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2	07	05	2.01	0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				5 Laporan	75,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		90,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang ditangani	5Kegiatan			5 Kegiatan	215,000,000					-	5Kegiatan	265,000,000	
2 07 05 2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah					2 Perkara	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		65,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 05 2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
					Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan					2 Perkara	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		65,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 05 2.02 0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																			
					Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi					1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	65,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		65,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 05 2.02 0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																			
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina					1 Lembaga	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		70,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						90,937,596						99,205,923		
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						90,937,596							99,205,923	
78	3	32	02		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Rencana Kawasan Transmigrasi baru	100%			50 %	19,999,876						100%	25,000,000	
	3	32	02	2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lokasi Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi	1Lokasi			1 Lokasi	19,999,876					-	1Lokasi	25,000,000	
3 32 02 2.01 0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi																			
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain					1 Dokumen	9,999,938	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		10,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
3 32 02 2.01 0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan																			
					Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi					1 Kawasan Transmigrasi	9,999,938	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		15,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
79	3	32	03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibangun	1Lokasi			1 Lokasi	44,999,814						1Lokasi	50,000,000	
	3	32	03	2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang diberangkatkan	5KK			5 KK	44,999,814					-	5KK	50,000,000	
3 32 03 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Laporan	19,999,876	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		25,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
3 32 03 2.01 0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
					Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan					5 Kepala Keluarga	24,999,938	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		25,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
80	3	32	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Laju Kemandirian Transmigran	70%			50 %	25,937,906						70%	24,205,923	
	3	32	04	2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Transmigran yang sudah mandiri di Kawasan Transmigrasi	32Orang			28 Orang	25,937,906					-	32Orang	24,205,923	
3 32 04 2.01 0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman																			
					Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina					5 Kepala Keluarga	25,937,906	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		24,205,923	DINAS KETENAGAKERJAAN
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											10,802,875,752							9,742,418,155	

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
													Nasional			Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					10,802,875,752						9,742,418,155					
	2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5,925,387,866						5,343,367,164					
81	2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100% 100% 100% 100%		100 % 90 % 100 % 90 %	4,569,166,602					100% 100% 100% 100%	4,519,367,708				
	2	08	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	1. 100 2. 100 3. 100%		1. 100 2. 100 3. 100 %	72,399,800				-	1. 100 2. 100 3. 100%	84,400,000				
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	62,400,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	74,400,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3 Laporan	9,999,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	10,000,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	08	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%		100 %	2,709,575,126				-	100%	2,725,575,327				
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			23 Orang/bulan	2,665,575,326	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	2,675,575,327	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			14 Dokumen	38,999,900	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	45,000,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	4,999,900	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	5,000,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	08	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	32 dan 420Jenis dan Unit/Buah		32 dan 400 Jenis dan Unit/Buah	39,000,000				-	32 dan 420Jenis dan Unit/Buah	45,000,000				
	2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	39,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	45,000,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	08	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%		100 %	163,399,760				-	100%	175,400,000				
	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			104 Paket	49,999,760	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	50,000,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	08	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							24 Dokumen	68,400,000	Kab. Pangandaran, Parigi, KarangBenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		80,400,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
							5 Orang	15,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, KarangBenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		15,000,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
							100 Orang	15,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, KarangBenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		15,000,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
							100 Orang	15,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, KarangBenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		15,000,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%			100 %	530,207,272		-	100%	478,809,120		
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
							6 Paket	10,328,655	Kab. Pangandaran, Parigi, KarangBenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		10,328,800	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							50 Paket	199,999,603	Kab. Pangandaran, Parigi, KarangBenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		200,000,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
							28 Paket	158,309,342	Kab. Pangandaran, Parigi, KarangBenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		158,310,320	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
							6 Paket	17,049,926	Kab. Pangandaran, Parigi, KarangBenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		17,050,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
							9 Dokumen	14,519,946	Kab. Pangandaran, Parigi, KarangBenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		14,520,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							50 Laporan	129,999,800	Kab. Pangandaran, Parigi, KarangBenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		78,600,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%			100 %	475,808,018		-	100%	487,808,261		
	2	08	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							15 Unit	108,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, KarangBenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		108,000,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
							47 Unit	48,903,450	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		48,903,515	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	141,904,568	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		141,904,746	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud															
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	45,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		45,000,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	132,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		144,000,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%		100 %	222,839,325					-	100%	252,840,000			
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7,700,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		7,700,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	33,339,325	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		33,340,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	181,800,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangjaladri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		211,800,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%		100 %	355,937,301					-	100%	269,535,000			
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39,999,805	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		31,000,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	99,999,898	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		22,596,500	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				106 Unit	29,738,500	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		29,738,500	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud															
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	20,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		20,000,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	166,199,098	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		166,200,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
82	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelembagaan PUG aktif Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	96,15% 18,55%			94,62 % 14,98 %	462,499,440						96,15% 18,55%	269,298,496					
	2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi tentang Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun	132Dokumen			1 Dokumen	193,499,840					-	1Dokumen	59,398,496					
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	14,500,000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	14,849,690		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	149,999,890	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	14,849,402		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	14,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	14,849,702		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG																	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	14,499,950	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	14,849,702		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	1000Orang		100 Orang	241,399,840					-	100Orang	181,700,000					
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	
						Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	199,999,840	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	134,300,000		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	
						Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Organisasi	41,400,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	47,400,000		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	9Lembaga		1 Lembaga	27,599,760					-	1Lembaga	28,200,000					
	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	9,200,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	9,400,000		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				3 Orang	9,199,760	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	9,400,000		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	9,200,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		9,400,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
83	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	90%			85 %	112,119,994					90%	92,809,440		
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan yang dilaksanakan	7Regulasi			1 Regulasi	25,707,174				-	1Regulasi	26,516,984		
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	12,853,587	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		13,258,492	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Perangkat Daerah	12,853,587	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		13,258,492	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	13Kasus			2 Kasus	34,999,000					-	2Kasus	13,258,492	
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan					3 Orang	9,999,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		0	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					3 Layanan	25,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		13,258,492	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	1Lembaga			1 Lembaga	51,413,820					-	1Lembaga	53,033,964	
	2	08	03	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	12,853,560	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		13,258,491	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas					1 Orang	12,853,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		13,258,491	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik					4 Orang	12,853,380	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		13,258,491	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	12,853,480	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		13,258,491	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kemandirian PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)	100%			60 %	237,987,271						100%	240,054,720	
	2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PEKKA yang mendapatkan pelatihan	7Kelompok			1 Kelompok	237,987,271					-	1Kelompok	240,054,720	
	2	08	04	2.01	0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	32,993,775	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	34,027,360	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	04	2.01	0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	204,993,496	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	206,027,360	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
85	2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dan valid	80%			70 %	28,993,484						80%	30,027,360	
	2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak yang tersusun	5Dokumen			1 Dokumen	28,993,484					-	1Dokumen	30,027,360	
	2	08	05	2.01	0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	17,496,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	18,013,680	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	05	2.01	0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	11,496,684	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	12,013,680	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
86	2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Kabupaten/Kota Layak Anak Persentase pemenuhan kelompok hak anak	Nindya (700-800)Nilai 100%			Madya (600-700) Nilai 100 %	331,634,708						Nindya (700-800)Nilai 100%	113,454,720	
	2	08	06	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelembagaan PHA yang terbentuk	7Lembaga			1 Lembaga	17,594,990					-	1Lembaga	17,901,888	
	2	08	06	2.01	0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				1 Organisasi	8,797,480	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	8,950,944	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.01	0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	8,797,510	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	8,950,944	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	9Lembaga			1 Lembaga	314,039,718					-	1Lembaga	95,552,832	
	2	08	06	2.02	0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				116 Orang	74,998,309	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	8,950,944	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.02	0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Dokumen	28,797,510	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	30,250,944	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	8,797,320	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	8,950,944	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	201,446,579	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	47,400,000	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
87	2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	10%		14 %	182,986,367					10%	78,354,720				
	2	08	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	11Lembaga		1 Lembaga	149,999,887				-	1Lembaga	44,121,888				
2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA															
						Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu			1 Kegiatan	25,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	11,410,944	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA															
						Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		4 Orang	124,999,887	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	32,710,944	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang tersedia bagi Anak yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang tersedia Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	10Lembaga		1 Lembaga 1 Lembaga	21,989,240				-	1Lembaga	22,821,888				
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan		2 Orang	10,992,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	11,410,944	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK															
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		20 Orang	10,997,240	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	11,410,944	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	10Lembaga		-	10,997,240				-	1Lembaga	11,410,944				
2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota															
						Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK			1 Kegiatan	10,997,240	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	11,410,944	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					4,877,487,886					4,399,050,991					
88	2	14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase laporan pengendalian lapangan tingkat kecamatan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIGA) Validitas data keluarga beresiko stunting	100% 100%		100 % 100 %	910,817,992					100% 100%	318,246,082				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah koordinasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk yang dilaksanakan	5Kali Kegiatan			1 Kali Kegiatan	518,235,312					-	1Kali Kegiatan	206,716,070	
2 14 02 2.01 0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																			
					Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dokumen	249,999,992	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-			DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 02 2.01 0004 Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan																			
					Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan					1 Dokumen	35,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-			DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 02 2.01 0007 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																			
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota					1 Dokumen	21,250,400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		18,678,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 02 2.01 0008 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																			
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota					1 Dokumen	21,250,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		18,678,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 02 2.01 0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																			
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal					1 Satuan Pendidikan	21,250,120	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		19,178,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 02 2.01 0012 Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																			
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan					1 Organisasi	21,250,120	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		18,678,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 02 2.01 0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																			
					Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan					1 Organisasi	21,250,120	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		19,178,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 02 2.01 0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan																			
					Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan					1 Kegiatan	21,250,120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		18,678,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 02 2.01 0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																			
					Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga					1 Kegiatan	21,250,120	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		18,678,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 14 02 2.01 0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				1 Kegiatan	21,250,120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	18,678,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal														
						Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				1 Kegiatan	21,250,080	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	19,178,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal														
						Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				1 Kegiatan	21,250,120	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-	18,678,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana														
						Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	20,733,600	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	18,429,810	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1) Jumlah dokumen pemetaan pengendalian penduduk cakupan daerah yang disusun 2) Jumlah dokumen data keluarga beresiko stunting	5Dokumen 10Dokumen			1 Dokumen 2 Dokumen	392,582,680					-	1Dokumen 2Dokumen	111,530,012	
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				4 Laporan	180,550,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	17,678,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga														
						Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				2 Dokumen	18,950,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	16,678,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
						Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	22,332,880	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	21,136,882	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	34,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	17,678,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain														
						Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				4 Unit	114,999,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	19,678,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana														
						Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana				1 Laporan	21,250,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	18,678,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
89	2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1) Prevalensi peserta KB aktif Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting	75% 75,84%			75,74 % 75 %	3,160,289,212						75% 75,84%	3,236,835,685	
						1. jumlah kegiatan advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB yang dilaksanakan 2) Jumlah kali rakor tentang stunting tingkat kecamatan	17Kali Kegiatan 60Kali Kegiatan			2 Kali Kegiatan 12 Kali Kegiatan	1,409,588,365					-	2Kali Kegiatan 12Kali Kegiatan	1,386,813,977	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	900,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	863,540,553	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana															
						Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Unit	19,407,393	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	19,736,875	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana															
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	114,680,766	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	121,379,157	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)															
						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				2 Laporan	57,614,578	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	60,498,164	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang															
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				4 Dokumen	251,731,588	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	253,018,628	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal															
						Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	17,020,021	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	17,189,911	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja															
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				4 Organisasi	49,134,019	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	51,450,689	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan	63Orang		63 Orang	198,850,979					-	63Orang	211,677,978			
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB															
						Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				1 Unit	21,479,715	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	26,021,786	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	14	03	2.02	0004	Pengergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)															
						Jumlah Kader yang Mengikuti Pengergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1123 Orang	109,611,530	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	115,971,047	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB															
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				4 Organisasi	26,596,456	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	26,738,030	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
						Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				12 Laporan	41,163,278	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		42,947,115	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan kesehatan	2064Kali Kegiatan			336 Kali Kegiatan	1,010,646,659					-	336Kali Kegiatan	1,064,833,266	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
						Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	113,130,261	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		119,725,002	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1831 Orang	578,240,599	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		586,136,563	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP														
						Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				12 Laporan	35,972,428	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		35,286,348	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
						Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				12 Dokumen	17,190,217	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		17,237,786	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
						Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Unit	104,384,836	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		141,481,973	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				20 Orang	17,521,038	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		17,458,854	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	37,143,729	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		37,157,635	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi														
						Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				5 Orang	45,668,479	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		47,753,483	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
						Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1 Laporan	22,949,944	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saling	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		23,516,241	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional	Daerah						
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
											2 Orang	15,495,184	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		15,563,140	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan															
											20 Orang	22,949,944	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		23,516,241	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kampung KB yang mendapat pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	31Kampung KB			31 Kampung KB	541,203,209					-	31Kampung KB	573,510,464		
	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB															
											4 Organisasi	25,067,774	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		25,775,645	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB															
											12 Dokumen	172,045,145	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		182,578,273	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB															
											12 Laporan	172,045,145	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		182,578,273	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas															
											31 Kampung	172,045,145	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		182,578,273	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
90	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peningkatan pemberdayaan Keluarga Sejahtera Persentase peningkatan pemahaman tentang stunting bagi calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil dan Ibu pasca persalinan	75% 80,02%			78,02 % 75 %	806,380,682						75% 80,02%	843,969,224		
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina 2. Jumlah pembinaan tentang stunting yang dilaksanakan	60Kali Kegiatan 5Kelompok			2 Kelompok 12 Kali Kegiatan	457,944,804					-		12Kali Kegiatan 2Kelompok	395,533,346	
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)															
											2 Laporan	393,466,178	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		395,533,346	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	04	2.01	0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)															
											30 Orang	64,478,626	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		0	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1																					
	2		14	04	2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	5Kelompok			5 Kelompok	348,435,878			-	5Kelompok	448,435,878				
	2		14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
							Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				4 Laporan	134,478,626	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	164,478,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2		14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					4 Organisasi	134,478,626	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	164,478,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2		14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja														
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja					4 Laporan	79,478,626	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	119,478,626	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
							DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN					125,163,153,276						13,550,871,517			
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					125,163,153,276						13,550,871,517			
	2		11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					125,163,153,276						13,550,871,517			
91	2		11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 100 % 100 %	6,357,084,376					100% 100% 100% 100%	6,487,801,042			
	2		11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100%			100 %	24,000,000				-	100%	24,000,000			
	2		11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	24,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	24,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
	2		11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%			100 %	3,850,601,042				-	100%	3,850,601,042			
	2		11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	3,826,601,042	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	3,826,601,042	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
	2		11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	24,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	24,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
	2		11	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100%			100 %	24,000,000				-	100%	24,000,000			
	2		11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	24,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	24,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	11	01	2.04				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	01	2.04				100 %	33,000,000					-	100%	33,000,000	
	2	11	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah											
								1 Laporan	9,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		9,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah											
								4 Dokumen	24,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		24,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.05				100 %	136,982,465					-	100%	137,200,000	
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
								37 Paket	24,982,605	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		25,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
								8 Dokumen	21,999,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
								36 Orang	89,999,960	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		90,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06				100%	372,443,938					-	100%	372,500,000	
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
								1 Paket	3,996,673	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
								2 Paket	74,994,001	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		75,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
								1 Paket	4,479,444	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
								5 Paket	119,999,940	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		120,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
								2 Dokumen	21,978,280	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
								70 Laporan	124,995,700	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		125,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
								2 Dokumen	21,999,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.07				100%	468,078,776					-	100%	547,000,000	
	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
								1 Unit	318,078,776	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		397,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah				
1	2	11	01	2.07	0009	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	01	2.08		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	150,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%		100 %	178,491,767					-	100%	178,500,000	
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	3,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2 Laporan	44,998,885	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		45,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			8 Laporan	129,992,882	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		130,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang baik dan layak fungsi	100%		100 %	1,269,486,388					-	100%	1,321,000,000	
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			25 Unit	1,249,995,091	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,300,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			7 Unit	4,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		6,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	14,991,297	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
92	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30%		20 %	284,987,860						30%	285,000,000	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun	5Dokumen		1 Dokumen	34,988,000					-	1Dokumen	35,000,000	
	2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota			1 Dokumen	34,988,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		35,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	6Dokumen		2 Dokumen	249,999,860					-	1Dokumen	250,000,000	
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun			1 Dokumen	249,999,860	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
93	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kualitas Air dan Udara yang memenuhi Baku Mutu	31,50%		29,50 %	12,225,243,620						31,50%	200,000,000	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penjegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	-		3 Kegiatan	199,999,620					-	-	200,000,000	
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1 Dokumen	54,999,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		55,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	11	03	2.01	0002	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	45,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	45,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota													
						Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	99,999,720	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan	2Laporan		1 Laporan	12,025,244,000					-	0Laporan	0	
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup													
						Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				4 Titik	12,025,244,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
94	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tutupan Lahan yang dikelola	1,00%		0,80 %	11,431,173,428					-	1,00%	1,598,870,475	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Keanekaragaman hayati yang dikelola	131,4Ha		91,4 Ha	11,431,173,428					-	131,4Ha	1,598,870,475	
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati													
						Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	199,999,880	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				91.4 Ha	1,373,999,778	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	1,553,870,475	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				2 Unit	9,857,173,770	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	45,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
95	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dibina	51%		47 %	74,999,943					-	51%	75,000,000	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil LB3 yang memenuhi ketentuan	100Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	74,999,943					-	100Pelaku Usaha	75,000,000	
	2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik													
						Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	34,999,994	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	35,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3													
						Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	39,999,949	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	40,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
96	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan PPLH PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemda	70%		72 %	79,987,759					-	70%	80,000,000	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	06	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20Pelaku Usaha			20 Pelaku Usaha	79,987,759					-	20Pelaku Usaha	80,000,000	
2 11 06 2.01 0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																			
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				1 Badan Usaha	64,999,959	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		65,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 11 06 2.01 0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																			
						Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Orang	14,987,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		15,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
97	2	11	07		PROGRAM PENGAKUIAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang Terdaftar dan terdata	35%			25 %	39,999,542						35%	40,000,000	
	2	11	07	2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terdaftar dan terdata	6MHA			2 MHA	39,999,542					-	2MHA	40,000,000	
2 11 07 2.02 0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																			
						Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	39,999,542	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		40,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
98	2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks Perilaku Peduli Lingkungan	44%			36 %	122,999,750						44%	123,000,000	
	2	11	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat yang peduli lingkungan hidup	36Lembaga Masyarakat			12 Lembaga Masyarakat	122,999,750					-	12Lembaga Masyarakat	123,000,000	
2 11 08 2.01 0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																			
						Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				5 Orang	80,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		80,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2 11 08 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																			
						Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				7 Lembaga	42,999,750	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		43,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
99	2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penerapan Adiwiyata Di Lingkungan Pemerintah Daerah	27%			20 %	50,000,000						27%	50,000,000	
	2	11	09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah Berperilaku Peduli dan Berbudaya Lingkungan	30Sekolah			6 Sekolah	50,000,000					-	30Sekolah	50,000,000	
2 11 09 2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																			
						Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				6 Entitas	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
100	2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Yang Ditangani Pemma	76,67%			70 %	50,000,000						76,67%	55,000,000	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
														Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang ditangani	21Kasus			17 Kasus	50,000,000					-	21Kasus	55,000,000		
2 11 10 2.01 0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																				
						Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				22 Pengaduan	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		55,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
101	2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan layanan persampahan	31,60%			27,90 %	94,446,676,998						31,60%	4,556,200,000		
	2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	17772,389ton			17082,2652 ton	94,446,676,998					-	17772,389ton	4,556,200,000		
2 11 11 2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				14 Unit	90,396,710,664	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		265,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2 11 11 2.01 0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																				
						Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				17082,27 Ton	4,049,966,334	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		4,291,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						10,776,904,909							8,910,137,742		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10,776,904,909								8,910,137,742	
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						10,776,904,909								8,910,137,742	
102	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparaturnya Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 100 % 100 %	10,011,351,303						100% 100% 100% 100%	7,990,657,339		
	2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100% 100% 100%			100 % 100 % 100 %	49,973,700					-	100% 100% 100%	52,800,000		
2 12 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	29,850,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		32,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																				
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3,999,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																				
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,300,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,300,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,499,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2 12 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																				
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,999,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2	12	01	2.01	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 Laporan	5,370,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		6,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	3,955,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%		100 %	3,112,899,130					-	100%	3,444,354,370		
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25 Orang/bulan	3,070,334,330	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,070,334,370	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	28,040,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		33,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Dokumen	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		185,520,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	7,025,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		144,600,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			12 Dokumen	1,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,900,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			18 Laporan	5,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2 Dokumen	999,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%		100 %	35,899,900					-	100%	38,200,000		
	2	12	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			12 Laporan	4,200,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,200,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			14 Laporan	1,999,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			14 Laporan	29,700,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		32,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%		100 %	107,943,957					-	100%	187,920,000		
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				53 Paket	9,275,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		22,920,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	23,750,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		60,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				53 Orang	74,918,957	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		75,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%			100 %	2,332,284,120				-	100%	2,316,720,000		
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	9,990,530	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	2,155,719,825	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,155,720,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	4,845,667	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		6,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	9,997,850	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	9,675,656	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	42,067,500	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		45,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	99,987,092	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		80,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%			100 %	3,669,206,525				-	100%	1,020,000,000		
	2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	98,398,920	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		400,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	88,990,039	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		90,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				196 Unit	3,481,817,566	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		190,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		195,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		145,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%		100 %	321,315,320					-	100%	420,662,969					
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	259,315,320	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		320,622,969	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		16,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	57,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		74,040,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%		100 %	381,828,651					-	100%	510,000,000					
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	53,394,756	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		100,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	127,942,705	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		175,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	175,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	17,564,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	7,926,790	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		30,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
103	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	100%		100 %	492,649,797						100%	515,938,879					
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang terlayani dalam pendaftaran penduduk	69642Orang		65100 Orang	376,709,880					-	69642Orang	421,632,500					
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				2 Dokumen	50,840,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		75,840,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				54000 Dokumen	275,030,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		275,040,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	02	2.01	0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				6655 Laporan	45,839,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		45,840,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan														
						Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				6655 Laporan	4,999,280	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		24,912,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan pendafaran penduduk	93Desa			93 Desa	115,939,917				-	93Desa	84,306,379		
	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				93 Dokumen	75,950,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		44,306,379	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														
						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	39,989,917	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		40,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang terlaksana	4Laporan			4 Laporan	0				-	0Laporan	10,000,000		
	2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk														
						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk				4 Laporan	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		10,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
104	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%			100 %	132,625,079					100%	243,957,556		
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil	15000Orang			14000 Orang	125,372,642				-	15000Orang	212,943,258		
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				513 Dokumen	33,290,762	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		35,288,698	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
						Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	61,350,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		137,520,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.01	0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil														
						Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				3 Dokumen	3,225,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,061,704	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan														
						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				4 Paket	27,506,880	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		35,072,856	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang diselenggarakan	4Pelayanan			4 Pelayanan	1,720,000				-	4Pelayanan	3,633,188		
	2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam														
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				4 Laporan	1,720,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,633,188	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil yang terlaksana	12Laporan		12 Laporan	5,532,437					-	12Laporan	27,381,110	
	2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil													
							Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			1 Laporan	5,532,437	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		27,381,110	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
105	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik	100%		100 %	140,278,730						100%	159,583,968	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	6Dokumen		6 Dokumen	85,062,980					-	6Dokumen	89,043,968	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan													
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan			2 Dokumen	19,999,874	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan													
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			5 Dokumen	14,266,966	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		18,203,968	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah			12 Laporan	50,796,140	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		50,840,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diterbitkan	2Dokumen		2 Dokumen	0					-	2Dokumen	5,000,000	
	2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
							Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun			2 Dokumen	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan	3Jenis		3 Jenis	55,215,750					-	3Jenis	55,240,000	
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			12 Laporan	55,215,750	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		55,240,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4Laporan		4 Laporan	0					-	4Laporan	10,300,000	
	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			4 Laporan	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		10,300,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						DINAS PERHUBUNGAN													
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					45,715,082,571							19,332,337,833	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					45,715,082,571							19,332,337,833	
106	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100% 100% 100% 100%		100 % 100% 90 % 90 %	13,884,812,236						100% 100% 100% 100%	14,026,244,547	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100%		100 %	58,899,752					Dinas Perhubungan	100%	64,826,355	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	56,752,952	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		62,463,830	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	2,146,800	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		2,362,525	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%			100 %	2,704,553,165				Dinas Perhubungan	100%	2,643,614,900		
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2,547,688,765	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		2,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	32,334,400	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		38,732,100	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	124,530,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		104,882,800	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%			100 %	26,920,400				Dinas Perhubungan	100%	27,000,000		
	2	15	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	26,920,400	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		27,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	100%			100 %	136,074,000				Dinas Perhubungan	100%	222,600,000		
	2	15	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	136,074,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		222,600,000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%			100 %	17,864,400				Dinas Perhubungan	100%	22,920,000		
	2	15	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	17,864,400	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		22,920,000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	100%			100 %	416,377,262				Dinas Perhubungan	100%	429,981,142		
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	11,048,482	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		12,184,080	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	85,918,519	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		91,589,562	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	15,103,795	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		16,637,500	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	84,688,560	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		90,000,000	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	19,791,906	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		19,920,000	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	199,826,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		199,650,000	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	100%		100 %	150,000,000					Dinas Perhubungan	100%	159,720,000					
	2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150,000,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		159,720,000	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%		100 %	9,914,212,800					Dinas Perhubungan	100%	10,047,630,650					
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,500,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		3,859,900	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9,561,500,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		9,679,000,000	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	349,212,800	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		364,770,750	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%		100 %	459,910,457					Dinas Perhubungan	100%	407,951,500					
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	416,205,838	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		359,370,000	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	24,050,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		26,620,000	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	19,654,619	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Dinas Perhubungan		21,961,500	DINAS PERHUBUNGAN				
107	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat Presentase Pelayanan Izin Trayek Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Presentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas	20% 20% 30% 75%		25 % 15 % 10 % 65 %	31,830,270,335						20% 20% 30% 75%	5,306,093,286					
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1dokumen		1 dokumen	204,905,000					Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	1dokumen	0					
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	204,905,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		0	DINAS PERHUBUNGAN				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11unit			9 unit	26,115,685,155					Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	11unit	3,535,906,736		
	2	15	02	2.02	0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				550 Unit	25,669,541,047	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		3,078,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.02	0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan															
						Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				30 Unit	29,981,341	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		35,890,736	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.02	0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan															
						Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				184 Unit	416,162,767	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		422,016,000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2terminal			0 terminal	3,829,124,000					Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	2terminal	0		
	2	15	02	2.03	0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang															
						Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	3,829,124,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	12laporan			12 laporan	159,070,000					Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	12laporan	85,000,000		
	2	15	02	2.04	0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota															
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	159,070,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		85,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12laporan			12 laporan	59,803,200					Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	12laporan	242,440,000		
	2	15	02	2.05	0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				5 Unit	59,803,200	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		242,440,000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12laporan			12 laporan	709,210,850					Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	12laporan	973,520,000		
	2	15	02	2.06	0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota															
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 laporan	35,983,750	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		36,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															
						Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	99,900,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota															
						Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				12 laporan	573,327,100	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		837,520,000	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional	Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2	15	02	2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	12laporan			12 laporan	89,164,250				Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	12laporan	54,965,000				
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin															
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	18,028,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		19,965,000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	02	2.07	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin															
						Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				3 Orang	41,136,010	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		0	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin															
						Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				12 Laporan	29,999,840	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	5laporan		5 laporan	111,474,560					Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	5laporan	126,750,000			
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal															
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				12 Laporan	59,992,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		65,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota															
						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				5 Laporan	19,994,100	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		25,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum															
						Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				2 Laporan	1,499,960	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		1,750,000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	02	2.08	0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan															
						Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya				4 Orang	29,987,700	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18unit		13 unit	69,999,680					Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	18unit	70,000,000			
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota															
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	69,999,680	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		70,000,000	DINAS PERHUBUNGAN		
	2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0dokumen		1 dokumen	214,939,720					Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	0dokumen	0			
	2	15	02	2.10	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota															
						Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	179,949,920	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		0	DINAS PERHUBUNGAN		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	15	02	2.10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	34,989,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1dokumen			1 dokumen	72,154,560					Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	1dokumen	80,860,000		
	2	15	02	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	42,149,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		46,585,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30,004,760	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		34,275,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12laporan			12 laporan	39,999,800					Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	12laporan	45,000,000		
	2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	39,999,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		45,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12laporan			12 laporan	154,739,560					Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	12laporan	91,651,550		
	2	15	02	2.16	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	74,799,840	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		0	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.16	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	49,689,920	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		55,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.16	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	30,249,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran		36,651,550	DINAS PERHUBUNGAN	
						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						9,030,133,239								9,189,561,000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9,030,133,239								9,189,561,000	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						8,460,163,866								8,564,561,000	
108	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparaturnya Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	95% 95% 95% 95%			93 % 93 % 93 % 93 %	5,105,303,944						95% 95% 95% 95%	4,854,650,000		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	95% 95% 95%			93 % 93 % 93 %	29,249,560					-	95% 95% 95%	29,250,000	
	2	16	01	2.01		0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	28,999,800	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		29,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	249,760	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		250,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kienrja keuangan dengan baik	95%			93 %	3,129,499,800					-	95%	3,229,500,000	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3,100,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,200,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	28,999,800	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		29,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	250,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		250,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	250,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		250,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	270Unit			260 Unit	24,999,840					-	270Unit	29,000,000	
	2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	24,999,840	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		29,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima perangkat daerah	5%			5 %	22,999,880					-	5%	23,000,000	
	2	16	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah													
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	22,999,880	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		23,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	95%			93 %	18,999,800					-	95%	20,000,000	
	2	16	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	18,999,800	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		20,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	95%			93 %	405,864,357					-	95%	457,900,000	
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,589,512	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		7,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	49,998,015	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	7,986,870	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		8,100,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	2,496,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	21,799,760	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		21,800,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	18,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		18,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					26 Laporan	299,994,200	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		350,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	95%			93 %	714,509,818					-	95%	295,000,000		
	2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	350,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					10 Unit	34,744,229	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					13 Unit	199,765,589	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		155,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	130,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		140,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	95%			93 %	556,093,890					-	95%	563,000,000		
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					45 Laporan	9,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		9,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					5 Laporan	359,998,890	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		365,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					3 Laporan	187,095,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		189,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	95%			93 %	203,086,999					-	95%	208,000,000		
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional					Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	132,987,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		135,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	55,499,999	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		57,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	8,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		9,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6,600,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		7,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
109	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tata kelola komunikasi publik Persentase tata kelola layanan informasi publik	75% 75%		65 % 65 %	1,859,061,616						0% 75%	1,938,911,000					
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan konten yang dipublikasikan Persentase pengelolaan media massa dan lainnya	80% 80%		70 % 70 %	1,859,061,616				-		80% 80%	1,938,911,000					
	2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																	
						Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				7 Dokumen	95,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		100,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																	
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				28 Dokumen	34,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		30,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	16	02	2.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	34,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		32,911,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		35,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				2 Dokumen	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		110,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																	
						Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				150 Orang	24,999,960	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		25,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																	
						Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				3 Dokumen	1,396,062,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,476,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	16	02	2.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit	89,999,656	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		80,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
110	2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan tata kelola SPBE	3.5Indeks			3,3 Indeks	1,495,798,306						3.5Indeks	1,771,000,000					
	2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain yang terkelola Persentase sub domain yang terkelola	100% 85%			100 % 83 %	510,299,760					-	100% 85%	540,000,000					
	2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	40,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		40,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																	
						Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				7 Unit	470,299,760	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		500,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	16	03	2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki layanan publik berbasis sistem elektronik	75%			68 %	985,498,546					-	75%	1,231,000,000					
	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																	
						Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				5 Unit	209,999,345	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		300,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																	
						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				6 Unit	200,499,620	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		250,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																	
						Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		300,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																	
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	339,999,680	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		345,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	34,999,901	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		36,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						364,969,441							400,000,000					
111	2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase publikasi data statistik sektoral	75%			65 %	364,969,441						75%	400,000,000					
	2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang dipublikasikan	3Publikasi			3 Publikasi	364,969,441					-	3Publikasi	400,000,000					
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	164,986,374	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		200,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																	
						Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				150 Orang	49,989,200	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																	
						Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				3 Dokumen	69,994,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		70,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				
	2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
						Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	79,999,067	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		80,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						204,999,932							225,000,000		
112	2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	40%			30 %	204,999,932						40%	225,000,000		
	2	21	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah	40%			30 %	159,999,942					-	40%	175,000,000		
	2	21	02	2.01	0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	159,999,942	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		175,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2	21	02	2.02	Penetapan Pola Hubungan komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prosedur komunikasi sandi antar perangkat daerah yang disusun	5Prosedur			3 Prosedur	44,999,990					-	5Prosedur	50,000,000		
	2	21	02	2.02	0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				1 Perangkat Daerah	44,999,990	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		50,000,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN						95,223,953,023							10,717,940,274		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7,565,028,877							7,219,073,005		
	2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						7,565,028,877							7,219,073,005		
113	2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 100 % 100 %	4,745,028,877						100% 100% 100% 100%	4,749,073,005		
	2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100% 100% 100%			100 % 100 % 100 %	58,980,000					-	100% 100% 100%	65,219,000		
	2	17	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	36,300,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		39,930,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,420,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		2,662,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	01	2.01	0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,420,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		2,662,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD															
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,420,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		2,662,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	01	2.01	0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							1 Dokumen	2,420,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		2,662,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							1 Laporan	6,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		6,655,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
							3 Laporan	7,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		7,986,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							-	100%	2,939,195,991				
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							24 Orang/bulan	2,860,310,043	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		2,871,341,791	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							12 Dokumen	37,510,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		40,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
							12 Dokumen	5,082,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		5,590,200	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							12 Laporan	12,100,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		13,310,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
							2 Dokumen	2,420,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		2,662,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							2 Laporan	2,420,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		2,662,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
							2 Dokumen	3,300,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		3,630,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							-	100%	54,341,100				
	2	17	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
							2 Dokumen	2,420,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		2,662,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		1,331,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1,700,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		2,262,700	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2,904,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		3,194,400	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	37,510,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		41,261,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		3,630,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
2	17	01		2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	100%		100 %	239,300,000					-	100%	280,111,300	
2 17 01 2.04 0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																			
						Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	36,300,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		39,930,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.04 0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah																			
						Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				2 Dokumen	175,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		202,913,300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	28,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		37,268,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
2	17	01		2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%		100 %	85,654,600					-	100%	107,220,060	
2 17 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				44 Paket	32,336,600	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		34,570,260	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	43,318,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		47,649,800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	10,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		25,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN
2	17	01		2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100 %	540,343,919					-	100%	564,569,807	
2 17 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							1 Paket	1,720,620	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		1,892,682	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							1 Paket	79,814,020	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		87,795,422	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
							1 Paket	19,965,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		21,961,500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							1 Paket	6,600,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		7,260,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							2 Paket	57,928,750	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		63,721,625	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
							10 Dokumen	15,013,680	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		16,515,048	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
							1 Paket	9,982,500	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		10,980,750	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
							12 Laporan	13,310,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		14,641,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							30 Laporan	282,655,549	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		282,812,600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
							12 Dokumen	27,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		28,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
							1 Dokumen	26,353,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		28,989,180	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%			100 %	444,146,363			100%	292,995,000			
	2	17	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							2 Unit	70,282,700	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	84,700,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	30,250,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		33,275,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	113,713,663	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	145,200,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		159,720,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%		100 %	213,255,482			-		100%	234,581,030			
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4,538,710	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		4,992,581	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	73,471,200	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		80,818,320	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	135,245,572	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		148,770,129	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%		100 %	191,672,470			-		100%	210,839,717			
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	54,815,420	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		60,296,962	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	107,811,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		118,592,100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				105 Unit	3,993,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		4,392,300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	18,150,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		19,965,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	6,903,050	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		7,593,355	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
114	2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang patuh	55,00%			51,35 %	225,000,000						55,00%	225,000,000				
		2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	37Koperasi		35 Koperasi	225,000,000					-	37Koperasi	225,000,000				
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																
						Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				35 Unit Usaha	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				35 Unit Usaha	175,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		175,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
115	2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat dan cukup sehat	70%			60 %	125,000,000						70%	75,000,000				
		2	17	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang sehat dan cukup sehat	23Koperasi		21 Koperasi	125,000,000					-	23Koperasi	75,000,000				
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				21 Unit Usaha	125,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		75,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
116	2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Koperasi bersertifikat	50%			40 %	100,000,000						50%	100,000,000				
		2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	125Orang		21 Orang	100,000,000					-	25Orang	100,000,000				
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				90 Orang	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
117	2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	5%			5 %	200,000,000						5%	200,000,000				
		2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang meningkat volume usahanya	21Koperasi		19 Koperasi	200,000,000					-	21Koperasi	200,000,000				
	2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																
						Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				30 Unit Usaha	200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		200,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
118	2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya Persentase pertumbuhan wirausaha baru	15%			0,1 % 15 %	1,170,000,000						15%	870,000,000				
		2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang omsetnya meningkat Jumlah wirausaha baru	5000Unit Usaha		100 Pelaku Usaha Mikro 1000 Unit Usaha	1,170,000,000					-	1000Unit Usaha	870,000,000				
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				30 Unit Usaha	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		320,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
2 17 07 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																				
						Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				30 Unit Usaha	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
2 17 07 2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																				
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				60 Unit Usaha	500,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
2 17 07 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																				
						Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				30 Orang	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
2 17 07 2.01 0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																				
						Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				22 Unit Usaha	260,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		270,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
2 17 07 2.01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																				
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				30 Orang	10,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		80,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
119	2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	0,1%			-	1,000,000,000						0,1%	1,000,000,000		
	2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	100Pelaku Usaha Mikro			-	1,000,000,000					-	100Pelaku Usaha Mikro	1,000,000,000		
2 17 08 2.01 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																				
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				100 Unit Usaha	1,000,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		1,000,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						87,658,924,146							3,498,867,269		
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						86,254,500,000							2,253,701,581		
120	3	30	02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	2,00%			1,40 %	100,000,000						2,00%	110,000,000		
	3	30	02	2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam satu tahun	0%			100 %	100,000,000					-	0%	110,000,000		
3 30 02 2.06 0001 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya																				
						Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				4 Laporan	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		110,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
121	3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	38,46%			30,77 %	85,150,000,000						38,46%	1,254,201,581		
	3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun atau direvitalisasi	-			1 Unit	85,050,000,000						-	1,154,201,581		
3 30 03 2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		3 Unit	85,000,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		1,094,201,581	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN		
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
						Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		3 Unit	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		60,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN		
	3	30	03	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya	-	75 Orang	100,000,000					-		100,000,000			
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 Dokumen	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN		
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 Dokumen	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN		
122	3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya stabil	83,00%		72,22 %	450,000,000					83,00%	455,000,000			
	3	30	04	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terjamin ketersediannya	18Barang Pokok		18 Barang Pokok	195,000,000				-	18Barang Pokok	195,000,000			
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		12 Laporan	65,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN		
3	30	04	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		12 Laporan	65,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN		
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
						Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		12 Laporan	65,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		65,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN		
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang terkendali harga dan stoknya	21 Barang Pokok dan Penting		21 Barang Pokok dan Penting	180,000,000				-	21 Barang Pokok dan Penting	185,000,000			
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		12 Laporan	75,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		75,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN		
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		12 Laporan	30,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		35,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN		
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 Laporan	75,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		75,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	3	30	04	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk dan pestisida yang diterima oleh masyarakat	4Jenis Pupuk			4 Jenis Pupuk	75,000,000			-	4Jenis Pupuk	75,000,000			
	3	30	04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan													
						Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				1 Dokumen	25,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	25,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi													
						Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				1 Laporan	25,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	25,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi													
						Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	25,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	25,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
123	3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan nilai ekspor	20%			15 %	169,500,000				20%	114,500,000			
	3	30	05	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Ekspor Unggulan yang meningkat penjualannya	3Produk			3 Produk	169,500,000				3Produk	114,500,000			
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional													
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				2 Pelaku Usaha	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal													
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				2 Pelaku Usaha	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan													
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				3 Pelaku Usaha	7,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	7,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor													
						Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				3 Produk	62,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	7,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
124	3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTPP yang tertib ukur	56,41%			53,85 %	230,000,000				56,41%	240,000,000			
	3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTPP yang ditera, tera ulang, dan diawasi	2500Unit			2300 Unit	230,000,000				2500Unit	240,000,000			
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang													
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				2.2 Unit	130,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	140,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal													
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				5 Orang	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal													
						Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				2 Unit	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	

No				Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah							
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
125	3	30	07		PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk lokal yang meningkat omsetnya	3,0%			2 %	155,000,000						3,0%	80,000,000				
		3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang meningkat omsetnya	0Buah		3 Buah	155,000,000					-	4Buah	80,000,000				
	3	30	07	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				30 Orang	10,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		10,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				5 UMKM	20,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		20,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				3 UMKM	125,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1,404,424,146							1,245,165,688				
126	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pengembangan Industri yang Ditangani	100%			75 %	1,115,000,000						100%	931,000,000				
		3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	90%		70 %	1,115,000,000					-	90%	931,000,000				
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				8 Dokumen	80,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		80,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				10 Dokumen	150,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		151,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				5 Dokumen	85,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		300,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		300,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN			
127	3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri Kecil dan menengah yang berizin	100%			100 %	90,000,000						100%	90,000,000				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	3	31	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IUI Kecil dan Menengah yang difasilitasi perizinannya	45Dokumen			30 Dokumen	90,000,000			-	45Dokumen	90,000,000			
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Dokumen	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)													
						Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				30 Dokumen	40,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	40,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
128	3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah Data Informasi Industri Kabupaten Pangandaran yang diinformasikan	50%			30 %	199,424,146					50%	224,165,688		
	3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia	30Data			20 Data	199,424,146			-	30Data	224,165,688			
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)													
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				12 Dokumen	139,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	160,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas													
						Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				3 Dokumen	30,212,073	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	32,082,844	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
	3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas													
						Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				3 Dokumen	30,212,073	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	32,082,844	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						8,389,160,102						3,605,768,248		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8,389,160,102						3,605,768,248		
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						8,389,160,102						3,605,768,248		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah							
1	2	18	01		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
129	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur	64Nilai			81 % 81 % 81 % 81 %	2,981,488,235						64Nilai	2,883,026,178				
	2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	3Dokumen			3 Dokumen	38,309,280					-	3Dokumen	55,709,880				
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	24,700,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		42,100,880	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1,692,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		1,693,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1,692,920	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		1,693,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,692,920	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		1,693,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,692,920	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		1,693,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	5,144,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		5,144,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1,692,920	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		1,693,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	15Dokumen			15 Dokumen	1,832,448,650					-	15Dokumen	2,092,725,837				
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1,803,753,350	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		2,064,029,837	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	23,309,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		23,310,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2,692,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	2,693,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2,692,600	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	2,693,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1Laporan		1 Laporan	23,309,800					-	1Laporan	23,310,000	
	2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	23,309,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	23,310,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang Disusun	1Dokumen		1 Dokumen	23,309,740					-	1Dokumen	23,310,000	
	2	18	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah													
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	23,309,740	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	23,310,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun	1Dokumen		1 Dokumen	19,313,800					-	1Dokumen	100,734,498	
	2	18	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	19,313,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	19,314,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 Orang	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	62,263,535	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				16 Orang	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	19,156,963	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun	3Laporan		3 Laporan	130,393,891					-	3Laporan	241,293,203	
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2,463,978	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	2,281,750	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	27,986,359	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	45,901,075	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	6,884,205	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	15,843,875	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional					Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	16,993,938	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		30,854,540	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	6,516,184	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		10,954,800	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	69,549,227	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		135,457,163	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1Laporan		1 Laporan	0					-	1Laporan	33,802,912					
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		10,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		23,802,912	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	3Laporan		3 Laporan	766,346,250					-	3Laporan	197,702,000					
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				280 Laporan	2,775,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		3,102,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	580,262,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		64,400,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	183,308,850	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		130,200,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	4Laporan		4 Laporan	148,056,824					-	4Laporan	114,437,848					
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40,221,788	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		47,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	47,114,276	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	49,075,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2,775,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	7,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	57,945,760	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	10,862,848	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
130	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	Cakupan Pertumbuhan Jumlah Investor	3000Investor		201 Investor	67,472,915					3000Investor	110,763,000		
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1Dokumen		1 Dokumen	0				-	1Dokumen	110,763,000		
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													
						Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				0 Dokumen	0	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko													
						Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				0 Dokumen	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	110,763,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1Dokumen		1 Dokumen	67,472,915				-	1Dokumen	0		
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	67,472,915	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
131	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan Peluang Investasi Yang Terpublikasi	20Kegiatan		10 %	81,321,662					20Kegiatan	221,526,000		
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10Dokumen		8 Dokumen	81,321,662				-	10Dokumen	221,526,000		
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				8 Dokumen	81,321,662	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	110,763,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				0 Dokumen	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-	110,763,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
132	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	70Nilai		85 %	5,208,749,723					70Nilai	327,757,570		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2	18	04	2.01																
	2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1Laporan			1 Laporan	5,208,749,723			-		1Laporan	327,757,570			
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
						Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				368 Dokumen	16,266,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		35,927,200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				368 Pelaku Usaha	5,127,863,723	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		161,473,630	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
						Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	16,266,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		85,106,300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
						Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				368 Kegiatan Usaha	48,354,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		45,250,440	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
133	2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Kepatuhan Pendataan Nilai Investasi PMDN & PMATERhadap Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	20Kegiatan 0Kegiatan			428,71 Milyar Rupiah	32,532,000					20Kegiatan 0Kegiatan	45,099,000			
	2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3Laporan 0Laporan			3 Laporan	32,532,000			-		3Laporan 0Laporan	45,099,000			
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya														
						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya				0 Kegiatan Usaha.		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				0 Pelaku Usaha		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal														
						Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				50 Kegiatan Usaha	32,532,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		45,099,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
134	2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	10Dokumen			10 %	17,595,567					10Dokumen	17,596,500			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	18	06	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1Dokumen			1 Dokumen	17,595,567					-	1Dokumen	17,596,500						
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
						Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				12 Dokumen	17,595,567	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		17,596,500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN													7,033,584,813						
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													7,033,584,813						
	2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													6,645,766,258						
135						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	92,25% 92,25% 97,5% 94%		92 % 87,5 % 92,25 % 87,5 %	5,141,310,255						92,25% 92,25% 97,5% 94%	5,772,590,544						
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	75% 75% 75%		70 % 70 % 70 %	75,709,500					-	75% 75% 75%	84,559,297						
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	69,008,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		79,310,977	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	6,700,700	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,248,320	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	75%		70 %	3,103,535,549					-	75%	3,607,453,460						
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	3,012,440,049	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3,475,603,712	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	60,939,600	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		77,160,612	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	24,068,700	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		49,575,600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	6,087,200	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,113,536	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	45 & 11.100Jenis & Buah		44 & 11.080 Jenis & Buah	82,600,800					-	45 & 11.100Jenis & Buah	89,484,320						
	2	23	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	82,600,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		89,484,320	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	85%			84 %	28,999,800					-	85%	31,000,000					
	2	23	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	28,999,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		31,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	85%			83 %	317,924,921					-	85%	325,958,533					
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	28,612,602	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		29,122,406	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	49,742,483	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		50,715,270	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	29,372,980	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		29,893,307	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10,999,056	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	199,197,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		202,727,550	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%			90 %	225,521,418					-	100%	229,576,351					
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	225,521,418	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		229,576,351	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	85%			80 %	895,125,983					-	85%	925,243,556					
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	5,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,770,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	325,900,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		355,870,356	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	564,225,983	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		567,603,200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	85%			80 %	411,892,284					-	85%	479,315,027					
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	246,896,990	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		287,484,487	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	90,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		91,830,540	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	74,995,294	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
136	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	20,24Indeks		19,61 Indeks	7,064,439,344						20,24Indeks	780,009,278					
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aspek pembangunan literasi masyarakat	7Aspek		7 Aspek	1,756,184,708					-	7Aspek	455,127,117					
	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																	
						Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				11 Layanan	1,459,999,788	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		139,091,002	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	27,499,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	02	2.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				12 Eksemplar	20,385,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		24,036,115	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																	
						Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				16 Perpustakaan	24,800,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		26,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	02	2.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				6 Perpustakaan	25,500,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		26,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2 Orang	10,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		12,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				2 Layanan	24,999,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka																	
						Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				320 Eksemplar	54,999,820	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																	
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				320 Eksemplar	82,999,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		83,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	24,999,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Budaya Gemar Membaca	16,16Nilai		15,77 Nilai	5,308,254,636					-	16,16Nilai	324,882,161					
	2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional	Daerah									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Jumlah Lokus Pembudayaan Kegerman Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				60 Lokus	76,634,609	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		90,400,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	20,517,429	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		22,385,909	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				16 Orang	72,096,252	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		72,096,252	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
						Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				14 Perpustakaan	5,081,230,670	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		80,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				120 Orang	57,775,676	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
137	2	23	03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan	10%			10 %	87,370,000						10%	93,166,436						
	2	23	03	2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang didigitalisasi/Alih aksarakan	1Dokumen			1 Dokumen	55,000,000					-	1Dokumen	55,000,000						
	2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
						Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				10 Orang	30,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
						Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				1 Eksemplar	25,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	23	03	2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan seleksi budaya etnis nusantara	2Kegiatan			2 Kegiatan	32,370,000					-	2Kegiatan	38,166,436						
	2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
						Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				1 Eksemplar	23,721,600	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		27,969,297	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	23	03	2.02	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
						Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan				1 Eksemplar	8,648,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		10,197,139	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																		387,818,555	
138	2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai LAKE Kabupaten/Kota	(AA) 4180Nilai			(A) 3353 Nilai	471,296,725						(AA) 4180Nilai	234,000,463						
	2	24	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD taat perundang-undangan	24SKPD			24 SKPD	90,740,485					-	24SKPD	98,570,961						
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
						Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				24 Berkas	44,463,100	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		48,300,173	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
						Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				1 Berkas	46,277,385	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		50,270,788	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	24	02	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dikelola	150Dokumen			125 Dokumen	290,741,340					-	150Dokumen	37,863,957						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI															
						Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI			1 Arsip	25,137,700	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	27,307,092	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis															
						Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			10 Arsip	265,603,640	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	10,556,865	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan simpul jaringan informasi	1Jaringan		1 Jaringan	89,814,900				-	1Jaringan	97,565,545				
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN															
						Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			1 Pengguna	44,426,100	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	48,259,956	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			26 Laporan	45,388,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	49,305,589	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
139	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase LAKE Kabupaten/Kota	100%		80,22 %	135,108,410					100%	153,818,092				
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah dokumen Penyusutan Arsip Inaktif	90Dokumen		80 Dokumen	61,584,968				-	90Dokumen	75,733,279				
	2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun															
						Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			2 Arsip	24,999,757	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	24	03	2.01	0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun															
						Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan			2 Berkas	36,585,211	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	50,733,279	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kearsipan yang teridentifikasi dan terselamatkan	90Dokumen		80 Dokumen	18,834,678				-	90Dokumen	20,556,864				
	2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana															
						Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			1 Arsip	18,834,678	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	20,556,864	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	2Dokumen		2 Dokumen	35,699,507				-	2Dokumen	36,770,000				
	2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan															
						Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan			1 Arsip	10,699,798	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	11,770,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan															
						Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan			1 Arsip	24,999,709	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang di Alih Mediasi melalui Autentikasi	13Naskah		13 Naskah	18,989,257				-	13Naskah	20,757,949				
	2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip															
						Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			13 Arsip	18,989,257	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	20,757,949	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
													Nasional					Daerah	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN					70,340,697,771							53,253,515,846		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					14,902,600,000								11,393,360,000	
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					14,902,600,000								11,393,360,000	
140	2	09	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase peningkatan ketersediaan cadangan pangan	8%		8 %	9,402,500,000						8%	7,653,250,000		
		2	09	02	2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan	1dokumen		1 dokumen	9,402,500,000				-	1dokumen	7,653,250,000		
	2	09	02	2.01	0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
						Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia			9 Unit	9,402,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		7,653,250,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
141	2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi Angka Kecukupan Protein	2100Angka 57Angka		2100 Angka 57 Angka	3,137,800,000						2100Angka 57Angka	2,901,580,000		
		2	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten / Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2dokumen		2 dokumen	536,300,000				-	2dokumen	39,930,000		
	2	09	03	2.01	0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis			24 Laporan	536,300,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		39,930,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2	09	03	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten /Kota	1dokumen		1 dokumen	121,000,000					-	1dokumen	133,100,000		
	2	09	03	2.02	0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			10 Ton	121,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		133,100,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-		1 dokumen	2,480,500,000					-	-	2,728,550,000		
	2	09	03	2.04	0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			4 Laporan	2,480,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		2,728,550,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
142	2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa rentan rawan pangan (jumlah)	1%		3 %	580,800,000						1%	638,880,000		
	2	09	04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1dokumen		1 dokumen	121,000,000					-	1dokumen	133,100,000		
	2	09	04	2.01	0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan			1 Dokumen	121,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		133,100,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2	09	04	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2dokumen		2 dokumen	459,800,000					-	2dokumen	505,780,000		
	2	09	04	2.02	0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3 Dokumen	363,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		399,300,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2	09	04	2.02	0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							12 Laporan	96,800,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		106,480,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
143	2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman	75%		65 %	1,781,500,000			-	75%	199,650,000				
	2	09	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2dokumen		2 dokumen	1,781,500,000			-	2dokumen	199,650,000				
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan													
						Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan			1 Dokumen	660,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	66,550,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan													
						Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			1 Laporan	1,121,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-	133,100,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						55,438,097,771				41,860,155,846				
	3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						55,438,097,771				41,860,155,846				
144	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	90% 90% 90% 90%		90 % 90 % 90 % 90 %	5,362,186,807					90% 90% 90% 90%	5,694,598,111			
	3	25	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2dokumen		2 dokumen	99,234,145				-	2dokumen	106,830,356			
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	63,855,240	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	71,600,507	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			24 Laporan	35,378,905	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	35,229,849	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	3	25	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	4dokumen		4 dokumen	4,366,307,571				-	4dokumen	4,636,507,560			
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			546 Orang/bulan	4,248,648,356	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	4,519,295,513	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	44,778,405	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	44,629,349	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	61,272,905	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	61,123,849	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			13 laporan	11,607,905	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	11,458,849	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional	Daerah						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1dokumen						-		1dokumen	40,581,349	
	3	25	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD												
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							-			40,581,349	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	1dokumen						-		1dokumen	38,161,349	
	3	25	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah												
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah							-			38,161,349	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1dokumen						-		1dokumen	34,786,349	
	3	25	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan												
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							-			34,786,349	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7dokumen						-		7dokumen	406,893,379	
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							-			13,289,337	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							-			105,150,282	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							-			66,794,349	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							-			18,354,364	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							-			36,301,249	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							-			106,397,449	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							-			60,606,349	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3dokumen						-		3dokumen	290,475,011	
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							-			22,554,349	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							-			70,588,049	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	188,481,669	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangiajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		197,332,613	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN				
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3dokumen		3 dokumen	128,809,926					-	3dokumen	140,362,758					
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	77,956,330	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangiajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		81,807,274	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN				
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	26,738,191	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangiajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		30,589,135	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN				
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	24,115,405	Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangiajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		27,966,349	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN				
145	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,30%		0,30 %	26,948,372,000						0,30%	25,615,095,000					
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Penangkapan ikan	3dokumen		3 dokumen	22,045,455,715					-	3dokumen	21,365,895,000					
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																	
						Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	181,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		199,650,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN				
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																	
						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				2 Unit	16,580,920,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		13,876,245,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN				
	3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																	
						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				5 Unit	5,283,035,715	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		7,290,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN				
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Nelayan Kecil	3laporan		3 laporan	2,516,914,285					-	3laporan	2,289,000,000					
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																	
						Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				500 Orang	1,861,914,285	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		2,009,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN				
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																	
						Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				2 Kelompok	242,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		130,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN				
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																	
						Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				2 Unit Usaha	413,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		150,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN				
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2dokumen		2 dokumen	1,660,002,000					-	2dokumen	1,234,200,000					
	3	25	03	2.03	0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				2						1 Dokumen	242,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		266,200,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																
										8 Layanan	1,418,002,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		968,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
			3	25	03	2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	2dokumen		2 dokumen	242,000,000				-	2dokumen	242,000,000				
	3	25	03	2.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																
										1 Dokumen	121,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		121,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
	3	25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																
										10 Rekomendasi	121,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		121,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
			3	25	03	2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	2dokumen		2 dokumen	242,000,000				-	2dokumen	242,000,000				
	3	25	03	2.05	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																
										1 Dokumen	121,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		121,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
	3	25	03	2.05	0002	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																
										1 Rekomendasi	121,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		121,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
			3	25	03	2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	2dokumen		2 dokumen	242,000,000				-	2dokumen	242,000,000				
	3	25	03	2.06	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																
										1 Dokumen	121,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		121,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
	3	25	03	2.06	0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																
										1 Rekomendasi	121,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		121,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
146	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0,20%		0,20 %	17,148,301,900						0,20%	6,211,853,555				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah				
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	25	04	2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen izin usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan	2dokumen			2 dokumen	242,000,000					-	2dokumen	266,200,000	
3 25 04 2.01 0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																			
						Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			1 Rekomendasi	121,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		133,100,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3 25 04 2.01 0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																			
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan			5 Rekomendasi	121,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		133,100,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah dokumen kelayakan usaha Pembudidaya Ikan Kecil skala kecil	4dokumen			4 dokumen	2,666,640,350					-	4dokumen	927,540,350	
3 25 04 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																			
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				12 Kelompok	2,091,890,350	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		295,315,350	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 25 04 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																			
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				10 Kelompok	121,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		133,100,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 25 04 2.02 0003 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																			
						Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				5 Kelompok	151,250,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		166,375,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 25 04 2.02 0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																			
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				5 Kelompok	302,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		332,750,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	04	2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen izin usaha Pembudidaya Ikan Kecil	150dokumen			125 dokumen	217,800,000					-	150dokumen	239,508,000	
3 25 04 2.03 0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				10 Rekomendasi	121,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		133,100,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3 25 04 2.03 0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Rekomendasi	96,800,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		106,408,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya	350ton		325 ton	14,021,861,550					-	350ton	4,778,605,205				
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	60,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		66,550,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3,952,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		1,597,200,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				8 Unit	8,527,111,550	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		1,484,380,205	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	211,750,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		232,925,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
	3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																
						Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				50 Orang	60,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		66,550,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
	3	25	04	2.04	0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan ikan di Darat																
						Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi				5 Ha	605,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		665,500,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
	3	25	04	2.04	0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																
						Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				50 Orang	605,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		665,500,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
147	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Usaha Perikanan Darat yang Memenuhi Ketentuan	5%		5 %	2,759,733,540						5%	3,035,710,194				
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan	2dokumen		2 dokumen	2,759,733,540					-	2dokumen	3,035,710,194				
	3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2,662,936,540	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		2,929,230,194	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			
	3	25	05	2.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	96,797,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		106,480,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
148	3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase penyediaan pasar terhadap produksi hasil perikanan	90%			90 %	3,219,503,524									
		3	25	06	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen izin usaha Pengolahan hasil Perikanan	5dokumen		5 dokumen	141,446,006			-	5dokumen	141,446,006				
	3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	141,446,006	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		141,446,006	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	5dokumen		4 dokumen	250,000,000					-	5dokumen	250,000,000		
	3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil														
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				10 Unit Usaha	250,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		250,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	2dokumen		2 dokumen	2,828,057,518					-	2dokumen	911,452,980		
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6 Ton	2,328,057,518	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		411,452,980	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				50 Pelaku Usaha	500,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		500,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
						DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN												37,435,100,542		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												2,173,933,500		
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												2,173,933,500		
149	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	20%		16 %	11,566,235,000					20%	1,818,481,000			
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebudayaan masyarakat lokal yang dikelola	20%		16 %	11,375,835,000					-	20%	1,622,724,000		
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
						Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				1 Objek	11,375,835,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		1,622,724,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional masyarakat lokal yang dilestarikan	20%		16 %	190,400,000					-	20%	195,757,000		
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	190,400,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		195,757,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
150	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	13%		9 %	299,058,000					13%	355,452,500			
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	13%		9 %	196,655,000					-	13%	231,817,500		
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				5 Objek	94,885,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		97,878,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya																	
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	101,770,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		133,939,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya yang dikelola	13%		9 %	102,403,000					-	13%	123,635,000					
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya																	
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				2 Objek	102,403,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		123,635,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					49,468,247,578							35,261,167,042					
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					49,468,247,578							35,261,167,042					
151	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	90% 90% 90% 90%		90 % 90 % 90 % 90 %	11,013,015,767						90% 90% 90% 90%	11,829,621,042					
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	90% 90% 90%		90 % 90 % 90 %	122,404,476					-	90% 90% 90%	123,636,500					
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	71,406,840	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		72,121,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,549,480	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2,576,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,549,480	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2,576,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,549,480	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2,576,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,549,480	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2,576,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	35,699,926	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36,060,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	5,099,790	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5,151,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	90%		90 %	7,012,002,245					-	90%	7,704,552,542					
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	6,915,093,245	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7,606,674,042	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	30,603,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30,909,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	30,603,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30,909,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	30,603,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30,909,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	5,100,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5,151,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik Jumlah Unit barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	900Unit/Buah 25Jenis		25 Jenis 900 Unit/Buah	61,206,000					-	900Unit/Buah 25Jenis	61,818,000	
	3	26	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	30,603,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30,909,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	30,603,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30,909,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	30%		20 %	61,206,000					-	30%	61,818,000	
	3	26	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				2 Laporan	30,603,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30,909,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah													
						Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	30,603,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30,909,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	90%		90 %	365,391,810					-	90%	368,605,000	
	3	26	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	65,420,960	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		65,757,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	55,085,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55,636,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	28,051,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		28,333,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	105,070,250	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		106,151,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	111,763,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		112,727,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
													Nasional					Daerah	
1																			
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	90%											
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	15,294,084	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	15,454,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	443,037,378	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	447,468,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	25,448,360	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	25,757,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	275,502,205	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	278,257,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			27 Dokumen	40,798,824	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	41,212,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			25 Laporan	76,497,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	77,272,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			150 Laporan	306,019,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	309,090,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	90%		90 %	814,247,125					-	90%	906,664,500	
	3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			3 Unit	589,912,354	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	679,998,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 Unit	101,989,466	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	103,030,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10 Unit	122,345,305	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	123,636,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	90%		90 %	807,412,000					-	90%	815,592,000	
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 Laporan	37,743,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	38,121,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	350,415,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	354,017,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			5 Laporan	419,253,600	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	423,453,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	90%		90 %	586,549,260					-	90%	592,422,500	
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			11 Unit	255,019,962	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	257,575,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	102,009,298	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	103,030,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah							
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	25,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25,757,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	204,020,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		206,060,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
152	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	18%		14 %	34,314,241,047						18%	18,115,205,000				
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang dikelola	18%		14 %	2,226,373,840					-	18%	2,476,862,000				
	3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	1,637,917,440	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		1,861,408,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	130,956,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		151,818,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	457,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		463,635,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	18%		14 %	512,000,000					-	18%	770,175,500				
	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	512,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		770,175,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola	18%		14 %	31,116,822,542					-	18%	14,404,532,000				
	3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Dokumen	4,581,023,930	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		4,642,465,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	4,372,360,418	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		6,936,074,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				7 Unit	21,816,204,814	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG PARIWISATA-PENUGASAN, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		2,024,694,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	138,174,540	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		412,120,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
						Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	209,058,840	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		389,179,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1																			
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan	50%		50 %	459,044,665			-	50%	463,635,500			
	3	26	02	2.04	0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota													
							Jumlah usaha yang dibina dan diawasi			3 Usaha	331,532,475	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		334,848,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota													
							Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota			50 Dokumen	76,507,300	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		77,272,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	02	2.04	0013	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)													
							Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)			2 Unit Usaha	51,004,890	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		51,515,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
153	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dipasarkan	45%		35 %	2,575,138,591					-	45%	3,734,830,500	
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata yang dipasarkan dan dipromosikan	45%		35 %	2,575,138,591			-	45%	3,734,830,500			
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			1 Dokumen	153,014,986	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		154,545,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri													
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			1 Dokumen	102,009,883	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		103,030,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata													
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			3 Dokumen	310,299,633	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		566,655,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota													
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			1 Kegiatan	1,047,427,169	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		1,504,087,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri													
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			1 Promosi	962,386,920	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		1,406,513,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
154	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dan dilindungi	18%		14 %	408,039,550					-	18%	412,120,000	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	18%		14 %	408,039,550					-	18%	412,120,000	
	3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan													
							Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan			1 Dokumen	102,009,850	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		103,030,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	26	04	2.02	0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan													
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif			1 Laporan	204,020,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		206,060,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual															
						Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual		2 Kegiatan	51,004,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		51,515,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif															
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		1 Laporan	51,004,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		51,515,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
155	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi keratif yang berdaya saing	35%		25 %	1,157,812,623				35%	1,169,390,500					
		3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas tingkat dasar	35%		25 %	918,089,470			-	35%	927,270,500				
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif															
						Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		200 Orang	306,029,850	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		309,090,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI															
						Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI		160 Orang	306,029,860	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		309,090,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata															
						Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		40 Orang	153,014,960	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		154,545,500	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		25 Orang	102,009,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		103,030,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif															
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1 Laporan	51,004,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		51,515,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	Persentase kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan	35%		25 %	239,723,153			-	35%	242,120,000					
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		15 Orang	137,713,253	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		139,090,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	05	2.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif															
						Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif		25 Orang	102,009,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		103,030,000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
						DINAS PERTANIAN											17,938,102,368				
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											17,938,102,368				
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											17,938,102,368				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
156	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	20% 90% 90% 90%			20 % 90 % 90 % 90 %	10,118,150,017						20% 90% 90% 90%	9,896,442,393		
	3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53Dokumen			9 dokumen	285,000,000				Pegawai Dinas Pertanian	9Dokumen	285,000,000			
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	85,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		85,000,000	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	50,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		50,000,000	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	150,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		150,000,000	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6Dokumen			1 dokumen	8,040,560,017				Pegawai Dinas Pertanian	1Dokumen	8,239,594,393			
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	7,961,375,017	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		8,160,409,393	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	69,185,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		69,185,000	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		5,000,000	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	5,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		5,000,000	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6Dokumen			1 dokumen	37,188,000				-	1Dokumen	40,906,000			
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	37,188,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	40,906,000	DINAS PERTANIAN		
	3	27	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	6Dokumen			1 dokumen	135,840,000				Pegawai Dinas Pertanian	1Dokumen	138,920,000			
	3	27	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	30,840,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		33,920,000	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	55,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		55,000,000	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	50,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		50,000,000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	6Dokumen			1 dokumen	299,556,000					Pegawai Dinas Pertanian	1Dokumen	303,212,000	
	3	27	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,050,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		6,655,000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	95,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		95,000,000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		10,000,000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	30,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		30,000,000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				280 Dokumen	28,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		28,000,000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		100,000,000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.06	0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	30,506,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		33,557,000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99Unit			22 unit	290,000,000					Pegawai Dinas Pertanian	25Unit	300,000,000	
	3	27	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	50,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		50,000,000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	75,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		80,000,000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.07	0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	165,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		170,000,000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6Dokumen			1 dokumen	896,906,000					Pegawai Dinas Pertanian	1Dokumen	442,400,000	
	3	27	01	2.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	9,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		9,000,000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	125,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		125,000,000	DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	762,906,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		308,400,000	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	2.09	0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109Unit		22 unit	133,100,000					Pegawai Dinas Pertanian	23Unit	146,410,000		
	3	27	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	121,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		133,100,000	DINAS PERTANIAN	
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	12,100,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Pegawai Dinas Pertanian		13,310,000	DINAS PERTANIAN	
157		3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Persentase Peningkatan Produksi Peternakan Indeks Pertanaman	2,0% 200Indeks 3% 2,3%		1,5 % 3 % 1,6 % 200 Indeks	4,810,000,000						2,0% 200Indeks 3% 2,3%	1,820,015,255		
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5dokumen		1 dokumen	600,000,000					Kelompok Tani	1dokumen	200,000,000		
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	150,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		100,000,000	DINAS PERTANIAN	
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				3 Laporan	450,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		100,000,000	DINAS PERTANIAN	
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	6dokumen		1 dokumen	1,100,000,000					Kelompok Tani	1dokumen	1,070,015,255		
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		100,000,000	DINAS PERTANIAN	
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
						Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	1,000,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		970,015,255	DINAS PERTANIAN	
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4dokumen		1 dokumen	50,000,000					Kelompok Tani	1dokumen	50,000,000		
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														
						Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		50,000,000	DINAS PERTANIAN	
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	588ekor		800 ekor	3,060,000,000					Kelompok Tani	100ekor	500,000,000		
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				800 Ekor	3,060,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		500,000,000	DINAS PERTANIAN				
158	3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian	2,0%			1,5 %	21,733,560,332						2%	3,863,590,000					
	3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian	5dokumen			1 dokumen	714,060,332					Kelompok Tani	1dokumen	693,590,000					
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																	
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	70,385,254	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		0	DINAS PERTANIAN				
	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																	
						Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP28				1 Dokumen	643,675,078	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		693,590,000	DINAS PERTANIAN				
	3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	75unit			89 unit	20,919,500,000					Kelompok Tani	15unit	3,070,000,000					
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																	
						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	2,000,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		800,000,000	DINAS PERTANIAN				
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																	
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	3,000,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		1,270,000,000	DINAS PERTANIAN				
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																	
						Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				83 Unit	15,919,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		1,000,000,000	DINAS PERTANIAN				
	3	27	03	2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	4ha			1 ha	100,000,000					Kelompok Tani	1ha	100,000,000					
	3	27	03	2.04	0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum																	
						Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan				1 Ha	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		100,000,000	DINAS PERTANIAN				
159	3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Bahan Pangan Asal Hewan Yang ASUH & Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	10%			10 %	483,987,500						10%	336,054,720					
	3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	5dokumen			1 dokumen	450,000,000					Kelompok Tani	1dokumen	300,000,000					
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																	
						Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	150,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		150,000,000	DINAS PERTANIAN				
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		150,000,000	DINAS PERTANIAN				
	3	27	04	2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	4dokumen			1 dokumen	33,987,500					Kelompok Tani	1dokumen	36,054,720					
	3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							1 Laporan	33,987,500	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		36,054,720	DINAS PERTANIAN		
160	3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	75%			70 %	800,000,000			75%	800,000,000			
	3	27	05	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	300ha			500 ha	800,000,000			Kelompok Tani	300ha	800,000,000		
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan												
							500 Ha	500,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		500,000,000	DINAS PERTANIAN		
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan												
							500 Ha	300,000,000	Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		300,000,000	DINAS PERTANIAN		
161	3	27	06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	100%			100 %	50,000,000			100%	50,000,000			
	3	27	06	2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4dokumen			1 dokumen	50,000,000			Kelompok Tani	1dokumen	50,000,000		
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian												
							1 Laporan	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		50,000,000	DINAS PERTANIAN		
162	3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	10%			10 %	1,172,000,000			10%	1,172,000,000			
	3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang Skornya Naik	672unit			112 unit	1,172,000,000			Kelompok Tani	112unit	1,172,000,000		
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa												
							10 Unit	200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		200,000,000	DINAS PERTANIAN		
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa												
							112 Unit	693,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		693,000,000	DINAS PERTANIAN		
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota												
							2 Unit	279,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	Kelompok Tani		279,000,000	DINAS PERTANIAN		
					SEKRETARIAT DAERAH												73,587,407,215	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												201,593,867	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												201,593,867	
163	2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Diselesaikan	100%			100 %	100,000,000			100%	0			
	2	10	04	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5Laporan			5 Laporan	100,000,000			-	0Laporan	0		
	2	10	04	2.01	0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanian dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												
							5 Dokumen	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		0	SEKRETARIAT DAERAH		
	2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Berita Acara	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		0	SEKRETARIAT DAERAH	
164	2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan	100%			100 %	20,000,000						100%	18,331,427		
	2	10	05	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%			100 %	20,000,000					-	100%	18,331,427		
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	20,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		18,331,427	SEKRETARIAT DAERAH	
165	2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	100%			100 %	161,053,239						100%	183,262,440		
	2	10	10	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	12Laporan			12 Laporan	161,053,239					-	12Laporan	183,262,440		
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		61,103,877	SEKRETARIAT DAERAH	
	2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				12 Dokumen	55,503,547	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		61,053,902	SEKRETARIAT DAERAH	
	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	55,549,692	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		61,104,661	SEKRETARIAT DAERAH	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														73,385,813,348	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH														73,385,813,348	
166	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Fasilitas Keprotokolan dan Dokumentasi Kegiatan KDH / WKDH yang dilaksanakan Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase Penataan Kelembagaan Organisasi, Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik Tatalaksanaan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Daerah	92% 100% 100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 89 %	42,497,479,998						92% 100% 100% 0% 100% 0%	45,418,476,219		
	4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	-			100 %	282,720,000					-	-	311,298,000		
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	235,620,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Ciptakarva	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		259,182,000	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	10,200,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11,322,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	10,200,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11,322,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	10,200,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11,322,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	16,500,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18,150,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	-			100 %	18,693,047,865				-		-	20,562,352,218	
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					98 Orang/bulan	18,371,055,865	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20,208,161,018	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4 Dokumen	303,600,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		333,960,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	9,196,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10,115,600	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					3 Laporan	9,196,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10,115,600	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			12 Dokumen	70,686,000				-		-	77,754,600	
	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	70,686,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		77,754,600	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			2 Laporan	465,794,945				-		-	512,374,440	
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	223,025,165	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		245,327,682	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					8 Dokumen	19,140,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21,054,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					35 Orang	223,629,780	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		245,992,758	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keberhasilan Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	-			100 %	3,389,958,620				-		-	2,927,739,577	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					37 Paket	33,619,841	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36,982,259	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1,179,826,599	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1,297,809,258	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	132,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		145,200,000	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	126,812,180	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			139,493,398	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													129,470,000	SEKRETARIAT DAERAH
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	117,700,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-				
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				290 Laporan	1,800,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			1,178,784,662	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang dibeli	-		4 Jenis	235,619,824				-		-		259,181,806	
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	123,419,824	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			135,761,806	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	112,200,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			123,420,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	-		100 %	9,817,984,000				-		-		10,799,782,400	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7 Laporan	24,684,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			27,152,400	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2,310,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			2,541,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Laporan	1,763,300,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			1,939,630,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	5,720,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			6,292,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang di Pelihara	-		7 Jenis	1,710,577,885				-		-		1,516,365,648	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	836,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			919,600,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	363,363,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			399,699,300	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				7 Unit	11,214,885	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			12,336,374	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	500,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			184,729,974	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase fasilitasi operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan	-		100 %	1,319,113,668				-		-		1,838,452,619	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	343,377,428	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			1,037,715,171	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	207,267,940	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		227,994,734	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	168,468,300	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		185,315,130	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	600,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		387,427,584	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Jumlah Jenis Kerumahtangaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi	2Jenis		2 Jenis	848,616,175					-	2Jenis	933,477,793					
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																	
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	395,726,100	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		435,298,710	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																	
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	277,869,075	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		305,655,983	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																	
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	175,021,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		192,523,100	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase SOTK perangkat daerah yang ditata	-		100 %	2,218,655,516					-	-	2,440,521,068					
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																	
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	755,468,736	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		831,015,610	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	468,842,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		515,726,200	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	444,399,956	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		488,839,952	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	55,550,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		61,105,000	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	494,394,824	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		543,834,306	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang dilaksanakan	-		100 %	3,444,705,500					-	-	3,239,176,050					
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan																	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				4 Laporan	638,269,500	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		702,096,450	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				3 Laporan	1,342,138,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		926,351,800	SEKRETARIAT DAERAH				
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																	
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				6 Laporan	1,464,298,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1,610,727,800	SEKRETARIAT DAERAH				
167	4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelayanan Administrasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan Kerjasama yang dirumuskan Persentase Produk Hukum Daerah yang Diharmonisasi	90% 95% 95%			90 % 90 % 92 %	31,183,235,881						90% 95% 0%	22,716,692,050					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah						
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	TinggiNilai			Tinggi Nilai	2,700,000,000				-	TinggiNilai	3,165,189,390			
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan															
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				6 Dokumen	800,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		647,667,020	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		733,260,000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah															
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				12 Dokumen	1,600,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,784,262,370	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	281Kegiatan			281 Kegiatan	25,799,214,225				-	281Kegiatan	16,568,553,959			
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual															
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				37 Dokumen	10,550,499,450	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Nilai Investasi melalui Infrastruktur dan Konektivitas Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi	-		3,094,967,706	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial															
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				216 Dokumen	14,804,353,275	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Penanganan Stunting	-		12,984,788,603	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat															
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				28 Dokumen	444,361,500	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan	-		488,797,650	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselenggarakan	100%			100 %	2,434,021,656				-	100%	2,677,423,822			
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah															
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				75 Dokumen	693,383,966	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		762,722,363	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum															
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	1,485,757,790	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		1,634,333,569	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum															
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				75 Dokumen	254,879,900	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		280,367,890	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen kerjasama daerah	7Dokumen			7 Dokumen	250,000,000				-	7Dokumen	305,524,879			
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri															
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				7 Dokumen	250,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		305,524,879	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
168	4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Pengendalian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Penyusunan Program, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Pengendalian Pembangunan Fisik dan Keuangan Sesuai Target	90% 100% 95%			100 % 90 % 94 %	4,773,313,708						90% 100% 95%	5,250,645,079		
	4	01	03	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan	100%			100 %	1,420,946,250					-	100%	1,563,040,875		
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	593,097,319	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		652,407,051	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				3 Laporan	360,815,300	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Sektor Unggulan dalam Penanganan Kemiskinan dan Penyerapan Tenaga Kerja	-		396,896,830	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	467,033,631	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Pusat Ekonomi Masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif	-		513,736,994	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Keberhasilan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%			100 %	1,991,279,048					-	100%	2,190,406,953		
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen	699,326,452	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		769,259,097	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	293,233,820	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		322,557,202	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				24 Laporan	998,718,776	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1,098,590,654	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	70Nilai			57,5 Nilai	1,173,913,620					-	70Nilai	1,291,304,982		
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				682 Dokumen	273,673,620	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		301,040,982	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				682 Dokumen	80,960,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		89,056,000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				160 Orang	819,280,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		901,208,000	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	5Kegiatan			5 Kegiatan	187,174,790					-	5Kegiatan	205,892,269		
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	162,524,890	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		178,777,379	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	24,649,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27,114,890	SEKRETARIAT DAERAH				
						SEKRETARIAT DPRD					46,490,443,924							65.162.219.911,68					
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					46,490,443,924							65.162.219.911,68					
	4	02				SEKRETARIAT DPRD					46,490,443,924							65.162.219.911,68					
169	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur, 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%			95 %	29,709,343,789					100%	47,014,699,076					
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	9Dokumen			9 Dokumen	72,088,500				-	9Dokumen	197,096,581					
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	54,900,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	58,005,946	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1,110,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1,030,301	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1,050,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1,030,301	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	4,612,500	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	45,333,244	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	4,612,500	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	45,333,244	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	4,612,500	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	45,333,244	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1,191,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1,030,301	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang tersusun dengan baik	57Dokumen			57 Dokumen	4,352,070,000				-	57Dokumen	20,232,230,881					
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					25 Orang/bulan	4,293,960,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	4,354,609,381	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					14 Dokumen	48,600,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	69,713,257	SEKRETARIAT DPRD				
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6,600,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		15,779,059,815	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	540,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,151,505	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	1,500,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		15,454,515	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	870,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		8,242,408	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang tersedia dalam kondisi baik	43Dokumen		43 Dokumen 43 Dokumen	82,354,500				-		-	43Dokumen	81,074,385	
	4	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	645,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		875,756	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	17,583,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		15,701,787	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	922,500	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		824,240	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2,574,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,575,753	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				24 Laporan	3,630,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,090,903	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	57,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		58,005,946	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersusun	23Dokumen		23 Dokumen	611,316,480				-		-	023Dokumen	620,241,202	
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	142,390,880	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		144,242,140	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	27,525,600	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		27,818,127	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	125,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		128,787,625	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	61,525,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	61,818,060	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				180 Orang	254,875,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	257,575,250	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	780Dokumen		780 Dokumen	1,965,087,083					-	780Dokumen	2,923,513,989		
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	91,804,980	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	92,727,090	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	250,499,442	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	317,111,219	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	51,910,984	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	51,515,050	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	179,633,100	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	181,537,746	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	183,843,950	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	154,545,150	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	74,887,302	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	84,484,682	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	206,717,325	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	208,862,104	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				240 Laporan	296,840,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	196,298,098	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	576,750,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1,582,857,198	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	52,200,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	53,575,652	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Prasarana yang baik dan layak fungsi	29Unit		29 Unit	456,970,722					-	29Unit	407,972,614		
	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	97,500,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	103,030,100	SEKRETARIAT DPRD		
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	94,849,810	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	100,894,743	SEKRETARIAT DPRD		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				26 Unit	184,620,912	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		121,623,691	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2 Unit	0	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		0	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	80,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		82,424,080	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Disediakan	1270Laporan		1270 Laporan	3,204,214,432			-		1270Laporan		2,237,319,360		
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1150 Laporan	15,300,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		15,454,515	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	583,014,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		463,635,450	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				108 Laporan	2,605,900,432	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,758,229,395	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang terpelihara	139Unit		139 Unit	901,888,086			-		139Unit		963,156,284		
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	234,990,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		254,597,680	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	312,160,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		310,347,267	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	22,500,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		25,757,525	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				64 Unit	93,500,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		130,333,077	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				27 Unit	25,200,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		25,757,525	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	60,520,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		61,818,060	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	51,008,086	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		51,515,050	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
						Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	102,010,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		103,030,100	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
													Nasional					Daerah
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah orang yang menerima layanan keuangan yang tersedia	120Orang		120 Orang	17,429,144,986					-	120Orang	18,157,083,710	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD												
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			40 Orang/Bulan	17,037,542,167	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	17,759,876,917	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD												
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			1 Paket	311,602,819	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	314,782,713	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD												
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			40 Orang	80,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	82,424,080	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan layanan administrasi DPRD yang tersedia	84Laporan	84 Laporan	634,209,000					-	84Laporan	1,195,010,070	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD												
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			72 Laporan	65,160,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	235,526,809	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD												
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			12 Laporan	569,049,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	959,483,261	SEKRETARIAT DPRD	
170	4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang telaksana dengan baik	73%		66 %	16,781,100,135						73%	18.147.520.835,68	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang tersusun	24Dokumen	24 Dokumen	3,150,805,295					-	24Dokumen	3,980,313,503	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah												
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			9 Dokumen	102,010,200	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	103,030,100	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah												
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			9 Dokumen	1,900,102,425	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	2,919,103,473	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan												
						Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan			2 Dokumen	51,004,900	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	51,515,050	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik												
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			4 Dokumen	897,687,970	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	906,664,880	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD												
						Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun			1 Dokumen	199,999,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen hasil pembahasan Kebijakan anggaran yang tersusun	7Dokumen	7 Dokumen	1,330,272,300					-	7Dokumen	1,344,542,805	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS												
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			1 Dokumen	265,034,460	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	267,878,260	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS												
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			1 Dokumen	265,034,460	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	267,878,260	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD												

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	265,034,460	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		267,878,260	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan													
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	265,034,460	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		267,878,260	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester													
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	5,100,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,151,505	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD													
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	265,034,460	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		267,878,260	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun	308Laporan		308 Laporan	737,359,400					-	308Laporan	744,938,119	
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum													
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				72 Laporan	92,855,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		93,788,918	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur													
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				60 Laporan	103,830,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		104,932,036	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat													
						Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				72 Laporan	92,805,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		93,788,918	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian													
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				72 Laporan	92,830,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		93,788,918	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam													
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				28 Laporan	76,475,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		77,272,575	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	92,854,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		93,788,918	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Dokumen	92,854,800	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		93,788,918	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah													
						Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	92,854,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		93,788,918	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen peningkatan kapasitas DPRD	45Dokumen		45 Dokumen	3,538,276,500					-	45Dokumen	3,157,874,626	
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD													
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	499,574,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		0	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD													
						Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	2,326,509,100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,349,784,824	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
						Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				12 Orang	60,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		123,636,120	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	360,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		370,908,360	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				28 Dokumen	248,226,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		250,696,961	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
						Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	9,167,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		9,272,709	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
						Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	34,800,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		53,575,652	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang tersusun	28Laporan		28 Laporan	3,093,513,000				-		28Laporan	3,125,591,174		
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				24 Laporan	297,670,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		300,689,226	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	35,615,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		36,060,535	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses														
						Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	2,760,228,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,788,841,413	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang tersusun	1Laporan		1 Laporan	195,580,440				-		1Laporan	6,709,126		
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
						Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	94,889,220	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		0	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	100,691,220	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		6,709,126	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Pembahasan Kerja Sama Daerah yang tersusun	33Dokumen		33 Dokumen	792,000,000				-		33Dokumen	804,675,384		
	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
						Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				33 Dokumen	792,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		804,675,384	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana	57Dokumen		57 Dokumen	3,943,293,200				-		57Dokumen	4.982.876.098,68		
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				16 Dokumen	2,857,691,700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,886,277,114	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
						Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	25,424,100	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		25,757,525	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah															
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					12 Dokumen	220,659,900	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		222.875.948,68	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD															
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					12 Dokumen	146,152,500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		147,666,861	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	02	2.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus															
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus					16 Dokumen	693,365,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		700,298,650	SEKRETARIAT DPRD	
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							21,379,820,346						20.418.858.437,29		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							21,379,820,346						20.418.858.437,29		
	5	01				PERENCANAAN							20,700,069,295							19.897.764.040,29	
171	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana pasarana kantor yang terpenuhi Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	98% 98% 95% 98%			93 % 97 % 97 % 97 %	11,498,147,522						98% 98% 95% 98%	11.548.184.630,29		
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	100%			100 % 100 % 100 %	138,249,600				-		100%	142,000,000		
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	107,799,760	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10 Laporan	30,449,840	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		32,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%			100 %	6,469,193,022				-		100%	6.665.799.961,44		
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					45 Orang/bulan	6,273,543,372	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		6.377.414.239,44	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					2 Dokumen	137,470,525	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		144,565,722	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	40,788,550	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		102,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1 Laporan	17,390,575	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		41,820,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%			968 Unit	42,570,000				-		100%	43,421,400		
	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							1 Laporan	42,570,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		43,421,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%						-	100%	145,000,000	
	5	01	01	2.05	0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
							1 Dokumen	41,958,180	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		45,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							70 Orang	100,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%						-	100%	2.243.236.381,69	
	5	01	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							2 Paket	25,563,313	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		26.075.570,60	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							2 Paket	1,537,699,845	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,247,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							1 Paket	279,999,637	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		333,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							3 Paket	32,101,604	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		32.743.805,09	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							1 Dokumen	44,518,466	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		46,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0007 Penyediaan Bahan/Material											
							1 Paket	72,632,173	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		80,417,006	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							12 Laporan	310,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		350,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							1 Dokumen	127,999,960	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		128,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%						-	100%	418.708.529,16	
	5	01	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel											
							1 Unit	125,973,302	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		128,520,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							16 Unit	284,498,460	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		290.188.529,16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%						-	100%	1,433,518,358	
	5	01	01	2.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional			Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	9,980,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		9,983,358	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	840,249,960	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		862,035,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	561,500,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		561,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%		100 %	453,460,000					-	100%	456,500,000					
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	343,460,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		346,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
172						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	110,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Cintakarya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		110,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase realisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	100% 62%		100 % 60 %	3,301,809,204						100% 62%	3,567,256,452					
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Aplikasi yang dikelola Jumlah dokumen tahapan penyusunan RKPD	1Aplikasi 12Dokumen		1 Aplikasi 12 Dokumen	2,168,247,638					-	1Aplikasi 12Dokumen	2,375,502,452					
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																	
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				4 Berita Acara	20,774,316	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		23,472,452	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	229,998,450	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		238,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	1,917,474,872	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,114,030,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemenuhan Data Perencanaan Pembangunan daerah	87%		82 %	169,991,420					-	87%	180,000,000					
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	169,991,420	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		180,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	62%		-	963,570,146					-	62%	1,011,754,000					
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				12 Laporan	963,570,146	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,011,754,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
173	5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase perangkat daerah yang memiliki keselarasan program RPJMD dan RKPD Prosentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran	100% 98%			96 % 100 %	5,900,112,569						100% 98%	4,782,322,958					
	5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	3Laporan 2Dokumen			4 Dokumen 3 Laporan	2,518,279,740					-	3Laporan 2Dokumen	1,256,991,855					
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	1,029,980,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	455,967,613	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	188,760,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	145,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	435,599,740	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	791,340,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	345,578,031	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	72,600,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	60,446,211	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	6Dokumen		6 Dokumen	675,831,137					Stake holders pembangunan di Kabupaten Pangandaran	6Dokumen	713,376,438					
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	220,979,600	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Stake holders pembangunan di Kabupaten Pangandaran	233,376,438	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	95,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Stake holders pembangunan di Kabupaten Pangandaran	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	94,998,242	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Stake holders pembangunan di Kabupaten Pangandaran	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	114,854,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Stake holders pembangunan di Kabupaten Pangandaran	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	74,999,794	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Stake holders pembangunan di Kabupaten Pangandaran	80,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	74,999,501	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Stake holders pembangunan di Kabupaten Pangandaran	80,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang disinergikan dan diharmonisasikan dengan perencanaan tingkat daerah	10Peta 13Dokumen	10 Peta 13 Dokumen	2,706,001,692				-		10Peta 13Dokumen	2,811,954,665			
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	260,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	265,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	10,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	15,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	9,999,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	15,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	1,987,211,174	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	2,024,154,960	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	10,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	15,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah														
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah				3 Laporan	10,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	15,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah														
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah				3 Laporan	10,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	15,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJM pada Bidang Kewilayahan				4 Laporan	408,790,718	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		447,799,705	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						679,751,051							521,094,397					
174	5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	60%			50 %	679,751,051						60%	521,094,397					
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	2Laporan			0 Dokumen 2 Laporan	179,750,780					-	0Laporan	181,094,397					
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																	
						Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				2 Laporan	179,750,780	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		181,094,397	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1Dokumen			1 Dokumen	299,999,989					-	0Dokumen	340,000,000					
	5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	299,999,989	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		340,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	5	05	02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2Dokumen			2 Dokumen	200,000,282					-	0Dokumen	0					
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				0 Laporan	200,000,282	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						375,268,515,500							407,022,608,750					
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						375,268,515,500							407,022,608,750					
	5	02			KEUANGAN						375,268,515,500							407,022,608,750					
175	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	97% 100% 96% 95%			95 % 97 % 93 % 100 %	22,077,644,550						97% 100% 96% 95%	24,795,285,980					
	5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	98% 98% 98%			98 % 98 % 98 %	170,000,000					-	98% 98% 98%	180,000,000					
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	90,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		95,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	80,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		85,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	99%			90 %	16,347,874,550					-	99%	17,324,035,980					
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	16,259,874,550	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		17,236,035,980	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	55,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		55,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	11,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		11,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	11,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		11,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	11,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		11,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	90%		82 %	55,000,000					-	90%	55,000,000					
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	55,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		55,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	99%		97 %	283,350,000					-	99%	284,350,000					
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	165,850,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		165,850,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	117,500,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		118,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	99%		94 %	443,000,000					-	99%	421,000,000					
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	15,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		10,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	175,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		158,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	40,000,000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		45,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	18,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		10,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	195,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		197,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	36%			30 %	2,352,070,000					-	36%	4,128,500,000					
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				8 Unit	1,137,500,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,185,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	490,300,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		328,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	165,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		170,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	259,270,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		145,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	300,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	99%		95 %	1,282,850,000					-	99%	1,307,900,000					
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7,850,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		7,900,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	785,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	490,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cibanten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		500,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	98%		96 %	1,143,500,000					-	98%	1,094,500,000					
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	475,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		495,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	28,500,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		29,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	285,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		295,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	355,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		275,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
176	5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen keuangan dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan Persentase kesesuaian dokumen penganggaran sesuai waktu dan ketentuan	100% 100%			100 % 100 %	347,870,870,950						100% 100%	366,751,663,770					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase PD yang mengirimkan RKA dan DPA persentase Raperda Raperbub APBD sesuai ketentuan	100% 100%			100 % 100 %	7,354,687,340					-	100% 100%	7,765,466,478					
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																	
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	564,643,200	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		592,875,800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																	
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	565,214,100	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		593,474,200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																	
						Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				36 Dokumen	458,438,200	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		481,360,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																	
						Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				36 Dokumen	471,747,100	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		495,334,400	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																	
						Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				36 Dokumen	472,474,200	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		496,098,900	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																	
						Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				36 Dokumen	616,353,100	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		647,170,700	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																	
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	968,147,400	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1,016,555,100	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																	
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				6 Dokumen	1,506,070,500	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,581,373,200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																	
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	637,972,500	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		701,769,750	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				25 Dokumen	329,136,940	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		362,050,634	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				29 Dokumen	329,136,940	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		362,050,634	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				20 Dokumen	289,088,360	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		289,088,360	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				36 Orang	146,264,800	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		146,264,800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase PD yang melaksanakan penyerapan belanja yang tertib dan sesuai ketentuan	95%		90 %	7,101,399,050					-	95%	2,861,483,625					
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	621,215,650	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		621,215,100	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				36 Dokumen	107,797,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		191,008,125	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				36 Dokumen	266,107,600	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		275,183,700	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				8 Dokumen	190,919,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		486,179,100	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	143,374,750	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		356,548,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																	
						Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	5,242,550,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		254,677,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																	
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				4700 Dokumen	183,801,300	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		313,756,300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				144 Orang	345,633,750	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		362,915,300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Peresentase PD yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP(Akrual)	95%		85 %	3,061,025,000				-	95%	3,168,994,400						
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	202,633,200	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		214,790,400	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																	
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				36 Dokumen	280,827,800	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		297,676,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	525,269,700	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		432,789,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	979,569,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,190,489,300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	709,810,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		652,187,800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				85 Orang	362,915,300	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		381,060,900	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyerapan anggaran belanja sesuai aturan	95%		90 %	329,344,317,360				-	95%	352,682,876,367					
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				12 Laporan	16,000,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		17,000,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				93 Laporan	277,986,576,260	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		298,592,983,967	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				93 Laporan	27,107,741,100	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		28,839,892,400	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				2 Laporan	8,250,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8,250,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik	100%		100 %	1,009,442,200				-	100%	272,842,900					
	5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																
						Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				12 Dokumen	110,657,800	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		115,008,300	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																
						Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	898,784,400	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		157,834,600	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
177	5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD yang tertib dan akuntabel oleh Perangkat Daerah	100%			100 %	5,320,000,000					100%	15,475,659,000					
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terinventarisir Presentase PD yang melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah sesuai standar	100% 100%			100 % 100 %	5,320,000,000				-	100% 100%	15,475,659,000					
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		10,996,404,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah															
						Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				0 Dokumen		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		300,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah															
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	750,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		250,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah															
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	400,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,059,255,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah															
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				12 Dokumen	2,500,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,425,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah															
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	850,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		900,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah															
						Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	250,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		275,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				45 Orang	270,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		270,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						BADAN PENDAPATAN DAERAH						21,234,897,000							21,235,303,499		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						21,234,897,000							21,235,303,499		
	5	02				KEUANGAN						21,234,897,000								21,235,303,499	
178	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	-		96 % 97 % 100 % 94 %	12,297,550,000						-		12,504,894,999		
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	-		97 % 97 % 97 %	55,125,000				-		-		57,881,250		
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	38,587,500	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-		40,516,875	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	16,537,500	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		17,364,375	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	-		90 %	6,152,496,638					-	-		6,232,646,921		
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/bulan	6,064,296,638	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		6,140,036,921	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Prioritas	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							5 Dokumen	38,587,500	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40,516,875	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
							1 Laporan	16,537,500	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17,364,375	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
							12 Laporan	16,537,500	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17,364,375	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
							12 Dokumen	16,537,500	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		17,364,375	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	-	82 Unit	38,587,500				-	-	40,516,875	
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
							3 Laporan	38,587,500	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40,516,875	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	-	97 %	864,701,302				-	-	907,936,366	
	5	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai										
							20 Unit	137,812,500	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		144,703,125	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							3 Paket	277,672,552	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		291,556,179	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
							5 Dokumen	29,216,250	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30,677,062	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
							40 Orang	420,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		441,000,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	-	94 %	1,020,740,810				-	-	1,036,953,050	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							1 Paket	78,828,750	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		82,770,187	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							1 Paket	385,820,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		389,678,200	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							1 Paket	55,125,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57,881,250	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							1 Paket	158,570,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160,155,700	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							4 Dokumen	16,167,060	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16,975,413	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
							12 Laporan	51,005,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		51,515,050	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	275,225,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		277,977,250	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	-			94 %	495,783,750					-	-	500,741,587	
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	151,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		153,015,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	191,268,750	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		193,181,437	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	153,015,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		154,545,150	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	-		95 %	2,776,405,000					-	-	2,804,610,050	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	11,025,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11,576,250	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	381,780,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		385,597,800	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	2,383,600,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2,407,436,000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	-		96 %	893,710,000					-	-	923,608,900	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	239,370,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		241,763,700	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	165,375,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		173,643,750	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	55,125,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57,881,250	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	173,750,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		181,912,500	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	260,090,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		268,407,700	BADAN PENDAPATAN DAERAH
179	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	100% 100% 100%			100 % 100 % 100 %	8,937,347,000						100% 100% 100%	8,730,408,500	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional	Daerah									
1																								
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				60 Dokumen	670,909,670	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		684,327,863	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				20 Laporan	86,179,402	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		87,902,990	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
	5					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH					17,400,244,799							18,518,416,692						
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					17,400,244,799								18,518,416,692					
	5	03				KEPEGAWAIAN					13,228,872,632								14,181,985,032					
180	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi Persentase Peningkatan Laporan Keuangan dengan kualitas baik Pesentase Peningkatan Kompetensi Aparatur	95% 95% 95% 95%			95 % 95 % 95 % 95 %	7,370,918,325						95% 95% 95% 95%	8,004,383,851					
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	95%			95 %	148,165,500				-		95%	162,982,050					
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	40,425,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		44,467,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH					
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,250,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5,775,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH					
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,250,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5,775,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH					
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,250,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5,775,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH					
	5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,250,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5,775,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH					
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	82,698,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90,967,800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH					
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4,042,500	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4,446,750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH					
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	95%			95 %	3,872,680,635					-	95%	4,259,948,698					
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3,815,245,635	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4,196,770,198	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH					
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	38,850,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42,735,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	10,500,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11,550,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4,042,500	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4,446,750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	4,042,500	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4,446,750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100%		100 %	42,892,500					-	100%	47,181,750					
	5	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				13 Laporan	4,042,500	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4,446,750	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	38,850,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42,735,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	95%		95 %	1,077,542,025					-	95%	1,188,015,098					
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	120,750,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		126,787,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	26,472,600	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		27,796,230	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang			42 Orang	646,819,425	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	42 Orang	711,501,368	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				42 Orang	52,500,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55,125,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				42 Orang	231,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		266,805,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana yang Disediakan	95%		95 %	640,673,978					-	95%	672,707,676					
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	10,395,728	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10,915,514	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	105,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110,250,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	21,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	22,050,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	44,100,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	46,305,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				17 Dokumen	24,428,250	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	25,649,662	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	68,250,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	71,662,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	367,500,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	385,875,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	100%		100 %	930,000,000			-		100%	977,025,000				
	5	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	300,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	315,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			
	5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	45,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	47,250,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	450,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	472,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			
	5	03	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya															
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			
	5	03	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud															
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			
	5	03	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	115,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	121,275,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			
	5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			
	5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	95%			95 %	300,863,687			-	-	-	95%	316,195,621	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,775,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6,352,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	90,088,687	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		94,593,121	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5,250,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	200,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang Dilaksanakan	95%			95 %	358,100,000				-	95%	380,327,958	
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	300,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		316,417,958	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	15,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud													
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	11,550,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12,705,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11,550,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12,705,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
181	5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase kegiatan layanan kepegawaian ASN yang terlaksana	100%			100 %	5,857,954,307						100%	6,177,601,181	
	5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%			100 %	1,576,677,487				-		100%	1,669,484,320	
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK	2 Dokumen			2 Dokumen	1,245,245,911	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	1,307,508,206	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																	
						Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	51,972,375	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		54,570,994	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																	
						Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				2 Lembaga	88,279,149	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		97,107,063	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	191,180,052	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210,298,057	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN	95%			91 %	889,101,200				-	95%	936,406,110					
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	56,997,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		62,696,700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																	
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	234,372,600	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		246,091,230	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen			2 Dokumen	597,731,600	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	627,618,180	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN yang Terealisasi	95%			91 %	1,713,067,166				-	95%	1,805,964,023					
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																	
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				11 Orang	1,272,602,216	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1,336,232,326	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	295,594,950	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		310,374,697	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	02	2.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				3 Dokumen	144,870,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		159,357,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelayanan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	96%			93 %	1,679,108,454				-	96%	1,765,746,728					
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	625,678,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		656,961,900	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	95,191,120	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		99,950,676	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																	
						Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				1 Orang	232,029,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		246,098,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				8 Orang	325,492,650	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		341,767,282	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	305,422,950	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		320,909,400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																	
						Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	95,294,734	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100,059,470	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					4,171,372,167							4,336,431,660					
182	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Aparatur Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%		89 %	4,171,372,167						100%	4,336,431,660					
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional, Kepimimpinan dan Prajabatan yang terealisasi	93%		89 %	4,171,372,167				-		93%	4,336,431,660					
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																	
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan			3 Laporan	4,171,372,167	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	4,336,431,660	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH				
						INSPEKTORAT					16,297,898,177							17,279,982,790					
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					16,297,898,177							17,279,982,790					
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH					16,297,898,177							17,279,982,790					
183	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas Baik 3. Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur 4. Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	95Persen 95Persen 95Persen 95Persen		92 Persen 92 Persen 92 Persen 92 Persen	11,317,898,177						95Persen 95Persen 95Persen 95Persen	12,091,832,790					
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	95% 95% 95%		92 Persen 92 Persen 92 Persen	290,000,000					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	95% 95% 95%	304,500,000					
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		105,000,000	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	12,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		12,600,000	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	12,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		12,600,000	INSPEKTORAT				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	12,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		12,600,000	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	12,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		12,600,000	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					6 Laporan	130,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		136,500,000	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	12,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		12,600,000	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34Dokumen			34 Dokumen	8,958,665,755					Terlaksananya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34Dokumen	9,583,257,790		
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					40 Orang/bulan	8,853,665,755	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9,473,007,790	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					28 Dokumen	47,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		49,350,000	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2 Laporan	36,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		37,800,000	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4 Laporan	22,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23,100,000	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah	42Laporan			42 Laporan	69,500,000					Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	42Laporan	72,975,000		
	6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen	7,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah		7,875,000	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					14 Laporan	12,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah		12,600,000	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					26 Laporan	50,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah		52,500,000	INSPEKTORAT	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	50Dokumen			52 Dokumen	510,000,000					Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50Dokumen	535,500,000					
	6	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	40,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		42,000,000	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				40 Dokumen	20,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		21,000,000	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	450,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		472,500,000	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah Paket Penyediaan Administrasi umum Perangkat Daerah 2. Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah	5Paket 4Dokumen			5 Paket 4 Dokumen	526,990,702					Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	5Paket 4Dokumen	553,350,000					
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		12,600,000	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	49,999,090	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		52,500,000	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	25,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		26,250,000	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	29,991,612	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		31,500,000	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	45,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		47,250,000	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	325,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		341,250,000	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	40,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		42,000,000	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan Barang Milik Daerah	95%			92 Persen	429,999,716					Terealisasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	494,000,000					
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	149,999,874	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terealisasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		200,000,000	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	119,999,842	Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terealisasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		126,000,000	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	160,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terealisasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		168,000,000	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Bulanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12Laporan		12 Laporan	279,998,762					Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12Laporan	294,000,000		
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5,250,000	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	80,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		84,000,000	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	194,998,762	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		204,750,000	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah prasarana yang baik dan layak fungsi	55Unit		51 Unit	252,743,242					Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55Unit	254,250,000		
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	30,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		30,000,000	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	194,243,242	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		194,250,000	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	28,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		30,000,000	INSPEKTORAT	
184	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD Nilai rata-rata maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) OPD	-		72,25 Nilai 3,15 Nilai	3,635,000,000						-	3,816,750,000		
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan 2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa dan Pengawasan Internal 3. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan APIP yang selesai ditindaklanjuti	-		15 Laporan 9 Laporan 12 Laporan	2,755,000,000					Berkurangnya Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	-	2,892,750,000		
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				22 Laporan	450,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Berkurangnya Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti		472,500,000	INSPEKTORAT	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				8 Laporan	585,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Berkurangnya Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	614,250,000	INSPEKTORAT		
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja														
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				74 Laporan	350,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Berkurangnya Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	367,500,000	INSPEKTORAT		
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan														
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				40 Laporan	95,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Berkurangnya Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	99,750,000	INSPEKTORAT		
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				40 Laporan	725,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Berkurangnya Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	761,250,000	INSPEKTORAT		
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
						Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	150,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Berkurangnya Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	157,500,000	INSPEKTORAT		
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 Dokumen	400,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Berkurangnya Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	420,000,000	INSPEKTORAT		
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-		42 Laporan	880,000,000					Tercapainya Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	924,000,000		
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				10 Laporan	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tercapainya Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	315,000,000	INSPEKTORAT		
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				32 Laporan	580,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tercapainya Penyelesaian Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	609,000,000	INSPEKTORAT		
185	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Jumlah Usulan Unit Kerja Zona Integritas	-			72,00 Nilai 4 Unit Kerja	1,345,000,000						-	1,371,400,000		
	6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-			2 Rekomendasi	60,000,000					Tersedianya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	34,650,000		
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	30,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tersedianya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	31,500,000	INSPEKTORAT		
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	30,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tersedianya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	3,150,000	INSPEKTORAT		
	6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan, asistensi dan Monev	-			54 Laporan	1,285,000,000					Tersedianya Laporan hasil pendampingan dan asistensi	-	1,336,750,000		
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah							
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				36 perangkat daerah	125,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tersedianya Laporan hasil pendampingan dan asistensi		131,250,000	INSPEKTORAT			
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	250,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tersedianya Laporan hasil pendampingan dan asistensi		250,000,000	INSPEKTORAT			
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	750,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tersedianya Laporan hasil pendampingan dan asistensi		787,500,000	INSPEKTORAT			
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				4 perangkat daerah	160,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Tersedianya Laporan hasil pendampingan dan asistensi		168,000,000	INSPEKTORAT			
						KECAMATAN PARIGI						1,990,614,456							2,643,688,444			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1,990,614,456							2,643,688,444			
	7	01				KECAMATAN						1,990,614,456							2,643,688,444			
186	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Bersentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2.Bersentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3.Bersentase peningkatan kompetensi aparatur 4.Bersentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%			100 %	1,888,491,781					100%		2,488,275,082			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.Bersentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2.Bersentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3.Bersentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%			100 %	36,946,400				-	100%		61,585,370			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	31,546,400	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		53,599,370	KECAMATAN PARIGI			
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	900,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,331,000	KECAMATAN PARIGI			
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	900,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,331,000	KECAMATAN PARIGI			
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	900,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,331,000	KECAMATAN PARIGI			
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	900,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,331,000	KECAMATAN PARIGI			
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	900,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,331,000	KECAMATAN PARIGI			
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	900,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,331,000	KECAMATAN PARIGI			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%			100 %	1,393,087,662				-	100%	1,726,228,888	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1,361,583,262	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1,669,967,518	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	29,704,400	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	53,599,370	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	900,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1,331,000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	900,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1,331,000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%			100 %	30,437,992				-	100%	54,930,370	
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	900,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1,331,000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				61 Laporan	29,537,992	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	53,599,370	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%			100 %	55,924,214				-	100%	62,837,520	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				11 Paket	10,616,214	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	11,000,000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	24,210,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	30,506,520	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	1,098,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1,331,000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	20,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	20,000,000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%			100 %	86,051,809				-	100%	96,249,934	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3,688,779	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	4,259,200	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				38 Paket	42,107,360	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	46,585,000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7,207,500	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		7,986,000	KECAMATAN PARIGI				
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3,913,620	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,324,000	KECAMATAN PARIGI				
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	2,989,550	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,327,500	KECAMATAN PARIGI				
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	26,145,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		28,768,234	KECAMATAN PARIGI				
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%		100 %	74,681,086					-	100%	89,630,000					
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	24,755,337	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		25,500,000	KECAMATAN PARIGI				
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	38,845,180	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		48,400,000	KECAMATAN PARIGI				
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	11,080,569	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		15,730,000	KECAMATAN PARIGI				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%		100 %	132,865,348					-	100%	280,350,500					
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	4,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,658,500	KECAMATAN PARIGI				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	28,000,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		39,930,000	KECAMATAN PARIGI				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100,865,348	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		235,762,000	KECAMATAN PARIGI				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%		100 %	78,497,270					-	100%	116,462,500					
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	52,379,840	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		86,515,000	KECAMATAN PARIGI				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	23,100,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		26,620,000	KECAMATAN PARIGI				
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	3,017,430	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,327,500	KECAMATAN PARIGI				
187	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100% 100%			100 %	17,713,500						100% 100%	40,947,362					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100% 100%			100 %	9,423,500			-	100% 100%	27,637,362			
	7	01	02	2.01	0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	9,423,500	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		27,637,362	KECAMATAN PARIGI
	7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100% 100%			100 %	8,290,000			-	100% 100%	13,310,000			
	7	01	02	2.02	0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	8,290,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13,310,000	KECAMATAN PARIGI
188	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100% 100%			100 %	8,290,000				100% 100%	13,310,000			
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100% 100%			100 %	8,290,000			-	100% 100%	13,310,000			
	7	01	03	2.01	0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	8,290,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13,310,000	KECAMATAN PARIGI
189	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100% 100%			100 %	8,290,000				100% 100%	13,310,000			
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum	100%			100 %	8,290,000			-	100%	13,310,000			
	7	01	04	2.01	0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				10 Laporan	8,290,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13,310,000	KECAMATAN PARIGI
190	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100% 100%			100 %	11,028,000				100% 100%	13,310,000			
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100% 100%			100 %	11,028,000			-	100% 100%	13,310,000			
	7	01	05	2.01	0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
						Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				10 Dokumen	11,028,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13,310,000	KECAMATAN PARIGI
191	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100% 100%			100 %	56,801,175				100% 100%	74,536,000			
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa	100% 100%			100 %	56,801,175			-	100% 100%	74,536,000			
	7	01	06	2.01	0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	8,290,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13,310,000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	06	2.01	0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	40,221,175	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		47,916,000	KECAMATAN PARIGI
	7	01	06	2.01	0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	8,290,000	Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13,310,000	KECAMATAN PARIGI	
						KECAMATAN CIJULANG					2,903,622,192							3,173,774,660		
						UNSUR KEWILAYAHAN					2,903,622,192							3,173,774,660		
						KECAMATAN					2,903,622,192							3,173,774,660		
192		7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi			100% 100% 100% 100%	100 % 100% 100% 100%		2,423,776,332				100% 100% 100% 100%	2,705,051,996		
		7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu			100%			100 %	61,894,840		Kantor Kecamatan Cijulang	100%	63,221,475		
		7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	42,145,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang	54,839,200	KECAMATAN CIJULANG
		7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3,950,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang	1,754,500	KECAMATAN CIJULANG	
		7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3,950,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang	1,754,500	KECAMATAN CIJULANG	
		7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3,950,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang	1,754,500	KECAMATAN CIJULANG	
		7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3,950,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang	1,754,500	KECAMATAN CIJULANG	
		7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	3,949,840	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang	1,364,275	KECAMATAN CIJULANG	
		7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik			100%		100 %	1,550,995,853			Kantor Kecamatan Cijulang	100%	1,752,890,676		
		7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	1,484,875,093	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang	1,671,677,887	KECAMATAN CIJULANG	
		7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	42,145,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang	54,839,200	KECAMATAN CIJULANG	
		7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	940,880	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang	1,035,082	KECAMATAN CIJULANG	
		7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	23,034,880	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		25,338,507	KECAMATAN CIJULANG				
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%			100 %	42,145,000				Kantor Kecamatan Cijulang	100%	54,839,200					
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	42,145,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		54,839,200	KECAMATAN CIJULANG			
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	100%			100 %	101,023,174				Kantor Kecamatan Cijulang	100%	108,923,571					
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	10,532,214	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		14,530,391	KECAMATAN CIJULANG			
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					12 Dokumen	28,991,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		31,893,180	KECAMATAN CIJULANG			
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					10 Dokumen	1,499,960	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		2,500,000	KECAMATAN CIJULANG			
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					12 Orang	60,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		60,000,000	KECAMATAN CIJULANG			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	100%			100 %	143,791,917				Kantor Kecamatan Cijulang	100%	150,679,923					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	5,522,852	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		4,187,444	KECAMATAN CIJULANG			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	37,899,803	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		35,199,580	KECAMATAN CIJULANG			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	18,749,896	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		22,500,000	KECAMATAN CIJULANG			
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					48 Dokumen	4,796,848	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		5,760,000	KECAMATAN CIJULANG			
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	14,979,618	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		15,000,000	KECAMATAN CIJULANG			
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					340 Laporan	61,842,900	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kantor Kecamatan Cijulang		68,032,899	KECAMATAN CIJULANG			
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	100%			100 %	130,574,136				-	100%	151,400,000					
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					14 Unit	49,636,438	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60,000,000	KECAMATAN CIJULANG			
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	70,260,304	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		90,000,000	KECAMATAN CIJULANG			
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				17 Unit	10,677,394	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1,400,000	KECAMATAN CIJULANG				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%		100 %	272,155,915					-	100%	299,767,872					
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	2,880,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3,174,600	KECAMATAN CIJULANG				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	56,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66,762,000	KECAMATAN CIJULANG				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	213,275,915	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		229,831,272	KECAMATAN CIJULANG				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%		100 %	121,195,497					-	100%	123,329,279					
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	76,695,497	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		84,366,029	KECAMATAN CIJULANG				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	32,500,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20,963,250	KECAMATAN CIJULANG				
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12,000,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18,000,000	KECAMATAN CIJULANG				
193	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100% 100%		100 %	335,556,000						100% 100%	343,236,789					
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100% 100%		100 %	304,730,000					-	100% 100%	310,829,904					
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	304,730,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-		310,829,904	KECAMATAN CIJULANG				
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100% 100%		100 %	30,826,000					-	100% 100%	32,406,885					
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	30,826,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-		32,406,885	KECAMATAN CIJULANG				
194	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100% 100%		100 %	4,976,000						100% 100%	6,227,500					
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%		100 %	4,976,000					-	100%	6,227,500					
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	4,976,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-		6,227,500	KECAMATAN CIJULANG				
195	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase KoordinasiKetenteraman dan Ketertiban Umum	100% 100%		100 %	6,276,000						100% 100%	6,592,950					
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100%		100 %	6,276,000					-	100%	6,592,950					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				7 Laporan	6,276,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-		6,592,950	KECAMATAN CIJULANG	
196	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100% 100%			100 %	6,702,000						100% 100%	8,088,000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	12Kali 100%			100 %	6,702,000				-		12Kali 100%	8,088,000	
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
						Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					7 Dokumen	6,702,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-		8,088,000	KECAMATAN CIJULANG
197	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100% 100%			100 %	126,335,860						100% 100%	104,577,425	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase perencanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100% 100%			100 %	126,335,860				-		100% 100%	104,577,425	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					4 Dokumen	41,658,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-		32,406,885	KECAMATAN CIJULANG
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif					1 Dokumen	43,349,860	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-		39,763,655	KECAMATAN CIJULANG
	7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					4 Laporan	41,328,000	Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-		32,406,885	KECAMATAN CIJULANG
						KECAMATAN PANGANDARAN						2,910,104,104							3,794,648,027	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2,910,104,104							3,794,648,027	
	7	01				KECAMATAN						2,910,104,104							3,794,648,027	
198	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 100 % 100 %	2,533,266,504						100% 100% 100% 100%	3,304,498,528	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu"	100%			100 %	51,620,698				-		100%	67,132,325	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	44,350,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57,655,000	KECAMATAN PANGANDARAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1,509,790	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1,966,250	KECAMATAN PANGANDARAN
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1,509,790	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1,966,250	KECAMATAN PANGANDARAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1,509,790	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1,966,250	KECAMATAN PANGANDARAN
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,509,790	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1,966,250	KECAMATAN PANGANDARAN
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1,231,538	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1,612,325	KECAMATAN PANGANDARAN
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%	100 %	1,805,513,218				-	100%	2,347,177,586	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1,734,251,470	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2,254,526,911	KECAMATAN PANGANDARAN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	1,734,251,470	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2,254,526,911	KECAMATAN PANGANDARAN
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	44,350,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57,655,000	KECAMATAN PANGANDARAN
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,171,748	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1,533,675	KECAMATAN PANGANDARAN
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	25,740,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		33,462,000	KECAMATAN PANGANDARAN
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	100 %	48,553,900				-	100%	63,129,040	
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	4,203,900	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5,474,040	KECAMATAN PANGANDARAN
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	44,350,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		57,655,000	KECAMATAN PANGANDARAN
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%	100 %	110,796,096				-	100%	147,594,619	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	12,629,768	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16,425,659	KECAMATAN PANGANDARAN
7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	30,125,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39,325,000	KECAMATAN PANGANDARAN
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	3,041,328	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3,963,960	KECAMATAN PANGANDARAN
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	65,000,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		87,880,000	KECAMATAN PANGANDARAN		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%		100 %	104,248,585			-		100%	136,299,478				
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,655,920	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3,549,824	KECAMATAN PANGANDARAN		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23,887,108	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31,062,161	KECAMATAN PANGANDARAN		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	12,195,100	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15,874,493	KECAMATAN PANGANDARAN		
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				264 Dokumen	14,758,536	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19,773,000	KECAMATAN PANGANDARAN		
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material															
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	8,431,921	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10,985,000	KECAMATAN PANGANDARAN		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				326 Laporan	42,320,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55,055,000	KECAMATAN PANGANDARAN		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	100%		100 %	78,315,698			-		100%	102,245,000				
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	24,140,366	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31,460,000	KECAMATAN PANGANDARAN		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	42,183,310	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55,055,000	KECAMATAN PANGANDARAN		
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	11,992,022	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15,730,000	KECAMATAN PANGANDARAN		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%		100 %	266,086,364			-		100%	350,011,480				
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	4,050,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5,272,800	KECAMATAN PANGANDARAN		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	42,163,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55,055,000	KECAMATAN PANGANDARAN		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	219,873,364	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		289,683,680	KECAMATAN PANGANDARAN		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%		100 %	68,131,945			-		100%	90,909,000				
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	52,831,945	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70,785,000	KECAMATAN PANGANDARAN		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	12,000,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		15,730,000	KECAMATAN PANGANDARAN		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3,300,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4,394,000	KECAMATAN PANGANDARAN
199	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100% 100%		100 %	304,572,800						100% 100%	395,977,920	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100% 100%		100 %	279,405,000				-		100% 100%	363,259,520	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	279,405,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-		363,259,520	KECAMATAN PANGANDARAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100% 100%		100 %	25,167,800				-		100% 100%	32,718,400	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	25,167,800	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-		32,718,400	KECAMATAN PANGANDARAN
200	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100% 100%		100 %	3,340,000						100% 100%	4,396,535	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100% 100%		100 %	3,340,000				-		100% 100%	4,396,535	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	3,340,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-		4,396,535	KECAMATAN PANGANDARAN
201	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan keteriban umum	100% 100%		100 %	1,065,000						100% 100%	1,399,970	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum Umum	100% 100%		100 %	1,065,000				-		100% 100%	1,399,970	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				8 Laporan	1,065,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-		1,399,970	KECAMATAN PANGANDARAN
202	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100% 100%		100 %	2,040,000						100% 100%	2,721,290	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100% 100%		100 %	2,040,000				-		100% 100%	2,721,290	
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal													
						Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				8 Dokumen	2,040,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-		2,721,290	KECAMATAN PANGANDARAN
203	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100% 100%		100 %	65,819,800						100% 100%	85,653,784	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Jumlah Desa Wisata yang difasilitasi 2. Jumlah Desa yang dibina	100% 100%		100 %	65,819,800				-		100% 100%	85,653,784	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	14,560,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-		18,960,193	KECAMATAN PANGANDARAN
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	36,959,800	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-		48,048,000	KECAMATAN PANGANDARAN				
	7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	14,300,000	Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-		18,645,591	KECAMATAN PANGANDARAN				
						KECAMATAN MANGUNJAYA					2,084,186,877							2,136,721,079					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					2,084,186,877							2,136,721,079					
	7	01				KECAMATAN					2,084,186,877							2,136,721,079					
204	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi, 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik, 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur, 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%			100 %	2,006,682,619					0%	2,056,707,103					
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2.Persentase Dokumen Penganggaran Kinerja yang disusun Tepat Waktu 3.Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun Tepat Waktu	100Persen			100 Persen	49,401,900				Kantor Kecamatan Mangunjaya	100Persen	50,559,851					
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	40,104,600	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Kantor Kecamatan Mangunjaya		40,706,424	KECAMATAN MANGUNJAYA				
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,060,400	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Kantor Kecamatan Mangunjaya		2,091,356	KECAMATAN MANGUNJAYA				
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,060,400	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Kantor Kecamatan Mangunjaya		2,091,357	KECAMATAN MANGUNJAYA				
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,060,400	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Kantor Kecamatan Mangunjaya		2,507,537	KECAMATAN MANGUNJAYA				
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,060,400	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Kantor Kecamatan Mangunjaya		2,091,357	KECAMATAN MANGUNJAYA				
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1,055,700	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Kantor Kecamatan Mangunjaya		1,071,820	KECAMATAN MANGUNJAYA				
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang Menyusun Laporan Kinerja Keuangan dengan Baik	100Persen			100 Persen	1,376,039,848				-	100Persen	1,396,802,502					
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1,320,909,748	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,340,845,116	KECAMATAN MANGUNJAYA				
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	53,261,400	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		54,060,526	KECAMATAN MANGUNJAYA				
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	968,400	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		982,937	KECAMATAN MANGUNJIAYA				
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	900,300	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		913,923	KECAMATAN MANGUNJIAYA				
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100Persen		100 Persen	33,820,200					-	100Persen	34,359,946					
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	4,697,700	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,768,293	KECAMATAN MANGUNJIAYA				
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	29,122,500	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		29,591,653	KECAMATAN MANGUNJIAYA				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100Persen		100 Persen	93,203,225					-	100Persen	96,555,013					
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	8,234,225	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		9,512,745	KECAMATAN MANGUNJIAYA				
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	25,745,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		26,141,959	KECAMATAN MANGUNJIAYA				
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	3,336,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,387,998	KECAMATAN MANGUNJIAYA				
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	55,888,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		57,512,311	KECAMATAN MANGUNJIAYA				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100Persen		100 Persen	67,415,656					-	100Persen	72,402,593					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3,018,273	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,124,194	KECAMATAN MANGUNJIAYA				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	13,708,189	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13,934,200	KECAMATAN MANGUNJIAYA				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3,090,450	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,137,035	KECAMATAN MANGUNJIAYA				
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,581,088	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,768,293	KECAMATAN MANGUNJIAYA				
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				9 Paket	12,355,656	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		12,548,141	KECAMATAN MANGUNJIAYA				
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	31,662,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		34,890,730	KECAMATAN MANGUNJAYA	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	100Persen			100 Persen	102,830,861					-	100Persen	110,655,440		
	7	01	01	2.07	Pengadaan Mebel															
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	6,712,406	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		6,928,232	KECAMATAN MANGUNJAYA	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	74,092,654	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		80,319,591	KECAMATAN MANGUNJAYA	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	22,025,801	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		23,407,617	KECAMATAN MANGUNJAYA	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100Persen			100 Persen	145,732,644					-	100Persen	147,585,791		
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				110 Laporan	1,110,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,129,333	KECAMATAN MANGUNJAYA	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	28,500,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		28,158,864	KECAMATAN MANGUNJAYA	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	116,122,644	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		118,297,594	KECAMATAN MANGUNJAYA	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100Persen			100 Persen	138,238,285					-	100Persen	147,785,967		
	7	01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	47,762,300	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		48,487,270	KECAMATAN MANGUNJAYA	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	6,000,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		6,274,070	KECAMATAN MANGUNJAYA	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	84,475,985	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		93,024,627	KECAMATAN MANGUNJAYA	
205	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100% 100%			100 %	17,185,000					-	100% 100%	18,721,537		
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100% 100Persen			100 % 100 Persen 100 %	17,185,000					-	0% 100Persen	18,721,537		
	7	01	02	2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10 Laporan	14,725,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		16,214,000	KECAMATAN MANGUNJAYA				
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	2,460,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,507,537	KECAMATAN MANGUNJAYA				
206	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100% 100%			100 %	3,325,000						100% 0%	3,382,770					
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100Persen 100%			100 %	3,325,000					-	100Persen 100%	3,382,770					
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	3,325,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,382,770	KECAMATAN MANGUNJAYA				
207	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100% 100%			0 % 100 %	3,320,000						0% 100%	3,382,770					
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100% 100Persen			100 Persen	3,320,000					-	100% 100Persen	3,382,770					
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5 Laporan	3,320,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,382,770	KECAMATAN MANGUNJAYA				
208	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100% 100%			100 % 100 % 0 %	3,590,000						100% 0%	3,644,189					
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100% 100Persen			100 % 100 Persen 100 %	3,590,000					-	100% 100Persen	3,644,189					
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																	
						Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				10 Dokumen	3,590,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,644,189	KECAMATAN MANGUNJAYA				
209	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100% 100%			100 % 0 % 100 %	50,084,258						100% 0%	50,882,710					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100Persen 100%			100 % 100 % 100 Persen	50,084,258					-	100Persen 100%	50,882,710	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	2,440,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,507,536	KECAMATAN MANGUNJAYA
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	2,460,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,507,537	KECAMATAN MANGUNJAYA
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	40,244,258	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		40,852,563	KECAMATAN MANGUNJAYA
	7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan													
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	4,940,000	Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,015,074	KECAMATAN MANGUNJAYA
						KECAMATAN PADAHERANG					2,895,925,219							3,332,547,752	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					2,895,925,219							3,332,547,752	
	7	01				KECAMATAN					2,895,925,219							3,332,547,752	
210	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Persentase Sarana Prasarana Kantor yang Terpenuhi, 2.Persentase Dokumen Penganggaran Kinerja yang disusun Tepat Waktu, 3.Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun Tepat Waktu, 4.Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Berkualitas	100% 100%			100 %	2,642,742,355						100% 100%	2,946,930,432	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100Persen			100 Persen	42,380,250					-	100Persen	46,618,275	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	36,300,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		39,930,000	KECAMATAN PADAHERANG
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	1,210,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,331,000	KECAMATAN PADAHERANG
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	1,210,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,331,000	KECAMATAN PADAHERANG
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	1,210,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,331,000	KECAMATAN PADAHERANG
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	1,210,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,331,000	KECAMATAN PADAHERANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1,240,250	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,364,275	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100Persen			100 Persen	1,858,224,903					-	100Persen	2,044,047,393					
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1,819,504,903	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,001,455,393	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	36,300,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		39,930,000	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,210,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,331,000	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	1,210,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,331,000	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	61/170Jenis dan Unit/ Buah			61/170 Jenis dan Unit/ Buah	38,720,000					-	61/170Jenis dan Unit/ Buah	42,592,000					
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2,420,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,662,000	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	36,300,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		39,930,000	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100Persen			100 Persen	106,843,425					-	100Persen	135,987,438					
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	10,593,425	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		12,430,708	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	33,150,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		52,694,290	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				25 Dokumen	3,100,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,312,440	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	60,000,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		66,550,000	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100Persen			100 Persen	83,135,668					-	100Persen	96,484,211					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5,853,060	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		6,439,697	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				38 Paket	23,952,450	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		26,353,800	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7,805,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13,432,154	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	6,906,384	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		7,666,560	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	2,418,774	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,662,000	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	36,200,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		39,930,000	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100Persen		100 Persen	153,113,719					-	100Persen	172,318,012					
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	48,051,738	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		55,000,000	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	93,671,030	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		104,008,012	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	11,390,951	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13,310,000	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100Persen		100 Persen	217,560,000					-	100Persen	251,739,048					
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	2,300,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,635,380	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	35,500,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		39,930,000	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	179,760,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		209,173,668	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100Persen		100 Persen	142,764,390					-	100Persen	157,144,055					
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	56,104,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		61,717,405	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	65,996,300	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		72,600,000	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional			Daerah						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	16,500,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		18,168,150	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	4,164,090	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,658,500	KECAMATAN PADAHERANG				
211	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%			100 %	140,410,000						100%	254,433,960					
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100Persen			100 Persen	116,750,000					-	100Persen	228,399,600					
	7	01	02	2.01	0001	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				11 Laporan	116,750,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		228,399,600	KECAMATAN PADAHERANG				
	7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100Persen			100 Persen	23,660,000					-	100Persen	26,034,360					
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				14 Laporan	23,660,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		26,034,360	KECAMATAN PADAHERANG				
212	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%			100 Persen	12,100,000						100%	13,310,000					
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			100 Persen	12,100,000					-	-	13,310,000					
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				14 Lembaga Kemasyarakatan	12,100,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13,310,000	KECAMATAN PADAHERANG				
213	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100%			100 Persen 100 %	8,470,000						100%	9,317,000					
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum Umum	-			100 %	8,470,000					-	-	9,317,000					
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				14 Laporan	8,470,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		9,317,000	KECAMATAN PADAHERANG				
214	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%			100 %	2,420,000						100%	2,662,000					
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	12Kali			12 Kali	2,420,000					-	12Kali	2,662,000					
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																	
						Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				10 Dokumen	2,420,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,662,000	KECAMATAN PADAHERANG				
215	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%			100 %	89,782,864						100%	105,894,360					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawai Pemerintah Desa	100Persen			100 Persen	89,782,864					-	100Persen	105,894,360		
	7	01	06	2.01	0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				14 Dokumen	9,450,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		11,979,000	KECAMATAN PADAHERANG	
	7	01	06	2.01	0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif															
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	63,582,864	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		69,957,360	KECAMATAN PADAHERANG	
	7	01	06	2.01	0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				14 Laporan	16,750,000	Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		23,958,000	KECAMATAN PADAHERANG	
					KECAMATAN CIGUGUR							1,791,055,035							1,715,492,261	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN							1,791,055,035							1,715,492,261	
	7	01			KECAMATAN							1,791,055,035							1,715,492,261	
216	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100% 100% 100% 100%			100 % 100 % 100 % 100 %	1,664,320,985						100% 100% 100% 100%	1,547,919,361		
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2.Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3.Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu Persentase perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100% 100% 100%			100 % 0 % 0 % 100 %	37,921,360					-	100% 0% 0%	44,366,500		
	7	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	35,038,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		41,538,000	KECAMATAN CIGUGUR	
	7	01	01	2.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	352,840	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		374,000	KECAMATAN CIGUGUR	
	7	01	01	2.01	0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	352,840	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		374,000	KECAMATAN CIGUGUR	
	7	01	01	2.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	352,840	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		374,000	KECAMATAN CIGUGUR	
	7	01	01	2.01	0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	352,840	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		374,000	KECAMATAN CIGUGUR	
	7	01	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1,472,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,332,500	KECAMATAN CIGUGUR	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%			100 %	1,324,991,836				-	100%	1,219,602,776		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1,291,969,012	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,180,018,676	KECAMATAN CIGUGUR
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	30,686,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		37,460,100	KECAMATAN CIGUGUR
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	352,840	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		374,000	KECAMATAN CIGUGUR
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	1,983,584	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,750,000	KECAMATAN CIGUGUR
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	73Jenis			100 % 73 Jenis	29,024,480				-	73Jenis	29,553,000		
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	346,880	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		374,000	KECAMATAN CIGUGUR
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				61 Laporan	28,677,600	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		29,179,000	KECAMATAN CIGUGUR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%			100 % 100 %	33,753,000				-	100%	34,420,000		
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket		Kab. Pangandaran, 0 Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,000,000	KECAMATAN CIGUGUR
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	22,185,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		22,920,000	KECAMATAN CIGUGUR
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	1,568,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,500,000	KECAMATAN CIGUGUR
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	10,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,000,000	KECAMATAN CIGUGUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang baik Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%			100 % 100 %	69,968,253				-	100%	47,400,000		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2,265,145	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,400,000	KECAMATAN CIGUGUR				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	31,998,180	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		0	KECAMATAN CIGUGUR				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3,528,960	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,000,000	KECAMATAN CIGUGUR				
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	4,220,568	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,500,000	KECAMATAN CIGUGUR				
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		10,000,000	KECAMATAN CIGUGUR				
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95 Laporan	27,955,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		27,500,000	KECAMATAN CIGUGUR				
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%		100 % 0 %	0					-	100%	30,000,000					
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		25,000,000	KECAMATAN CIGUGUR				
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		0	KECAMATAN CIGUGUR				
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,000,000	KECAMATAN CIGUGUR				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan			100 %	109,096,976					-	100%	131,211,453					
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				170 Laporan	1,440,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,400,000	KECAMATAN CIGUGUR				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	28,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		23,430,000	KECAMATAN CIGUGUR				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	79,156,976	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		105,381,453	KECAMATAN CIGUGUR				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%		100 %	59,565,080					-	100%	11,365,632					
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	54,565,080	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,865,632	KECAMATAN CIGUGUR				
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		0	KECAMATAN CIGUGUR				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	5,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,500,000	KECAMATAN CIGUGUR				
217	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100persen 100%		100 % 100 persen	17,037,680						100persen 100%	66,550,000					
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelelnggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12Bulan 100persen		12 Bulan 100 persen	17,037,680					-	12Bulan 100persen	66,550,000					
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	17,037,680	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		66,550,000	KECAMATAN CIGUGUR				
218	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100% 100persen		100 % 100 persen	16,228,000						100% 100persen	4,658,500					
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100persen 7Desa		100 persen 7 Desa	16,228,000					-	100persen 7Desa	4,658,500					
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	4,130,600	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,658,500	KECAMATAN CIGUGUR				
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	12,097,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		0	KECAMATAN CIGUGUR				
219	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100persen 100%		100 % 100 persen	4,315,000						100persen 100%	4,658,500					
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Upaya Yang Dilaksanakan dalam Penyelenggaraan tranitibum Umum	100persen 7Desa		7 Desa	4,315,000					-	100persen 7Desa	4,658,500					
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				7 Laporan	4,315,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,658,500	KECAMATAN CIGUGUR				
220	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100% 100persen		100 % 100 persen	3,470,200						100% 100persen	3,859,900					
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100% 100persen		100 % 100 persen	3,470,200					-	100% 100persen	3,859,900					
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				7 Dokumen	3,470,200	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,859,900	KECAMATAN CIGUGUR			
221	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100persen 100%			100 % 100 persen	85,683,170						100persen 100%	87,846,000				
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa	100persen 12Bulan			12 Bulan 100 persen	85,683,170					-	100persen 128Bulan	87,846,000				
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	27,166,620	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		17,303,000	KECAMATAN CIGUGUR			
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	43,047,590	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		53,240,000	KECAMATAN CIGUGUR			
	7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	15,468,960	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		17,303,000	KECAMATAN CIGUGUR			
						KECAMATAN SIDAMULIH						2,167,094,524							3,471,951,750			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2,167,094,524							3,471,951,750			
	7	01				KECAMATAN						2,167,094,524							3,471,951,750			
222	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi; 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik; 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur; 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%			100 %	2,095,924,886						100%	3,138,002,519				
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun tepat waktu; 2. Persentase Dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu; 3. Persentase Dokumen Evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%			100 %	81,356,100					-	100%	90,086,872				
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	70,976,700	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		78,074,597	KECAMATAN SIDAMULIH			
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,419,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,662,000	KECAMATAN SIDAMULIH			
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,239,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,662,000	KECAMATAN SIDAMULIH			
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2,239,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,662,000	KECAMATAN SIDAMULIH			
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2,239,800	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,662,000	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1,240,200	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,364,275	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%		100 %	1,439,783,668					-	100%	2,354,278,636					
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1,376,468,168	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,274,438,468	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	61,120,700	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		77,425,734	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,137,300	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,251,140	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1,057,500	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,163,294	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100%		100 %	37,627,600					-	100%	59,668,730					
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	5,517,600	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		6,069,360	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	32,110,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		53,599,370	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	100%		100 %	109,085,040					-	100%	122,900,813					
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	11,947,840	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		12,108,373	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	26,960,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		33,275,000	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	3,920,200	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,312,440	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	66,257,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		73,205,000	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	100%		100 %	91,616,937					-	100%	100,941,665					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	974,957	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,072,790	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	27,476,068	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		30,223,834	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,825,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		6,408,166	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4,220,568	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,775,628	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	14,510,344	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		15,972,000	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	38,610,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		42,489,247	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%		100 %	136,137,255					-	100%	145,911,655					
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	8,016,944	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		8,818,655	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	112,659,816	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		123,783,000	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15,460,495	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13,310,000	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%		100 %	104,572,146					-	100%	187,855,743					
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	1,300,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,437,480	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	36,600,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		35,842,233	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	66,672,146	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		150,576,030	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%		100 %	95,746,140					-	100%	76,358,405					
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	56,096,140	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		61,717,405	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	7,250,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		7,986,000	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	4,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,658,500	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	27,900,000	Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,996,500	KECAMATAN SIDAMULIH				
223						Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100Persen 100%			100 Persen 100 % 100 Persen 100 %	23,110,000						100Persen 100%	246,288,240					
						Persentase Koodinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koodinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100% 100Persen			100 % 100 Persen 100 5 100 Persen	23,110,000					-	100% 100Persen	246,288,240					
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	18,730,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		228,399,600	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	4,380,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		17,888,640	KECAMATAN SIDAMULIH				
224						Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100% 100Persen			100 % 100 Persen	3,914,100						100% 100Persen	4,305,785					
						Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100Persen 100%			100 % 100 Persen	3,914,100					-	100Persen 100%	4,305,785					
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	3,914,100	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,305,785	KECAMATAN SIDAMULIH				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
225	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100% 100Persen			100 % 100 Persen	3,910,000						100% 100Persen	4,305,785					
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan tranitibum Umum	100Persen 12Kali			12 Kali	3,910,000					-	100Persen 12Kali	4,305,785					
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	3,910,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,305,785	KECAMATAN SIDAMULIH				
226	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100% 100Persen			100 % 100 Persen	4,200,000						100% 100Persen	4,638,535					
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100Persen 12Kali			12 Kali 100 Persen	4,200,000					-	100Persen 12Kali	4,638,535					
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																	
						Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				10 Dokumen	4,200,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,638,535	KECAMATAN SIDAMULIH				
227	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100Persen 100%			100 % 100 Persen	36,035,538						100Persen 100%	74,410,886					
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100Persen 100%			100 Persen 100 %	36,035,538					-	100Persen 100%	74,410,886					
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	2,901,400	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,191,738	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																	
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				7 Dokumen	26,009,138	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		53,330,508	KECAMATAN SIDAMULIH				
	7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	7,125,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		17,888,640	KECAMATAN SIDAMULIH				
					KECAMATAN LANGKAPLANCAR														3,053,916,208				
	7				UNSUR KEWILAYAHAN														3,053,916,208				
	7	01			KECAMATAN														3,050,721,808				
228	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	-			100 % 100 % 100 % 100 %	2,651,129,378						-	2,872,208,011					
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan kinerja, Persentase dokumen penganggaran kinerja, dan persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	-			100 %	41,697,728					-	-	46,917,750					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			14 Dokumen	31,810,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	35,138,400	KECAMATAN LANGKAPLANCAR			
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1,480,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1,663,750	KECAMATAN LANGKAPLANCAR			
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1,510,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1,663,750	KECAMATAN LANGKAPLANCAR			
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1,512,254	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1,663,750	KECAMATAN LANGKAPLANCAR			
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1,512,354	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1,663,750	KECAMATAN LANGKAPLANCAR			
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	3,873,120	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	5,124,350	KECAMATAN LANGKAPLANCAR			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	-	100 %	2,063,726,545					-	2,292,967,487				
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 Orang/bulan	2,022,321,897	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	2,224,554,087	KECAMATAN LANGKAPLANCAR			
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	31,810,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	36,469,400	KECAMATAN LANGKAPLANCAR			
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12 Laporan	9,594,648	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	31,944,000	KECAMATAN LANGKAPLANCAR			
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	-	100 %	34,229,835					-	39,131,400				
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	2,419,835	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	2,662,000	KECAMATAN LANGKAPLANCAR			
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	31,810,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	36,469,400	KECAMATAN LANGKAPLANCAR			
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	-	100 %	73,142,770					-	86,940,920				
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	8,182,770	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	9,317,000	KECAMATAN LANGKAPLANCAR			
7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	26,600,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		31,038,920	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	38,360,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		46,585,000	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	-			100 %	34,330,050					-	-	38,732,100	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	17,305,050	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		24,224,200	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	14,025,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		11,180,400	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	3,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,327,500	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi	-			100 %	129,812,742					-	-	83,853,000	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	26,208,022	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		27,285,500	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	93,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		39,930,000	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10,104,720	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		16,637,500	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	-			100 %	157,268,305					-	-	167,643,684	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	1,810,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,996,500	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	28,600,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		23,878,140	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	126,858,305	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		141,769,044	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Prasarana yang Baik dan Layak Fungsi	-			100 %	116,921,403					-	-	116,021,670	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	56,202,468	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		49,712,850	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	60,718,935	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		66,308,820	KECAMATAN LANGKAPLANCAR

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
229	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%			100 %	2,500,000						100%	15,972,000	
	7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	-			100 %	2,500,000					-	-	15,972,000	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	2,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		15,972,000	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
230	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%			100 %	5,550,000						100%	5,318,822	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			100 %	5,550,000					-	-	5,318,822	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga Kemasyarakatan	5,550,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,318,822	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
231	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100%			100 %	3,605,000						100%	3,993,000	
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Upaya yang dilaksanakan dalam Penyelenggaraan tranitibum	-			100 %	3,605,000					-	-	3,993,000	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				15 Laporan	3,605,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,993,000	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
232	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%			100 %	4,521,325						100%	4,991,250	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	-			100 %	4,521,325					-	-	4,991,250	
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal													
						Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				15 Dokumen	4,521,325	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,991,250	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
233	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%			100 %	107,895,774						100%	148,238,725	
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	-			100 %	107,895,774					-	-	148,238,725	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				15 Dokumen	10,603,185	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		11,027,225	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				15 Dokumen	17,961,835	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		19,165,000	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				15 Dokumen	15,100,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		16,500,000	KECAMATAN LANGKAPLANCAR
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional	Daerah									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				15 Dokumen	15,100,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		16,500,000	KECAMATAN LANGKAPLANCAR					
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
						Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	26,130,754	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		41,926,500	KECAMATAN LANGKAPLANCAR					
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				15 Laporan	16,650,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		16,500,000	KECAMATAN LANGKAPLANCAR					
	7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				15 Laporan	6,350,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		26,620,000	KECAMATAN LANGKAPLANCAR					
	7	-	-	-	-	-																	3,194,400	
234	7	-	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	-			100 %	1,816,385						-	3,194,400						
						2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik				100 %														
						3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %														
						4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas				100 %														
	7	-	-	-	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	-		100 %	1,816,385					-	-	3,194,400						
	7	-	-	-	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	1,816,385	Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,194,400	KECAMATAN LANGKAPLANCAR					
						KECAMATAN KALIPUCANG																3,528,415,624		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																3,528,415,624		
	7	01				KECAMATAN																3,528,415,624		
											1,876,870,722													
											1,876,870,722													
											1,876,870,722													
235	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%			100 %	1,717,301,722						100% 100% 100% 100%	3,046,675,012						
						3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur				100 %														
						1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%			100 %														
						2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%			100 %														
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu, 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu, 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100Persen		100 Persen	26,800,000					-	100Persen	76,793,376						
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	22,100,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		67,709,301	KECAMATAN KALIPUCANG					
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	700,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,929,950	KECAMATAN KALIPUCANG					
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	700,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,929,950	KECAMATAN KALIPUCANG					
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	900,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,929,950	KECAMATAN KALIPUCANG				
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	900,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,929,950	KECAMATAN KALIPUCANG				
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1,500,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,364,275	KECAMATAN KALIPUCANG				
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100Persen		100 Persen	1,253,294,143					-	100Persen	2,156,799,897					
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1,229,354,143	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,055,349,746	KECAMATAN KALIPUCANG				
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	22,100,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		67,709,301	KECAMATAN KALIPUCANG				
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	730,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,297,725	KECAMATAN KALIPUCANG				
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	1,110,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		32,443,125	KECAMATAN KALIPUCANG				
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100Persen		100 Persen	23,780,000					-	100Persen	72,341,181					
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	1,680,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,631,880	KECAMATAN KALIPUCANG				
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	22,100,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		67,709,301	KECAMATAN KALIPUCANG				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100Persen		100 Persen	56,190,000					-	100Persen	130,116,231					
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	7,590,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13,898,635	KECAMATAN KALIPUCANG				
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	22,100,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		39,658,476	KECAMATAN KALIPUCANG				
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	1,500,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,354,120	KECAMATAN KALIPUCANG				
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	25,000,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		73,205,000	KECAMATAN KALIPUCANG				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik	100Persen			100 Persen	75,931,873			-		100Persen	127,655,982		
	7	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4,498,633	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	3,003,697	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	20,999,591	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	26,283,367	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	7,500,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	13,432,218	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4,433,728	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	7,986,000	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan/Material														
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	2,499,921	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	2,662,000	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				326 Laporan	36,000,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	74,288,700	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100Persen			100 Persen	85,536,103			-		100Persen	93,835,500		
	7	01	01	2.07	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	30,854,911	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	33,940,500	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	38,963,092	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	42,592,000	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	15,718,100	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	17,303,000	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100Persen			100 Persen	146,273,435			-		100Persen	291,632,748		
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				360 Laporan	2,500,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	2,156,220	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	28,500,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	69,637,920	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	115,273,435	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	219,838,608	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100Persen			100 Persen	49,496,168			-		100Persen	97,500,097		
	7	01	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paikaknya				5 Unit	41,499,293	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	77,335,447	KECAMATAN KALIPUCANG	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	3,000,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	18,168,150	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4,996,875	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1,996,500	KECAMATAN KALIPUCANG	
236	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100% 100%			100 %	36,900,000					100% 100%	278,385,360		
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 %	14,400,000					-	253,635,360		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	7,200,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	227,601,000	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	7,200,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	26,034,360	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%			100 %	22,500,000					-	100%	24,750,000	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	22,500,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	24,750,000	KECAMATAN KALIPUCANG	
237	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100% 100%			100 %	30,620,000					100% 100%	32,556,189		
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100% 100%			100 %	5,420,000					-	100% 100%	4,836,189	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga Kemasyarakatan	5,420,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	4,836,189	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	03	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%			100 % 100 %	25,200,000					-	100%	27,720,000	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat													
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				90 Keluarga	6,300,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	-	-	6,930,000	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga													
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				90 Keluarga	6,300,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	6,930,000	KECAMATAN KALIPUCANG	
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah													
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				90 Keluarga	6,300,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	6,930,000	KECAMATAN KALIPUCANG	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					90 Keluarga	6,300,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		6,930,000	KECAMATAN KALIPUCANG		
238	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100% 100Persen			100 %	14,279,000					100% 100Persen	16,155,260				
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100% 100%			100 %	14,279,000				-	100% 100%	16,155,260				
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					3 Laporan	10,499,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		11,550,000	KECAMATAN KALIPUCANG		
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat															
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					9 Laporan	3,780,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,605,260	KECAMATAN KALIPUCANG		
239	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100% 100%			100 %	3,780,000					100% 100%	13,549,580				
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100Persen 100%			100 %	3,780,000				-	100Persen 100%	13,549,580				
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal															
					Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					9 Dokumen	3,780,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13,549,580	KECAMATAN KALIPUCANG		
240	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100% 100%			100 %	73,990,000					100% 100%	141,094,223				
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Perencanaan pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100Persen 100%			100 %	73,990,000				-	100Persen 100%	141,094,223				
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa															
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					72 Dokumen	8,280,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		9,108,000	KECAMATAN KALIPUCANG		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa															
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					9 Dokumen	7,560,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		26,034,360	KECAMATAN KALIPUCANG		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa															
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					72 Dokumen	8,280,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		9,108,000	KECAMATAN KALIPUCANG		
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa															
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa					45 Dokumen	5,175,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,692,500	KECAMATAN KALIPUCANG		
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa															
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa					27 Dokumen	3,105,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,415,500	KECAMATAN KALIPUCANG		
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa															
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					27 Dokumen	3,105,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,415,500	KECAMATAN KALIPUCANG		
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional	Daerah									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				9 Dokumen	3,780,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,158,000	KECAMATAN KALIPUCANG					
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				45 Dokumen	5,175,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,692,500	KECAMATAN KALIPUCANG					
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				11 Dokumen	25,750,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		48,435,502	KECAMATAN KALIPUCANG					
	7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	3,780,000	Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		26,034,361	KECAMATAN KALIPUCANG					
						KECAMATAN CIMERAK						2,559,511,365							2,909,617,363					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2,559,511,365							2,909,617,363					
	7	01				KECAMATAN						2,559,511,365							2,909,617,363					
241		7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas 1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100% 100% 100% 100%		100 % 100 % 100 % 100 %	2,405,569,933						100% 100% 100% 100%	2,459,898,265						
		7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2.Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%		100 %	34,340,000					-	100%	57,481,770						
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	31,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		53,366,445	KECAMATAN CIMERAK					
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	420,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		465,850	KECAMATAN CIMERAK					
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	420,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		465,850	KECAMATAN CIMERAK					
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	420,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		465,850	KECAMATAN CIMERAK					
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	420,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		465,850	KECAMATAN CIMERAK					
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	1,660,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,251,925	KECAMATAN CIMERAK					
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%		100 %	1,522,691,908					-	100%	1,711,919,669						
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional	Daerah									
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
				2			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	1,481,911,908	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,630,103,099	KECAMATAN CIMERAK				
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	31,000,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		53,366,445	KECAMATAN CIMERAK				
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	540,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		998,250	KECAMATAN CIMERAK				
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	9,240,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		27,451,875	KECAMATAN CIMERAK				
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	12Laporan			12 Laporan	31,812,500				-		12Laporan	54,260,877					
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	812,500	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		894,432	KECAMATAN CIMERAK				
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				61 Laporan	31,000,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		53,366,445	KECAMATAN CIMERAK				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	100%			100 %	38,345,011				-		100%	45,017,082					
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	7,910,011	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		8,984,250	KECAMATAN CIMERAK				
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				24 Dokumen	27,400,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		32,678,712	KECAMATAN CIMERAK				
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	3,035,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3,354,120	KECAMATAN CIMERAK				
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0	KECAMATAN CIMERAK				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%			100 %	296,913,965				-		100%	260,290,924					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5,388,424	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,962,113	KECAMATAN CIMERAK				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	21,774,510	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23,958,000	KECAMATAN CIMERAK				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	11,337,700	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12,611,225	KECAMATAN CIMERAK				
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	9,600,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10,860,960	KECAMATAN CIMERAK				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	68,048,331	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	2,662,000	KECAMATAN CIMERAK		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				326 Laporan	180,765,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	204,236,626	KECAMATAN CIMERAK		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	100%		100 %	83,811,783					-	100%	47,000,000		
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	48,525,874	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	47,000,000	KECAMATAN CIMERAK		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	28,795,187	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	0	KECAMATAN CIMERAK		
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6,490,722	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	0	KECAMATAN CIMERAK		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%		100 %	163,168,343					-	100%	157,609,034		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				240 Laporan	2,800,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	3,087,920	KECAMATAN CIMERAK		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	51,080,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	56,221,440	KECAMATAN CIMERAK		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	109,288,343	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	98,299,674	KECAMATAN CIMERAK		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%		100 %	234,486,423					-	100%	126,318,909		
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	70,086,423	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	77,335,447	KECAMATAN CIMERAK		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	16,500,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	18,168,150	KECAMATAN CIMERAK		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	147,900,000	Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	30,815,312	KECAMATAN CIMERAK		
242	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100% 100%		100 %	10,559,545						100% 100%	307,461,000		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100% 100%		100 %	10,559,545					-	100% 100%	307,461,000		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	10,559,545	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	307,461,000	KECAMATAN CIMERAK		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
243	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100% 100%			100 %	33,270,000					100% 100%	31,843,510		
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100% 100%			100 &	33,270,000			-		100% 100%	31,843,510		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				11 Lembaga Kemasyarakatan	4,320,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,836,189	KECAMATAN CIMERAK
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	28,950,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		27,007,321	KECAMATAN CIMERAK
244	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	100% 100%			100 %	9,300,000					100% 100%	10,236,721		
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase upaya yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan trantibum	100% 100%			100 %	9,300,000			-		100% 100%	10,236,721		
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				11 Laporan	9,300,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		10,236,721	KECAMATAN CIMERAK
245	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%			100 %	1,796,450					100%	1,996,500		
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%			100 %	1,796,450			-		100%	1,996,500		
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal													
						Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 Dokumen	1,796,450	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,996,500	KECAMATAN CIMERAK
246	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100% 100%			100 %	99,015,437					100% 100%	98,181,367		
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perencanaan Pembinaan dan Pegawasan Pemerintah Desa	100% 100%			100 %	99,015,437			-		100% 100%	98,181,367		
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	38,239,545	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		29,003,821	KECAMATAN CIMERAK
	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	38,810,742	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		42,174,225	KECAMATAN CIMERAK
	7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan													
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	21,965,150	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		27,003,321	KECAMATAN CIMERAK
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						59,183,344,469							18,487,636,571	
	8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						59,183,344,469							18,487,636,571	
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						59,183,344,469							18,487,636,571	
247	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%			100 %	8,330,346,797					100%	8,999,052,627		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	100%			100 %	100,998,984			-	100%	111,100,000				
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	45,999,854	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	50,600,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	6,050,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	6,050,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	6,050,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	6,050,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	32,999,130	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	36,300,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100%			100 %	4,797,241,357			-	100%	5,109,246,930			
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	4,674,041,679	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	4,971,536,930	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	22,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	24,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	43,999,960	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	48,400,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	5,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	6,050,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	43,999,955	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	50,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1,100,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	1,800,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
													Nasional					Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	3,299,763	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	3,630,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	3,300,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	3,630,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	138Jenis		138 Jenis	171,998,560				-	138Jenis	193,000,000			
8	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	22,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	24,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	22,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	24,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	22,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	24,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	22,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	24,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	22,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	24,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	41,998,560	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	50,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	22,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100%		100 %	219,447,000				-	100%	245,746,250			
8	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				6 Unit	31,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	34,100,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	10,540,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	11,646,250	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	22,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	24,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	34,907,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-	40,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	22,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		24,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																	
						Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				1 Orang	22,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		24,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																	
						Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	22,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		24,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN																	
						Jumlah ASN yang dipindahtugaskan				1 Orang	22,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		24,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	33,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		39,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%		100 %	1,191,552,507					-	100%	1,341,360,000					
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				59 Paket	29,493,036	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		32,450,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	753,567,432	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		831,050,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	39,961,119	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		44,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	29,683,420	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		32,670,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	23,895,984	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		26,400,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	19,854,284	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		22,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	24,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		26,400,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	217,099,232	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		266,990,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	26,999,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		29,700,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				29 Dokumen	26,999,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		29,700,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	8	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%			100 %	1,324,125,028			-	100%	1,475,100,000			
8 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	788,558,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		869,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	70,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		85,800,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel																			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	57,553,200	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		64,900,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	25,950,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		28,600,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10,658,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		12,100,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.07 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud																			
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	20,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		24,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		330,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	26,405,828	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30,250,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30,250,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%			100 %	221,299,671			-	100%	243,989,447			
8 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4,880,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5,377,900	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	87,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		96,248,547	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	129,419,671	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		142,363,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100%			100 %	303,683,690			-	100%	279,510,000			
8 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	237,737,922	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		226,380,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional					Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	24,216,418	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		22,110,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	3,300,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		3,300,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	17,250,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																	
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3,750,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,400,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	4,500,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,950,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5,490,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		5,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4,974,350	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		4,950,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1,200,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,100,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																	
						Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	1,265,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,320,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
248	8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan	77%			73 %	1,640,818,841						77%	1,849,320,812					
	8	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-			1 Laporan	1,640,818,841					-	-	1,849,320,812					
	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				4 Dokumen	313,282,634	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		338,015,073	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
						Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	30,249,842	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		33,275,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	0	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
														Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					35 Orang	170,986,945	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		127,585,739	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					1 Laporan	36,299,804	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		41,745,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					30 Keluarga	34,999,750	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		38,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka																	
						Jumlah Paskibraka					80 Orang	924,999,866	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		1,010,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila																	
						Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila					1 Dokumen	30,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		40,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																	
						Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila					40 Orang	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		120,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
249	8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri	70%			66 %	44,148,920,000							70%	3,201,920,000				
	8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis, Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Pemantapan Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Pemantapan Pelaksanaan Pemantauan Situasi Politik	1Laporan			1 Laporan	44,148,920,000						-	1Laporan	3,201,920,000				
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun					1 Dokumen	200,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		150,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)					
											Nasional	Daerah								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	108,920,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		64,920,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				8 Orang	43,525,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		2,675,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				500 Orang	300,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		300,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	15,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		12,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
250	8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Masyarakat yang memahami tentang pemberdayaan dan pengawasan ormas	70%		66 %	1,384,999,710					70%	1,597,000,000				
	8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1Laporan		1 Laporan	1,384,999,710				-	1Laporan	1,597,000,000				
	8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
				Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
				Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	249,999,950	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							100 Orang	735,000,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		900,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah												
							500 Orang	299,999,760	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		347,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah												
							0 Laporan		Kab. Pangandaran, 0 Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
251	8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	87%			81 %	467,064,589			87%	435,596,095		
	8	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis yang Tersusun	1Laporan			1 Laporan	467,064,589			-	1Laporan	435,596,095	
8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
							1 Dokumen	52,659,104	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		60,558,080	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
							1 Dokumen	28,326,068	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		32,575,015	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
							29 Orang	293,979,770	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		240,548,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
							100 Orang	79,999,845	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		88,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	12,099,802	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		13,915,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
252	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelaksanaan koordinasi kewaspadaan daerah	90%			80 %	3,211,194,532					90%	2,404,747,037		
	8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1Laporan			1 Laporan	3,211,194,532				-	1Laporan	2,404,747,037		
	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
						Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	120,999,740	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		133,100,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
						Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	110,996,746	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		182,247,475	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
						Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				49 Orang	801,099,872	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		677,731,020	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				82 Orang	708,899,174	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		494,760,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	9,999,000	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	-		11,946,542	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No		Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Akhir Periode Renstra OPD		Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
														Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Sumber Dana		Prioritas				Target		Pagu Indikatif (Rp)					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
		8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																										
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota								12 Dokumen		1,459,200,000		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan		Reformasi Birokrasi, Inovasi Daerah, dan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu		-		904,962,000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		J U M L A H												4,504,136,075,835																			



Pemerintah
Kabupaten Pangandaran